



**PEMERINTAH  
KABUPATEN DONGGALA**

# **RPJMD**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2019-2024**



**Dr. Drs. KASMAN LASSA, SH., MH**  
Bupati Donggala

**MOH. YASIN, S.Sos., M.AP**  
Wakil Bupati Donggala

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2022**





BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2023, terdapat kekeliruan dalam penetapan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2019-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan Masyarakat.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan di semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2024.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.



10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.
15. Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk Mewujudkan Visi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

24. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
25. Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan desentralisasi dan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang layak, terdiri dari :
  - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu Asas yang menjaga landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Pemerintahan;
  - c. Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
  - d. Asas Keterbukaan, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
  - e. Asas Proporsionalitas, yaitu Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik;
  - f. Asas Akuntabilitas, yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Rakyat.



- (4) Asas Khusus Kawasan adalah asas yang meletakkan kawasan pada fungsi Peruntukannya RPJMD bertujuan untuk :
- a. Memudahkan koordinasi Antara pelaku pembangunan.
  - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah;
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
  - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) Tahun.
- (2) Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk RKPD atau Kebijakan Umum APBD.

##### Pasal 5

Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, serta hasil evaluasi indikator kinerja daerah sampai tahun 2020.
  - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH  
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
  - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta prioritas pembangunan daerah.
  - f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
memuat strategi DAN arah kebijakan pembangunan.
  - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah kabupaten donggala periode rpjmd revisi tahun 2022-2023, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan kabupaten donggala periode rpjmd tahun 2022-2023.
  - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA MENURUT BIDANG URUSAN TAHUN 2019-2023  
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - i. BAB IX : PENUTUP  
memuat pedoman transisi dan pedoman pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.
- (2) Sitematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Menyelenggarakan Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 07,01/2022



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

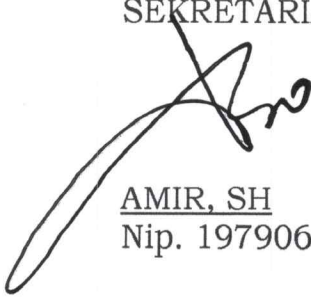
RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 07,01/2022

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Sudah selayaknya sebagai hamba Allah mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmad dan bimbinganNYA, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah menyelesaikan dokumen Revisi atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor ... tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala tahun 2019-2024.

Secara substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019 – 2024 tidak mengubah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2019 – 2024, melainkan penyesuaian Program dan kegiatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Disamping itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2023 dan tahun 2024. Dalam RPJMD sebelum perubahan pagu anggaran tahun 2024 belum tercantum, dan setelah perubahan pagu anggaran tahun 2024 telah termuat.

Merujuk pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan pasal 342 tersebut, Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala dilakukan karena telah terjadi bencana alam yaitu Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi tanggal 28 September 2018, pandemi Covid-19 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Di samping itu, perubahan RPJMD Kabupaten Donggala dilakukan untuk menyesuaikan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 ini menjadi pedoman semua pihak terutama masyarakat Donggala dan stake holder lainnya dalam mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Khusus bagi Perangkat Daerah agar segera melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) supaya program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam Perubahan RPJMD.

Izinkan Kami Bupati Donggala selaku penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Donggala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Wakil Bupati Donggala yang telah memberikan masukan secara pro aktif kepada Tim Penyusun sehingga penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 dapat diselesaikan sesuai durasi waktu.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala selaku penanggungjawab penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 sehingga substansi perubahan dalam RPJMD sesuai standar teknis.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Donggala beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengumpulkan bahan/data, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan stake holder lainnya sehingga penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya kami berpesan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf untuk bekerja keras dan penuh keiklasan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan secara rinci dalam Perubahan RPJMD ini dapat diimplementasikan, dan pada akhirnya Kesejahteraan Masyarakat dapat dicapai, SDM yang unggul dan Kompetitif, serta Masyarakat Donggala yang berkarakter berdasarkan kearifan lokal terlihat dalam kehidupan keseharian dapat diwujudkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Donggala, Januari 2022

Bupati Donggala

Dr. Drs. Kasman Lassa, S.H.M.H.





|           |                                                 |        |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 2.1.2.1.  | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....       | II-87  |
| 2.1.3.    | Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....          | II-90  |
| 2.1.3.1.  | Komposisi Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin..... | II-92  |
| 2.2.      | Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....             | II-97  |
| 2.2.1.    | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... | II-97  |
| 2.2.1.1.  | Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)..                    | II-97  |
| 2.2.1.2.  | Laju Inflasi.....                               | II-106 |
| 2.2.1.3.  | PDRB Per Kapita.....                            | II-107 |
| 2.2.1.4.  | Indeks Gini.....                                | II-109 |
| 2.2.1.5.  | Tingkat Kemiskinan.....                         | II-110 |
| 2.2.1.6.  | Indeks Pembangunan Manusia..                    | II-121 |
| 2.2.2.    | Fokus Kesejahteraan Sosial.....                 | II-124 |
| 2.2.2.1.  | Angka Melek Huruf.....                          | II-124 |
| 2.2.2.2.  | Angka Rata-Rata Lama Sekolah.                   | II-126 |
| 2.2.2.3.  | Harapan Lama Sekolah.....                       | II-128 |
| 2.2.2.4.  | Usia Harapan Hidup.....                         | II-129 |
| 2.2.2.5.  | Persentase Balita Gizi Kurang...                | II-131 |
| 2.2.2.6.  | Stunting.....                                   | II-132 |
| 2.2.2.7.  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....  | II-134 |
| 2.2.2.8.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....         | II-136 |
| 2.2.2.9.  | Rasio Penduduk yang Bekerja..                   | II-138 |
| 2.2.2.10. | Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja.....      | II-139 |
| 2.2.2.11. | Persentase PAD Terhadap Pendapatan.....         | II-140 |
| 2.2.2.12. | Kontribusi Sektor Pertanian /                   | II-141 |

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Perkebunan Terhadap PDRB..                                                              |        |
| 2.2.2.13. Kontribusi Sektor Pertanian<br>(Palawija) Terhadap PDRB.....                  | II-141 |
| 2.2.2.14. Produksi Sektor Pertanian.....                                                | II-142 |
| 2.2.2.15. Kontribusi Sektor Perkebunan<br>Terhadap PDRB.....                            | II-143 |
| 2.2.2.16. Produksi Sektor Perkebunan...                                                 | II-144 |
| 2.2.2.17. Kontribusi Sektor<br>Pertambangan Terhadap<br>PDRB.....                       | II-145 |
| 2.2.2.18. Kontribusi Sektor Perdagangan<br>Terhadap PDRB.....                           | II-146 |
| 2.2.2.19. Kontribusi Sektor Industri<br>Terhadap PDRB.....                              | II-146 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum.....                                                          | II-147 |
| 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah<br>Wajib.....                                    | II-147 |
| 2.3.1.1. Pendidikan.....                                                                | II-147 |
| 2.3.1.2. Kesehatan.....                                                                 | II-164 |
| 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang.....                                      | II-182 |
| 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Pemukiman.....                                 | II-187 |
| 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan<br>Masyarakat.....           | II-189 |
| 2.3.1.6. Sosial.....                                                                    | II-190 |
| 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak<br>Berkaitan dengan Pelayanan<br>Dasar..... | II-193 |
| 2.3.2.1. Tenaga Kerja.....                                                              | II-193 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                    | II-195 |
| 2.3.2.3. Pangan.....                                                          | II-198 |
| 2.3.2.4. Pertanahan.....                                                      | II-201 |
| 2.3.2.5. Lingkungan Hidup.....                                                | II-202 |
| 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....                  | II-204 |
| 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....                                | II-206 |
| 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....                    | II-207 |
| 2.3.2.9. Perhubungan.....                                                     | II-214 |
| 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika                                          | II-215 |
| 2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....                             | II-217 |
| 2.3.2.12. Penanaman Modal.....                                                | II-218 |
| 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga                                            | II-219 |
| 2.3.2.14. Statistik.....                                                      | II-221 |
| 2.3.2.15. Kebudayaan.....                                                     | II-221 |
| 2.3.2.16. Perpustakaan.....                                                   | II-222 |
| 2.3.2.17. Kearsipan.....                                                      | II-223 |
| 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... | II-224 |
| 2.3.3.1. Pariwisata.....                                                      | II-224 |
| 2.3.3.2. Pertanian.....                                                       | II-226 |
| 2.3.3.3. Kehutanan.....                                                       | II-229 |
| 2.3.3.4. Perdagangan.....                                                     | II-230 |
| 2.3.3.5. Perindustrian.....                                                   | II-231 |
| 2.3.3.6. Transmigrasi.....                                                    | II-232 |



|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.3.3.7. Kelautan dan Perikanan.....                                   | II-232 |
| 2.3.4. Penunjang Umum Pemerintahan.....                                | II-236 |
| 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan.....                                  | II-236 |
| 2.3.4.2. Keuangan.....                                                 | II-239 |
| 2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan<br>dan Pelatihan.....            | II-240 |
| 2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan..                                 | II-240 |
| 2.3.4.5. Pengawasan.....                                               | II-241 |
| 2.3.4.6. Sekretariat Dewan.....                                        | II-241 |
| 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....                                      | II-242 |
| 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....                             | II-242 |
| 2.4.1.1. Rata-rata Pengeluaran Rumah<br>Tangga per Kapita.....         | II-243 |
| 2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah.....                               | II-243 |
| 2.4.1.3. Nilai Tukar Petani.....                                       | II-244 |
| 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....                      | II-245 |
| 2.4.2.1. Rasio Panjang Per Jumlah<br>Kendaraan.....                    | II-246 |
| 2.4.2.2. Jumlah Orang / Barang yang<br>Terangkut Angkutan Umum.....    | II-247 |
| 2.4.2.4 Ketaatan terhadap RTRW.....                                    | II-248 |
| 2.4.2.5 Luas Wilayah Produktif.....                                    | II-249 |
| 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....                                   | II-249 |
| 2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia.....                                   | II-251 |
| 2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai<br>Tahun 2020..... | II-252 |

### **BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu..... | III-2 |
| 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD..... | III-2 |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 3.1.2. Neraca Daerah.....                           | III-12 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... | III-18 |
| 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....            | III-18 |
| 3.2.2. Analisis Pembiayaan .....                    | III-20 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan .....                       | III-25 |
| 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....         | III-25 |
| 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....          | III-32 |

#### **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1. Permasalahan Pembangunan .....                                                               | IV-1   |
| 4.1.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....                                             | IV-1   |
| 4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib yang Berkaitan Layanan Dasar..          | IV-14  |
| 4.1.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Layanan Dasar..... | IV-21  |
| 4.1.1.3 Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Pilihan.....                | IV-29  |
| 4.2. Analisis Isu Strategis .....                                                                 | IV-35  |
| 4.2.1. Isu Strategis Internasional.....                                                           | IV-36  |
| 4.2.2. Isu Strategis Nasional.....                                                                | IV-50  |
| 4.2.3. Isu Strategis Regional Sulawesi.....                                                       | IV-84  |
| 4.2.4. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                | IV-94  |
| 4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Donggala.....                                                      | IV-100 |
| 4.3. Pembobotan Isu Strategis .....                                                               | IV-132 |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>BAB V</b>                                                                                                                                                                     | <b>: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>                                                                       |        |
| 5.1. Visi.....                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | V-1    |
| 5.2. Misi.....                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | V-6    |
| 5.3. Tujuan dan Sasaran.....                                                                                                                                                     |                                                                                                               | V-28   |
| 5.4. Prioritas Pembangunan Daerah.....                                                                                                                                           |                                                                                                               | V-53   |
| 5.4.1. Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan Nasional dan Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 Serta RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024..... |                                                                                                               | V-55   |
| 5.4.1.1 Substansi RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Nasional.....                                                                                             |                                                                                                               | V-55   |
| 5.4.1.2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....                                                                                                                      |                                                                                                               | V-57   |
| <b>BAB VI</b>                                                                                                                                                                    | <b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>                                                              | VI-1   |
| 6.1. Strategi.....                                                                                                                                                               |                                                                                                               | VI-1   |
| 6.2. Arah Kebijakan.....                                                                                                                                                         |                                                                                                               | VI-14  |
| <b>BAB VII</b>                                                                                                                                                                   | <b>: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>                                          |        |
| 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Periode RPJMD Revisi Tahun 2022-2024.....                                                                          |                                                                                                               | VII-1  |
| 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Donggala Periode RPJMD Tahun 2022-2024.....                                                  |                                                                                                               | VII-5  |
| <b>BAB VIII</b>                                                                                                                                                                  | <b>: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA MENURUT BIDANG URUSAN TAHUN 2019-2024</b> | VIII-1 |

**BAB IX : PENUTUP**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 9.1. Pedoman Transisi.....    | IX-1 |
| 9.2. Pedoman Pelaksanaan..... | IX-2 |



## DAFTAR TABEL

|              |             |                                                                                                             |               |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.1</b>  | <b>Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Donggala Tahun 2020</b>                                      | <b>II-2</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>2.2</b>  | <b>Kondisi Topografi Berdasarkan Luas Wilayah</b>                                                           | <b>II-9</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>2.3</b>  | <b>Jumlah Desa/Kelurahan/UPT Menurut Letak Desa di Kabupaten Donggala Tahun 2020</b>                        | <b>II-10</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.4</b>  | <b>Keterangan Gambar Struktur Geologi Kabupaten Donggala</b>                                                | <b>II-13</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.5</b>  | <b>Presentase Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                          | <b>II-16</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.6</b>  | <b>Parameter Cuaca di Kabupaten Donggala Menurut Bulan Tahun 2019-2020</b>                                  | <b>II-19</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.7</b>  | <b>Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala</b>                   | <b>II-46</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.8</b>  | <b>Data Potensi Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala</b>                                  | <b>II-52</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.9</b>  | <b>Potensi Hutan dan Non Hutan di Kabupaten Donggala Tahun 2020</b>                                         | <b>II-61</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.10</b> | <b>Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Gempa Tahun 2018 di Kabupaten Donggala</b>                      | <b>II-82</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.11</b> | <b>Tren Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                            | <b>II-88</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.12</b> | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                    | <b>II-89</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.13</b> | <b>Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Donggala Menurut Kecamatan Tahun 2020</b>                           | <b>II-91</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.14</b> | <b>Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Donggala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020</b>                        | <b>II-92</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.15</b> | <b>Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (Jiwa)</b>                      | <b>II-94</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.16</b> | <b>Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Agama di Kabupaten Donggala Tahun 2020</b>                     | <b>II-96</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.17</b> | <b>Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Donggala ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2020</b>   | <b>II-98</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>2.18</b> | <b>Nilai Absolut PDRB Kabupaten Donggala ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2020</b> | <b>II-101</b> |

|              |             |                                                                                                                                                      |               |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.19</b> | <b>Nilai Absolut PDRB Kabupaten Donggala ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2020</b>                                          | <b>II-102</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.20</b> | <b>Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Donggala Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2020</b> | <b>II-105</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.21</b> | <b>Tingkat Inflasi Kabupaten Donggala, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2020 (Persen)</b>                                                            | <b>II-106</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.22</b> | <b>Nilai dan Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                      | <b>II-108</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.23</b> | <b>Indeks Gini Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                                                                | <b>II-110</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.24</b> | <b>Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020</b>                                                           | <b>II-111</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.25</b> | <b>Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020</b>                                                       | <b>II-113</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.26</b> | <b>Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020</b>                                                      | <b>II-114</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.27</b> | <b>Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020</b>                                                      | <b>II-117</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.28</b> | <b>Garis Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020</b>                                                                 | <b>II-119</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.29</b> | <b>IPM Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-123</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.30</b> | <b>AMH Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-125</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.31</b> | <b>RLS Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-126</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.32</b> | <b>HLS Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-128</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.33</b> | <b>UHH Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-130</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.34</b> | <b>Persentase Balita Kurang Gizi Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                              | <b>II-132</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.35</b> | <b>Angka Stunting Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                             | <b>II-133</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.36</b> | <b>TPAK Kabupaten Donggala Dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                                       | <b>II-135</b> |

|              |             |                                                                                                                                  |               |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.37</b> | <b>TPT Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                   | <b>II-137</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.38</b> | <b>Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>           | <b>II-139</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.39</b> | <b>Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b> | <b>II-140</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.40</b> | <b>Persentase Pendapatan Terhadap Pendapatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                              | <b>II-140</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.41</b> | <b>Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                              | <b>II-141</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.42</b> | <b>Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                              | <b>II-143</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.43</b> | <b>Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                             | <b>II-144</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.44</b> | <b>Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                           | <b>II-145</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.45</b> | <b>Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                            | <b>II-146</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.46</b> | <b>Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                               | <b>II-147</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.47</b> | <b>PAUD Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                                   | <b>II-148</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.48</b> | <b>APK SD/MI Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                              | <b>II-150</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.49</b> | <b>APK SMP/MTs Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                           | <b>II-150</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.50</b> | <b>APK SMP/MTs Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>                           | <b>II-151</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.51</b> | <b>Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>      | <b>II-152</b> |

|              |             |                                                                                                                |               |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.52</b> | <b>APM SD/MI/Paket A Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>   | <b>II-153</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.53</b> | <b>APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>  | <b>II-154</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.54</b> | <b>APM SMA/MA/Paket C Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>  | <b>II-155</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.55</b> | <b>APS SD/MI/Paket A Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>    | <b>II-156</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.56</b> | <b>APS SMP/MTs/Paket B Kabupaten Donggala disbanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b> | <b>II-156</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.57</b> | <b>APS SMA/MA/Paket C Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020</b>   | <b>II-157</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.58</b> | <b>APTS Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                                 | <b>II-158</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.59</b> | <b>Angka Kelulusan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                      | <b>II-159</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.60</b> | <b>Angka Melanjutkan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                    | <b>II-160</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.61</b> | <b>Fasilitas Pendidikan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                 | <b>II-161</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.62</b> | <b>Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                           | <b>II-162</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.63</b> | <b>Rasio Guru/Murid Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                     | <b>II-162</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.64</b> | <b>Angka Melek Huruf Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                    | <b>II-163</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.65</b> | <b>Gambaran Tentang Rasio Puskesmas, Rasio Poliklinik, dan Rasio Pustu Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>  | <b>II-169</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.66</b> | <b>Rasio Rumah Sakit Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                    | <b>II-170</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.67</b> | <b>Rasio Dokter Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                         | <b>II-171</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.68</b> | <b>Rasio Tenaga Medis Kabupaten Donggala</b>                                                                   | <b>II-172</b> |



|              |             |                                                                                                                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              |             | <b>Tahun 2019-2020</b>                                                                                                            |               |
| <b>Tabel</b> | <b>2.69</b> | <b>Angka Kejadian Malaria Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                                  | <b>II-180</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.70</b> | <b>Cakupan Puskesmas Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                                       | <b>II-182</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.71</b> | <b>Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Donggala Periode 2019-2020 (Dalam Km)</b>                         | <b>II-183</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.72</b> | <b>Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                                            | <b>II-184</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.73</b> | <b>Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (&gt;40 KM/Jam) Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                         | <b>II-185</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.74</b> | <b>Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                                                  | <b>II-186</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.75</b> | <b>Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                                            | <b>II-187</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.76</b> | <b>Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                                                                | <b>II-188</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.77</b> | <b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Donggala Periode 2019-2020</b>                                                 | <b>II-189</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.78</b> | <b>Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                  | <b>II-189</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.79</b> | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada di Kabupaten Donggala Tahun 2013-2018</b>                                        | <b>II-190</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.80</b> | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                       | <b>II-193</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.81</b> | <b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kabupaten Donggala Tahun 2013-2018</b>                                   | <b>II-195</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.82</b> | <b>Bidang Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                     | <b>II-199</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.83</b> | <b>Data Ketersediaan Pangan Perkapita Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Donggala Tahun 2019 sampai dengan 2020</b> | <b>II-200</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.84</b> | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Pertanahan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                         | <b>II-202</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.85</b> | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                      | <b>II-203</b> |

|              |              |                                                                                                                                                |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.86</b>  | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                  | <b>II-205</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.87</b>  | <b>Bidang Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                | <b>II-206</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.88</b>  | <b>Bidang Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                       | <b>II-208</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.89</b>  | <b>Bidang Capaian Indikator Bidang Perhubungan Tahun 2019-2020</b>                                                                             | <b>II-214</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.90</b>  | <b>Bidang Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Tahun 2019 - 2020</b>    | <b>II-216</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.91</b>  | <b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                        | <b>II-217</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.92</b>  | <b>Bidang Capaian dalam Penanaman Modal di Kabupaten Donggala Tahun 2019 -2020</b>                                                             | <b>II-219</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.93</b>  | <b>Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                                   | <b>II-220</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.94</b>  | <b>Realisasi Pembangunan Bidang Perpustakaan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                            | <b>II-223</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.95</b>  | <b>Realisasi Pembangunan Bidang Kearsipan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                            | <b>II-224</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.96</b>  | <b>Target dan Realisasi Kunjungan Wisata di Kabupaten Donggala 2019-2020</b>                                                                   | <b>II-226</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.97</b>  | <b>Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (dalam %)</b>           | <b>II-227</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.98</b>  | <b>Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (dalam %)</b>       | <b>II-228</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.99</b>  | <b>Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman keras) Terhadap PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (dalam %)</b> | <b>II-228</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.100</b> | <b>Indikator Capaian dan Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                    | <b>II-230</b> |

|              |              |                                                                                                                            |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.101</b> | <b>Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2019-2020 Di Kabupaten Donggala</b>                                               | <b>II-232</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.102</b> | <b>Persentase Transmigrasi Swakarsa Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala</b>                                              | <b>II-232</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.103</b> | <b>Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>           | <b>II-233</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.104</b> | <b>Capaian Konsumsi Ikan Perkapita di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                               | <b>II-234</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.105</b> | <b>Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                 | <b>II-235</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.106</b> | <b>Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Terhadap Total Produksi Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b> | <b>II-235</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.107</b> | <b>Dokumen Perencanaan RPJPD Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2023</b>                          | <b>II-237</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.108</b> | <b>Dokumen Perencanaan RPJMD Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2019-2023</b>                                             | <b>II-237</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.109</b> | <b>Dokumen Perencanaan RKPD Telah Ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                         | <b>II-238</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.110</b> | <b>Dokumen Perencanaan RTRW Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                           | <b>II-239</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.111</b> | <b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                              | <b>II-240</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.112</b> | <b>Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                     | <b>II-241</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.113</b> | <b>Rasio Panjang Jalan Persatuan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020</b>                              | <b>II-247</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.114</b> | <b>Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020</b>                                   | <b>II-247</b> |

|              |              |                                                                                                                                                    |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>2.115</b> | <b>Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                               | <b>II-249</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>2.116</b> | <b>Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016-2020</b> | <b>II-254</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.1</b>   | <b>Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Donggala</b>                                       | <b>III-6</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>3.2</b>   | <b>Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Per 31 Desember 2019 s/d Per 31 Desember 2020 Kabupaten Donggala</b>                                        | <b>III-13</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.3</b>   | <b>Analisis Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Kabupaten Donggala</b>                                                               | <b>III-17</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.4</b>   | <b>Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018 s/d Tahun 2020 Kabupaten Donggala (Dalam ribuan rupiah)</b>                   | <b>III-19</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.5</b>   | <b>Analisis Defisit Riil Anggaran Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Kabupaten Donggala (Dalam ribuan rupiah)</b>                                           | <b>III-21</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.6</b>   | <b>Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Kabupaten Donggala</b>                                                        | <b>III-22</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.7</b>   | <b>Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 s/d Tahun 2020 Kabupaten Donggala</b>                                                      | <b>III-24</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.8</b>   | <b>Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2024 Kabupaten Donggala</b>                                                | <b>III-27</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.9</b>   | <b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2024 Kabupaten Donggala</b>                     | <b>III-33</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>3.10</b>  | <b>Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2024 Kabupaten Donggala</b>                                    | <b>III-36</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>4.1.</b>  | <b>Permasalahan Pokok Daerah Kabupaten Donggala</b>                                                                                                | <b>IV-2</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>4.2</b>   | <b>Kriteria Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Donggala</b>                                                                                   | <b>IV-133</b> |

|              |            |                                                                                                                                     |               |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>4.3</b> | <b>Pembobotan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Donggala</b>                                                                  | <b>IV-135</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>5.1</b> | <b>Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024</b>                                                                   | <b>V-4</b>    |
| <b>Tabel</b> | <b>5.2</b> | <b>Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024</b>                                                           | <b>V-7</b>    |
| <b>Tabel</b> | <b>5.3</b> | <b>Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024</b>                                                         | <b>V-10</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>5.4</b> | <b>Keselarasan Misi RPJMD 2019-2024 dan Misi RPJPD 2005-2025</b>                                                                    | <b>V-13</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>5.5</b> | <b>Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2024 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026</b>             | <b>V-14</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>5.6</b> | <b>Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024 dengan Misi RPJM Nasional Periode 2020-2024</b>                      | <b>V-17</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>5.7</b> | <b>Integrasi Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024 Kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)</b>                    | <b>V-21</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>5.8</b> | <b>Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis</b>              | <b>V-32</b>   |
| <b>Tabel</b> | <b>6.1</b> | <b>Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024</b>                                          | <b>VI-16</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>6.2</b> | <b>Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024</b>                                                                | <b>VI-39</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>6.3</b> | <b>Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024</b>                                   | <b>VI-61</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>7.1</b> | <b>Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024 Kabupaten Donggala</b>                                                     | <b>VII-3</b>  |
| <b>Tabel</b> | <b>7.2</b> | <b>Target, Indikator dan Besaran Anggaran Program Kerja Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2022-2024</b> | <b>VII-7</b>  |



|              |            |                                                                                                                                           |               |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tabel</b> | <b>8.1</b> | <b>Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Donggala 2021-2024</b>                                                          | <b>VIII-4</b> |
| <b>Tabel</b> | <b>8.2</b> | <b>Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Donggala Tahun 2021-2024</b> | <b>VIII-8</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|               |             |                                                                                                                                                    |               |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gambar</b> | <b>1.1</b>  | <b>Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya</b>                                                                                              | <b>I-16</b>   |
| <b>Gambar</b> | <b>2.1</b>  | <b>Peta Wilayah Kabupaten Donggala</b>                                                                                                             | <b>II-8</b>   |
| <b>Gambar</b> | <b>2.2</b>  | <b>Peta Struktur Geologi Kabupaten Donggala</b>                                                                                                    | <b>II-12</b>  |
| <b>Gambar</b> | <b>2.3</b>  | <b>Kondisi Kegempaan di Wilayah Sulawesi KF: Palu Koro Fault (Patahan Palu-Koro), MF : Matano Fault (Patahan Matano) (Bellier, O. et al, 2001)</b> | <b>II-73</b>  |
| <b>Gambar</b> | <b>2.4</b>  | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha ADHK-2010 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                   | <b>II-100</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.5</b>  | <b>PDRB Perkapita ADHK-2010 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                    | <b>II-109</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.6</b>  | <b>Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Jiwa)</b>                                               | <b>II-112</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.7</b>  | <b>Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)</b>                                                  | <b>II-114</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.8</b>  | <b>Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                 | <b>II-116</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.9</b>  | <b>Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                 | <b>II-118</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.10</b> | <b>Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Rupiah)</b>                                                   | <b>II-120</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.11</b> | <b>IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                                         | <b>II-124</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.12</b> | <b>RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                                         | <b>II-127</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.13</b> | <b>HLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                                         | <b>II-129</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.14</b> | <b>UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                                         | <b>II-131</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.15</b> | <b>Angka Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020</b>                                                              | <b>II-134</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.16</b> | <b>TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)</b>                                                                    | <b>II-136</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.17</b> | <b>TPT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)</b>                                                                     | <b>II-138</b> |

|               |             |                                                                                                                                   |               |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gambar</b> | <b>2.18</b> | <b>Kontribusi Sektor Pertanian Palawija Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                      | <b>II-142</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.19</b> | <b>Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)</b>                                          | <b>II-144</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.20</b> | <b>AKB per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                            | <b>II-165</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.21</b> | <b>Angka Kematian Neonatal Per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                        | <b>II-166</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.22</b> | <b>AKI Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                            | <b>II-168</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.23</b> | <b>Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b> | <b>II-173</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.24</b> | <b>Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                            | <b>II-175</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.25</b> | <b>Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                    | <b>II-176</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.26</b> | <b>Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                              | <b>II-177</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.27</b> | <b>Penyakit Diare yang Tertangani Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020</b>                                                          | <b>II-179</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.28</b> | <b>Produktivitas Total Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020.</b>                                                           | <b>II-244</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>2.29</b> | <b>Nilai Tukar Petani Gabungan Sulawesi Tengah 2016-2020</b>                                                                      | <b>II-245</b> |
| <b>Gambar</b> | <b>6.1</b>  | <b>Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024</b>                                                                  | <b>VI-42</b>  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Tujuan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam rangkaian tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan masing-masing pada jenjang administrasi pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada tujuan pembangunan nasional tersebut, maka secara nasional telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009, dan dalam lingkup Kabupaten Donggala telah ditetapkan RPJPD dalam jangka waktu 20 tahun yaitu periode 2005 - 2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD periode 2005-2025. RPJPD memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Donggala yang dalam implementasinya dilaksanakan melalui tahapan 5 (lima) tahunan dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2019-2024 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD 2005-2025 yang diuraikan secara ringkas pada bab ini, hasil evaluasi atas RPJMD

Tahun 2019-2024, hasil Diskusi Kelompok Terarah (FGD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan agenda, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan Tahun 2019-2024.

Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, spasial, maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 ini, disusun melalui beberapa pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
3. Pendekatan Politis, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke



dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan lima Tahun;

4. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, hasil pendekatan *Bottom-Up* melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJMD, dan pendekatan *Top-Down* berupa penyelarasan dokumen perencanaan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran seperti terkandung dalam makna filosofi Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran;
5. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2024 selanjutnya menjadi acuan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Donggala sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Donggala.

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Penyusunan secara berjenjang, merupakan langkah strategis dalam RPJMD, sehingga dalam perjalanannya jika terjadi perubahan sesuai amanat undang-undang maka dapat disesuaikan langkah-langkahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa perubahan terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan bilamana:

- 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Terjadi perubahan yang mendasar. Pada pasal 342 ayat 3 dijelaskan yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar yaitu mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada pasal 2 ayat 3 huruf b mengamanatkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 342 ayat 1 huruf c Permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, terdapat beberapa alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala yang diantaranya berkaitan dengan hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan mendesak untuk memperoleh perlakuan dalam penyelesaiannya; meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam menjalankan urusannya; dan terbitnya regulasi baru berkaitan dengan dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi dengan kepala daerah yang baru menjabat, sehingga RPJMD Kabupaten Donggala diharuskan melakukan penyesuaian.

Sehingga proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta Surat Edaran Bersama nomor 050/3499/SJ, tahun 2021 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024 yang dianggap penting untuk segera ditindak lanjuti diantaranya, menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen Perubahan Renstra PD tahun 2019-2024. Perubahan Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2024, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
  20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pananganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7764/SJ tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan;
  33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 tentang Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
  35. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
  36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 6);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen Perubahan RPJMD memiliki keterkaitan dokumen perencanaan yaitu RPJMD dan RPJPD, Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan RPJM Nasional 2020-2024, Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, Dokumen RPJMD Donggala dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulteng Tahun 2018-2021, RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan Renstra PD, RPJMD dengan RKPD.

#### **1. Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan RPJM Nasional 2020-2024**

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat. Prioritas pembangunan nasional Periode 2020-2024 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Donggala adalah reformasi



birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

## **2. Dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Donggala**

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Donggala. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan daerah, masalah pembangunan dan isu-isu strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pagu indikatif, indikator kinerja daerah, dan pedoman transisi. Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Donggala tahapan ke-4 Tahun 2005-2025. Pada Periode IV RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2024 menetapkan 6 (enam) skala prioritas, yaitu:

- a. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas seluruh pelayanan yang merata dan berkeadilan;
- b. Peningkatan kerjasama bidang ekonomi dengan mendorong sarana perekonomian dan investasi serta mendorong produktivitas perekonomian yang berorientasi pada pasar;
- c. Penyediaan infrastruktur yang merata terutama daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan;
- e. Peningkatan fungsi kelembagaan, sumberdaya aparatur, serta sarana prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kemampuan daerah dan daya saing diberbagai bidang ekonomi, sosial budaya dan pelayanan dalam kerjasama regional, nasional maupun global.

### **3. Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi pertimbangan utama.

### **4. Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Donggala.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang.

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai Pola dan Struktur Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Donggala. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten

Donggala juga memuat arah pembangunan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

## **5. Dokumen RPJMD Donggala dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulteng Tahun 2018-2021**

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala juga merujuk pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang RAD TPB Provinsi Sulteng Tahun 2018-2021. Bab V, Bab VI dan VII RPJMD Kabupaten Donggala diselaraskan dengan berbagai program dalam Lampiran I Matriks Program Kegiatan Pemerintah. Selanjutnya matriks tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra dan Renja PD.

## **6. Dokumen RPJMD Kabupaten Donggala dan Renstra PD**

Dokumen Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang berlaku 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan berbasis pada hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Donggala. Perubahan Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

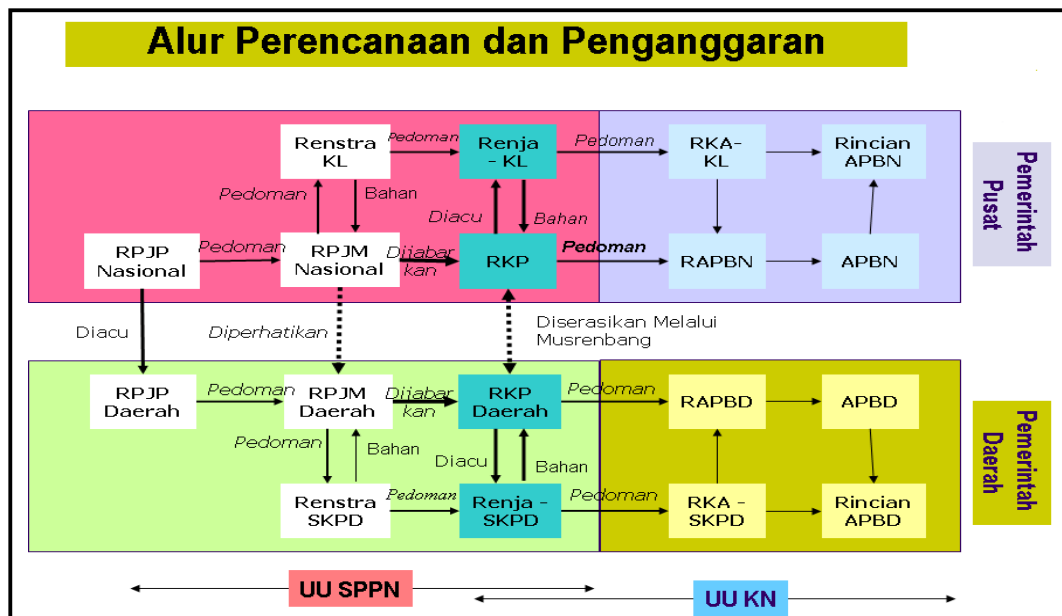
## 7. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Donggala

Pelaksanaan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dan dilengkapi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Donggala dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Donggala dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**

### Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala dimaksudkan untuk menjadi arahan atau pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Donggala. Di samping itu, Dokumen RPJMD berfungsi untuk memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyusunan RPJMD harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Mengingat Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2024 memuat Visi dan Misi Bupati terpilih yang diintegrasikan ke dalamnya, maka secara isi dan substansi tujuan dari penyusunan Dokumen RPJMD yaitu :

- a. Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Donggala, untuk menetapkan prioritas program-program pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mekanisme monitoring, serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Merupakan rujukan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Donggala;
- c. Menjadi landasan tolak ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah dan tolak ukur kinerja lima tahun masa jabatan kepala daerah;
- d. Menjadi panduan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai pelaksanaan strategi dan arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- e. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (gradual) melalui

program-program pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;

- f. Pedoman penyusunan RKPD mulai tahun 2023-2024;
- g. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024;
- h. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- i. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Donggala;
- j. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 47 ayat 5, Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala disusun memuat sembilan bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I:      Pendahuluan, yang memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan;



- BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat bahasan tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah;
- BAB III: Gambaran Keuangan Daerah, yang memuat bahasan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;
- BAB IV: Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis, yang memuat bahasan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis.
- BAB V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- BAB VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, yang memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja;
- BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, yang memuat hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD;
- BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- BAB IX: Penutup, yang memuat pedoman dalam masa transisi bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penyusunan RKPD 2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Informasi berkaitan dengan gambaran umum kondisi Kabupaten Donggala terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Donggala dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section*. Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tabel Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Kabupaten Donggala berdasarkan periode data yang tersedia, Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024 (terkait target pembangunan), serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Donggala.

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Donggala**

Aspek geografi dan demografi menjadi informasi penting bagi proses perencanaan di Kabupaten Donggala untuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala periode 2019-2024. Aspek geografi menjelaskan tentang kondisi sumberdaya alam yang dimiliki, sedangkan aspek demografi menjelaskan tentang kondisi sumberdaya manusianya. Kondisi umum geografi dan demografi dijabarkan ke dalam telaah yang secara spesifik yang diuraikan pada bagian berikut.

##### **2.1.1 Aspek Geografis Kabupaten Donggala**

Aspek geografis dijabarkan ke dalam telaah yang secara spesifik berkaitan dengan: 1). Luas wilayah dan batas administrasi wilayah, 2) letak wilayah dan topografi, 3) geologi dan potensi kandungan, 4) hidrologi dan potensi air tanah,

5) klimatologi, 6) penggunaan lahan, 7) potensi sumber daya dan pengembangan wilayah, 8) arah pengembangan kawasan strategis, dan 9) aspek kerawanan bencana alam.

#### 2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administratif Wilayah

Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah 5.275,69 kilometer persegi yang secara administratif terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dengan 158 (seratus lima puluh delapan) desa, 9 (sembilan) kelurahan dan 2 (dua) masih berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Dari jumlah 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dan 9 (sembilan) kelurahan tersebut, terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) desa merupakan desa pesisir dan 88 (delapan puluh delapan) desa merupakan desa non-pesisir. Data mengenai luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2020**

| No. | Kecamatan          | Ibukota Kecamatan | Kelurahan | Desa | Luas (km <sup>2</sup> ) | %     |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|------|-------------------------|-------|
| 1.  | Rio Pakava         | Lalundu           | -         | 14   | 872,16                  | 16,53 |
| 2.  | Pinembani          | Gimpubia          | -         | 9    | 402,61                  | 7,63  |
| 3.  | Banawa             | Gunung Bale       | 9         | 5    | 99,04                   | 1,88  |
| 4.  | Banawa Selatan     | Watatu            | -         | 19   | 430,67                  | 8,16  |
| 5.  | Banawa Tengah      | Limboro           | -         | 8    | 74,64                   | 1,41  |
| 6.  | Labuan             | Labuan            | -         | 7    | 126,01                  | 2,39  |
| 7.  | Tanantovea         | Wani              | -         | 10   | 302,64                  | 5,74  |
| 8.  | Sindue             | Toaya             | -         | 13   | 177,19                  | 3,36  |
| 9.  | Sindue Tombusabora | Tibo              | -         | 6    | 211,55                  | 4,01  |
| 10. | Sindue Tobata      | Alindau           | -         | 6    | 211,92                  | 4,02  |
| 11. | Sirenja            | Tompe             | -         | 13   | 286,94                  | 5,44  |
| 12. | Balaesang          | Tambu             | -         | 13   | 314,23                  | 5,96  |
| 13. | Balaesang          | Malei             | -         | 8    | 188,85                  | 3,58  |

| No.                       | Kecamatan   | Ibukota Kecamatan | Kelurahan | Desa       | Luas (km <sup>2</sup> ) | %          |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
|                           | Tanjung     |                   |           |            |                         |            |
| 14.                       | Dampelas    | Sabang            | -         | 13         | 732,76                  | 13,89      |
| 15.                       | Sojol       | Balukang          | -         | 9          | 705,41                  | 13,37      |
| 16.                       | Sojol Utara | Ogoamas           | -         | 5          | 139,07                  | 2,64       |
| <b>Kabupaten Donggala</b> |             |                   | <b>9</b>  | <b>158</b> | <b>5.257,6</b>          | <b>100</b> |
|                           |             |                   |           |            |                         | <b>9</b>   |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, (Penyajian Data Diolah Kembali)**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Donggala adalah Kecamatan Rio Pakava dengan luas wilayah 872,16 km<sup>2</sup> atau 16,53 persen dari total luas wilayah Kabupaten Donggala secara keseluruhan. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banawa Tengah yang memiliki luas 74,64 km<sup>2</sup> atau 1,41 persen dari total luas wilayah Kabupaten Donggala. Posisi Wilayah Kabupaten Donggala menyebar pada arah Utara, Selatan, Barat, dan Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sebelah Utara</b>   | Kabupaten Tolitoli                                    |
| <b>Sebelah Selatan</b> | Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Barat |
| <b>Sebelah Barat</b>   | Selat Makassar dan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat    |
| <b>Sebelah Timur</b>   | Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong           |

Uraian mengenai aspek wilayah Kecamatan di Kabupaten Donggala mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada bagian berikut.

- Kecamatan Pinembani** : Terdiri atas 9 (sembilan) desa non pesisir dengan ibukota kecamatan di Desa Gimpubia berjarak 113 km dari ibukota kabupaten, memiliki Luas wilayah 402,61 km<sup>2</sup> atau 7,63 persen dari wilayah kabupaten;
- Kecamatan Banawa** : Kecamatan Banawa merupakan ibukota kabupaten yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa, dengan luas wilayah sebesar 99,04 km<sup>2</sup> atau 1,88 persen. Dari sembilan desa/kelurahan tersebut, 5 (lima) desa dan 2 (dua) kelurahan berada di daerah pesisir sedangkan 7 (tujuh) kelurahan lainnya non-pesisir dengan ibukota Kecamatan Gunung Bale;
- Kecamatan Banawa Selatan** : Ibu kota kecamatannya yakni Desa Watatu dengan jarak 27 km dari ibukota Kabupaten Donggala terdiri atas 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah sebesar 430,67 km<sup>2</sup> atau 8,16 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Donggala. 5 (lima) desa terletak di daerah pesisir dan 14 (empat belas) desa lainnya merupakan desa non-pesisir;
- Kecamatan Banawa Tengah** : merupakan kecamatan yang terkecil wilayahnya dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala, dengan luas wilayah hanya 74,64 km<sup>2</sup> atau 1,41 persen memiliki 8 (delapan) desa, di mana 3 (tiga) desa di antaranya terletak di daerah pesisir dengan ibukota Kecamatan Desa Limboro

- dengan jarak 9 km dari ibukota kabupaten;
- Kecamatan Labuan** : luas wilayah 126,01 km<sup>2</sup> atau 2,39 persen dari total luas wilayah Kabupaten Donggala, berjarak tempuh 53 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan ibukota kecamatan di Labuan, terdiri dari 7 (tujuh) desa, yang 4 (empat) desa di antaranya merupakan desa pesisir;
- Kecamatan Tanantovea** : Desa Wani I adalah ibukota Kecamatan Tanantovea dengan luas wilayah 302,64 km<sup>2</sup> atau 5,74 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Donggala dengan jarak 50 km dari Ibukota Kabupaten Donggala terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yang 2 (dua) desa di antaranya merupakan desa pesisir;
- Kecamatan Sindue** : Terdiri atas 13 (tiga belas) desa yang 9 (sembilan) desa di antaranya merupakan desa pesisir dengan luas wilayah 177,19 km<sup>2</sup> atau 3,36 persen dari total luas wilayah adalah ibukota Kabupaten Donggala berjarak 70 km dari ibukota, dengan Ibukota Kecamatan di Desa Toaya:
- Kecamatan Sindue Tombusabora** : Berjarak 84 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan luas wilayah 211,55 km<sup>2</sup> atau sebesar 4,01 persen dari total wilayah Kabupaten Donggala, terdiri dari 6 (enam) desa, yang 5 (lima) desa di antaranya merupakan desa pesisir, dengan Ibukota Kecamatan di Desa Tibo;
- Kecamatan Sindue Tobata** : Luas wilayah 211,92 km<sup>2</sup>, berjarak 102 km dari Ibukota Kabupaten Donggala, terdiri



dari 6 desa, 2 desa merupakan desa pesisir dan 4 desa lainnya non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di Desa Alindau;

**Kecamatan Sirenja** : Terdiri dari 13 desa, yang 9 (Sembilan) desa di antaranya merupakan desa pesisir dengan luas wilayah 286,94 km<sup>2</sup> atau 5,55 persen dari total luas wilayah Kabupaten Donggala berjarak 120 km dari Ibukota Kabupaten Donggala, dengan Ibukota Kecamatan di Desa Tompe;

**Kecamatan Balaesang** : Dengan Ibukota Kecamatan di Desa Tambu memiliki Luas wilayah sebesar 314,23 km<sup>2</sup> atau 5,96 persen dari total wilayah Kabupaten Donggala dengan berjarak 141 km dari Ibukota Kabupaten Donggala terdiri atas 13 (tiga belas) desa yang 11 (sebelas) desa merupakan pesisir;

**Kecamatan Balaesang Tanjung** : Merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Donggala, pemekaran dari Kecamatan Balaesang dengan luas wilayah 188,85 km<sup>2</sup> atau 3,58 persen dari total wilayah Kabupaten Donggala, terdiri atas 7 (tujuh) desa pesisir dan 1 (satu) desa non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di Desa Malei, berjarak 150 km dari Ibukota Kabupaten Donggala;

**Kecamatan Dampelas** : Terdiri atas 13 (tiga belas) desa, 8 (delapan) di antaranya terletak di daerah pesisir pantai dengan total luas wilayah sebesar 732,76 km<sup>2</sup> atau 13,89 persen berjarak berjarak 182 km dari Ibukota Kabupaten Donggala

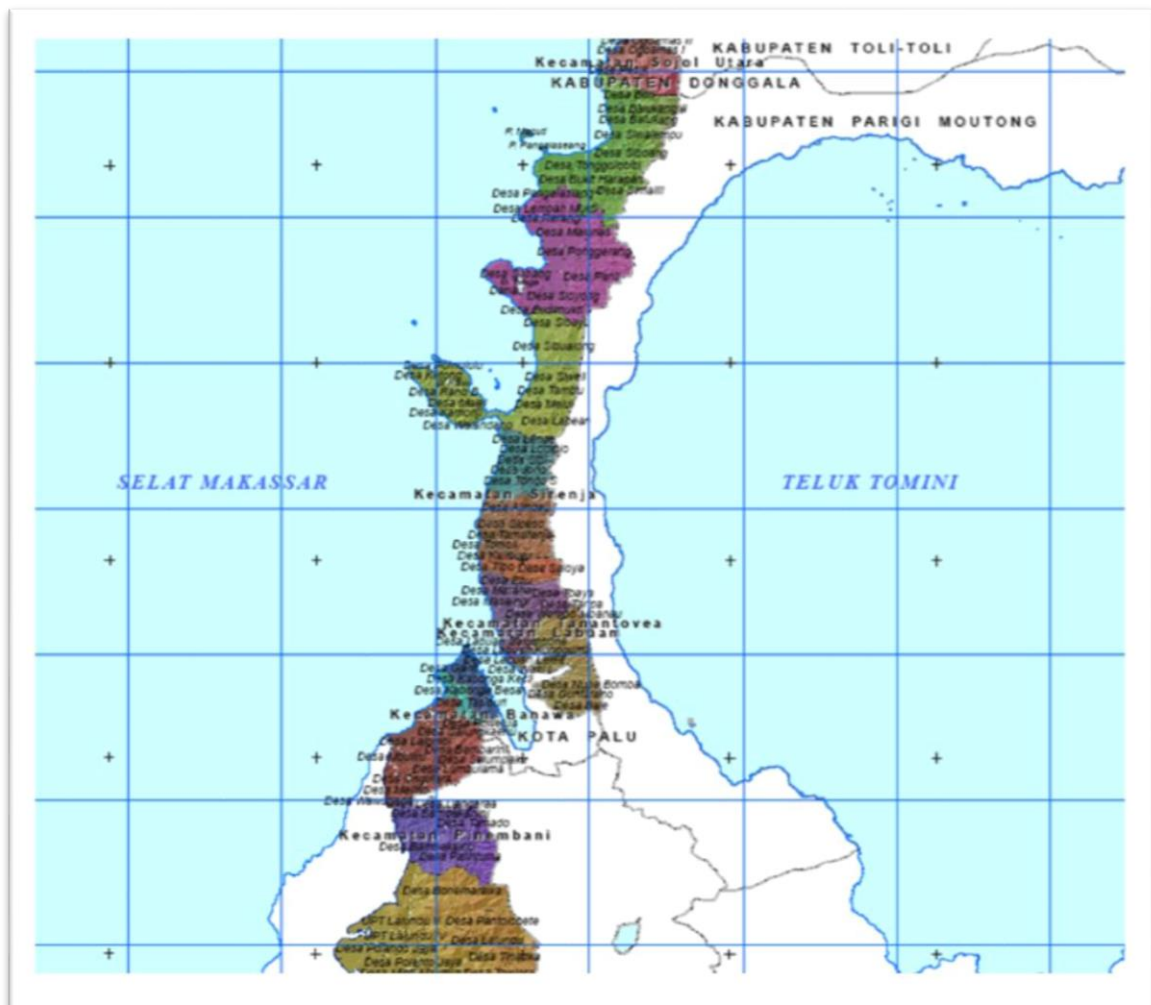
- dengan ibukota kecamatan di Desa Sabang;
- Kecamatan Sojol** : Luas wilayah 705,41 km<sup>2</sup> atau 13,37 persen terdiri atas 8 (delapan) desa pesisir dan 1 (satu) desa non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di Desa Balukang berjarak 228 km dari Ibukota Kabupaten Donggala;
- Kecamatan Sojol Utara** : Ibukota Kecamatan di Ogoamas, memiliki jarak 267 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan Luas wilayah 139,07 km<sup>2</sup> atau 2,64 persen. Terdiri atas 5 (lima) desa yang 3 (tiga) di antaranya desa pesisir;

#### 2.1.1.2 Letak Wilayah dan Topografi

##### A. Letak wilayah

Letak Kabupaten Donggala secara astronomi Kabupaten Donggala terletak antara 0<sup>o</sup>,30" Lintang Utara dan 2<sup>o</sup>,20" Lintang Selatan serta 119<sup>o</sup>,45"-121<sup>o</sup>,45" Bujur Timur. Kabupaten Donggala memiliki letak dan kondisi geografis yang dapat dipetakan menjadi dua wilayah yaitu: 1) **Wilayah Pantai Barat** merupakan wilayah Kabupaten Donggala yang berada di pesisir pantai bagian barat Pulau Sulawesi, berbatasan dengan wilayah bagian utara Kota Palu di ujung selatan, dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tolitoli bagian selatan. Beberapa kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki potensi sumberdaya laut khususnya perikanan tangkap, potensi pertambangan, dan memiliki lahan yang relatif subur sehingga berpotensi untuk pengembangan tanaman pertanian terutama tanaman pangan dan

perkebunan; 2) **Wilayah Banawa** yang berada di sebagian pesisir Teluk Palu dan sebagian Selat Makassar terpisah dengan wilayah pantai barat dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa kecamatan di wilayah ini antara lain; Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Pinembani dan Rio Pakava merupakan daerah yang relatif subur bagi sub sektor perkebunan, potensi jasa lingkungan, dan memiliki potensi perikanan laut dan budidaya terutama perikanan tambak.



**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Kabupaten Donggala**

## B. Topografi

Kondisi Topografi Kabupaten Donggala cukup beragam, mulai dari dataran yang rendah, dataran yang berbukit hingga pengunungan. Dataran rendah tersebar di sepanjang pesisir Kabupaten Donggala yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar di mana sebagian besar berada di wilayah Pantai Barat. Wilayah perbukitan dan pegunungan sebagian besar berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut hingga mencapai ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Donggala menurut topografinya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Kondisi Topografi Berdasarkan Luas Wilayah**

| No.   | Rentang Tingkat Kemiringan (°) | Kondisi                      | Luas Wilayah (Ha) | Persentase (%) |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 0 – 3                          | Datar                        | 123.094           | 23,33          |
| 2     | 3 – 15                         | Landai sampai berombak       | 12.506            | 2,37           |
| 3     | 15 – 40                        | Berombak sampai bergelombang | 95.075            | 18,02          |
| 4     | > 40                           | Bergelombang sampai berbukit | 296.894           | 56,28          |
| Total |                                |                              | 527.569           | 100,00         |

**Sumber: Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi di Kabupaten Donggala Tahun 2012.**

Kondisi topografi Kabupaten Donggala sangat bervariasi yang ditandai oleh bentuk lereng yang beragam. Puncak tertinggi pada Kawasan Tenggara kabupaten dengan ketinggian di atas  $\pm 700$  m dari permukaan laut. Sebaran

permukiman khususnya desa dan kelurahan pada Kabupaten Donggala mengikuti kondisi topografi yang ada. Sebanyak 158 desa dan 9 kelurahan berada pada daerah pedalaman/bukan pantai, dan selebihnya berada pada daerah pegunungan sebanyak 88 desa/kelurahan dan pinggiran pantai sebanyak 79 desa. Informasi mengenai ibukota kecamatan, tinggi wilayah (m) di atas permukaan laut (DPL), jumlah desa dan letaknya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan/UPT Menurut Letak Desa di**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2020**

| Kecamatan                 | Nama<br>Ibukota<br>Kecamatan | Tinggi<br>Wilayah<br>(mdpl) | Desa/<br>Kelurahan | Letak          |                         |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|                           |                              |                             |                    | Desa<br>Pantai | Desa<br>Bukan<br>Pantai |
| 01. Rio Pakava            | Lalundu                      | 45                          | 14                 | -              | 14                      |
| 02. Pinembani             | Gimpubia                     | 235                         | 9                  | -              | 9                       |
| 03. Banawa                | Gunung<br>Bale               | 35                          | 14 Desa            | 7              | 7                       |
| 04. Banawa<br>Selatan     | Watatu                       | 21                          | 19 Desa            | 7              | 12                      |
| 05. Banawa<br>Tengah      | Limboro                      | -                           | 8                  | 3              | 5                       |
| 06. Labuan                | Labuan                       | 3                           | 7                  | 3              | 4                       |
| 07. Tanantovea            | Wani                         | 15                          | 10                 | 4              | 6                       |
| 08. Sindue                | Toaya                        | 31                          | 13                 | 6              | 7                       |
| 09. Sindue<br>Tombusabora | Tibo                         | -                           | 6                  | 2              | 4                       |
| 10. Sindue<br>Tobata      | Alindau                      | -                           | 6                  | 2              | 4                       |
| 11. Sirenja               | Tompe                        | 5                           | 13                 | 8              | 5                       |
| 12. Balaesang             | Tambu                        | 12                          | 13                 | 12             | 1                       |
| 13. Dampelas              | Malei                        | -                           | 13                 | 8              | 5                       |

| Kecamatan                | Nama<br>Ibukota<br>Kecamatan | Tinggi<br>Wilayah<br>(mdpl) | Desa/<br>Kelurahan | Letak          |                         |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|                          |                              |                             |                    | Desa<br>Pantai | Desa<br>Bukan<br>Pantai |
| 14. Sojol                | Sabang                       | 7                           | 9                  | 8              | 1                       |
| 15. Sojol Utara          | Balukang                     | 9                           | 5                  | 3              | 2                       |
| 16. Balaesang<br>Tanjung | Ogoamas                      | 15                          | 8                  | 6              | 2                       |
| <b>Jumlah</b>            |                              |                             | <b>167</b>         | <b>79</b>      | <b>88</b>               |

**Sumber: Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021,  
(Penyajian Data Diolah Kembali).**

#### 2.1.1.3 Geologi dan Potensi Kandungan

Kondisi tatanan geologi Kabupaten Donggala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan geologi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang memiliki ciri khas berdasarkan dinamika tektonis yang sangat kompleks yang merupakan implikasi dari interaksi lempeng Euroasia di bagian Timur Laut, Indo-Australia di bagian Selatan dan Pasifik di bagian Timur. Kondisi geologi tidak berada pada lokasi zona *holocene fault*, serta tidak pula berada pada zona bahaya geologi. Berdasarkan struktur geologinya, wilayah Kabupaten Donggala didasari oleh sejumlah formasi seperti tertera pada gambar berikut ini.





**Gambar 2.2.**

II - 12

## a) Dataran Monto – Balukang

Dataran ini mempunyai geologi tanah yang terdiri dari alluvial baru yang berasal dari sedimen-sedimen yang telah membeku dan yang lebih tua. Tanahnya kemungkinan bertekstur sedang dengan drainase yang agak lebih baik, topografi dari datar hingga berombak.

## b) Dataran Bambamua – Tanah Mea

Geologi dataran ini terdiri dari endapan-endapan pantai dan alluvial baru yang berasal dari sedimen tua. Tanahnya bertekstur sedang dengan drainase yang agak lebih baik, topografi dari datar hingga berombak. Dataran-dataran yang lebih kecil terdapat di pesisir yaitu pesisir pantai barat seperti dataran Sabang, Palasa, Malei, Tanjung Padang, Sibayu dan dataran Towia.

Struktur geologi yang dimiliki Kabupaten Donggala di antaranya berupa: Kompleks Batuan Metamorfis, Granit Kambuno, Batu Gamping Kora. Simbol, formasi dan keterangan mengenai tatanan serta struktur geologi Kabupaten Donggala disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Keterangan Gambar Struktur Geologi Kabupaten**  
**Donggala**

| No. | Simbol | Formasi                    | Keterangan                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gr     | Granit dan Granodiorit     | Granit dan Granodiorit                                                                         |
| 2.  | Kis    | Formasi Latimojong         | Perselingan Batu Pasir Malih dengan Batu Sabak dan Filit setempat bersisipan Batu Lempung Meta |
| 3.  | Km     | Kompleks Batuan Metamorfis | Sekis Mika, Sekis Amfibolit, Granit dan Pualam (Terutama Pualam)                               |
| 4.  | Kmg    | Komplek                    | Komplek Metamorfis                                                                             |

| No. | Simbol   | Formasi                    | Keterangan                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | Metamorfis                 | Terutama Sekis Hijau                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Qal/Qap  | Aluvium dan Endapan Pantai | Pasir, Lempung, Lempung Kerikil dan Kerakal                                                                                                                                                       |
| 6.  | Ql       | Batu Gamping Korai         | Batu Gamping Korai                                                                                                                                                                                |
| 7.  | QTs/QTms | Molasa Celebes Sarasin     | Konglomerat, Batu Pasir, Batu Lumpur, Batu Gamping, Korai dan Napal, Sebagian Mengeras Lemah (Terutama Batu Gamping)                                                                              |
| 8.  | Tpkg     | Granit Kambuno             | Granit dan Granodiorit, Granit Berwarna Putih Berbintik hitam, Berbutir Sedang Sampai Kasar, terdiri atas Granit Biorit Horen Blenda-Biorit, Mikroleukogranit dan Mikrogranit Horen Blenda-Biorit |
| 9.  | TQp      | Formasi pasangkayu         | Perselingan Batu Pasir dengan Batu Lempung setempat bersisipan Konglomerat dan Batu Gamping                                                                                                       |
| 10. | Tt/Tts   | Formasi Tinombo            | Serpilh Batu Pasir, Konglomerat, Batuan Vulkanik, Batu Gamping dan Rijang, termasuk Filit, Sabak dan Kuarsit Dekat pada Intrusi-Intrusi                                                           |

**Sumber: Peta Geologi 1:250.000, Lembah Palu, Toli-Toli, Pasangkayu, dan PPPG Tahun 2017.**

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Donggala adalah ultisol, alfisol, entisol dan histosol. Jenis tanah tersebut menyebar dari daerah pantai sampai pada daerah ketinggian. Namun secara umum jenis tanah didominasi ultisol.

a) Histosol

Histosol atau tanah gambut tersebar di kecamatan Rio Pakava dan Damsol. Histosol terbentuk akibat produksi dan

penimbunan yang lebih besar dari mineralisasinya. Kondisi ini terdapat di tempat-tempat yang selalu digenangi air sehingga sirkulasi oksigen sangat lambat.

a) Entisol

Entisol adalah jenis tanah yang baru berkembang yang banyak ditemukan di sekitar Lambah Palu dan Kecamatan Banawa. Jenis tanah ini banyak digunakan masyarakat untuk usaha pertanian.

b) Ultisol

Jenis tanah ini merupakan bagian terluas dari lahan kering yang ada dan dapat ditemukan hampir semua kecamatan. Ultisol adalah jenis tanah yang tingkat perkembangannya sudah sangat lanjut dan miskin unsur hara akibat seringnya terjadi pelindian/pencucian.

#### **2.1.1.4 Hidrologi dan Potensi Air Tanah**

Kabupaten Donggala memiliki sejumlah sumber air telah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Peruntukannya di antaranya untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi dan mencuci serta irigasi. Pemanfaatannya sumber air tentunya masih dapat dioptimalkan, sehingga keberadaannya dan penggunaannya harus terjaga dan diatur sedemikian rupa, sebab sumber air ini merupakan bagian terpenting untuk masyarakat Kabupaten Donggala, utamanya masyarakat di sekitar kawasan mata air terdekat yang dapat dilayani. Penyaluran air bersih bagi masyarakat berdasarkan sumber mata air bersih yang disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Persentase Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

| Sumber Air | Tahun dan (%) |        |
|------------|---------------|--------|
|            | 2019          | 2020   |
| Sungai     | 96.51         | 95,10  |
| Mata Air   | 3.49          | 4,90   |
|            | 100.00        | 100.00 |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, (Penyajian Data Diolah Kembali).**

Upaya yang digalakkan masyarakat dalam bentuk kerjasama untuk mengatur pemanfaatan sumber mata air telah diupayakan dengan proporsi yang seimbang serta dilakukan pembinaan dan pelestarian sumber air. Perlu pengaturan Sumber air yang ada di beberapa kecamatan dalam hal komposisi antar wilayah dan untuk kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air pada sawah beririgasi teknis dan setengah teknis. Temuan terhadap keberadaan sejumlah sumber mata air baru diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber air minum di Kabupaten Donggala secara berkelanjutan.

Pengelompokkan sumber mata air di Kabupaten Donggala dibagi menjadi: sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar, karena menjadi daerah resapan air (*catchment area*). Perlu dilakukan pengaturan pemanfaatan sumber mata air tanah dalam volume yang besar untuk keperluan komersial sehingga dapat menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber mata air tanah. Pengaturan itu antara lain meliputi:

- Tidak mempunyai muka air tanah < 3 m;
- keluasan tanah tidak lebih dari 10- 6cm/det;

- c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih dari 100 meter di hilir aliran.

Sumber air banyak dimanfaatkan untuk kepentingan air minum dan irigasi atau untuk berbagai pemanfaatan yang lainnya. Pemanfaatan sumber ini harus diatur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Donggala sendiri atau digunakan untuk masyarakat di sekitar kawasan mata air terdekat yang dapat dilayani. Untuk hal ini, diperlukan pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang serta dilakukan pembinaan dan pelestarian air sumber. Demikian juga untuk sumber air yang ada di beberapa Kecamatan meliputi:

- a. Sumber mata air di Kecamatan Banawa Tengah;
- b. Air terjun di Kecamatan Sindue Tobata;
- c. Air terjun dan Danau Talaga di Kecamatan Dampelas;
- d. Air terjun Bou di Desa Bou dan air terjun Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol;
- e. Air terjun di Desa Nupabomba, air terjun di Desa Bale, Air terjun di Desa Wombo Kalonggo Kecamatan Tanantovea;
- f. Air Terjun Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa; dan
- g. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung

Kabupaten Donggala banyak memiliki sumber kecil dan besar, serta memiliki cadangan air tanah yang cukup besar, mengingat banyak kawasan yang mampu meresapkan air. Pola ini menjadikan terdapat beberapa potensi untuk memanfaatkan air tanah di antaranya untuk pemenuhan kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Meskipun demikian diperlukan pengaturan bila akan mengambil potensi air bawah tanah dalam jumlah besar. Karena, hal ini akan sangat mempengaruhi persediaan air pada bagian bawah.



Dengan demikian, diperlukan kajian kemampuan cadangan air bawah tanah disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) jika akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi perlindungan dan konservasi daerah resapan air, perlindungan sekitar mata air serta pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

#### **2.1.1.5 Klimatologi**

Seperti wilayah Indonesia umumnya yang beriklim tropis, Kabupaten Donggala memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau (panas). Wilayah Kabupaten Donggala akan mengalami musim panas terjadi antara bulan April-September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober-Maret. Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu Tahun 2020 bahwa suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada bulan Februari (29,4 °C) dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli (26,7 °C). Sementara kelembaban udara yang dicatat pada stasiun yang sama berkisar antara 71,1 – 83,8 persen. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 83,8 persen, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 71,1 persen. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6.**  
**Parameter Cuaca di Kabupaten Donggala Menurut Bulan**  
**Tahun 2019-2020**

| <b>Bulan</b>                | <b>Suhu Udara (°C)</b> | <b>Tekanan Udara (mb)</b> | <b>Kelembaban Udara (%)</b> | <b>Penyinaran Matahari (%)</b> | <b>Curah Hujan mm/tahun</b> | <b>Kecepatan Angin (knot)</b> |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Januari                     | 28,8                   | 1011,4                    | 72,0                        | 63                             | 15                          | 4,0                           |
| Februari                    | 29,4                   | 1012,1                    | 71,1                        | 66                             | 25                          | 5,0                           |
| Maret                       | 28,2                   | 1011,8                    | 75,8                        | 61                             | 38                          | 5,0                           |
| April                       | 28,5                   | 1011,8                    | 74,9                        | 73                             | 64                          | 4,0                           |
| Mei                         | 28,7                   | 1011,1                    | 77,3                        | 128                            | 50                          | 4,0                           |
| Juni                        | 27,3                   | 1011,3                    | 80,8                        | 53                             | 89                          | 3,0                           |
| Juli                        | 26,7                   | 1010,5                    | 83,8                        | 63                             | 181                         | 3,0                           |
| Agustus                     | 27,4                   | 1011,1                    | 78,4                        | 73                             | 59                          | 3,0                           |
| September                   | 27,1                   | 1000,8                    | 82,6                        | 54                             | 304                         | 3,0                           |
| Oktober                     | 27,8                   | 1010,3                    | 78,7                        | 66                             | 48                          | 3,0                           |
| Nopember                    | 28,0                   | 1011,9                    | 77,4                        | 63                             | 42                          | 3,0                           |
| Desember                    | 28,4                   | 1009,8                    | 72,6                        | 66                             | 20                          | 3,0                           |
| <b>Rata-Rata Tahun 2020</b> | <b>28,0</b>            | <b>1010,3</b>             | <b>77,1</b>                 | <b>69</b>                      | <b>77,9</b>                 | <b>3,6</b>                    |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, (Penyajian Data Diolah Kembali).**

Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun Mutiara Palu Tahun 2020 terjadi pada bulan September 304 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu 15 mm. Sementara itu, kecepatan angin berkisar antara 3,0 – 5,0 knot, dengan rata-rata kecepatan angin 3,6 knot.

#### **2.1.1.6 Penggunaan Lahan**

Klasifikasi pola ruang penggunaan lahan di Kabupaten Donggala terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Donggala berdasarkan informasi yang dimuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang meliputi pengembangan kawasan budidaya dan

kawasan lindung dijelaskan sebagai berikut:

### **A. Kawasan Hutan Produksi**

Penggunaan lahan di Kabupaten Donggala untuk kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukkan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukkan hutan produksi yang dapat dikonversi. Rencana pengembangan hutan produksi di wilayah Kabupaten Donggala dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Rencana pengembangan hutan produksi yang dimaksud diperkirakan seluas kurang lebih 169.410 ha, meliputi: 1) Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 157.048 ha, 2) Pengembangan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 12.362 ha, dan 3) Pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 14.580 ha. Perencanaan pengembangan hutan produksi sampai dengan akhir Tahun 2020 masih tetap dipertahankan dalam rangka mendukung pelestarian dan kelestarian alam.

#### **A.1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas perlu mendapatkan pengawasan, agar dapat menghindari kegiatan penebangan secara liar. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan eksploitasi hasil hutan melalui sistem tebang pilih. Kriteria penetapan kawasan hutan produksi terbatas mencakup: 1) Tingkat kelerengan; 2) Jenis tanah; 3) Curah hujan dengan nilai skor 125-174 dan berada di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Kawasan hutan produksi terbatas juga dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*)

antara kawasan budidaya non- kehutanan dengan kawasan lindung. Rencana pengembangan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 157.048 ha, meliputi:

- (a) Kecamatan Balaesang;
- (b) Kecamatan Balaesang Tanjung;
- (c) Kecamatan Banawa Selatan;
- (d) Kecamatan Dampelas;
- (e) Kecamatan Labuan;
- (f) Kecamatan Pinembani;
- (g) Kecamatan Rio Pakava;
- (h) Kecamatan Sindue;
- (i) Kecamatan Sindue Tobata;
- (j) Kecamatan Sindue Tombusabora;
- (k) Kecamatan Sirenja;
- (l) Kecamatan Sojol;
- (m) Kecamatan Sojol Utara; dan
- (n) Kecamatan Tanantovea;

## **A.2 Kawasan Hutan Produksi Tetap**

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang dieksploitasi melalui sistem tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kriteria penetapan kawasan hutan produksi tetap mencakup: 1) Tingkat kelerengan; 2) Jenis tanah; 3) Curah hujan dengan nilai skor 124 atau kurang serta berada di luar suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan produksi tetap juga dapat difungsikan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan budidaya non- kehutanan dengan kawasan lindung.

Rencana pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 12.362 ha,

meliputi Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Rio Pakava. Kawasan hutan ini secara ruang apabila digunakan untuk budidaya hutan alam atau hutan tanaman dapat memberikan manfaat:

- (a) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi lainnya;
- (b) Meningkatkan fungsi lindung;
- (c) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- (d) Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- (e) Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- (f) Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- (g) Meningkatkan ekspor;
- (h) Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

### **A.3 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi**

Kawasan hutan produksi konversi adalah kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan bila diperlukan. Kriteria penetapan kawasan hutan konversi adalah: 1) Tingkat kelerengan; 2) jenis tanah; 3) Curah hujan dengan nilai skor 120 atau kurang dan berada di luar kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Bagi kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang pada saat ini fungsinya tidak dapat dipertahankan oleh pemanfaatan kegiatan budidaya yang intensif, maka direncanakan sebagai *holding zone* untuk dialihkan statusnya menjadi hutan konversi. Rencana pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 14.580 ha, meliputi:

- (a) Kecamatan Balaesang Tanjung;
- (b) Kecamatan Banawa Selatan;
- (c) Kecamatan Pinembani;
- (d) Kecamatan Rio Pakava;
- (e) Kecamatan Sindue Tobata;
- (f) Kecamatan Sirenja.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ini dari aspek ruang dapat dicadangkan untuk digunakan untuk mendukung dan menjadi inti pengembangan transportasi, transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

#### **A.4 Kawasan Pertanian**

Peruntukkan kawasan pertanian di Kabupaten Donggala terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. Kawasan peruntukan hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan Perkebunan; dan
- d. Kawasan peruntukan Peternakan.

Rencana wilayah pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Donggala meliputi:

- (a) Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Donggala, seluas kurang lebih 23.493.6 Ha, terdapat di Kecamatan : Rio Pakava, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Labuan, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Kecamatan Sojol Utara. Sedangkan untuk Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Donggala sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 17.046,23 Ha.



- (b) Rencana pengembangan kawasan peruntukkan hortikultura seluas kurang lebih 52.154.3 Ha, terdapat di Kecamatan : Rio Pakava, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Labuan, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Kecamatan Sojol Utara.
- (c) Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 77.254.1 Ha, terdapat di Kecamatan : Rio Pakava, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Labuan, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Kecamatan Sojol Utara. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di arahkan untuk Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
  - 1. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di pusat wilayah pengembangan;
  - 2. Pengembangan perkebunan dengan merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak;
  - 3. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
  - 4. Pengembangan pasar produksi perkebunan dan;
  - 5. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.
- (d) Kawasan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan budidaya ternak besar, ternak kecil, dan padang penggembalaan, dengan kriteria ketinggian < 1.000 meter dpl; kelerengan < 15%, dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Kawasan peternakan diarahkan bagi pengembangan peternakan skala besar dan kecil dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, ayam buras, dan ayam ras. Untuk mendukung kegiatan peternakan, di kecamatan yang potensial bagi peternakan dikembangkan program HMT (hijauan makanan

ternak) melalui pemanfaatan limbah pertanian, seperti kacang-kacangan, batang jagung, tanaman gamal, rumput penguat teras, cover crop pada kawasan perkebunan, dan sebagainya. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud, seluas kurang lebih 416,43 Ha, terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, dan Kecamatan Sindue.

### **A.5 Kawasan Industri**

Kawasan industri diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri dengan kriteria kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri, yaitu memiliki prasarana eksternal yang memadai; tersedia sumber air untuk air baku industri; tersedia badan air permukaan untuk pembuangan limbah cair industri; tersedia sumber energi; memiliki kelerengan <8%; tidak berpotensi menimbulkan dampak sosial; dan bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:

- (1) Industri besar sebagaimana, direncanakan di Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 97,61 Ha.
- (2) Industri kecil, yang telah ada di Kabupaten Donggala meliputi industri Tenun Sarung Donggala di Kecamatan : Banawa, Banawa Tengah, Labuan, Tanantovea dan Kecamatan Sindue, industri makanan olahan dan industri makanan lainnya yaitu pembuatan bawang goreng, abon ikan dan gula aren yang terdapat di Kecamatan : Banawa, Banawa Tengah, Labuan, Tanantovea dan Kecamatan Sindue, industri furniture dari kerajinan kayu eboni, meubel bambu dan meubel rotan yang terdapat di Kecamatan : Tanantovea, Labuan, Balaesang, dan Kecamatan Sirenja, Industri kerajinan dari kerajinan tempurung kelapa terdapat di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, industri bahan bangunan dari batu bata bahan konstruksi bangunan rumah, toko, kantor dan lainnya yang terdapat di Kecamatan : Banawa, Banawa Tengah, dan Kecamatan Banawa

Selatan. Industri bumbu dan produk masak yaitu pembuatan garam beryodium yang terdapat di Kecamatan : Balaesang, Sirenja, Sindue, Kecamatan Banawa, dan Kecamatan Banawa Selatan, industri kopra, minyak goreng dan minyak mentah yaitu pengolahan kelapa dan kopra menjadi minyak goreng serta *Virginn Coconut Oil* (VCO) yang terdapat di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue, industri barang kimia lainnya yaitu pengolahan minyak atsiri, minyak pakanangi, minyak nilam sebagai bahan pembuatan parfum yang terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Riopakava, industri sabuk kelapa bahan pembuatan jok mobil, spring beat dan lainnya yang terdapat di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea. Industri penggergajian kayu untuk bahan pembuatan atap, ventilasi, pintu lainnya yang terdapat di Kecamatan : Dampelas, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sirenja, Sindue Tambusabora, Sindue Tobata, Sindue, Labuan, Tanantovea, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Riopakava dan Kecamatan Pinembani.

Pengembangan kawasan industri berskala besar diarahkan di Balaesang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan utama Kota Donggala dan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Donggala secara menyeluruh. Pengembangan kawasan industri ini pada implementasinya perlu mempertimbangkan faktor-faktor teknis berkaitan dengan kepentingan operasional industri serta kelayakan lingkungan sekitar. Oleh karenanya, selain pertimbangan ketersediaan air baku, badan air penerima limbah cair, prasarana dan sarana transportasi, energi, dan telekomunikasi, serta insentif bagi investasi; perlu mempertimbangkan pula dampaknya terhadap kawasan lindung dan lingkungan di sekitarnya. Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Perindustrian di Kabupaten Donggala, yaitu :

- a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan industri sedang
- b. Pengembangan kawasan sentra industri besar

- c. Pengelolaan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
- d. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
- e. Penyediaan lahan untuk industri,
- f. Penyediaan infrastruktur,
- g. Pembuatan buffer zone, dan
- h. Menyediakan perumahan dan berbagai prasarana untuk perumahan industri.

#### **A.6 Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria memiliki obyek keindahan alam; kebudayaan dan peninggalan sejarah bernilai tinggi; dan keunikan alami sebagai suaka alam. Kawasan wisata di Kabupaten Donggala dapat digolongkan sebagai kawasan wisata alam karena sebagian besar objek/daya tarik wisata masih memanfaatkan sumberdaya alam sebagai objek utama, seperti kawasan wisata pegunungan; kawasan wisata pantai dan Laut; kawasan wisata danau dan kawasan wisata permandian.

Kawasan wisata tersebar hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala karena secara umum kondisi alam di Kabupaten Donggala masih tergolong baik sehingga berpotensi sebagai objek dan daya tarik wisata (ODTW). Kawasan peruntukan pariwisata yang merupakan pariwisata alam terdiri atas:

- a. Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung, Pulau Maputi dan Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;
- b. Tanjung Manimbaya di Kecamatan Balaesang Tanjung;
- c. Pesisir Pantai Tanjung Batu sampai Kabonga Besar Kecamatan Banawa;

- d. Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;
- e. Air Terjun di Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa, Air terjun di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Air Terjun di Desa Bou dan Air terjun Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan Desa Bale, Desa Wombo Kalonggo, Desa Nupa Bomba di Kecamatan Tanantovea;
- f. Danau Dampelas di Kecamatan Dampelas;
- g. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;
- h. Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;
- i. Pesisir pantai Bambarano di Sabang Kecamatan Dampelas;
- j. Pesanggerahan di Kecamatan Tanantovea;
- k. Sumber Air Panas di Kecamatan Sindue;

Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Donggala, yaitu :

- a. Pembenahan dan peningkatan kondisi objek wisata maupun pada sistem jaringan jalan yang menuju ke objek wisata. Disamping juga utilitas yang menunjang objek wisata tersebut.
- b. Pengelolaan usaha pemasaran pariwisata pada masyarakat luas, baik berupa periklanan di media masa, bekerjasama dengan sekolah-sekolah, maupun kerjasama dengan para pengusaha biro perjalanan dengan menawarkan rute-rute wisata terutama pada objek wisata prioritas.
- c. Membuka peluang kerjasama dalam hal pengelolaan objek-objek wisata prioritas.
- d. Pengembangan wisata bahari
- e. Pengelolaan fasilitas wisata pada obiek-objek wisata prioritas.
- f. Pengelolaan sistem transportasi yang menunjang aksesibilitas ke lokasi obiek wisata.
- g. Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dengan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan mengembangkan seni budaya pada lokasi-lokasi potensial, yaitu pada desa di sekitar objek wisata.

### **A.7 Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan diperuntukkan bagi kegiatan pengumpulan dan perdagangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui pertambakan dan kolam darat, dengan kriteria kelerengan < 8% dan persediaan air yang mencukupi. Pada akhir tahun rencana sektor perikanan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian wilayah, terutama dari kegiatan penangkapan ikan di perairan laut bagian Utara Kabupaten Donggala yang memiliki garis pantai terpanjang. Perairan laut di Utara tersebut merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Perikanan Selat Makassar yang memiliki kekayaan ikan pelagis besar dan ikan karang, seperti tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, setuhuk, cucut, pedang, layangan, kerapu, kakap, baronang, dan ekor kuning. Sedang hasil pertambakan antara lain bandeng dan udang windu. Di samping itu Kabupaten Donggala memiliki potensi bagi pengembangan budidaya biota laut lainnya, yaitu rumput laut dan keramba jaring apung.

Potensi perikanan di Kabupaten Donggala meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan. Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Donggala, seluas kurang lebih 1.493,36 Ha.

Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Donggala:

- a. Memberdayakan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengembangkan budidaya air tawar melalui pembuatan kolam ikan, usaha kolam pancing, penebaran benih ikan air tawar di waduk, embung dan sungai.
- b. Mengembangkan kawasan marine culture untuk komoditi yang bernilai ekonomi tinggi.
- c. Revitalisasi fungsi PPI sebagai sarana pendukung operasi perikanan tangkap, pembinaan oleh Pemerintah, pengumpulan data statistik perikanan dan menjamin harga jual produk perikanan tangkap melalui pelayanan TPI dan KUD.



- d. Mengembangkan teknologi perikanan tangkap dan rehabilitasi ekosistem perairan melalui pembangunan rumpon dangkal/terumbu karang buatan, pembangunan tambatan perahu dan tempat perlindungan ikan serta memberikan informasi lokasi potensi ikan yang potensial / lintasan migrasi ikan.
- e. Meningkatkan pendapatan petani khususnya scat ikan melimpah, melalui pembangunan Pasar Ikan Higienis, TPI dan timbangan kompas dalam rangka refungsionalisasi TPI.
- f. Meningkatkan produksi hasil penangkapan ikan nelayan, melalui modifikasi alat tangkap ikan.
- g. Membantu jalannya kegiatan pelelangan, melalui pengadaan sarana TPI dalam rangka peningkatan status TPI tingkat propinsi.
- h. Mempermudah koordinasi dalam memanfaatkan hasil laut, melalui Sarana Kelembagaan Sektor Perikanan dalam rangka pemberdayaan KUD.
- i. Mengendalikan dan mengatur pemanfaatan potensi sumber daya perikanan agar lebih sesuai dengan kaidah pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries/MSY) serta prinsip keadilan melalui pengaturan jalur penangkapan ikan, pengendalian jumlah kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang dipergunakan dan kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- j. Melindungi kawasan konservasi dan Pemijahan Ikan

#### **A.8 Kawasan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam terdiri atas:
  - a. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara ;

- b. Batu gamping di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue dan Sindue Tombusabora
  - c. Lempung dan Napal di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Dampelas;
  - d. Pasir felspar-kuarsa Kecamatan Sojol utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue Tombusabora, dan Kecamatan Sindue;
  - e. Granit di Kecamatan Sindue Tombusabora, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol, Sojol Utara dan Kec. Dampelas
  - f. Andesit di Kecamatan Banawa,
  - g. Diorit di Kecamatan Banawa;
  - h. Tras di Kecamatan Banawa Tengah; dan
  - i. Gabbro di Kecamatan Dampelas.
2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, yaitu emas :
    - a. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sojol;
    - b. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara;
    - c. Molibdenum di Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas;
  3. Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora
  4. Kawasan peruntukan pertambangan minyak terdapat Blok Dampelas, Blok Balaesang Tanjung dan Blok Surumana
  5. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan Kecamatan Sindue Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora.

Jenis pertambangan di Kabupaten Donggala adalah :

- Kawasan pertambangan minyak bumi yang teridentifikasi di Kabupaten Donggala berada Blok Dampelas, Blok Balaesang dan Blok Surumana. Ketiga titik potensi minyak bumi tersebut terdapat berada di lepas pantai dan saat ini Blok Surumana dalam status eksplorasi.
- potensi biji besi yang berada di Kecamatan Dampelas dan Sojol yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi.
- Logam dan batu bara di Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovean dan Kecamatan Banawa.

Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Donggala, yaitu :

- a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. Melakukan rehabilitasi/reklamasi kawasan bekas pertambangan;
- c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
- d. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai amdal, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
- e. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta

- f. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

## **B. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Donggala meliputi: 1) Kawasan Sempadan Pantai, 2) Sempadan Sungai, 3) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, 4) Kawasan Sekitar Mata Air, 5) Sempadan Irigasi.

### **B.1 Kawasan Sempadan Pantai**

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan perlindungan sempadan pantai di Kabupaten Donggala berada di 14 (empat belas) kecamatan dengan luas kawasan sempadan pantai kurang lebih 3.120.3 Ha, yaitu di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanatovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara.

Pada kawasan lindung setempat sempadan pantai ini terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, dan permukiman. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pantai, maka perlu adanya perlindungan terhadap sempadan pantai, untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dan juga untuk mengantisipasi gelombang pasang. Sehingga dilakukan pembatasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Kawasan sempadan pantai, merupakan kawasan sepanjang

pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, meliputi :

- a. Pengembangan kawasan hutan bakau; dan
- b. Perlindungan ekosistem pantai dengan pengendalian secara ketat untuk kegiatan budidaya di wilayah pesisir.

Arahan Penataan RTH Kawasan Sempadan Pantai diantaranya :

- a. Rencana kedepannya sepanjang 100 m dari pasang tertinggi akan diarahkan untuk fungsi RTH.
- b. Pada kondisi eksisting yang telah terdapat suatu kegiatan perlu dibatasi pengembangannya agar tidak berkembang dan pada akhirnya akan menutupi seluruh kawasan pesisir yang ada.
- c. Pengembangan wisata pantai dipertahankan dengan lebih memperhatikan keberadaan ekosistem alam yang ada, dengan peningkatan sarana prasarana wisata secara seimbang.
- d. Pada kawasan pesisir yang tidak dimanfaatkan segera dibuat fungsi RTH dengan penambahan fungsi hutan mangrove
- e. Jenis vegetasi yang diarahkan diantaranya : kelapa, siwalan serta tanaman untuk hutan mangrove seperti rhizophora, api-api, dan cemara laut.

## **B.2 Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Adapun kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Donggala yaitu;

1. Sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter
2. Pada anak sungai besar diluar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter
3. Pada sungai besar dan anak sungainya di kawasan pemukiman ditetapkan 15 meter.
4. Untuk sungai bertanggul diukur dari kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai

5. Untuk sungai yang tidak bertanggul diukur dari titik banjir ke arah daratan.

Rencana perlindungan kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan atau kanal yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai, meliputi :

- a. Sungai; dan
- b. Perlindungan sempadan sungai dengan pemanfaatan sebagai pariwisata alam melalui penataan kawasan tepian sungai.

Rencana penetapan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih kurang lebih 25.656.9 Ha meliputi Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanatovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara.

### **B.3 Kawasan Sempadan Danau**

Kawasan sekitar danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Adapun kriteria penetapan sempadan danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Di Kabupaten Donggala terdapat 2 (dua) danau yaitu:

- a) Danau Dampelas di Kecamatan Dampelas;
- b) Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung.

Guna meminimalisir adanya erosi dan sedimentasi pada danau, maka perlu upaya perlindungan sekitar danau dari kerusakan lingkungan. Rencana penetapan perlindungan danau di Kabupaten Donggala secara keseluruhan secara keseluruhan seluas kurang lebih 870,33 Ha. Kawasan sekitar danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau, meliputi:

- a) Kawasan danau terdapat pada Kecamatan Dampelas dan BalaesangTanjung;
- b) Pelestarian danau beserta seluruh tangkapan air di atasnya yang dimanfaatkan untuk irigasi, pengendali banjir, perikanan, dan pariwisata.

#### **B.4 Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air yaitu: sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air, berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus meter) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

#### **B.5 Kawasan Sempadan Irigasi**

Kawasan sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung maupun tidak. Kawasan ini bermanfaat untuk pelestarian saluran irigasi, baik dari sisi kualitas air maupun manfaat bagi area yang diairi. Kawasan sempadan irigasi, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung maupun tidak. Kawasan sekitar irigasi merupakan kawasan tertentu di sepanjang irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk kebutuhan air baku



pertanian, meliputi:

- a) Kawasan sempadan irigasi berdasarkan daerah irigasi;
- b) Melestarikan kawasan sumber air untuk meningkatkan debit irigasi;
- c) Pengembangan sistem saluran bagi sumber yang dimanfaatkan untuk irigasi.

### **B.6 Kawasan Suaka Margasatwa**

Kawasan suaka margasatwa Kabupaten Donggala adalah suaka margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang lebih 61 ha yang berlokasi di Kecamatan Balaesang Tanjung. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas penangkaran penyu hijau khas Kabupaten Donggala.

### **B.7 Kawasan Cagar Alam**

Kawasan cagar alam ini merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi. Di Kabupaten Donggala hanya terdapat satu cagar alam yang terdapat di Kecamatan Sojol, Dampelas, Sojol Utara. Kawasan cagar alam yaitu kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah, serta keberadaanya memerlukan upaya konservasi. Rencana perlindungan kawasan cagar alam di Kabupaten Donggala, yaitu: Kawasan cagar alam Gunung Sojol dengan luas

keseluruhan adalah kurang lebih 22.621 Ha yang terdapat di Kecamatan Sojol seluas kurang lebih 19.808 ha, Dampelas seluas kurang lebih 203 ha, Sojol Utara seluas kurang lebih 2.610 ha.

### **B.8 Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan pantai berhutan mangrove yaitu kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan hutan mangrove sebagai pembentuk ekosistem hutan mangrove dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Kawasan pantai berhutan mangrove yang jaraknya dari garis air surut terendah ke arah darat sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, sepanjang pantai di wilayah pesisir Kabupaten Donggala. Kawasan pantai berhutan mangrove ini memiliki fungsi penyeimbang lingkungan pantai sehingga harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi mangrove. Potensi kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi mangrove untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total mangrove yang ada.

Kawasan yang merupakan daerah hutan mangrove yaitu sekitar kurang lebih 312.1 Ha, yaitu antara lain :

- a. Hutan Mangrove di Kecamatan Banawa, seluas kurang lebih 13,01 Ha;
- b. Hutan Mangrove di Kecamatan Banawa Selatan, seluas kurang lebih 17,43 Ha;
- c. Hutan Mangrove di Kecamatan Balaesang, seluas kurang lebih 14,17 Ha;
- d. Hutan Mangrove di Kecamatan Balaesang Tanjung, seluas kurang lebih 25,51 Ha;
- e. Hutan Mangrove di Kecamatan Dampelas, seluas kurang lebih 23,90 Ha;
- f. Hutan Mangrove di Kecamatan Sojol, seluas kurang lebih 217,68 Ha; dan

- g. Hutan Mangrove di Kecamatan Sojol Utara, seluas kurang lebih 0,73 Ha.

### **B.9 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan meliputi: lingkungan non bangunan, lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung dan halamannya dan kebun raya yang telah memiliki umur lebih dari 50 tahun dan perlu dilestarikan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Donggala antara lain:

- a. Makam di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Desa Sipi dan Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Toaya Kecamatan Sindue, Desa Tonggolobibi, Desa Siwalempu Desa Balukang, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol;
- b. Lumpang Batu di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Tanjung, Desa Talaga dan Desa Sabang Kecamatan Dampelas;
- c. Masjid tua di Desa Toaya Kecamatan Sindue;
- d. Tapak kaki di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung dan Desa Talaga Kecamatan Dampelas;
- e. Gua di Desa Talaga Kecamatan Dampelas;
- f. Bangunan Kolonial di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol;
- g. Batu perahu Kecamatan Labuan.

### **B.10 Kawasan Permukiman**

Di Kabupaten Donggala penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Rencana pengembangan untuk kawasan permukiman adalah daerah perkotaan, perdesaan, dan pusat pertumbuhan.

### **1) Kawasan Permukiman Perdesaan**

Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Donggala arahan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada pengembangan kegiatan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan. Rencana pengembangan permukiman pedesaan di arahkan untuk lebih mendukung kegiatan agropolitan, minapolitan, dan ekowisata, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian pedesaan dengan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan acuan tersebut di atas, kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :

- a. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah.
- b. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dan lain-lain.
- d. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- e. Permukiman lahan pedesaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan pedesaan meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala kecuali Kecamatan Banawa.
- f. Memanfaatkan lokasi bekas pertambangan sebagai kawasan permukiman baru yang sebelumnya dilakukan pengurukan tanah terlebih dahulu.
- g. Memanfaatkan lokasi bekas pertambangan sebagai kawasan permukiman baru yang sebelumnya dilakukan pengurukan tanah terlebih dahulu.

Kawasan permukiman pedesaan, meliputi suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas

umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, yaitu seluas kurang lebih 21.071,55 Ha.

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, daerah peruntukan transmigrasi dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, meliputi:

- a. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir; dan
- b. Kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

## **2) Kawasan Permukiman Perkotaan**

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Donggala arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- a. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru.
- b. Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan.
- c. Penggunaan lahan eksistingnya.

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Donggala lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat

produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, lokasi bekas pertambangan dan lain-lain).

2. Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam, untuk pengembangan permukiman, maka di ambil tindakan:
  - a. Pembuatan tanggul disepanjang permukiman daerah pesisir untuk menghalangi air laut pasang sehingga tidak merusak permukiman yang ada.
  - b. Pembuatan tanggul di kawasan permukiman di sepanjang aliran sungai-sungai besar.
  - c. Mencegah timbulnya permukiman baru di sekitar kawasan pesisir khususnya disempadan pantai.
3. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan privat minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi perkotaan yang merupakan ibukota kecamatan di Kabupaten Donggala. Selain itu juga terdapat penambahan permukiman berdasarkan pengembangan kegiatan dan kelayakan lahan untuk permukiman. Kawasan permukiman perkotaan meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat perkotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya seluas kurang lebih 518,6 Ha.

Kawasan permukiman perkotaan, meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat perkotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, meliputi:

- a. Permukiman di perkotaan Donggala; dan
- b. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.

Upaya pengembangan untuk kawasan permukiman meliputi :

- a. Permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis Pengelolaannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- e. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- f. Penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan Pengelolaan perumahan secara vertikal;
- g. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- h. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta
- i. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan



permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian.

### **3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

#### **1. TNI AD**

- a. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1306/Donggala di Kecamatan Banawa;
- b. Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL);
- c. Kipan A Yonif 711 Desa Towale di Kecamatan Banawa;

#### **2. TNI AL**

- d. Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal) di Kecamatan Banawa, dan Kecamatan Sojol Utara;
- e. Posal Satrad tg. Melontobang jl. Trans Palu tolitoli di Kecamatan Sojol;

#### **3. POLISI**

- f. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) di Kecamatan Banawa;
- g. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK);

### **B.11 Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Donggala meliputi kawasan terumbu karang dan padang lamun. Kawasan ini merupakan bagian dari ekosistem laut dan pesisir. Terumbu karang dan padang lamun merupakan kawasan konservasi sumberdaya ikan yaitu kawasan perairan tepian pantai dan darat dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan secara

berkelanjutan. Kawasan ini terletak di 14 Kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Donggala. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan terumbu karang dan padang lamun terletak di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara.

Rencana perlindungan, konservasi, pelestarian dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun dengan luas kurang lebih 148 ha meliputi 14 Kecamatan pesisir melalui:

- a) Perlindungan terumbu karang dan padang lamun untuk peningkatan sumberdaya ikan, dan melarang kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumberdaya alam tersebut;
- b) Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi sumberdaya ikan.

#### **2.1.1.7 Potensi Sumberdaya dan Pengembangan Wilayah**

##### **2.1.2.1. Potensi Sumberdaya Alam**

###### **A. Pertanian**

Potensi sumberdaya alam terkait dengan sumberdaya pertanian meliputi potensi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Sementara potensi sumberdaya pertanian dalam arti luas lainnya mencakup sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan, serta sumberdaya kehutanan.

### A.1 Potensi Tanaman Pangan

Kondisi luas panen dan produksi beberapa jenis tanaman pangan disajikan pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**  
**Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala**

| No                        | Deskripsi    | 2019    | 2020*  |
|---------------------------|--------------|---------|--------|
| <b>A. Luas Panen (Ha)</b> |              |         |        |
|                           | Padi         | 26.801  | 20.875 |
|                           | Jagung       | 10.190  | 10.873 |
|                           | Kedelai      | 367     | 1.311  |
|                           | Kacang Tanah | 347     | 420    |
|                           | Kacang Hijau | 50      | 39     |
|                           | Ubi Kayu     | 190     | 211    |
|                           | Ubi Jalar    | 70      | 105    |
| <b>B. Produksi (Ton)</b>  |              |         |        |
|                           | Padi         | 120.550 | 95.030 |
|                           | Jagung       | 60.694  | 63.975 |
|                           | Kedelai      | 325     | 1.642  |
|                           | Kacang Tanah | 283     | 417    |
|                           | Kacang Hijau | 22      | 23     |
|                           | Ubi Kayu     | 2.517   | 3.916  |
|                           | Ubi Jalar    | 1.060   | 1.472  |

**Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2019 dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020-2021 (data diolah)**  
**\*Data masih sementara**

Rencana pengelolaan sawah di Kabupaten Donggala diarahkan sebagai berikut:

- Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
- Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 persen dan sebelum dilakukan perubahan atau alih

- fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- c) Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 persen dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
  - d) Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi, maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
  - e) Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
  - f) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan holtikultura dengan mengembangkan *kawasan good agriculture practices*;
  - g) Perubahan sawah irigasi teknis menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan yang memiliki perkembangan sangat tinggi (misalnya jalan arteri dan jalan kolektor), maka peralihan fungsi dibatasi maksimal adalah 100 meter dari as jalan.

## **A.2 Hortikultura**

Peruntukkan lahan untuk kawasan hortikultura di Kabupaten Donggala dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan hasil produksi tanaman hortikultura. Luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Donggala yang terbesar pada Tahun 2020 adalah komoditas cabai rawit dengan luas panen sebesar 450 ha dan produksi yang mencapai 5.233 ton. Luas panen terbesar tersebut berasal dari Kecamatan Sindue Tobata Sementara untuk produksi buah pisang yang terbesar berasal dari Kecamatan Sindue dan Sindue Tombusabora dengan total produksi 14.017 ton pada Tahun 2020. Pencapaian hasil produksi tanaman sayuran pada Tahun 2020 adalah sebesar 10.232 ton, dapat dikemukakan bahwa komoditas sayuran mengalami penurunan produksi sebesar 4.185 ton dari Tahun 2019 yang mencapai 14.417 ton. Pencapaian luas panen komoditi sayuran Tahun 2020 adalah 1.565 ha, naik sebesar 97 ha dibandingkan pada Tahun 2019 yang mencapai 1.468 Ha, dengan produktivitas Tahun 2020 sebesar 65,38 Ku/ha menurun dari Tahun 2019 yang mencapai 98,19 Ku/ha (LAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, 2021).

Perkembangan komoditas buah-buahan pada Tahun 2020 menunjukkan penurunan baik untuk produksi maupun luas panen sedangkan untuk produktivitasnya meningkat. Pencapaian produksi buah-buahan Tahun 2020 sebesar 49.552 ton menunjukkan penurunan produksi sebesar 395,6 ton dibandingkan pada Tahun 2019 yang mencapai 53.939 ton. Luas panen 1.130,6 ha menurun sebesar 1.219 ha dari tahun sebelumnya yang mencapai luas 2.349 ha. Dengan produktivitas pada tahun 2020 438 ku/ha meningkat sebesar 208,6 ku/ha dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 229,6 ku/ha.

### **A.3 Kawasan Perkebunan**

Kawasan Perkebunan, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk produksi tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan, maupun bahan baku industri dengan kriteria kawasan: ketinggian lahan < 2.000 meter dpl; kelerengan < 40 persen; dan kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm. Kawasan perkebunan di Kabupaten Donggala selain diarahkan untuk pengembangan perkebunan skala besar yang diusahakan oleh kegiatan usaha berbadan hukum, juga diarahkan bagi pengembangan perkebunan rakyat. Pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui perluasan dan peningkatan produktivitas lahan dengan beragam komoditi, antara lain jenis tanaman utama kelapa, kakao, dan kelapa sawit.

Daerah yang saat ini memiliki potensi kawasan perkebunan adalah Kecamatan Sojol Utara, Sojol, Dampelas, Balaesang Tanjung, Balaesang, Sirenja, Sindue, Banawa Tengah, Banawa Selatan dan Rio Pakava. Sektor perkebunan merupakan salah satu andalan Kabupaten Donggala. Sebagian besar masyarakatnya berusaha di sektor ini. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Donggala Tahun 2020 terdiri dari tanaman Kelapa Sawit, Kelapa, kakao dan Kopi serta beberapa jenis tanaman lainnya.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan diarahkan untuk:

- a) Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- b) Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di pusat wilayah pengembangan;
- c) Pengembangan perkebunan dengan merehabilitas tanaman perkebunan yang rusak;

- d) Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian panganlahan kering;
- e) Pengembangan pasar produksi perkebunan dan;
- f) Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentukketerikatan antar produk.

#### **A.4 Potensi Peternakan**

Kawasan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan budidaya ternak besar, ternak kecil, dan padang penggembalaan, dengan kriteria ketinggian < 1.000 meter dpl; kelerengan <15 persen, dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Kawasan peternakan diarahkan bagi pengembangan peternakan skala besar dan kecil dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, ayam buras, dan ayam ras. Untuk mendukung kegiatan peternakan, di kecamatan yang potensial bagi peternakan dikembangkan program pengembangan HMT (hijauan makanan ternak) melalui pemanfaatan limbah pertanian, seperti kacang- kacangan, batang jagung, tanaman gamal, rumput penguat teras, *cover crop* pada kawasan perkebunan, dan sebagainya. Pengembangan kawasan peternakan di antaranya di Kecamatan Dampelas, Balaesang, Sirenja dan Banawa namun masih berasosiasi dengan lahan yang potensial untuk peruntukkan lahan pertanian.

Populasi ternak besar dan kecil yang terdiri dari Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Domba, dan Babi di Kabupaten Donggala pada Tahun 2020 adalah kerbau 8 ekor, sapi 40.486 ekor, kuda 15 ekor, kambing 43.777 ekor, domba 39 ekor dan babi 8.549 ekor. Populasi ternak unggas untuk jenis ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik adalah ayam pedaging 514.000 ekor, ayam petelur 56.650 ekor, ayam buras 362.558 ekor, dan itik 8.749 ekor.



Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan peternakan di Kabupaten Donggala ditujukan untuk:

- a) Peningkatan produksi dan populasi ternak untuk pemenuhan pangan dengan mempertimbangkan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- b) Meningkatkan pendapatan petani ternak dan pemerataan kesempatan kerja.

#### **A.5 Perikanan dan Kelautan**

Kawasan kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi kegiatan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) serta Kelautan. Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian wilayah, terutama pada Perikanan Tangkap melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan laut bagian utara Kabupaten Donggala yang memiliki garis pantai terpanjang. Potensi perikanan tangkap yang dimiliki Kabupaten Donggala cukup besar, jika dikelola secara optimal, potensi lestari yang dapat dicapai adalah sekitar 99.100,8 ton/tahun. Jenis ikan yang terdapat di perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi meliputi ikan pelagis dan ikan demersal.

Hasil Perikanan Budidaya melalui kegiatan usaha perikanan budidaya air tawar berbasis teknologi perkolaman, Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap; Usaha Perikanan Budidaya Air Payau berbasis teknologi pertambakan; dan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut berbasis pada teknologi KJA dan *Pen Culture*. Untuk mendukung produksi hasil perikanan, dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diperlukan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, kegiatan ini mutlak dilakukan sebagai upaya untuk pelestarian dan pencegahan tindakan pencurian ikan atau penangkapan ikan

dengan merusak ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) didampingi Polisi Perairan TNI AL.

Kegiatan Pengelolaan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Sosialisasi dan Upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) memegang peranan penting pada produksi hasil perikanan. Produksi komoditi perikanan merupakan komoditi yang cepat mengalami kerusakan (*perishable*) sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik untuk menjamin kualitas yang layak dikonsumsi oleh konsumen. P2HP dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (*Cool Chain System-CCS*) di TPI, selain penerapan CCS pada setiap kantong produksi perikanan dilakukan kegiatan pengolahan dan pengasapan ikan untuk mendapatkan hasil produk olahan dengan mutu yang lebih baik. Data potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8.**  
**Data Potensi Pengembangan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Donggala**

| Potensi                  | Luas (Ha) | Lokasi                            | Usulan Pengembangan                                                          |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perikanan Tangkap</b> |           |                                   |                                                                              |
| Ikan Pelagis             |           | Laut Sulawesi dan Selat Makassar. | Pengembangan dan Peningkatan Armada Penangkapan berbasis kawasan minapolitan |
| Ikan Demersal            |           |                                   | Pengkayaan Stok Sumberdaya Ikan di Laut                                      |

|                           |          |                                                                          |                                                                                               |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |          |                                                                          | dan perairan umum                                                                             |
|                           |          | Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Sojol Utara                            | Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TPI.                                            |
| <b>Perikanan Budidaya</b> |          |                                                                          |                                                                                               |
| Budidaya Air Payau        | 3.845    | Kecamatan Banawa Tengah, Banawa Selatan, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara | Pembangunan Tambak Percontohan di Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi                           |
|                           |          |                                                                          | Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Tambak Rakyat.                                          |
|                           |          |                                                                          | Pengembangan UPP Budidaya di Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol.                       |
|                           |          |                                                                          | Penciptaan dan Pengkajian kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kecamatan Banawa Selatan. |
| Budidaya Air Laut         | 10.364,8 | Kecamatan Banawa Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol dan Sojol utara     | Meningkatkan Pembenihan swasta ikan kerapu sebagai pusat produksi benih.                      |
|                           |          |                                                                          | Pengembangan budidaya Ikan Kerapu ekonomis penting.                                           |
|                           |          |                                                                          | Pengembangan Budidaya Rumput Laut.                                                            |
|                           |          |                                                                          | Pembangunan Budidaya Taripang                                                                 |
| Budidaya Air Tawar        | 2.189    | Kecamatan Ri                                                             | Pembangunan Balai benih                                                                       |

|                                                          |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                  | o Pakava, Banawa Selatan, Labuan, Sindue, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol    | <p>Ikan (BBI) Rano, BBI Labuan.</p> <p>Pengembangan Budi daya Perkolaman.</p> <p>Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap.</p> <p>Pengembangan Buddidaya Ikan air tawar di Kec. Sirenja, Kec. Riopakava, Kecamatan Labuan.</p> |
| <b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) :</b> |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Usaha Perikanan Konsumsi :</b>                        |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pengolahan Ikan                                          |                  | Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea                                        | <p>Pembinaan Manajemen usaha dan Pemasarananya ikan olahan.</p> <p>Pembinaan Teknolog pengolahan hasil Perikanan.</p>                                                                                                                            |
| <b>Potensi</b>                                           | <b>Luas (Ha)</b> | <b>Lokasi</b>                                                                                       | <b>Usulan Pengembangan</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Pengeringan Ikan Teri                                    |                  | Kecamatan Banawa Selatan dan Balaesang, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sojol dan Kecamatan | <p>Pembinaan Manajemen usaha dan Pemasarananya ikan olahan.</p> <p>Pembinaan Teknolog pengolahan hasil Perikanan.</p>                                                                                                                            |

|                                                     |  |                                                                            |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  | tan Sojol Utara                                                            |                                                                                                                                                       |
| Pengasapan Rono Tapa dan Ikan Roa                   |  | Kecamatan Sindue, Balaesang Tanjung dan Kec. Banawa Tengah.                | Pembangunan Sentra olahan berbasis komoditi lokal.                                                                                                    |
| Ikan Segar/ Ikan Basah                              |  | Kecamatan Banawa Selatan, Sindue, Sirenja, Balaesang, Sojol, Sojol Utara   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin ( <i>Cool Chain System-CCS</i> ).<br>Pengembangan dan Pembangunan prasarana pemasaran.          |
| <b>Usaha Ikan Non Konsumsi :</b>                    |  |                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Pengelolaan usaha ikan hias                         |  | Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung | Pembangunan prasarana sentra pemasaran ikan hias.<br>Penguatan kelembagaan pengolah ikan hias.<br>Optimalisasi asosiasi ikan hias Kabupaten Donggala. |
| Pengelolaan Usaha Kerang-Kerangan                   |  | Kecamatan Banawa, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Sojol                  | Penguatan kelembagaan pengolah kerang-kerangan.                                                                                                       |
| <b>Kelautan :</b>                                   |  |                                                                            |                                                                                                                                                       |
| <b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b> |  |                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Ekosistem sumberdaya                                |  | Kecamatan Banawa                                                           | Pengembangan dan Penguatan                                                                                                                            |

|                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a Perikanan Laut dan Perairan Umum                                     |  | Selatan dan Balaesang, Balaesang Tanjung, Sindue Tombusabora, Sojol dan Sojol Utara | Kelembagaan sistem pengawasan.                                                   |
|                                                                        |  |                                                                                     | Pembangunan dan Peningkatan habitat Sumberdaya Perikanan.                        |
| Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                          |  |                                                                                     |                                                                                  |
| Panjan Pesisir Pantai 414 Km dengan ketersediaa n 15 Pulau pulau kecil |  | 14 Kecamatan Wilayah Pesisir                                                        | Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemanfaatan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. |
|                                                                        |  |                                                                                     | Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.                              |

**Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2017 (Data Diolah Kembali Penyajiannya Mengacu pada RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2018)**

Potensi perikanan di Kabupaten Donggala meliputi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Kelautan.

a) Perikanan Tangkap:

Rencana pengembangan untuk perikanan tangkap meliputi:

- 1) Pemberdayaan nelayan skala 3-10 Gross Ton (GT);
- 2) Restrukturisasi armada > 10 GT;
- 3) Fasilitasi Sarana Penangkapan Ikan program 1000 Katinting;
- 4) Pemulihan sumberdaya ikan (SDI) melalui *Restocking*;
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana dari TPI Menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- 6) Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Balaesang.

## b) Perikanan Budidaya

### 1) Perikanan budidaya air payau.

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau meliputi:

- a. Peningkatan tambak percontohan di Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol;
- b. Peningkatan teknologi produksi tambak rakyat sistem polikultur dan monokultur;
- c. Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya wilayah pantai barat;
- d. Penciptaan dan pengkajian kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Banawa Selatan.

### 2) Perikanan budidaya air laut.

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air laut meliputi:

- a. Optimalisasi peran pembenihan swasta ikan kerapu sebagai sentra produksi benih;
- b. Peningkatan budidaya ikan kerapu melalui teknologi Karamba Jaring Apung (KJA) di perairan laut pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Pembangunan budidaya teripang melalui teknologi *pen culture*;
- d. Pengembangan budidaya rumput laut teknologi *long line*, lepas dasar dan rakit apung.

### 3) Perikanan budidaya air tawar.

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi:

- a. Pembangunan dan Pengembangan balai benih ikan (BBI) Dinas Perikanan sebagai produksi benih berkualitas;
- b. Pembangunan dan Pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) pada kawasan perikanan budidaya air



tawar;

- c. Pemanfaatan lahan kritis seperti eks lahan sawah yang produktif dengan teknologi perkolaman usaha ikan konsumsi dan kolam pemancingan dan perairan umum seperti Danau Rano dan Danau Talaga dengan teknologi keramba jaring apung/keramba tancap sebagai kawasan baru perikanan budidaya air tawar.

c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Rencana pengembangan kawasan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) meliputi:

1) Usaha Perikanan Konsumsi

- a. Pembinaan manajemen usaha dan pemasaran abon ikan, bakso ikan, ikan Teri, ikan asin, ikan roa sistem pengasapan dan olahan lainnya pada sentra produksi hasil perikanan;
- b. Pembangunan Sentra olahan berbasis komoditi lokal khususnya rono tapa dan ikan roa;
- c. Penerapan Sistem Rantai Dingin (*Cool Chain System-CCS*) di sentra produksi hasil perikanan;
- d. Pembangunan dan optimalisasi pabrik es dan *cool storage*;
- e. Pembangunan Pasar Ikan tradisional menjadi pasar ikan Modern.

2) Usaha Ikan Non Konsumsi

- a. Pembangunan dan pengelolaan prasarana sentra pemasaran ikan hias di kawasan strategis wisata bahari;
- b. Penguatan kelembagaan pengolah ikan hias;
- c. Optimalisasi asosiasi ikan hias Kabupaten Donggala;
- d. Penguatan kelembagaan pengolah kerang dan kerangan.

d) Kelautan

Rencana pengembangan kawasan Kelautan meliputi:

1) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

- a. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan kelompok pengawasan masyarakat (POKMASWAS);
- b. Operasi pengawasan rutin/berkala dan terpadu merupakan *shock therapy* kegiatan nelayan ilegal melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS);
- c. Konservasi terumbu karang berupa pembuatan rumah ikan (*Fish Home*).

2) Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- a. Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peningkatan jalan produksi/jalan setapak di pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil berupa jetty Akses listrik dan air bersih;
- d. Peningkatan rehabilitasi terumbu karang dalam mendukung kawasan wisata pesisir;
- e. Penguatan kelembagaan kearifan lokal dalam pengelolaan laut pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pemberdayaan masyarakat pesisir, sosialisasi dan upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Donggala:

- 1) Memberdayakan potensi desa pesisir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Perikanan Tangkap, perikanan budidaya, pengeolahan dan pemasaran hasil serta membangun infrastruktur wilayah pesisir;
- 2) Revitalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai sarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan usaha perikanan tangkap, Pelayanan PPI dapat menjamin harga jual produk perikanan tangkap yang menguntungkan nelayan produsen;

- 3) Pembangunan tambatan perahu nelayan, sarana perbengkelan kapal motor perikanan dalam kawasan PPI;
- 4) Meningkatkan produksi hasil perikanan, melalui penerapan alat bantu teknologi penangkapan dengan memodifikasi alat tangkap ikan, pembuatan rumpon laut dangkal, rumpon laut dalam, penambahan armada penangkapan ikan;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan untuk mengembangkan perikanan budidaya air tawar melalui pembuatan kolam ikan, usaha kolam pemancingan, penebaran benih ikan air tawar di perairan umum seperti di waduk, sungai dan danau;
- 6) Mengembangkan kawasan perikanan budidaya air laut (*marine culture*) untuk komoditi yang bernilai ekonomi tinggi seperti ikan kerapu macan dan tikus dengan sistem penerapan Keramba Jaring Apung;
- 7) Rehabilitasi ekosistem perairan melalui pembangunan *fish home*, tranplantasi terumbu karang buatan, penanaman *mangrove*;
- 8) Meningkatkan pendapatan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar hasil perikanan, melalui pembangunan Pasar Ikan Higienis, TPI, Pemasaran antar pulau;
- 9) Mempermudah koordinasi dalam pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, melalui lembaga usaha

mikro (KUD) Mina di Sektor Perikanan;

- 10) Mengendalikan dan mengatur pemanfaatan potensi sumber daya perikanan agar lebih sesuai dengan kaidah pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries/MSY*) serta prinsip keadilan melalui pengaturan jalur penangkapan ikan, pengendalian jumlah kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang dipergunakan dan kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

#### A.6 Potensi Hutan dan Non Hutan

Potensi hutan dan non hutan serta luas penggunaan di Kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9.**  
**Potensi Hutan dan Non Hutan di Kabupaten Donggala Tahun 2020**

| No            | Jenis Penggunaan                | Luas (Ha)      | Persentase (%) |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.            | Hutan Lindung                   | 87.707         | 29,68          |
| 2.            | Hutan Produksi                  | 12.228         | 4,14           |
| 3.            | HPT                             | 157.048        | 53,15          |
| 4.            | Hutan Produksi dapat Dikonversi | 14.587         | 4,94           |
| 5.            | Kawasan Suaka Alam (KSA)        | 23.913         | 8,09           |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>295.483</b> | <b>100,00</b>  |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah.**

Total kawasan Hutan seluas sebesar 295.483 Ha atau 56,01 % dari total luas wilayah Kabupaten Donggala yang mencakup antara lain; Hutan Lindung, Hutan Produksi

Terbatas (HPT), Hutan Produksi yang dapat dikonservasi dan KSA.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 635/menhut/II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 94,759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 8.409 (Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan) Ha, dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +91 (sembilan puluh satu) Ha.

Kawasan Non hutan yang merupakan pewilayahan komoditas sebagai suatu kesatuan fungsional kawasan yang mempunyai karakter kegiatan budidaya komoditi pertanian tertentu yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi kawasan-kawasan sentral produksi dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan budidaya komoditas unggulan. Perwilayahan komoditas di daerah ditentukan atas dasar hasil penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas unggulan, keadaan wilayah secara umum serta kondisi penggunaan lahan saat ini. Dari hasil analisis dari penggunaan lahan antara lain; Perkebunan dengan luasan sebesar 89.929 Ha, Sawah dengan luas 30.887 Ha.

## **B. Potensi dan Jaringan Air Minum**

Pengembangan layanan air minum bagi masyarakat sangat perlu dilakukan mengingat fungsi dari air minum tersebut yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan akan air minum, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya.

Rencana pengembangan jaringan air minum meliputi

jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) yang memanfaatkan mata air dan sumber air bawah tanah. Jaringan air minum ke kelompok pengguna berupa jaringan perpipaan air minum Palu dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum yang memanfaatkan mata air di Kecamatan Banawa Tengah dan sumber air bawah tanah di seluruh Kecamatan. Upaya penanganan untuk meningkatkan layanan fasilitas air minum di Kabupaten Donggala seperti:

1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
2. Perluasan daerah tangkapan air.

Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum oleh PDAM dengan peningkatan sistem jaringan air minum hingga ke wilayah perdesaan.

### C. Potensi Mineral

Kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Donggala terdiri dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Batuan/Galian C sebesar 650,00 Ha atau 0,12 persen, Wilayah Pertambangan (WP) Mineral Logam dan Batubara.

1. **Tembaga;** Terdapat di 6 titik lokasi, kesemuanya masih berupa indikasi yang ditemukan pada bongkah-bongkah batuan intrusi granodiorit, diorit dan malihan yang dipotong oleh urat kuarsa.
2. **Timbal;** Berupa indikasi mineralisasi timbal/galena, ditemukan pada singkapan maupun bongkah-bongkah batuan intrusi granit dan granodiorit yang diterobos oleh urat-urat kuarsa, di 6 titik lokasi.
3. **Bahan Galian Non Logam;** Beberapa jenis bahan galian non-logam di daerah Kabupaten Donggala antara lain

adalah *granit/diorit/andesit* (16 titik lokasi dengan jumlah sumberdaya 281.873,93 juta ton), *sirtu / pasir* (29 titik lokasi sirtu/pasir, besar sumberdaya sebanyak 1.80 juta ton), *lempung* (4 titik lokasi dengan potensi sumberdaya sebesar 12,65 juta ton), *batugamping* (potensi sumberdaya berjumlah 695,65 juta ton), sebahagian besar potensi tersebut berada di Kecamatan Banawa yang merupakan daerah konsesi PT. Cipta Cakra Murti, *pasir kuarsa*, (3 titik lokasi) dengan jumlah potensi sebesar 0,05 juta ton, *felsfar* (4 titik lokasi) dengan jumlah potensi sumberdaya sebesar 40,81 juta ton, *kaolin* (terdapat pada 1 titik lokasi), sumberdaya belum diketahui dan sampai sekarang belum diusahakan, *mika* (2 titik lokasi), potensi sumber dayanya belum diketahui, *kalsedon* (1 titik lokasi), berupa indikasi pada endapan alluvial yang terdiri dari bongkah-bongkah kalsedon bersama dengan rijang, agat dan jasper, potensi sumberdaya endapan ini belum diketahui.

4. **Batubara;** Ditemukan di Desa *peat*” hingga Toaya hingga Tamarenja, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, merupakan batu bara jenis “ *lignit brown coal*” dengan ketebalan 0,15-3,0 m, penyebarannya  $\pm$  15 ha, terdapat dalam Formasi Molasa berselang seling dengan lempung dan batupasir. Hasil analisis batubara tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala menunjukkan komposisi dari kadar air 20,79 persen, abu 9,68 persen, fix carbon 29,55 persen, belerang 1,26 persen dan nilai kalori 4130 kkal. Potensi sumberdaya batubara belum diketahui.
5. **Energi Listrik;** Energi listrik di Kabupaten Donggala pada Tahun 2020 disuplai dari PLN rayon Donggala dan



Tambu dengan Jumlah pelanggan Rayon Donggala sebanyak 48.851 dan Rayon Tambu sebanyak 31.677. Daya Terpasang *Installed Electricity Power* Rayon Donggala sebesar 7.800 KW dan Tambu sebesar 4.700 KW. Produksi Listrik *Electricity Production* (KWh) Rayon Donggala sebesar 65.065.497 KWh dan Tambu sebesar 38.787.199 KWh. Jumlah tenaga listrik yang terpakai/terjual sebanyak Donggala 58.476.008 dan Tambu 27.691.822.

#### **D. Potensi Pariwisata**

Donggala adalah sebuah kota tua yang terletak  $\pm$  34 Km Timur Laut dari Kota Palu. Dengan arsitektur Belanda yang masih menghiasi kota, Donggala juga mempunyai banyak obyek wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi, antara lain Pantai Tanjung Karang, Pusentasi (kolam air asin), pantai Kaluku, pantai Labuana, pantai Bambarano, Air Terjun Pawelua, Pulau Pasoso, dan lain-lain. Selain wisata daratan, perairan Donggala juga memiliki pemandangan bawah Laut yang sangat indah dan baik untuk lokasi penyelaman (diving) antara lain di Rumah Bupati, Enu, Pasi pome, Batu Suyu dan Atoll Besar.

Wisatawan yang berkunjung juga dapat membeli oleh-oleh berupa Kain Tenun Donggala, dengan sentra produksinya antara lain di Desa Towale. Kain tenun Donggala atau sarung sutra Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Dikatakan tenun tradisional, karena proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang tradisional dilakukan oleh kaum perempuan di Donggala.

#### **2.1.1.8 Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Donggala**

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan tentang kawasan strategis, yang dikenal dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Sebagai kawasan strategis yang diprioritaskan, maka kawasan strategis ini dari sudut proses perencanaan, akan diprioritaskan penyusunan rencana rincinya, masing-masing pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

PP Nomor 26/2008 tentang RTRWN, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 75 dikemukakan bahwa penetapan kawasan strategis nasional (KSN) dilakukan berdasarkan kepentingan:

- 1) Pertahanan Keamanan,
- 2) Pertumbuhan Ekonomi,
- 3) Sosial dan Budaya,
- 4) Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi;  
dan/atau
- 5) Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

##### **A. Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan RTRWN, Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Donggala yaitu :

- a. Wilayah Sungai (SW) Palu – Lariang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dan kewenangan Nasional serta merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup;

- b. Cagar Alam Gunung Sojol yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan lingkungan hidup;
- c. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan lingkungan hidup.

## **B. Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Donggala, terdiri atas:

- a. Kawasan Dampelas dan sekitarnya, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Lalundu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. Kawasan Surumana yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- d. Kawasan terusan khatulistiwa yang meliputi Parigi Moutong- Donggala yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

## **C. Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah penataan ruangnya yang di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Dasar penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK) Donggala adalah substansi rencana yang telah ditetapkan di depan, yaitu meliputi:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Donggala;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Donggala;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Donggala; serta
4. Penetapan KSN dan KSP yang terletak atau terkena dengan wilayah Kabupaten Donggala.

Selanjutnya untuk penetapan KSK Donggala menurut sudut kepentingan, karakter pengembangan KSK, dan arahan penanganan KSK terlebih dahulu diperhatikan penetapan KSK Donggala dalam RTRW Kabupaten Donggala 2018-2038, dan kemudian dilakukan kajian untuk merumuskan karakter pengembangan dan arahan penanganan kawasan strategis kabupaten (KSK) tersebut.

### **C.1 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi**

Penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
12. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
13. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Sedangkan didasari analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Donggala terdiri atas:

- a) Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan di Sojol, Balaesang dan Rio Pakava.

Pengembangan agropolitan didasari dengan ketersediaan dan kontribusi pertanian pada wilayah tersebut. Komoditi yang menjadi *core busnesses* diwilayah pengembangan ini adalah pertanian sawah dan perkebunan kelapa sawit. Dalam pengembangannya harus dilakukan pengembangan produk pertanian secara optimal, pemanfaatan SDM sebagai sumber daya masa depan, pengembangan kegiatan perdagangan untuk mendukung sektor pertanian, pengembangan infrastruktur pendukung rencana pengembangan tanaman, penyediaan lahan untuk daerah berkembang disekitar KSK Agropolitan sebagai kawasan perdagangan, mempersiapkan Kecamatan Sojol, Balaesang, dan Rio Pakava sebagai pusat pertumbuhan karena didukung oleh pengembangan , dan pengembangan jalur angkutan barang. Pengembangan ke depan diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan, sehingga memungkinkan berkembangnya industri-industri yang memiliki kaitan ke depan dan kebelakang dari usaha pertanian ini.

- b) Kawasan Strategis Kabupaten Minapolitan di Balaesang Tanjung, Banawa, Banawa Selatan dan Sojol.

Kawasan minapolitan di Kabupaten Donggala dilihat dari produksi perikanan terbesar yaitu di Kecamatan Balaesang Tanjung, Banawa, Banawa Selatan dan Sojol. Perikanan yang dapat dikembangkan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan KSK Minapolitan di Kabupaten Donggala sudah difasilitasi dengan adanya PPI sehingga sudah terdapat ruang untuk mengumpulkan hasil produksi ikan, namun terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kawasan minapolitan ini seperti pengembangan SDM dan pengelolaan produk dari hulu sampai ke pemasaran.

- c) Kawasan Strategis Kabupaten Pariwisata Bahari di Banawa, Banawa Tengah, Balaesang Tanjung dan Dampelas

Kabupaten Donggala memiliki potensi yang beragam salah satunya yaitu pariwisata. Destinasi wisata yang menjadi potensi terbesar yaitu berada di Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Balaesang Tanjung dan Dampelas. Beberapa destinasi wisata tersebut yaitu Danau Dampelas di Kecamatan Dampelas; Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung; Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah; Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa; Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung. Destinasi wisata yang sudah ada perlu dikembangkan dari sisi manajemen dan pemasarannya agar pariwisata di Kabupaten Donggala kedepannya dapat menjadi destinasi wisata nasional bahkan internasional yang dapat bersaing dengan wilayah lain.

## **C.2 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sisi Sosial Budaya/Sejarah**

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Didasari analisa yang bertumpu kepada sosial budaya, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Donggala yaitu Kawasan Strategis Kabupaten Kota Tua di Banawa. Kota Tua dengan adanya gedung-gedung tempo dulu memiliki daya tarik tersendiri sebagai sejarah berkembangnya Kabupaten Donggala yang perlu dilestarikan dan dijaga nilai budaya/sejarahnya. Penanganan kawasan strategis sosial budaya khususnya yang berada di Kota Donggala dilakukan dengan pengembangan kegiatan *home industry* Kain Tenun Sarung Donggala dan pengembangan wisata budaya asli yang ada di Kabupaten Donggala.

### **C.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;



6. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

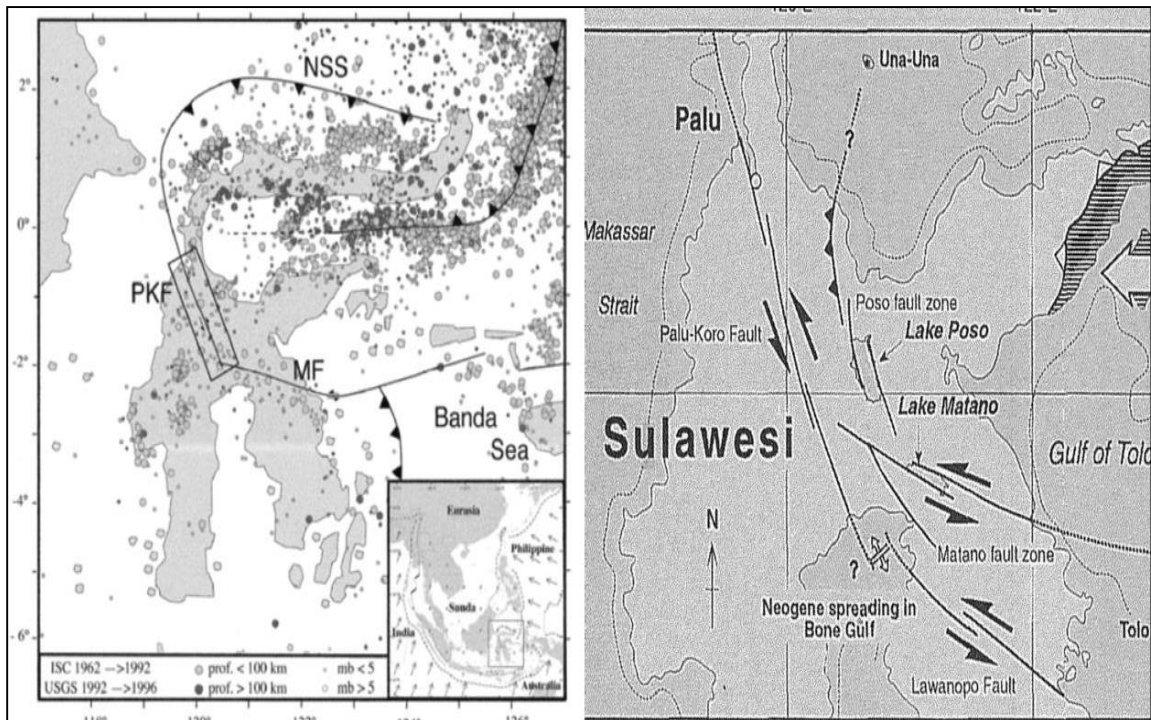
Didasari analisa yang bertumpu kepada kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Donggala yaitu Kawasan Strategis Kabupaten Cagar Alam Gunung Sojol. Kawasan cagar alam Gunung Sojol dengan luas  $\pm 22.621$  Ha meliputi Kecamatan Sojol, Dampelas, Sojol Utara. Arahana Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Peningkatan pengembangan perekonomian yang ada di kawasan strategi penyelamatan lingkungan hidup
- b. Melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Donggala
- c. Mempertahankan kawasan tersebut sebagai kawasan strategi penyelamatan lingkungan hidup.

#### **2.1.1.9 Aspek Kerawanan Bencana Alam**

##### **A. Kegempaan dan Dampak Yang Ditimbulkan**

Dari aspek kegempaan, sistem patahan di bagian tengah Sulawesi di mana Kota Palu terdapat terdiri dari kompleks zona patahan yang terletak dalam pertemuan lempeng Pasifik, Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dari perhitungan terhadap pergerakan patahan Palu-Koro ini (Bellier, O. *et al*, 2001), diperoleh data kisaran pergerakan lempeng, yaitu  $35 \pm 8$  mm per tahun. Sejarah gempa bumi di bagian tengah Sulawesi telah tercatat sejak abad ke-19, di mana beberapa di antaranya mempunyai magnitude yang besar, yakni tahun 1968 (6,7 SR), 1993 (5,8 SR), dan 2005 (6,2 SR), serta dan 7,4 SR pada Tanggal 28 September 2018. Pergerakan lempengan pada Sesar Palu-Koro disajikan padagambar berikut;



Gambar 2.3.

**Kondisi Kegempaan di Wilayah Sulawesi KF: Palu Koro Fault (Patahan Palu-Koro), MF: Matano Fault (Patahan Matano) (Bellier, O. *et.all*, 2001**

Pada Gambar 2.3 diperlihatkan jalur patahan yang melalui bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat berada di bagian tengah yang membelah Kota Palu bagian timur dan barat. Bencana alam bersifat geologi yang terjadi di Sulawesi Tengah sangat terkait dengan kondisi dan proses- proses geologi yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Termasuk di antaranya adalah patahan aktif Palu-Koro, patahan Matano melewati wilayah Kabupaten Morowali dan patahan Sorong yang mendorong bagian timur Sulawesi. Bentuk topografi, tekstur tanah umumnya berpasir di wilayah Palu dan Donggala, serta rawan longsor pada banyak kawasan serta ruas-ruas jalan strategis di wilayah pantai Barat atau Selat Makassar sangat terkait dengan struktur material yang rapuh serta dapat dipicu oleh kegempaan.

Mekanisme sesar Palu-Koro adalah sesar geser kiri dengan

pergeseran relatif menurut beberapa tulisan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan 5 mm/tahun, 23-28 mm/tahun dan ada 44 mm/tahun yang dapat menimbulkan gempa dengan magnitudo maksimum 7,3 Skala Richter. Secara kolektif sejak terbentuk, sesar ini telah menghasilkan total pergeseran batuan kurang lebih 20 km ke arah barat laut, ditandai dengan batuan-batuan di utara jalur sesar yang bergeser sepanjang sekitar 20 km tadi. Sesar ini terbentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng Samudera Pasifik yang bergerak ke arah barat. Pergerakan ini telah menghasilkan gaya tekan di wilayah bagian timur Indonesia yang selanjutnya menghasilkan retakan yang panjang mulai dari kepala burung Papua sampai daratan Sulawesi. Seiring dengan tekanan yang terus berlangsung akibat pergerakan dari arah timur tersebut, pergerakan ini akhirnya menghasilkan gerakan di sepanjang retakan tersebut dan akhirnya terbentuklah sebuah sesar. Arti sesar sendiri secara sederhana adalah retakan di kulit bumi di mana sudah ada pergerakan di sepanjang retakan tersebut.

Sulawesi Tengah, khususnya di jalur Patahan Palu-Koro, masuk dalam kategori merah sampai coklat dengan nilai percepatan gempa bumi pada batuan dasar kisaran 0,7 sampai lebih dari 1,2 g (gravitasi  $m^2/det$ ). Ini artinya kawasan tersebut amat rawan gempa bumi. Satu langkah paling konkret yang dapat direkomendasikan adalah tidak diperkenankan untuk membangun rumah, bahkan bangunan vital seperti rumah sakit di atas patahan aktif Palu-Koro. Bangunan di atas patahan kemungkinan besar akan hancur, setidaknya berikan jarak 20 meter dari patahan untuk dikosongkan dari segala bentuk bangunan. Dua tahun terakhir pemerintah memberikan atensi tinggi terhadap wilayah Sulawesi Tengah. Sejumlah wilayah di daerah tersebut, seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala,

berpotensi terkena dampak besar bila sewaktu-waktu gempa bumi terjadi. *Country Manager Humanitarian Open Street Map (OSM) Team Indonesia Yantisa, Akhadi* menuturkan, pada Tahun 2016, BNPB telah bekerja sama dengan pihaknya untuk memetakan potensi bencana yang akan terjadi di Sulteng.

Pemetaan tersebut meliputi letak bangunan, fasilitas publik, serta jalan akses yang memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari. Menurut Yantisa, selain ketiga wilayah tersebut, sejauh ini sudah ada 136 kabupaten/kota lain yang juga telah dipetakan kerawanannya. Meski demikian, ia mengaku, tidak dapat diketahui sejauh apa dampak terhadap wilayah tersebut saat gempa terjadi.

Sejarah kegempaan Sesar Palu-Koro di Sulawesi terutama wilayah Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Teluk Palu, secara berurut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 1828 silam, sesar Palu Koro pernah mengguncangkan Sulawesi Tengah dan sekitarnya dengan kekuatan 7,9 SR, kala itu korban meninggal tidak pernah tercatat, namun cerita masyarakat turun temurun menyebut jumlah korban yang tidak sedikit.
2. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* Edisi 21 November 1907, menerbitkan laporan Laporan awal dari otoritas sipil (*civil gezaghebber*) di Lemo, tentang gempa 30 Juli 1907 di Kulawi. Gempa ini menyebabkan 201 rumah penduduk (Kampung Lemo, Bahapa, Bolapapu, Bologanggo, Soenggoe, Matauw'e dan Kulawi) hancur, dan penduduk banyak menyelamatkan diri ke lapangan terbuka dan ada yang memilih mengungsi ke kebun.

3. Gempa Kulawi tahun 1909, Abendanon pada catatan perjalanannya di Kulawi, yang termuat dalam *Algemeen Handelsblad* Edisi 7 September 1910 menyebutkan, gempa ini menghancurkan semua rumah di bagian selatan Kulawi. Pada tahun 1907, lanskap yang sama juga dilanda gempa bumi, yang hampir menghancurkan semua rumah. Pada Laporan Residen Menado, Mei 1909, surat kabar *Het News Van Den Dag*, Edisi 26 Agustus 1909 menyebutkan, gempa diperkirakan berpusat di daerah Kulawi, guncangan dahsyat itu terasa pada tanggal 1 Mei jam 4 pagi. Kampung yang terdampak adalah Kampung Soengkoe, yang menghancurkan beberapa rumah, gempa dirasakan berhari-hari sampai tanggal 20 Mei.
4. **Tanggal 1 Desember 1927** di Teluk Palu, walaupun telah tercatat sejarah gempa sebelumnya, namun gempa ini dianggap sebagai gempa paling tua pada sesar Palu Koro. Hal ini mungkin terkait dengan informasi terkait dengan akurasi informasi magnitudo gempa, dampak gempa dan penanganannya. Gempa saat itu berkekuatan 6,5 SR yang disusul tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 15 m, menyebabkan korban meninggal sebanyak 14 orang.
5. **Tanggal 30 Januari 1930**, gempa terjadi di pantai barat Kabupaten Donggala. Tak tercatat berapa kekuatan gempa saat itu. Namun menurut Sutopo, gempa menyebabkan tsunami setinggi dua meter.
6. Gempa pertama Tahun 1938; Pengamat kebencanaan dari Fakultas MIPA Untad Drs Abdullah, MT, menyebutkan, gempa bumi yang terjadi pada Jumat,

20 Mei 1938 pukul 01.08 WITA tersebut, memiliki magnitudo 7,6 Skala Richter (SR), dengan episentrum 119,3 BT dan 0,5 LS. Kedalaman pusat gempa 33 km, serta memicu tsunami di teluk Palu setinggi 4 meter. Gempa bumi ini juga menyebabkan down- lift atau penurunan permukaan tanah di sebagian wilayah teluk Palu. Dalam catatannya, akibat gempa bumi tersebut, 50 rumah dan jaringan perpipaan di Palu rusak/hancur, 11 rumah rusak di Wani, 30 rumah di Tawaeli, serta 60 rumah di Donggala. Di Mamboro, lokasi pasar lenyap ditelan tsunami dan saat ini menjadi laut. Kemudian, dalam catatan tersebut juga disebutkan, beberapa orang hanyut terbawa gelombang dan seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ban Ho tewas tenggelam, menurut penuturan kembali oleh Slamet Anugrah masyarakat Mamboro. Leeuwarder Nieuwsblad, surat kabar harian tertua di Belanda, dalam edisi 21 Mei 1938, melaporkan gempa bumi tersebut dirasakan di wilayah Palu dan Mamboro, dan menyebabkan kerusakan besar. Di Palu, 50 rumah ambruk, sementara di banyak tempat tanah terbelah. Di Wani, delapan rumah hancur atau rusak. Di Mamboro 17 rumah rusak hanyut oleh gelombang pasang. Adapun di Donggala, guncangan pertama dirasakan pada sepuluh menit sebelum jam 00.30 WITA. Guncangan ini dilaporkan intens terjadi dan berlangsung selama satu menit. Guncangan kedua bahkan lebih buruk dan berlangsung selama tiga menit. Orang-orang dilaporkan hampir tidak dapat berdiri dan melarikan diri ke jalanan. Sepanjang malam tersebut, warga menghabiskan waktu di luar



rumah. Di Tawaeli juga banyak rumah rusak, jaringan pipa-pipa air di Palu rusak, jalan antara Palu dan Kulawi rusak, tribun lintasan balap dan sebuah lumbung di Bulubete runtuh, serta ada satu orang tewas dan satu orang terluka.

7. Gempa kedua Tahun 1938, Selang tiga hari dari gempa bumi di teluk Palu, tepatnya pada 23 Mei 1938, gempa bumi bermagnitudo besar juga melanda kawasan Teluk Tomini. Gempa bumi ini terjadi diakibatkan pergerakan sesar Sausu, dengan episentrum 120,3 BT dan 1,0 LS. Episentrum gempa diperkirakan di Toribulu, mengakibatkan tsunami sejauh 60 km di kawasan Parigi hingga Toribulu, dengan tinggi gelombang sekitar 2-3 meter. Akibat gempa bumi ini, terjadi *up-lift* atau naiknya permukaan tanah di lepas pantai Parigi, yang kini dikenal dengan Pulau Makakata. Beberapa surat kabar (*Bredasche Courant* edisi 24 Mei 1938, *De Tijd* Edisi 2 Juni 1938, dan *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie* Edisi 25 Mei 1938 serta *Bredasche courant*, terbitan 16 Juni 1938) yang memberitakan dampak gempa memiliki informasi yang berbeda-beda dan bantuan akibat gempa, namun gempa bumi tersebut diperkirakan mengakibatkan 942 unit rumah rubuh, 184 lainnya rusak, serta semua jembatan di sepanjang jalur tersebut rusak. Di Parigi, 16 orang terbawa gelombang, di Ampibabo 1 orang tewas dan di Toribulu 3 orang tewas. Selain itu dilaporkan Dermaga Parigi juga rusak.
8. Dalam *Newsletter*, Vol. I No. 3 (5 September 1968) yang diterbitkan *International Tsunami Information Center* di Hawaii, dan Surat kabar *Nieuwsblad van het Noorden*



edisi 23 Agustus 1968 dan majalah Tempo Tahun 1978, mencatat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 1968. dalam beritanya terkait gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan kawasan pantai barat Kabupaten Donggala Tahun 1968 mencatat, ada dua periode gempa bumi yang disertai tsunami, dalam selang waktu empat hari, menghajar kawasan tersebut, yakni 10 dan 14 atau 15 Agustus. **Pada 10 Agustus 1968** terjadi gempa bermagnitudo 7,3 dengan pusat gempa di Laut Sulawesi. Badan Penanggulangan Bencana Alam Indonesia mengumumkan bahwa gelombang tsunami besar menyapu kawasan pantai di Donggala ke arah daratan sampai 300 meter, sebanyak 200 (Dua ratus) orang tewas dan 800 rumah hancur di desa pesisir Tambu terutama kawasan pemukiman di Mapaga dinyatakan hilang ke dalam laut. Surat kabar *Nieuwsblad van het Noorden* sendiri menjelaskan gelombang pasang (tsunami) menyebabkan 500 orang hilang, setelah gelombang pasang tersebut melanda pulau Tuguan (dekat Panggalasiang) di lepas pantai barat laut Sulawesi. Gempa kedua terjadi pada 14 Agustus 1968 bermagnitudo 7,4 dengan pusat gempa di Laut Sulawesi. Kantor berita Antara melaporkan gempa ini menghasilkan gelombang tsunami besar yang mengakibatkan Pulau Tuguan tenggelam sepenuhnya dan menghilang.

9. **Tanggal 1 Januari 1996**, gempa dengan kekuatan 7,4 SR berpusat di selat Makassar mengakibatkan tsunami di pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli. Masih dalam Tahun 1996, Gempa terjadi di Desa Bankir, Tonggolobibi dan Donggala

mengakibatkan sembilan orang tewas dan bangunan rusak parah. Gempa juga menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang 3,4 meter menyapu hingga 300 meter ke daratan, dan menghancurkan 386 rumah penduduk, fasilitas umum dan kantor pemerintahan.

10. **Tanggal 11 Oktober 1998**, Kabupaten Donggala kembali digoncang gempa dengan kekuatan 5,5 SR, yang berdampak pada kerusakan parah ratusan bangunan.
11. **Tanggal 24 Januari 2005**, Gempa Donggala berkekuatan 6,2 SR. Pusat gempa terletak di 16 km arah tenggara Kota Palu, tepatnya di sekitar kawasan air panas Bora Kabupaten Sigi saat ini. Akibatnya, 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.
12. **Tanggal 17 November 2008**, Gempa dengan kekuatan 7,7 SR di Laut Sulawesi dan mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan menelan empat korban jiwa.
13. **Tanggal 18 Agustus 2012**, Gempa mengguncang Kabupaten Sigi dengan kekuatan 6,2 SR, episentrum di dekat Danau Lindu berpusat di 27 km barat daya Kabupaten Parigi Moutong. Delapan orang meninggal dan tiga kecamatan terisolir. Tercatat lima orang tewas, tiga orang luka berat dan belasan orang luka berat. Sebanyak 943 rumah rusak berat dan ringan, serta lebih dari 10 ribu warga di tiga kecamatan terkena dampak gempa yang terisolir.
14. **Pada Tahun 2017**, beberapa kali gempa tercatat di sepanjang sesar Palu Koro dan Matano. Pada Mei di Poso, dan Juni (Danau Matano) juga gempa.

15. **Gempa bumi tanggal 28 September 2018** terletak 26 km Barat Laut Donggala, kekuatan 7,4 SR dan kedalaman 10 km dengan ketinggian gelombang maksimum 11,4 m (Kelurahan Tondo Kota Palu). Gempa tersebut menimbulkan gelombang Tsunami setinggi 7 m (23 fet) di Kecamatan Banawa dan 15 m (49 fet) di Desa Wani Kecamatan Tanantovea. Akibat Gempa dan Tsunami tersebut menimbulkan korban jiwa dengan rincian meninggal dunia 212 orang, luka berat 175 orang, tertimbun 2 orang, korban hilang sebanyak 19 orang. Jumlah pengungsi sebanyak 36.346 jiwa (11.478 KK) yang tersebar di 52 titik pengungsian.

Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, maka untuk memperoleh nilai rupiah dampak bencana dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian yang meliputi lima sektor terdampak bencana yaitu:

- a) Sektor Permukiman, meliputi: Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman;
- b) Sektor Infrastruktur, meliputi: Transportasi (Darat, Laut, Udara), Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi, Energi/Listrik, Pos dan Telekomunikasi, serta Air Bersih dan Sanitasi;
- c) Sektor Ekonomi Produktif, meliputi: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Industri Kecil dan Menengah, Perdagangan (Pasar Tradisional), dan Pariwisata;
- d) Sektor Sosial meliputi: Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, Lembaga Sosial (Panti Asuhan, Wredha), Budaya dan Bangunan Sejarah;

e) Lintas sektor meliputi: Pemerintah, Ketertiban dan Keamanan, Keuangan dan Perbankan, serta Lingkungan Hidup.

Gempa bumi dan Tsunami di Kabupaten Donggala melanda 10 (sepuluh) kecamatan yang menimbulkan dampak berupa korban jiwa dan kerusakan serta kerugian yang relatif cukup besar. Berdasarkan data Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, per 30 November 2018 dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian, teridentifikasi bahwa bencana gempa bumi dan Tsunami di Kabupaten Donggala telah menimbulkan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 3,526 Triliun. Dilihat dari kepemilikan kerusakan dan kerugian, kepemilikan pihak pemerintah sebesar Rp 1,528 Triliun dan di pihak non Pemerintah sebesar Rp 1,998 triliun. Secara rinci total kerusakan dan kerugian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10.**  
**Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Gempa Tahun 2018 di Kabupaten Donggala**

| No            | Sektor        | Kerusakan/<br>Kerugian<br>(Rp.Milyar) | Kepemilikan (Rp. Milyar) |                 |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|               |               |                                       | Pemerintah               | Non Pemerintah  |
| 1             | Permukiman    | 1.926,50                              | 5,51                     | 1.920,99        |
| 2             | Infrastruktur | 934,51                                | 934,51                   | -               |
| 3             | Sosial        | 451,56                                | 451,56                   | -               |
| 4             | Ekonomi       | 169,85                                | 94,76                    | 75,09           |
| 5             | Lintas Sektor | 43,08                                 | 43,08                    | -               |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>3.525,52</b>                       | <b>1.527,79</b>          | <b>1.997,73</b> |

**Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Donggala Tahun 2019.**

Di Kecamatan Dampelas, tsunami hanya menerpa lahan perkebunan kelapa yang berada di Desa Kambayang di mana puluhan hektar kebun kelapa mati akibat kontaminasi air asin dan menyebabkan pindahnya jalur jalan trans Sulawesi bagian barat. Kawasan rawan bencana gempa dan tsunami secara keseluruhan seluas kurang lebih 6.371 ha. Daerah yang mempunyai potensi rawan bencana gempa dan tsunami meliputi:

- Kecamatan Banawa;
- Kecamatan Banawa Tengah;
- Kecamatan Tanantovea;
- Kecamatan Sindue;
- Kecamatan Sindue Tobata;
- Kecamatan Sindue Tombusabora;
- Kecamatan Sirenja;
- Kecamatan Balaesang;
- Kecamatan Balaesang Tanjung;
- Kecamatan Dampelas;
- Kecamatan Sojol; dan
- Kecamatan Sojol Utara.

## **B. Daerah Rawan Bencana**

Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Donggala ini meliputi kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan tsunami dan kawasan rawan abrasi pantai.

## **1. Rawan Bencana Longsor**

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Donggala pada umumnya di akibatkan ketinggian sangat curam diatas 2000 mdp dan jenis tanah yang labil pada saat hujan, tersebar hampir diseluruh kecamatan, dengan luas kawasan rawan longsor tertinggi yaitu sekitar kurang lebih 413,5 Ha. Upaya pengendalian kawasan rawan longsor dilakukan melalui hal berikut:

### **a) Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pedoman pengendalian ini mengacu kepada prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota/provinsi atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah.
- (3) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya.
- (4) Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat.

### **b) Acuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Rawan Longsor**

### **c) Perizinan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Longsor**

### **d) Perangkat insentif dan disinsentif pada Kawasan Rawan Longsor**

- e) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang Kawasan Rawan Longsor.

## **2. Rawan Bencana Banjir**

Peristiwa banjir erat kaitannya dengan musim penghujan dan pola penggunaan/pengelolaan lahan atas hinterland-nya. Selain itu terjadinya banjir ini berhubungan pula dengan siklus pasang. Beberapa daerah di pesisir Kabupaten Donggala berisiko terkena banjir.

Upaya penanganan untuk kawasan yang terkena banjir yaitu :

- a) Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;
- b) Pengoptimalan fungsi tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
- c) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
- d) Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

## **3. Rawan Bencana Abrasi Pantai**

Kawasan pesisir Kabupaten Donggala termasuk rentan terhadap abrasi pantai. Hal ini diperparah oleh penebangan vegetasi mangrove yang terus berlangsung, di samping faktor aksi laut. Pantai yang terabrasi secara indikatif ditemui pada sepanjang pantai di kabupaten ini, pada beberapa tempat mengancam jaringan jalan yang dibangun menyusur pantai.

Upaya untuk penanganan abrasi ini meliputi :

- a) Pembatasan kegiatan perkotaan dan perdesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, yang mempunyai resiko terkena ombak besar;
- b) Pembuatan bangunan pemecah gelombang.



#### 4. Rawan Bencana Tsunami

Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Bencana tsunami ini salah satu bencana yang berpotensi di Kabupaten Donggala karena sebagian besar wilayah Kabupaten Donggala berada diantara lempengan gempa bumi aktif yang dapat mengakibatkan gelombang tsunami bila gempa terjadi.

##### 2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam pembangunan, berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang sangat besar akan menjadi beban pembangunan jika berkualitas rendah, apalagi distribusi geografis tidak merata dan komposisinya secara sosial dan budaya sangat beragam.

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan,

perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial.

Masalah yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah penduduk tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin besar, yaitu pangan, sandang dan papan, tetapi juga masalah dalam hal pemenuhan fasilitas kehidupan yang layak. Kemajuan zaman membuat tuntutan konsumsi semakin besar, dan tuntutan pemenuhannya pun semakin besar pula. Jika barang pemenuhan kebutuhan terbatas, akan terjadi persaingan untuk mendapatkannya. Akibatnya penduduk yang kemampuannya terbatas, terpaksa tidak mendapatkannya. Hal yang demikian juga terjadi dalam penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang “kalah” dalam persaingan akan menjadi pengangguran dan tentunya menyusul rentetan dampak di bidang ekonomi dan sosial lainnya. Penduduk yang tidak bekerja akan menjadi miskin karena tidak mampu menopang kehidupannya. Akibatnya muncullah pemukiman- pemukiman kumuh, gangguan keamanan, kriminalitas meningkat, dan masalah sosial lainnya.

#### **2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Pertumbuhan alami akan meningkat apabila kelahiran lebih besar daripada kematian dan atau migrasi masuk (*in migration*) lebih besar daripada migrasi keluar (*out migration*).

Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar

sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Penduduk Per Tahun (Jiwa)</b> |                |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                    | <b>2019</b>                             | <b>2020</b>    |
| Rio Pakava         | 25.260                                  | 21.331         |
| Pinembani          | 7.154                                   | 6.313          |
| Banawa             | 34.345                                  | 36.076         |
| Banawa Selatan     | 25.785                                  | 25.426         |
| Banawa Tengah      | 11.131                                  | 11.327         |
| Labuan             | 14.718                                  | 14.861         |
| Tanantovea         | 16.516                                  | 15.860         |
| Sindue             | 19.918                                  | 21.024         |
| Sindue Tombusabora | 12.664                                  | 12.281         |
| Sindue Tobata      | 9.628                                   | 9.920          |
| Sirenja            | 22.000                                  | 21.812         |
| Balaesang          | 24.777                                  | 25.058         |
| Balaesang Tanjung  | 11.340                                  | 12.540         |
| Dampelas           | 31.062                                  | 32.032         |
| Sojol              | 27.636                                  | 25.340         |
| Sojol Utara        | 10.176                                  | 9.235          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>304.110</b>                          | <b>300.436</b> |

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021**

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Donggala dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 terus memperlihatkan

penurunan menjadi sebanyak 300.436 jiwa. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2020 adalah Kecamatan Banawa sebanyak 36.076 jiwa dan Kecamatan terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pinembani sebanyak 6.313 jiwa. Tabel 2.10 juga menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Donggala cenderung mengalami peningkatan yang konstan dengan penambahan penduduk berkisar 3.000 jiwa pada setiap tahunnya. Lebih jelasnya laju peningkatan jumlah penduduk setiap tahun di Kabupaten Donggala selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.12.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Kecamatan</b>   | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b> |             |               |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|                    | <b>Per Tahun (%)</b>             |             |               |
|                    | <b>2019</b>                      | <b>2020</b> | <b>Rataan</b> |
| Rio Pakava         | 0,83                             | -15,55      | -7,36         |
| Pinembani          | 0,83                             | -11,76      | -5,46         |
| Banawa             | 0,83                             | 5,04        | 2,94          |
| Banawa Selatan     | 0,83                             | -1,39       | -0,28         |
| Banawa Tengah      | 0,83                             | 1,76        | 1,30          |
| Labuan             | 0,84                             | 0,97        | 0,90          |
| Tanantovea         | 0,84                             | -3,97       | -1,57         |
| Sindue             | 0,84                             | 5,55        | 3,20          |
| Sindue Tombusabora | 0,84                             | -3,02       | -1,09         |
| Sindue Tobata      | 0,84                             | 3,03        | 1,94          |
| Sirenja            | 0,83                             | -0,85       | -0,01         |
| Balaesang          | 0,83                             | 1,13        | 0,98          |
| Balaesang Tanjung  | 0,84                             | 10,58       | 5,71          |
| Dampelas           | 0,83                             | 3,12        | 1,98          |
| Sojol              | 0,84                             | -8,31       | -3,74         |

| Kecamatan        | Laju Pertumbuhan Penduduk<br>Per Tahun (%) |              |              |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | 2019                                       | 2020         | Rataan       |
| Sojol Utara      | 0,84                                       | -9,25        | -4,20        |
| <b>Rata-rata</b> | <b>0,84</b>                                | <b>-1,21</b> | <b>-0,19</b> |

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021 (Data diolah)**

Tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari Tahun 2019 menjadi di bawah 0,84 persen per tahun, terendah pada Tahun 2020 yang mencapai -1,21 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode 2019-2020 mencapai -0,19 persen, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Balesang Tanjung mencapai 5,71 persen per tahun, dan terendah pertumbuhannya di Kecamatan Rio Pakava yakni -7,36 persen per tahun.

### **2.1.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumber daya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.

**Tabel 2.13.**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Donggala**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2020**

| <b>No.</b>                | <b>Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Penduduk (Org)</b> | <b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b> | <b>Kepadatan Penduduk (Org/Km<sup>2</sup>)</b> |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.                        | Rio Pakava         | 21.331                       | 872.16                               | 24                                             |
| 2.                        | Pinembani          | 6.313                        | 402.61                               | 16                                             |
| 3.                        | Banawa             | 36.076                       | 99.04                                | 364                                            |
| 4.                        | Banawa Selatan     | 25.426                       | 430.67                               | 59                                             |
| 5.                        | Banawa Tengah      | 11.327                       | 74.64                                | 152                                            |
| 6.                        | Labuan             | 14.861                       | 126.01                               | 118                                            |
| 7.                        | Tanantovea         | 15.860                       | 302.64                               | 52                                             |
| 8.                        | Sindue             | 21.024                       | 177.19                               | 119                                            |
| 9.                        | Sindue Tombusabora | 12.281                       | 211.55                               | 58                                             |
| 10.                       | Sindue Tobata      | 9.920                        | 211.92                               | 47                                             |
| 11.                       | Sirenja            | 21.812                       | 286.94                               | 76                                             |
| 12.                       | Balaesang          | 25.058                       | 314.23                               | 80                                             |
| 13.                       | Balaesang Tanjung  | 12.540                       | 188.85                               | 66                                             |
| 14.                       | Dampelas           | 32.032                       | 732.76                               | 44                                             |
| 15.                       | Sojol              | 25.340                       | 705.41                               | 36                                             |
| 16.                       | Sojol Utara        | 9.235                        | 139.07                               | 66                                             |
| <b>Kabupaten Donggala</b> |                    | <b>300.436</b>               | <b>5.275,69</b>                      | <b>57</b>                                      |

**Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021.**

Kepadatan Penduduk seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Donggala sebanyak 300.436 jiwa dengan luas Kabupaten Donggala seluas 5.275,69 km<sup>2</sup>. Dengan demikian, kepadatan penduduk Kabupaten Donggala pada akhir Tahun 2020 tercatat 57 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Banawa sebagai ibukota Kabupaten

memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 364 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pinembani sebesar 16 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 2.1.3.1. Komposisi Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.14.**  
**Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Donggala**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

| No | Kecamatan          | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) |           | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|----|--------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
|    |                    | Laki-Laki                                    | Perempuan |        |                     |
| 1  | Rio Pakava         | 11.186                                       | 10.145    | 21.331 | 110                 |
| 2  | Pinembani          | 3.346                                        | 2.967     | 6.313  | 113                 |
| 3  | Banawa             | 18.549                                       | 17.527    | 36.076 | 106                 |
| 4  | Banawa Selatan     | 13.248                                       | 12.178    | 25.426 | 109                 |
| 5  | Banawa Tengah      | 5.900                                        | 5.427     | 11.327 | 109                 |
| 6  | Labuan             | 7.577                                        | 7.284     | 14.861 | 104                 |
| 7  | Tanantovea         | 8.067                                        | 7.793     | 15.860 | 104                 |
| 8  | Sindue             | 10.774                                       | 10.250    | 21.024 | 105                 |
| 9  | Sindue Tombusabora | 6.348                                        | 5.933     | 12.281 | 107                 |
| 10 | Sindue Tobata      | 5.113                                        | 4.807     | 9.920  | 106                 |



| No              | Kecamatan         | Jumlah Penduduk<br>Menurut Jenis Kelamin<br>(Jiwa) |                | Jumlah         | Rasio<br>Jenis<br>Kelamin |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                 |                   | Laki-Laki                                          | Perempuan      |                |                           |
| 11              | Sirenja           | 11.080                                             | 10.732         | 21.812         | 103                       |
| 12              | Balaesang         | 12.842                                             | 12.216         | 25.058         | 105                       |
| 13              | Balaesang Tanjung | 6.459                                              | 6.081          | 12.540         | 106                       |
| 14              | Dampelas          | 16.475                                             | 15.557         | 32.032         | 106                       |
| 15              | Sojol             | 13.089                                             | 12.251         | 25.340         | 107                       |
| 16              | Sojol Utara       | 4.766                                              | 4.469          | 9.235          | 107                       |
| <b>Donggala</b> |                   | <b>154.819</b>                                     | <b>145.617</b> | <b>300.436</b> | <b>106</b>                |

**Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021.**

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Donggala pada Tahun 2020 sebesar 300.436 jiwa terdiri atas 154.819 jiwa penduduk laki-laki dan 145.617 jiwa penduduk perempuan dengan Rasio jenis kelamin sebesar 106. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Donggala setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan relatif lebih sedikit dibanding jumlah penduduk laki-laki. Pada tingkat kecamatan dapat diketahui bahwa Kecamatan Pinembani mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 113 dan yang terendah rasionya adalah Kecamatan Sirenja dengan rasio sebesar 103. Selain komposisi penduduk dianalisis melalui perbandingan penduduk menurut jenis kelamin, kajian komposisi penduduk juga dikaji berdasarkan perbandingan kelompok umur. Tabel berikut akan disajikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Donggala Tahun 2020.

**Tabel 2.15.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten**  
**Donggala**  
**Tahun 2019-2020 (Jiwa)**

| Kelompok Umur | Penduduk 2020 Menurut Jenis Kelamin |                | Tahun          |                |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               | Laki-laki                           | Perempuan      | 2019           | 2020           |
| 0-4           | 12.695                              | 12.445         | 32.696         | 25.140         |
| 5-9           | 14.915                              | 14.374         | 31.766         | 29.289         |
| 10-14         | 15.325                              | 14.382         | 28.784         | 29.707         |
| 15-19         | 14.174                              | 13.083         | 26.089         | 27.257         |
| 20-24         | 13.430                              | 12.773         | 23.366         | 26.203         |
| 25-29         | 12.881                              | 11.647         | 21.841         | 24.528         |
| 30-34         | 11.665                              | 11.042         | 22.592         | 22.707         |
| 35-39         | 10.912                              | 10.566         | 23.403         | 21.478         |
| 40-44         | 10.718                              | 10.230         | 22.332         | 20.948         |
| 45-49         | 9.887                               | 9.392          | 19.169         | 19.279         |
| 50-54         | 8.443                               | 7.727          | 15.574         | 16.170         |
| 55-59         | 6.891                               | 6.343          | 11.848         | 13.234         |
| 60-64         | 4.984                               | 4.573          | 9.553          | 9.557          |
| 65+           | 7.899                               | 7.040          | 15.097         | 14.939         |
| <b>Jumlah</b> | <b>154.819</b>                      | <b>145.617</b> | <b>304.110</b> | <b>300.436</b> |

**Sumber: Profil Kabupaten Donggala Tahun 2019-2021; Badan Pusat Statistik, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, (diolah kembali)**

Jika membandingkan jumlah penduduk yang berusia non produktif (99.075 jiwa) dengan penduduk usia produktif (201.361 jiwa) dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 32,98 persen artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 33 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun ke atas. Besarnya angka ketergantungan ini hampir tidak jauh berbeda dengan angka ketergantungan pada Tahun 2019 yakni

35,63 persen, yang berarti bahwa komposisi penduduk berdasarkan golongan umur relatif tidak jauh berbeda setiap tahunnya.

Sebaliknya, komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Donggala selama Tahun 2020 hampir 61,52 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Donggala didominasi kelompok penduduk usia muda. Penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda mengakibatkan besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah yang penduduknya lebih banyak yang berusia muda, berarti proporsi penduduk usia produktifnya relatif kecil. Hal ini akan berpengaruh secara ekonomis pada pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, daerah yang usia produktifnya relatif besar dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang memadai dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang ada.

Selanjutnya komposisi penduduk di Kabupaten Donggala dapat dikaji berdasarkan agama yang dianut. Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keberagaman agama yang dianut oleh penduduknya. Adapun komposisi jumlah penduduk Kabupaten Donggala berdasarkan Agama Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.16.

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Donggala umumnya (mayoritas) beragama Islam (89,67 persen), lalu diikuti oleh penduduk yang beragama Kristen Protestan sekitar 6,78 persen dan agama Hindu dianut sekitar 3,55 persen masyarakat Kabupaten Donggala. Penduduk yang beragama Hindu tersebar di 4 (empat) kecamatan yakni Rio Pakava, Banawa,

Dampelas, dan Sojol, umumnya merupakan wilayah transmigrasi yang berasal dari transmigran Bali.

**Tabel 2.16.**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Agama**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2020**

| <b>Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b> |                              |               |              |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                    | <b>Islam</b>                  | <b>Kristen<br/>Protestan</b> | <b>Hindu</b>  | <b>Budha</b> |
| Rio Pakava         | 15.926                        | 3.808                        | 5.467         | -            |
| Pinembani          | 3                             | 5.439                        | -             | -            |
| Banawa             | 23.698                        | 4.255                        | 140           | -            |
| Banawa Selatan     | 32.360                        | 779                          | -             | -            |
| Banawa Tengah      | 11.635                        | 10                           | -             | -            |
| Labuan             | 24.355                        | 70                           | -             | -            |
| Tanantovea         | 21.602                        | -                            | -             | -            |
| Sindue             | 23.566                        | 59                           | -             | -            |
| Sindue Tombusabora | 11.819                        | 1.138                        | -             | -            |
| Sindue Tobata      | 8.530                         | 130                          | -             | -            |
| Sirenja            | 11.973                        | 502                          | -             | -            |
| Balaesang          | 20.558                        | 1.860                        | -             | -            |
| Balaesang Tanjung  | 8.990                         | 899                          | -             | -            |
| Dampelas           | 26.145                        | 1.445                        | 4.150         | -            |
| Sojol              | 24.188                        | 100                          | 1.150         | -            |
| Sojol Utara        | 10.163                        | 3                            | -             | -            |
| <b>Jumlah</b>      | <b>275.511</b>                | <b>20.847</b>                | <b>10.907</b> | <b>-</b>     |
| <b>Persentase</b>  | <b>89,67</b>                  | <b>6,78</b>                  | <b>3,55</b>   |              |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021,**  
**(diolah kembali).**

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kebutuhan data akan disajikan berdasarkan indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut di antaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita, dan tingkat inflasi.

#### **2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan Indikator Makro ekonomi jangka panjang sehingga ditekankan pada prosesnya pencapaiannya, tidak sekedar pada output (nilai pertumbuhan itu sendiri). Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dimiliki daerah antara lain, peranan modal (investasi). Laju perkembangan ekonomi secara nasional dan regional selalu mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peningkatan skala ekonomi, teknologi serta kemampuan SDM sebagai salah satu faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi ADHK 2010 Kabupaten Donggala yang dicapai selama Tahun 2019 sebesar 4,37 persen lebih

tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang mencapai -4,87. Jumlah pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mencapai jumlah yang ditargetkan tahun 2019-2020 sebesar 5,72 persen. Salah satu penyebab adalah bencana Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar pada awal tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menyebabkan sektor ekonomi mengalami perlambatan. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala, dalam kurun waktu 2019- 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.17.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Donggala**  
**ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2020**

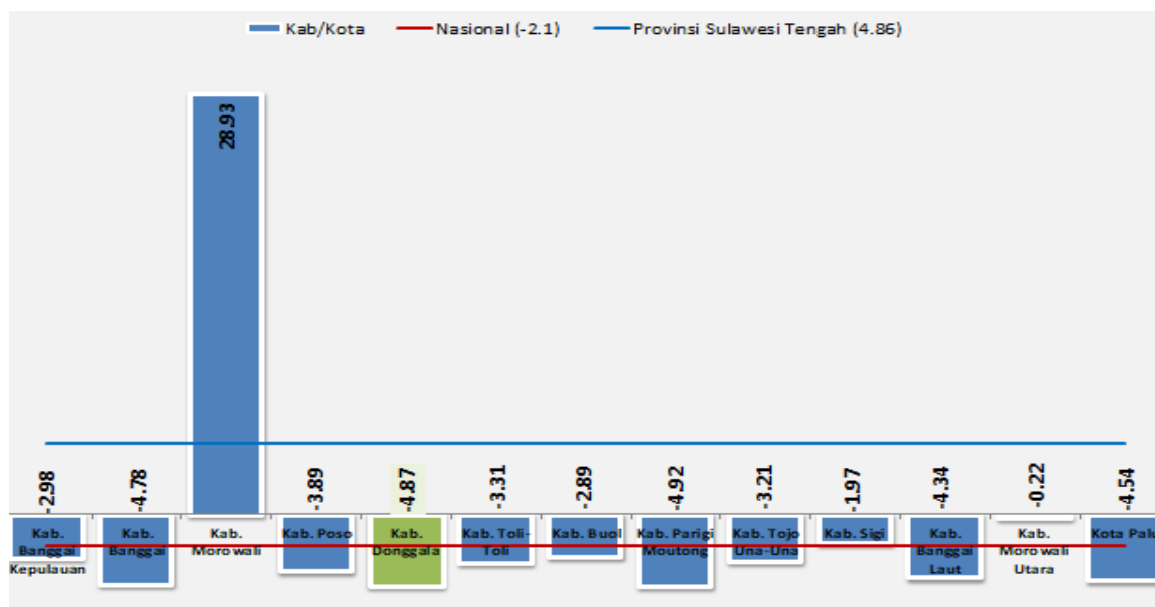
|     | <b>Lapangan Usaha/Industri</b>                                 | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,05        | -0,09       |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 16,71       | -20,92      |
| C   | Industri Pengolahan                                            | -4,30       | -6,08       |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1,35        | 2,49        |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | -2,28       | 1,19        |
| F   | Konstruksi                                                     | 7,53        | -2,59       |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 2,53        | -5,17       |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,71        | -29,87      |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -0,19       | -3,65       |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 7,61        | 8,45        |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -0,01       | 12,90       |
| L   | Real Estat                                                     | 0,62        | 0,51        |
| M,N | Jasa Perusahaan                                                | 4,14        | -0,46       |
| O   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,61        | 1,29        |

|                                              | <b>Lapangan Usaha/Industri</b>     | <b>2019</b> | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| P                                            | Jasa Pendidikan                    | 1,60        | -2,37        |
| Q                                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,97        | 5,83         |
| R                                            | Jasa lainnya                       | 2,11        | -0,03        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>        |                                    | <b>4,37</b> | <b>-4,87</b> |
| <b>Target Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                    | <b>5,72</b> | <b>5,72</b>  |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2019-2020 (Diolah Kembali).**

Berdasarkan 17 sektor ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2020 hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan. Sektor yang paling besar mengalami penurunan adalah sektor pertambangan dari 16,71 persen tahun 2019 menurun drastis menjadi -20,92 persen tahun 2020. Sementara sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 menunjukkan posisi tertinggi kabupaten Morowali Sebesar 28,93 persen. Sementara Kabupaten Donggala berada pada posisi kedua belas sebesar -4,87 persen. Kabupaten Parigi Moutong berada pada urutan terendah sebesar -4,92 persen. Pandemi Covid-19 memberi dampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala berada di bawah nasional sebesar -2,10 persen. Sementara Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 4,86 persen atau berada di atas nasional.





Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)

**Gambar 2.4.**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha ADHK-2010 (%) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin besar kemampuan suatu daerah menghasilkan barang dan jasa, secara agregat semakin besar pula kemampuan ekonomi di wilayah tersebut. Kemampuan ekonomi sangat penting dalam menopang pembangunan karena sumber daya ekonomi itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Walaupun prestasi pembangunan dapat juga dilihat dari pendekatan non ekonomi, namun tolok ukur dari sisi pendapatan tetap saja relevan dan paling lazim diterapkan.

Angka PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Tinggi rendahnya kemajuan daerah yang diukur dengan nilai PDRB diyakini akan memberikan peluang ekonomi yang akhirnya menumbuhkan

berbagai kondisi sektoral yang diperlukan sehingga distribusi pendapatan sektoral di daerah tersebut mencerminkan struktur ekonominya. Pemerintah dan investor menggunakan struktur ekonomi wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan sektoral dan memantau perkembangannya dengan melihat pergeseran struktur ekonomi dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.18.**  
**Nilai Absolut PDRB Kabupaten Donggala ADHB 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2020**

| Lapangan Usaha/Industri |                                                                | 2019         | 2020         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A                       | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 4.013.536,42 | 4.114.846,12 |
| B                       | Pertambangan dan Penggalian                                    | 2.344.287,57 | 1.888.824,14 |
| C                       | Industri Pengolahan                                            | 284.294,21   | 272.964,16   |
| D                       | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.261,96     | 1.295,38     |
| E                       | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 23.015,27    | 23.319,36    |
| F                       | Konstruksi                                                     | 1.823.752,57 | 1.850.574,10 |
| G                       | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.072.827,90 | 1.057.818,78 |
| H                       | Transportasi dan Pergudangan                                   | 390.195,23   | 282.201,88   |
| I                       | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 54.001,10    | 52.453,36    |
| J                       | Informasi dan Komunikasi                                       | 273.626,00   | 295.306,18   |
| K                       | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 207.532,46   | 234.586,95   |
| L                       | Real Estat                                                     | 125.354,19   | 127.372,32   |
| M                       | Jasa Perusahaan                                                | 10.815,20    | 10.891,07    |
| N                       | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.123.635,16 | 1.141.099,06 |
| O                       | Jasa Pendidikan                                                | 200.217,10   | 198.464,96   |
| P                       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 80.670,08    | 86.461,91    |

| <b>Lapangan Usaha/Industri</b>        | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Q Jasa lainnya                        | 81.711,34            | 81.999,76            |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> | <b>12.110.733,76</b> | <b>11.720.479,49</b> |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2019-2020 (Diolah Kembali).**

PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 Atas Dasar Harga Berlaku di Tahun 2019 mencapai 12.110.733,76 juta rupiah. Selanjutnya PDRB ini menurun menjadi 11.720.479,49 juta rupiah di Tahun 2020. Begitupula Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan yang mencapai 8.522.094,12 juta rupiah pada Tahun 2019 menurun menjadi 8.107.033,92 juta rupiah pada Tahun 2020. Dengan demikian, secara umum PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2016 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun konstan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

**Tabel 2.19.**

**Nilai Absolut PDRB Kabupaten Donggala ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2020**

| <b>Lapangan Usaha/Industri</b>                                  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 3.231.584,91 | 3.228.677,93 |
| B Pertambangan dan Penggalan                                    | 1.390.598,50 | 1.099.678,92 |
| C Industri Pengolahan                                           | 201.125,70   | 188.887,30   |
| D Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 1.221,20     | 1.251,66     |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 18.146,44    | 18.361,90    |
| F Konstruksi                                                    | 1.086.392,83 | 1.058.229,33 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 823.113,19   | 780.520,65   |
| H Transportasi dan Pergudangan                                  | 287.507,80   | 201.639,91   |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 38.548,50    | 37.140,83    |

| Lapangan Usaha/Industri               |                                                                      | 2019               | 2020                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                             | 228.860,55         | 248.204,33          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                           | 155.235,74         | 175.259,93          |
| L                                     | Real Estat                                                           | 93.625,12          | 94.106,04           |
| M                                     | Jasa Perusahaan                                                      | 7.916,72           | 7.880,68            |
| N                                     | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan dan Jaminan Sosial<br>Wajib | 705.919,80         | 715.054,41          |
| O                                     | Jasa Pendidikan                                                      | 143.065,47         | 139.677,11          |
| P                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial                                | 55.670,21          | 58.917,17           |
| Q                                     | Jasa lainnya                                                         | 53.561,44          | 53.545,82           |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                      | <b>8.522.094,1</b> | <b>8.107.033,92</b> |
|                                       |                                                                      | <b>2</b>           |                     |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2019-2020 (Diolah Kembali).**

Peningkatan nilai tambah sektoral ditentukan oleh perkembangan masing-masing sub sektor, yang berasal dari komoditi-komoditi yang termasuk dalam klasifikasi sektor tersebut. Sebagai contoh, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi hasil hutan serta padi dan holtikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya yang disebut sebagai *multiplier effect*. Semakin beragamnya produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Demikian juga pembangunan infrastruktur dapat menjadi sumber pertumbuhan pada sektor lainnya. Peningkatan nilai tambah pada sektor barang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peningkatan pada sektor jasa. Perkembangan yang pesat pada Sub Sektor Komunikasi ditambah dengan bertambahnya output pada sektor-sektor lainnya menyebabkan pertumbuhan Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran sangat tinggi.

Pengeluaran pemerintah pun memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan yang tinggi pada Sektor Jasa-jasa melalui Sub Sektor Pemerintahan Umum. Sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Donggala adalah sektor pertanian yang mencapai hampir separuh dari keseluruhan PDRB, yaitu sebesar 39,83 persen Tahun 2020 (ADHK) dan meningkat dari Tahun 2019 sebesar 37,92 persen. Namun demikian, besarnya kontribusi PDRB sektor pertanian tersebut baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan terjadi peningkatan selama Tahun 2019-2020. Peranan terbesar urutan kedua pada Tahun 2020 yakni sektor pertambangan dan pengalihan yaitu sebesar 13,56 persen. Sedangkan peranan terbesar ketiga pada sektor konstruksi sebesar 13,05 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan sektor perdagangan besar dan eceran masing-masing mencapai 8,82 persen dan 9,63 persen sebagai urutan keempat. Sedangkan sektor-sektor yang lain peranannya kurang dari 3 persen. Sektor pertambangan dan penggalan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial terhadap total PDRB dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

**Tabel 2.20.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Donggala Atas Dasar**  
**Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Menurut**  
**Lapangan Usaha (Persen), 2019-2020**

| No | Lapangan Usaha                                          | 2019  |       | 2020  |       |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                         | HB    | HK    | HB    | HK    |
| A  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                     | 33,14 | 37,92 | 35,11 | 39,83 |
| B  | Pertambangan dan Penggalan                              | 19,36 | 16,32 | 16,12 | 13,56 |
| C  | Industri Pengolahan                                     | 2,35  | 2,36  | 2,33  | 2,33  |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas                               | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah               | 0,19  | 0,21  | 0,20  | 0,23  |
| F  | Konstruksi                                              | 15,06 | 12,75 | 15,79 | 13,05 |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda | 8,86  | 9,66  | 9,03  | 9,63  |
| H  | Transportasi dan Pergudangan                            | 3,22  | 3,37  | 2,41  | 2,49  |
| I  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                    | 0,45  | 0,45  | 0,45  | 0,46  |
| J  | Informasi dan Komunikasi                                | 2,26  | 2,69  | 2,52  | 3,06  |
| K  | Jasa Keuangan dan Asuransi                              | 1,71  | 1,82  | 2,00  | 2,16  |
| L  | Real Estate                                             | 1,04  | 1,10  | 1,09  | 1,16  |
| M  | Jasa Perusahaan Administrasi                            | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,10  |
| N  | Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib       | 9,28  | 8,28  | 9,74  | 8,82  |
| O  | Jasa Pendidikan                                         | 1,65  | 1,68  | 1,69  | 1,72  |
| P  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                      | 0,67  | 0,65  | 0,74  | 0,73  |

| No                                    | Lapangan Usaha | 2019       |            | 2020       |            |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       |                | HB         | HK         | HB         | HK         |
| Q                                     | Jasa lainnya   | 0,67       | 0,63       | 0,70       | 0,66       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

**Sumber: BPS: Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah Kembali)**

#### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Pengumpulan data Indeks harga di tingkat konsumen (IHK) di Kabupaten Donggala mencakup perkembangan harga 322 jenis komoditas barang dan jasa, dan setiap jenis komoditas barang dan jasa dipantau 2 atau 3 kualitas/merk yang merupakan spesifikasi dari komoditas tersebut. Pengumpulan data dilakukan di pasar Ibukota Kabupaten Donggala dengan frekuensi yang harian sesuai dengan sifat dan fluktuasi harga masing-masing barang dan jasa yang dicakup. Pencatatan harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya yang perubahannya relatif cepat dilakukan setiap minggu, sedangkan pencatatan komoditas lainnya yang perubahan harganya relatif lebih lambat dilakukan dalam periode dua mingguan atau bulanan. Di Kabupaten Donggala sendiri, pencacahan dilakukan di Pasar Banawa. Data berikut disajikan perkembangan inflasi Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan Nasional sebagaimana berikut.

**Tabel 2.21.**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Donggala, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2020 (Persen)**

| Uraian                   | Tahun |      |
|--------------------------|-------|------|
|                          | 2019  | 2020 |
| Kabupaten Donggala       | 2,49  | 1,98 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 2,30  | 1,81 |
| Nasional                 | 2,72  | 1,90 |

**Sumber: Profil Kabupaten Donggala 2021, BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, (diolah kembali);**



Terlihat pada Tabel 2.22 karena IHK mengukur perubahan harga secara periodik dengan paket komoditas yang tetap, maka penghitungannya menggunakan rumus Modifikasi Laspeyers (*Modified Laspeyers*) dengan tahun dasar tertimbang. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan sesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari 2,49 persen Tahun 2019 menjadi 1,98 persen Tahun 2020. Hal ini juga sama kondisinya dengan inflasi yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional untuk tahun pengukuran yang sama. Angka inflasi nasional Tahun 2020 sebesar 1,90 persen, sementara inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,81 persen lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

#### **2.2.1.3. PDRB Per Kapita**

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan yang paling penting, karena untuk itulah pembangunan dilaksanakan. Penghitungan PDRB yang melibatkan adanya penduduk di dalamnya disebut PDRB perkapita, sebab dihitung dengan membagi nilai PDRB total dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dengan harapan dapat mewakili jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.

PDRB perkapita digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun angka ini menunjukkan ukuran secara agregat, namun sampai sekarang masih dianggap sebagai ukuran yang cukup relevan. Berikut ini disajikan data PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Donggala tahun 2019-2020.

**Tabel 2.22.**  
**Nilai dan Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

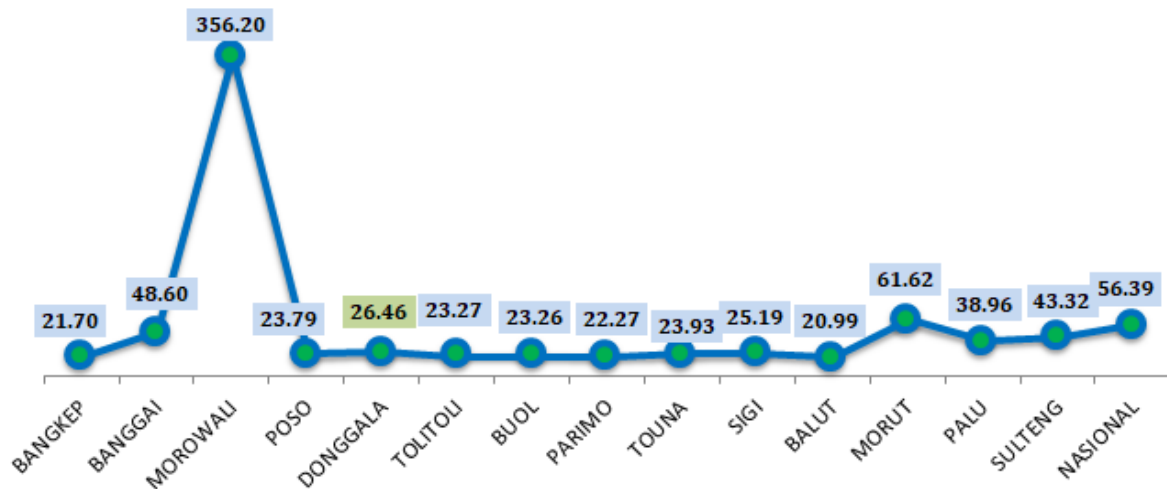
| Nilai PDRB (Juta Rupiah)              | Tahun         |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | 2019          | 2020          |
| - ADHB                                | 12.110.733,76 | 11.720.479,49 |
| - ADHK 2010                           | 8.522.094,12  | 8.107.033,92  |
| <b>PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)</b>  |               |               |
| - ADHB                                | 39.823,53     | 38.251,22     |
| - ADHK 2010                           | 28.023,06     | 26.458,30     |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB      | 6,67          | -3,95         |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 | 3,51          | -5,58         |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah Kembali)**

PDRB Perkapita Kabupaten Donggala mengalami penurunan selama tahun 2019-2020, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010. Terlihat PDRB perkapita Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 39.823,53 ribu rupiah menurun menjadi 38.251,22 ribu rupiah di Tahun 2020. Begitupula PDRB perkapita Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mencapai 28.023,06 ribu rupiah menurun menjadi 26.458,30 ribu rupiah Tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan nilai PDRB Perkapita ADHK-2010 pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Morowali mencapai 356,20 juta rupiah yang ditopang oleh sektor pertambangan dan Kabupaten Donggala berada pada urutan kelima sebesar 26,46 juta rupiah. Sementara Kabupaten Banggai Laut berada pada urutan terendah sebesar 20,99 juta rupiah. Secara nasional, PDRB Perkapita Kabupaten Donggala berada di bawah rata-rata nasional sebesar 56,39 juta rupiah dan Provinsi Sulawesi

Tengah sebesar 43,32 juta rupiah.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.5.**

**PDRB Perkapita ADHK-2010 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Juta Rupiah)**

#### 2.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat adalah konsep koefisien gini (indeks Gini). Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1,0 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan bahwa semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika koefisien Gini memiliki angka 1, hal ini menunjukkan bahwa semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Koefisien Gini dengan angka nol dan satu adalah tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian. Sehubungan dengan besarnya angka Gini koefisien yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika angka Gini koefisien berada pada: 1) 0

sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2) di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3) lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.23.**  
**Indeks Gini Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No. | Indeks Gini                    | 2019 | 2020 |
|-----|--------------------------------|------|------|
| 1   | Realisasi Donggala             | 0,33 | 0,33 |
| 2   | Target RPJMD Periode 2019-2024 | 0,38 | 0,38 |
| 3   | Realisasi Sulawesi Tengah      | 0,33 | 0,33 |
| 4   | Realisasi Nasional             | 0,38 | 0,38 |

**Sumber: Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021 (data diolah)**

Selama Tahun 2019-2020 indeks Gini Kabupaten Donggala sebesar 0,33 lebih rendah dari target sebesar 0,38, artinya bahwa indeks Gini yang ditargetkan belum tercapai dalam mendukung keberhasilan pembangunan melalui ketidaktimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk. Kondisi indeks Gini Kabupaten Donggala sama dengan indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,33 dan secara Nasional sebesar 0,38. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Donggala tersebut yang lebih besar dari 0,33, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan moderat.

#### **2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan**

##### **A. Jumlah Penduduk Miskin**

Selama Periode 2019-2020, penduduk miskin Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari 55.830 jiwa di Tahun 2019 menjadi 53.170 jiwa di Tahun 2020, begitupula pada tahun 2016-2018 jumlah penduduk miskin mengalami

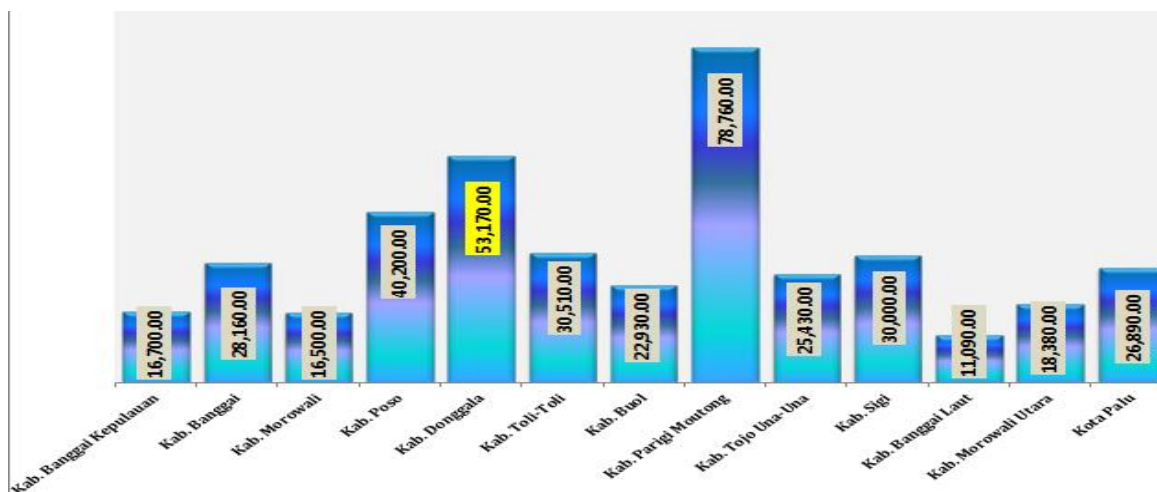
penurunan dari 55.690 jiwa menjadi 54.280 jiwa. Demikian pula dengan penduduk miskin Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 404.030 jiwa di Tahun 2019 menjadi 398.730 jiwa di Tahun 2020. Sementara secara nasional penduduk miskin meningkat dari 24.785.720 jiwa di Tahun 2019 menjadi 26.424.020 jiwa di Tahun 2020.

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020**

| Uraian                   | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) |            |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
|                          | 2019                          | 2020       |
| Kabupaten Donggala       | 55.830                        | 53.170     |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 404.030                       | 398.730    |
| Nasional                 | 24.785.870                    | 26.424.020 |

**Sumber : BPS Sulteng dan Kabupaten Donggala Tahun 2021 (data diolah)**

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk miskin pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 78.760 jiwa dan Kabupaten Donggala berada pada urutan tertinggi kedua sebesar 53.170 jiwa. Sementara Kabupaten Banggai Laut berada pada urutan terendah sebesar 11.090 jiwa.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.6.**

**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Jiwa)**

## **B. Persentase Penduduk Miskin**

Selama Periode 2019-2020, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Donggala menurun dari 18,40 persen di Tahun 2019 menjadi 17,39 persen di Tahun 2020. Hal yang sama juga ditunjukkan pada data RPJMD sebelumnya yakni pada Tahun 2016-2018 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 18,59 persen menjadi 18,03 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut melampaui persentase yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu 16,35 persen, artinya bahwa target untuk menurunkan persentase penduduk miskin belum tercapai. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 13,48 persen Tahun 2019 menjadi 12,92 persen Tahun 2020. Sebaliknya persentase Penduduk Miskin secara nasional mengalami peningkatan dari 9,22 persen Tahun 2019 menjadi 9,78 persen Tahun 2020. Baik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Donggala maupun Provinsi Sulawesi Tengah, berada di atas persentase penduduk miskin nasional.

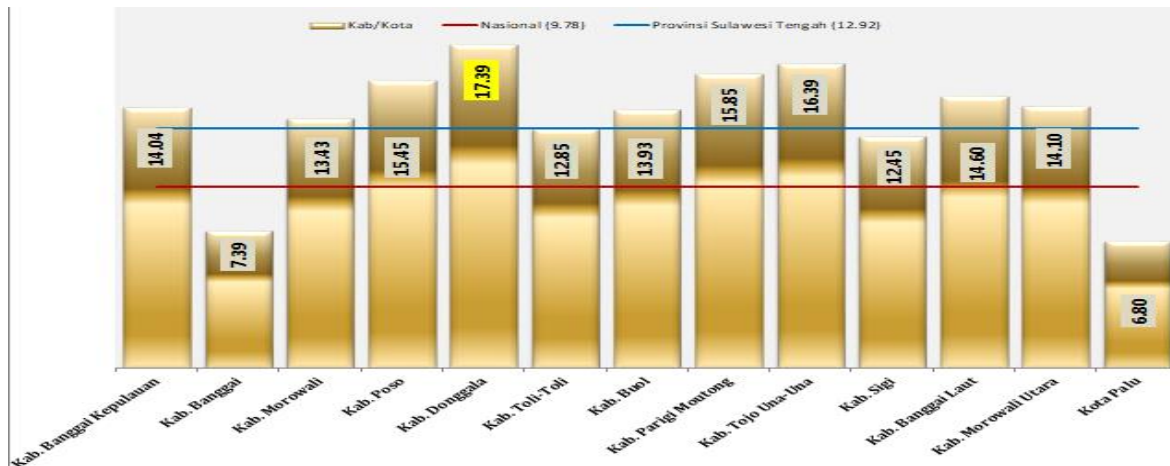
**Tabel 2.25**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng**  
**dan Indonesia Tahun 2019-2020**

| Uraian                         | Persentase Penduduk Miskin (%) |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                | 2019                           | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 18,40                          | 17,39 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 16,35                          | 16,35 |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 13,48                          | 12,92 |
| Nasional                       | 9,22                           | 9,78  |

**Sumber : BPS Sulteng dan Kabupaten Donggala Tahun 2021 (data diolah)**

Persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa Kabupaten Donggala menempati urutan pertama dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 17,39 persen, urutan kedua Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 16,39 persen, dan urutan ketiga Kabupaten Parigi Moutong sebesar 15,85 persen. Ketiga kabupaten ini berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92 persen. Sementara Kota Palu berada pada urutan terendah sebesar 6,80 persen dan Kabupaten Banggai sebesar 7,39 persen. Kedua kabupaten ini berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.





Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)

**Gambar 2.7.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)**

### C. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

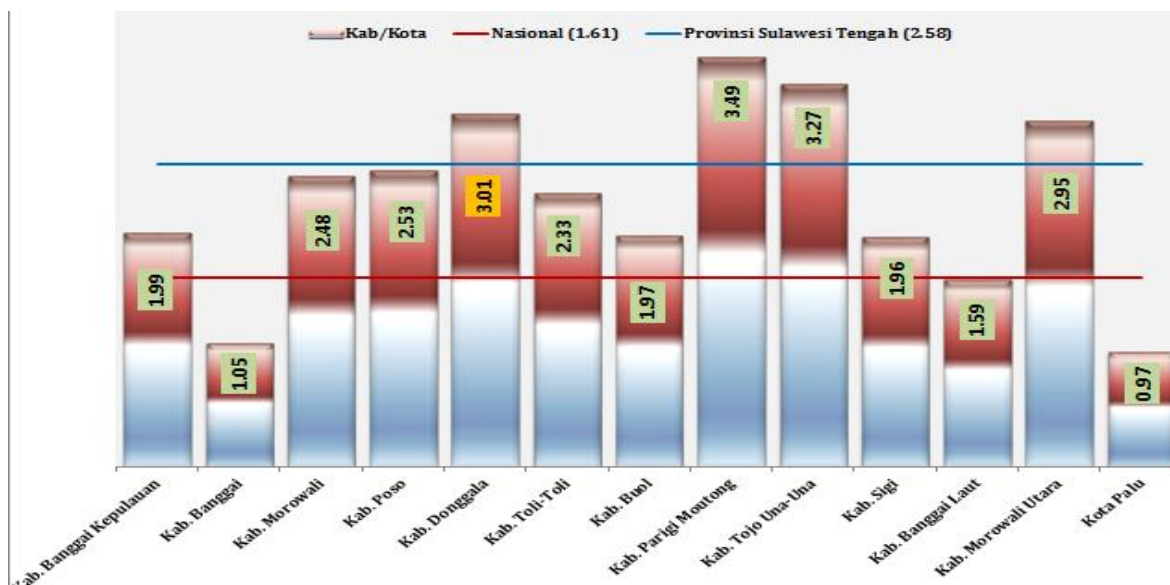
Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverti Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Tabel 2.26.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020**

| Uraian                   | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) |      |
|--------------------------|----------------------------------|------|
|                          | 2019                             | 2020 |
| Kabupaten Donggala       | 2,86                             | 3,01 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 2,33                             | 2,58 |
| Nasional                 | 1,55                             | 1,61 |

Sumber : BPS Sulteng dan Kabupaten Donggala Tahun 2021 (data diolah)

Data P1 mengindikasikan bahwa bila P1 meningkat, maka jumlah penduduk miskin yang menuju dasar kemiskinan semakin banyak dan sebaliknya. Selama Periode 2019-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Donggala meningkat dari 2,86 di Tahun 2019 menjadi 3,01 di Tahun 2020, begitupula pada Tahun 2016-2018 P1 mengalami peningkatan dari 3,01 meningkat menjadi 3,17 sementara Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,03 atau secara keseluruhan Tahun 2016-2020 P1 mengalami fluktuasi. Demikian pula Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari 2,33 Tahun 2019 menjadi 2,58 Tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) secara nasional mengalami peningkatan dari 1,55 Tahun 2019 menjadi 1,61 Tahun 2020. Baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Donggala maupun Provinsi Sulawesi Tengah, berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) nasional. Artinya semakin banyak penduduk miskin Sulteng dengan pendapatan yang dikategorikan miskin. Angka indeks ini mengindikasikan diperlukan adanya strategi terpadu saling sinergi antara Pemerintah Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.8.**

#### **Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan pertama dengan angka indeks P1 tertinggi sebesar 3,49, urutan kedua Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,21. Kedua kabupaten ini berada di atas rata-rata indeks P1 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,58. Sementara Kabupaten Donggala berada pada urutan ketiga dengan angka indeks P1 sebesar 3,01 dan berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu berada pada urutan terendah dengan angka indeks P1 sebesar 0,97, Kabupaten Banggai sebesar 1,05, dan Kabupaten Banggai Laut sebesar 1,59. Ketiga kabupaten ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

#### **D. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Angka ini mengindikasikan bahwa

semakin tinggi angka P2, maka semakin timpang disparitas antar sesama rumah tangga miskin (RTM), sebaliknya, semakin rendah P2, maka semakin merata dan/atau semakin sempit kesenjangan antar RTM. Selama periode tersebut, angka P2 mengalami peningkatan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional yang berarti semakin timpang disparitas antar sesama RTM. Angka P2 Kabupaten Donggala Tahun 2019 sebesar 0,76 meningkat menjadi 0,79 Tahun 2020, begitupula pada Tahun 2016-2018 P2 mengalami peningkatan dari 0,90 meningkat menjadi 1,05 sementara Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,86 atau secara keseluruhan Tahun 2016-2020 P2 mengalami fluktuasi. Strategi penanganan P2 tentu berbeda jauh dengan penanganan P1. Kabupaten Donggala membutuhkan waktu yang akan lama dalam mengatasi P2. Baik Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Donggala maupun Provinsi Sulawesi Tengah, berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan nasional.

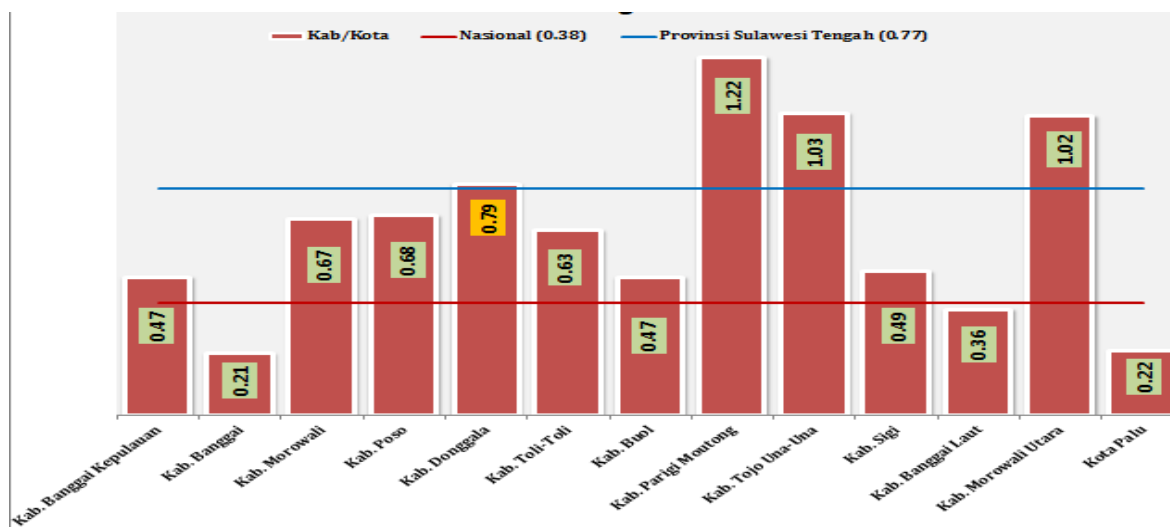
**Tabel 2.27.**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2019-2020**

| Uraian                   | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |      |
|--------------------------|----------------------------------|------|
|                          | 2019                             | 2020 |
| Kabupaten Donggala       | 0,76                             | 0,79 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 0,63                             | 0,77 |
| Nasional                 | 0,37                             | 0,38 |

**Sumber : BPS Sulteng dan Kabupaten Donggala Tahun 2021 (data diolah)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan pertama

dengan angka indeks P2 tertinggi sebesar 1,22, urutan kedua Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 1,03. Sementara Kabupaten Donggala berada pada urutan Keempat dengan angka indeks P2 sebesar 0,79. Kota Palu berada pada urutan terendah dengan angka indeks P1 sebesar 0,22 dan Kabupaten Banggai sebesar 0,21.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.9.**

### **Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020**

#### **E. Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selama Tahun 2019-2020 Garis Kemiskinan Kabupaten Donggala meningkat dari Rp.336.404 di Tahun 2019 menjadi Rp.360.483 di Tahun 2020, begitupula pada Tahun 2016-2018 Garis Kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp.281.374 meningkat menjadi Rp.308.212. Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah naik dari Rp.441.036 di Tahun 2019 menjadi

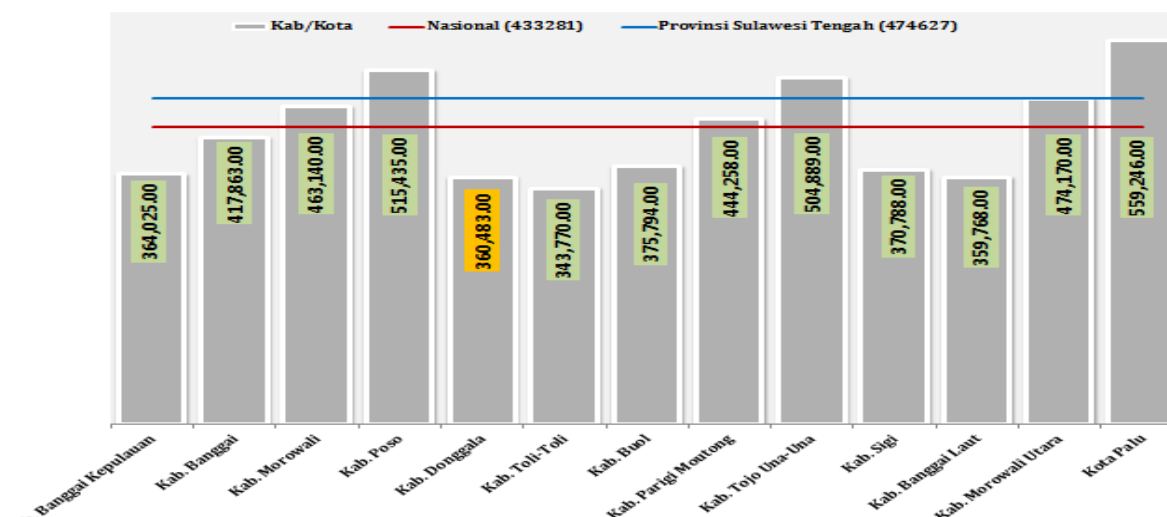
Rp.474.627 di Tahun 2020. Sedangkan Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2019-2020 berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala.

**Tabel 2.28.**  
**Garis Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan**  
**Indonesia**  
**Tahun 2019-2020**

| Uraian                   | Garis Kemiskinan (GK) |         |
|--------------------------|-----------------------|---------|
|                          | 2019                  | 2020    |
| Kabupaten Donggala       | 336.404               | 360.483 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 441.036               | 474.627 |
| Nasional                 | 335.604               | 359.768 |

**Sumber : BPS Sulteng dan Kabupaten Donggala Tahun 2021**  
**(data diolah)**

Garis Kemiskinan (GK) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bahwa Kota menempati urutan pertama dengan garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp.559.246, urutan kedua Kabupaten Poso sebesar Rp.515.435. Sementara Kabupaten Donggala berada pada urutan Kesebelas dengan garis Kemiskinan sebesar Rp.360.483. Kabupaten Tolitoli berada pada urutan terendah dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp.343.770.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.10.**

**Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Rupiah)**

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pihak perbankan, kelompok dunia usaha, LSM maupun dengan Perguruan Tinggi. Pemda Kabupaten Donggala telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Donggala, berikut Kelompok Kerja (POKJA) yang sudah terbentuk di daerah, yang mempunyai peran dan fungsi untuk mengkaji Indeks Kedalaman Kemiskinan daerah (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai bahan awal untuk memetakan program-program penanggulangan kemiskinan dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan khususnya masyarakat miskin.

Dalam mengentaskan penduduk miskin, pemerintah Kabupaten Donggala telah menjalankan berbagai strategi dan program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang



kehidupan yang dapat dilaksanakan secara efektif. Berkaitan hal dimaksud, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, maka di Tahun 2020 ini berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di antaranya: Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin/Keluarga Miskin, Pembinaan, pengawasan dan Pengelolaan Distribusi RASKIN, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, PAMSIMAS, Fasilitasi Dukungan sistem penanggulangan kemiskinan daerah, Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Pembinaan Petani Bantuan Permodalan Lembaga Mikro, Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK) Mandiri Pendampingan, Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), Pendamping program usaha agribisnis perdesaan, Kegiatan Donggala Kanamavali. Saat ini, Kabupaten Donggala Tengah mempersiapkan Program Sistem Inovasi Daerah (SiDA) dalam payung Program Gerakan Penuntasan Kemiskinan (Gertaskin) berupa Kegiatan Donggala Kana Mavali, Donggala Kana Maseha, Donggala Nasugi Kana Masagena, Donggala Nanyama Ngapata sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat Kabupaten Donggala paska bencana alam Tanggal 28 September 2018.

#### **2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia**

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Oleh karena itu, Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks

ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (IPH), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (*metode Brass, varian Trussel*) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas/BPS menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil

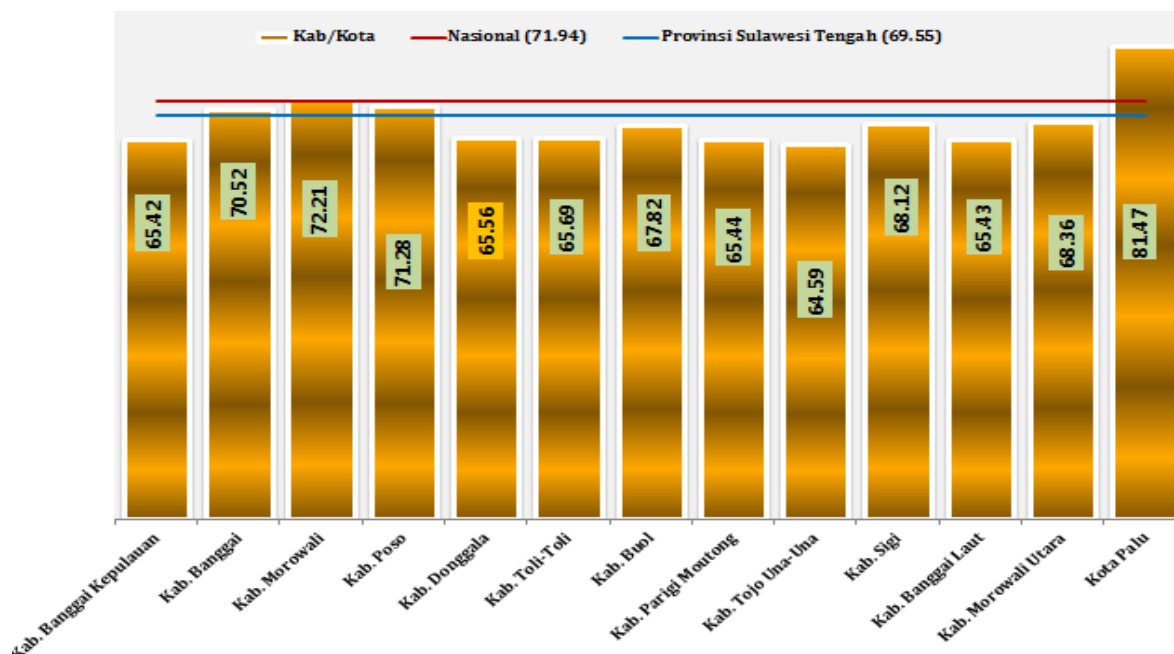
yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Untuk lebih jelasnya posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.29.**  
**IPM Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Tahun |       |
|----------------------------------|-------|-------|
|                                  | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala               | 65,49 | 65,56 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024   | 64,98 | 65,31 |
| Provinsi Sulawesi Tengah         | 69,50 | 69,55 |
| Nasional                         | 72,02 | 71,94 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, data diolah**

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian pembangunan non fisik yang lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Secara umum Capaian pembangunan mutu modal manusia di Kabupaten Donggala cenderung meningkat. Hal ini terindikasi dari nilai IPM Kabupaten Donggala, yakni dari 65,49 pada Tahun 2019 meningkat menjadi 65,56 pada tahun 2020, dengan posisi peringkat ke-sebelas di Sulawesi Tengah. Nilai IPM tersebut melampaui nilai IPM yang ditargetkan sebesar 65,31 Tahun 2020. Namun perkembangan atau peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Donggala masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)

**Gambar 2.11.**  
**IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah**  
**dan Nasional Tahun 2020**

Capaian IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menempatkan Kabupaten Donggala berada pada urutan kesepuluh dengan capaian sebesar 65,56. Posisi tertinggi capaian IPM adalah Kota Palu sebesar 81,47 dan berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Sementara capaian IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,59.

## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1 Angka Melek Huruf**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap

kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah.

Data dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Donggala terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, terlihat nyata bahwa meskipun secara keseluruhan belum mencapai nilai sempurna akan tetapi capaian terus mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat Kabupaten Donggala tentang pentingnya pendidikan makin meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30.**

**AMH Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Angka Melek Huruf<br>(AMH) (%) | Tahun |       |
|--------------------------------|-------|-------|
|                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 99,84 | 99,84 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 99,78 | 99,84 |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 98,99 | 100   |
| Nasional                       | 99,76 | 98,29 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

AMH Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 99,84 persen atau tidak mengalami perubahan. Angka tersebut mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Donggala sebesar 99,84 persen Tahun 2020. Capaian AMH Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 berada di atas rata-rata nasional dan masih lebih baik dibandingkan AMH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebesar 98,99 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama

sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Donggala memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat.

#### 2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub-komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Donggala. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Donggala pada keadaan Tahun 2019 tercatat 7,86 tahun, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 7,88 tahun keadaan Tahun 2020. Sementara angka yang ditargetkan Tahun 2020 sebesar 7,89 tahun artinya tidak mencapai target. Data tersebut berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,83 tahun pada Tahun 2020 dan nasional sebesar 8,48 tahun pada Tahun 2020. Angka RLS Kabupaten Donggala sebesar 7,88 tahun mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Donggala usia 15 tahun ke atas baru sampai pada kelas 1 (satu) jenjang pendidikan SMP/MTs. Dengan demikian, capaian Kabupaten Donggala masih perlu untuk ditingkatkan.

**Tabel 2.31.**

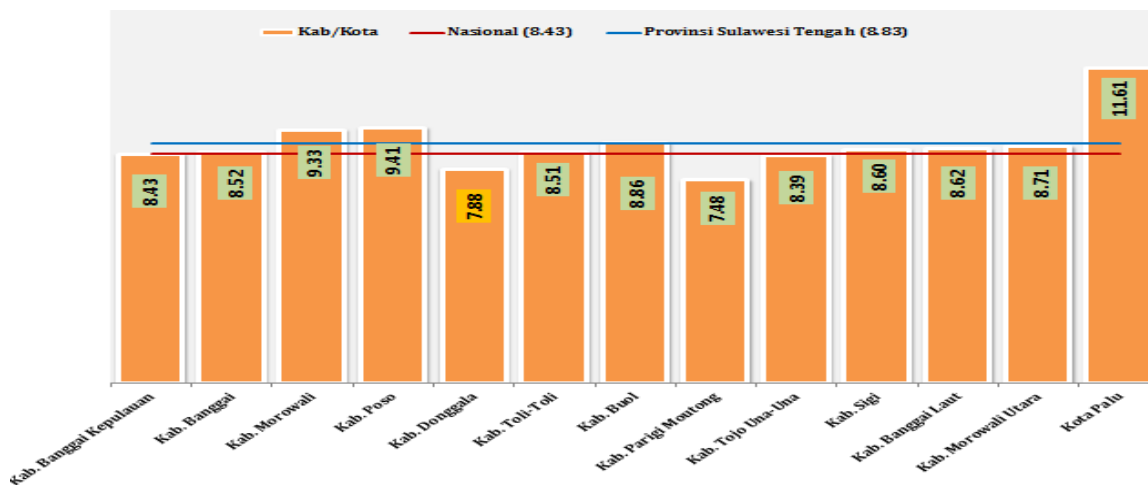
**RLS Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>(RLS) (Tahun) | Tahun |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
|                                               | 2019  | 2020 |
| Kabupaten Donggala                            | 7,86  | 7,88 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024                | 7,86  | 7,89 |

| Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>(RLS) (Tahun) | Tahun |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
|                                               | 2019  | 2020 |
| Provinsi Sulawesi Tengah                      | 8,75  | 8,83 |
| Nasional                                      | 8,34  | 8,48 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

Peningkatan RLS Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain, penduduk usia produktif di Kabupaten Donggala memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.12.**  
**RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Tahun)**

Pada Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Donggala berada pada urutan keduabelas dengan capaian sebesar 7,88 tahun. Urutan tertinggi adalah Kota Palu dengan capaian sebesar 11,61 tahun,



urutan kedua adalah Kabupaten Poso sebesar 9,41 tahun, dan urutan ketiga adalah Kabupaten Morowali sebesar 9,33 tahun. Sementara Kabupaten Parigi Moutong berada pada urutan terakhir sebesar 7,48 tahun.

### 2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas sebab mengikuti kebijakan program wajib belajar pemerintah.

**Tabel 2.32.**

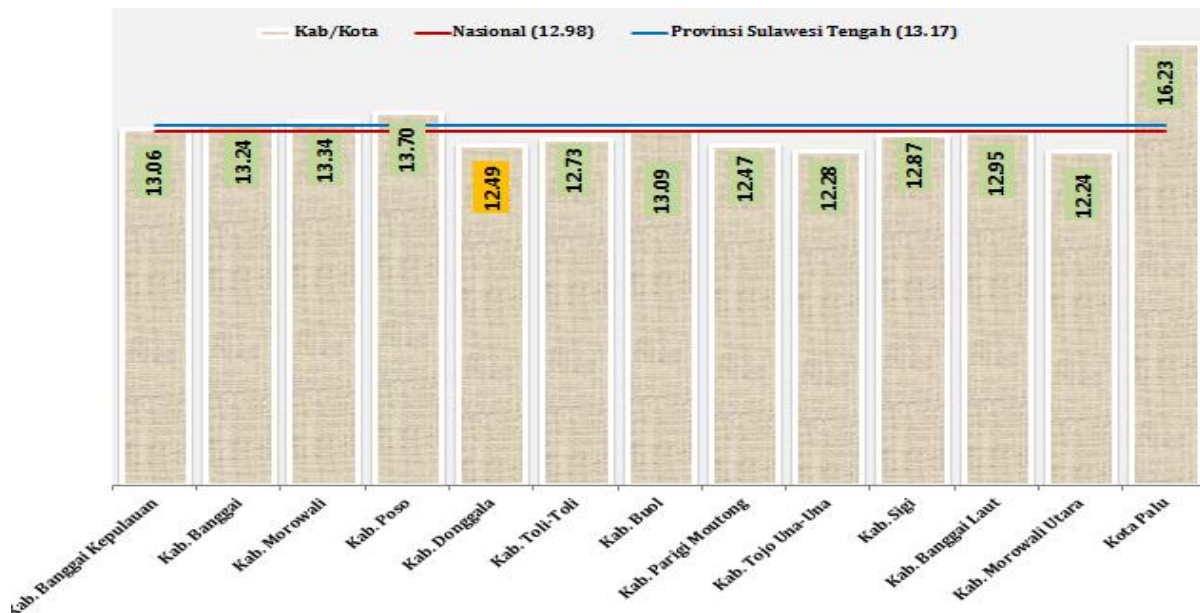
**HLS Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) | Tahun |       |
|------------------------------------|-------|-------|
|                                    | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala                 | 12,48 | 12,49 |
| Provinsi Sulawesi Tengah           | 13,14 | 13,17 |
| Nasional                           | 12,95 | 12,98 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 meningkat dari 12,48 tahun pada Tahun 2019 menjadi 12,49 tahun pada Tahun 2020. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,49 tahun atau setara dengan Diploma I. Meningkatnya HLS mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang

bersekolah. Capaian HLS Kabupaten Donggala berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 13,17 tahun dan secara nasional sebesar 12,98 tahun.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.13.**

#### **HLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Tahun)**

Berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Donggala berada pada urutan kesepuluh dengan capaian sebesar 12,49 tahun. Urutan tertinggi adalah Kota Palu dengan capaian sebesar 16,23 tahun, urutan kedua adalah Kabupaten Poso sebesar 13,70 tahun, dan urutan ketiga adalah Kabupaten Morowali sebesar 13,34 tahun. Sementara Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan terakhir sebesar 12,24 tahun.

#### **2.2.2.4. Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka UHH rendah di suatu daerah menunjukkan capaian pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan kalori. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Donggala Tahun 2019- 2020 sebesar 66,85 tahun atau tidak mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Donggala sebesar 67,64 Tahun 2020. UHH Kabupaten Donggala lebih rendah dari rata-rata UHH Sulawesi Tengah 68,69 tahun dan Nasional sebesar 71,47 tahun pada Tahun 2020.

**Tabel 2.33.**  
**UHH Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) | Tahun |       |
|----------------------------------|-------|-------|
|                                  | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala               | 66,85 | 67,33 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024   | 67,57 | 67,64 |
| Provinsi Sulawesi Tengah         | 68,23 | 68,69 |
| Nasional                         | 71,34 | 71,47 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

Situasi Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Donggala dapat diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH). Mencermati perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat dalam 3 Tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang berarti. Dalam rangka meningkatkan UHH tersebut berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah terutama untuk menekan Angka Kematian Ibu melahirkan. Jika dilihat dari klasifikasi komponen Indeks

Harapan Hidup yang dicapai, maka Kabupaten Donggala pada dua tahun terakhir (2019-2020) berada pada kategori sedang (antara nilai 66,29-67,69). Dengan demikian, melihat kenyataan tersebut baik rata-rata Kabupaten Donggala maupun di Sulawesi Tengah, indeks peluang umur panjang dan sehat tidak ada yang masuk kategori tinggi (antara nilai 69,70-74,40).



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)

**Gambar 2.14.**  
**UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (Tahun)**

Usia harapan Hidup (UHH) Kabupaten Donggala berada pada urutan kedelapan dengan capaian sebesar 67,33 tahun. Kabupaten Poso menempati urutan pertama sebesar 71,18 tahun, urutan kedua Kota Palu sebesar 71,04 tahun, dan urutan ketiga Kabupaten Banggai 70,88 tahun. Sementara posisi terendah adalah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 64,30 tahun.

#### **2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Kurang**

Gizi kurang adalah suatu keadaan dimana berat badan balita tidak sesuai dengan usia yang disebabkan oleh karena konsumsi gizi yang

tidak mencukupi kebutuhan dalam waktu tertentu. Balita gizi kurang adalah balita dengan status gizi berdasarkan korelasi berat badan dengan umur nilai zscore :  $-3$  SD sampai dengan  $<-2$  SD. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 meningkat dari 15,0 persen menjadi 16,7 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11 persen.

**Tabel 2.34.**

**Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Persentase Balita Gizi Kurang (%) | Tahun |      |
|-----------------------------------|-------|------|
|                                   | 2019  | 2020 |
| Kabupaten Donggala                | 15,0  | 16,7 |
| Provinsi Sulawesi Tengah          | 11,3  | 11,9 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

#### **2.2.2.6. Stunting**

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekeurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U. Selain itu juga dilihat dari hasil penimbangan berat badan berdasarkan umur antara gizi buruk dan gizi kurang (BB/U. Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek diantaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan (kognitif, motorik, bicara), meningkatnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan

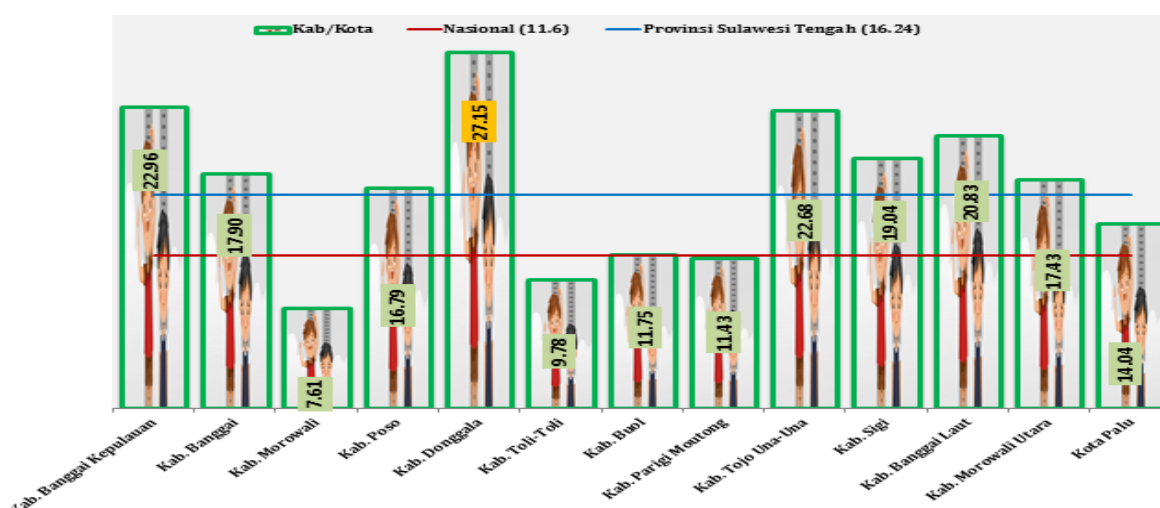
pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas kerja.

**Tabel 2.35.**  
**Angka Stunting Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Angka Stunting (%)       | Tahun |       |
|--------------------------|-------|-------|
|                          | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala       | 34,90 | 27,15 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 21,40 | 16,24 |
| Nasional                 | 27,67 | 11,60 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020, (Data Diolah)**

Angka Stunting Kabupaten Donggala tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan yang signifikan dari 34,90 persen Tahun 2019 menjadi 27,15 persen Tahun 2020. Begitupula Angka Stunting Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional juga mengalami penurunan. Walaupun Angka Stunting Kabupaten Donggala menurun, namun prevalensinya masih di atas ambang dari WHO yang menghendaki Angka Stunting kurang dari 20 persen, sehingga Angka Stunting perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.15.**

**Angka Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)**

Angka Stunting menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menempatkan Kabupaten Donggala berada pada urutan pertama dengan capaian tertinggi sebesar 27,15 persen dan berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Posisi tertinggi kedua capaian angka stunting adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 22,96 persen. Sementara capaian angka stunting terendah adalah Kabupaten Morowali sebesar 7,61 persen.

#### **2.2.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja terhadap Jumlah Tenaga Kerja. Angkatan Kerja (AK) adalah jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) yang diperoleh dari perhitungan Jumlah Tenaga Kerja (TK), yaitu penduduk berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun dikurangi dengan Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK). Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia di antara 15 sampai dengan



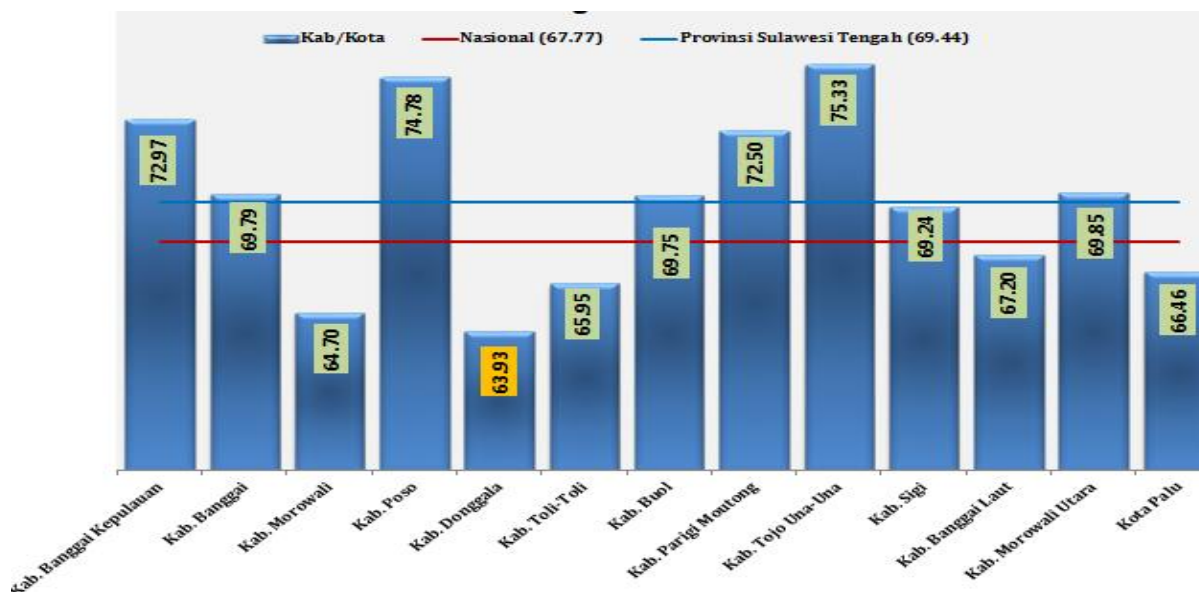
65 tahun yang tidak sedang mencari pekerjaan (karena sedang sekolah, ibu rumah tangga, dan lain alasan yang membuat mereka tidak sedang mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Tabel 2.36.**  
**TPAK Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja<br>(TPAK/%) | Tahun |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala                             | 65,52 | 63,93 |
| Provinsi Sulawesi Tengah                       | 67,80 | 69,44 |
| Nasional                                       | 67,49 | 67,77 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

TPAK Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 65,52 persen menjadi 63,93 persen Tahun 2020, artinya bahwa semakin rendah pasokan tenaga kerja yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa. Sementara TPAK Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional mengalami peningkatan sebesar 69,44 persen dan 67,77 persen Tahun 2020. Secara keseluruhan TPAK Kabupaten Donggala masih berada di bawah rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan TPAK Kabupaten Donggala diantaranya adalah meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)

**Gambar 2.16.**  
**TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah**  
**dan Nasional Tahun 2020 (%)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menempatkan Kabupaten Donggala berada pada urutan terendah ketigabelas dengan capaian sebesar 63,93 persen. Posisi tertinggi capaian TPAK adalah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 75,33 persen dan berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Sementara capaian TPAK urutan kedua adalah Kabupaten Poso sebesar 74,78 persen dan urutan ketiga adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 72,97 persen.

#### **2.2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang

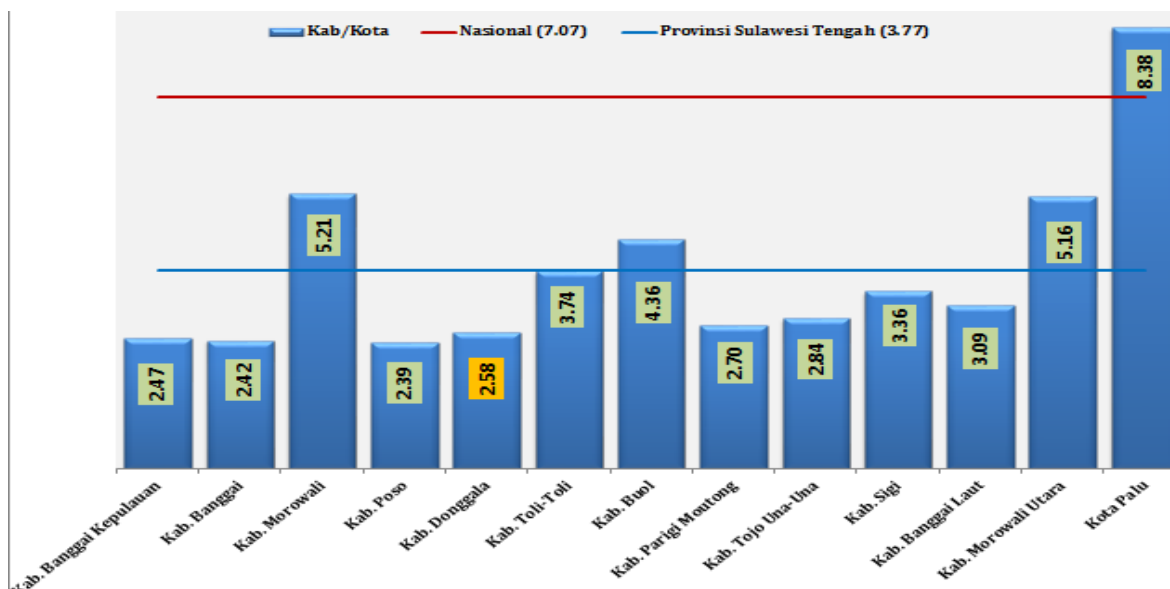
tidak terserap pada pasar kerja. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

**Tabel 2.37.**  
**TPT Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| Tingkat Pengangguran Terbuka<br>(TPT/%) | Tahun |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
|                                         | 2019  | 2020 |
| Kabupaten Donggala                      | 2,81  | 2,58 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024          | 3,12  | 3,11 |
| Provinsi Sulawesi Tengah                | 3,11  | 3,77 |
| Nasional                                | 5,23  | 7,07 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

TPT Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 2,81 persen menjadi 2,58 persen Tahun 2020, artinya sebesar 2,58 persen penduduk yang belum terserap dalam pasar kerja. Angka TPT Kabupaten Donggala tidak melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2020 sebesar 3,11 persen. Sementara TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional mengalami peningkatan sebesar 3,77 persen dan 7,07 persen Tahun 2020. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Donggala masih berada di bawah rata-rata TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.



**Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (data diolah)**

**Gambar 2.17.**

**TPT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020 (%)**

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menempatkan Kabupaten Donggala berada pada urutan terendah kesepuluh dengan capaian sebesar 2,58 persen. Posisi tertinggi capaian TPT adalah Kota Palu sebesar 8,38 persen dan berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Sementara capaian TPT urutan kedua adalah Kabupaten Morowali sebesar 5,21 persen dan urutan ketiga adalah Kabupaten Morowali Utara sebesar 5,16 persen.

**2.2.2.9. Rasio Penduduk yang Bekerja**

Indikator rasio penduduk yang bekerja dalam laporan RPJMD ini menyangkut tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran. Yang dimaksud dengan Rasio Penduduk yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja.

**Tabel 2.38.****Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| <b>Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)</b> | <b>Tahun</b> |             |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
|                                        | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| Penduduk yang Bekerja                  | 135,367      | 135,340     |
| Angkatan Kerja                         | 139,282      | 138,929     |
| Rasio Penduduk Yang Bekerja            | 97,19        | 97,42       |
| Target RPJMD Periode 2019-2024         | 82,57        | 84,63       |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan menjadi 97,42 persen atau melampaui target RPJMD Tahun 2019-2020 sebesar 82,57 persen menjadi 84,63 persen Tahun 2020.

**2.2.2.10. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja**

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah tenaga kerja. Diperoleh laju pertumbuhannya sebesar 40,09 persen Tahun 2019 menurun menjadi 37,30 persen Tahun 2020. Persentase laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.39.**

**Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten  
Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional  
Tahun 2019-2020**

| Laju Pertumbuhan PDRB per<br>Tenaga Kerja (%) | Tahun        |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                               | 2019         | 2020         |
| PDRB                                          | 8,522,094.12 | 8,107,033.92 |
| Tenaga Kerja                                  | 212,582      | 217,330      |
| Laju Pertumbuhan                              | 40,09        | 37,30        |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **2.2.2.11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

**Tabel 2.40.**

**Persentase Pendapatan Terhadap Pendapatan  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Persentase PAD Terhadap<br>Pendapatan | Tahun                    |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | 2019                     | 2020                     |
| Pendapatan Daerah (Rp)                | 1.885.423.205.858,1<br>2 | 1.266.838.755.205,<br>49 |
| Pendapatan Asli Daerah<br>(Rp)        | 82.731.306.991,13        | 106.028.267.179,49       |
| Persentase (%)                        | 4,39                     | 8,37                     |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 mengalami penurunan dengan capaian Rp. 1.266.838.755.205,49, sementara PAD mengalami peningkatan menjadi Rp.106.028.267.179,49.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari 4,39 persen menjadi 8,37 persen.

#### **2.2.2.12. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Donggala, terutama dalam sumbangan terhadap PDRB, serta penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan daerah. Kontribusi sektor pertanian (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 39,83 persen. Sementara Kontribusi sektor pertanian (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 35,11 persen.

**Tabel 2.41.**  
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

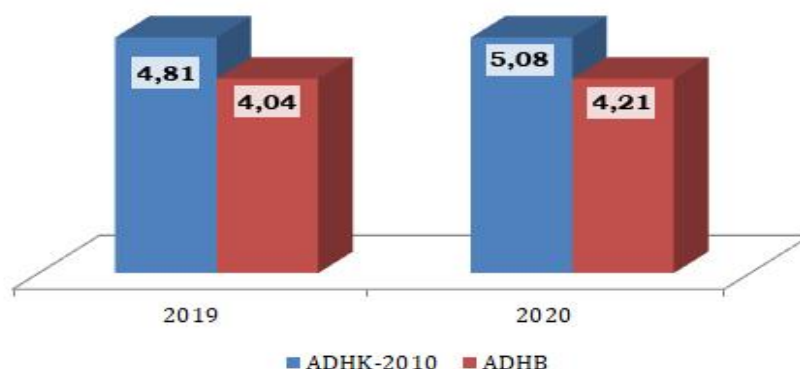
| Uraian                                         | Tahun         |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | 2019          | 2020          |
| Nilai Sektor Pertanian (ADHK 2010) Juta Rupiah | 3.231.584,91  | 3.228.677,93  |
| Nilai Sektor Pertanian (ADHB) Juta Rupiah      | 4.013.536,42  | 4.114.846,12  |
| Nilai PDRB (ADHK-2010) Juta Rupiah             | 8.522.094,12  | 8.107.033,92  |
| Nilai PDRB (ADHB) Juta Rupiah                  | 12.110.733,76 | 11.720.479,49 |
| Kontribusi (%)                                 |               |               |
| ADHK-2010                                      | 37,92         | 39,83         |
| ADHB                                           | 33,14         | 35,11         |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **2.2.2.13. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB**

Tanaman palawija atau tanaman pangan di Kabupaten Donggala terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, serta berbagai tanaman pangan lainnya. Kontribusi sektor pertanian palawija (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 4,81 persen dan 5,08 persen. Sementara Kontribusi sektor pertanian palawija (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 4,04 persen dan 4,21 persen.





Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)

**Gambar 2.18.**

**Kontribusi Sektor Pertanian Palawija Terhadap PDRB  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

#### **2.2.2.14. Produksi Sektor Pertanian**

Kondisi produksi padi pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Faktor penurunan luas lahan tanam menjadi hal utama yang menyebabkan turunnya jumlah produksi, tetapi ancaman kekeringan dan gagal panen tetap menjadi mimpi buruk bagi para petani, yang pada akhirnya juga menyebabkan produksi menurun. Penurunan produksi padi disebabkan oleh musim kemarau yang menyebabkan berkurang debit irigasi, sehingga luas panen padi berkurang. Produksi padi mengalami fluktuasi seiring dengan luas penggunaan lahan (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala, 2020). Produksi jagung yang dicapai pada Tahun 2019 sebesar 60.694 ton, Naik menjadi 63,975 ton Pada tahun 2020, Kedelai 325 ton pada Tahun 2019, Naik mencapai 1,642 ton thn 2020; tahun 2019 produksi kacang Tanah 283 ton naik sebesar 417 ton tahun 2020; produksi kacang hijau tahun 2019 mencapai 23 Ton sama produksinya dengan tahun 2020 23 ton; tahun 2019 produksi Ubi kayu 2,517 Ton naik sebesar 3,916 Ton tahun 2020 sedangkan Ubi jalar juga mengalami kenaikan dari 1,060 ton tahun 2019 naik menjadi 1,472 ton tahun 2020.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala yaitu:

1. Program penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

**Tabel 2.42.**  
**Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

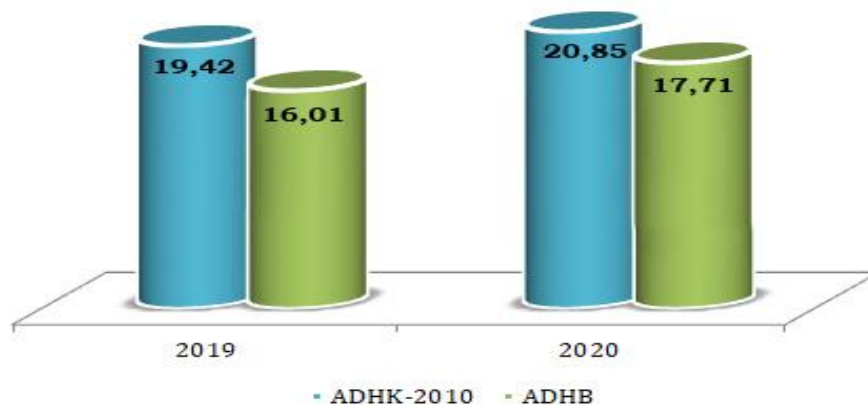
| Jenis Tanaman | Tahun (ton) |        |
|---------------|-------------|--------|
|               | 2019        | 2020*  |
| Padi          | 120.550     | 95.030 |
| Jagung        | 60.694      | 63.975 |
| Kedelai       | 325         | 1.642  |
| Kacang Tanah  | 283         | 417    |
| Kacang Hijau  | 22          | 23     |
| Ubi Kayu      | 2.517       | 3.916  |
| Ubi Jalar     | 1.060       | 1.472  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**  
**\*Data masih sementara**

#### **2.2.2.15. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB**

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Komoditas yang termasuk komoditas sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan teh. Perkebunan dibagi menjadi tiga berdasarkan jenis pengusahaannya, yaitu: perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara. Terdapat tiga ciri-ciri perkebunan rakyat dilihat dari usaha taninya, yaitu: 1) Perkebunan rakyat memiliki luas areal yang diusahakan secara kecil dan perorangan; 2) Pengelolaannya masih menggunakan teknologi yang sederhana dan tradisional; 3) Perkebunan rakyat juga memiliki kelemahan pada permodalan, pemasaran dan kualitas produksinya.

Kontribusi sektor perkebunan (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 19,42 persen dan 20,85 persen. Sementara Kontribusi sektor perkebunan (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 16,01 persen dan 17,71 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)

Gambar 2.19.

**Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

**2.2.2.16. Produksi Sektor Perkebunan**

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 komoditi yang paling besar produksinya adalah Kelapa sebesar 29.609,10 ton dan Kakao sebesar 17.952,48 ton. Wilayah penghasil kelapa adalah tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Donggala sedangkan produksi terbesar berasal dari kecamatan mulai dari Kecamatan Sirenja sampai Sojol Utara, Kecamatan Sindue Tombusabaora, Kecamatan Banawa Selatan dan Kecamatan Rio Pakava.

Tabel 2.43.

**Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Donggala  
Tahun 2019-2020**

| Jenis Tanaman | Tahun (ton) |           |
|---------------|-------------|-----------|
|               | 2019        | 2020      |
| Kelapa Sawit  | 17.646,8    | 16.867,11 |
| Kelapa        | 28.678,20   | 29.609,10 |
| Kakao         | 17.880,11   | 17.952,48 |
| Kopi          | 365,85      | 354,96    |
| Cengkeh       | 1.805,7     | 2.094,1   |
| Kapuk         | 39,1        | 38,3      |
| Lada          | 46,3        | 46,1      |

| Jenis Tanaman | Tahun (ton) |       |
|---------------|-------------|-------|
|               | 2019        | 2020  |
| Pala          | 112,1       | 293,0 |
| Vanili        | 9,4         | 12,5  |
| Jambu Mete    | 146,4       | 194,3 |
| Sagu          | 2,2         | 3,6   |
| Kemiri        | 35,9        | 39,8  |
| Nilam         | 1,1         | 1,9   |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### 2.2.2.17. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kegiatan pertambangan dan penggalan adalah kegiatan yang mencakup penggalan, pemboran, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Kontribusi sektor pertambangan (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 16,32 persen menurun menjadi 13,56 persen. Sementara Kontribusi sektor pertanian (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 19,36 persen menurun menjadi 16,12 persen.

**Tabel 2.44.**

#### **Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                            | Tahun         |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                   | 2019          | 2020          |
| Nilai Sektor Pertambangan (ADHK 2010) Juta Rupiah | 1.390.598,50  | 1.099.678,92  |
| Nilai Sektor Pertambangan (ADHB) Juta Rupiah      | 2.344.287,57  | 1.888.824,14  |
| Nilai PDRB (ADHK-2010) Juta Rupiah                | 8.522.094,12  | 8.107.033,92  |
| Nilai PDRB (ADHB) Juta Rupiah                     | 12.110.733,76 | 11.720.479,49 |
| Kontribusi (%)                                    |               |               |
| ADHK-2010                                         | 16,32         | 13,56         |
| ADHB                                              | 19,36         | 16,12         |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **2.2.2.18. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Kegiatan yang dicakup dalam sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Kegiatan yang dicakup dalam sektor 30 perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang tersebut. Kontribusi sektor perdagangan (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 9,63 persen. Sementara Kontribusi sektor perdagangan (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 9,02 persen.

**Tabel 2.45.**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                           | Tahun         |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                  | 2019          | 2020          |
| Nilai Sektor Perdagangan (ADHK 2010) Juta Rupiah | 823.113,19    | 780.520,65    |
| Nilai Sektor Perdagangan (ADHB) Juta Rupiah      | 1.072.827,90  | 1.057.818,78  |
| Nilai PDRB (ADHK-2010) Juta Rupiah               | 8.522.094,12  | 8.107.033,92  |
| Nilai PDRB (ADHB) Juta Rupiah                    | 12.110.733,76 | 11.720.479,49 |
| Kontribusi (%)                                   |               |               |
| ADHK-2010                                        | 9,66          | 9,63          |
| ADHB                                             | 8,86          | 9,02          |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **2.2.2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**

Kegiatan industri adalah kegiatan untuk merubah bentuk baik secara teknis maupun secara kimiawi dari bahan organik atau anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mesin atau tangan, baik dibuat didalam sebuah pabrik atau rumah tangga. Termasuk juga disini

perakitan bagian suku cadang barang-barang industri di pabrik seperti peralatan mobil dan alat-alat elektronik. Industri pengolahan secara garis besarnya dibagi atas dua kelompok yaitu industri dengan migas dan industri tanpa migas. Kontribusi sektor Industri (ADHK-2010) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 2,34 persen. Sementara Kontribusi sektor Industri (ADHB) terhadap PDRB Tahun 2019-2020 sebesar 2,34 persen.

**Tabel 2.46.**  
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                        | Tahun         |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 2019          | 2020          |
| Nilai Sektor Industri (ADHK 2010) Juta Rupiah | 201.125,70    | 188.887,30    |
| Nilai Sektor Industri (ADHB) Juta Rupiah      | 284.294,21    | 272.964,16    |
| Nilai PDRB (ADHK-2010) Juta Rupiah            | 8.522.094,12  | 8.107.033,92  |
| Nilai PDRB (ADHB) Juta Rupiah                 | 12.110.733,76 | 11.720.479,49 |
| Kontribusi (%)                                |               |               |
| ADHK-2010                                     | 2,36          | 2,34          |
| ADHB                                          | 2,35          | 2,34          |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

## **2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

#### **2.3.1.1. Pendidikan**

Pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan kemakmuran bagi dirinya sendiri, alam, dan lingkungannya. Oleh karena itu, pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk wajib belajarnya dalam rangka persaingan yang lebih adil dan bermartabat. Hal ini sangat

relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan dan mengacu kepada salah satu target SDGs mengenai pendidikan dasar untuk semua, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran, dan program yang tepat, efektif, dan memadai.

#### **A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah ini. Tabel berikut ini memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan jumlah anak didik pada jenjang pendidikan non formal PAUD di Kabupaten Donggala dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Dari gambar tersebut dapat dilihat perkembangan jumlah siswa PAUD di wilayah ini yang terus mengalami peningkatan, dengan jumlah anak usia 4-6 tahun.

**Tabel 2.47.**

**PAUD Kabupaten Donggala dibanding  
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| PAUD                              | Tahun  |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
|                                   | 2019   | 2020   |
| Jumlah Murid TK/RA (Jiwa)         | 7.054  | 7.533  |
| Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun (Jiwa) | 32.696 | 25.140 |
| PAUD (%)                          | 21,57  | 29,96  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024    | 22,00  | 23,00  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

PAUD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 meningkat dari 21,57 persen menjadi 29,96 persen, berdasarkan target RPJMD Tahun 2019-2020 jumlah tersebut lebih tinggi dari



target sebesar 22,00 persen Tahun 2019 menjadi 23,00 persen Tahun 2020.

### **B. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK untuk menunjukkan 1) berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. 2) untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. 3) Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

#### **(1) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan SD/MI**

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 99,14 persen cenderung tidak mengalami perubahan walaupun melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 98,50 persen. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional dengan angka sebesar 103,95 persen dan 106,32 persen, berada di bawah rata-rata.

**Tabel 2.48.****APK SD/MI Kabupaten Donggala dibanding  
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APK SD/MI<br>(%)               | Tahun  |        |
|--------------------------------|--------|--------|
|                                | 2019   | 2020   |
| Kabupaten Donggala             | 99,14  | 99,14  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 98,50  | 98,50  |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 105,13 | 103,95 |
| Nasional                       | 103,50 | 106,32 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

**(2) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan SMP/MTs**

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 107,6 persen cenderung tidak mengalami perubahan walaupun melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 98,2 persen. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional dengan angka sebesar 91,98 persen dan 92,06 persen, berada di atas rata-rata.

**Tabel 2.49.****APK SMP/MTs Kabupaten Donggala dibanding  
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APK SMP/MTs<br>(%)             | Tahun  |       |
|--------------------------------|--------|-------|
|                                | 2019   | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 107,6  | 107,6 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 98,2   | 98,2  |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 90,63  | 91,98 |
| Nasional                       | 101,32 | 92,06 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

### (3) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan SMA/MA

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 80,1 persen cenderung tidak mengalami perubahan walaupun melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 68,18 persen. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional dengan angka sebesar 88,42 persen dan 84,53 persen, berada di bawah rata-rata.

**Tabel 2.50.**  
**APK SMP/MTs Kabupaten Donggala dibanding**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APK SMA/MA<br>(%)              | Tahun |       |
|--------------------------------|-------|-------|
|                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 80,1  | 80,1  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 68,18 | 68,18 |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 87,35 | 88,42 |
| Nasional                       | 92,92 | 84,53 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

### C. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Donggala di Tahun 2020 mencapai 100 persen untuk semua jenjang pendidikan begitupula di Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

**Tabel 2.51.**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Donggala**  
**dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2019-2020**

| Angka Pendidikan yang<br>Ditamatkan<br>(%) | Tahun |      |
|--------------------------------------------|-------|------|
|                                            | 2019  | 2020 |
| Kabupaten Donggala                         | 100   | 100  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024             | 100   | 100  |
| Provinsi Sulawesi Tengah                   | 100   | 100  |
| Nasional                                   | 100   | 100  |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **D. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

### (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing sebesar 93,48 persen dan 93,38 persen. Capaian ini lebih rendah atau tidak mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 96,79 persen Tahun 2020. Capaian APM ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Donggala akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat, namun sedikit mengalami penurunan. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional lebih rendah dibandingkan Kabupaten Donggala atau lebih baik dari capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

**Tabel 2.52.**

**APM SD/MI/Paket A Kabupaten Donggala dibanding  
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APM SD/MI/Paket A<br>(%)       | Tahun |       |
|--------------------------------|-------|-------|
|                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 93,48 | 93,38 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 95,83 | 96,79 |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 93,17 | 93,24 |
| Nasional                       | 92,88 | 97,69 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

### (2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

APM SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 77,43 persen dan 77,51 persen. Capaian ini lebih tinggi atau melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 75,92 persen Tahun 2020. Capaian APM ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Donggala akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMP/Sederajat. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah

dibandingkan Kabupaten Donggala atau lebih baik dari capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 2.53.**

**APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APM SMP/MTs/Paket B (%)        | Tahun |       |
|--------------------------------|-------|-------|
|                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 77,43 | 77,51 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 73,71 | 75,92 |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 73,82 | 74,42 |
| Nasional                       | 77,21 | 80,12 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

**(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C**

APM SMA/MA/Paket C di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 59,38 persen dan 60,45 persen. Capaian ini lebih rendah atau tidak mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 61,72 persen Tahun 2020. Capaian APM ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Donggala akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/Sederajat, namun sedikit mengalami penurunan. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional lebih tinggi, Kabupaten Donggala berada di bawah rata-rata APM SMA/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

**Tabel 2.54.****APM SMA/MA/Paket C Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| <b>APM SMA/MA/Paket C (%)</b>  | <b>Tahun</b> |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|
|                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| Kabupaten Donggala             | 59,38        | 60,45       |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 59,93        | 61,72       |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 64,66        | 65,02       |
| Nasional                       | 70,99        | 61,25       |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

**E. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 penduduk usia pendidikan dasar. Adapun kegunaan dari APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda.

**(1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A**

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Tahun 2019-2020 nilai APS pada tingkat SD/MI/Paket A di Kabupaten Donggala sebesar 98,8 persen dan mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2020 sebesar 98,8 persen. Capaian APS pada tingkatan pendidikan SD/ sederajat di atas capaian Sulawesi Tengah, dan berada dibawah capaian nasional.



**Tabel 2.55.****APS SD/MI/Paket A Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| <b>APS SD/MI/Paket A (%)</b>   | <b>Tahun</b> |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|
|                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| Kabupaten Donggala             | 98,8         | 98,8        |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 98,50        | 98,80       |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 98,40        | 98,38       |
| Nasional                       | 99,24        | 99,26       |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)****(2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B**

Selanjutnya nilai APS pada tingkat SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 98,5 persen dan mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2020 sebesar 98,5 persen. Capaian APS pada tingkatan pendidikan SMP/ sederajat di atas capaian Sulawesi Tengah, dan nasional.

**Tabel 2.56.****APS SMP/MTs/Paket B Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| <b>APS SMP/MTs/Paket B (%)</b> | <b>Tahun</b> |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|
|                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| Kabupaten Donggala             | 98,5         | 98,5        |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 98,20        | 98,50       |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 93,01        | 93,13       |
| Nasional                       | 95,51        | 95,74       |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)****(3) Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C**

Sementara itu nilai APS pada tingkat SMA/MA/Paket C di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 68,5 persen

dan mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2020 sebesar 68,5 persen. Capaian APS pada tingkatan pendidikan SMA/ sederajat di bawah capaian Sulawesi Tengah dan nasional.

**Tabel 2.57.**

**APS SMA/MA/Paket C Kabupaten Donggala dibanding Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020**

| APS SMA/MA/Paket C<br>(%)      | Tahun |       |
|--------------------------------|-------|-------|
|                                | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Donggala             | 68,85 | 68,5  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 | 68,18 | 68,5  |
| Provinsi Sulawesi Tengah       | 97,29 | 75,89 |
| Nasional                       | 72,36 | 72,72 |

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **F. Angka Putus Sekolah**

Anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Akibat yang disebabkan anak putus sekolah adalah kenakalan remaja, tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, minum-minuman dan perkelahian, akibat lainnya juga adalah perasaan minder dan rendah diri.

Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang

sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13- 15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Selanjutnya untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13- 15, 16-18 tahun dan 19-24 tahun) Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan.

**Tabel 2.58.**  
**APTS Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Jenjang Pendidikan | Tahun  |      |           |      |
|--------------------|--------|------|-----------|------|
|                    | Target |      | Realisasi |      |
|                    | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| SD/MI (%)          | 0,03   | 0,02 | 0,06      | 0,05 |
| SMP/MTs (%)        | 0,34   | 0,20 | 0,32      | 0,21 |
| SMA/SMK/MA (%)     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Capaian Angka Putus Sekolah di Kabupaten Donggala terus mengalami penurunan selama Tahun 2019-2020 walaupun masih belum mencapai angka yang ditargetkan. Capaian APTS SD/MI pada Tahun 2019 sebesar 0,06 persen turun menjadi 0,05 persen pada Tahun 2020. APTS SMP/MTs Tahun 2019 sebesar 0,32 persen turun menjadi 0,21 persen pada Tahun 2020, dan APTS SMA/SMK/MA Tahun 2019-2020 sebesar 0,00 persen dan telah mencapai angka yang ditargetkan.

### G. Angka Kelulusan

Target Capaian Angka kelulusan pada tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Donggala, tahun ke tahun terus memperlihatkan hasil yang menggembirakan mencapai angka 100 persen Tahun 2019-2020. Sementara Angka kelulusan pendidikan tingkat SMP/MTs menunjukkan persentase yang tetap namun cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya data Capaian Angka Kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 secara tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.59.**  
**Angka Kelulusan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Jenjang Pendidikan | Tahun  |       |           |       |
|--------------------|--------|-------|-----------|-------|
|                    | Target |       | Realisasi |       |
|                    | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| SD/MI (%)          | 100    | 100   | 100       | 100   |
| SMP/MTs (%)        | 99,57  | 99,77 | 99,61     | 99,73 |
| SMA/SMK/MA (%)     | 100    | 100   | 100       | 100   |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Capaian angka kelulusan SD/MI dan SMA/SMK/MA Tahun 2019-2020 telah mencapai angka yang ditargetkan sebesar 100 persen. Sementara capaian angka kelulusan SMP/MTs belum mencapai angka 100 persen, namun telah menunjukkan capaian yang meningkat dari jumlah yang ditargetkan walaupun Tahun 2020 masih sekitar 99,77 persen.

### H. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Sekolah adalah persentase tamatan sekolah yang melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi. Angka melanjutkan lebih tinggi lebih baik. Pada tingkatan dari SD/MI ke SMP/MTs nilai yang ditargetkan dalam indikator ini cenderung terus membaik hampir mencapai 100 periode 2019-

2020. Namun angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung menurun dengan capaian Tahun 2019 sebesar 100 persen dan Tahun 2020 menjadi sebesar 98,64 persen yang berarti ada sekitar 1,36 persen yang tidak melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

**Tabel 2.60.**

**Angka Melanjutkan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Jenjang Pendidikan                                    | Tahun  |       |           |      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------|
|                                                       | Target |       | Realisasi |      |
|                                                       | 2019   | 2020  | 2019      | 2020 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)      | 99,75  | 99,80 | 100       | 100  |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) | 100    | 98,64 | 100       | 100  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Capaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2019-2020 telah mencapai angka sebesar 100 persen. Capaian ini lebih besar dari angka yang ditargetkan sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan lebih tinggi atau lebih baik.

## **I. Fasilitas Pendidikan**

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang mutlak tersedia di setiap wilayah. Gedung sekolah merupakan fasilitas yang utama dalam proses belajar-mengajar. Namun pada dasarnya bukan hanya jumlah gedung sekolah yang menjadi perhatian namun yang juga menjadi fokus adalah kondisinya juga baik. Fasilitas pendidikan yang memenuhi standar dan layak menjadi wadah untuk mendidik siswa-siswi menjadi generasi masa depan yang kompetitif dan berdaya saing. Pada tahun 2020 capaian fasilitas pendidikan kondisi bangunan baik sekitar 100 persen

atau telah mencapai angka yang ditargetkan. Data mengenai fasilitas pendidikan dalam kondisi baik Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61.**  
**Fasilitas Pendidikan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Fasilitas Pendidikan                                                | Tahun  |       |           |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------|
|                                                                     | Target |       | Realisasi |      |
|                                                                     | 2019   | 2020  | 2019      | 2020 |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)                  | 99,95  | 99,96 | 100       | 100  |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%) | 100    | 100   | 100       | 100  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

#### **J. Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar sebesar 1:90 lebih rendah dari target sebesar 1:96. Data mengenai ketersediaan sekolah di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.62.****Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Rasio Ketersediaan Sekolah</b>                                 | <b>Tahun</b>  |             |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                   | <b>Target</b> |             | <b>Realisasi</b> |             |
|                                                                   | <b>2019</b>   | <b>2020</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b> |
| Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 1:98          | 1:96        | 1:90             | 1:90        |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)****K. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Sedangkan Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di suatu daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Di sisi rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar-mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan.

**Tabel 2.63.****Rasio Guru/Murid Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Rasio Guru/Murid</b>                       | <b>Tahun</b>  |             |                  |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
|                                               | <b>Target</b> |             | <b>Realisasi</b> |             |
|                                               | <b>2019</b>   | <b>2020</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b> |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar     | 1:20          | 1:20        | 1:26             | 1:26        |
| Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | 1:20          | 1:20        | 1:30             | 1:30        |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**



Berdasarkan data bahwa pada tingkatan pendidikan dasar di Kabupaten Donggala mempunyai rasio guru/murid sebesar 1:26 Tahun 2019-2020. Sementara rasio guru/murid pada tingkatan pendidikan menengah sebesar 1:30. Rasio pada kedua tingkatan pendidikan tersebut melampaui rasio yang ditargetkan sebesar 1:20. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

#### **L. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Tabel 2.64.**

**Angka Melek Huruf Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Angka Melek Huruf (%)</b>                                         | <b>Tahun</b>  |             |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                      | <b>Target</b> |             | <b>Realisasi</b> |             |
|                                                                      | <b>2019</b>   | <b>2020</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b> |
| Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | 99,48         | 100         | 99,48            | 100         |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | 96,12         | 97,31       | 96,38            | 97,22       |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

AMH penduduk usia 15-24 tahun menurut jenis kelamin di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 99,48 persen dan 100 persen atau telah mencapai angka yang ditargetkan. Begitupula AMH penduduk usia >15 tahun (tidak buta aksara) Tahun 2020 sebesar 97,22

persen lebih rendah atau belum mencapai angka yang ditargetkan sebesar 97,31 persen Tahun 2020.

#### **2.3.1.2 Kesehatan**

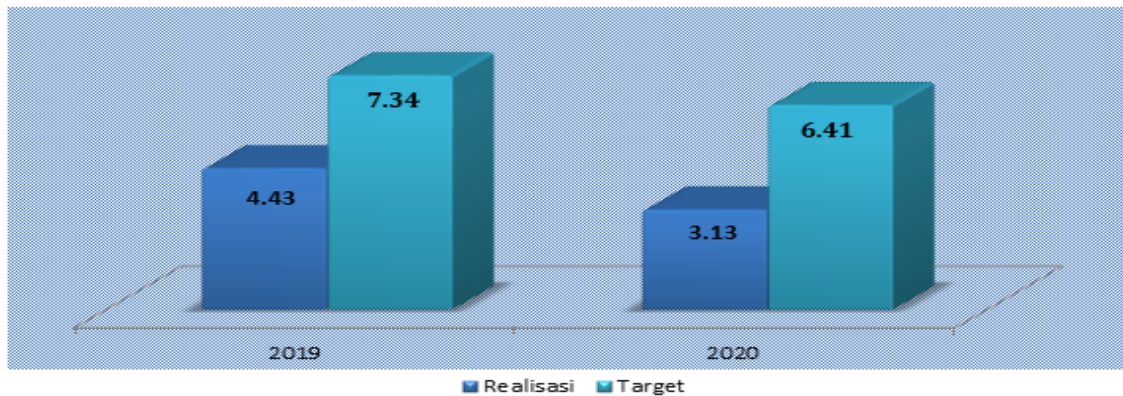
Kesehatan merupakan indikator penting, karena dapat menggambarkan tingkat perbaikan kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan memegang peran penting dalam menyiapkan generasi mendatang yang inovatif dan kreatif. Tanpa pembangunan bidang kesehatan yang baik, tidak mungkin dapat menghasilkan sumberdaya yang andal dan berkualitas. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Donggala sampai saat ini terus diupayakan dan ditingkatkan. Kondisi umum pembangunan kesehatan dapat dilihat kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

##### **A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan, pendarahan dan prevalensi anemia menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan. Pantauan kesehatan ibu semasa kehamilan baik keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan

tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.20.**

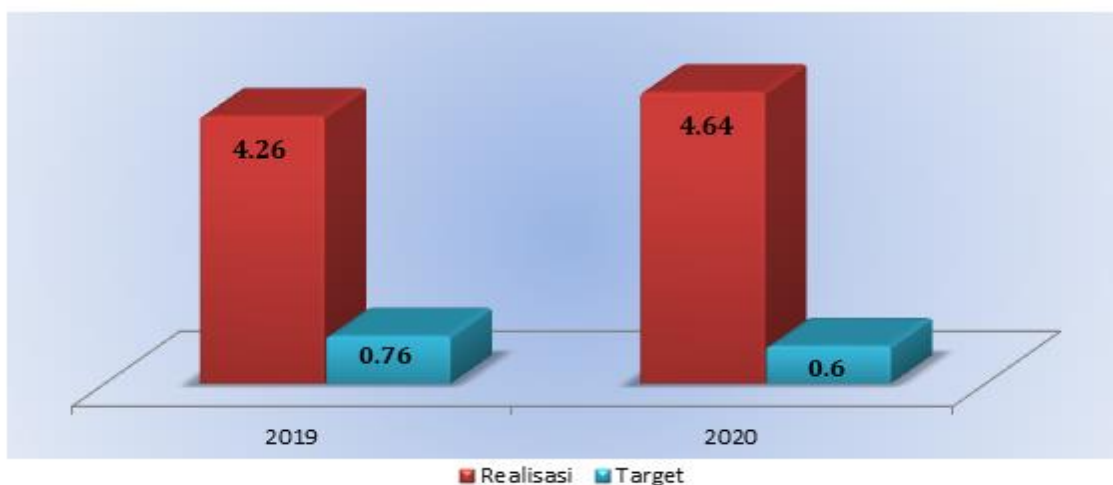
**AKB per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Donggala  
Tahun 2019-2020**

AKB Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 mengalami penurunan angka yaitu sebesar 4,43 per 1000 kelahiran hidup menjadi 3,13 per 1000 kelahiran hidup. Capaian AKB menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan AKB yang ditargetkan sebesar 6,41 per 1000 kelahiran hidup Tahun 2020. Artinya dalam 1000 kelahiran hidup terdapat 3 orang bayi yang meninggal dunia Tahun 2020.

**B. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup**

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan

sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.



**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**  
**Gambar 2.21.**

**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup  
 Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

Dalam kurun waktu 2019-2020, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Donggala, terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 angka kematian neonatal mencapai 4,26 per 1000 kelahiran hidup yang berarti setiap 1000 kelahiran hidup sebanyak 4 orang meninggal, dan menurun menjadi 3 orang pada Tahun 2020. Angka ini lebih besar dari capaian yang ditargetkan yaitu 0,6 per 1000 kelahiran hidup Tahun 2020.

**C. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup**

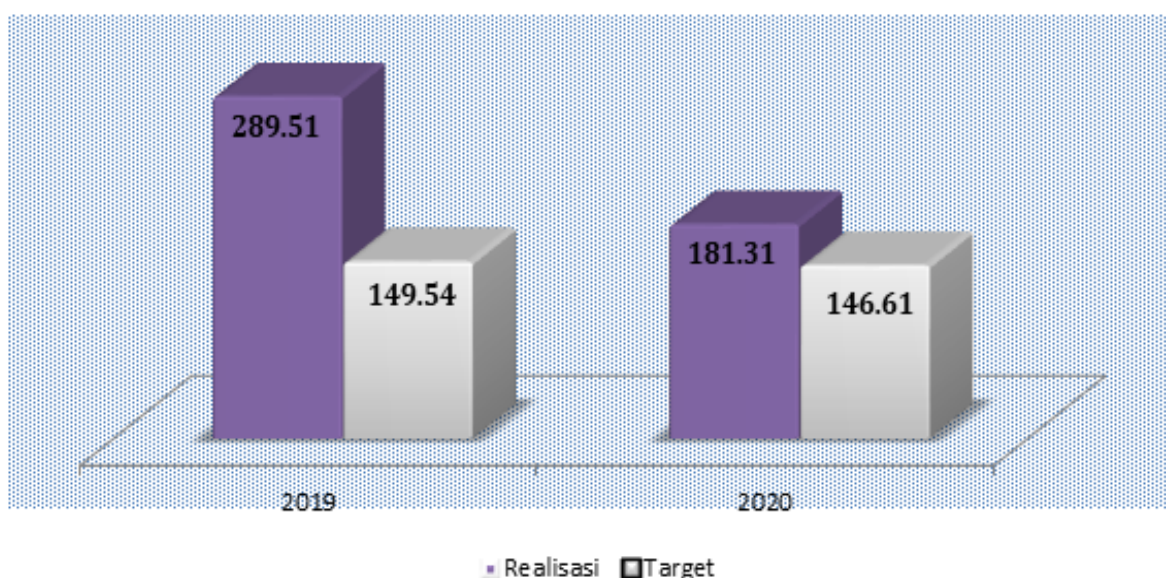
*World Health Organization* (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah *Maternal Death* atau kematian ibu, yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004).

Konsep *Maternal Death* ini berbeda dengan konsep *Maternal Mortality Ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *Maternal Mortality Ratio/AKI* sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75 persen dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014). Tingginya angka kasus kematian ibu sebenarnya bukanlah masalah yang terbilang baru. Upaya penanganan kasus kematian ibu merupakan diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak abad ke 17. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Death In Childbed From The Eighteenth Century To 1935*", Loudon menjelaskan bahwa catatan-catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul pada awal abad ke-17, seiring dengan berkembangnya praktik kebidanan di masyarakat Inggris (Loudon, 1986). Tetapi, komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian ibu agaknya baru hadir di akhir abad ke-20. Pada Tahun 1987, kekhawatiran terkait dampak dari tingginya kasus kematian ibu mendorong WHO dan organisasi-organisasi internasional lain untuk melahirkan *The Safe Motherhood Initiative* (Women & Children First, 2015).

Konsep *Safe Motherhood* sendiri mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *Prenatal*, *Delivery*, dan *Postpartum* yang berkualitas,

dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan (USAID, 2005). Mengacu pada modul yang disusun oleh *The Health Policy Project* (2003), konsep *Safe Motherhood* sendiri memiliki enam pilar utama.



**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.22.**  
**AKI per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

Kurun waktu 2019-2020, angka kematian ibu di Kabupaten Donggala cenderung menurun pada Tahun 2019 dengan capaian 289 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kejadian kematian ibu sebanyak 17 kematian, dan Tahun 2020 sebanyak 11 kematian dengan angka kematian ibu 181,31 per 100.000 kelahiran hidup. Makin tinggi nilai indikator ini, maka merupakan gambaran awal makin buruk pelayanan kesehatan bagi ibu baik yang sedang hamil ataupun pasca melahirkan.



#### D. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk adalah jumlah seluruh puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1000 penduduk. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan.

Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit.

Poskesdes adalah singkatan dari pos kesehatan desa di mana lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

**Tabel 2.65.**

**Gambaran Tentang Rasio Puskesmas, Rasio Poliklinik, dan Rasio Pustu Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                 | Tahun         |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | 2019          | 2020          |
| Puskesmas (unit)       | 18            | 18            |
| Poliklinik (unit)      | 3             | 3             |
| Pustu (unit)           | 74            | 74            |
| Jumlah Faskes (unit)   | 95            | 95            |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 304.110       | 300.463       |
| Rasio Puskesmas        | 0,0591        | 0,0591        |
| Rasio Poliklinik       | 0,0099        | 0,0099        |
| Rasio Pustu            | 0,2433        | 0,2433        |
| <b>Rasio</b>           | <b>0,3164</b> | <b>0,3164</b> |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio puskesmas, poliklinik, pustu konstan 2019-2020 sebesar 0,3164 dengan jumlah Faskes 95 sementara jumlah penduduk Tahun 2020 sebesar 300.463 jiwa. Rasio Pustu sebesar 0,2433 Tahun 2019-2020 lebih tinggi dari rasio Puskesmas sebesar 0,0591 dan rasio poliklinik sebesar 0,0099. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya Obat-obat tersebut didatangkan setiap 3 bulan sekali.

#### **E. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan.

**Tabel 2.66.**

#### **Rasio Rumah Sakit Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Uraian</b>             | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Jumlah Rumah Sakit (unit) | 2            | 2            |
| Jumlah Penduduk (jiwa)    | 304.110      | 300.463      |
| <b>Rasio</b>              | <b>0,007</b> | <b>0,007</b> |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Berdasarkan data dari BPS Tahun 2021 bahwa dari Tahun 2019-2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) unit dengan rasio 0,007 dengan jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 304.110 jiwa menurun menjadi 300.463 jiwa Tahun 2020 sementara jumlah rumah sakit tidak



mengalami pertambahan.

#### **F. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dokter yang dimaksud di sini adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis, tetapi tidak termasuk dokter hewan. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana kondisi idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Semakin banyak tenaga dokter yang tersedia dapat mengindikasikan layanan pengobatan semakin mudah dipenuhi. Rasio dokter per 10000 penduduk menurut standar pelayanan minimal adalah 40 persen dari 10000 penduduk.

**Tabel 2.67.**

#### **Rasio Dokter Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Uraian</b>          | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|------------------------|--------------|--------------|
| Jumlah Dokter (jiwa)   | 34           | 35           |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 304.110      | 300.463      |
| <b>Rasio</b>           | <b>0,113</b> | <b>0,117</b> |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Standar Kementrian Kesehatan, yaitu 26 dokter per 100.000 penduduk atau dengan angka 0,26. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dokter di Kabupaten Donggala kurun Tahun 2019-2020 sebesar 0,113 dan 0,117 dan belum mencapai rasio dokter yang ditetapkan oleh Kemenkes. Kegunaan dari perhitungan rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat juga diinterpretasikan sebagai semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan layanan kesehatan dan

semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi.

#### **G. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Dari sisi lain, rasio ini juga merupakan indikasi ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.

**Tabel 2.68.**

#### **Rasio Tenaga Medis Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>Uraian</b>              | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Tenaga Medis (jiwa) | 733         | 731         |
| Jumlah Penduduk (jiwa)     | 304.110     | 300.463     |
| <b>Rasio</b>               | <b>2,41</b> | <b>2,43</b> |

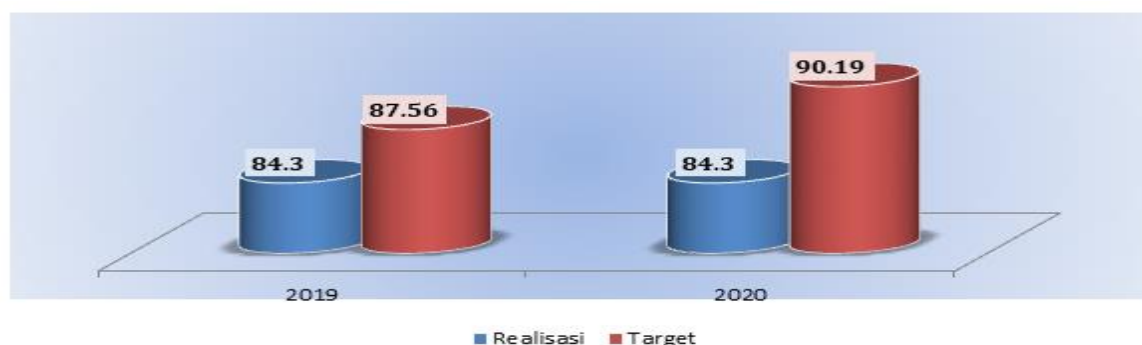
**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Berdasarkan data pada tabel yang menyajikan rasio tenaga medis terhadap penduduk, yakni Kabupaten Donggala mempunyai rasio medis yang meningkat. Rasio tenaga medis Tahun 2019 yakni 2,41 dan rasio tenaga medis Tahun 2020 yakni 2,43. Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap kesehatan, dan makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan).

#### **H. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Angka Kematian Anak dan Angka Kematian ibu merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sebagai masalah sepele.

Jika mencari akar permasalahannya adalah masih rendahnya perhatian yang diberikan kepada ibu hamil, proses kelahiran atau pasca melahirkan yang berdampak akan kematian ibu dan bayi yang di kandungnya. Selain itu, usia anak dari 0 bukan hingga 5 tahun merupakan tahapan kehidupan yang membutuhkan perhatian lebih yang harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah namun harus didukung oleh masyarakat. Perlu kerja sama dan keiklasan bagi semua pihak agar sebuah tujuan pembangunan dapat maksimal.



**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.23.**

**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan). Kurun waktu 2019-2020, di Kabupaten Donggala belum mencapaitarget yang ditentukan oleh Kemenkes yaitu 88 persen persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kebidanan. Sering kali masalah kepercayaan dan kebiasaan melatar belakangi ke mana masyarakat akan melakukan persalinan.

Tahun 2019-2020, ibu yang ditolong masyarakat Kabupaten Donggala sebesar 84,3 persen merupakan penanda

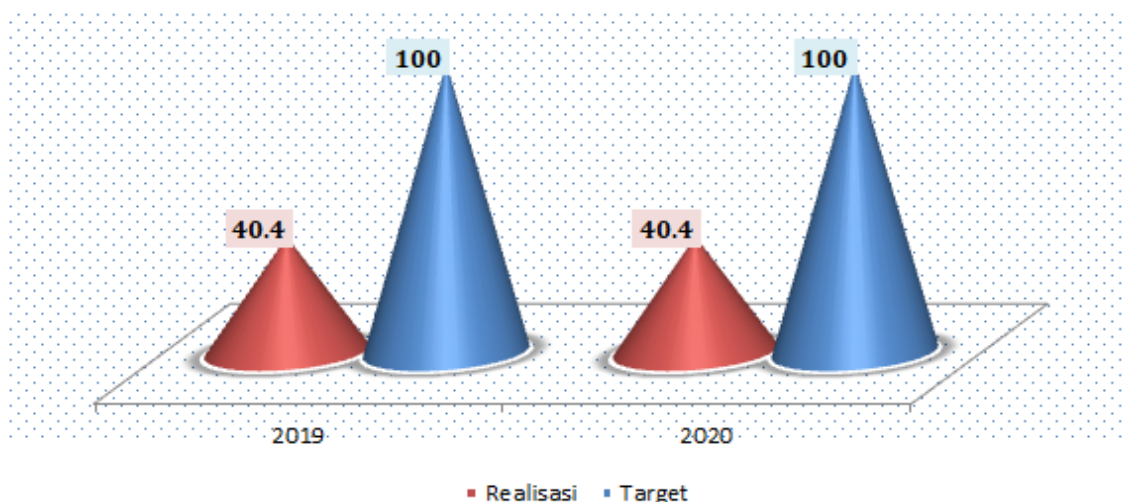
masih kuatnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan non medis dalam proses kelahiran. Namun yang tidak dapat dihindari bahwa dalam proses persalinan seringkali diperhadapkan pada komplikasi kebidanan misalnya pendarahan atau komplikasi sesak nafas pada ibu dan bayi yang membutuhkan keahlian, penanganan serta peralatan sangat penting. Sangat sulit dalam jangka waktu pendek mengubah kepercayaan masyarakat untuk tidak melakukan persalinan non medis dalam proses kelahiran. Salah satu jalan keluar adalah melakukan kerja sama antara para dukun beranak dengan memberikan pelatihan tentang standar proses kelahiran dan memberikan bantuan berupa peralatan yang membantu dalam proses kelahiran. Dengan demikian, diharapkan resiko dalam proses kelahiran yang ditangani dapat diminimalisir misalnya kasus pendarahan, tekanan darah.

#### **I. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor. Definisi gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Banyak faktor yang dapat mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang

seimbang, dapat juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna. Persentase balita gizi buruk adalah proporsi balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.



**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

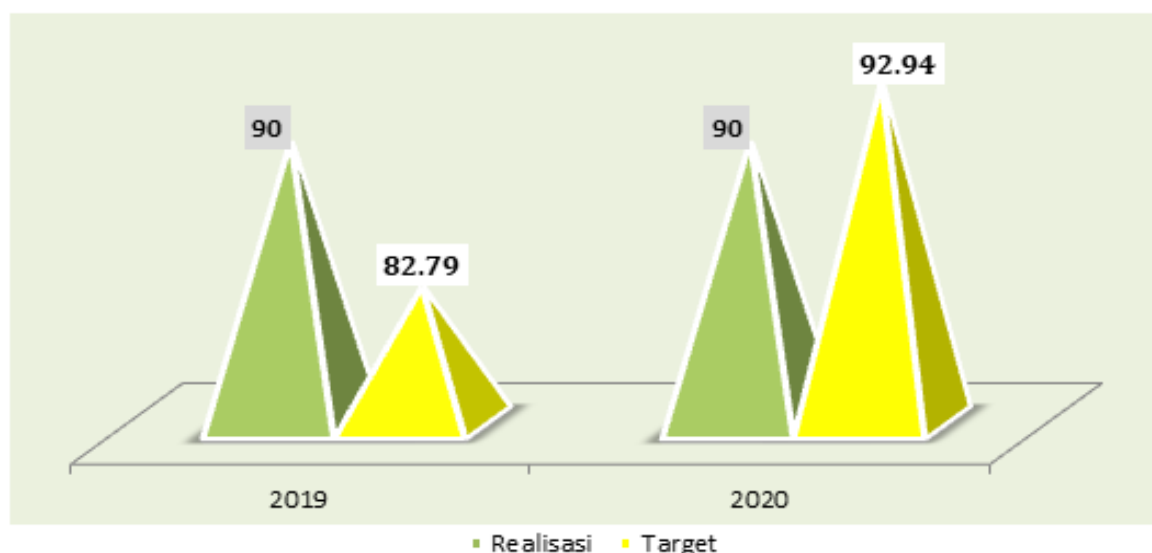
**Gambar 2.24.**

**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

Kurun waktu 2019-2020 cakupan balita bigi buruk yang mendapat perawatan sebesar 40,4 persen atau lebih rendah dari angka capaian yang ditargetkan sebesar 100 persen. Kasus gizi kurang Tahun 2020 sebanyak 2.762 kasus. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status anak balita dan wanita hamil. Oleh karena itu, sasaran dari program perbaikan gizi makro ini berdasarkan siklus kehidupan yaitu dimulai dari wanita usia subur, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, dan anak sekolah.

## J. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Campak alias measles adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini sangat mudah menular dan banyak menyerang anak-anak. Melihat tingginya angka kejadian campak dan rubella, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pencegahan dengan imunisasi measles-rubella (MR) alias campak rubella. Imunisasi MR dapat diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan usia kurang dari 15 Tahun. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Donggala disajikan pada gambar berikut.



**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.25.**

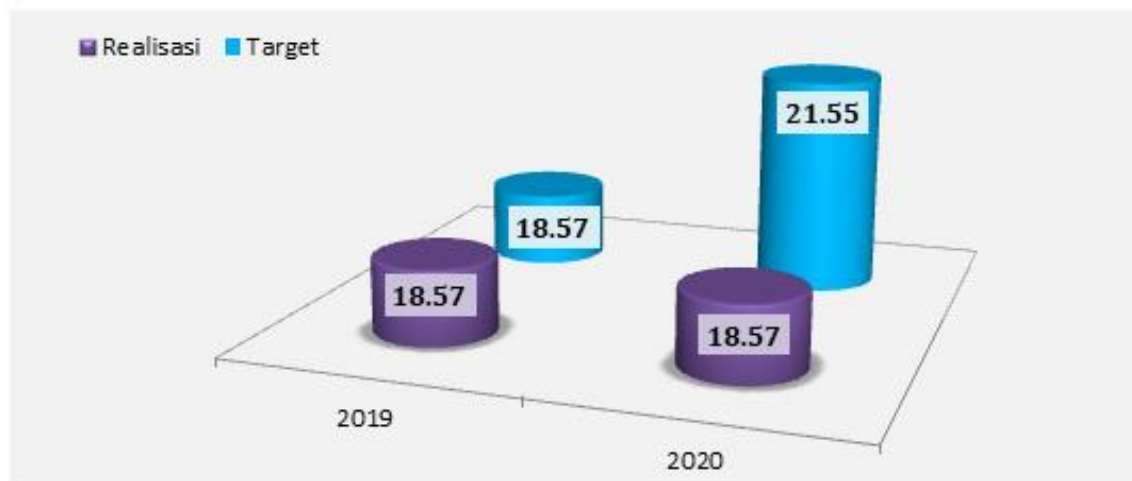
### **Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

Persentase anak usia 1 tahun yang diimuniasi Campak Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala sebesar 90 persen. Persentase Tahun 2019 melampaui angka yang ditargetkan sebesar 82,79 persen sementara Tahun 2020 tidak mencapai target 92,94 persen.

## K. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

TBC atau *Tuberculosis* adalah infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun dapat juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya.

Jenis tuberkulosis yang diderita oleh pasien sering kali merupakan infeksi TBC laten, di mana terdapat bakteri TBC yang “tertidur” atau belum aktif secara klinis. Bakteri TBC akan aktif dan mulai menunjukkan gejala setelah periode waktu tertentu, beberapa minggu bahkan beberapa tahun, tergantung kondisi kesehatan dan daya tahan pasien. Jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah (misalnya pada penderita HIV, kanker, atau pasien yang menjalani kemoterapi), maka TBC akan berkembang lebih cepat.



**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.26.**

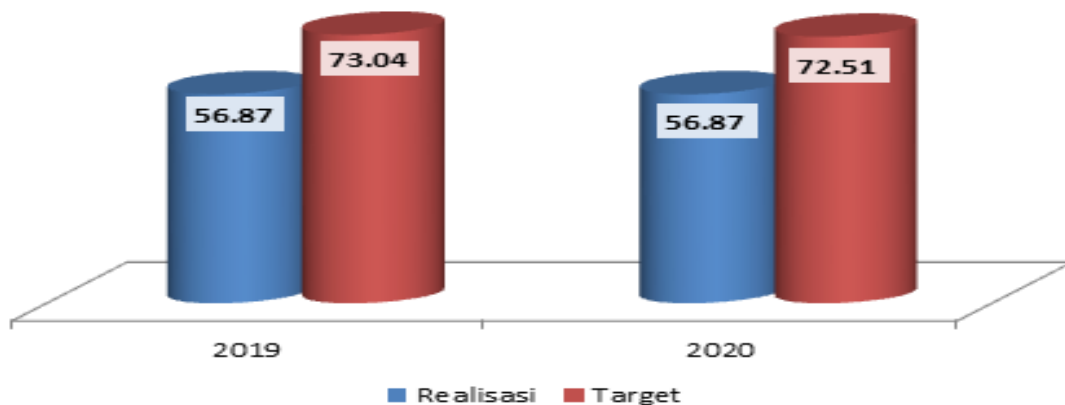
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**



Data berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala 2019-2020, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Donggala masih di bawah 20 persen Tahun 2019-2020 sebesar 18.57 persen lebih rendah dari angka yang ditargetkan 21,55 persen Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perkiraan akan pasien baru TB BTA positif di Kabupaten Donggala yang terus menurun dan diikuti jumlah masyarakat yang memeriksakan diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Jumlah kasus angka penemuan TBC Tahun 2020 sebanyak 24 kasus dengan angka keberhasilan pengobatan TBC Tahun 2020 sebanyak 96 persen.

#### **L. Penderita Diare yang Ditangani**

Diare (*diarrhea*) adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam. Di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Menurut WHO (1999) secara klinis diare didefinisikan sebagai bertambahnya defekasi (buang air besar) lebih dari biasanya/lebih dari tiga kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja (menjadi cair) dengan atau tanpa darah. Secara klinik dibedakan tiga macam sindroma diare yaitu diare cair akut, disentri, dan diare persisten. Sedangkan menurut menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari.



**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

**Gambar 2.27.**

**Penyakit Diare yang Tertangani  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 (%)**

Tahun 2019-2020 jumlah penderita diare yang tertangani di Kabupaten Donggala sebesar 56,87 persen lebih rendah dari kasus diare yang ditargetkan sebesar 72,51 persen Tahun 2020. Kurun waktu 2014-2018 jumlah proyeksi kasus diare di bawah kasus yang ditangani. Hal ini berdampak pada kemampuan penanganan yang tidak optimal yang mengakibatkan karena persiapan yang ada berdasarkan proyeksi tidak memadai dengan jumlah yang harus ditangani.

#### **M. Angka kejadian Malaria**

Malaria adalah penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria dapat terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga dapat terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Gejala malaria biasanya akan muncul antara satu sampai dua minggu setelah tubuh terinfeksi. Gejala juga dapat muncul seTahun

setelah gigitan nyamuk, namun kasus ini jarang terjadi. Gejala-gejala malaria umumnya terdiri dari demam, berkeringat, menggigil atau kedinginan, muntah-muntah, sakit kepala, diare, dan nyeri otot. Jika anda sudah terlanjur mengalami gejala-gejala malaria, segera temui dokter agar dapat dilakukan diagnosis dan penanganan secepatnya. Malaria dapat didiagnosis dengan mudah melalui tes darah yang sederhana. Indikator kinerja bidang kesehatan terkait angka kejadian malaria selama Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.69.**  
**Angka Kejadian Malaria Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Angka kejadian Malaria         | Tahun |       |
|----|--------------------------------|-------|-------|
|    |                                | 2019  | 2020  |
| 1  | Realisasi                      | 0,10  | 43,85 |
| 2  | Target RPJMD Periode 2019-2024 | 1,04  | 0,91  |

**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Angka kejadian malaria Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebesar 0,10 meningkat menjadi 43,85. Capaian ini melampaui angka yang ditargetkan sebesar 0,91 Tahun 2020. Sementara angka kesakitan malaria per 1000 penduduk Tahun 2020 sebesar 0,02 persen.

## **N. Cakupan Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu wilayah kerja tertentu (Depkes, 2011). Pengertian puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat

pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009).

Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Donggala pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 18 unit puskesmas. Berdasarkan kecamatan, sebanyak 14 kecamatan masing-masing memiliki 1 unit puskesmas. Kecamatan Rio Pakava dan Sojol memiliki 2 unit puskesmas. Angka indikator ini lebih tinggi lebih baik. Indikator ini sebagai gambaran awal tentang kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan mendekatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah kecamatan.

**Tabel 2.70.****Cakupan Puskesmas Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                             | Tahun |       |
|------------------------------------|-------|-------|
|                                    | 2019  | 2020  |
| Jumlah Puskesmas (unit)            | 18    | 18    |
| Jumlah Kecamatan                   | 16    | 16    |
| Cakupan Puskesmas (%)              | 90,0  | 93,27 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 (%) | 93,27 | 93,36 |

**Sumber: IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2021, (Data Diolah)**

Cakupan puskesmas di Kabupaten Donggala tahun 2019-2020 meningkat dari 90 persen menjadi 93,27 persen. Angka ini tidak mencapai angka yang ditargetkan sebesar 93,36 persen. Cakupan layanan Puskesmas di Kabupaten Donggala belum mencapai 100 persen. Walaupun demikian, fasilitas Puskesmas telah tersedia di Semua Kecamatan Kabupaten Donggala.

### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar. Kurun waktu 2019-2020 panjang jalan di Kabupaten Donggala cenderung konstan dengan panjang 1015,31 Km, lalu Tahun 2018 meningkat menjadi 1035,53 km. Dilihat dari sisi komposisi keadaan jalan, kondisi jalan dalam kondisi baik dari Tahun 2013-2017 tidak mencapai 50 persen.

**Tabel 2.71.**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**  
**Kabupaten Donggala Periode 2019-2020 (Dalam Km)**

| Uraian                                 | 2019     | 2020     |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Total Panjang Jalan                    | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 0,45     | 0,45     |
| Target RPJMD Periode 2019-2024         | 0,45     | 0,47     |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Berdasarkan Tabel 2.55, rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2019-2020 1.370,00. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah panjang jalan yang disertai dengan terjadinya bencana alam yang menyebabkan penurunan kualitas panjang jalan dalam kondisi baik menjadi kategori sedang serta meningkatnya panjang jalan dalam kondisi rusak.

#### **B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka makin baik dengan indikasi awal makin banyak masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sumber dari Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

**Tabel 2.72.**  
**Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten**  
**Donggala Periode 2019-2020**

| Uraian                                 | 2019    | 2020    |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk (jiwa)                 | 304.110 | 300.463 |
| Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 0,0036  | 0,0036  |
| Target RPJMD Periode 2019-2024         | 0,0036  | 0,0037  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Hasil perhitungan dengan membandingkan antara total panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk diperoleh hasil yang konstan dari Tahun 2019-2020 sebesar 0,0036.

#### **C. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)**

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar.

Nilai indikator ini memiliki kegunaan untuk mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan yang ada di suatu daerah tertentu. Hal tersebut dapat juga dibaca sebagai kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik. Semakin besar nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik.



**Tabel 2.73.**  
**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)**  
**Kabupaten Donggala Periode 2019-2020**

| Uraian                                | 2019     | 2020     |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Panjang Jalan Kabupaten (km)          | 1.035,54 | 1.035,53 |
| Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km) | 353,57   | 353,57   |
| Persentase (%)                        | 44,73    | 44,73    |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 (%)    | 44,73    | 45,88    |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Pada pengukuran indikator ini mengasumsikan bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan roda empat dengan kecepatan  $\geq 40$  Km perjam. Berdasarkan data panjang jalan berdasarkan kondisi jalan, kurun waktu 2019-2020 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik masih di bawah 50 persen dari total panjang jalan.

#### **D. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik-beratkan pada pengawasan terhadap struktur fisik, di mana orang menggunakannya sebagai tempat berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih. Rumah tinggal bersanitasi baik

harus memiliki system pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dengan menggunakan sistem setempat (memiliki *septic tank*). Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Donggala diperlihatkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.74.**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**  
**Kabupaten Donggala Periode 2019-2020**

| Uraian                                   | 2019  | 2020  |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) | 54,44 | 54,44 |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 (%)       | 54,44 | 55,72 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Tabel di atas memperlihatkan persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2019-2020 tidak menunjukkan peningkatan yakni konstan 54,44 persen sementara target 55,72 persen. Artinya sebesar 45,56 persen rumah tinggal tidak bersanitasi. Kondisi tersebut merupakan indikator berkurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, karena salah satu faktor penentu tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan apabila persentase rumah tinggal yang bersanitasi semakin meningkat. Proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal merupakan indikasi tersedianya fasilitas dan akses penduduk suatu daerah terhadap rumah layak huni bersanitasi. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah menyediakan layanan yang layak bagi penduduk dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

#### **E. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum**

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Air Bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air bersih adalah keluarga yang mempunyai kemudahan dalam memperoleh air bersih dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai indikator ini di suatu daerah, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi.

**Tabel 2.75.**  
**Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum**  
**Kabupaten Donggala Periode 2019-2020**

| <b>Uraian</b>                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum (%) | 81,28       | 76,00       |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 (%)             | 81,28       | 83,69       |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Pada Tahun 2019 persentase rumah tangga berakses air minum bersih mencapai 81,28 persen, sementara Tahun 2020 menurun menjadi 76,00 persen dan belum mencapai 80 persen yang artinya lebih dari 20 persen rumah tangga di Kabupaten Donggala belum menikmati air untuk kebutuhan hidup yang dikategorikan sebagai air bersih walaupun angka yang ditargetkan mencapai 83,69 persen namun angka tersebut jauh dari realisasi yang terjadi.

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

##### **A. Rasio Permukiman Layak Huni**

Rasio Permukiman Layak Huni adalah indikator kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara luas pemukiman yang layak huni dengan luas wilayah pemukiman. Realisasi dan

target kinerja indikator Rasio Permukiman Layak Huni pada Tahun 2019-2020 di Kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76.**  
**Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Donggala Periode 2019-2020**

| <b>Uraian</b>                             | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Luas Wilayah Pemukiman (km <sup>2</sup> ) | 5.275,69    | 5.275,69    |
| Rasio Permukiman Layak Huni               | 0,13        | 0,13        |
| Target RPJMD Periode 2019-2024            | 0,13        | 0,13        |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Rasio permukiman layak huni kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 sebanyak 0,13 persen dengan luas wilayah pemukiman 5.275,69 km<sup>2</sup>. Rasio tersebut mencapai angka yang ditargetkan sebesar 0,13 persen.

## **B. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan kelengkapan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.77.**  
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**  
**Kabupaten Donggala Periode 2019-2020**

| <b>Uraian</b>                             | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) | 66,25       | 66,50       |
| Target RPJMD Periode 2019-2024 (%)        | 66,25       | 67,57       |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala Tahun 2021 (Data Diolah)**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Donggala tahun 2019 sebesar 66,25 persen meningkat menjadi 66,50 persen atau meningkat sebesar 0,25 persen. Angka capaian ini lebih rendah dari target sebesar 67,57 persen.

### **2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat memiliki beberapa indikator yang menunjukkan kinerja bidang tersebut. Indikator lain ditampilkan pada table TB I karena keterbatasan data yang tersedia. Pada bagian ini ditampilkan data perubahan yang dapat menjadi sorotan pada perubahan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 Sebagai berikut.

**Tabel 2.78.**  
**Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan**  
**Masyarakat di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| <b>No</b> | <b>Ketentrman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (%)</b>       | <b>Tahun</b> |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|           |                                                                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| 1         | Target Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrman, keindahan) | 93,38        | 96,89       |
| 2         | Realisasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3                                  | 100          | 100         |

| No | Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (%) | Tahun |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                    | 2019  | 2020 |
|    | (ketertiban, ketentraman, keindahan)                               |       |      |

**Sumber: SIPD Kab. Donggala Tahun 2021**

Tabel di atas menunjukkan ketercapaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Nampak bahwa capaian indikator ini melampaui proyeksi pada Tahun 2019 sebesar 93,38 persen dan Tahun 2020 sebesar 96,89 persen menjadi sebesar 100 persen pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab telah berupaya maksimal dalam penegakan aturan terkait ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kabupaten Donggala.

#### **2.3.1.6 Sosial**

Terdapat 9 indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang sosial. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.79.**  
**Bidang Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| NO | Sosial (%)                                               | Tahun |       |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                          | 2019  | 2020  |
| 1  | Proyeksi Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  | 20,61 | 22,35 |
|    | Realisasi Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 10,01 | 10,01 |
| 2  | Proyeksi Persentase PMKS yang tertangani                 | 20,61 | 22,35 |
|    | Realisasi Persentase PMKS yang tertangani                | 10,01 | 10,01 |

| NO | Sosial<br>(%)                                                                                                                                                  | Tahun |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                | 2019  | 2020  |
| 3  | Proyeksi Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                  | 40    | 40    |
|    | Realisasi Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                 | 5     | 5     |
| 4  | Proyeksi Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya  | 100   | 100   |
|    | Realisasi Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 64,32 | 64,32 |
| 5  | Proyeksi Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                                                                  | Na    | 18    |
|    | Realisasi Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                                                                 | 8     | 8     |
| 6  | Proyeksi Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                   | 20    | 20    |
|    | Realisasi Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana                                                           | 5     | 5     |

| NO | Sosial (%)                                                                                                                   | Tahun |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                              | 2019  | 2020  |
|    | prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                                                                                     |       |       |
| 7  | Proyeksi Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                  | 50    | 50    |
|    | Realisasi Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                 | 31    | 31    |
| 8  | Proyeksi Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap               | 25    | 25    |
|    | Realisasi Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap              | 10    | 10    |
| 9  | Proyeksi Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial  | 20,84 | 13,98 |
|    | Realisasi Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 1,1   | 1,1   |

**Sumber: EKPD Kab. Donggala Tahun 2021**

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum target realisasi pembangunan dalam bidang sosial belum tercapai. Terdapat beberapa indikator yang belum diidentifikasi oleh OPD dalam hal proyeksi karena tidak tersedianya data pada Tabel 8.1 Bab VIII RPJMD 2019-2024. Semua indikator bidang sosial yang terdapat pada tabel di atas memiliki



nilai realisasi kinerja yang tidak mencapai proyeksi atau target Tahun 2019 dan Tahun 2020.

### **2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Salah satu tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini berhubungan erat dengan tugas pengawasan ketenagakerjaan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja. Saat ini permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan sangat kompleks, dan yang paling umum adalah banyaknya pengangguran, lapangan kerja yang rendah, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Dalam SDGs, bidang ketenagakerjaan menjadi tujuan urutan kedelapan yang menjadi prioritas yaitu Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius dan berkesinambungan dari berbagai pihak antara lain pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat luas.

**Tabel 2.80.**  
**Bidang Capaian Pembangunan Bidang Tenaga Kerja**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator Bidang Tenaga Kerja (%)                                        | Tahun |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                          | 2019  | 2020  |
| 1  | Proyeksi Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)  | 95,06 | 96,00 |
|    | Realisasi Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 25,00 | 100   |
| 2  | Proyeksi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan                           | 100   | 80    |

| No | Indikator Bidang Tenaga Kerja (%)                                             | Tahun |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                               | 2019  | 2020  |
|    | pelatihan berbasis kompetensi                                                 |       |       |
|    | Realisasi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 144   | 35,56 |
| 3  | Proyeksi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan        | 17    | 18    |
|    | Realisasi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan       | 80    | 75,29 |

Terkait urusan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, terdapat beberapa indikator yang dapat diukur dalam menilai keberhasilan II - 202 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Periode 2019-2024 pembangunan selama lima tahun terakhir (2019-2020). Indikator tersebut meliputi: angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, keselamatan dan perlindungan, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, Besaran Pemeriksaan Perusahaan, Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan Rasio lulusan S1/S2/S3. Namun banyak indikator yang nilainya tidak tersedia.

Terdapat 3 indikator yang tersedia secara lengkap dan ketiga indikator tersebut ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target/proyeksi kinerja Tahun 2020. Besaran kasus yang

diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) yang diproyeksikan sebesar 96 persen pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 100 persen kasus. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang ditargetkan sebesar 80 orang pada Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 35 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang ditargetkan sebesar 18 orang pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 75 orang. Dengan demikian, target bidang tenaga kerja ada yang belum mencapai target dan sudah mencapai bahkan melebihi dari yang ditargetkan.

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 19 indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun ketersediaan data yang tidak memadai sehingga banyak indikator yang tidak dapat ditampilkan secara lengkap. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.81.**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                         | Tahun |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                      | 2019  | 2020 |
| 1  | Proyeksi Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)  | 8,70  | 9,13 |
|    | Realisasi Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 1,26  | 1,26 |
| 2  | Proyeksi Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR (%)          | 9,00  | 9,00 |
|    | Realisasi Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR (%)         | 13,00 | 1,26 |
| 3  | Proyeksi Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)                 | 7,26  | 7,62 |
|    | Realisasi Partisipasi perempuan                                      | 0,39  | 0,39 |

| No | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                | Tahun |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                             | 2019  | 2020 |
|    | di lembaga swasta (%)                                                                                                                                                                       |       |      |
| 4  | Proyeksi Rasio KDRT                                                                                                                                                                         | 0,25  | 0,24 |
|    | Realisasi Rasio KDRT                                                                                                                                                                        | na    | 0,34 |
| 5  | Proyeksi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)                                        | 20    | 20   |
|    | Realisasi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)                                       | 20    | 100  |
| 6  | Proyeksi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 9%)  | 30    | 40   |
|    | Realisasi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%) | 30    | 72   |
| 7  | Proyeksi Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)          | 10    | 20   |
|    | Realisasi Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial                                                                                               | 0     | 85   |

| No | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                          | Tahun |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                       | 2019  | 2020  |
|    | terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)                                                                 |       |       |
| 8  | Proyeksi Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)  | 50    | 60    |
|    | Realisasi Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | 50    | 50    |
| 9  | Proyeksi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)                                                       | 10    | 20    |
|    | Realisasi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)                                                      | 10    | 89    |
| 10 | Proyeksi Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)                                                                      | 10    | 20    |
|    | Realisasi Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)                                                                     | 10    | 89    |
| 11 | Proyeksi Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                          | 98,82 | 97,80 |
|    | Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                         | 87,00 | 87,00 |
| 12 | Proyeksi Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                         | 65,90 | 72,53 |
|    | Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                        | 87,00 | 87,00 |
| 13 | Proyeksi Rasio APM                                                                                                                                    | 54,5  | 56,37 |

| No | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                | Tahun |       |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                             | 2019  | 2020  |
|    | perempuan/laki-laki di SMA                                  |       |       |
|    | Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA              | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Proyeksi Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi  | 40,30 | 15,20 |
|    | Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | 30,00 | 30,00 |

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan dapat menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada tahun 2020 antara lain Realisasi Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Realisasi Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR, Realisasi Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Realisasi Rasio KDRT, Realisasi Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di SD dan Realisasi Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi murni perempuan masih berada di bawah laki-laki. selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

### 2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Namun data tersebut belum dapat disajikan karena ketersediaan data yang terbatas. Data tersedia pada RPJMD sebelum perubahan menunjukkan bahwa realisasi ketersediaan pangan utama dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami penurunan dari 24,3 persen Tahun 2013 turun menjadi sebesar 20,57 persen pada Tahun 2018. Adapun indikator terkait pangan yang tersedia disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.82.**  
**Bidang Ketersediaan Pangan Utama**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Pangan                                                                 | Tahun |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                        | 2019  | 2020  |
| 1  | Proyeksi Ketersediaan energi dan protein perkapita (gram/kapita/hari)  | 3.420 | 3.600 |
| 2  | Realisasi Ketersediaan energi dan protein perkapita (gram/kapita/hari) | 4.457 | 4.434 |

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein perkapita Tahun 2020 sebesar 4.434 gram/kapita/hari. Capaian ini berada di atas target sebesar 3.600 gram/kapita/hari pada Tahun 2020. Dapat dikatakan stabil dan secara umum meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni antara 1,65 poin Tahun 2017 dan 1,77 poin Tahun 2018. Namun, capaian ketersediaan pangan dan energi pada Tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu 4.457 gram/kapita/hari.

**Tabel 2.83.****Data Ketersediaan Pangan Perkapita Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Donggala Tahun 2019 sampai dengan 2020**

| NO. | TAHUN | KETERSEDIAAN PER KAPITA |                     |                 |                  |
|-----|-------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|     |       | TOTAL                   | KALORI<br>(Kkal/hr) | PROTEIN (Gr/Hr) | LEMAK<br>(Gr/Hr) |
| 1.  | 2019  |                         | 4.457               | 131,12          | 79,84            |
|     |       | NABATI                  | 4.300               | 108,1           | 73,8             |
|     |       | HEWANI                  | 157                 | 23,02           | 6,03             |
| 2.  | 2020  |                         | 4.434               | 118,19          | 74,53            |
|     |       | NABATI                  | 4.279               | 95,36           | 68,55            |
|     |       | HEWANI                  | 155                 | 22,83           | 5,98             |

Ketersediaan pangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada balita. Ketersediaan pangan yang baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya menjadi modal utama dalam mencukupi asupan nutrisi keluarga. Terjadinya stunting pada balita dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya ketersediaan pangan. Ketersediaan energy Kabupaten Donggala tahun 2020 mencapai 4.434 Kkal/Kap/Hr telah melebihi rekomendasi Windyakarya Nasional dan Gizi (WNPG) tahun 2012 yang merekomendasikan kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia untuk ketersediaan minimal 2.400 Kkal perkapita/hari. Ketersediaan energy ini jumlah penyumbang terbesarnya adalah kelompok padi-padian atau beras sebesar 78,57% sementara dari jenis lain (telur, daging, susu, minyak dan lemak, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gula pasir, sayuran, dll) kabupaten donggala masih kurang dan hanya menerima tambahan pasokan dari luar kabupaten donggala, jika di dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten donggala tahun 2019 sebesar 304.110 jiwa, maka kebutuhan ketersediaan energy selain beras masih kurang dan masih dibutuhkan untuk pemenuhan ketersediaan energy tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka stunting di kabupaten donggala yang angka stunting sebesar 1.743 anak, walaupun tersedia bahan pangan berupa bahan pangan pokok (beras) yang melebihi atau surplus tidak akan menjamin kualitas



gizi masyarakat dapat terpenuhi jika tidak ditunjang oleh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi berimbang dan aman, kemudahan masyarakat untuk memperoleh yang terkait dengan akses, pola asuh Ibu dan lain sebagainya.

#### 2.3.2.4 Pertanian

Indikator kinerja bidang pertanian meliputi pengukuran persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Persentase luas lahan bersertifikat diperoleh dari  $II - 207$  persentase perbandingan jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah luas wilayah daratan Kabupaten Donggala. Penyelesaian kasus tanah negara merupakan persentase jumlah kasus yang diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus yang terdaftar. Penyelesaian izin lokasi diperoleh dari perbandingan jumlah izin lokasi dengan permohonan izin lokasi. Untuk lebih jelasnya nilai indikator urusan pertanian di Kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.84.**  
**Bidang Capaian Pembangunan Bidang Pertanian**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Pertanian<br>(%)                              | Tahun    |          |
|----|-----------------------------------------------|----------|----------|
|    |                                               | 2019 (%) | 2020 (%) |
| 1  | Proyeksi Persentase luas lahan bersertifikat  | 45       | 25       |
|    | Realisasi Persentase luas lahan bersertifikat | 45       | 35       |
| 2  | Proyeksi Penyelesaian kasus tanah Negara      | 45       | 25       |
|    | Realisasi Penyelesaian kasus tanah Negara     | 45       | 25       |
| 3  | Proyeksi Penyelesaian izin lokasi             | -        | -        |
|    | Realisasi Penyelesaian izin lokasi            | 84       | 85,89    |

Tabel di atas menunjukkan bahwa data ketiga indikator kinerja urusan pertanahan pada Tahun 2019-2020 tidak lengkap. Namun, berdasarkan data EKPD 2018 bidang pertanahan menyebutkan bahwa persentase luas lahan bersertifikat lebih kurang (diperkirakan) mencapai 35 persen dari target 70 persen pada Tahun 2018. Dan meningkat pada realisasi Tahun 2019 menjadi sebesar 45 persen. Sementara untuk penyelesaian Kasus Tanah Negara terdapat dua kasus (kasus Abd. Rabbie dan Abd. Rauf) dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 35 persen lebih besar dibandingkan target pada tahun yang sama sebesar 30 persen. Angka ini juga mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 45 persen. Untuk penyelesaian Izin lokasi, tupoksi berada pada Badan PM & PTSP.

#### **2.3.2.5 Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator capaian pembangunan bidang Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten memiliki 24 indikator. Penilaian capaian setiap indikator tersebut ada yang sifatnya terukur (kuantitatif) dan tidak terukur atau bersifat kualitatif. Hasil analisis terhadap seluruh indikator capaian kinerja bidang lingkungan hidup diperlihatkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.85.**  
**Bidang Capaian Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                 | Tahun |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020  |
| 1  | Proyeksi Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)  | 75%   | 75%   |
|    | Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%) | 20%   | 20%   |
| 2  | Proyeksi Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)                                     | 1     | 1     |
|    | Realisasi Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)                                    | 100%  | 100%  |
| 3  | Proyeksi Timbulan Sampah yang Ditangani (%)                                                                                                                                                                                      | 80    | 80    |
|    | Realisasi Timbulan Sampah yang Ditangani (%)                                                                                                                                                                                     | 100   | 100   |
| 5  | Proyeksi Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)                                                                                                                                                                                   | 1     | 1     |
|    | Realisasi Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)                                                                                                                                                                                  | 0,89% | 0,90% |
| 6  | Proyeksi Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)                                                                                                                                                                            | 1     | 1     |
|    | Realisasi Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)                                                                                                                                                                           | 6,93% | 6,95% |

Berdasarkan tabel di atas, secara menyeluruh indikator bidang lingkungan hidup menunjukkan kinerja positif. Hal ini nampak dari nilai realisasi indikator kinerja yang berada di atas angka target pada tahun terakhir. Indikator pembinaan dan pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH menggambarkan persentase jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan per total penanggungjawab usaha. Indikator ini memiliki nilai capaian 100 persen, melampaui angka target yang hanya sebesar 50 persen. Hal sama juga berlaku pada indikator lain seperti timbulan sampah yang ditangani, cakupan area pelayanan dan persentase jumlah sampah yang tertangani yang berada diatas angka target pada Tahun 2020.

#### **2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dievaluasi pencapaiannya adalah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan akte kelahiran. Realisasi pembangunan pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.86.**  
**Bidang Capaian Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan**  
**Sipil di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                                   | Tahun   |         |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                             | 2019    | 2020    |
| 1  | Proyeksi Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk         | 120,150 | 135,453 |
|    | Realisasi Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk        | 186,366 | 205,864 |
| 2  | Proyeksi Rasio Bayi Berakte Kelahiran                       | 18,452  | 20,25   |
|    | Realisasi Rasio Bayi Berakte Kelahiran                      | 20,022  | 21,082  |
| 3  | Proyeksi Rasio Pasangan Berakte Nikah                       | 196,253 | 198,57  |
|    | Realisasi Rasio Pasangan Berakte Nikah                      | 24,651  | 35,276  |
| 4  | Proyeksi Persentase kepemilikan KTP (%)                     | na      | Na      |
|    | Realisasi Persentase kepemilikan KTP (%)                    | 89,27   | 97,93   |
| 5  | Proyeksi Rasio Penduduk Memiliki KK                         | na      | Na      |
|    | Realisasi Rasio Penduduk Memiliki KK                        | 91022   | 92765   |
| 6  | Proyeksi Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)  | 120,150 | 135,453 |
|    | Realisasi Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%) | 186,366 | 205,864 |

Tabel di atas menunjukkan capaian realisasi indikator bidang kependudukan dan catatan sipil yang mengalami secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020. Indikator seperti rasio penduduk memiliki KK dan kepemilikan KTP terus meningkat dari 89,27 persen menjadi 97,93 persen.

**2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa****Tabel 2.87.****Bidang Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)                                             | Tahun |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                  | 2019  | 2020 |
| 1  | Proyeksi Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik        | 141   | 150  |
| 2  | Realisasi Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik       | 141   | 126  |
| 3  | Proyeksi Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  | 0     | 59   |
| 4  | Realisasi Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | na    | 33   |
| 5  | Proyeksi Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                    | 60    | 90   |
| 6  | Realisasi Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                   | 60    | 27   |
| 13 | Proyeksi Persentase Posyandu Aktif                                               | 668   | 698  |
| 14 | Realisasi Persentase Posyandu Aktif                                              | 668   | 452  |

Urusan pemerintahan terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa indikator kinerja yakni: (1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yang diperoleh dari persentase perbandingan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan Jumlah seluruh pemerintahan desa; (2) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diperoleh dari perbandingan Jumlah kelompok binaan LPM dengan Jumlah LPM;

(3) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah rasio Jumlah kelompok binaan PKK dengan Jumlah PKK; (4) Persentase LSM aktif adalah rasio Jumlah LSM aktif dengan Jumlah LPM dikali 100 persen; (5) Persentase LPM Berprestasi adalah rasio Jumlah LPM berprestasi dengan Jumlah LPM dikali 100 persen; (6) Persentase PKK aktif adalah rasio Jumlah PKK aktif dengan Jumlah PKK dikali 100 persen; (7) Persentase Posyandu aktif adalah rasio Jumlah Posyandu aktif dengan Total Posyandu dikali 100 persen; (8) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat adalah rasio Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Total Program Pemberdayaan Masyarakat dikali 100 persen; dan (9) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat adalah rasio program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat dengan Total pasca program pemberdayaan masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik yang memiliki target sebesar 59 persen telah melampauinya dengan angka realisasi pada Tahun 2020 sebesar 141 persen. Sedangkan indikator Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) justru berada jauh dibawah target Tahun 2020 sebesar 150, hanya mampu mencapai realisasi sebesar rata-rata 33 kelompok. Hal serupa juga terjadi pada indikator Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK dari target 90, kelompok, hanya mencapai realisasi 27 kelompok. Serta indikator Persentase Posyandu Aktif dari target sebanyak 698 hanya mencapai realisasi 452. Perlu tindak yang lebih serius agar kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat lebih meningkat.

#### **2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki beberapa indikator diantaranya; (1). Laju pertumbuhan penduduk merupakan persentase pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dalam satu daerah, dalam kajian ini dilakukan analisis per tahun. (2).

*Total Fertility Rate* (TFR) Capaian pembangunan terkait dengan indikator *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Donggala. (3) Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Hal ini bermakna bahwa perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Persentase akseptor KB adalah prosentase jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000.

**Tabel 2.88.**

**Bidang Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                 | Tahun |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                                                              | 2019  | 2020 |
| 1. | Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                                                     | 1,38  | 1,37 |
|    | Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                                                    | 1,38  | 1,89 |
| 2  | Proyeksi <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)                                                                                   | 2,2   | 2,2  |
|    | Realisasi <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)                                                                                  | 2,2   | 2,61 |
| 3  | Proyeksi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)       | 10    | 12   |
|    | Realisasi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)      | 10    | 10   |
| 4  | Proyeksi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)  | 6     | 6    |
|    | Realisasi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%) | 6     | 6    |
| 5  | Proyeksi Jumlah Kebijakan (Peraturan                                                                                         | 2     | 2    |



| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                  | Tahun |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                               | 2019  | 2020  |
|    | Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk                                                            |       |       |
|    | Realisasi Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk                      | 2     |       |
| 6  | Proyeksi Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan  | 6     | 6     |
|    | Realisasi Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | 6     | 6     |
| 7  | Proyeksi Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan                                  | 4     | 4     |
|    | Realisasi Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan                                 | 4     | 4     |
| 8  | Proyeksi Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga                                                                                                                   | 2     | 2     |
|    | Realisasi Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga                                                                                                                  | 2     | 2     |
| 9  | Proyeksi Ratio Akseptor KB (%)                                                                                                                                | 67%   | 67%   |
|    | Realisasi Ratio Akseptor KB (%)                                                                                                                               | 67    | 65,7  |
| 10 | Proyeksi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 (%)                                                                              | 4500  | 4500  |
|    | Realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 (%)                                                                             | 41014 | 41014 |
| 11 | Proyeksi Angka kelahiran remaja                                                                                                                               | 15%   | 15%   |

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                              | Tahun  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                                                           | 2019   | 2020   |
|    | (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)                                  |        |        |
|    | Realisasi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | 32     | 32     |
| 12 | Proyeksi Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)                             | 12400  | 12654  |
|    | Realisasi Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)                            | 12400  | 354    |
| 13 | Proyeksi Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)                          | 65241  | 65101  |
|    | Realisasi Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)                         | 65241  | 10520  |
| 14 | Proyeksi Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)                                      | 11,40% | 11,54% |
|    | Realisasi Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)                                     | 11,4   | 11,54  |
| 15 | Proyeksi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)                                     | 80%    | 85%    |
|    | Realisasi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)                                    | 80     | 94     |
| 16 | Proyeksi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)                                            | 1524   | 1552   |
|    | Realisasi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)                                           | 1524   | 1440   |
| 17 | Proyeksi Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)                                            | 1502   | 1548   |
|    | Realisasi Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)                                           | 1502   | 476    |
| 18 | Proyeksi Cakupan anggota Bina                                                                             | 102    | 130    |

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                               | Tahun |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                                                                                            | 2019  | 2020 |
|    | Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)                                                                                                                           |       |      |
|    | Realisasi Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)                                                                                            | 852   | 852  |
| 19 | Proyeksi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)                                                                                 | 20    | 20   |
|    | Realisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)                                                                                | 20    | 3    |
| 20 | Proyeksi Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)                                                                           | 85    | 85   |
|    | Realisasi Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)                                                                          | 85    | 420  |
| 21 | Proyeksi Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)  | 90    | 90   |
|    | Realisasi Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%) | 90    | 98   |
| 22 | Proyeksi Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)                                    | 120   | 120  |
|    | Realisasi Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)                                   | 120   | 190  |
| 23 | Proyeksi Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)                                                                          | 170   | 170  |
|    | Realisasi Rasio petugas Pembantu Pembina; 0 KB Desa (PPKBD) setiap                                                                                         | 170   | 170  |

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                  | Tahun |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                               | 2019  | 2020 |
|    | desa/kelurahan (%)                                                                                                                                                            |       |      |
| 24 | Proyeksi Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)                                                               | 50%   | 50%  |
|    | Realisasi Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)                                                              | 50    | 7154 |
| 25 | Proyeksi Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)  | 25    | 30   |
|    | Realisasi Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%) | 18    | 18   |
| 26 | Proyeksi Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)                                                                                                  | 170   | 170  |
|    | Realisasi Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)                                                                                                 | 84    | 84   |
| 27 | Proyeksi Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)                                                                                                     | 30    | 25   |
|    | Realisasi Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)                                                                                                    | 30    | 0    |
| 28 | Proyeksi Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)                                                                            | 6     | 6    |
|    | Realisasi Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga                                                                                                         | 6     | 59   |

| No | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                              | Tahun |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                                                                                           | 2019  | 2020 |
|    | melalui 8 fungsi keluarga (%)                                                                                                             |       |      |
| 29 | Proyeksi Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)  | 2500  | 2589 |
|    | Realisasi Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%) | 50    | 2112 |
| 30 | Proyeksi Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                              | 20    | 21   |
|    | Realisasi Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                             | 18    | 19   |

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Donggala demi tercapainya tujuan program dan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 1,89 persen. Angka ini berada diatas proyeksi yakni sebesar 1,37 pada tahun 2020. Ini berarti bahwa realisasi laju pertumbuhan penduduk lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan. Sehingga jumlah penduduk kemungkinan akan bertambah dengan pesat bilamana laju pertumbuhan penduduk sulit untuk dikendalikan. Para pelaksana program diharapkan dapat memperbaiki pelayanan atau mengarahkan program secara lebih tepat sasaran. Banyak indikator pada bidang ini yang belum dapat memenuhi target capaian sesuai angka proyeksi. Indikator lain yang perlu mendapat perhatian juga adalah Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes. Sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran dan sampai kepada penerima program, bilamana perencanaan,

pelaksanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan melalui APBD dan APBDes.

### 2.3.2.9. Perhubungan

Bidang perhubungan memiliki beberapa indikator kinerja diantaranya Rasio Izin trayek, Layanan angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, persentase pemasangan rambu-rambu, rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun. Adapun data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.89.**  
**Bidang Capaian Indikator Bidang Perhubungan**  
**Tahun 2019-2020**

| No | Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                          | Tahun   |         |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                            | 2019    | 2020    |
| 1  | Proyeksi Rasio ijin trayek                                 | 0,00095 | 0,0008  |
|    | Realisasi Rasio ijin trayek                                | 0,00095 | 0,00098 |
| 2  | Proyeksi persentase Layanan Angkutan Darat (%)             | 18,23   | 20,57   |
|    | Realisasi persentase Layanan Angkutan Darat (%)            | 18,23   | 16,6    |
| 3  | Proyeksi persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)      | 3,87    | 2,99    |
|    | Realisasi persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)     | 3,87    | 5,65    |
| 4  | Proyeksi persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)             | 0       | 85      |
|    | Realisasi persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)            | 0       | 30      |
| 6  | Proyeksi rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan          | 11,21   | 11,54   |
|    | Realisasi rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan         | 11,21   | 13,16   |
| 7  | Proyeksi jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (jiwa)  | 3210    | 3300    |
|    | Realisasi jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (jiwa) | 3210    | 2689    |
| 8  | Proyeksi jumlah orang/barang melalui                       | 3325    | 3347    |

| No | Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                         | Tahun |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                                           | 2019  | 2020 |
|    | dermaga/bandara/ terminal per tahun                                       |       |      |
|    | Realisasi jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | 3325  | 2689 |

Rasio izin trayek merupakan perbandingan izin trayek yang dikeluarkan per jumlah penduduk. Angka ini terbilang cukup kecil yakni berada di angka 0,00098 atau sebanyak 9 sampai dengan 10 izin per 10.000 penduduk. Indikator persentase Layanan Angkutan Darat juga masih berada dibawah angka proyeksi serta mengalami penurunan angka realisasi yakni sebesar 18,3 persen di Tahun 2019 turun menjadi 16,6 persen di Tahun 2020. Adapun beberapa indikator seperti persentase Layanan Angkutan Darat , persentase Pemasangan Rambu-Rambu jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun memiliki angka realisasi yang masih berada dibawah angka target/proyeksi tahun 2020. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan bidang perhubungan.

#### **2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika memiliki beberapa indikator seperti Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Capaian indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi dan realisasi indikator-indikator tersebut.

**Tabel 2.90.**  
**Bidang Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok**  
**Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019 – 2020**

| No | Komunikasi dan Informatika                                                                             | Tahun  |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                                                        | 2019   | 2020   |
| 1  | Proyeksi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)  | 50     | 63     |
|    | Realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) | 50     | 50     |
| 2  | Proyeksi cakupan Layanan Telekomunikasi                                                                | 65     | 65     |
|    | Realisasi cakupan Layanan Telekomunikasi                                                               | 65     | 65     |
| 3  | Proyeksi persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)                                           | 75     | 77     |
|    | Realisasi persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)                                          | 75     | 75     |
| 4  | Proyeksi proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                   | 56,205 | 58,912 |
|    | Realisasi proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                  | 56,2   | 56,2   |
| 5  | Proyeksi proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                          | 14,23  | 14,35  |
|    | Realisasi proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                         | 14,23  | 14,23  |
| 6  | Proyeksi website Milik Pemerintah Daerah                                                               | 1      | 1      |
|    | Realisasi website Milik Pemerintah Daerah                                                              | 1      | 1      |



Data di atas menunjukkan bahwa belum ada peningkatan kinerja indikator dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari angka realisasi Tahun 2020 yang masih sama dengan capaian di Tahun 2019.

#### **2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; Persentase koperasi aktif; Jumlah Koperasi Aktif; Jumlah UKM non BPR/LKM aktif; Jumlah BPR/LKM dan; Usaha Mikro dan Kecil, yang dijabarkan secara detail sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.91.**  
**Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**  
**Di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                      | Tahun  |        |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                | 2019   | 2020   |
| 1  | Proyeksi persentase koperasi aktif (%)         | 34     | 37     |
|    | Realisasi persentase koperasi aktif (%)        | 48     | 53     |
| 2  | Proyeksi persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)  | 84     | 82     |
|    | Realisasi persentase UKM non BPR/LKM aktif (%) | 80     | 80     |
| 3  | Proyeksi persentase BPR/LKM aktif (%)          | 0,15   | 0,15   |
|    | Realisasi persentase BPR/LKM aktif (%)         | 1      | 1      |
| 4  | Proyeksi jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)   | 4.006  | 4.010  |
|    | Realisasi jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)  | 10.585 | 12.206 |

Data di atas menunjukkan realisasi persentase koperasi aktif Tahun 2020 sebesar 53 persen ini berada diatas angka proyeksi Tahun 2020 yakni sebesar 37 persen. Selain itu, realisasi Tahun 2020 ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 37 persen. Indikator jumlah Usaha Mikro dan Kecil juga memenuhi Target Tahun 2019 sebanyak 4.006 unit usaha yang terealisasi sejumlah 10.585 unit usaha dan target Tahun 2020 sebanyak 4.010 unit usaha yang terealisasi sejumlah 12.206 unit usaha. Adapun indikator yang tidak mencapai target yakni indikator persentase non BPR/LKM aktif yang ditargetkan sebesar 82 persen hanya dapat terealisasi sebesar 80 persen pada Tahun 2020. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa indikator ini tidak mengalami peningkatan capaian dari Tahun sebelumnya.

#### **2.3.2.12. Penanaman Modal**

Indikator penanaman modal menunjukkan kondisi investasi yang masuk dan berkembang di wilayah Kabupaten Donggala. Indikator penanaman modal terdiri atas Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (ribu), Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dan PMDN), dan Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta). Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMD dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Sedangkan nilai kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN diperoleh dari rasio realisasi PMDN tahun evaluasi-realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi, satuan persen.

**Tabel 2.92.**  
**Bidang Capaian dalam Penanaman Modal**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019 -2020**

| No | Indikator                                                         | Tahun          |                |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                   | 2019           | 2020           |
| 1  | Proyeksi jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)      | 250 M          | 300 M          |
|    | Realisasi jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)     | 83.010.000.000 | 65.043.000.000 |
| 2  | Proyeksi rasio daya serap tenaga kerja                            | 11             | 11             |
|    | Realisasi rasio daya serap tenaga kerja                           | 10             | 10             |
| 3  | Proyeksi kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)  | 25             | 25             |
|    | Realisasi kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 33,20          | 22,88          |

Tabel di atas menunjukkan bahwa bidang penanaman modal memiliki indikator-indikator yang angka capaiannya mengalami penurunan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 seperti jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai realisasi PMDN sedangkan untuk rasio daya serap tenaga kerja capaiannya tetap. Pemkab Donggala perlu untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

#### **2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga**

Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda), Persentase wirausaha muda, Cakupan pembinaan olah raga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan pembinaan atlet muda, Jumlah atlet berprestasi, dan Jumlah prestasi olahraga. Realisasi bidang kepemudaan dan olahraga tersebut disajikan pada bagian berikut.

**Tabel 2.93.**  
**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                             | Tahun |      |
|----|-------------------------------------------------------|-------|------|
|    |                                                       | 2019  | 2020 |
| 1  | Proyeksi persentase organisasi pemuda yang aktif (%)  | 60    | 60   |
|    | Realisasi persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 31    | 50   |
| 2  | Proyeksi persentase wirausaha muda (%)                | 10    | 12   |
|    | Realisasi persentase wirausaha muda (%)               | 8     | 3    |
| 3  | Proyeksi cakupan pembinaan olahraga (%)               | 50    | 60   |
|    | Realisasi cakupan pembinaan olahraga(%)               | 8     | 45   |
| 4  | Proyeksi cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)      | 30    | 60   |
|    | Realisasi cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)     | 30    | 15   |
| 5  | Proyeksi cakupan pembinaan atlet muda(%)              | 30    | 80   |
|    | Realisasi cakupan pembinaan atlet muda (%)            | 30    | 25   |
| 6  | Proyeksi jumlah atlet berprestasi (orang)             | 15    | 15   |
|    | Realisasi jumlah atlet berprestasi (orang)            | 39    | 0    |
| 7  | Proyeksi jumlah prestasi olahraga                     | 10    | 10   |
|    | Realisasi jumlah prestasi olahraga                    | 15    | 0    |

Tabel di atas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif dan cakupan pembinaan olahraga Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian bila dibandingkan Tahun 2019. Namun angka realisasi capaian ini belum memenuhi angka capaian proyeksi kinerja pada Tahun 2020 yang ditargetkan. Disisi lain indikator persentase wirausaha muda, cakupan Pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga pada Tahun 2020 justru mengalami penurunan angka realisasi bila dibandingkan Tahun 2019.

Adapun realisasi persentase wirausaha muda Tahun 2019 sebesar 8 persen turun menjadi sebesar 3 persen pada Tahun 2020. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Tahun 2019 sebesar 30 persen turun menjadi sebesar 15 persen pada Tahun 2020. Cakupan pembinaan atlet muda

Tahun 2019 sebesar 30 persen turun menjadi sebesar 25 persen pada Tahun 2020. Jumlah atlet berprestasi Tahun 2019 sebesar 39 persen turun menjadi 0 persen pada Tahun 2020. Jumlah prestasi olahraga Tahun 2019 sebesar 15 persen turun menjadi 0 persen pada Tahun 2020. Hal ini menggambarkan kurangnya pembinaan dan prestasi olahraga Kabupaten Donggala, sehingga pada Tahun 2020 Kabupaten Donggala tidak memiliki atlet berprestasi dan olahraga berprestasi.

#### **2.3.2.14 Statistik**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (data statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Pembangunan Manusia, Profil Kabupaten, Profil Kecamatan dan Profil Kesejahteraan Rakyat.

#### **2.3.2.15 Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Donggala ditujukan untuk melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global yang cukup negatif. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Donggala memasuki kemajuan yang ditandai

dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah lokal, namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Donggala seperti halnya kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar sehingga solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi; dan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

### **2.3.2.16 Perpustakaan**

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam suatu daerah. Perpustakaan Daerah Kabupaten Donggala berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan dan selalu berupaya agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakat layanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi.

Indikator kinerja untuk urusan statistik yakni Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Rasio perpustakaan persatuan penduduk, Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. Hasil capaian indikator kinerja dan target per indikator urusan perpustakaan Kabupaten Donggala disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.94.**  
**Realisasi Pembangunan Bidang Perpustakaan**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                                              | Target |       | Realisasi |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                        | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1  | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Jiwa)                        | 4000   | 5000  | 350       | 400   |
| 2  | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                      | 22738  | 23738 | 22738     | 23238 |
| 3  | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                  | .2,10  | 2.11  | 0.12      | 0.13  |
| 4  | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun                         | 333    | 415   | 29.17     | 33.33 |
| 5  | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                 | 7813   | 8313  | 7688      | 7813  |
| 6  | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 5      | 7     | 7         | 10    |
| 7  | Jumlah Perpustakaan (%)                                                | 621    | 626   | 616       | 616   |

**Sumber: EKPD Urusan Perpustakaan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020.**

### **2.3.2.17 Kearsipan**

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaan arsip sesungguhnya teramat sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Pada jajaran pemerintahan daerah pengelolaan arsip secara baku dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan kumpulan arsip yang dipandang penting namun karena

keterbatasan sarana penyimpanan di OPD di sediakan lembaga Kantor Arsip Daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Pengelolaan arsip secara baku; dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan yang sajikan secara detail sebagai Berikut.

**Tabel 2.95.**  
**Realisasi Pembangunan Bidang Kearsipan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                                        | Target |       | Realisasi |       |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                  | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1  | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | 30.77  | 31.87 | 30.77     | 10.32 |
| 2  | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                              | 17     | 22    | 17        | 0     |

**Sumber: IKK dan EKPD Urusan Kearsipan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

### **2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintah daerah bersifat pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 8 (delapan) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah pilihan berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Donggala dijabarkan secara detail sebagaimana Berikut.

#### **2.3.3.1 Pariwisata**

Pada era globalisasi saat ini, Sektor Pariwisata (*tourism sector*) memiliki peran penting dalam mendatangkan devisa bagi perekonomian daerah. Pariwisata menjadi sektor penghasil devisa yang dapat diandalkan saat ini dan masa mendatang. Selain itu, Sektor Pariwisata



juga dapat menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi yang cepat.

Pengembangan Sektor Pariwisata harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan mengingat Sektor Pariwisata memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang lainnya seperti transportasi, infrastruktur dan teknologi informasi. Strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata dapat dilakukan antara lain melalui penggali, inventarisasi dan pengembang obyek-obyek wisata untuk menjadi daerah tujuan wisata. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

#### **a) Kunjungan Wisata**

Menurut Soetomo (1994:25) yang didasarkan pada ketentuan WATA (World Association of Travel Agent atau Perhimpunan Agen Perjalanan Sedunia), wisata adalah perjalanan keliling selama lebih dari tiga hari, yang diselenggarakan oleh suatu kantor perjalanan di dalam kota dan acaranya antara lain melihat-lihat di berbagai tempat atau kota baik di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk memajukan ekonomi di suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengembangan sektor kepariwisataan antara lain bertujuan untuk: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3) menghapus kemiskinan, dan 4) mengatasi pengangguran. Menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A. Yoeti (1994, 116), pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, di mana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Dalam pengertian ini wisatawan dibedakan berdasarkan waktu dan tujuan yang disebut wisatawan adalah orang-orang yang berkunjung dan yang datang berdasarkan motivasi mengisi waktu senggang seperti bersenang, berlibur, untuk kesehatan, studi, keperluan agama, dan olahraga, serta bisnis, keluarga, keputusan, dan pertemuan-pertemuan. Jumlah kunjungan wisatawan selama Tahun 2019-2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.96.**  
**Target dan Realisasi Kunjungan Wisata**  
**di Kabupaten Donggala 2019-2020**

| No | Indikator               | Target |        | Realisasi |        |
|----|-------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|    |                         | 2019   | 2020   | 2019      | 2020   |
| 1. | Kunjungan Wisata (Jiwa) | 22.266 | 23.366 | 22.266    | 19.100 |

**Sumber: Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021, dan IKK Urusan Pariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2021**

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai Tahun 2020, total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Donggala mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang direncanakan pada tahun yang sama.

#### **2.3.3.2 Pertanian**

Sektor pertanian di Kabupaten Donggala masih merupakan kegiatan yang masih mendominasi sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan data mengenai keadaan sektor pertanian di Kabupaten Donggala beserta sub sektornya, yakni: Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, Sub-Sektor Perkebunan, Sub Sektor Kehutanan, dan Sub

Sektor Peternakan. Indikator kinerja urusan pilihan sektor pertanian dapat dievaluasi melalui pencapaian besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas, cakupan bina kelompok pada setiap sub sektornya. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.

#### **A. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kontribusi sub-sektor perkebunan merupakan besarnya sumbangan pendapatan bagi sub-sektor tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Donggala. Nilai kontribusi diperoleh dengan cara membandingkan pendapatan PDRB sektor pertanian/sub sektor perkebunan dengan total PDRB Kabupaten Donggala pada setiap tahun analisis. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.97.**

**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB  
(Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020  
(dalam %)**

| No | Indikator                                             | Target |       | Realisasi |       |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                                                       | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1. | Kontribusi Sektor Pertanian/Sub Sektor Perkebunan (%) | 25.53  | 24.76 | 25        | 26,99 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala, 2021, RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

Secara umum dalam dua tahun terakhir, kontribusi PDRB sektor Pertanian/perkebunan di Kabupaten Donggala mengalami perkembangan. Realisasi PDRB tahun 2019 tidak mencapai target dan pada Tahun 2020 melebihi target RPJMD Tahun 2019-2024.

#### **B. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB**

Kontribusi sub-sektor pertanian tanaman pertanian (palawija) merupakan besarnya sumbangan pendapatan bagi sub-sektor tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Donggala. Nilai kontribusi diperoleh dengan cara membandingkan pendapatan PDRB sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB Kabupaten Donggala pada setiap tahun analisis. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.98.**

**Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB  
(Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020  
(dalam %)**

| No | Indikator                                | Target |      | Realisasi |      |
|----|------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|    |                                          | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| 1. | Kontribusi Sektor Pertanian/Palawija (%) | 4.31   | 4.18 | 4.04      | 4.21 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala, 2021, RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Donggala berasal dari PDRB sub sektor pangan dan palawija. Kontribusi palawija terhadap PDRB pada tahun 2019 tidak mencapai target yaitu hanya 4.04 persen sedangkan realisasi pada Tahun 2020 mencapai target RPJMD 2019-2024.

**C. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB**

Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan merupakan besarnya sumbangan pendapatan bagi sub sektor tersebut terhadap total PDRB sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Donggala. Nilai kontribusi diperoleh dengan cara membandingkan pendapatan PDRB sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian Kabupaten Donggala pada setiap tahun analisis. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.99.**

**Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman keras) Terhadap PDRB  
(Berdasarkan Harga Berlaku) Kabupaten Donggala  
Tahun 2019-2020 (dalam %)**

| No | Indikator                                                           | Target |       | Realisasi |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                     | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1. | Kontribusi Sektor Pertanian/Sub Sektor Perkebunan Tanaman Keras (%) | 16.76  | 16.26 | 16.01     | 17.71 |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala, 2021, RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

Demikian pula pada sub sektor perkebunan, merupakan salah penyumbang kenaikan (cukup signifikan) kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Donggala, dan realisasi PDRB sub sector ini pada tahun 2019 tidak mencapai target dan pada Tahun 2020 melebihi target RPJMD 2019-2024.

#### **D. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB**

Kontribusi produksi kelompok petani merupakan besarnya sumbangan produksi kelompok petani pada produksi padi atau pangan lokal utama terhadap total produksi padi atau pangan utama lokal Kabupaten Donggala. Nilai kontribusi diperoleh dengan cara membandingkan produksi padi/pangan utama lokal dari kelompok tani dengan total produksi padi atau pangan utama lokal Kabupaten Donggala pada setiap tahun analisis, dalam satuan persen.

#### **E. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Dalam SDGs dituangkan bahwa dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan menjadi tantangan untuk mewujudkannya. Sasaran Global bahwa pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi sasaran nasional RPJMN.

#### **2.3.3.3 Kehutanan**

Kinerja urusan kehutanan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Kerusakan Kawasan Hutan, dan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian

keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan. Capaian kinerja ketiga indikator disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.100.**  
**Indikator Capaian dan Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                               | Target |       | Realisasi |       |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                                         | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) | 75.86  | 88.23 | 75.86     | 75.86 |
| 2  | Kerusakan Kawasan Hutan (%)             | 18.28  | 12.54 | 18.28     | 18.28 |
| 3  | Rasio luas kawasan lindung              | 0.29   | 0.29  | 0.29      | 0.29  |

**Sumber: BPS Kabupaten Donggala, 2021, RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

#### **2.3.3.4 Perdagangan**

Ekspor (*export*) adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari *Gross Nasional Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor, maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap guncangan-guncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan

ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000). Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar perdagangan internasional.

Dalam konteks daerah, ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari daerah yang bersangkutan kepada daerah lain, baik dalam negara yang sama maupun pada negara yang lain. Hal yang sebaliknya tentang pengertian impor. Ekspor berarti tambahan permintaan atas barang dan jasa daerah yang bersangkutan yang dengan demikian mendorong meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pengekspor. Ekspor barang dan jasa ke daerah lain dalam negara yang sama tidak menambah devisa bagi negara. Di lain pihak, ekspor barang dan jasa ke negara lain akan menambah devisa bagi negara dari daerah pengekspor. Makna lain dari semakin terbukanya ekonomi suatu daerah adalah bahwa pengaruh eksternal (daerah lain, dalam negara yang sama dan atau negara lain) terhadap ekonomi lokal semakin besar.

#### **2.3.3.5 Perindustrian**

Indikator capaian urusan perindustrian memiliki 1 (satu) indikator yakni Cakupan bina kelompok pengrajin. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.101.**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2019-2020**  
**Di Kabupaten Donggala**

| No | Indikator                           | Target |      | Realisasi |      |
|----|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|    |                                     | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| 1. | Cakupan bina kelompok pengrajin (%) | 14     | 17   | 14        | 14   |

**Sumber: IKK Urusan Perindustrian Kabupaten Donggala 2019-2020**

#### **2.3.3.6 Transmigrasi**

Indikator capaian kinerja urusan transmigrasi membahas tentang persentase transmigran swakarsa. Persentase transmigran swakarsa diperoleh dari perbandingan antara jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah transmigrasi. Hasil analisis kinerja OPD transmigrasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.102.**  
**Persentase Transmigrasi Swakarsa Tahun 2019-2020 di**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Indikator                           | Target |      | Realisasi |      |
|----|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|    |                                     | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| 1. | Persentase transmigran swakarsa (%) | 25     | 26   | 25        | 25   |

**Sumber: Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2020 dan Tahun 2021**

#### **2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan**

##### **A. Produksi Perikanan**

Dijelaskan dalam SDG's bahwa melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan global. Pada Tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang



memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan pertahun terhadap target daerah. Indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah produksi ikan dengan target produksi ikan daerah. Untuk lebih lengkapnya produksi perikanan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.103.**  
**Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                   | Target |        | Realisasi |        |
|----|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|    |                             | 2019   | 2020   | 2019      | 2020   |
| 1. | Produksi Perikanan Tangkap  | 27.350 | 27.897 | 20.716    | 21.910 |
| 2. | Produksi Perikanan Olahan   | 4.970  | 5.069  | 5.732     | 6.760  |
| 3. | Produksi Perikanan Budidaya | 7.670  | 7.823  | 15.106    | 19.741 |
| 4. | Produksi perikanan          | 39.990 | 40.789 | 41.464    | 48.411 |

**Sumber: BPS, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2020-2021, dan IKK-EKPD Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2020**

Pada Tahun 2019-2020, perikanan tangkap merupakan produksi perikanan dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Donggala. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Donggala pada Tahun 2020 dengan jumlah produksi 21.910 ton. nilai ini belum mencapai target RPJMD pada tahun tersebut.

## **B. Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan oleh individu guna memenuhi kebutuhan gizi manusia. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah ikan yang dikonsumsi terhadap target daerah setiap tahunnya. Berdasarkan perilaku pengeluaran pangan rumah tangga telah menunjukkan pergeseran dari perilaku pangan ikan di dalam rumah ke perilaku pangan ikan di luar rumah. Konsumsi langsung di dalam rumah tangga

turut berubah sesuai dengan pertambahan jumlah anggota rumah tangga yang serumah dan pendapatan. Khusus perilaku pangan ikan di luar rumah tangga semakin beragam bentuk dan menu sajiannya, baik yang disediakan oleh hotel, restoran, rumah makan, dan warung tenda. Nilai persentase konsumsi ikan perkapita diperoleh dari rasio konsumsi ikan perkapita dengan target konsumsi ikan perkapita pada RPJMD Donggala disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.104.**  
**Capaian Konsumsi Ikan Perkapita di Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

| No | Indikator         | Target |       | Realisasi |       |
|----|-------------------|--------|-------|-----------|-------|
|    |                   | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1. | Konsumsi ikan (%) | 40,27  | 42,28 | 44,52     | 44,77 |

**Sumber: IKK dan EKPD Urusan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2020**

Capaian konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Donggala mulai Tahun 2020 melampaui target.

### **C. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Perikanan daerah dalam mengembangkan lembaga-lembaga usaha perikanan melalui kelompok nelayan pemberian bantuan program dari pemda Donggala. Indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan jumlah total kelompok nelayan di kabupaten yang bersangkutan setiap tahunnya dikali 100 persen. Mengingat target cakupan binaan kelompok nelayan tidak terdapat pada RPJMD Periode 2019-2024, maka tabel berikut menyajikan realisasi cakupan binaan kelompok nelayan di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020.

**Tabel 2.105.**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                         | Target |      | Realisasi |      |
|----|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|
|    |                                   | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| 1. | Cakupan bina kelompok nelayan (%) | 35     | 37   | 103       | 65   |

**Sumber: LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2021, IKK dan EKPD Urusan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2020**

Pembinaan kelompok nelayan di Kabupaten Donggala Tahun 2020 telah mencapai target RPJMD Donggala tahun 2019-2024.

#### **D. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Indikator produksi perikanan kelompok nelayan adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang berasal dari kelompok selama satu tahun. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan dari perikanan tangkap di Kabupaten Donggala. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.106.**  
**Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Terhadap Total Produksi Perikanan Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2019-2020**

| No | Indikator                                 | Target |        | Realisasi |        |
|----|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|    |                                           | 2019   | 2020   | 2019      | 2020   |
| 1. | Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) | 20.360 | 21.550 | 22.680    | 23.560 |

**Sumber: LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2021, IKK dan EKPD Urusan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun 2018**

Capaian produksi perikanan dari kelompok nelayan Kabupaten Donggala Tahun 2020 melampaui target RPJMD Donggala tahun 2019-2024.

### **2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan**

Urusan pemerintah daerah bersifat pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 meliputi 8 (delapan) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah pilihan berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Donggala dijabarkan secara detail sebagaimana berikut.

#### **2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA; 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 4) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA; 5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD; 6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan 7) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW; yang dijabarkan secara detail sebagaimana Berikut.

#### **1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2

bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja-OPD. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang ada harus memiliki prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan, perencanaan yang terintegrasi, serta perencanaan yang sesuai dinamika perkembangan serta kondisi dan potensi yang dimiliki.

Dalam kaitan tersebut seluruh produk perencanaan pembangunan di kabupaten Donggala selama 5 (lima) tahun terakhir tersedia, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten Donggala sebagai liding sektor dalam bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terus melakukan tugas tersebut.

**Tabel 2.107.**

**Dokumen Perencanaan RPJPD Telah Ditetapkan dengan PERDA  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

| Uraian                                                                   | Target |      | Realisasi |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                                                          | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Dokumen perencanaan RPJPD (2005-2025) yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada    | Ada  | Ada       | Ada  |

**Sumber: Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2021**

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

**Tabel 2.108.**

**2) Dokumen Perencanaan RPJMD Telah Ditetapkan dengan PERDA  
Tahun 2019-2024**

| Uraian                                                       | Target |      | Realisasi |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                                              | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada    | Ada  | Ada       | Ada  |

**Sumber: Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2021**

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Di Kabupaten Donggala RPJMD Periode Tahun 2019-2020 telah disusun dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

### **3) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Donggala menyusun dokumen RKPD sebagai kewajiban perencanaan tahunan yang di perintahkan oleh Undang-Undang.

**Tabel 2.109.**

#### **Dokumen Perencanaan RKPD Telah Ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                                        | Target |      | Realisasi |      |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                                               | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada    | Ada  | Ada       | Ada  |

**Sumber: Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2021**

### **4) Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Pemerintah Kabupaten Donggala telah menyusun dokumen RTRW sebagai pedoman dalam penataan ruang pemerintah daerah Kabupaten Donggala.

**Tabel 2.110.**  
**Dokumen Perencanaan RTRW Telah Ditetapkan dengan PERDA**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Urain                                                       | Target |      | Realisasi |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                                             | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada    | Ada  | Ada       | Ada  |

**Sumber: Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2021**

#### **2.3.4.2 Keuangan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Keuangan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; 1) Opini BPK terhadap laporan keuangan; 2) Persentase SILPA; 3) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; 4) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; 5) Persentase belanja pendidikan (20%); 6) Persentase belanja kesehatan (10%); 7) Persentase belanja langsung; 8) Persentase belanja belanja tidak langsung; 9) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; dan 10) Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.

#### **4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang komponennya meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPKK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**Tabel 2.111.**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Urain                               | Target |      | Realisasi |      |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                     | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP    | WTP  | WTP       | WTP  |

**Sumber: Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2021**

#### **2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan salah satunya dapat dilihat dari; Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

#### **2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan**

Terkait dengan Urusan Penelitian dan pengembangan yang mencakup ketersediaan Dokumen Penelitian dan pengembangan yang dapat mempermudah perencanaan sebagai sektor penunjang guna mendukung pembangunan pada sektor lainnya diantaranya pembangunan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa serta memicu daya saing ekonomi. Adapun indikator Kinerja yang terkait dengan urusan Penelitian dan pengembangan sebagai Berikut.



**Tabel 2.112.**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                                                           | Target |      | Realisasi |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
|                                                                                  | 2019   | 2020 | 2019      | 2020 |
| Persentase implementasi rencana kelitbanga (%)                                   | 77     | 60   | 77        | 60   |
| Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)                                     | 15     | 10   | 15        | 10   |
| Penerapan SIDA                                                                   | 11     | 4    | 11        | 4    |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) | 31     | 10   | 31        | 10   |
| Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)                       | 40     | 20   | 40        | 20   |

#### **2.3.4.5 Pengawasan**

Terkait dengan Urusan Pengawasan yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut sebagai sektor penunjang guna mendukung pembangunan pada sektor lainnya diantaranya pembangunan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa serta memicu daya saing ekonomi.

#### **2.3.4.6 Sekretariat Dewan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Sekretariat Dewan salah satunya dapat dilihat dari; 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten; 2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); dan 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,

pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, ciri khas dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Uraian mengenai kondisi daerah terkait Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; 1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, 2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, 3) Fokus Iklim Berinvestasi, dan 4) Fokus Sumber Daya Manusia.

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari; Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dan Produktivitas Total Daerah.

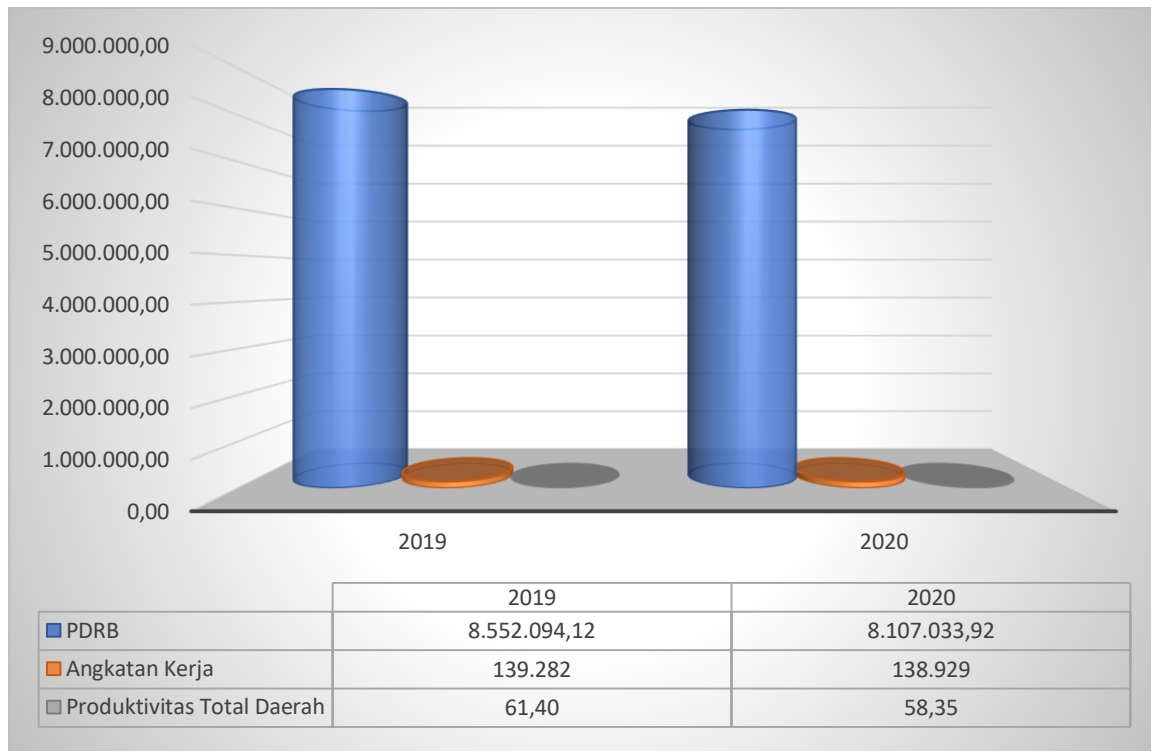
#### **2.4.1.1 Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

#### **2.4.1.2 Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Perhitungan produktivitas total daerah didasarkan pada PDRB berdasarkan harga berlaku pada periode 2019-2020.



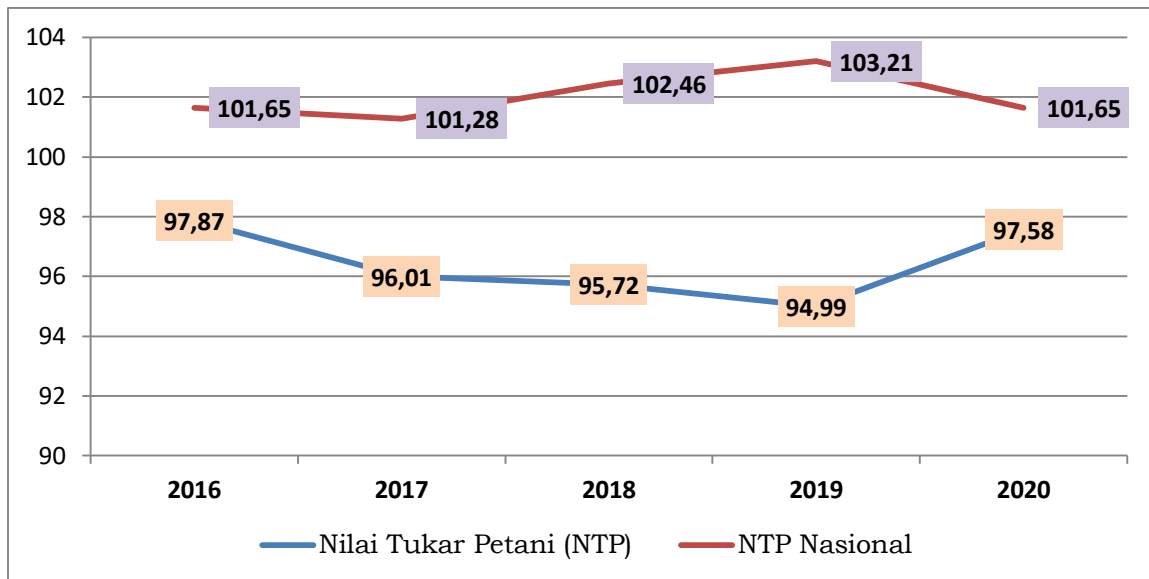
**Sumber : Badan Pusat Statistik**

**Gambar 2.28.**  
**Produktivitas Total Daerah**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020.**

Berdasarkan data BPS, produktivitas total daerah Kabupaten Donggala mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2020 dengan penurunan sebesar 61,40 dan 58,35 juta rupiah.

#### **2.4.1.3 Nilai Tukar Petani**

Salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan petani yakni menggunakan pendekatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai ini menunjukkan tingkat kemampuan pendapatan petani dari usahataniya dalam memenuhi seluruh pengeluaran dalam keluarga/rumahtangga petani. Mengingat perhitungan NTP pada tingkat pemerintah kabupaten tidak dilakukan oleh BPS, maka dalam laporan ini ditampilkan NTP provinsi Sulawesi Tengah yang mewakili NTP kabupaten.



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

**Gambar 2.29.**  
**Nilai Tukar Petani Gabungan Sulawesi Tengah 2016-2020**

Nilai Tukar Petani Gabungan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dari 94,99 poin pada Tahun 2019, menjadi 97,58 poin pada Tahun 2020, hal ini menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 petani produsen telah mampu menikmati keuntungan daya saing dari produk pertanian mereka. Kondisi ini masih di bawah capaian NTP nasional yang telah berada di atas 100 poin.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan Rumah Makan/Restoran serta ketersediaan penginapan.

Ketersediaan fasilitas/infrastruktur perhubungan merupakan salah satu faktor salah satunya dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi dalam aspek Daya Saing daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi pula. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat dan diikuti oleh peningkatan kebutuhan transportasi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

#### **2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Kegunaan Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membangun fasilitas. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membangun fasilitas wilayah, dan semakin mampu daerah tersebut melaksanakan otonomi.

**Tabel 2.113.**  
**Rasio Panjang Jalan Persatuan Jumlah Kendaraan**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020**

| Uraian                               | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Proyeksi dalam RPJMD<br>2019 – 2020  | 11.21 | 11.54 |
| Realisasi dalam RPJMD<br>2019 - 2020 | 13.16 | 13.16 |

**Sumber :IKK Urusan PU & Penataan Ruang Kabupaten Donggala  
Tahun 2019 – 2020**

Merujuk pada tabel yang tersaji di atas, mendeskripsikan bahwa capaian rasio panjang jalan per satuan kendaraan tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2020, Namun, bila dibandingkan dari terget di tahun yang sama maka terlihat bahwa realisasi di tahun tersebut melampaui dari target.

#### **2.4.2.2. Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Capaian indikator Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.114.**  
**Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten**  
**Donggala Tahun 2019 – 2020**

| Uraian                                         | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------|------|------|
| Proyeksi dalam<br>RPJMD 2019 – 2020<br>(jiwa)  | 3210 | 3300 |
| Realisasi dalam<br>RPJMD 2019 – 2020<br>(jiwa) | 2716 | 2689 |

**Sumber : IKK Urusan Perhubungan Kabupaten Donggala Tahun 2019 –  
2020**

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas, mendeskripsikan bahwa Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019-2020, Namun, bila dibandingkan dari terget di tahun yang sama maka terlihat bahwa realisasi di tahun tersebut tidak mencapai dari target yang telah diproyeksikan pada RPJMD Tahun 2019-2024.

#### **2.4.2.4. Ketaatan terhadap RTRW**

Penataan wilayah di Kabupaten Donggala diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031. Bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan dan penataan kawasan.

Rencana pemanfaatan lahan dan penataan kawasan di Kabupaten Donggala berdasarkan RTRW Kabupaten Donggala terbagi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasilitas umum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan).

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.



**Tabel 2.115.**  
**Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020**

| Uraian                                  | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------|------|------|
| Proyeksi dalam RPJMD<br>2019 – 2020 (%) | 76   | 77   |
| Realisasi Ketaatan<br>Terhadap RTRW (%) | 76   | 76   |

**Sumber : IKK Urusan PU & Penataan Ruang Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2024.**

Tabel di atas memberikan informasi bahwa persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah mengalami peningkatan. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 76,00 persen yang menunjukkan semakin semakin taatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Donggala yang mengacu pada RTRW. Walaupun dari sisi lain, realisasi Tahun 2020 terhadap proyeksi tidak mencapai target.

#### **2.4.2.5. Luas Wilayah Produktif**

Informasi mengenai luas wilayah produktif di Kabupaten Donggala dapat memberikan arahan bagi pengembangan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Donggala.

#### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal

penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Donggala.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha dan Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa).

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

#### **A. Jumlah dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah**

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

#### **A. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa**

Pembangunan Desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang. Dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Pembangunan

Desa/kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Berdasarkan statusnya, Desa atau kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni Desa/kelurahan swadaya; Desa/kelurahan swakarya; dan Desa/kelurahan swasembada (berkembang).

#### **2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

##### **A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Iulusan S1/S2/S3)**

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

##### **B. Rasio Ketergantungan**

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk

muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sementara penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi Persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

## **2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2020**

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD sampai tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Kabupaten Donggala yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori, yaitu melebihi target, tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Donggala 2019 – 2024 tersebut dilakukan terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang memiliki data target dan realisasi sesuai dengan

Permendagri 86 Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Donggala disajikan pada Tabel Lampiran bab II ini.

**Tabel 2.116 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016-2020**

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                         | Capaian Kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                               | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| <b>I.</b>       | <b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                                                               |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>1.1.</b>     | <b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>                                                                   |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.1.2001.       | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.1.1.1         | Pertumbuhan PDRB (HK 2010)                                                                                    | 4,32            | 5,08  | 2,56  | 4,37  | -4,87 | 5,72    | <                                                                             |
| 1.1.1.2         | Laju Inflasi                                                                                                  | 1,57            | 4,56  | 0,290 |       |       | 3,76    | Donggala bukan kota Inflasi tahun 2019-2020                                   |
| 1.1.1.3         | PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)                                                                                  | 33,69           | 35,99 | 37,34 | 39,82 | 38,25 | 46,25   | <                                                                             |
| 1.1.1.4         | Indeks Gini                                                                                                   | 0,33            | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,38    | <                                                                             |
| 1.1.1.5         | Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia                                                                        | na              | na    | na    |       |       |         | na                                                                            |
| 1.1.1.6         | Indeks Ketimpangan Williamson                                                                                 | na              | na    | na    |       |       |         | na                                                                            |
| 1.1.1.7         | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan                                                                   | 18,59           | 18,17 | 18,03 | 18,4  | 17,99 | 16,35   | >                                                                             |
| 1.1.1.8         | Indeks Kedalaman Kemiskinan                                                                                   | 03,01           | 3,17  | 3,04  | 2,86  | 3,01  | 2,85    | >                                                                             |
| 1.1.1.9         | Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari                            | na              | na    | na    |       |       |         | na                                                                            |
| 1.1.1.10        | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                              | 64,42           | 64,66 | na    | 65,49 | 65,56 | 65,31   | >                                                                             |
|                 |                                                                                                               |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>1.2.</b>     | <b>Kesejahteraan Sosial</b>                                                                                   |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>1.2.2001</b> | <b>Pendidikan</b>                                                                                             |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.2.1.1         | Angka Melek Huruf                                                                                             | 98,13           | 98,96 | 99,79 | 99,84 | 99,84 | 99,84   | =                                                                             |
| 1.2.1.2         | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                                                                  | 7,81            | 7,85  | 7,89  | 7,86  | 7,88  | 7,89    | <                                                                             |
| 1.2.1.3         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI                                                                           | 111,16          | 106,1 |       | 99,14 | 99,14 | 110,39  | <                                                                             |

| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                       | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
|                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MT                                  | 77,95           | 87,61 |       | 107,6 | 107,6 | 92,95   | >                                                                             |
|                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA                                  | 64,15           | 76,86 |       | 809,1 | 80,1  | 81,54   | <                                                                             |
| 1.2.1.4          | Angka Pendidikan yang Ditamatkan                                      | na              | na    | na    | 100   | 100   | na      | na                                                                            |
| 1.2.1.5          | Angka Partisipasi Murni SD/MI                                         | 95,91           | 94,88 |       | 93,48 | 93,38 | 96,79   | <                                                                             |
|                  | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs                                       | 69,06           | 71,56 |       | 77,43 | 77,51 | 75,92   | >                                                                             |
|                  | Angka Partisipasi Murni SMA/MA                                        | 55,63           | 58,18 |       | 59,38 | 60,45 | 61,72   | <                                                                             |
| <b>1.2.2002</b>  | <b>Kesehatan</b>                                                      |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.2.2.1          | Angka Kelangsungan Hidup Bayi                                         | 1               | 0,99  | 0,99  | 0,76  | 0,6   | 0,99    | <                                                                             |
| 1.2.2.2          | Angka Usia Harapan Hidup                                              | 67,13           | 67,41 | 67,69 | 66,85 | 67,33 | 67,64   | <                                                                             |
| <b>1.2.2003</b>  | <b>Sumberdaya</b>                                                     |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.2.3.1          | Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan                               | na              | na    | na    | 45    | 35    |         | na                                                                            |
| 1.2.3.2          | Rasio Penduduk yang Bekerja                                           | 80,55           | 81,3  | na    | na    | na    | 84,63   | na                                                                            |
| 1.2.3.3          | Tingkat Pengangguran Terbuka                                          | 3,13            | 3,32  | 2,77  | 2,81  | 2,58  | 3,11    | >                                                                             |
| <b>1.3.</b>      | <b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>                                 |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1.3.2001         | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk                              | 58              | na    | na    | na    | na    | 68      | na                                                                            |
| 1.3.2002         | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk                            | 1               | na    | na    | na    | na    | 3       | na                                                                            |
| 1.3.2003         | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk                              | na              | na    | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| 1.3.2004         | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk                            | na              | na    | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
|                  |                                                                       |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>II.</b>       | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                           |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.</b>      | <b>Layanan Urusan Pemerintah Wajib</b>                                |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.2001.</b> | <b>Wajib Layanan Dasar</b>                                            |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.1</b>   | <b>Pendidikan</b>                                                     |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.1a</b>  | <b>2.1.1.1a</b>                                                       | na              | na    | na    |       |       | 23      | na                                                                            |

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |             |             |       |       | Standar     | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                       | 2016            | 2017        | 2018        | 2019  | 2020  |             |                                                                               |
| <b>2.1.1.1b</b> | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APAS)</b>                               |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | APS SD/MI/Paket A                                                     | 102,35          | 97,3        | 94,6        | 98,8  | 98,8  | 98,8        | =                                                                             |
|                 | APS SMP/MTs/Paket B                                                   | 85,16           | 90,75       | 97,9        | 98,5  | 98,5  | 98,5        | =                                                                             |
|                 | APS SMA/SMK/MA/Paket C                                                | 63,05           | 64,75       | 66,45       | 68,85 | 68,5  | 69,85       | <                                                                             |
| <b>2.1.1.1c</b> | <b>Angka Putus Sekolah (APUS)</b>                                     |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | APUS SD/MI/Paket A                                                    | 2               | 0,06        | na          | 0,06  | 0,05  | 0,02        | >                                                                             |
|                 | APUS SMP/MTs/Paket B                                                  | 2,19            | 0,57        | na          | 0,32  | 0,21  | 0,2         | >                                                                             |
|                 | APUS SMA/SMK/MA/Paket C                                               | 3,24            | 0           | na          | 0     | 0     | 0           | =                                                                             |
| <b>2.1.1.1d</b> | <b>Angka Kelulusan</b>                                                |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | AK SD/MI/Paket A                                                      | 99,45           | 100         | na          | 100   | 100   | 100         | =                                                                             |
|                 | AK SMP/MTs/Paket B                                                    | 99,49           | 99,37       | na          | 99,1  | 99,73 | 99,77       | <                                                                             |
|                 | AK SMA/SMK/MA/Paket C                                                 | 100             | 100         | na          | 100   | 100   | 100         | =                                                                             |
| <b>2.1.1.1e</b> | <b>Angka Melanjutkan</b>                                              |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | AM ke SMP/MTs/Paket B                                                 | 99,88           | 99,7        | na          | 100   | 100   | 99,8        | >                                                                             |
|                 | AM ke SMA/SMK/MA/Paket C                                              | 99,6            | 98,61       | na          | 100   | 100   | 98,67       | >                                                                             |
| <b>2.1.1.1f</b> | <b>Sekolah Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik</b>                    |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | SD/MI/Paket A                                                         | 99,72           | na          | na          | 100   | 100   | 99,96       | >                                                                             |
|                 | SMP/MTs/Paket B                                                       | 92,44           | na          | na          | 100   | 100   | 93,82       | >                                                                             |
|                 | SMA/MA/Paket C                                                        | 92,44           | na          | na          | 100   | 100   | 93,72       | >                                                                             |
| <b>2.1.1.1g</b> | <b>Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah</b>               |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | Rasio Ketersediaan<br>SD/MI/Penduduk Usia SD/MI                       | 0,135416667     | 0,125       | 0,125       | 02:30 | 02:30 | 1,96        | <                                                                             |
|                 | Rasio Ketersediaan<br>SMP/MTs/Penduduk Usia<br>SMP/MTs                | 0,129166667     | 0,122222222 | 0,116666667 | 02:30 | 02:30 | 1,80        | <                                                                             |
|                 | Rasio Ketersediaan<br>SMA/MA/SMK/Penduduk Usia<br>SMA/MA/SMK          | 0,130555556     | 0,130555556 | 0,130555556 | 02:30 | 02:30 | 0,104166667 | =                                                                             |
| <b>2.1.1.1h</b> | <b>Rasio Guru/Murid</b>                                               |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | Rasio Guru/Murid SD/MI/Paket A                                        | 01:16           | 01:22       | 01:30       | 01:26 | 01:26 | 01:25       | >                                                                             |
|                 | Rasio Guru/Murid SMP/MTs/Paket B                                      | 01:15           | 01:25       | 01:34       | 01:26 | 01:26 | 01:23       | >                                                                             |
|                 | Rasio Guru/Murid<br>SMA/MA/SMK/Paket C                                | 01:19           | 01:19       | 01:19       | -     | -     | 01:23       | na                                                                            |
| <b>2.1.1.1i</b> | <b>Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata</b>                           |                 |             |             |       |       |             |                                                                               |
|                 | SD/MI/Paket A                                                         | na              | na          | na          | na    | na    |             | na                                                                            |



| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                   | Capaian Kinerja |        |        |        |        | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                         | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |         |                                                                               |
|                | SMP/MTs/Paket B/SMA/MA/Paket C                                                          | na              | na     | na     | na     | na     |         | na                                                                            |
| 2.1.1.1j       | Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan SD                                      | na              | na     | na     | na     | na     |         | na                                                                            |
| 2.1.1.1k       | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki                    | na              | na     | na     | 99,48  | 100    |         | na                                                                            |
| 2.1.1.1l       | Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)                         | na              | na     | na     | 96,38  | 97,22  | 97,31   | <                                                                             |
| 2.1.1.1m       | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                                  | 42,39           | na     | na     | na     | na     | 46,73   | na                                                                            |
|                |                                                                                         |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.2</b> | <b>Kesehatan</b>                                                                        |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| 2.1.1.2a       | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran                                                  | 5,2             | 8,22   | 8,39   | 4,43   | 3,13   | 6,41    | <                                                                             |
| 2.1.1.2b       | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup                                        | 3,77            | 8,06   | 7,37   | 4,26   | 4,64   | 0,6     | >                                                                             |
| 2.1.1.2c       | Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup                                          | 89,65           | 218,19 | 137,06 | 289,51 | 181,31 | 146,61  | >                                                                             |
| 2.1.1.2d       | Rasio Posyandu Per Satuan Balita                                                        | 13,42           | 13,15  | 13,2   | na     | na     | 12,54   | na                                                                            |
| 2.1.1.2e       | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk                                                     | 0,294           | 0,311  | 0,315  | 0,0591 | 0,0591 | 0,3165  | <                                                                             |
|                | Rasio Pustu Per Satuan Penduduk                                                         | 0,294           | 0,311  | 0,315  | 0,2433 | 0,2433 | 0,3165  | <                                                                             |
|                | Rasio Poskesdes Per Satuan Penduduk                                                     | 0,294           | 0,311  | 0,315  | 0,099  | 0,099  | 0,3165  | <                                                                             |
|                | Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk                                                   | 0,0067          | 0,0067 | 0,0066 | 0,007  | 0,007  | 0,0078  | <                                                                             |
| 2.1.1.2f       | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk                                                        | 0,081           | 0,0769 | 0,0862 | 0,113  | 0,117  | 0,118   | <                                                                             |
| 2.1.1.2g       | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk                                                  | 0,125           | 0,134  | 0,166  | 2,41   | 2,43   | 0,185   | >                                                                             |
| 2.1.1.2h       | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 97,04           | 81,69  | 85,01  | 84,3   | 84,3   | 90,19   | <                                                                             |
| 2.1.1.2i       | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                             | 78,24           | 83,93  | 76,57  | na     | na     | 89,38   | na                                                                            |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                      | Capaian Kinerja |        |        |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            | 2016            | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 2.1.1.2j | Cakupan Desa/Kelurahan<br>Universal Child Immunization (UCI)                               | 56,29           | 74,25  | 72,46  | 100   | 100   | 77,62   | >                                                                             |
| 2.1.1.2k | Cakupan Balita Gizi Buruk<br>mendapat perawatan                                            | 100             | 100    | 100    | 40.4  | 40.4  | 100     | >                                                                             |
| 2.1.1.2l | Persentase anak usia 1 tahun yang<br>Diimunisasi Campak                                    | 78,74           | 81,98  | 86,73  | 90    | 90    | 92,94   | <                                                                             |
| 2.1.1.2m | Cakupan Penemuan dan<br>Penanganan Penderita Penyakit<br>TBC BTA                           | 37,91           | 73,35  | 30,86  | 18.57 | 18.57 | 21,55   | >                                                                             |
| 2.1.1.2m | Tingkat prevalensi TB                                                                      | 135,3           | 160,78 | 128,32 | na    | na    | 75,97   | na                                                                            |
| 2.1.1.2m | Tingkat kematian karena TB                                                                 | 4,05            | 6,69   | 8,62   | na    | na    | 3,62    | na                                                                            |
| 2.1.1.2n | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang<br>terdeteksi dalam program DOTS                   | 0,85            | 6,24   | 12,12  | na    | na    | 2,81    | na                                                                            |
| 2.1.1.2n | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan<br>sembuh dalam program DOTS                  | 26,73           | 47,26  | 19,22  | na    | na    | 21,86   | na                                                                            |
| 2.1.1.2t | Cakupan penemuan dan<br>Penanganan Penderita Penyakit<br>DBD                               | 100             | 100    | 100    | na    | na    | 100     | na                                                                            |
| 2.1.1.2n | Penderita Diare Yang Ditangani                                                             | 88,17           | 83,35  | 83,76  | 56.87 | 56.87 | 72,51   | >                                                                             |
| 2.1.1.2o | Angka Kejadian Malaria                                                                     | 1,03            | 0,19   | 0,21   | 0.10  | 43.85 | 0,91    | >                                                                             |
| 2.1.1.2p | Cakupan kunjungan bayi                                                                     | 96,72           | 137,04 | 90,1   | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 2.1.1.2q | Cakupan Puskesmas                                                                          | 100             | 106,25 | 112,5  | 90    | 93.27 | 93,36   | >                                                                             |
| 2.1.1.2r | Cakupan Pustu                                                                              | 42,51           | 44,31  | 44,31  | na    | na    | 43,21   | na                                                                            |
| 2.1.1.2s | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                             | 72,77           | 78,92  | 81,73  | na    | na    | 77,64   | na                                                                            |
|          | Cakupan pelayanan nifas                                                                    | 97,69           | 80,59  | 82,95  | na    | na    | 77,81   | na                                                                            |
|          | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang<br>ditangani                                       | 74,4            | 89,25  | 51,6   | na    | na    | 94,11   | na                                                                            |
| 2.1.1.2u | Cakupan Pelayanan Anak Balita                                                              | 76,39           | 82,51  | 33,34  | na    | na    | 73,52   | na                                                                            |
| 2.1.1.2v | Cakupan pemberian makanan<br>pendamping asi pada anak usia 6 -<br>24 bulan keluarga miskin | 2,12            | 2,61   | 2,61   | na    | na    | 5,7     | na                                                                            |
| 2.1.1.2w | Cakupan penjangkaran Kesehatan<br>Siswa SD dan setingkat                                   | 82,86           | 87,45  | 100    | na    | na    | 86,51   | na                                                                            |
| 2.1.1.2x | Cakupan pelayanan kesehatan<br>dasar pasien masyarakat miskin                              | 58,85           | 47,34  | 47,34  | na    | na    | 70,88   | na                                                                            |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                    | Capaian Kinerja |        |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                          | 2016            | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
|                | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)       | 100             | 100    | 100   | na    | na    |         | na                                                                            |
| 2.1.1.2y       | Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  | 100             | 100    | 100   | na    | na    | 100     | na                                                                            |
|                |                                                                                          |                 |        |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                 |                 |        |       |       |       |         |                                                                               |
| a.             | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik                                       | 0,27            | 0,43   | 0,19  | 0.45  | 0.45  | 0,47    | >                                                                             |
| b.             | Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk                                               | 0,0034          | 0,0034 | na    | 0.36  | 0.36  | 0,0037  | >                                                                             |
| c.             | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)                             | 39,66           | 43,6   | na    | 44.73 | 44.73 | 45,88   | >                                                                             |
| d.             | Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4                   | na              | na     | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| f.             | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air               | 46,52           | 48,8   | 43,73 | na    | na    | 45,59   | na                                                                            |
| g.             | Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima                                | na              | na     | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| h.             | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                                                     | 40,31           | 55,2   | 53,19 | 54.44 | 54,44 | 55,72   | <                                                                             |
| i.             | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat            | 13              | 13     | 11    | na    | na    | 19,78   | na                                                                            |
| j.             | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                  | na              | na     | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| k.             | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | na              | na     | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| l.             | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                          | 26              | 39     | 34    | na    | na    | 34,22   | na                                                                            |
| m.             | Rasio Jaringan Irigasi                                                                   | 0,88            | 0,31   | 0,1   | na    | na    | 0,46    | na                                                                            |
| n.             | Persentase Penduduk Berakses Air Minum                                                   | 79,9            | 78,94  |       | na    | na    | 83,69   | na                                                                            |
| o.             | Persentase Areal Kawasan kumuh                                                           | 1,58            | 1,58   | 1,58  | na    | na    | 1,55    | na                                                                            |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                        | Capaian Kinerja |       |              |         |         | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                              | 2016            | 2017  | 2018         | 2019    | 2020    |         |                                                                               |
| p.             | Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan                                                                        | na              | na    | na           | na      | na      |         | na                                                                            |
| q.             | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk                                                                              | 34              | 36    | 38           | na      | na      | 42,94   | na                                                                            |
| r.             | Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk                                                                                          | na              | na    | na           | na      | na      | 2,9     | na                                                                            |
| t.             | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB                                                                | 0,26            | 0,26  | 0,26         | na      | na      | 64,36   | na                                                                            |
| u.             | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan                                                       | na              | na    | na           | na      | na      | 0,3     | na                                                                            |
| v.             | Ρασιο βανγυριαν βερ- IMB per satuan βανγυριαν                                                                                | 0,35            | 0,36  | 0,36         | na      | na      | 0,37    | na                                                                            |
| w.             | Ruang publik yang berubah peruntukannya                                                                                      | 0,52            | 0,52  | 0,52         | na      | na      | 0,52    | na                                                                            |
| x.             | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | na              | na    | na           | na      | na      | na      | na                                                                            |
| y.             | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                       | 73              | 73    | 75           | na      | na      | 77      | na                                                                            |
|                |                                                                                                                              |                 |       |              |         |         |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.4</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                                                                |                 |       |              |         |         |         |                                                                               |
| a.             | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                                                                                             | 58,27           | 58,79 | 59,31        | na      | na      |         | na                                                                            |
| b.             | Rumah Layak Huni                                                                                                             | 51318           | 52293 | <b>37202</b> | 28722   | 31562   |         | na                                                                            |
| c.             | Rumah Akibat Bencana                                                                                                         | -               | -     | -            | 106     | 200     |         | na                                                                            |
| d.             | Rumah Relokasi akibat Prog.Pemerintah                                                                                        | 53              | 50    | -            | -       | -       |         | na                                                                            |
| e.             | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                       | 0,173           | 0,176 | 0,126        | 0,0954  | 0,1049  |         | na                                                                            |
| e.             | Rasio Pemukiman Layak Huni                                                                                                   | 0,986           | 0,986 | 0            | 0,98465 | 0,98462 | 0,13    | >                                                                             |
| f.             | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)                                                                                    | 90,19           | 91,93 | 64,95        | 40,29   | 44,27   | 67,57   | <                                                                             |
| g.             | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)                                                                         | 67,57           | 65,2  | 46,06        | 28,975  | 31,84   | 47,92   | <                                                                             |
| h.             | Persentase permukiman yang tertata                                                                                           | 0,21            | 0,23  | 0,24         | na      | na      | 0,3     | na                                                                            |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                         | Capaian Kinerja |             |             |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                               | 2016            | 2017        | 2018        | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| i.             | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh                                                        | 0,02            | 0,01        | 0,01        | na    | na    | 0,01    | na                                                                            |
| j.             | Persentase Luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan                                       | 2,4             | 25,13       | 26,09       | na    | na    | 25,08   | na                                                                            |
| k.             | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan                                                         | 7,46            | 7,4         | 7,33        | na    | na    | 7,63    | na                                                                            |
| l.             | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU                               | 14              | 18          | 11          | na    | na    | 13,31   | na                                                                            |
| <b>2.1.1.5</b> | <b>Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat</b>                         |                 |             |             |       |       |         |                                                                               |
| 5.1            | Rasio Jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk                                                       | 2               | 1           | 1           | na    | na    | 2       | na                                                                            |
| 5.2            | Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk                                                      | 6               | 6           | 6           | na    | na    | 6       | na                                                                            |
| 5.3            | Rasio Pos Siskamling perjumlah Desa/Kelurahan                                                 | 218             | 218         | 218         | na    | na    | 218     | na                                                                            |
| 5.4            | Penegakan Perda                                                                               | 80              | 85          | 90          | na    | na    | 100     | na                                                                            |
| 5.5            | Cakupan patroli petugas Satpol.PP                                                             | 16 Kali         | 16 Kali     | 16 Kali     | na    | na    | 17      | na                                                                            |
| 5.6            | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman, keindahan) di Kabupaten Donggala | 80              | 85          | 90          | 100   | 100   | 100     | =                                                                             |
| 5.7            | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten                                         | 1.228           | 1.228       | 1.228       | na    | na    | 13,08   | na                                                                            |
| 5.9            | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota                                            | 0.001-0.002     | 0.001-0.002 | 0.001-0.002 | na    | na    | 0,13    | na                                                                            |
| 6.10           | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)   | 100             | 66,67       | 0           | na    | na    | 90      | na                                                                            |
| 5.10           | Persentase Penegakan PERDA                                                                    | na              | na          | na          | na    | na    |         | na                                                                            |
|                |                                                                                               |                 |             |             |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.1.5</b> | <b>Sosial</b>                                                                                 |                 |             |             |       |       |         |                                                                               |
| 5.a            | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                | 25              | 22          | 19          | 10.01 | 10.01 | 22,35   | >                                                                             |
| 5.b            | Persentase PMKS yang tertangani                                                               | 25              | 22          | 19          | 10.01 | 10.01 | 22,35   | >                                                                             |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                | Capaian Kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 5.c            | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                 | na              | na    | na    | 5     | 5     | na      | na                                                                            |
| 5.d            | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | na              | na    | na    | 64.42 | 64.32 | na      | na                                                                            |
| 5.e            | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                                                                 | na              | na    | na    | 8     | 8     | na      | na                                                                            |
| 5.f            | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                  | na              | na    | na    | 5     | 5     | na      | na                                                                            |
| 5.g            | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                                                   | na              | na    | na    | 31    | 31    | na      | na                                                                            |
| 5.h            | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap                                                | na              | na    | na    | 10    | 10    | na      | na                                                                            |
| 5.i            | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                   | 35              | 18 80 | 18 91 | 1.1   | 1.1   | 13,98   | >                                                                             |
| <b>2.1.1.6</b> | <b>Kesatuan Bangsa Politik</b>                                                                                                                       |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 8.1.           | Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama                                                                                           | 3               | 1     | -     | na    | na    | 1,52    | na                                                                            |
| 8.2.           | Rapat-rapat Koordinasi Pengendalian Keamanan                                                                                                         | 4               | 4     | 4     | na    | na    | 5       | na                                                                            |
| 8.3.           | Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini                                                                                                           | 2               | 1     | -     | na    | na    | 2       | na                                                                            |
| 8.4.           | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik                                                                                              | 1               | 16    | -     | na    | na    | 17      | na                                                                            |

| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                         | Capaian Kinerja |      |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                               | 2016            | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 8.5.             | Penelitian/Verifikasi Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik                                             | 11              | 11   | 11    | na    | na    | 11      | na                                                                            |
| 8.6.             | Pemantauan, Pendataan dan Pembinaan Ormas, Orkesmas dan LS                                                    | 2               | 1    | -     | na    | na    | 1,6     | na                                                                            |
| 8.7.             | Peningkatan Pemahaman Idiologi dan Bela Negara                                                                |                 | 1    | -     | na    | na    | 1,6     | na                                                                            |
| 8.8.             | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)                                                                              | 2               | -    | -     | na    | na    | 3,21    | na                                                                            |
| 8.8.             | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat                                          | -               | -    | -     | na    | na    | 2       | na                                                                            |
| 8.9.             | Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | -               | -    | -     | na    | na    | 1       | na                                                                            |
| 8.10             | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                         | 2               | -    | -     | na    | na    | 2       | na                                                                            |
| 8.11.            | Sosialisasi Penyuluhan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan dan Ketahanan Usaha Ekonomi Rakyat             | -               | -    | -     | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| <b>2.1.2002.</b> | <b>Urusan Wajib Non Layanan Dasar</b>                                                                         |                 |      |       |       |       |         |                                                                               |
| <b>2.1.2.1</b>   | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                                           |                 |      |       |       |       |         |                                                                               |
| 1                | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun                                                                    | 65,57           | 100  | 77,78 | 8,26  | 33,06 | 96      | <                                                                             |
| 2                | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                | 100             | 100  | 77,78 | 25,00 | 100   | 96      | >                                                                             |
| 3                | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                                         | 5156            | 1021 | 2921  | 0,01  | 0,09  | 226     | <                                                                             |
| 4                | Keselamatan dan perlindungan                                                                                  | 0,61            | 0,61 | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 96,82   | <                                                                             |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah         | Capaian Kinerja |             |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | 2016            | 2017        | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 5   | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek                  | 0,63            | 0,88        | 0,98  | 0,95  | 12,45 | 98,66   | <                                                                             |
| 6   | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah         | 100             | 100         | 77,78 | 25,00 | 100   | 100     | =                                                                             |
| 7   | Besaran Pemeriksaan Perusahaan                                                | na              | na          | na    | na    | na    | na      | Tim Pemeriksa Provinsi                                                        |
| 8   | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan                                     | na              | na          | na    | na    | na    | na      | Tim Pemeriksa Provinsi                                                        |
| 9   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi           | 160             | 126         | 96    | 144   | 35,56 | 80      | <                                                                             |
| 10  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat           | 80              | 80          | 80    | 64,02 | 86,11 | 64      | >                                                                             |
| 11  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan                 | 60              | 9           | 9     | 80,00 | 75,29 | 18      | >                                                                             |
| 12  | Rasio lulusan S1/S2/S3                                                        | 48,92           | 75,31       | 77,82 | 75,33 | 75,63 | 100     | <                                                                             |
| 13  | Prosentase lancarnya administrasi perkantoran                                 | 99,94           | 98,96       | na    | 98,96 | na    | 100     | na                                                                            |
|     |                                                                               | 773.212.621     | 569.285.095 | na    |       |       | na      | na                                                                            |
|     |                                                                               | 773.660.000     | 575.281.991 |       |       |       | na      | na                                                                            |
| 14  | Persentase meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik |                 | 100         | na    | 100   | na    | 100     | na                                                                            |
|     |                                                                               | -               | 86.900.000  | na    |       |       |         | na                                                                            |
|     |                                                                               | -               | 86.900.000  |       |       |       |         | na                                                                            |
| 15  | Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek                         | 90              | 87          | 100   | na    | na    | 100     | na                                                                            |
| 16  | Persentase peningkatan kesejahteraan /upah kerja                              | 0,76            | 1,12        | 5     | 5     | na    | 8       | na                                                                            |



| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                     | Capaian Kinerja |           |           |      |      | Standar   | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                           | 2016            | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 |           |                                                                               |
|                | Kesejahteraan apar kerja                                                                                                                                                  | 1.850.000       | 2.077.750 | 2.181.600 |      |      | 2.450.000 | na                                                                            |
| <b>2.1.2.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                                                                                       |                 |           |           |      |      |           |                                                                               |
| 1              | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                                                                                    | 0,70%           | 5,30%     | 1,30%     | 1.26 | 1.26 | 9,13      | >                                                                             |
| 2              | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                                                                                             | 6,67            | 6,67      | 6,67      | 13   | 1.26 | 9         | >                                                                             |
| 3              | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                   | -               | 6,91      | 6,91      | 0.39 | 0.39 | 7,62      | >                                                                             |
| 4              | Rasio KDRT                                                                                                                                                                | 0,043           | 0,044     | 0,016     | na   | 0.34 | 0,24      | >                                                                             |
| 5              | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                                                                                                                               | 3%              | 1,56%     | 0,00%     | na   | na   | 30,12     | na                                                                            |
| 6              | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                                                                                      | 35.547          | 5.260     | 22.041    | nq   | na   | 79,96     | na                                                                            |
| 7              | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                   | data tidak ada  | 10,6      | 0,6       | 20   | 100  | 20        | >                                                                             |
| 8              | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A PPT/PKT di Rumah Sakit | 0               | 0         | 0         | 30   | 72   | 40        | >                                                                             |
| 9              | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.    | na              | na        | na        | 0    | 85   | 20        | >                                                                             |
| 10             | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                   | na              | na        | 42,56     | 50   | 50   | 60        | <                                                                             |
| 11             | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                        | na              | na        | na        | 10   | 20   | 20        | =                                                                             |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                                | Capaian Kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                      | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 12             | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                                  | na              | na    | na    | 10    | 89    | 20      | >                                                                             |
| 13             | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak                                                                                                                           | na              | na    | 25,57 | na    | na    | 40      | na                                                                            |
| 14             | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                                  | 95,91           | 94,88 | na    | 87    | 87    | 97,8    | <                                                                             |
| 15             | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                                                                 | 69,24           | 71,56 | na    | 87    | 87    | 72,53   | >                                                                             |
| 16             | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                                                                                                 | 55,63           | 58,18 | na    | 50    | 50    | 56,37   | <                                                                             |
| 17             | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                                                                                                                                    | 11,37           | na    | na    | 30    | 30    | 15,2    | >                                                                             |
| 18             | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                                                                                                        | na              | na    | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| 19             | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian                                                                                                                  | na              | na    | na    | na    | na    |         | na                                                                            |
| <b>2.1.2.3</b> | <b>Pangan</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 1              | Dipertahankannya Ketersediaan Energi per kapita 2.200 Kkal, Penyediaan Protein per kapita minimal 57 gram/hari, dan tercapainya kecukupan energi 2.000 Kkal dan Protein 52 gram/hari | 3.274           | 3.576 | 4.504 | 4.457 | 4.434 | 3.600   | >                                                                             |
| 2              | Berkurangnya jumlah Penduduk miskin 1 % per tahun dan Desa Rawan Pangan                                                                                                              | 100%            | 100%  | na    | na    | na    | 1%      | na                                                                            |
| 3              | Menurunkan konsumsi beras 1,03 % pertahun yang diimbangi dengan peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan skor PPH 95 Tahun 2016                                           | 125,9           | 127,5 | na    | na    | na    | 123,57  | na                                                                            |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                        | Capaian Kinerja |         |         |         |         | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                              | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |         |                                                                               |
| 4              | Meningkatkan sistem Distribusi dan cadangan Pangan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat | 80%             | na      | na      | na      | na      | 25%     | na                                                                            |
| 5              | Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah (Ton)                                                                   | 11.400          | na      | na      | 15,50   | 16,50   | 16,50   | =                                                                             |
| 6              | Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui peran Dewan Ketahanan Pangan                                          | 17 Dok          | na      | na      | 17 Dok  | 17 Dok  | 17 Dok  | =                                                                             |
| <b>2.1.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>                                                                                                                            |                 |         |         |         |         |         |                                                                               |
| 1              | Persentase luas lahan bersertifikat                                                                                                          | na              | 20      | 35      | 45      | 35      | 25      | >                                                                             |
| 2              | Penyelesaian kasus tanah Negara                                                                                                              | na              | 20      | 35      | 45      | 25      | 25      | =                                                                             |
| 3              | Penyelesaian izin lokasi                                                                                                                     | na              | na      | na      | 84      | 85.89   | -       | na                                                                            |
| <b>2.1.2.5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                      |                 |         |         |         |         |         |                                                                               |
| 1              | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                                             | Tdk Ada         | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Ada     | <                                                                             |
| 2              | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupten/kota                                                                                | Tdk Ada         | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Ada     | <                                                                             |
| 3              | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah kabupaten/kota                                                                                      | Tdk Ada         | Tdk Ada | Tdk Ada | Ada     | Tdk Ada | Tdk Ada | =                                                                             |
| 4              | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air                                                                                                         | na              | na      | na      | na      | 24,01   |         | na                                                                            |
| 5              | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara                                                                                                       | na              | na      | na      | na      | 18,31   |         | na                                                                            |
| 6              | Hasil Pengukuran Indeks Kuallita tutupan lahan                                                                                               | na              | na      | na      | ma      | 29,26   |         | na                                                                            |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                                                              | Capaian Kinerja |         |      |         |         | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    | 2016            | 2017    | 2018 | 2019    | 2020    |         |                                                                               |
| 7   | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 0,5             | 0,56    | 0,67 | 20%     | 20%     | 0,5     | <                                                                             |
| 8   | Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota                                                                                                   | na              | na      | na   | na      | na      | 1       | na                                                                            |
| 9   | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA                                                                                                                                                                           | na              | na      | na   | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 10  | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional                                                                                                                                               | na              | na      | na   | na      | na      | 1       | na                                                                            |
| 11  | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional                                                                                                                                                  | na              | na      | na   | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 12  | Penetapan hak MHA                                                                                                                                                                                                  | na              | na      | na   | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 13  | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan                                                                                                                                                    | na              | na      | na   | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 14  | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana                                                                                                                                                                          | na              | na      | na   | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 15  | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat                                                                                                                                                                  | 1               | 0       | 0    | na      | na      | 2       | na                                                                            |
| 16  | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup                                                                                                                                                               | Tdk Ada         | Tdk Ada | Ada  | Tdk Ada | Tdk Ada | Ada     | <                                                                             |
| 17  | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota                                     | 0               | 0       | 1    | 100%    | 100%    | 1       | =                                                                             |
| 18  | Timbulan sampah yang ditangani                                                                                                                                                                                     | 0,9             | 0,89    | 0,88 | 100     | 100     | 0,8     | >                                                                             |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                          | Capaian Kinerja |         |         |         |         | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |         |                                                                               |
| 19             | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                                             | 0,1             | 0,11    | 0,12    | 3,59    | 3,59    | 0,1     | >                                                                             |
| 20             | Persentase cakupan area pelayanan                                                                              | 0,85            | 0,85    | 0,85    | 0.89%   | 0.90%   | 0,01    | >                                                                             |
| 21             | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                       | 0,01            | 0,01    | 0,01    | 6.93%   | 6.95%   | 0,01    | >                                                                             |
| 22             | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupten/kota                                                                 | <71             | <71     | >71     | >71     | >71     | >71     | =                                                                             |
| 23             | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan                                                | na              | na      | na      | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| 24             | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan                      | na              | na      | na      | na      | na      | 0       | na                                                                            |
| <b>2.1.2.6</b> | <b>Penduduk dan Capil</b>                                                                                      |                 |         |         |         |         |         |                                                                               |
| 1              | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                                                     | 131.345         | 141.250 | 118.404 | 186.366 | 205.864 | 135.453 | >                                                                             |
| 2              | Rasio bayi berakte kelahiran                                                                                   | 12.599          | 11.651  | 16.564  | 20.022  | 21.082  | 20.250  | >                                                                             |
| 3              | Rasio pasangan berakte nikah                                                                                   | 131.059         | 151.200 | 185.251 | na      | na      | 198.570 | na                                                                            |
| 4              | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                                              | Ada             | Ada     | Ada     | na      | na      | Ada     | na                                                                            |
| 5              | Penerapan KTP nasional berbasis NIK                                                                            | Ada             | Ada     | Ada     | na      | na      | Ada     | na                                                                            |
| 6              | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                                                  | 131.345         | 141.250 | 118.404 | 186.366 | 5.864   | 135.453 | <                                                                             |
| 7              | Cakupan penerbitan akte kelahiran                                                                              | 11.335          | 11.058  | 44.711  | na      | na      | 46.425  | na                                                                            |
| <b>2.1.2.7</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                            |                 |         |         |         |         |         |                                                                               |
| 1              | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                                                                | 1,46            | 1,42    | 1,39    | 1,38    | 1,37    | 1,37    | >                                                                             |
| 2              | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                     | 2,7             | 2,5     | 2,4     | 2,2     | 2,2     | 2,2     | >                                                                             |
| 3              | Persentase Perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB      | 0               | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      | =                                                                             |
| 4              | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 2               | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | =                                                                             |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                               | Capaian Kinerja |        |        |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                     | 2016            | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 5   | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | 1               | 1      | 2      | 2     | 0     | 2       | <                                                                             |
| 6   | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 4               | 4      | 5      | 6     | 6     | 6       | =                                                                             |
| 7   | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yng melakukan pendidikan kependudukan                                   | 2               | 2      | 2      | 4     | 4     | 4       | =                                                                             |
| 8   | rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                                  | 2,7             | 2,6    | 2,5    | 2     | 2     | 2       | =                                                                             |
| 9   | Rasio akseptor KB                                                                                                                                   | 52%             | 60%    | 65%    | 67    | 65.7  | 67%     | >                                                                             |
| 10  | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                   | 4118            | 4189   | 4221   | 41014 | 41014 | 4500    | >                                                                             |
| 11  | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                                      | 15%             | 18%    | 20%    | 32    | 32    | 15%     | >                                                                             |
| 12  | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun                                                                                   | 12989           | 13389  | 13776  | 12400 | 12654 | 12654   | =                                                                             |
| 13  | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                          | 82167           | 81142  | 78210  | 65241 | 65101 | 65101   | =                                                                             |
| 14  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                             | 10,02%          | 10,30% | 11,29% | 11.4  | 11,54 | 11,54%  | >                                                                             |
| 15  | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                            | 68%             | 72%    | 75%    | 80    | 94    | 85%     | >                                                                             |
| 16  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB                                                                                                   | 1175            | 1180   | 1465   | 1524  | 1440  | 1552    | <                                                                             |
| 17  | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB                                                                                                   | 1237            | 1290   | 1418   | 1502  | 476   | 1548    | <                                                                             |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                            | Capaian Kinerja |      |      |      |      | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | 2016            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |         |                                                                               |
| 18  | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB                                                                                                                | 874             | 891  | 930  | 852  | 852  | 130     | >                                                                             |
| 19  | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                                    | 16              | 16   | 16   | 20   | 3    | 20      | <                                                                             |
| 20  | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                              | 70              | 75   | 78   | 85   | 420  | 85      | >                                                                             |
| 21  | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB Perangkat Daerah KB Perangkat Daerah Kb pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penduduk pengendalian   | 33              | 33   | 33   | 90   | 98   | 90      | >                                                                             |
| 22  | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                                       | 100             | 102  | 102  | 120  | 190  | 120     | >                                                                             |
| 23  | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                             | 160             | 164  | 167  | 170  | 170  | 170     | =                                                                             |
| 24  | Cakupan ketersediaan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                                   | 38%             | 39%  | 40%  | 50   | 7154 | 50%     | >                                                                             |
| 25  | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 19              | 21   | 21   | 18   | 18   | 30      | <                                                                             |
| 26  | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                  | 160             | 164  | 167  | 84   | 84   | 170     | <                                                                             |
| 27  | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                     | 36              | 35   | 35   | 30   | 0    | 25      | <                                                                             |

| No.            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                       | Capaian Kinerja |           |              |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                             | 2016            | 2017      | 2018         | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 28             | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                       | 3               | 4         | 4            | 6     | 59    | 6       | >                                                                             |
| 29             | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 2305            | 2358      | 2422         | 50    | 2112  | 2589    | <                                                                             |
| 30             | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                         | 19              | 20        | 20           | 18    | 19    | 21      | <                                                                             |
| 31             | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes               | 7%              | 7%        | 8%           | na    | na    | 9%      | na                                                                            |
| <b>2.1.2.8</b> | <b>Perhubungan</b>                                                                                                          |                 |           |              |       |       |         |                                                                               |
| 1              | Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)                                                                            | na              | na        | na           | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 2              | Jumlah kapal berangkat                                                                                                      | na              | na        | na           | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 3              | Jumlah penumpang turun                                                                                                      | na              | na        | na           | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 4              | Jumlah penumpang naik                                                                                                       | na              | na        | na           | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 5              | Jumlah barang bongkar (ton)                                                                                                 | 226.777         | 545.113   | 513.104      | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 6              | Jumlah barang muat (ton)                                                                                                    | 20.312.958      | 2.560.690 | 2.880.123,17 | na    | na    | 0       | na                                                                            |
| 7              | Rasio Ijin Trayek ?                                                                                                         | 0,00085         | 0,0009    | 0,00095      | 0.95% | 0.98% | 0,0008  | >                                                                             |
| 8              | Jumlah uji kir angkutan umum                                                                                                | 49              | 38        | 37           | na    | na    | 230     | na                                                                            |
| 9              | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                                                                    | 5               | 5         | 5            | na    | na    | 5       | na                                                                            |
| 10             | Persentase layanan angkutan darat                                                                                           | 16.04           | 15,15     | 17,34        | 18.23 | 16.6  | 20,57   | >                                                                             |
| 11             | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                    | 1,15            | 0,95      | 0,8          | 3.87  | 5.65  | 2,99    | >                                                                             |
| 12             | Pemasangan rambu-rambu                                                                                                      | 100             | 0         | 0            | 0     | 30    | 85      | <                                                                             |
| 13             | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraannya                                                                                 | 6,59            | 10,22     | 10,59        | 11.21 | 13.16 | 11,54   | >                                                                             |
| 14             | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                                                                           | 3414            | 3431      | 3161         | 3210  | 2689  | 3300    | <                                                                             |



| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                    | Capaian Kinerja         |                         |                         |        |        | Standar                 | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                          | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019   | 2020   |                         |                                                                               |
| 15              | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun                            | 3329                    | 3354                    | 3016                    | 3325   | 2689   | 3347                    | <                                                                             |
| <b>2.1.2.9</b>  | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                        |                         |                         |                         |        |        |                         |                                                                               |
| 1               | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | na                      | 0,375                   | 0,375                   | 50     | 50     | 0,625                   | >                                                                             |
|                 |                                                                                          | na                      | 38%                     | 38%                     |        |        | 63%                     | na                                                                            |
| 2               | Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jml Tower)                                               | 60                      | 60                      | 61                      | 65     | 65     | 65                      | =                                                                             |
| 3               | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon                                           | 205.546 / 297.893 x 100 | 216.877 / 301.217 x 100 | 228.790 / 305.053 x 100 | 75     | 77     | 239.894 / 311.551 x 100 | <                                                                             |
|                 |                                                                                          | 69%                     | 72%                     | 75%                     |        |        | 77%                     | na                                                                            |
| 4               | Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase)                        | 72916 x 675             | 73536 x 69%             | 74392 x 72%             | 56.2   | 56.2   | 75528 x 78%             | <                                                                             |
|                 |                                                                                          | 48.854                  | 50.740                  | 53.562                  |        |        | 58.912                  | na                                                                            |
| 5               | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                     | 72916 x 18%             | 73537 x 19%             | 74392 x 19%             | 14.23  | 14.23  | 75528 x 19%             | <                                                                             |
|                 |                                                                                          | 13.125                  | 13.972                  | 14.135                  |        |        | 1435036%                | na                                                                            |
| 6               | Jumlah penyiaran radio/TV Lokal                                                          | 1                       | 1                       | 1                       | na     | na     | 1                       | na                                                                            |
| 7               | Website milik Pemerintah Daerah                                                          | 1                       | 1                       | 1                       | 1      | 1      | 1                       | =                                                                             |
| <b>2.1.2.10</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>                                               |                         |                         |                         |        |        |                         |                                                                               |
| 1               | Persentase Koperasi aktif                                                                | 72                      | 73,28                   | 34,35                   | 48     | 53     | 48                      | >                                                                             |
| 2               | Jumlah Koperasi aktif                                                                    | 90                      | 96                      | 45                      | na     | na     | 65                      | >                                                                             |
| 3               | Jumlah Seluruh Koperasi                                                                  | 131                     | 131                     | 131                     | na     | na     | 136                     | >                                                                             |
| 4               | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)                                                              | 3.306                   | 3.316                   | 3.326                   | na     | na     | 3.336                   | >                                                                             |
| 5               | Jumlah BPR/LKM)                                                                          | 10                      | 6                       | 6                       | na     | na     | 6                       | >                                                                             |
| 6               | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil                                                             | 12.482                  | 3.057                   | 3.972                   | 10.585 | 12.206 | 4.072                   | >                                                                             |

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |                 |                 |                |                | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                       | 2016            | 2017            | 2018            | 2019           | 2020           |         |                                                                               |
| 7               | Persentase UKM non BPR/LKM aktif<br>(Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)      | 26              | 108             | 84              | 80             | 80             | 82      | <                                                                             |
| 8               | Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah<br>BPR/LKM)                          | 0,08            | 0,20            | 0,15            | 1,00           | 1,00           | 0,15    | >                                                                             |
| <b>2.1.2.11</b> | <b>Penanaman Modal</b>                                                |                 |                 |                 |                |                |         |                                                                               |
| 1               | Jumlah investor berskala nasional<br>(PMDN/PMA)                       | 8               | 10              | 16              | 7              | 18             | 20      | <                                                                             |
| 2               | Jumlah nilai investasi berskala<br>nasional(PMDN/PMA) (ribu)          | 24.011.000.000  | 110.068.000.000 | 244.208.000.000 | 83.010.000.000 | 65.043.000.000 | 300 M   | <                                                                             |
| 3               | Rasio daya serap tenaga kerja<br>(TK/PMA dn PMDN)                     | 11              | 11              | 10              | 10             | 10             | 11      | <                                                                             |
| 4               | Kenaikan /penurunan Nilai<br>Realisasi PMDN (juta)                    | 12,49%          | 37%             | 55,87%          | 33,20%         | 22,88%         | 25%     | <                                                                             |
| <b>2.1.2.12</b> | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                       |                 |                 |                 |                |                |         |                                                                               |
| 1               | Persentase organisasi pemuda yang<br>aktif (jumlah organisasi pemuda) | 60              | 60              | 0               | 31             | 50             | 60      | <                                                                             |
| 2               | Persentase wirausaha muda                                             | 30              | 0               | 0               | 8              | 3              | 12      | <                                                                             |
| 3               | Cakupan pembinaan olah raga                                           | 22              | 23              | 25              | 8              | 45             | 60      | <                                                                             |
| 4               | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                   | 0               | 0               | 30              | 30             | 15             | 60      | <                                                                             |
| 5               | Cakupan pembinaan atlet muda                                          | 54              | 16              | 28              | 30             | 25             | 80      | <                                                                             |
| 6               | Jumlah atlet berprestasi                                              | 12              | 7               | 7               | 15             | 15             | 15      | =                                                                             |
| 7               | Jumlah prestasi olahraga                                              | 2               | 2               | 3               | 39             | 0              | 10      | <                                                                             |
| 8               | Jumlah organisasi olah raga                                           | 13              | 13              | 13              | na             | na             | 15      | na                                                                            |
| 9               | Jumlah kegiatan kepemudaaan                                           | 4               | 5               | 2               | na             | na             | 10      | na                                                                            |
| 10              | Jumlah kegiatan olah raga                                             | 7               | 3               | 3               | na             | na             | 10      | na                                                                            |
| 11              | Gelanggang/balai remaja (selain<br>milik swasta)                      | 5               | 5               | 18              | na             | na             | 10      | na                                                                            |
| 12              | Lapangan olah raga                                                    | 5               | 18              | 3               | na             | na             | 15      | na                                                                            |
| <b>2.1.2.13</b> | <b>Statistik</b>                                                      |                 |                 |                 |                |                |         |                                                                               |
| 1               | Tersedianya sistem data dan<br>statistik yang terintegrasi            | ADA             | ADA             | ADA             | na             | na             | ADA     | na                                                                            |
| 2               | Buku "kabupaten dalam angka"                                          | ADA             | ADA             | ADA             | na             | na             | ADA     | na                                                                            |

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah     | Capaian Kinerja |            |            |            |            | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                           | 2016            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |         |                                                                               |
| 3               | Buku "PDRB"                                                               | ADA             | ADA        | ADA        | na         | na         | ADA     | na                                                                            |
| <b>2.1.2.14</b> | <b>Persandian</b>                                                         |                 |            |            |            |            |         |                                                                               |
| 1               | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | na              | na         | na         | na         | na         | na      | na                                                                            |
| <b>2.1.2.15</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                   |                 |            |            |            |            |         |                                                                               |
| 1               | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)    | <b>27</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>na</b>  | <b>33</b>  | 59      | <                                                                             |
| 2               | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                                      | <b>60</b>       | <b>36</b>  | <b>12</b>  | <b>60</b>  | <b>27</b>  | 90      | <                                                                             |
| 3               | Jumlah LSM                                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 16      | na                                                                            |
| 4               | LPM Berprestasi                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 16      | na                                                                            |
| 5               | PKK aktif                                                                 | <b>173</b>      | <b>173</b> | <b>173</b> | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 183     | na                                                                            |
| 6               | Posyandu aktif                                                            | <b>443</b>      | <b>452</b> | <b>452</b> | <b>668</b> | <b>452</b> | 698     | <                                                                             |
| 7               | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat               | <b>9</b>        | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 13      | na                                                                            |
| 8               | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat                        | <b>5</b>        | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 13      | na                                                                            |
| 9               | Sarana dan prasarana Perkantoran pemerintah desa yang baik                | 138             | 141        | 141        | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 150     | na                                                                            |
| 10              | Lembaga Adat Desa Aktif                                                   | -               | 31         | 36         | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 84      | na                                                                            |
| <b>2.1.2.16</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                         |                 |            |            |            |            |         |                                                                               |
| 1               | Penyelenggara festival seni dan budaya                                    | 0               | 0          | 0          | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 1       | na                                                                            |
| 2               | Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                   | 0               | 0          | 0          | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 1       | na                                                                            |
| 3               | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                 | 0               | 0          | 0          | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 1       | na                                                                            |
| 4               | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                          | 9 unit          | 0          | 0          | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 9       | na                                                                            |
| 5               | Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya                                    | 0               | 0          | 0          | <b>na</b>  | <b>na</b>  | 1       | na                                                                            |
| <b>2.1.2.17</b> | <b>Perpustakaan</b>                                                       |                 |            |            |            |            |         |                                                                               |
| 1               | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                  | 6996            | 5000       | 3415       | 350        | 400        | 5000    | <                                                                             |
| 2               | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                         | 19936           | 21738      | 21738      | 22738      | 23238      | 23738   | <                                                                             |

| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                        | Capaian Kinerja |        |        |        |        | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                              | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |         |                                                                               |
| 3                | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                                        | 0,16            | 2,07   | 2,08   | 0.12   | 0.13   | 2,11    | >                                                                             |
| 4                | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun                                               | 583             | 415    | 284    | 29.17  | 33.33  | 415     | >                                                                             |
| 5                | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                                       | 6811            | 7313   | 7313   | 7688   | 7813   | 8313    | <                                                                             |
| 6                | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat                       | 0               | 0      | 2      | 7      | 10     | 7       | >                                                                             |
| 7                | Jumlah perpustakaan                                                                          | 48              | 614    | 616    | 616    | 616    | 626     | <                                                                             |
| <b>2.1.2.18</b>  | <b>Kearsipan</b>                                                                             |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| 1                | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) | .26,00          | 27,47  | 29.67  | 30.77  | 10.32  | 31.87   | <                                                                             |
| 2                | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                                          | 12              | 12     | 13     | 17     | 0      | 22      | <                                                                             |
|                  |                                                                                              |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| <b>2.2.</b>      | <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>                                                           |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| <b>2.2.2001.</b> | <b>Perikanan</b>                                                                             |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| 1.1              | Produksi Perikanan                                                                           | 36.058          | 39.112 | 38.739 | 41.464 | 48.411 | 40.789  | >                                                                             |
| 1.2              | - Produksi Perikanan Budidaya ( Ton )                                                        | 8.500           | 8.500  | 15.735 | 15.016 | 19.741 | 7.823   | >                                                                             |
| 1.3              | - Produksi Perikanan Tangkap ( Ton )                                                         | 22.998          | 25.842 | 18.406 | 20.716 | 21.910 | 27.897  | <                                                                             |
| 1.4              | - Produksi Perikanan yang diolah ( Ton )                                                     | 4.560           | 4.670  | 4.592  | 5.732  | 6.760  | 5.069   | >                                                                             |
| 1.5              | Konsumsi Ikan ( Kg / Kap /Thn )                                                              | 33,72           | 34,75  | 38,42  | 44,52  | 44.77  | 42,28   | >                                                                             |
| 1.6              | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ( ADH Berlaqku )                                   | 6,36            | 6,48   | 6,5    | na     | na     | 6,15    | na                                                                            |

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah      | Capaian Kinerja |        |        |        |        | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                            | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |         |                                                                               |
| 1.7             | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ( ADH Konstan )                  | 6,52            | 702    | na     | na     | na     | 6,04    | na                                                                            |
| 1.8             | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                              | 97              | 185    | 97     | 103    | 65     | 37      | >                                                                             |
| 1.9             | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan                                        | 13.739          | 17.448 | 10.559 | 22.680 | 23.560 | 21.550  | >                                                                             |
| 1.10            | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman       | 0               | 0      | 0      | na     | na     | 2.699   | >                                                                             |
| 1.11            | Nilai Tukar Nelayan                                                        | na              | na     | na     | 104    | 105    | 103%    | >                                                                             |
| 1.12            | Persentase Tingkat Pemanfaatan Sarana Pemberdayaan Nelayan                 | 100%            | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | na      | <                                                                             |
| 1.13            | Persentase Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan | 100%            | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | =                                                                             |
| <b>2.2.2002</b> | <b>Pariwisata</b>                                                          |                 |        |        |        |        |         |                                                                               |
| 26.1.           | Kunjungan Wisata                                                           | 97.909          | 87.655 | 44.392 | 22.266 | 19.100 | 23.366  | <                                                                             |
| 26.2.           | Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata                            | 2               | -      | -      | na     | na     | 1       | na                                                                            |
| 26.3            | Jumlah kegiatan promosi pariwisata                                         | 7               | 8      | 3      | na     | na     | 5       | na                                                                            |
| 26.4.           | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara                                       | 94.333          | 84.391 | 43.694 | 43.694 | na     | 22.939  | na                                                                            |
| 26.5.           | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                     | 3.576           | 3.264  | 698    | 698    | na     | 427     | na                                                                            |
| 26.6.           | Jumlah Pemandu Wisatawan                                                   | 32              | 32     | 32     | na     | na     | 16      | na                                                                            |

| No.             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah         | Capaian Kinerja |             |             |             |            | Standar     | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                               | 2016            | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       |             |                                                                               |
| 26.7.           | PAD sector pariwisata (Rp.juta)                                               | 276.027.000     | 248.144.000 | 181.478.000 | 142.435.000 | 60.648.900 | 137.000.000 | <                                                                             |
| 26.8.           | Jumlah gedung dan bangunan yang dibangun pada objek wisata                    | 10              | 10          | 7           | na          | na         | 5           | na                                                                            |
| 26.9.           | Jumlah jalan dan jembatan yang dibangun pada objek wisata                     | 1               | -           | -           | na          | na         | -           | na                                                                            |
| 26.10           | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | -               | -           | -           | na          | na         | -           | na                                                                            |
| 26.11.          | Jumlah media cetak dan audio visual informasi / promosi pariwisata daerah     | 8               | 5           | 2           | na          | na         | 5           | na                                                                            |
| 26.12           | Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan                                      | na              | na          | na          | na          | na         | 3           | na                                                                            |
| 26.13           | Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata                       | na              | na          | na          | na          | na         | 2           | na                                                                            |
| 26.14           | Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan                                | na              | na          | na          | na          | na         | na          | na                                                                            |
| 26.15           | Jumlah potensi baru pariwisata                                                | na              | na          | na          | na          | na         | 1           | na                                                                            |
| <b>2.2.2003</b> | <b>Pertanian</b>                                                              |                 |             |             |             |            |             |                                                                               |
| <b>2.2.3.1</b>  | <b>Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB</b>                                 |                 |             |             |             |            |             |                                                                               |
| 3.1.a           | Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADH-Berlaku)                       | 27,89           | 26,65       | 27,17       | 25,00       | 26,99      | 24,76       | >                                                                             |
| 3.1.b           | Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADH-Konstan)                       | 32,23           | 31,07       | 31,00       | 29,69       | 31,64      | 29,44       | >                                                                             |
| 3.1.c           | Kontribusi sektor Perkebunan Tahunan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)              | 18,57           | 17,55       | 17,59       | 16,01       | 17,71      | 16,26       | >                                                                             |
| 3.1.d           | Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (ADH-Konstan)              | 21,43           | 20,48       | 20,14       | 19,42       | 20,85      | 19,39       | >                                                                             |

| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                | Capaian Kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                      | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                                                                               |
| 3.1.e            | Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)                         | 4,77            | 4,56  | 4,51  | 4,04  | 4,21  | 4,18    | >                                                                             |
| 3.1.f            | Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Konstan)                         | 5,6             | 5,42  | 5,32  | 4,81  | 5,08  | 5,06    | >                                                                             |
| <b>2.2.3.2</b>   | <b>Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ ha)</b> |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 27.5a.           | Padi                                                                                 | 4,80            | 4,60  | 4,68  | 4,73  | 4,67  | 4,84    | <                                                                             |
| 27.5b.           | Jagung                                                                               | 5,74            | 6,39  | 6,22  | 5,96  | 5,88  | 5,15    | >                                                                             |
| 27.5c.           | Kedelai                                                                              | 1,59            | 0,93  | 1,25  | 0,89  | 1,25  | 1,69    | <                                                                             |
| 27.5d.           | Kacang Tanah                                                                         | 1,30            | 0,94  | 1,26  | 0,82  | 0,99  | 1,18    | <                                                                             |
| 27.5e.           | Kacang Hijau                                                                         | -               | -     | 0,00  | 0,45  | 0,58  | 0,86    | <                                                                             |
| 27.5f.           | Ubi Kayu                                                                             | 12,96           | 15,75 | 16,11 | 13,24 | 18,56 | 16,94   | >                                                                             |
| 27.5g.           | Ubi Jalar                                                                            | 17,90           | 16,09 | 16,47 | 15,18 | 13,99 | 10,73   | >                                                                             |
| 27.6             | Cakupan bina kelompok petani                                                         | 25,43           | 32,29 | 42,61 | 52,22 | 59,09 | 25      | >                                                                             |
| <b>2.2.2004.</b> | <b>Peternakan dan Keswan</b>                                                         |                 |       |       |       |       |         |                                                                               |
| 2.4.2001         | Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB (Harga Berlaku)                           | 1,85            | 1,82  | 1,79  | 2,34  | 2,43  | 0,23    | >                                                                             |
| 2.4.2002         | Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB (Harga Konstan)                           | 2,11            | 2,13  | 2,15  | 2,46  | 2,61  | 0,76    | >                                                                             |
| 2.4.2003         | Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi.                                        | 5,15            | 4,7   | 3,02  | -9,06 | 1,96  | 3       | <                                                                             |
| 2.4.2004         | Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Kambing                                      | 4,31            | 4,38  | 9,45  | 8,94  | 8,85  | 3,50    | >                                                                             |
| 2.4.2005         | Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Ayam Buras                                   | 7,29            | 7,18  | 7,41  | 7,18  | 7,18  | 7,50    | <                                                                             |

| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah                   | Capaian Kinerja |         |         |       |      | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                         | 2016            | 2017    | 2018    | 2019  | 2020 |         |                                                                               |
| 2.4.2006         | Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Itik                                            | 11,64           | 0,95    | -42,02  | 8,62  | 0,95 | 13,31   | <                                                                             |
| 2.4.2007         | Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Babi                                            | 2,77            | 2,35    | -12,96  | -4,16 | 5,13 | 4,12    | >                                                                             |
| 2.4.2008         | Terjaminnya Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)               | 0               | 0       | 0,38    | 0,47  | 0,63 | 32      | <                                                                             |
| 2.4.2009         | Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis | 0               | 0       | 0,01    | 0,01  | 0,01 | 0,10    | <                                                                             |
| 2.4.10           | Pembinaan kemitraan dan temu usaha kemitraan                                            | 0               | 0       | 0,63    | 0,25  | 0,25 | 8       | <                                                                             |
| 2.4.11           | Cakupan bina kelompok peternak                                                          | 0               | 7,52    | 7,42    | na    | 1,60 | 9,20    | <                                                                             |
| 2.4.12           | Persentase terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran                               | 0               | 0,75    | 0,75    | 0,75  | 0,75 | 0,25    | >                                                                             |
| <b>2.2.2005.</b> | <b>Kehutanan</b>                                                                        |                 |         |         |       |      |         |                                                                               |
| 28.1.            | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                                     | 30,84           | 65,23   | na      |       |      | 88,23   | na                                                                            |
| 28.2.            | Kerusakan Kawasan Hutan                                                                 | 12,47           | 26,63   | na      |       |      | 12,54   | na                                                                            |
| 28.2.            | Rasio kawasan lindung                                                                   | 0,29            | 0,29    | na      |       |      | 0,29    | na                                                                            |
| <b>2.2.2006.</b> | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>                                                   |                 |         |         |       |      |         |                                                                               |
| 29.1.            | Persentase rumah tangga pengguna listrik                                                | 74,62           | 48,08   | na      |       |      | 53,13   | na                                                                            |
| 29.2.            | Rasio ketersediaan daya listrik                                                         | na              | na      | na      |       |      | na      | na                                                                            |
| 29.3.            | Persentase pertambangan tanpa ijin                                                      | na              | na      | na      |       |      | na      | na                                                                            |
| <b>2.2.2007.</b> | <b>Perdagangan</b>                                                                      |                 |         |         |       |      |         |                                                                               |
| 30.1.            | Ekspor Bersih Perdagangan                                                               | 821.125         | 733.940 | 287.005 | na    | na   | 787.500 | >                                                                             |



| No.              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |       |       |      |      | Standar | Interpretasi 2016 - 2021<br>, Belum Tercapai (<);<br>Sudah (=); Melampaui (>)                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                       | 2016            | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 |         |                                                                                                                                                                           |
| 30.1.            | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                         | 10              | 12    | 8     | 8    | 8    | 10      | <                                                                                                                                                                         |
| <b>2.2.2008.</b> | <b>Perindustrian</b>                                                  |                 |       |       |      |      |         |                                                                                                                                                                           |
| 31.1.            | Cakupan bina kelompok pengrajin                                       | 13              | 14    | 14    | 14   | 14   | 17      | <                                                                                                                                                                         |
| <b>2.2.2009.</b> | <b>Transmigrasi</b>                                                   |                 |       |       |      |      |         |                                                                                                                                                                           |
| 32.1.            | Persentase transmigrasi swakarsa                                      | na              | na    | na    | na   | na   | 26      | Sejak tahun 1980an-2013 pola Transmigrasi diKab. Donggala adalah Transmigrasi Umum (TU)/Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) yg digagas oleh Pemda dgn sumber anggaran APBN |
| 32.2.            | Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB                                 | na              | na    | na    | na   | na   | na      | na                                                                                                                                                                        |
| 32.3.            | Jumlah Lokasi permukiman transmigrasi baru (PTB) yang dibuka          | 1 UPT           | na    | na    | na   | na   | na      | na                                                                                                                                                                        |
| 32.4.            | Jumlah dokumen perencanaan satuan permukiman (RTSP)                   | 1 Dok           | na    | na    | na   | na   | 1 Dok   | na                                                                                                                                                                        |
| 32.5.            | Jumlah KK yang ditempatkan di wilayah Transmigrasi                    | 15%             | na    | na    | na   | na   | na      | na                                                                                                                                                                        |
| 32.6.            | Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil                      | 23,26           | 30,23 | 30,23 | na   | na   | 51,94   | na                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                       | 120             | 156   | 156   | na   | na   | 294     | na                                                                                                                                                                        |
| 32.7.            | Jumlah KK transmigran yang di bina                                    | 516             | 516   | 516   | 516  | na   | 50 kk   | na                                                                                                                                                                        |

na = Data Belum Tersedia

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Seiring dengan upaya peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai perubahan terhadap regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan regulasi ini diantaranya ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, akibat dari pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020 dan berbagai permasalahan yang ditimbulkan pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial, serta adanya perubahan kebijakan dan/atau kebijakan baru Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* maka menyebabkan tidak tercapainya

beberapa target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Oleh karena itu, seiring dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, bab ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kinerja keuangan Kabupaten Donggala pada Tahun 2019-2021 serta seberapa besar kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya, khususnya pada tahun 2022-2024.

### **3.1. Analisis Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan Kabupaten Donggala pada tahun 2016-2020, dilakukan analisis terhadap perkembangan pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 2016-2020 dan pencapaian realisasinya terhadap target yang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pelaksanaan APBD merupakan salah satu tahapan pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan tentang sistem dan prosedur pelaksanaan APBD, khususnya sejauhmana realisasi atas anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran sebelumnya. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi,

dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasperbantukan kepada Daerah. Pendapatan daerah dapat digolongkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun potensi sumber pendapatan daerah lainnya yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perbedaan utama antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada imbal jasanya. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari aset pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan atau badan usaha, baik badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun badan usaha milik swasta atau kelompok usaha

masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan (deviden) dari perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun masih termasuk dalam kategori PAD.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.

Awalnya, pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Namun, seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan maka saat ini dirubah menjadi *money follow program* yang merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup: (i) hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; (ii). Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD; (iii). Dana

penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; (iv). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; dan (v). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Wajib terdiri atas Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkait langsung dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pilihan merupakan urusan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan pendanaan Urusan yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan urusan pilihan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Selain itu, dalam rangka penentuan rencana kerja dan anggaran Belanja Daerah juga harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Donggala tahun 2016 – 2020 dan selisih dari target yang telah ditetapkan sebelumnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Donggala**

| No           | Uraian                                              | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|              |                                                     | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        |                              |
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                   | <b>1.266.899.313.486,24</b> | <b>1.136.703.943.698,65</b> | <b>1.164.902.560.903,20</b> | <b>1.885.423.205.858,00</b> | <b>1.266.838.755.206,00</b> | <b>(16,89)</b>               |
| <b>1,1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                       | <b>70.883.672.512,24</b>    | <b>113.840.490.862,65</b>   | <b>60.135.251.908,54</b>    | <b>82.731.306.991,00</b>    | <b>106.028.267.180,00</b>   | <b>(19,96)</b>               |
| 1.1.1        | Pajak Daerah                                        | 24.271.459.455,14           | 28.670.668.156,86           | 28.324.967.662,87           | 38.303.635.792,00           | 32.851.723.681,00           | <b>(19,76)</b>               |
| 1.1.2        | Retribusi Daerah                                    | 36.809.150.000,00           | 2.226.087.660,00            | 1.850.178.850,00            | 2.491.846.558,00            | 2.339.593.085,00            | <b>(20,57)</b>               |
| 1.1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 3.353.913.533,96            | 2.645.844.479,00            | 2.305.234.581,00            | 2.288.690.163,00            | 2.137.140.009,00            | <b>(10,33)</b>               |
| 1.1.4        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah           | 39.441.513.933,14           | 80.297.890.566,79           | 27.654.870.814,67           | 39.647.134.478,00           | 68.699.810.405,00           | <b>38,67</b>                 |
| <b>1,2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                          | <b>1.124.287.347.318,00</b> | <b>1.012.949.401.156,00</b> | <b>1.051.256.171.273,00</b> | <b>1.236.343.474.763,00</b> | <b>1.084.476.938.026,00</b> | <b>(0,20)</b>                |
| <b>1.2.1</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b> | <b>1.008.832.124.005,00</b> | <b>853.072.586.876,00</b>   | <b>899.815.215.433,00</b>   | <b>1.066.838.810.041,00</b> | <b>908.769.801.937,00</b>   | <b>(1,55)</b>                |

|              |                                                          |                           |                           |                           |                           |                           |               |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.2.1.<br>1  | Dana Bagi Hasil                                          | 12.957.637.578,00         | 25.274.647.654,00         | 31.433.848.326,00         | 26.155.838.123,00         | 12.282.640.780,00         | <b>12,40</b>  |
| 1.2.1.<br>2  | Dana Alokasi Umum                                        | 663.388.901.000,00        | 652.945.096.000,00        | 659.731.826.000,00        | 699.139.595.000,00        | 624.939.920.000,00        | <b>(1,29)</b> |
| 1.2.1.<br>3  | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                | 321.632.204.497,00        | 174.852.843.222,00        | 208.649.541.107,00        | 341.543.376.918,00        | 271.547.241.157,00        | <b>4,22</b>   |
| <b>1.2.2</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>               | <b>102.662.743.600,00</b> | <b>131.717.943.784,00</b> | <b>123.460.807.000,00</b> | <b>141.388.871.600,00</b> | <b>141.919.150.400,00</b> | <b>9,23</b>   |
| 1.2.2.<br>1  | Dana Penyesuaian                                         | 102.662.743.600,00        | 131.717.943.784,00        | 123.460.807.000,00        | 141.388.871.600,00        | 141.919.150.400,00        | <b>9,23</b>   |
| <b>1.2.3</b> | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>     | <b>11.738.855.871,00</b>  | <b>27.373.870.496,00</b>  | <b>27.686.148.840,00</b>  | <b>27.875.793.122,00</b>  | <b>29.568.885.689,00</b>  | <b>35,27</b>  |
| 1.2.3.<br>1  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                              | 11.738.855.871,00         | 27.373.870.496,00         | 27.686.148.840,00         | 27.875.793.122,00         | 29.568.885.689,00         | <b>35,27</b>  |
| <b>1.2.4</b> | <b>Bantuan Keuangan</b>                                  | <b>1.053.623.842,00</b>   | <b>785.000.000,00</b>     | <b>294.000.000,00</b>     | <b>240.000.000,00</b>     | <b>4.219.100.000,00</b>   | <b>387,89</b> |
| 1.2.4.<br>1  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 1.053.623.842,00          | 785.000.000,00            | 294.000.000,00            | 240.000.000,00            | 4.219.100.000,00          | <b>387,89</b> |



|            |                                             |                             |                           |                           |                             |                             |                 |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>1,3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b> | <b>71.728.293.656,00</b>    | <b>9.914.051.680,00</b>   | <b>53.511.137.721,66</b>  | <b>566.348.424.104,00</b>   | <b>76.333.550.000,00</b>    | <b>306,36</b>   |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                            | 64.815.208.150,00           | 9.914.051.680,00          | 48.317.390.363,00         | 560.573.050.000,00          | 76.333.550.000,00           | <b>319,12</b>   |
| 1.3.2      | Pendapatan Lainnya                          | 6.913.085.506,00            | -                         | 5.193.747.358,66          | 5.775.374.104,00            | -                           | <b>(47,20)</b>  |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>                              | <b>1.110.268.927.279,84</b> | <b>958.067.342.681,90</b> | <b>970.149.487.982,29</b> | <b>1.097.257.230.754,00</b> | <b>1.541.785.588.601,00</b> | <b>10,29</b>    |
| <b>2,1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                      | <b>751.224.604.476,85</b>   | <b>789.066.971.140,90</b> | <b>816.118.830.222,29</b> | <b>852.018.913.992,00</b>   | <b>1.293.891.311.096,00</b> | <b>16,18</b>    |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                             | 457.722.414.270,00          | 430.988.669.386,00        | 476.777.858.205,00        | 485.452.804.686,00          | 479.400.379.082,00          | <b>1,34</b>     |
| 2.1.2      | Belanja Barang dan Jasa                     | 287.784.465.206,85          | 330.867.717.904,90        | 298.617.711.467,29        | 356.879.729.306,00          | 327.796.382.014,00          | <b>4,15</b>     |
| 2.1.3      | Belanja Hibah                               | 5.267.625.000,00            | 26.650.432.000,00         | 37.873.544.750,00         | 4.110.000.000,00            | 1.250.000.000,00            | <b>72,33</b>    |
| 2.1.4      | Belanja Bantuan Sosial                      | 450.100.000,00              | 560.151.850,00            | 2.849.715.800,00          | 5.576.380.000,00            | 485.444.550.000,00          | <b>2.283,56</b> |
| <b>2,2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                        | <b>359.020.547.802,99</b>   | <b>166.658.700.441,00</b> | <b>147.478.090.188,00</b> | <b>245.238.316.762,00</b>   | <b>222.544.216.885,00</b>   | <b>(2,01)</b>   |
| 2.2.1      | Belanja Tanah                               | 1.615.751.500,00            | 170.000.000,00            | 555.794.300,00            | 1.304.009.000,00            | 799.793.000,00              | <b>58,35</b>    |

|            |                                         |                           |                           |                           |                           |                           |                 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2.2.2      | Belanja Peralatan dan Mesin             | 63.844.379.765,99         | 37.079.448.062,00         | 20.498.055.571,00         | 40.699.568.092,00         | 65.048.444.566,00         | <b>17,93</b>    |
| 2.2.3      | Belanja Bangunan dan Gedung             | 83.123.223.264,00         | 38.328.030.229,00         | 38.983.773.738,00         | 92.830.345.485,00         | 53.356.087.323,00         | <b>10,86</b>    |
| 2.2.4      | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan     | 207.298.499.300,00        | 90.655.122.150,00         | 87.290.296.579,00         | 110.178.234.185,00        | 101.825.955.416,00        | <b>(10,34)</b>  |
| 2.2.5      | Belanja Aset Tetap Lainnya              | 3.138.693.973,00          | 426.100.000,00            | 150.170.000,00            | 226.160.000,00            | 1.513.936.580,00          | <b>117,21</b>   |
| <b>2,3</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>              | <b>23.775.000,00</b>      | <b>2.341.671.100,00</b>   | <b>6.552.567.572,00</b>   | <b>-</b>                  | <b>25.350.060.620,00</b>  | <b>2.457,28</b> |
| 2.3.1      | Belanja Tak Terduga                     | 23.775.000,00             | 2.341.671.100,00          | 6.552.567.572,00          | -                         | 25.350.060.620,00         | <b>2.457,28</b> |
| <b>3</b>   | <b>TRANSFER</b>                         | <b>170.092.081.207,00</b> | <b>194.593.925.151,00</b> | <b>190.990.196.824,00</b> | <b>220.416.975.341,00</b> | <b>211.955.232.020,00</b> | <b>6,03</b>     |
| <b>3,1</b> | <b>TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH</b> | <b>3.082.224.793,00</b>   | <b>622.606.773,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>2.966.914.059,00</b>   | <b>2.723.008.656,00</b>   | <b>(47,01)</b>  |
| 3.1.1      | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah        | 3.082.224.793,00          | 622.606.773,00            | -                         | 2.966.914.059,00          | 2.723.008.656,00          | <b>(47,01)</b>  |
| <b>3,2</b> | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>        | <b>167.009.856.414,00</b> | <b>193.971.318.378,00</b> | <b>190.990.196.824,00</b> | <b>217.450.061.282,00</b> | <b>209.232.223.364,00</b> | <b>6,17</b>     |

|            |                                                                      |                            |                            |                         |                           |                             |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 3.2.1      | Transfer Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya/Desa | 166.237.282.260,00         | 193.112.610.120,00         | 190.505.970.638,00      | 216.935.643.510,00        | 208.355.904.800,00          | <b>6,18</b>     |
| 3.2.2      | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                    | 772.574.154,00             | 858.708.258,00             | 484.226.186,00          | 514.417.772,00            | 876.318.564,00              | <b>11,03</b>    |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                           | <b>(13.461.695.000,60)</b> | <b>- 15.957.324.134,25</b> | <b>3.762.876.096,91</b> | <b>567.748.999.763,00</b> | <b>- 486.902.065.415,00</b> | <b>3.674,34</b> |
| <b>4</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                    | <b>91.972.765.541,71</b>   | <b>20.147.255.541,11</b>   | <b>4.189.931.406,00</b> | <b>3.564.936.443,00</b>   | <b>571.313.936.206,00</b>   | <b>3.938,43</b> |
| <b>4,1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                         | <b>91.972.765.541,71</b>   | <b>24.347.255.541,11</b>   | <b>4.189.931.406,00</b> | <b>7.564.936.443,00</b>   | <b>571.313.936.206,00</b>   | <b>1.844,09</b> |
| 4.1.1      | Penggunaan SiLPA                                                     | 91.972.765.541,71          | 24.347.255.541,11          | 4.189.931.406,00        | 7.564.936.443,00          | 571.313.936.206,00          | <b>1.844,09</b> |
| <b>4,2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                        | <b>54.163.815.000,00</b>   | <b>4.200.000.000,00</b>    | <b>-</b>                | <b>4.000.000.000,00</b>   | <b>-</b>                    | <b>(73,06)</b>  |
| 4.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                       | 54.163.815.000,00          | 4.200.000.000,00           | <b>-</b>                | 4.000.000.000,00          | <b>-</b>                    | <b>(73,06)</b>  |

|       |                                                       |                          |                         |                         |                           |                          |                 |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri                | -                        | -                       | -                       | -                         | -                        | -               |
|       | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b> | <b>24.347.255.541,11</b> | <b>4.189.931.406,86</b> | <b>7.952.807.502,91</b> | <b>571.313.936.206,00</b> | <b>84.411.870.791,00</b> | <b>1.751,40</b> |

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Donggala, mencapai Rp.126.689.931.348.624,00, lebih besar dari pada yang diproyeksikan pada RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu sebesar 958.114.990.638,37, pada tahun 2017, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 1.136.703.943.698,65, lebih besar dari pada yang diproyeksikan pada RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu sebesar 1.006.020.740.170,29, pada tahun 2018, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Donggala, mencapai Rp.1.164.902.560.903,20, lebih besar dari pada yang diproyeksikan pada RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu sebesar Rp.1.006.020.740.000,00. pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Donggala, mencapai Rp.1.885.423.205.858,00, lebih besar dari pada yang diproyeksikan pada RPJMD Tahun 2019-2024, yaitu sebesar Rp. 1.206.149.647.000 . Namun demikian, setelah terjadi Pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020, realisasi pendapatan Kabupaten Donggala pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.1.266.838.755.206,00, sehingga terdapat selisih dengan proyeksi pendapatan sebelumnya sebesar Rp.-60.689.108.206,00.

Akibat dari kondisi penurunan pendapatan daerah Kabupaten Donggala pada tahun 2020 dan adanya *refocusing* program dan kegiatan yang dikonsentrasikan untuk penanganan penyebaran pandemi *Covid-19* serta mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan maka beberapa program dan kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Neraca daerah sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, memberikan informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah tentang

fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) dan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Donggala tahun 2019-2020 maka disajikan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Donggala pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Per 31 Desember 2019 s/d Per 31 Desember 2020**  
**Kabupaten Donggala**

| <b>No</b>   | <b>Uraian</b>                | <b>Rata-rata Pertumbuhan (%)</b> |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ASET</b>                  | <b>-9,44</b>                     |
| <b>1.1.</b> | <b>ASET LANCAR</b>           | <b>-77,40</b>                    |
| 1.1.1.      | Kas di Kas Daerah            | <b>-87,55</b>                    |
| 1.1.2.      | Kas di Bendahara Penerimaan  | <b>0,00</b>                      |
| 1.1.3.      | Kas di Bendahara Pengeluaran | <b>8,53</b>                      |
| 1.1.4.      | Kas di BLUD                  | <b>-77,12</b>                    |
| 1.1.5.      | Kas di Bendahara FKTP        | <b>0,00</b>                      |
| 1.1.6.      | Kas di Bendahara BOS         | <b>0,00</b>                      |
| 1.1.7.      | Kas Lainnya di Bendahara     | <b>-92,08</b>                    |
| 1.1.8.      | Piutang Pendapatan           | <b>21,81</b>                     |
| 1.1.9.      | Piutang Lainnya              | <b>0,00</b>                      |
| 1.1.10.     | Penyisihan Piutang           | <b>8,23</b>                      |

|             |                                 |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 1.1.11.     | Beban Dibayar Dimuka            | -50,01       |
| 1.1.12.     | Persediaan                      | 14,75        |
| <b>1.2.</b> | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b> | <b>-1,20</b> |
| 1.2.1.      | Investasi Non Permanen          | 0,00         |
| 1.2.2.      | Investasi Permanen              | -1,20        |
| <b>1.3.</b> | <b>ASET TETAP</b>               | <b>6,04</b>  |
| 1.3.1.      | Tanah                           | 0,00         |
| 1.3.2.      | Peralatan dan Mesin             | 15,80        |
| 1.3.3.      | Gedung dan Bangunan             | 7,27         |
| 1.3.4.      | Jalan, Irigasi, dan Jaringan    | 8,48         |
| 1.3.5.      | Aset Tetap Lainnya              | 5,87         |
| 1.3.6.      | Konstruksi Dalam Pengerjaan     | -37,04       |
| 1.3.7.      | Akumulasi Penyusutan            | 11,29        |
| <b>1.4.</b> | <b>DANA CADANGAN</b>            | <b>0,00</b>  |
| 1.4.1.      | Dana Cadangan                   | 0,00         |
| <b>1.5.</b> | <b>ASET LAINNYA</b>             | <b>73,77</b> |
| 1.5.1.      | Tagihan Jangka Panjang          | -0,23        |
| 1.5.2.      | Kemitraan dengan Pihak Ketiga   | 0,00         |
| 1.5.3.      | Aset Tidak Berwujud             | -34,29       |

|             |                                          |               |
|-------------|------------------------------------------|---------------|
| 1.5.4.      | Aset Lain-lain                           | <b>74,31</b>  |
|             | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b> | <b>-9,44</b>  |
| <b>2</b>    | <b>KEWAJIBAN</b>                         | <b>34,12</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           | <b>34,12</b>  |
| 2.1.1.      | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | <b>-87,77</b> |
| 2.1.2.      | Pendapatan Diterima Dimuka               | <b>0,00</b>   |
| 2.1.3.      | Utang Beban                              | <b>37,87</b>  |
| 2.1.4.      | Utang Jangka Pendek Lainnya              | <b>-28,41</b> |
| <b>2.2.</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>3.1.</b> | <b>EKUITAS</b>                           | <b>-9,67</b>  |
| 3.1.1.      | Ekuitas                                  | <b>-9,67</b>  |

*Ket : Tahun 2021\* ( Neraca Tahun 2021 Triwulan IV belum diterbitkan)*

Berdasarkan pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa posisi Aset Daerah Kabupaten Donggala tahun 2020 sebesar -9,44, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar -77,40, Investasi Jangka Panjang sebesar -1,2, Aset Tetap sebesar 6,04, Dana Cadangan sebesar 0, dan Aset lainnya sebesar 73,77, posisi Jumlah Kewajiban sebesar 34,12, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar 34,12 dan Kewajiban jangka Panjang sebesar 0, sedangkan posisi Ekuitas sebesar -9,67. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pandemi *Covid-19* tidak hanya mengakibatkan penurunan pada Pendapatan Kabupaten Donggala, namun lebih daripada itu, juga telah menyebabkan penurunan pada nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.



Selain itu, salah satu metode untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan, termasuk untuk menilai sejauhmana efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah maka beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- **Kemandirian keuangan** adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri
- **Fleksibilitas keuangan** adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).
- **Solvabilitas operasional** merupakan kemampuan keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode penganggaran.
- **Solvabilitas keuangan jangka pendek** menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
- **Solvabilitas keuangan jangka panjang** menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban keuangannya jangka panjang atau lebih dari 12 bulan.
- **Solvabilitas layanan** menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Adapun hasil analisis terhadap kondisi keuangan Kabupaten Donggala selama tahun 2019 – 2021 disajikan pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Analisis Kondisi Keuangan Daerah**  
**Tahun 2019 s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Donggala**

| No. | Uraian                               | 2019         | 2020         | 2021* |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1   | Kemandirian Keuangan                 | 0,04         | 0,08         | 0,03  |
| 2   | Fleksibilitas Keuangan               | 3,09         | 2,00         | N/A   |
| 3   | Solvabilitas Operasional             | 1,37         | 0,64         | N/A   |
| 4   | Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek  | 42,00        | 4,63         | N/A   |
| 5   | Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang | 0,00         | 0,00         | N/A   |
| 6   | Solvabilitas Layanan (Rp)            | 5.761.616,05 | 6.184.321,85 | N/A   |

Ket : Tahun 2021\* (Data Realisasi Triwulan IV)

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Donggala pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,08 dari tahun 2019 yang hanya sebesar 0,04. Hal ini mengakibatkan ketersediaan sumber daya keuangan untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat juga mengalami peningkatan menjadi Rp.6.184.321,85 per penduduk pada tahun 2020 dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp.5.761.616,05 per penduduk.

Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan rasio fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional. Pada tahun 2020,

ketersediaan sumber daya keuangan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas utang menurun menjadi 2,00 dari 3,09 pada tahun 2019. yang mana pada akhirnya mengurangi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Donggala dalam membayar utang jangka pendek pada tahun 2020 menjadi 4,63 dari sebelumnya sebesar 42,00 pada tahun 2019. Selain itu, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Donggala dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional juga mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,64 dari sebelumnya sebesar 1,37 pada tahun 2019.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

#### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Pada realisasi belanja daerah, terdapat kelompok belanja yang khusus diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur (eksekutif dan legislatif), baik untuk membiayai pembayaran gaji tunjangan, tambahan penghasilan, insentif, honorarium, lembur, pendidikan, kursus, biaya operasional kantor maupun untuk pembelian fasilitas kerja aparatur. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Donggala maka dilakukan perbandingan antara proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah (akumulasi dari total belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pengeluaran) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Tahun 2018 s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Donggala**  
**(Dalam ribuan rupiah)**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>        | <b>Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)</b> | <b>Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)</b> | <b>(%)</b> |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | Tahun Anggaran 2018  | 476.777.858.205                                        | 970.149.487.982.29                                               | 49.14      |
| 2         | Tahun Anggaran 2019  | 485.452.804.686                                        | 1.321.674.206.095                                                | 36.73      |
| 3         | Tahun Anggaran 2020* | 479.400.379.082                                        | 2.325.054.756.827.29                                             | 20.62      |

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa walaupun total pengeluaran daerah mengalami peningkatan dari tahun 2019, namun demikian, pada tahun 2020 total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 20.62 persen dari sebelumnya sebesar 36,73 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Donggala telah mampu melakukan peningkatan efisiensi belanja daerah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah diantaranya bersumber dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diantaranya dapat digunakan untuk: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah.

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan seefektif mungkin surplus anggaran, sehingga untuk menentukan nilai defisit riil dilakukan dengan cara mengurangi pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun gambaran tentang defisit riil anggaran Kabupaten Donggala tahun 2019 – 2021 disajikan pada tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Analisis Defisit Riil Anggaran**  
**Tahun 2019 s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Donggala**  
**(Dalam ribuan rupiah)**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                       | <b>2019<br/>(Rp)</b>    | <b>2020<br/>(Rp)</b>      | <b>2021*<br/>(Rp)</b>       |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1         | Realisasi<br>Pendapatan<br>Daerah   | 1.164.902.560.903,20    | 1.885.423.205.858,13      | 1.266.838.755.205,49        |
|           | Dikurangi<br>realisasi:             |                         |                           |                             |
| 2         | Belanja +<br>Transfer<br>Daerah     | 1.161.139.684.806,29    | 1.317.674.206.095,00      | 1.753.740.820.620,95        |
| 3         | Pengeluaran<br>Pembiayaan<br>Daerah | 0                       | 4.000.000.000,00          |                             |
|           | <b>Defisit riil</b>                 | <b>3.762.876.096,91</b> | <b>563.748.999.763,13</b> | <b>- 486.902.065.415,46</b> |

*Ket : Tahun 2021\* (Data Realisasi Triwulan IV)*

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Donggala mengalami fluktuatif selama tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2019 menunjukkan defisit riil yang positif, pada tahun 2020 defisit riil menunjukkan angka yang negatif, sedangkan pada tahun 2021 defisit Riil Anggaran Menunjukkan angka yang positif. Untuk menutup defisit riil anggaran yang negatif tersebut digunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Adapun Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Donggala disajikan pada tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Tahun 2019 s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Uraian                                                            | Proporsi Dari Total Defisit Riil |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                                                   | 2019<br>(%)                      | 2020<br>(%) | 2021<br>(%) |
| 1  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 1,11%                            | 0.01%       | -1.17%      |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                                           | -                                | -           | -           |
| 3  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                   | -                                | -           | -           |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | -                                | -           | -           |
| 5  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | -                                | -           | -           |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah                                         | -                                | -           | -           |

*Ket : Tahun 2021\* (Data Realisasi Triwulan IV)*

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Donggala, khususnya pada tahun 2019 memiliki nilai yang positif, sehingga menambah nilai SiLPA tahun berkenaan. Pada tahun 2020, defisit riil anggaran Kabupaten Donggala memiliki nilai yang negatif, namun karena nilai SiLPA tahun 2019 sebelumnya lebih besar maka defisit riil tersebut dapat tertutupi seluruhnya dengan menggunakan

SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 memiliki nilai yang positif, sehingga menambah nilai SiLPA tahun berkenaan

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa SiLPA bersumber dari: (i). Pelampauan penerimaan PAD; (ii). Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; (iii). Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; (iv). Pelampauan penerimaan Pembiayaan; (v). penghematan belanja; (vi). kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau (vii). sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Adapun gambaran sumber SiLPA Kabupaten Donggala selama tahun 2018 – 2020 disajikan pada tabel 3.7 berikut.



**Tabel 3.7**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Tahun 2018 s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Uraian                                                                      | 2018               |              | 2019               |              | 2020               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|    |                                                                             | (%)                |              | (%)                |              | (%)                |              |
|    | Jumlah SiLPA                                                                | (Rp)               | % dari SiLPA | (Rp)               | % dari SiLPA | (Rp)               | % dari SiLPA |
| 1  | Pelampauan Penerimaan PAD                                                   | 4.189.931.406,00   | 100          | 7.952.807.502,91   | 100          | 571.313.936.206,34 | 100          |
| 2  | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer                                   | -28.045.479.670,00 | -6,69        | -13.258.676.801,46 | -1,67        | 23.477.536,13      | 0,000041     |
| 3  | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                  | -44.942.564.257,00 | -10,73       | -15.675.969.727,00 | -1,97        | -9.386.132.315,00  | -0,016429    |
| 4  | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya                                | -509.229.700,00    | -0,12        | 1.250.937.721,66   | 0,16         | 513.730.469.320,00 | 0,899209     |
| 5  | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan | 77.687.205.033,00  | 18,54        | 35.636.516.309,71  | 4,48         | 66.946.121.665,21  | 0,117179     |
| 6  | Kegiatan Lanjutan                                                           | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            |

Ket : Tahun 2021\* (Data Realisasi Triwulan IV)

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa timbulnya SiLPA tahun berkenaan Kabupaten Donggala selama tahun 2018 – 2020. Khususnya pada tahun 2018 dan 2019, perolehan SiLPA lebih diakibatkan karena adanya pelampauan PAD, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan besarnya sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Sementara itu, untuk tahun 2020, perolehan SiLPA lebih diakibatkan karena adanya sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja tidak langsung.

Untuk mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026 di Kabupaten Donggala diperlukan perhitungan terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Seiring dengan ditetapkannya Pandemi *Covid-19* sebagai bencana non alam nasional pada tahun 2020 maka arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan tema “*Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle Income Trap*”, dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Reformasi Pendapatan**

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

## 2. Recovery dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*);
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan *health security preparedness*;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
- d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
- e. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Oleh karena itu, penyusunan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Donggala untuk tahun 2021-2026 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, termasuk visi, misi, tujuan dan program strategis daerah;
- d. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun gambaran proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Donggala**

| REK | URAIAN                                            | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) | 2021<br>(Rp.)        | 2022<br>(Rp.)        | 2023<br>(Rp)         | 2024<br>(Rp)         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                            | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | (1.03)                       | 1.436.628.986.000,00 | 1.579.810.923.000,00 | 1.294.770.117.554,00 | 1.359.508.623.431,00 |
|     | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | 1.23                         | 87.091.055.000,00    | 101.421.323.000,00   | 83.411.276.152,00    | 87.581.839.959,00    |
|     | Pajak Daerah                                      | 10.66                        | 37.092.536.000,00    | 43.572.948.000,00    | 47.719.325.883,00    | 50.105.292.177,00    |
|     | Retribusi Daerah                                  | (13.48)                      | 9.517.856.000,00     | 10.796.978.000,00    | 4.438.926.429,00     | 4.660.872.750,00     |
|     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | (6.94)                       | 3.359.554.000,00     | 3.694.290.000,00     | 2.372.027.218,00     | 2.490.628.579,00     |
|     | Lain-Lain PAD yang Sah                            | (3.86)                       | 37.121.109.000,00    | 43.357.107.000,00    | 28.880.996.622,00    | 30.325.046.453,00    |

|  |                                              |               |                             |                             |                             |                             |
|--|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                   | <b>(1.17)</b> | <b>1.349.537.931.000,00</b> | <b>1.478.389.600.000,00</b> | <b>1.211.358.841.402,00</b> | <b>1.271.926.783.472,00</b> |
|  | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | (0.49)        | 1.131.507.938.000,00        | 1.220.322.583.000,00        | 1.045.437.295.726,00        | 1.097.709.160.513,00        |
|  | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya          | (0.88)        | 168.052.692.000,00          | 204.061.013.000,00          | 144.777.545.676,00          | 152.016.422.959,00          |
|  | Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya         | (6.46)        | 29.977.301.000,00           | 34.006.004.000,00           | 21.144.000.000,00           | 22.201.200.000,00           |
|  | Bantuan Keuangan                             | -             | 20.000.000.000,00           | 20.000.000.000,00           | -                           | -                           |
|  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>  | -             | <b>0,00</b>                 | -                           | -                           | -                           |
|  | Pendapatan Hibah                             | -             | 0,00                        | -                           | -                           | -                           |
|  | Pendapatan Lainnya                           | -             | 0,00                        | -                           | -                           | -                           |
|  | <b>BELANJA DAERAH</b>                        | <b>(1.11)</b> | <b>1.436.628.986.000,00</b> | <b>1.579.810.923.000,00</b> | <b>1.290.541.317.553,00</b> | <b>1.355.068.383.430,00</b> |
|  | <b>BELANJA OPERASI</b>                       | <b>3.39</b>   | <b>867.963.114.393,00</b>   | <b>954.468.844.942,00</b>   | <b>908.690.482.677,00</b>   | <b>954.125.006.811,00</b>   |

|  |                              |                |                           |                           |                           |                           |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Belanja Pegawai              | 6.02           | 476.636.008.950,00        | 524.140.039.337,00        | 540.309.118.872,00        | 567.324.574.815,00        |
|  | Belanja Barang dan Jasa      | (0.52)         | 326.206.106.059,00        | 358.717.507.808,00        | 299.415.358.187,00        | 314.386.126.096,00        |
|  | Belanja Hibah                | 4.15           | 55.918.246.043,00         | 61.491.350.064,00         | 59.935.411.430,00         | 62.932.182.002,00         |
|  | Belanja Bantuan Sosial       | 1.40           | 9.202.753.341,00          | 10.119.947.733,00         | 9.030.594.188,00          | 9.482.123.898,00          |
|  | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>(13.42)</b> | <b>317.853.109.951,00</b> | <b>349.532.008.545,00</b> | <b>156.460.338.720,00</b> | <b>164.283.355.656,00</b> |
|  | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>6.90</b>    | <b>5.818.577.339,00</b>   | <b>6.398.487.102,00</b>   | <b>6.764.480.564,00</b>   | <b>7.102.704.592,00</b>   |
|  | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>(1.29)</b>  | <b>244.994.184.317,00</b> | <b>269.411.582.411,00</b> | <b>218.626.015.592,00</b> | <b>229.557.316.371,00</b> |
|  | <b>Surplus/Defisit</b>       | <b>1.67</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4.228.800.001,00</b>   | <b>4.440.240.001,00</b>   |
|  | <b>PEMBIAYAAN</b>            |                |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> |                |                           | -                         | -                         | -                         |

|  |                                                                       |             |             |   |                           |                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|
|  | Sisa Lebih<br>Perhitungan<br>Anggaran Tahun<br>Sebelumnya             | -           | 0,00        | - | -                         | -                         |
|  | <b>PENGELUARAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                                     | <b>1.67</b> | <b>0,00</b> | - | <b>4.228.800.001,00</b>   | <b>4.440.240.001,00</b>   |
|  | Penyertaan<br>Modal Daerah                                            | 1.67        | 0,00        | - | 4.228.800.001,00          | 4.440.240.001,00          |
|  | <b>Pembiayaan<br/>Netto</b>                                           | <b>1.67</b> | <b>0,00</b> | - | - <b>4.228.800.001,00</b> | - <b>4.440.240.001,00</b> |
|  | <b>Sisa Lebih<br/>Pembiayaan<br/>Anggaran<br/>Tahun<br/>Berkenaan</b> | -           | -           | - | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

*Ket. : Tahun 2021 Merupakan tahun dasar.*

Tabel 3.8 menunjukkan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 – 2024, berdasarkan atas asumsi bahwa tiga terakhir angka pertumbuhan bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh kejadian diluar dugaan yaitu terjadinya bencana. Pada tahun 2018 di kabupaten Donggala mengalami Gempa Bumi, Tsunami dan likuifaksi, sehingga tahun 2019 pendapatan (penerimaan hibah) meningkat lebih kurang sebesar 500 milyar dari proyeksi anggaran dalam RPJMD. Hibah dari pemerintah tersebut digunakan untuk penanganan dan pemulihan dampak bencana.

Berdasarkan perbandingan realisasi APBD 2 (dua) tahun terakhir (2020 – 2021) dan APBD tahun 2022 yang sementara berjalan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Tahun 2020 realisasi pendapatan menurun jauh dibandingkan tahun 2019, karena terjadi bencana wabah penyakit virus Corona – 19 atau *Corona Virus Desiase* (Covid-19). Berdasarkan proyeksi dalam RPJMD dari Rp 1.312.932,068,00 terealisasi Rp 1.266.838.755.206,00 berkurang sebesar Rp 46.093.312.794,00 atau turun sebesar 3,51 %.
2. Tahun 2021 berkurang sebesar Rp 376.657.626.727 dari proyeksi dalam RPJMD sebesar Rp 1.436.628.986.000,00 atau turun sebesar 26,22 %.
3. Tahun 2022 sesuai kesepakatan dengan DPRD yang dituangkan dalam KUA-PPAS, anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.185.263.818.735,00 atau kurang sebesar Rp 394.547.104.265,00 atau turun 24,97 % dari proyeksi dalam RPJMD sebesar Rp 1.579.810.923.000,00.

Berdasarkan realiasi APBD tahun 2020 – 2021 dan anggaran dalam KUA- PPAS tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa anggaran dalam APBD Kabupaten Donggala setiap tahun mengalami penurunan berkisar pada rentang 3,51 % sampai dengan 24,97 %. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka proyeksi anggaran untuk tahun 2023



diturunkan sebesar Rp 450.472.294.444 dari proyeksi RPJMD sebelum perubahan sebesar Rp 1.745.242.412.000,00 sehingga proyeksi anggaran dalam RPJMD setelah perubahan menjadi Rp 1.294.770.117.556,36. Berdasarkan hasil tersebut, proyeksi anggaran dalam perubahan RPJMD dinaikan sebesar 5,72 % dari realisasi anggaran tahun 2021. Angka 5,72 berdasarkan asumsi target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,72 %.

Proyeksi anggaran tahun 2024 dilakukan dan dinaikan sebesar 5 % dari tahun 2023 menjadi Rp 1.359.508.623.433,80 atau naik sebesar Rp 64.738.505.878 dari anggaran tahun 2023. Proyeksi anggaran tahun 2024 sebesar 5 % didasarkan pada perhitungan dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala tahun 2024.

### **3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tabel 3.8 diatas, maka dilakukan proyeksi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Donggala tahun 2021-2024. Dalam menghitung kapasitas riil, proyeksi pendapatan daerah dikurangkan dengan belanja penunjang urusan Pemerintah, termasuk untuk gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala tahun 2021-2024.

Selain belanja tidak langsung, untuk mendapatkan nilai kapasitas riil, juga dikurangkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga dana kapasitas riil dapat menggambarkan dana riil yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Donggala selama tahun 2021-2024. Adapun gambaran proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Donggala yang diproyeksikan pada tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Uraian                                       | Proyeksi          |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                              | 2021(Rp)          | 2022 (Rp)         | 2023 (Rp)         | 2024 (Rp)         |
| 1  | Pendapatan                                   | 1,436,628,986,000 | 1,579,810,923,000 | 1,294,770,117,554 | 1,359,508,623,431 |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)       | -                 | -                 | -                 |                   |
| 3  | Sisa Lebih Riil<br>Perhitungan Anggaran      | 84,411,870,791    | -                 | -                 |                   |
|    | <b>Total Penerimaan</b>                      | 1,521,040,856,791 | 1,579,810,923,000 | 1,294,770,117,554 | 1,359,508,623,431 |
|    | <b>Dikurangi</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| 4  | Belanja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 547,575,585,673   | 602,149,824,236   | 616,039,605,054   | 646,841,585,307   |
| 5  | Pengeluaran Pembiayaan                       | 2,000,000,000     | -                 | 4,228,800,001     | 4,440,240,001     |
|    | <b>Kapasitas Riil<br/>Kemampuan Keuangan</b> | 971,465,271,118   | 977,661,098,764   | 674,501,712,499   | 708,226,798,123   |

*Ket. = Tahun 2021\* merupakan tahun dasar.*

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah di Kabupaten Donggala tahun 2021-2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari sebesar Rp. 1.436.628.986.000 pada tahun 2021, kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 143.181.937.000 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun sebesar Rp. -285.040.805.446, serta meningkat sebesar Rp. 64.738.505.877 di tahun 2024, atau turun bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Donggala yang diproyeksikan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengalokasikan dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah, yang mana prioritas tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu prioritas I dan II.

Prioritas I merupakan program dan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah. Begitupula dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. Prioritas II merupakan program dan kegiatan inovasi

daerah serta unggulan SKPD sebagai bagian dari perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah.

Adapun gambaran rencana pendanaan prioritas I dan II di Kabupaten Donggala tahun 2021-2024 digambarkan pada tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Uraian                            | Proyeksi        |                 |                 |                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                   | 2021*<br>(Rp)   | 2022<br>(Rp)    | 2023<br>(Rp)    | 2024<br>(Rp)    |
| 1  | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 971,465,271,118 | 977,661,098,764 | 674,501,712,499 | 708,226,798,123 |
|    |                                   | -               | -               | -               |                 |
| 2  | Prioritas I                       | 544,952,915,776 | 548,428,525,707 | 413,239,093,131 | 433,066,489,941 |
| 3  | Prioritas II                      | 426,512,355,342 | 429,232,573,057 | 261,262,619,368 | 275,160,308,182 |

*Ket. = Tahun 2021\* merupakan tahun dasar.*

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

##### **4.1.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **1) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Donggala**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala:

**Tabel 4.1.**  
**Permasalahan Pokok Daerah Kabupaten Donggala**

| MASALAH POKOK                                 | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kemiskinan</b>                             | Jumlah Penduduk Miskin menurun dari 58,83 ribu jiwa pada Tahun 2019 menjadi 53,17 ribu jiwa di Tahun 2020. Angka Kemiskinan di atas angka kemiskinan Sulteng dan nasional berturut-turut 18,40 persen pada Tahun 2019 menurun menjadi 17,39 persen pada 2020; Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 2,86 poin pada 2019 menjadi 3,01 poin pada 2020; Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,76 di Tahun 2019 menjadi 0,79 pada Tahun 2020. | Persentase penduduk miskin masih tinggi di atas persentase Sulawesi Tengah dan Nasional. Penyebabnya adalah Terbatasnya sarana prasarana pendukung untuk penanggulangan kemiskinan, Rendahnya sinergitas antara semua pihak yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan, Masih minimnya infrastruktur publik. |
| <b>Ketahanan Pangan</b>                       | Permintaan beras meningkat seiring peningkatan penduduk; alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan dan penggalian, permukiman dan niaga; degradasi hutan pada DAS Hulu; rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru; ancaman gizi buruk di wilayah terpencil dan pegunungan                                                                                                                                                     | Ketersediaan energi dan protein perkapita stabil 3,42 perkapita/hari Tahun 2020 lebih rendah dari target P-RPJMD sebesar 3,60 perkapita/hari di Tahun 2020;                                                                                                                                                          |
| <b>Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</b> | UHH lebih rendah dari nasional 66,85 tahun pada 2019 menjadi 67,33 tahun pada 2020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Span of Control &amp; Span of management</i> Puskesmas sangat luas; dokter dan nakes                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | sedangkan Sulteng 67,23 tahun menjadi 68,69 tahun ; nasional 71,34 tahun dan 71,47 tahun; Kasus Balita Gizi Kurang masih meningkat dari 2.998 kasus atau 15,0 persen pada Tahun 2019 menjadi 2.672 kasus atau 016,7 persen pada Tahun 2020 ; Angka stunting masih tinggi dari angka nasional dan Sulteng sebesar 34,90 persen Tahun 2019 menjadi 27,15 persen Tahun 2020; Rasio dokter meningkat dari 0,113 di Tahun 2019 menjadi 0,117 di Tahun 2020, artinya belum mencapai rasio ideal 0,26 menurut Kemenkes, di samping penyebarannya dokter belum merata; Linakes belum mencapai rasio ideal 88 persen; Cakupan pelayanan ibu nifas menurun dari 83,50 persen Tahun 2019 menjadi 80 persen Tahun 2020; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun dari 99,3 persen Tahun 2019 menjadi 31,5 persen Tahun 2020; Cakupan pelayanan anak balita menurun dari 80,1 persen Tahun 2019 menjadi 45,3 persen Tahun 2020; wilayah kerja Puskesmas | terkonsentrasi di perkotaan |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | masih sangat luas, termasuk desa-desa terpencil;                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pendidikan Inklusif</b>                          | Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada Tahun 2019-2020 mencapai 7,86 tahun dan 7,88 tahun berada di bawah target masing-masing 7,86 tahun dan 7,89 tahun. Angka tersebut berada juga di bawah RLS Sulteng yang meningkat dari 8,75 di Tahun 2019 menjadi 8,83 tahun pada 2020. | Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar belum optimal                                                                                                                                                            |
| <b>Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan</b> | Masyarakat masih melakukan doing gender                                                                                                                                                                                                                                         | Realisasi Persentase perempuan di lembaga pemerintah berada di bawah target yakni hanya 1,26 persen pada Tahun 2020 dari target 9,13 persen; Proporsi perempuan di DPRD hanya mencapai 1,26 persen dari target 9 persen; |
| <b>Air bersih dan sanitasi</b>                      | Volume air belum mencukupi<br>Kebutuhan penduduk, masih banyak masyarakat menggunakan air tanah<br>Akses layanan air minum belum merata ke seluruh Kecamatan serta Kualitas air belum maksimal, IPAL diharapkan berdampingan dengan TPA tapi lahan                              | Daya dukung fungsi lindung belum mencukupi<br>Alih fungsi lahan hutan terus terjadi                                                                                                                                      |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | belum tersedia dan Sistem pembuangan IPLT belum optimal.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| <b>Energi;</b>                                           | Ketidakcukupan sumber energi listrik                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daya terpasang sumber energi listrik 46.723.000 KW di Tahun 2019 menurun menjadi 12.500.000 KW di Tahun 2020. |
| <b>Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja</b>          | Pertumbuhan ekonomi menurun dari 4,37 persen di Tahun 2019 menjadi - 4,87 persen di Tahun 2020; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun dari 65,69 persen di Tahun 2019 menjadi 63,93 persen di Tahun 2020 dan berada pada posisi terendah menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. | Non inklusivitas pertumbuhan ekonomi                                                                          |
| <b>Pembangunan Infrastruktur;</b>                        | Proporsi Panjang Jalan per dalam kondisi baik konstan sebesar 0,45 di Tahun 2019-2020, namun masih berada di bawah target Tahun 2020 sebesar 0,47 poin; Rasio Panjang jalan per penduduk konstan 0,0036 pada 2019-2020;                                                                                        | Jalan dalam kondisi rusak meningkat dari 219,25 km di Tahun 2019 menjadi 281,21 km di Tahun 2020.             |
| <b>Kesenjangan Intra dan Antar Daerah, Antar Negara;</b> | Adanya ketimpangan antar kecamatan berbasis kepemilikan SDA dan geografis khususnya Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | Akses infrastruktur, air bersih dan energi belum tersedia memadai.                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Rio Pakava,<br>Pinembani, Sojol<br>Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| <b>Permukiman;</b> | Rasio Permukiman layak huni stabil dari Tahun 2019-2020 sebesar 0,13 poin; cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkat dari 66,25 persen di Tahun 2019 menjadi 66,50 persen di Tahun 2020; Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau meningkat dari 46,98 persen di Tahun 2019 menjadi 50 persen di Tahun 2020; Persentase lingkungan pemukiman kumuh stabil pada angka 0,01 persen. | Penataan Permukiman baik di pesisir maupun di perkotaan belum dilakukan secara terpadu lintas urusan. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pola Produksi dan Konsumsi;</b> | Perubahan struktural di sektor pertanian ditandai dengan menurunnya nilai produksi sektor pertanian terhadap PDRB dari 3.231.584,91 juta rupiah di Tahun 2019 menjadi 3.228.677,93 juta rupiah Tahun 2020; Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat selama periode 2019-2020, tetapi lahan pertanian makin berkurang karena degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan; | Ketergantungan pada monokultur beras masih tinggi tanpa adanya diversifikasi pangan, yang diikuti oleh luas lahan pertanian semakin berkurang.                  |
| <b>Perubahan Iklim;</b>            | Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut; Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosistem laut; Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca      | Adanya aktivitas masyarakat yang minim bersahabat dengan lingkungan dan kegiatan manusia yang tidak berorientasi pada harmoni antara manusia dan lingkungannya. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | akibat berkurangnya daerah tangkapan air; Menurunnya tutupan terumbu karang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| <b>Sumberdaya Kelautan;</b> | <p>Potensi perikanan laut dan budidaya belum dioptimalkan untuk 3.990 ton di Tahun 2020, tetapi di bawah target periode 2019-2020; Produksi perikanan budidaya meningkat 7.670 ton, namun lebih rendah dari target dalam RPJMD 2019-2020; Produksi Perikanan Tangkap meningkat sedikit dari 25.332 ton menjadi 25.886 ton, tetapi realisasi di tahun 2017 berada di bawah target RPJMD Tahun 2013-2018; Produksi perikanan kelompok nelayan menurun menjadi 20.360 ton Tahun 2020 tetapi capaian ini berada di bawah target RPJMD yakni di atas 20 ton; Konsumsi ikan meningkat dari 36,3 kg/tahun Tahun 2020 sama dengan target. Capaian Kabupaten; kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB baik ADHB dan ADHK tidak mencapai target</p> | Adanya kerusakan ekosistem bakau dan terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan sebagai konsekuensi penangkapan dan budidaya secara instan. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>RPJMD; teknologi penangkapan dan budidaya masih sangat sederhana; belum tercapainya ketersediaan induk dan benih ikan unggul; Jumlah Pokdakan budidaya dan KUBE Perikanan yang dibina masih rendah; Penyediaan Prasarana dan Sarana di TPI belum mencukupi; Nilai Tukar Nelayan masih berada di bawah 100; Penegakan hukum masih rendah terhadap oknum pemanfaat ekosistem dan sumberdaya perairan laut; Kurangnya akses nelayan dan pembudidaya pada modal dan perbankan; Tingginya kerusakan ekosistem bakau dan terumbu karang; Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurun karena beralih ke mata pencaharian nelayan pembudidaya.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati;</b></p>           | <p>Adanya Patahan Palu-Koro; Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut; Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosistem laut; Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai;</p> | <p>Fasilitasi dan edukasi pembangunan berkelanjutan belum dilakukan secara terpadu.</p>                          |
| <p><b>Kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan</b></p> | <p>Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Donggala; Tindakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Masalah Kamtibmas; Konflik batas antar desa; konflik lahan garap antara masyarakat dan area pertambangan.</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>yang efektif,<br/>akuntabel, dan<br/>inklusif;</b></p> | <p>pengeboman ikan,<br/>pembiusan masih<br/>menjadi masalah;<br/>Narkoba dan<br/>Kejahatan siber<br/>patut<br/>diantisipasi;<br/>Penyelesaian<br/>sengketa tanah<br/>garapan lintas desa<br/>dalam 1 (satu)<br/>wilayah Kecamatan<br/>belum optimal;<br/>Tumpang tindih<br/>antar penggunaan<br/>lahan terutama<br/>antara lahan pertanian<br/>masyarakat dengan<br/>penggunaan untuk<br/>pertambangan;<br/>Penyelesaian masalah<br/>ganti kerugian dan<br/>santunan tanah<br/>untuk pembangunan<br/>oleh Pemerintah<br/>Daerah kabupaten<br/>belum optimal;<br/>Penetapan subyek<br/>dan obyek<br/>redistribusi tanah,<br/>serta ganti kerugian<br/>tanah kelebihan<br/>maksimum dan<br/>tanah absentee lintas<br/>desa dalam 1 (satu)<br/>daerah kabupaten<br/>belum optimal;<br/>Penyelesaian<br/>Inventarisasi dan<br/>pemanfaatan tanah<br/>kosong lintas desa</p> |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal.                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <b>Penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</b> | Belum adanya kerjasama terpadu antar daerah baik antar kabupaten/kota dalam provinsi maupun antar kabupaten/kota bertetangga pada provinsi lain se kawasan seperti se kawasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. | Inisiasi Forum Kerjasama belum dilakukan dalam payung regulasi PP Nomor 28 Tahun 2018 |

**Sumber : Data diolah dari Hasil Telaah 16 kecamatan dalam angka, RKPD Tahun 2021, Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2021**

1. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2019-2020 mengalami kecenderungan penurunan dengan terendah pada Tahun 2020 mencapai -4,87 persen lebih rendah dari capaian Tahun 2019 mencapai 4,37 persen;
2. Realisasi IPM Tahun 2020 hanya mencapai 65,56 poin di bawah IPM Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 69,55 poin;
3. Masih tingginya angka kemiskinan: persentase Tahun 2020 sebesar 17,39 persen, sedangkan target dalam RPJMD Tahun 2019-2020 diproyeksikan mencapai 16,35 persen. Angka kemiskinan ini menjadi yang terbanyak pertama jumlah masyarakat miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,86 poin pada 2019 menjadi 3,01 poin pada 2020; Begitupula, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,76 poin menjadi 0,79 poin pada periode yang sama; Di Tahun 2020

penduduk miskin Kabupaten Donggala mencapai 53,17 ribu jiwa.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 65,49 poin di Tahun 2019 menjadi 65,56 poin di Tahun 2020 yang bermakna bahwa IPM Kabupaten Donggala berada di peringkat ke 10 di Sulteng;
5. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Donggala hanya meningkat dari 66,85 tahun pada 2019 menjadi 67,33 tahun pada 2020 lebih rendah dari UHH Provinsi Sulteng dan Nasional masing-masing 68,23 tahun dan 68,69 tahun dan 71,34 tahun dan 71,47 tahun;
6. Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 7,86 tahun pada 2019 menjadi 7,88 tahun pada 2020, tetapi masih berada di bawah RLS Sulteng yakni 8,83 tahun pada 2020;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif cukup rendah, yakni pada Tahun 2019 sebesar 2,76 persen (target 3,12 persen), menurun pada Tahun 2020 menjadi 2,56 persen (target 3,11 persen); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun dari 65,69 persen pada Tahun 2019 menjadi 63,93 persen pada Tahun 2020;

## **2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

#### **4.1.1.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib Yang Berkaitan Layanan Dasar**

##### **a Urusan Pendidikan**

Sesuai tabel Lampiran Bab II, Urusan pendidikan Tahun 2019-2020 meliputi sebagai berikut :

1. Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs meningkat dari 93,69 persen pada Tahun 2019 menjadi 93,90 persen pada Tahun 2020. Namun, capaian ini berada di bawah target Tahun 2019-2020 sebesar 98,2 persen;
2. Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menurun dari 93,48 persen pada 2019 menjadi 93,90 persen pada Tahun 2020. Realisasi ini berada di bawah target 95,83-96,79 persen. Selanjutnya, APM SMA/MA/SMK/Paket C meningkat dari 59,38 persen pada Tahun 2019 menjadi 60,45 pada Tahun 2020 namun masih berada di bawah target 59,93-61,72 persen.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK/Paket C berada di atas target yang terealisasi dari 68,18 persen pada Tahun 2019 menjadi 68,85 persen pada Tahun 2019. Sementara APS Tahun 2020 sebesar 68,85 berada di bawah target sebesar 69,85 persen;
4. Angka Putus Sekolah SD/MI menurun dari 0,06 persen tahun 2019 menjadi 0,05 persen tahun 2020 tetapi berada di atas target 0,03-0,02. Begitupula Angka Putus Sekolah SMP/MTs menurun dari 0,32 persen tahun 2019 menjadi 0,21 persen tahun 2020 tetapi berada di atas target 0,34-0,20. Angka ini menunjukkan bahwa semakin besar Angka Putus Sekolah, maka semakin tidak baik indikator tersebut atau menunjukkan kinerja yang kurang baik.
5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

pendidikan dasar stabil dengan rasio sebesar 1:90 Tahun 2019-2020 lebih rendah dari target sebesar 1:98 dan 1:96 tahun 2019-2020.

6. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Rendahnya jumlah generasi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi/PT (utamanya kaum perempuan), Beasiswa ke SMA/SMK dan ke perguruan tinggi sangat terbatas, Kawin muda menjadi penghalang bagi perempuan.
7. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar sebesar 1:17 Tahun 2020 lebih rendah dari target sebesar 1:26 tahun 2020.

#### **b. Urusan Kesehatan**

Permasalahan Urusan Kesehatan yang muncul selama periode 2019- 2020 meliputi sebagai berikut:

1. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menurun dari 4,26 persen Tahun 2019 menjadi 2,64 persen Tahun 2020. Namun masih di atas angka yang ditargetkan sebesar 0,76-0,60. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi AKN, maka semakin rendah derajat kesehatan balita di Kabupaten Donggala.
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 289,51 persen Tahun 2019 menjadi 181,31 persen Tahun 2020. Namun masih di atas angka yang ditargetkan sebesar 149,54-146,61 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi AKI, maka semakin rendah derajat kesehatan ibu di Kabupaten Donggala.
3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 85,5 persen Tahun 2019-2020 tidak mencapai angka yang ditargetkan sebesar 88,13-89,38 persen.

4. Cakupan pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 84,3 persen pada Tahun 2019-2020. Namun, berada di bawah target yakni 87,56-90,19 persen;
5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani menurun dari 89,55 persen pada Tahun 2013 menjadi 76,57 persen pada Tahun 2018. Realisasi ini berada di bawah target periode tersebut yakni 90,50-93 persen;
6. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) meningkat dari 68,90 persen pada Tahun 2019 menjadi 69 persen pada Tahun 2020. Namun angka ini berada di bawah target pada tahun tersebut dengan interval 74-77 persen;
7. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan sebesar 40,4 persen Tahun 2019-2020 lebih rendah dari target sebesar 100 persen.
8. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 18,57 persen Tahun 2019-2020 lebih rendah dari target sebesar 21,55 persen tahun 2020.
9. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) sebesar 78,79 persen Tahun 2019-2020 melampaui target sebesar 75,97 persen Tahun 2020. Semakin tinggi tingkat prevalensi Tuberkulosis, maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat.
10. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) sebesar 3,89 persen Tahun 2019-2020 melampaui target sebesar 3,62 persen Tahun 2020. Semakin tinggi tingkat pkematian karena Tuberkulosis, maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat.
11. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS sebesar 2,77 persen Tahun 2019-2020 tidak mencapai target sebesar 2,81 persen Tahun 2020.

12. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 18,35 persen Tahun 2019-2020 tidak mencapai target sebesar 2,86 persen Tahun 2020.
13. Penderita diare yang ditangani sebesar 56,87 persen Tahun 2019-2020 tidak mencapai target sebesar 73,04-72,51 persen Tahun 2019-2020.
14. Angka kejadian Malaria meningkat dari 0,1 persen Tahun 2019 menjadi 43,85 persen Tahun 2020 melampaui target sebesar 0,91 persen Tahun 2020. Semakin tinggi angka kejadian malaria, maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat.
15. Cakupan puskesmas meningkat dari 90 persen Tahun 2019 menjadi 93,27 persen Tahun 2020. Namun, masih di bawah target sebesar 93,36 persen Tahun 2020.
16. Cakupan Puskesmas Pembantu meningkat dari 24,54 persen Tahun 2019 menjadi 43,20 persen Tahun 2020. Namun, masih di bawah target sebesar 43,21 persen Tahun 2020.
17. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun dari 99,3 persen Tahun 2019 menjadi 31,15 persen Tahun 2020. Cakupan ini berada di bawah target sebesar 91,84-94,11 persen Tahun 2019-2020.
18. Cakupan Pelayanan Anak Balita dari 80,01 persen pada Tahun 2019 menurun menjadi 45,3 persen pada Tahun 2020. Angka ini berada di bawah target periode tersebut yakni pada interval 72,91 persen sampai dengan 73,52 persen;

**c. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi sebagai berikut:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tidak mengalami peningkatan dengan proporsi 0,45 persen Tahun 2019-2020. Capaian ini berada di bawah target

- sebesar 0,45-0,47 persen Tahun 2019-2020;
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tidak mengalami peningkatan dan stabil pada rasio 0,0036 poin pada Tahun 2019-2020 dan lebih rendah dari rasio yang ditargetkan sebesar 0,0037 Tahun 2020;
  3. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) tidak mengalami peningkatan dan stabil pada angka 44,73 persen pada Tahun 2019-2020 dan lebih rendah dari persentase yang ditargetkan sebesar 45,88 persen Tahun 2020;
  4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) tidak mengalami peningkatan dan stabil pada angka 44,65 persen pada Tahun 2019-2020 dan lebih rendah dari persentase yang ditargetkan sebesar 45,59 persen Tahun 2020;
  5. Persentase rumah tinggal bersanitasi tidak mengalami peningkatan dan stabil pada angka 54,44 persen pada Tahun 2019-2020 dan lebih rendah dari persentase yang ditargetkan sebesar 55,72 persen Tahun 2020;
  6. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat tidak mengalami peningkatan dan stabil pada angka 14,57 persen pada Tahun 2019-2020 dan lebih rendah dari persentase yang ditargetkan sebesar 19,78 persen Tahun 2020;
  7. Rasio jaringan irigasi tidak mengalami penurunan dari 0,39 Tahun 2019 menjadi 0,37 Tahun 2020 dan lebih rendah dari rasio yang ditargetkan sebesar 0,46 Tahun 2020;
  8. Rasio penduduk berakses air minum mengalami penurunan dari 81,28 Tahun 2019 menjadi 76 Tahun 2020 dan lebih rendah dari rasio yang ditargetkan

sebesar 83,69 Tahun 2020;

9. Persentase areal kawasan kumuh sebesar 1,57 persen Tahun 2020 lebih tinggi dari target sebesar 1,55 persen Tahun 2020. Semakin tinggi persentase areal kawasan kumuh, maka semakin rendah kualitas lingkungan tersebut;
10. Rasio tempat pemakaman umum sebesar 40,39 Tahun 2020. Capaian ini berada di bawah target sebesar 42,94 Tahun 2020;
11. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk sebesar 2,57 Tahun 2020. Capaian ini berada di bawah target sebesar 2,90 Tahun 2020;
12. Ketaatan terhadap RTRW sebesar 76 persen Tahun 2020. Capaian ini berada di bawah target sebesar 77 persen Tahun 2020

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mencakup permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni mengalami peningkatan dari 66,25 persen di Tahun 2019 menjadi 66,50 persen di Tahun 2020. Angka ini berada di bawah rata-rata target sebesar 67,57 persen Tahun 2020;
2. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU sebesar 12 persen Tahun 2020, namun berada di bawah target sebesar 13,31 persen Tahun 2020;

**e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencakup permasalahan pembangunan sebagai berikut :



1. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum optimal dan tidak ada peningkatan antara realisasi dan target dengan besarn 84,44 Tahun 2019.

**f. Urusan Sosial**

Permasalahan Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Donggala selama periode 2019-2020 mencakup sebagai berikut:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tidak menunjukkan peningkatan dengan persentase stabil sebesar 10,01 persen Tahun 2019-2020 namun lebih rendah dari target sebesar 20,61-22,35 persen Tahun 2019-2020;
2. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 5 persen Tahun 2020 dan jauh lebih kecil dari angka yang ditargetkan sebesar 40 persen Tahun 2020.
3. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya sebesar 64,32 persen Tahun 2020 namun tidak mencapai angka yang ditargetkan sebesar 100 persen tahun 2020.
4. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial sebesar 8 persen tahun 2020 dan lebih rendah dari target sebesar 18 persen tahun 2020.
5. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 5 persen Tahun 2020 jauh dari target sebesar 20 persen Tahun 2020.
6. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 31 persen Tahun 2020 dan tidak mencapai target sebesar 50 persen tahun 2020.

7. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 10 persen Tahun 2020 dan tidak mencapai target sebesar 25 persen tahun 2020.

#### **4.1.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Layanan Dasar**

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan wajib yang tidak berkaitan layanan dasar meliputi berbagai urusan sebagai berikut:

##### **a. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam urusan tenaga kerja meliputi :

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) meningkat dari angka 25 Tahun 2019 menjadi 100 Tahun 2020. Namun angka ini lebih tinggi dari target sebesar 96 persen Tahun 2020.
2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menurun dari 144 persen Tahun 2019 menjadi 35,59 persen Tahun 2020. Sementara jumlah yang ditargetkan sebesar 100 persen Tahun 2019 dan 80 persen Tahun 2020.
3. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menurun dari 80 persen di Tahun 2019 menjadi 75,29 persen di Tahun 2020, lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 18 persen Tahun 2020.

##### **b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya mencapai 1,26 persen di Tahun 2019-2020

berada di bawah target 8-9 persen periode 2019-2020;

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Donggala hanya menurun dari 13 persen Tahun 2019 menjadi 1,26 persen tahun 2020 jauh di bawah target 9 persen;
3. Persentase perempuan di lembaga swasta tidak mengalami peningkatan hanya sekitar 0,39 persen Tahun 2019-2020 jauh dari target sebesar 7,62 persen.
4. Rasio KDRT sebesar 0,34 tahun 2020 melampaui target sebesar 0,24. Semakin tinggi rasio KDRT, maka semakin tinggi pula kekerasan terhadap perempuan.
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 50 persen tahun 2019-2020 sementara angka yang ditargetkan sebesar 60 persen.
6. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD sebesar 87 persen tahun 2019-2020 tidak mencapai target sebesar 97,80 persen.
7. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 50 persen tahun 2019-2020 tidak mencapai target sebesar 56,37 persen.

**c. Urusan Pangan**

Ketersediaan energi dan protein perkapita mengalami penurunan pada angka 4.457 Tahun 2019 dan 4.434 pada Tahun 2020, sementara target sebesar 3.600 Tahun 2020.

**d. Urusan Pertanahan**

Permasalahan pembangunan urusan pertanahan meliputi sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten belum optimal;
2. Lahan yang memiliki sertifikat masih kurang (45

persen);

3. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala belum optimal;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal;
6. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
7. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas desa dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan belum optimal.

**e. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan urusan lingkungan hidup meliputi permasalahan berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat yang mencemari air;
2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca;
4. Meningkatnya timbunan sampah yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai;
5. Belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Donggala sehingga RPPLH belum dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Donggala;

6. Realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam urusan lingkungan hidup masyarakat hanya mencapai sekali jauh di bawah target yakni empat kali;
7. Adanya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, lokasi usaha dan dampaknya di Kabupaten Donggala.

**f. Urusan Penduduk dan Catatan Sipil**

Permasalahan Pembangunan urusan penduduk dan catatan sipil meliputi :

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran terutama penduduk Kabupaten Donggala di wilayah terpencil di Kecamatan Rio Pakava, Pinembani, Sojol Utara karena minimnya alat pencetakan dan petugas teknis.

**g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan Pembangunan urusan Pemberdayaan masyarakat Desa meliputi :

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar 33 kelompok Tahun 2020 jauh dari angka yang ditargetkan sebesar 150 kelompok.
2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menurun dari 60 kelompok Tahun 2019 menjadi 27 kelompok tahun 2020, lebih rendah dari angka yang ditargetkan 90 kelompok Tahun 2020.
3. Persentase Posyandu aktif menurun dari 668 Tahun 2019 menjadi 452 Tahun 2020 dan tidak mencapai target sebesar 698 Tahun 2020.

#### **h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

1. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah dalam kampung KB tidak mengalami peningkatan atau sekitar 10 persen tahun 2019-2020, namun berada di bawah target sebesar 12 persen Tahun 2020.
2. Rasio Akseptor KB menurun dari 67 persen Tahun 2019 menjadi 65,7 persen tahun 2020. Menurun dari target sebesar 67 persen Tahun 2020.
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menurun dari 65.241 Tahun 2019 menjadi 10.520 Tahun 2020. Tidak mencapai target sebesar 65.101 Tahun 2020.
4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB menurun dari 1.524 Tahun 2019 menjadi 1.440 Tahun 2020. Berada di bawah target sebesar 1.552 Tahun 2020.
5. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB menurun dari 1.502 Tahun 2019 menjadi 476 Tahun 2020. Berada di bawah target sebesar 1.552 Tahun 2020.
6. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan menurun dari 20 Tahun 2019 menjadi 3 Tahun 2020. Berada di bawah target sebesar 20 Tahun 2020.
7. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan tidak mengalami peningkatan atau stabil pada capaian 18 persen Tahun 2019-2020.

Sementara capaian yang ditargetkan sebesar 25-30 persen Tahun 2019-2020.

8. Cakupan penyediaan informasi Data Mikro keluarga di setiap desa masih berkisar 84 persen Tahun 2019-2020, sementara target sebesar 170.
9. Capaian keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak meningkat dari 50 KK tahun 2019 menjadi 2.112 KK Tahun 2020. Namun capaian ini masih di bawah target 2.589 Tahun 2020.
10. Rata-Rata usia kawin pertama meningkat dari usia 18 tahun meningkat menjadi 19 tahun pada Tahun 2019-2020. Angka usia kawin yang ditargetkan sebesar 20-21 tahun. Kondisi ini menunjukkan tingginya penduduk yang menikah di usia muda di bawah usia 20 tahun.

**i. Urusan Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan sebagai berikut:

1. Persentase layanan angkutan darat menurun dari 18,23 persen Tahun 2019 menjadi 16,6 persen Tahun 2020. Sementara angka yang ditargetkan 20,57 persen Tahun 2020.
2. Persentase pemasangan rambu-rambu menurun menjadi 30 persen tahun 2020 jauh dari target sebesar 50 persen Tahun 2020.

**j. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pembangunan dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sebagai berikut:

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan tidak mengalami peningkatan dan konstan pada angka 50 persen tahun 2019-2020 jauh dibawah target 63 persen Tahun 2020.
2. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon stabil pada

angka 75 persen tahun 2019-2020 atau tidak menunjukkan peningkatan, sementara target 77 persen Tahun 2020.

3. Proporsi RT dengan akses internet berada pada capaian 56,2 persen Tahun 2019-2020 sementara target sebesar 58,91 persen Tahun 2020.
4. Proporsi RT yang memiliki komputer pribadi sebesar 14,23 persen selama Tahun 2019-2020 berada dibawah target sebesar 14,35 persen.

**k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan pembangunan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi sebagai berikut:

- Persentase Koperasi Aktif meningkat dari 48 persen di Tahun 2019 menjadi 53 persen di Tahun 2020. Capaian ini berada diatas angka yang ditargetkan sebesar 37 persen Tahun 2020.
- Jumlah usaha mikro dan kecil meningkat dari 10.585 unit di Tahun 2019 menjadi 12.206 unit di Tahun 2020. Angka capaian ini berada diatas target sebesar 4.010 Tahun 2020.

**l. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Penanaman Modal meliputi sebagai berikut:

1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami penurunan dari Rp.83.010.000.000 Tahun 2019 menjadi Rp.65.043.000.000 Tahun 2020. Angka ini dibawah angka yang ditargetkan yaitu 300 Milyar pada Tahun 2020.

**m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sebagai berikut:

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif meningkat dari 31 persen Tahun 2019 menjadi 50 persen tahun 2020, namun masih dibawah target 60 persen Tahun 2019-2020.



2. Persentase wirausaha muda menurun dari 8 persen tahun 2019 menjadi 3 persen tahun 2020. Jumlah yang ditargetkan mencapai 10-12 persen Tahun 2019-2020.
3. Cakupan pembinaan olahraga meningkat dari 8 persen Tahun 2019 menjadi 45 persen tahun 2020, namun masih dibawah target 60 persen Tahun 2019-2020.
4. Cakupan pelatih bersertifikat menurun dari 30 persen Tahun 2019 menjadi 15 persen tahun 2020, berada dibawah target 60 persen Tahun 2019-2020.
5. Cakupan pembinaan atlet muda menurun dari 30 persen Tahun 2019 menjadi 25 persen tahun 2020, berada dibawah target 80 persen Tahun 2019-2020.
6. Jumlah prestasi olahraga menurun 12 Tahun 2019 menjadi 0 Tahun 2020. Capain ini jauh dari angka yang ditargetkan sebesar 10 selama Tahun 2019-2020.

#### **n. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan Pembangunan Urusan Perpustakaan meliputi sebagai berikut:

1. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun meningkat dari 350 orang Tahun 2019 menjadi 400 orang Tahun 2020, namun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 4.000-5.000 orang Tahun 2019-2020.
2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat dari 22.738 buku Tahun 2019 menjadi 23.238 buku Tahun 2020, namun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 23.738 buku Tahun 2020.
3. Rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,12 Tahun 2019 menjadi 0,13 Tahun 2020, namun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 2,11 Tahun 2020.

4. Jumlah koleksi judul buku meningkat dari 7.688 buku Tahun 2019 menjadi 7.813 buku Tahun 2020, namun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 8.313 buku Tahun 2020.
5. Jumlah perpustakaan tidak mengalami peningkatan selama Tahun 2019-2020 atau sebesar 616 perpustakaan, namun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 626 perpustakaan Tahun 2020.

**o. Urusan Kearsipan**

Permasalahan Pembangunan Urusan Kearsipan meliputi sebagai berikut:

1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku menurun dari 30,77 persen Tahun 2019 menjadi 10,32 persen tahun 2020. Capaian tersebut jauh dari target sebesar 31,87 persen Tahun 2020.
2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan dengan capaian 17 orang tahun 2019 sementara target sebesar 22 orang.

**4.1.1.3. Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Donggala berkaitan dengan urusan pilihan meliputi:

**a. Urusan Pariwisata**

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Urusan Pariwisata meliputi sebagai berikut:

1. Kunjungan wisata menurun dari 22.266 Tahun 2019 menjadi 19.100 Tahun 2020. Angka capaian ini jauh dari target sebesar 23.366 Tahun 2020.
2. PAD sektor pariwisata menurun dari Rp.142.435.000 Tahun 2019 menjadi Rp.60.648.900 Tahun 2020. Angka capaian ini jauh dari target sebesar Rp.137.000.000 pada Tahun 2020.

## **b. Urusan Pertanian**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Pertanian meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertambahan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun. Untuk itu, perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna.
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi.
3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai di samping kurangnya modal.
4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik.
5. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim.
6. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani.
7. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan.

8. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional.
9. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak.
10. Konsumsi daging dan telur masih di bawah standar gizi.
11. Tata niaga ternak masih belum optimal.
12. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
13. Cakupan bina kelompok petani masih rendah yakni hanya 25 persen;

**c. Urusan Kehutanan**

Permasalahan pembangunan dalam Urusan Kehutanan meliputi sebagai berikut:

1. Maraknya pencurian kayu di area hutan negara, khususnya pada areal HPH;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata, carbon trade) di hutan produksi dan hutan lindung masih rendah;
3. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal;
4. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak mengalami peningkatan sekitar 75,86 persen selama Tahun 2019-2020, berada jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar 88,23 persen.
5. Kerusakan kawasan hutan sebesar 18,28 persen Tahun 2019-2020 atau meningkat dari angka yang ditargetkan sebesar 12,54 persen tahun 2020.

**d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Energi dan Sumberdaya Mineral meliputi sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ADHK-

2010 menurun dari 16,32 persen Tahun 2019 menjadi 13,56 persen tahun 2020.

2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ADHB menurun dari 19,36 persen Tahun 2019 menjadi 16,12 persen tahun 2020.

**e. Urusan Perdagangan**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Perdagangan meliputi sebagai berikut:

1. Ekspor bersih perdagangan sekitar US\$750.000 Tahun 2019-2020 lebih rendah dari angka yang ditargetkan sebesar menjadi US\$787.500 Tahun 2020;
2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tidak mengalami perubahan hanya sekitar 8 persen selama Tahun 2019-2020, lebih rendah dari target 10 persen tahun 2020.
3. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK-2010 menurun dari 2,53 persen Tahun 2019 menjadi -5,17 persen tahun 2020.
4. Adanya pasar yang mubazir tidak digunakan di wilayah kecamatan tertentu.

**f. Urusan Perindustrian**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Perindustrian meliputi sebagai berikut :

1. Cakupan bina kelompok pengrajin tidak mengalami perubahan hanya sekitar 14 persen selama Tahun 2019-2020, lebih rendah dari target 17 persen tahun 2020.

**g. Urusan Transmigrasi**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Transmigrasi meliputi sebagai berikut:

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai.
2. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal.

3. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah.
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi.
5. Adanya tumpang tindih lahan.
6. Persentase transmigrasi swakarsa stagnan pada angka 25 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan 26 persen;

**h. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sebagai berikut:

1. Realisasi Produksi Perikanan 48.411 ton Tahun 2020 lebih tinggi dari target sebesar 40.789 ton Tahun 2020.
2. Produksi Perikanan Tangkap belum mencapai target yaitu 21.910 ton Tahun 2020 sementara yang ditargetkan 27.897 ton Tahun 2020.
3. Produksi perikanan olahan 6.760 ton Tahun 2020 lebih tinggi dari target sebesar 5.069 ton Tahun 2020.
4. Produksi perikanan budidaya sekitar 19.741 ton Tahun 2020 lebih tinggi dari target sebesar 7.823 ton Tahun 2020.
5. Konsumsi ikan masih rendah.
6. Cakupan bina kelompok nelayan capaiannya lebih tinggi yaitu 65 persen sementara target sebesar 37 persen pada Tahun 2020.
7. Produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 23.560 ton Tahun 2020 lebih tinggi dari target yaitu 21.550 ton.
8. Nilai tukar nelayan masih rendah.
9. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB masih dibawah 6 persen tahun 2019-2020.

10. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
11. Tata letak (layout) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas.
12. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun.
13. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk.
14. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah.
15. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal.
16. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan.
17. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar.
18. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon.
19. Tingginya kerusakan ekosistem *mangrove* dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di Kabupaten Donggala.
20. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.

## 4.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam di luar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang



efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global.

#### **4.2.1. Isu Strategis Internasional**

Pada sub bab 4.2.1 dipaparkan beberapa isu strategis internasional meliputi Volatilitas Kurs, Hutang Luar Negeri, Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, Perubahan Iklim dan Pemanasan Global, Krisis Pangan Sejak Tahun 2010, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

##### **a. Volatilitas Kurs**

Hampir dua dekade setelah krisis moneter di Asia, negara-negara Asia beralih dari sistem yang menganut kurs tetap menuju pada kurs fleksibel. Namun, kurs mengambang terkendali selalu diasosiasikan dengan dolar Amerika membutuhkan biaya mahal intervensi yang menggerus cadangan devisa yang mengakibatkan defisit neraca berjalan sehingga menimbulkan menurunnya kepercayaan asing atas kemampuan bayar Indonesia. Adanya traumatis krisis Asia mendorong negara-negara Asia Timur melakukan kerjasama moneter di Asia. Bentuk kerjasama tersebut berupa riset dan antisipasi krisis, aplikasi secara kolektif mata uang yang dipatok terhadap dolar amerika atau yen atau penggunaan sekeranjang mata uang utama.

Sesudah krisis Asia, para ekonom mendukung solusi dua arah yaitu sistem kurs tetap, pergerakan sempurna modal dan pengelolaan secara independen kebijakan keuangan yang dapat dicapai secara simultan. Tujuan solusi ini menyatakan bahwa hanya sistem kurs tetap adalah satu-satunya sistem moneter yang dapat berkesinambungan dalam lingkungan di mana mobilitas modal sempurna dan mengambang bebas atau kurs yang dipatok seperti *currency board system* (CBS) atau dolarisasi yang cocok di Asia Timur. Sistem kurs yang terdapat di tengah-tengah antara kurs tetap dan kurs bebas sangat rentan terhadap krisis moneter dan perbankan. Dalam proses pencarian sistem moneter

alternatif yang tepat di Asia, khususnya dari stabilitas, ketertarikan pada penyatuan moneter Asia (Asian Monetary Unit, AMU) juga merupakan solusi yang tepat. Peluncuran penyatuan ekonomi dan moneter model Eropa oleh negara-negara Asia dipandang sebagai usulan yang tidak realistis walaupun para pemimpin Asia tertarik dengan ide yang sama. Namun, fluktuasi mata uang regional khususnya terhadap USD sangat mengganggu target-target ekonomi dan kinerja jangka pendek perekonomian negara-negara Kawasan Asia Timur, khusus Indonesia berupa gejolak kurs atau fluktuasi kurs tidak terlepas dari pilihan kebijakan Indonesia di bidang moneter internasional.

Konsekuensi dari pilihan Indonesia pada rezim kurs mengambang tentu punya akibat yang memang sudah dapat diperkirakan. Konsekuensi ini terlihat selama minggu ketiga November hingga pertengahan Desember 2015. Pada 25 November 2015, nilai tukar rupiah ditutup menguat pada tingkat Rp 13.690,00 per USD atau rupiah menguat 0,2 persen terhadap penutupan sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat itu ditutup menguat 0,88 persen pada tingkat 4.585,55 poin. Saat itu, investor asing mencatat *net buy* sebesar Rp 89 milyar. Lima indeks sektoral dengan kapitalisasi pasar terbesar ditutup menguat berturut-turut sektor keuangan menguat 1,36 persen, manufaktur 0,95 persen, consumer 1,38 persen, infrastruktur 0,28 persen, perdagangan 0,62 persen. Indeks di kawasan Asia semuanya melemah kecuali Shanghai yang menguat 0,88 persen. Mata uang di kawasan Asia Timur menguat yakni dolar Taiwan 0,59 persen, dolar Singapura 0,41 persen, Baht 0,17 persen, Peso 0,2 persen, Yen 0,01 persen, Ringgit 1,41 persen kecuali Yuan yang melemah -0,01 persen. Hari itu, merupakan masa akhir penguatan mata uang regional Asia terhadap USD sebelum melemah secara kontinyu hingga pertengahan Desember walaupun menguat sejenak selama 17-18 Desember 2015. Jadi wajar jika kondisi ini akan berlangsung terus, inilah yang disebut sebagai kerentanan makroekonomi (*macroeconomic vulnerability*) saat Indonesia memilih memberlakukan

rezim kurs mengambang. Hal ini tidak berarti bahwa pilihan pada rezim kurs tetap merupakan pilihan tanpa konsekuensi.

Lalu pada 26 November 2015, nilai tukar rupiah mulai terdepresiasi secara perlahan-lahan hingga 16 Desember 2015. Pada 26 November 2015 rupiah ditutup melemah pada tingkat Rp 13.742,00 per USD atau melemah 0,38 Persen terhadap masa penutupan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia ditutup bervariasi yakni dolar Taiwan melemah -0,28 persen, dolar Singapura melemah -0,22 persen, Baht -0,24 persen, Peso -0,24 persen, Peso -0,22 persen dan Ringgit -0,28 persen. Pada 4 Desember 2015, rupiah ditutup pada level Rp 13.834,00 atau menguat 0,08 persen terhadap hari sebelumnya, sedangkan mata uang regional ditutup bervariasi yakni dolar Taiwan menguat 0,25 persen, dolar Singapura melemah -0,16 persen, Baht 0,03 persen, Peso 0,29 persen, Yen -0,14 persen, Yuan -0,07 persen, serta Ringgit menguat 0,03 persen.

Pada 11 Desember 2015, kurs rupiah bersama mata uang regional lainnya ditutup melemah. Rupiah ditutup pada tingkat Rp 13.993,00 per USD, dolar Singapura -0,22 persen, Peso -0,12 persen, Yen -0,28 persen, Yuan -0,26 persen, dan Ringgit -0,78 persen. Pada 16 Desember 2015, kurs rupiah kembali ditutup melemah pada tingkat Rp14.071,00 per USD atau melemah 0,18 persen terhadap penutupan sebelumnya. Mata uang regional ditutup melemah yakni dolar Taiwan -0,42 persen, dolar Singapura -0,29 persen, Baht -0,30 persen, Peso 0,03 persen, Yen -0,30 persen, Yuan -0,16 persen dan Ringgit -0,34 persen. Sebaliknya, pada sesi penutupan Kamis sore, kurs rupiah kembali menguat lagi pada tingkat Rp 14.009,00 per USD atau terjadi penguatan 0,44 persen dari hari sebelumnya. Di kawasan Asia Timur, dolar Taiwan menguat 0,11 persen dan Ringgit menguat 0,07 persen. Sedangkan dolar Singapura melemah -0,39 persen, Baht -0,32 persen, Peso -0,28 persen, Yen -0,14 persen dan Yuan juga melemah -0,17 persen. Mengapa sejak 26 November rupiah ditutup melemah terus, setelah sehari sebelumnya

menguat, lalu menguat lagi selama Kamis-Jum'at pada minggu ketiga Desember 2015? Lalu apa yang terjadi di balik ini?

Tiga tahun kemudian, yakni pada 3 Agustus 2018, kurs rupiah ditutup pada level Rp14.498,00 per dolar atau melemah -0,24 persen ketimbang penutupan sehari sebelumnya pada Rp14.478,00 per USD dengan rentang transaksi Rp14.495-Rp14.512,00 per USD. Depresiasi rupiah ini juga terjadi mata uang regional seperti RM melemah -0,12 persen, dolar Singapura melemah -0,11 persen, Baht melemah -0,15 persen dan Yuan melemah -0,36 persen.

Fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam pasar keuangan global. Secara teoretis, pertama, fluktuasi kurs rupiah ini tidak terlepas dari pilihan Indonesia dalam pemberlakuan sistem kurs dalam *impossible trinity* atau segitiga Mundell. Indonesia menurut konsep Mundell tidak dapat mencapai tiga tujuan kebijakan moneter sekaligus yakni independensi kebijakan moneter, stabilitas kurs, dan integrasi pasar keuangan dunia. Independensi kebijakan moneter dan stabilitas kurs bertumpu pada pengendalian arus modal, stabilitas kurs dan integrasi pasar keuangan dunia bertumpu pada penyatuan moneter, sedangkan integrasi pasar keuangan dan independensi kebijakan moneter bertumpu pada sistem kurs mengambang. Seperti beberapa negara Asia lainnya yakni Korea Selatan, Filipina, Thailand, Indonesia hingga saat ini lebih memilih integrasi dalam perekonomian global dan independensi kebijakan moneter. Pilihan rezim kursnya adalah kurs bebas. Tentu saja melepaskan pilihan stabilitas nilai tukar dan integrasi ekonomi dunia serta pilihan antara stabilitas kurs dan independensi kebijakan moneter. Konsekuensinya, stabilitas kurs diserahkan pada mekanisme pasar sehingga kondisinya seperti saat ini yang berlangsung sejak pemulihan pasca krisis Asia 1997.

Kedua, fluktuasi kurs atau tepatnya kurs yang *tervolatiled* seperti saat ini juga merupakan konsekuensi derasnya arus modal masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi Indonesia dalam

perekonomian Global. Hanya saja berbeda dengan saat masa krisis Asia. Jika pada masa krisis Asia, arus masuk modal berupa *financial investment* bersifat jangka pendek atau *hot money* yang sewaktu-waktu hengkang ke negara lain dan menimbulkan *sudden stop*. Saat ini arus modal masuk didominasi oleh Arus Modal Asing Langsung (FDI) khususnya pada bidang infrastruktur.

Adanya arus modal masuk baik melalui penanaman modal asing langsung maupun obligasi pemerintah serta kurs rupiah yang sering tervolatiled akan mempengaruhi penerimaan negara dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang selanjutnya akan menambah anggaran pembangunan bila *cost of fund* penjualan SBN dan SBSN tersebut lebih murah karena *credit rating* Indonesia lebih baik seperti 20 tahun lalu. Selain itu, volatilitas kurs tersebut juga mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam pembiayaan negara khususnya pembayaran pokok hutang dan bunganya yang akan jatuh tempo. Besarnya penerimaan dari hasil penjualan obligasi pemerintah tersebut selanjutnya akan digunakan dalam menunjang keuangan Pemerintah dalam bentuk pembiayaan operasional Kementrian/Lembaga serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk ke 519 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Donggala dan 34 provinsi di Indonesia.

## **b. Hutang Luar Negeri**

Hutang luar negeri sebenarnya juga merupakan penyelesaian dari surplus ekspor negara donor yang sekaligus memang dimaksud untuk mengatasi modal dari negara-negara sedang berkembang. Surplus ekspor ini merupakan investasi aktif jika disalurkan sebagai bantuan luar negeri di negara sedang berkembang. Politik luar negeri yang diprakarsai merupakan persoalan pokok dari ketergantungan terhadap modal dari luar negeri. Secara konseptual ini ditetapkan sebagai pelengkap yang mendampingi pendapatan pemerintah dari berbagi sektor dan kegiatan ekonomi.

Utang luar negeri pada awalnya memang menjadi pasokan modal bagi sistem ekonomi untuk mengeliminir defisit transaksi berjalan. Faktor kendali dan pengawasan terhadap transaksi hutang luar negeri ini tidak berjalan efektif, karena segala keputusan yang dilakukan negara (Pemerintah) sangat mendominasi kebijakan publik yang ada bahkan tidak sedikit yang dilakukan tanpa proses dan konfirmasi dan diketahui publik. Birokrasi pada dasarnya mempunyai sifat *cost maximizer*, sehingga transaksi utang luar negeri yang tidak efisien pun terus dilaksanakan.

Pengaruh utang luar negeri pemerintah menjadi tumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi karena muncul defisit atau transfer negatif keluar, semakin tinggi bahkan utang itu sendiri telah menjadi beban atau bahkan perangkat bagi perekonomian nasional kebijakan pembangunan yang bertumpu kepada utang luar negeri telah memperlihatkan gejala kegagalannya pada akhir Tahun 1980-an kini betul-betul mengerti bahwa utang dengan porsi berlebihan merupakan candu yang mengerikan dari pada sumber energi pembangunan perekonomian. Krisis nilai tukar Rupiah dan krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an tidak dapat terhindarkan, sekaligus merupakan puncak kegagalan dan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada utang luar negeri. Pertambahan efek permintaan terhadap valuta jauh lebih besar dari pada pertumbuhan penawarannya, terutama jika ditambah beban sektor produksi riil yang berbasis bahan baku impor. Kegiatan impor inilah yang mengurus devisa dalam jumlah besar dan pengaruh yang kuat beban berganda dari utang pemerintah dan swasta telah menimbulkan spekulasi bagi investor dan tidak cukup kuat menopang perkembangannya yang kompleks untuk menghindari, resiko yang fatal, maka para investor tersebut mengambil langkah seribu yang kemudian dirasakan pada keambrokan pasar modal sejak September sampai Desember 1997.

Kegagalan pelaksanaan utang luar negeri Pemerintah merupakan kesalahan awal (State Faillure) dan sekaligus menjadi landasan untuk kesalahan berikutnya yakni, kesalahan swasta (Private Faillure),

kesalahan kebijakan di sektor negara itu secara otomatis menjalar ke sektor swasta. Jadi persoalan ekonomi nasional kemudian disambung oleh kombinasi dua kesalahan pemerintah dan swasta secara bersama-sama.

Krisis keuangan pada Tahun 1997 meninggalkan Indonesia dan Hutang publik yang sangat besar sama besarnya dengan produk domestik bruto. Restrukturisasi sektor keuangan (Rekapitalisasi, dukungan likuiditas dan jaminan keuangan) yang dimandatkan oleh LoI (leter of intent) IMF telah menciptakan biaya bagi sektor publik sebesar U\$ 80 Milyar Hutang publik domestik ini merupakan bagian dari total hutang publik Indonesia U\$ 150 Milyar angka ini sama dengan 100 persen PDB. Hutang ini membutuhkan biaya kemanusiaan yang besar dan menyerap dana yang kiranya dapat digunakan untuk memperkuat pertumbuhan dan meringankan kemiskinan massal.

Dampak nyata dari beban hutang itu pada anggaran pembangunan Indonesia sebesar 40 persen dari total pengeluaran dan lebih 5 Persen PDB Indonesia setelah krisis, pengeluaran pembangunan terpotong menjadi hampir sepertiganya sekali krisis pada Tahun 1997. Pada Tahun 2001, pembayaran bunga atas hutang domestik dan luar negeri Indonesia diperkirakan sekitar 35 Persen dari pengeluaran Pemerintah Pusat. Sebagai perbandingan pengeluaran pembangunan yang sangat dibutuhkan hanya sekitar 17,5 persen dari pengeluaran dalam negeri Pemerintah.

Setelah krisis ekonomi pada Tahun 1997, status ekonomi Indonesia berdasarkan pendapatan dan besarnya hutang telah menurun. Laporan tahunan Bank Dunia tentang Tahun 2000, menempatkan Indonesia sebagai kelompok negara rendah, SILIC (Severely Indepted Low Income Countries = negara berpendapatan rendah yang terlilit hutang). Sebelum krisis, Indonesia menempati urutan sebagai negara yang berpendapatan menengah dan hutang menengah, berada satu tingkat dengan Mali, Nigeria, Afganistan, Malawi, dan Ethiopia. Negara Asia lain menderita krisis seperti Malaysia, Thailand dan Korea bukanlah kelompok SILIC.



Cara mengatasi krisis pinjaman secara bilateral dengan melakukan penjadwalan kembali pinjaman disertai keringanan pengembaliannya (debt relief) sudah sering dilakukan. Indonesia pernah A kebijaksanaan tersebut antara Tahun 1969 sampai sampai 1971, juga Pemerintah Turki melakukan penjadwalan pinjaman lamanya dan menerima pinjaman baru dengan persyaratannya lebih ringan. Tetapi, cara demikian tidak dapat dilakukan dalam mengatasi krisis pinjaman yang terjadi pada Tahun 1982. Meksiko adalah negara pertama menghentikan pembayaran kembali pinjamannya. Tindakan negara tetangga dan sekutu dekat ini sungguh mengejutkan pemerintah Amerika Serikat. Pinjaman Meksiko dan negara-negara Amerika Latin yang lain dari bank-bank swasta internasional sudah sedemikian besar sehingga dikuatirkan krisis itu dapat merusak sistem perbankan dan keuangan internasional. Untuk mengatasinya dilakukan pendekatan bersifat multilateral (pinjaman itu memang bukan pinjaman resmi bilateral) dan tidak pula disertai pemberian keringanan pembayaran. IMF diminta untuk merumuskan cara dan langkah-langkah penyelesaian pinjaman luar negeri itu yang dituangkan ke dalam suatu program penyesuaian (adjustment program) untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun. Program itu menekankan penyelamatan dana pinjaman yang sudah diberikan dengan cara mengendalikan pengeluaran devisa dan meningkatkan kemampuan keuangan negara peminjam khususnya penerima ekspor.

Pelaksanaan program ini dititik beratkan pada neraca pembayaran dan neraca modal yang harus dipatuhi oleh negara peminjam. Dalam neraca pembayaran diperinci mengenai arus pemasukan dan pengeluaran devisa dengan menekan impor dan memaksimalkan penerimaan ekspor. Neraca modal memperhitungkan arus modal asing yang akan masuk dan tambahan pinjaman yang akan diberikan oleh bank asing kepada negara tersebut. Dari kedua neraca akan terlihat jumlah dana yang harus disediakan negara peminjam untuk pembayaran *royalty* dan dividen dari investasi asing dari negara itu serta pengembalian pinjaman pokok dan bunga pinjamannya. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan



negara peminjam. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dan bunganya dapat dilakukan lagi, setelah dihentikan beberapa waktu lamanya, tetapi di pihak lain beban yang sangat besar harus ditanggung negara peminjam yang telah menyebabkan terjadinya penurunan dalam investasi dan meningkatnya laju inflasi, tingkat pertumbuhan investasi di beberapa negara peminjam besar (Argentina, Brazil, Columbia, Equador, Uruguay, dan Bolivia) laju inflasi telah meningkat dari 57,6 persen pada Tahun 1981 menjadi 84,8 persen (1982), 131,1 persen, 185,2 persen, laju inflasi yang tertinggi terjadi di negara – negara yang mempunyai pinjaman besar dan di negara – negara kecil. Perkapita PDB dan tingkat hidup menurun dratis.

IMF yang menjadi otak dari penyusunan program ini dituduh terlalu mengutamakan kepentingan pihak perbankan dan negara donor dan kurang memperhatikan beban yang ditimbulkan kepada rakyat di negara–negara peminjam. Dikatakan, beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri itu telah menimbulkan kemunduran dalam pembangunan, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan semula dari pinjaman tersebut. Akibatnya PDB dari negara–negara Amerika Latin yang melaksanakan program itu telah mengalami pertumbuhan negatif antara Tahun 1982–1983 dan pertumbuhan yang rendah (sekitar 3 persen) antara Tahun 1984–1987 tingkat pertumbuhan PDB perkapita juga menurun dari 8,9 persen antara Tahun 1981–1985 menjadi 1,45 persen dan 0,5 persen pada Tahun 1986–1987.

Langkah – langkah untuk pengumpulan dana bagi pembayaran cicilan pinjaman luar negeri itu diikuti pula dengan penekanan impor. Ekspor yang berhasil di tingkatkan masih kurang cukup untuk menghasilkan dana pembayaran pinjaman, sehingga harus dilakukan penekanan konsumsi masyarakat melalui pengurangan impor. Pengurangan impor telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara–negara tersebut karena berkurangnya barang modal dan peralatan yang diperlukan.

Debt Service Ratio (DSR) adalah rasio pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo terhadap ekspor yang dihasilkan dalam periode satu tahun. Angka DSR semakin besar akan semakin riskan dan semakin kecil akan semakin baik bagi perekonomian nasional. Namun DSR nasional tergolong tinggi karena sudah mencapai angka lebih dari 30 persen jauh lebih tinggi dari batas wajar yang dapat dikendalikan artinya dengan angka besar lebih dari 30 persen, hasil ekspor nasional banyak dipakai untuk membayar hutang luar negeri. Hal ini dapat dihubungkan dengan industri berorientasi ekspor kandungan bahan bakunya berasal dari impor yang tinggi dan sebagaimana diketahui bahwa nilai impor sudah mendekati nilai ekspor (75–89 persen) dengan angka DSR yang lebih dari 30 persen, maka sungguh terlalu besar pengorbanan ekspor bersih untuk pembayaran hutang luar negeri bahkan angka DSR pasca krisis ini (1998–1999) mencapai 45 persen sampai 59 persen.

Negara donor pada umumnya percaya bahwa persoalan-persoalan hutang dari negara penghutang bersifat sementara. Dengan demikian, untuk membayar cicilan hutang mengambil bentuk penjadwalan kembali pembayaran, kadang-kadang dibarengi dengan paket-paket pinjaman baru. Menurut suatu dokumen IMF dan Bank Dunia, sekitar US\$ 60 miliar dari jumlah hutang dan pembayaran cicilan hutang dan bunga telah dihapuskan lewat proses Paris club. Penjadwalan ulang dalam kenyataannya tidak cukup karena semakin banyak negara mengajukan untuk diulanginya penjadwalan ulang. Para kreditor mulai mencari cara-cara untuk mempertahankan jumlah yang terhutang pada tingkat yang dapat dikendalikan. Pada September 1996, Bank Dunia dan IMF melancarkan prakarsa untuk negara-negara miskin yang sangat terbebani hutang. Sekitar 180 Pemerintah di seluruh dunia menyetujuinya dan IMF serta Bank Dunia memujinya sebagai suatu pendekatan efektif untuk membantu mengurangi hutang negara-negara miskin, negara penghutang yang memikul beban hutang berat dan berbagai bagian dari suatu strategi pengurangan kemiskinan secara keseluruhan. Pada September

1999, tiga tahun setelah prakarsa itu dilancarkan, pada kesempatan sidang tahunan Bank Dunia dan IMF. Prakarsa Hipe mengalami perluasan signifikan dengan menyediakan peringanan hutang lebih besar kepada negara lebih cepat lagi. Peningkatan ini dan strategi yang dirancang ulang untuk menghubungkan peringanan hutang dengan pengurangan kemiskinan akan membantu menghilangkan hutang sebagai suatu hambatan terhadap pembangunan dan memungkinkan negara-negara untuk melakukan investasi lebih besar di masa depan.

Adanya kinerja hutang luar negeri ini akan menimbulkan kepercayaan tinggi pada pihak asing apabila *debt service ratio* di bawah nilai benchmarking sebesar 30 persen atas kinerja perekonomian Indonesia. Turunnya hutang luar negeri akan menimbulkan keleluasaan pembiayaan pembangunan yang tercermin dari besarnya ruang fiskal yang selanjutnya akan menambah dana pembangunan baik melalui K/L maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga dapat membiayai prioritas I, II maupun prioritas III di masing-masing daerah.

### **c. Perang Dagang Amerika dan Tiongkok**

Perang dagang Tiongkok–Amerika Serikat 2018 dimulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018, niatnya untuk mengenakan tarif sebesar US\$ 50 miliar bagi barang-barang Tiongkok di bawah Seksi 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, dengan menyebut riwayat "praktik perdagangan tidak adil" dan pencurian kekayaan intelektual. Produk Tiongkok yang terkena tarif itu beragam mulai dari mesin, peralatan elektronik, peralatan manufaktur, peralatan kantor, motor, hingga suku cadang pesawat. Sebaliknya, Pemerintah Tiongkok menerapkan tarif mereka pada lebih dari 128 produk Amerika Serikat, termasuk terutama sekali kedelai, mesin jet, chip komputer, pesawat, mobil, emas sebagai ekspor utama AS ke Tiongkok.

Pada 6 Juli 2018 Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai \$ 34

milyar, yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Administrasi Trump mengatakan bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis AS, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya, pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar \$ 600 miliar per tahun.

Perang Dagang tersebut dilatar belakangi oleh fenomena bahwa Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan \$500 miliar per tahun, ditambah pencurian kekayaan intelektual sebesar \$300 miliar per tahun. Pemerintah Amerika tidak dapat membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Menurut Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross, bahwa tarif terhadap produk Tiongkok yang direncanakan hanya mencerminkan 0,3 persen dari produk domestik bruto Amerika Serikat.

Perang dagang ini dapat mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia karena kedua negara merupakan patner dagang Indonesia. Pada satu sisi, adanya Perang Dagang tersebut dapat berpengaruh positif pada Indonesia melalui gencarnya arus modal asing jangka panjang ke Indonesia asal Tiongkok yang terkena dampak proteksi di Amerika Serikat. Selain itu, karena Indonesia di mata Amerika Serikat sebagai Negara Berkembang, ekspor produk-produk berbasis logam dasar ke Amerika Serikat mendapat pembebasan bea masuk sebesar 15 persen ketimbang Tiongkok yang dianggap negara maju. Pada sisi lain, dampak negatif yang muncul harus diantisipasi karena para pemodal akan *wait and see* sehingga mengurangi keinginan investasi bahkan membatalkan komitmen investasinya ke negara-negara *Emerging Economic* termasuk ke Indonesia khususnya pada Kawasan Industri yang sedang atraktif menarik modal asing. Akibatnya, daerah yang sedang gencar menarik arus modal asing mendapat ketidakpastian.

#### **d. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global**

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan. Terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global tersebut terjadi akibat menipisnya lapisan ozon (O<sub>3</sub>) merupakan konsekuensi pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, deforestasi, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya, penggunaan *hairspray*, pengharum ruangan. Pemanasan global menimbulkan pencairan es di artic (kutub utara) yang menimbulkan kenaikan pada permukaan air laut. Akibatnya terjadi perubahan musim, el-nino, la nina, anomali cuaca menimbulkan perubahan dan kacaunya iklim yang selanjutnya berpengaruh pada musim tanam petani, kacaunya ekosistem biota laut, intensitas bencana, dan lain-lain. Adanya perubahan iklim mengubah kalender tanam petani dan waktu melaut nelayan sehingga menimbulkan gejolak permintaan dan penawaran produk-produk pertanian termasuk di daerah yang kontribusi sektor pertaniannya besar seperti Kabupaten Donggala.

#### **e. Sejak Tahun 2010, Krisis Pangan menglobal**

Dunia mengalami krisis pangan sebagai konsekuensi dari anomali cuaca dan penguasaan aset pangan hanya pada negara tertentu. Setiap hari, ada 1,7 milyar penduduk dunia yang tidak memperoleh nutrisi yang layak terutama penduduk yang berdomisili di Afrika Sub Sahara dan India. Hal ini diperparah lagi oleh dominasi kartel dalam penentuan harga pangan membuat volatilitas harga pangan dunia sulit diantisipasi oleh berbagai negara. Thailand, sejak beberapa dekade telah menjadi pemegang seperempat pasokan beras terbesar di dunia. Sementara Indonesia sejak pertengahan dekade 1980an menjadi importir bahan pangan. Hampir semua kendali harga pangan ini dilakukan di Jenewa,

Swiss, negara yang tidak mempunyai kultur pangan kecuali produsen susu. Krisis pangan dunia akan menyulitkan negara-negara berpenduduk banyak sehingga harus dapat diantisipasi sebelum. Ikan dapat menjadi alternatif terbaik karena protein yang dikandungnya sangat tinggi, apalagi ikan merupakan nutrisi kecerdasan.

Krisis pangan meningkat karena kebutuhan pangan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penduduk. Tanpa adanya diversifikasi pangan dan pola pikir monokultur, ditambah dengan degradasi lingkungan akan berpengaruh pada pasokan pangan termasuk di Kabupaten Donggala yang target penurunan kebutuhan pangan utama tidak tercapai sebesar 1,5 persen pertahun pada periode 2013-2018 berbanding terbalik dengan ketersediaan pangan utama.

#### **f. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh berbagai negara dan lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tiga tujuan mulia SDGs yakni pertama, diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia ini pada semua usia. Oleh karena itu, pencapaian SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama, serta komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs). Adanya baiknya, Kabupaten Donggala sejak awal mempersiapkan rencana aksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan walaupun

secara umum, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 hanya mewajibkan adanya RAD TPB hanya pada Pemerintah Provinsi.

#### **4.2.2. Isu Strategis Nasional**

Dalam sub bab 4.2.2. ini akan diuraikan beberapa isu strategi nasional yakni kebijakan fiskal dan defisit neraca pembayaran, optimalisasi PNBPN, Efektivitas Hutang Luar Negeri Indonesia, Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas, Mengoptimalkan Ekspor Hasil Pertanian, Mengurangi Impor Pangan, Upaya Menurunkan Konsumsi Beras Nasional, Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam.

##### **a. Kebijakan Fiskal dan Defisit Neraca Pembayaran**

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran dan negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja.

Ada tiga instrumen kebijakan fiskal yang dapat ditempuh yakni memperkuat kualitas belanja. Kualitas belanja dalam jangka panjang dapat ditempuh melalui penguatan kualitas



sumberdaya manusia melalui kanal perluasan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor seperti diutarakan pada bagian sebelumnya. Pemerintah fokus belanja pada perlindungan sosial berbasis pada Basis Data Terpadu TNP2K dan program prioritas yang tidak menimbulkan *time mismatch* dan *maturity mismatch*, serta memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Instrumen kedua yakni memperlebar ruang fiskal. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan *tax ratio* fokus pada perbaikan dan administrasi penerimaan negara. Selain itu, pemberian insentif fiskal pada investasi, ekspor dan industrialisasi berbasis pada substitusi impor bagi produk-produk yang dapat dihasilkan domestik. Optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi belanja non prioritas dan efektivitas subsidi dan bansos, serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif. Instrumen ketiga yakni menjaga daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio hutang, transformasi keseimbangan primer menuju keseimbangan surplus, serta memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Bertumpu pada uraian di atas, maka stabilitas neraca berjalan yang berakar pada volatilitas kurs sebagai konsekuensi dari defisit neraca berjalan dari sisi kebijakan fiskal dapat diatasi sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan Penerimaan Negara yang lebih realistis melalui dukungan insentif fiskal, mendorong iklim investasi dan dunia usaha. Fokus Penerimaan Negara pada sektor perdagangan dan Wajib Pajak Pribadi, ekstensifikasi melalui *geo tagging*, memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan data base pajak, serta optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi perjanjian pajak internasional; cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu dan atau untuk mengurangi dengan eksternalitas negatif.



Pemerintah melakukan pula optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap memperhatikan pelestarian SDA dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kedua, Pemerintah akan fokus pada belanja lebih produktif seperti Belanja Infrastruktur dan Belanja Sosial, efisiensi pada Belanja Barang, mempertahankan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan pendidikan 20 persen. Selain itu, belanja pemerintah difokuskan pada fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian, mitigasi bencana alam dan risiko fiskal, dan percepatan penyerapan anggaran.

Ketiga, melakukan subsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan melalui subsidi energi yakni melakukan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, distribusi tertutup (*targeted*) subsidi *liquefied petro gaz* (LPG) 3 kg, penggunaan Basis Data Terpadu TNP2K bagi Rumah Tangga yang akan memperoleh subsidi listrik serta dari sisi non ekonomi, memperbaiki ketepatan sasaran.

Keempat, Pemerintah sebaiknya memperkuat desentralisasi fiskal melalui reformulasi perhitungan alokasi DAU, memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah akan memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar serta meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kelima, Pemerintah sebaiknya fokus pada Kestinambungan Fiskal melalui kebijakan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah. Selain itu, Pemerintah menempuh kebijakan investasi selektif, serta menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

## b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satu dari berbagai akar masalah dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah jalinan sinergitas antara pemungutan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain, pertama masalah penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi tentang optimalisasi Penerimaan Negara antara Aparat Sipil Negara (ASN) di daerah dan Aparat Sipil Negara (ASN) instansi vertikal baik yang berkiprah di Kantor Wilayah Pajak atau Kantor Pajak Pratama (KPP) tingkat kota/kabupaten. Bila penyamaan persepsi telah terpatrih dalam benak masing-masing ASN, utamanya bekerja mempunyai satu tujuan yakni optimalisasi PNBP, maka kendala kedua akan muncul di antara mereka adalah masalah koordinasi. Koordinasi menjadi penting dalam arti transformasi dari para ASN sama-sama telah bekerja tetapi belum bekerja bersama-sama. Ketiga, masalah agenda aksi bersama dalam optimalisasi PNBP karena tujuan ini akan sulit dilaksanakan apabila antara ASN instansi vertikal dan daerah saling berharap untuk menjalankan tugas bersama dan biasanya mereka lebih fokus pada tupoksi masing-masing.

Pada sisi Optimalisasi PNBP, menghadapi berbagai kendala **pertama**, pada sisi PNBP SDA Migas menghadapi kendala berupa fluktuasi harga minyak mentah internasional, gejolak kurs rupiah terhadap dolar Amerika, turunnya produksi migas yang dapat mempengaruhi lifting minyak bumi, tingginya biaya *cost recovery* serta adanya gangguan baik cuaca, aktivitas produksi pada fasilitas produksi. **Kedua**, pada PNBP non migas khususnya minerba menghadapi kendala berupa lemahnya regulasi, pengawasan, sanksi dan struktur organisasi. **Ketiga**, pada PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN besarnya sangat dipengaruhi oleh laba bersih BUMN, *payout ratio* dan besarnya kepemilikan saham Pemerintah. Secara riil, kendala yang terjadi yakni masih banyak BUMN dan BUMD yang belum sehat dan belum memiliki kinerja baik, belum efisiennya biaya operasional BUMN/BUMD, kebutuhan BUMN/BUMD untuk peningkatan *capital expenditure* guna meningkatkan kegiatan

usaha dan pencapaian laba yang lebih tinggi. **Keempat**, Penerimaan bersumber dari PNBP lainnya dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh K/L, besaran tarif pelayanan, serta ketepatan waktu penyetoran ke rekening kas negara. Kendala umum yang dihadapi PNBP lainnya yakni masih banyak potensi PNBP pada K/L dan di daerah yang belum tergali, masih banyak jenis pelayanan yang dapat diberikan K/L dan daerah tetapi belum terungkap. Untuk merealisasikan potensi yang ada, diperlukan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan karena untuk dapat memungut PNBP harus ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pemungutannya. Masih terdapat kelemahan data base pada K/L yang dapat digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi besaran tariff PNBP, serta masih terdapat beberapa K/L yang melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum, serta masih terdapat beberapa K/L yang melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum. Hal ini jelas menyalahi ketentuan atau aturan yang ada, yakni suatu K/L baru diperbolehkan memungut PNBP kalau sudah ada PP yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku bagi K/L bersangkutan. Kendala lain yakni masih ada penggunaan langsung PNBP oleh K/L. Hal ini terutama terjadi pada akhir tahun anggaran, yakni suatu K/L melampaui target PNBP. Terkait pencairan dana PNBP ini, K/L harus terlebih dahulu merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan, serta belum optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap PNBP di K/L dan daerah. **Kelima**, Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan Menteri Keuangan, kualitas pelayanan, administrasi pengelolaan BLU. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam BLU erat kaitannya dengan ketiga faktor di atas.

Pada sektor properti, identifikasi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pengembang-pengembang perumahan dalam mengembangkan kegiatan di sektor properti di antaranya adalah: Tingginya tingkat suku bunga. Hal ini diperkuat antara lain dari data tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah yang mencapai 12,7 persen atau paling tinggi

dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang berada dalam kisaran 4,9 persen sampai dengan 6,9 persen ; Selanjutnya, Perizinan banyak, lambat, dan tidak ada standar biaya maupun pelayanan; kemudian, lahan semakin mahal dan terdapat tumpang tindih kepemilikan; dan akhirnya, dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar dirasakan belum maksimal. Instrumen penerimaan pemerintah dari sektor properti meliputi 12 jenis penerimaan baik pusat maupun daerah. Penerimaan pusat dari sektor properti: (1) PPh final persewaan tanah dan bangunan; (2) PPh final atas jasa konstruksi; (3) PPh pasal 23 (properti dan jasa); (4) PPN dan PPnBM; (5) PPN atas sewa ruangan; (6) PPh pasal 22 untuk penjualan barang sangat mewah; (7) PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan; (8) PPN kegiatan membangun sendiri (KMS); (9) PBB-P3. Penerimaan daerah dari sektor properti: (1) PBB-P2; (2) BPHTB; dan (3) IMB.

Tantangan yang dihadapi dalam memungut penerimaan pemerintah di sektor properti antara lain adalah pertama, Nilai jual objek pajak yang sangat rendah dibandingkan nilai pasar terutama di daerah perdesaan; Kedua, kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak BPHTB untuk melaporkan nilai transaksi yang sebenarnya masih rendah; Ketiga, kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar PBB P2, membayar hanya “jika diperlukan”; Keempat, ketersediaan tenaga fungsional penilai di daerah masih terbatas; Kelima, Piutang PBB-P2 yang diterima pemda dari Pemerintah Pusat masih memerlukan penanganan yang tepat; Keenam, dirasakan relatif tingginya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) di daerah perdesaan; Ketujuh, terdapat surat setoran BPHTB palsu. Beberapa modus penghindaran pajak oleh WP di sektor properti, antara lain: memperkecil laporan nilai penjualan; tidak melakukan pemotongan pajak dengan benar; memecah luas bangunan; melaporkan penjualan rumah sebagai penjualan kavling; dan menggunakan faktur pajak yang tidak sah.

Dalam mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai optimalisasi PNBP, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah **Pertama**, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi koordinasi antara ASN instansi vertikal dan di ASN di daerah dalam melakukan agenda bersama optimalisasi penerimaan negara karena Penerimaan Negara ini berguna bagi pembiayaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

**Kedua**, dalam rangka meningkatkan PNBP minerba, maka upaya-upaya yang dilakukan yakni melaksanakan percepatan pengembangan lapangan minyak baru, *term and condition* yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di *remote area* dan atau laut dalam, melakukan efisiensi *cost recovery* dan mengupayakan penurunan angka *cost recovery* terhadap *gross revenue*. Selanjutnya mengadakan penyempurnaan peraturan tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan minerba, membangun sistem pembayaran *online* dan data base terkait pertambangan minerba. Selanjutnya, merumuskan ketentuan *reimbursement* PPN terkait dengan adanya penahanan DHPB oleh Kemenkeu. Pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang atas kontrak kerjasama yang nilainya sudah tidak wajar, seperti berkaitan dengan besarnya *royalty* dan pengurang. Pemerintah perlu mengatur secara spesifik mengenai jenis dan biaya komponen pengurang harga penjualan, tidak hanya pada batubara saja, namun juga pada komoditi mineral lainnya. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas atas ketidakmampuan pemilik izin usaha (IUP) pertambangan Minerba yang lalai memenuhi kewajibannya. Di samping itu, Pemerintah perlu memperkuat peran Kementrian ESDM dalam pengawasan atau membentuk lembaga baru dalam rangka mempertajam fungsi pengawasan sektor pertambangan minerba bila perlu menyewa surveyor independen untuk mencegah *transfert pricing*. Kemenkeu perlu melakukan reorganisasi pengelolaan PNBP SDA non-migas pada Direktorat PNBP Ditjen Anggaran. Selanjutnya, Pemerintah dapat

membentuk payung hukum kerjasama dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian ESDM dan Kemenkeu dalam rangka integrasi minerba serta memberikan kesempatan kepada surveyor independen yang bekerja untuk Pemerintah untuk memantau data produksi dengan baik, *reliable* untuk penerimaan SDA.

**Ketiga**, Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usaha sektor hulu migas guna meningkatkan *lifting* minyak bumi dan gas alam, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang *cost recovery* dalam kegiatan usaha hulu migas dengan tetap menghormati kontrak yang berlaku, memperkuat penagihan dan pengawasan dari sektor migas oleh BP migas. Selanjutnya, meningkatkan produksi dan revisi tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada sektor sumberdaya mineral dan menggali potensi-potensi penerimaan yang ada pada sub sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan dan mempertahankan kelestarian hutan, serta mengoptimalkan penerimaan dari sub sektor perikanan dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan.

**Keempat**, untuk meningkatkan PNBPN dari bagian Pemerintah atas laba BUMN/BUMD perlu dilakukan yakni Pemerintah melakukan penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN/BUMD, melakukan efisiensi biaya operasional BUMN/BUMD, melakukan optimalisasi *dividen pay-out ratio*, serta menyelesaikan audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan BUMN/BUMD yang harus selesai lebih awal dari peraturan yang ada guna mengetahui dari awal definitif atas rugi/laba BUMN/BUMD, meningkatkan sinergi antar BUMN/BUMD guna meningkatkan daya saing, serta menjaga keseimbangan antara *capital expenditure* dan *sharing dividen* kepada APBN/APBD, mengingat BUMN/BUMD juga memberikan sumbangan penerimaan pajak yang besar kepada Negara.

**Kelima**, untuk meningkatkan PNBPN lainnya, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan yakni Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta kepada seluruh K/L dan daerah, agar melakukan inventarisasi potensi PNBPN yang ada pada masing-masing K/L dan daerah. Selanjutnya

K/L dan daerah diminta mengusulkan potensi PNBPN tersebut untuk diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai landasan pemungutannya. Pengusulan ini dilakukan K/L dan daerah dengan menerbitkan surat permohonan kepada Menteri Keuangan *ce qui* Direktorat Jenderal Anggaran. Pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada K/L dan daerah yang melakukan pemungutan PNBPN tanpa dasar hukum, dan Menteri Keuangan agar memerintahkan kepada K/L dan daerah yang bersangkutan untuk menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah sebagai landasan pemungutan PNBPN oleh K/L yang bersangkutan, apabila telah nyata diketahui ada K/L yang melakukan pemungutan tanpa dasar hukum tersebut. Berkaitan dengan pengawasan PNBPN, agar dapat terlaksana dengan baik, dapat dilakukan oleh pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai satker yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBPN di daerah, untuk melakukan tugas pengawasan dan monitoring PNBPN tersebut. Guna lebih mendongkrak PNBPN lainnya ini, tidak kalah pentingnya adalah K/L harus meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBPN, dan kebijakan yang ditempuh terutama difokuskan pada peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBPN pada masing-masing K/L; monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBPN pada K/L; dan peningkatan akurasi target, penyusunan pagu penggunaan, serta pelaporan PNBPN K/L.

**Keenam,** berkaitan dengan pendapatan BLU, solusi yang dapat dilakukan yakni Pelaksana BLU dapat meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusianya. Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan Provinsi membina pelaksana BLU untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU. Akhirnya, pembinaan dari Kanwil PBN Provinsi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

**Ketujuh,** Total penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari sektor properti pada Tahun 2014 mencapai Rp101,3 triliun. Dalam periode



Tahun 2008-2014, penerimaan pemerintah dari sektor properti mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 2.05 persen sampai dengan 27.2 persen dengan *trend* pertumbuhan melambat sejak tahun 2013. Sementara itu, analisis Tabel I-O nasional menunjukkan kontribusi pajak tak langsung dari sektor konstruksi terhadap output berkisar antara 1.0 persen sampai dengan 1.5 persen, dan sektor *real estate* mencapai 2.1 persen. Analisis data menunjukkan bahwa Penerimaan Pemerintah dari sektor properti baik yang berbasis penghasilan, berbasis konsumsi, maupun berbasis kepemilikan masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang bercirikan perkotaan (urban bias). Daerah perkotaan menikmati penerimaan dari sektor properti yang lebih besar utamanya dari PBB-P2 dan BPHTB, sementara di daerah pedesaan kedua jenis pajak ini belum memberikan penerimaan yang berarti. Setidaknya terdapat dua instrumen penerimaan pusat dari sektor properti yang dalam pemungutannya sangat erat kaitannya dengan peranan Pemerintah Daerah, yaitu PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan PPN KMS. Hal ini karena pertama, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai basis perhitungan PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan ditentukan oleh pemda; Kedua, PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dipungut secara bersamaan dengan BPHTB yang merupakan pajak daerah; Ketiga, Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemungutan PPN KMS menggunakan data IMB yang dikeluarkan oleh pemda. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan dari kedua instrumen dimaksud perlu dilakukan kerja sama pemungutan pajak antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan memberikan kompensasi berupa bagi hasil kepada daerah dari penerimaan tersebut.

PNBP sebagai salah satu jenis penerimaan negara dari dalam negeri, memang harus mendapat perhatian kita bersama. Usaha-usaha untuk meningkatkan PNBP ini harus terus digalakkan karena dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan PNBP ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia. Kendala/hambatan



tersebut bukan terjadi pada salah satu jenis PNBPN saja, namun dalam semua komponen PNBPN dalam APBN terdapat kendala masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan PNBPN inilah yang menjadi perhatian kita bersama untuk kita tunjang dan sukseskan sesuai bidang kita masing-masing.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang didorong berdasarkan hasil kajian ini adalah dalam rangka mendorong peran sektor properti dalam pembangunan baik secara nasional maupun di daerah, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut yakni dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pemerintah dari sektor properti, dapat kiranya dilakukan hal-hal berikut yaitu, meningkatkan peran Pemerintah Pusat maupun daerah dalam penyediaan dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, pengelolaan persampahan, drainase, serta listrik ; Mendorong pemberian insentif fiskal daerah bagi pengembang yang menyediakan rumah sederhana, sebagai contoh melalui penghapusan BPHTB untuk kepemilikan pertama rumah sederhana ; Mendorong upaya penyederhanaan perizinan kepemilikan dan pembangunan lahan ; Pemerintah perlu mendorong penurunan tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah secara terukur. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap permintaan sektor properti lebih lanjut perlu dilakukan pengkajian tersendiri; Mendorong Pemda untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas pemungutan penerimaan pemda dari sektor properti dalam batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan, di antaranya melalui yakni melakukan penyesuaian NJOP mendekati nilai pasar secara berkala; Melakukan penelusuran dan penagihan piutang PBB-P2; Menyiapkan sistem pembayaran pajak daerah secara *online*; dan Meningkatkan sosialisasi manfaat membayar pajak kepada masyarakat ; Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak-pajak di sektor properti terutama PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), antara lain dengan melakukan pertemuan dan pertukaran data secara rutin ; Mendorong

aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan transaksi properti yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor properti.

#### **d. Efektivitas Hutang Luar Negeri Indonesia**

Berdasarkan sejarah, Hutang Luar Negeri (HLN) di Indonesia sudah dilakukan sejak Orde Lama. Pada awalnya penggunaan HLN hanya sebagai dana pendamping untuk menutup kekurangan dana pembangunan yang belum dapat dipenuhi dari sumber dana domestik. Namun dalam perkembangannya HLN telah mengarah menjadi sumber dana utama ketika terjadi defisit fiskal. Sehubungan dengan keadaan tersebut, jumlah HLN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan dengan meningkatnya defisit fiskal. Adanya pembiayaan defisit anggaran menentukan tingkat suku bunga domestik dan inflasi yang pada gilirannya mempengaruhi ekspektasi nilai tukar dan kapasitas perekonomian untuk memperoleh devisa.

Pada awalnya HLN dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun perkembangan sosial politik membelokkan fungsi pelengkap dari HLN menjadi beban bagi perekonomian. Kebijakan di sektor publik langsung mempengaruhi kondisi HLN suatu negara, terutama menyangkut beban pembayaran cicilan dan bunga hutang. Beban pemerintah semakin berat apabila tingkat kepercayaan terhadap negara tersebut menurun dan hal ini menimbulkan masalah pinjaman luar negeri. Terkadang pemerintah terpaksa mengambil alih hutang swasta demi menjaga kredibilitas di mata internasional.

Kemampuan pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pembangunan semakin terbatas sejak krisis harga minyak dunia Tahun 1980-an, sehingga pemerintah melakukan sejumlah deregulasi di bidang pembangunan. Pemerintah mendorong sektor swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi pada berbagai sektor yang diizinkan. Sejalan dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tetapi tanpa

didukung oleh sumber-sumber dana investasi di dalam negeri yang memadai, telah mendorong pihak swasta melakukan pinjaman keluar negeri, baik dalam bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio.

Menurut sumbernya, pinjaman terdiri dari Hutang Dalam Negeri (HDN) dan HLN. Perhatian pada HLN lebih serius ketimbang HDN karena kemampuan pembayaran HLN dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh devisa dan akan mempengaruhi kesejahteraan nasional. Pandangan demikian membawa kekeliruan pada negara-negara berkembang terutama di belahan Amerika Latin pada dekade 1970an yang berimplikasi munculnya krisis HLN pada Tahun 1982.

Akumulasi utang luar negeri (*external debt*) merupakan suatu gejala umum yang wajar. Rendahnya tabungan dalam negeri tidak memungkinkan dilakukannya investasi secara memadai, sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus menarik dana pinjaman dan investasi dari luar negeri. Bantuan luar negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha negara yang bersangkutan guna mengurangi kendala utamanya yang berupa kekurangan devisa, serta untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Pada awalnya, HLN sangat efektif sebagai injeksi untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi kita agar tetap tinggi rata-rata di atas 7 persen pertahun. Tetapi rupanya hal tersebut membuat kita kecanduan untuk semakin tergantung pada bantuan luar negeri dari tahun ke tahun dan hingga kini. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dan swasta yang menerima modal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat.

ULN sebenarnya tidak sesederhana bila ditinjau dalam jangka panjang. Khususnya menyangkut implementasi pemanfaatannya serta evaluasinya. Meskipun dalam jangka waktu pendek berperan sebagai injeksi, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi beban ekonomi jika tidak dipergunakan secara tepat, inilah yang perlu dipertahankan seleksi pemanfaatannya yang baik.

Pembiayaan ditentukan oleh kebutuhan pemerintah, jika pembiayaan utang yang digunakan untuk investasi, maka berpengaruh lebih besar terhadap perekonomian, daripada digunakan untuk membiayai konsumsi pemerintah dan menutupi cicilan pokok pinjaman serta bunga pinjaman. Ketika kondisi ini terus berlanjut, maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya defisit anggaran pada masa yang akan datang dengan pembayaran utang ataupun pengeluaran belanja pemerintah yang lain, sehingga pemanfaatan pembiayaan tidak lagi meningkatkan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Antara Tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir di atas 7 persen. Pencapaian ini memungkinkan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Kendati begitu, krisis finansial Asia yang meletus pada akhir Tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6 persen pada Tahun 1998 dan pertumbuhan yang terbatas pada 0,3 persen pada 1999, selanjutnya antara Tahun 2000-2004, pemulihan ekonomi terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6 persen per tahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada Tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6 persen, sebuah angka yang masih mengagumkan yang termasuk tertinggi ketiga setelah Tiongkok dan India) dan memuncak pada 6,5 persen di 2011. Kendati begitu, setelah Tahun 2011 ekspansi perekonomian Indonesia mulai sangat melambat. Di antara Tahun 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dengan cukup tajam yang terus menurun persentase tiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada periode 2005-2016 terus mengalami peningkatan ini

dikarenakan seiring dengan adanya inflasi. Pada Tahun 2005 PDB Indonesia sebesar 2.774.281,1 miliar rupiah dan mencapai 12.406.809,8 miliar rupiah di Tahun 2016, dan kenaikan besar terjadi pada Tahun 2009-2010 yaitu dari 5.606.203,4 miliar rupiah menjadi 6.864.133,1 miliar rupiah dengan selisih 1.257.929,7 miliar rupiah.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi utang luar negeri Indonesia sebagian besar terdiri dari utang luar negeri swasta. Pada Tahun 2005 memang utang luar negeri sektor pemerintah dan Bank Indonesia lebih besar dari utang luar negeri sektor swasta yaitu sebesar 80,8 miliar dolar AS (59,6 persen dari total utang luar negeri), sementara utang luar negeri swasta berada pada jumlah 54,3 miliar dolar AS (40,4 persen dari total utang luar negeri). Seiring dari tahun ke tahun jumlah utang luar negeri swasta Indonesia terus meningkat, sehingga pada Tahun 2014 utang luar negeri swasta di Indonesia mencapai 163,6 miliar dolar AS (55,7 persen dari total utang luar negeri) sedangkan utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 129,7 miliar dolar AS (44,3 persen dari total utang luar negeri).

Berdasarkan jangka waktu, posisi ULN Indonesia pada Tahun 2015 meningkat akibat meningkatnya ULN jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta. Sementara itu, ULN jangka pendek di sektor publik maupun swasta mengalami penurunan di tengah perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Struktur posisi ULN tersebut menunjukkan perkembangan yang sehat sebagaimana tercermin dari dominasi posisi ULN jangka panjang dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN tersebut meningkat dari 293,4 miliar dolar AS pada Tahun 2014 menjadi 310,7 miliar dolar AS. Sejalan dengan peningkatan posisi ULN yang disertai dengan perlambatan pertumbuhan PDB, rasio posisi ULN terhadap PDB pada 2015 meningkat dari 33 persen pada 2014 menjadi 36,1 persen. Rasio tersebut masih relatif aman dan berada dalam kisaran negara *peer group*. Selain itu, seiring dengan melambatnya perekonomian Indonesia,

pertumbuhan ULN Indonesia pada Tahun 2015 melambat dari 10,4 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,8 persen.

Berdasarkan profil risikonya, ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang yang memiliki profil risiko yang relatif rendah. Selain itu, posisi ULN swasta yang berasal dari afiliasi juga cukup besar. Posisi ULN dari afiliasi tersebut relatif lebih aman karena utang yang ditarik biasanya diperoleh dari induk perusahaannya sehingga posisi utangnya lebih terjamin. Pada Desember 2015, posisi ULN swasta jangka panjang sebesar 77,7 persen dari total posisi ULN swasta. Adapun ULN swasta yang berasal dari afiliasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) tercatat sebesar 50,1 miliar dolar AS atau sebesar 33,7 persen dari total posisi ULN swasta.

Profil risiko ULN swasta paling besar berada pada utang nonbank non-afiliasi yang berjangka pendek yang porsinya pada akhir 2015 relatif kecil. Pada Desember 2015, posisi ULN korporasi nonbank non-afiliasi yang berjangka pendek tersebut sebesar 16,4 miliar dolar AS atau hanya 9,8 persen dari total ULN swasta atau hanya 5,3 persen dari total ULN. Guna memitigasi berbagai risiko seperti risiko nilai tukar, likuiditas dan beban utang yang berlebihan yang timbul dari ULN, khususnya korporasi nonbank, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 mengenai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Lebih lanjut, guna memonitor pelaksanaannya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan lanjutan dengan Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Dalam hal ini, setiap korporasi di Indonesia yang memiliki ULN dalam valuta asing sesuai yang dipersyaratkan wajib melakukan transaksi lindung nilai dengan besaran tertentu. Selain itu, korporasi tersebut juga harus menyediakan aset valuta asing yang memadai terhadap kewajiban valuta asingnya yang jatuh tempo dengan

rasio tertentu serta wajib memenuhi minimum peringkat utang sesuai ketentuan. Sampai dengan akhir Tahun 2015, implementasi Peraturan Bank Indonesia ini menunjukkan upaya penerapan prinsip kehati-hatian oleh korporasi nonbank terus meningkat sehingga risiko ULN dapat dimitigasi dengan lebih baik.

ULN Indonesia pada akhir triwulan I 2017 berada pada posisi 326,3 miliar dolar AS, tumbuh terkendali sebesar 2,9 persen (yoy) atau sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,0 persen (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, peningkatan ULN tersebut dipengaruhi oleh lebih kecilnya kontraksi pertumbuhan ULN swasta pada triwulan I 2017 yaitu sebesar -3,6 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -5,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN sektor publik tumbuh melambat dari 11,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,0 persen (yoy). Pada akhir triwulan I 2017, posisi ULN sektor publik tercatat sebesar 166,5 miliar dolar AS (51,0 persen dari total ULN), sementara posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar 159,9 miliar dolar AS (49,0 persen dari total ULN). Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir triwulan I 2017 tercatat relatif stabil di kisaran 34 persen sebagaimana pada akhir triwulan IV 2016, namun menurun jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang sebesar 37 persen.

Selama periode 2014-2017, pembiayaan hutang netto meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif Pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan dengan menekankan pada prioritas utama pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sejak Tahun 2015. Pembiayaan Hutang Netto meningkat dari Rp.353,4 trilyun di Tahun 2014 menjadi Rp.416,1 trilyun di Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen. Sedangkan pembiayaan infrastruktur meningkat dari Rp.154,7,- trilyun di Tahun 2014 menjadi Rp.387,7 trilyun di Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 35,83 persen suatu peningkatan sangat besar selama tiga tahun. Sementara pembiayaan pendidikan meningkat sebesar 54,79 persen yakni dari



Rp.31,9 trilyun pada Tahun 2017 menjadi Rp.118,3,- trilyun pada Tahun 2017. Selanjutnya, pembiayaan kesehatan meningkat dari Rp. 59,7 trilyun pada Tahun 2014 menjadi Rp.104,1 trilyun pada Tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar 20,36 persen. Sedangkan alokasi anggaran bagi perlindungan sosial meningkat dari Rp.13,1 trilyun pada Tahun 2014 menjadi Rp.157,7 trilyun pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 129,19 persen.

Selama periode 2015-2017, beberapa capaian output prioritas sektor infrastruktur terjadi pada rekonstruksi, pelebaran jalan, pembangunan jalan kecuali jalan tol. Panjang jalan bertambah dari realisasi pada Tahun 2015 sepanjang 5.229 km bertambah 2.528 km pada Tahun 2016, diperkirakan pada Tahun 2017 bertambah lagi 2.571 km. Bandara yang selesai dibangun pada Tahun 2016 mencapai 3 unit, diperkirakan pada Tahun 2017 6 bandara akan selesai dibangun. Selanjutnya, bendungan yang telah terealisasi pada Tahun 2015 dan 2016 masing-masing 29 unit dan 37 unit. Pemerintah akan menyelesaikan pada Tahun 2017 sebanyak 39 unit bendungan. Pemerintah membangun juga jalur kereta api baru. Pada Tahun 2015, Pemerintah telah menyelesaikan 85 km dan pada Tahun 2016 Pemerintah telah menambah 114,6 km rel kereta api di luar rel *Long Rapid Transportation* (LRT) di Sumatra Selatan dan Jabodetabek. Pada Tahun 2017 ini Pemerintah tengah menyelesaikan 175 km rel. Di bidang perumahan, pada Tahun 2015 Pemerintah telah merealisasikan 99,2 ribu unit pembangunan rumah, 111,2 ribu unit di Tahun 2016, serta akan menyelesaikan pembangunan rusun, rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 123,4 unit pada Tahun 2017 ini.

Capaian output prioritas pada sektor pendidikan selama periode 2015-2016 mencakup Kartu Indonesia Pintar mencapai 20,5 juta siswa pada Tahun 2015 dan 20,7 juta siswa pada Tahun 2016, beasiswa bidikmisi masing-masing sebanyak 274,5 ribu siswa dan 324 ribu siswa. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah masing-masing mencapai 21,6 ribu unit pada 2015 dan 28,4 ribu unit pada 2016.



Selain itu, Biaya Operasional Sekolah (BOS) masing-masing mencapai 7,9 juta siswa dan 8 juta siswa. Belanja pendidikan yang berasal dari sumber HLN ini bertujuan meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran pendidikan dijaga tetap stabil pada angka 20 persen sesuai amanah Undang-Undang. Di sektor kesehatan, selama periode 2015-2016, realisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masing-masing mencapai 86,4 juta jiwa dan 91,1 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5,44 persen. Selanjutnya, pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan masing-masing mencapai 3,4 juta bayi dan 4 juta bayi. Prevalensi *stunting* (kategori pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bayi usia dua tahun) masing-masing mencapai 29 persen dan 27,5 persen. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas masing-masing mencapai 77 persen dan 81,5 persen. Alokasi anggaran kesehatan dijaga sebesar 5 persen terhadap APBN untuk meningkatkan *supply side* dan layanan serta menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian output prioritas di sektor perlindungan sosial selama periode 2012-2017 yakni program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Program-program tersebut mencakup CCT/PKH yang meningkat anggarannya dari Rp.1,83 trilyun menjadi Rp.11,34 trilyun, Jamkes/KIS naik dari Rp.5,62 trilyun menjadi Rp.25,50,- trilyun, Bantuan Siswa Miskin (BSM) meningkat dari Rp.4,64,- trilyun menjadi Rp.14,21 trilyun, serta BOS meningkat dari Rp.3,96 menjadi Rp.8,07 trilyun. Selain itu, belanja infrastruktur melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 10 persen dari total APBN periode 2015-2017.

#### **e. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas**

APBN Tahun 2017 disusun berdasarkan asumsi laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen, inflasi terkendali pada angka 4,0 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan mencapai 5,3 persen, kurs

diperkirakan terkendali pada Rp.13.300,- per dolar US, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai US\$45 per barel, lifting atau kebutuhan per hari minyak Indonesia diperkirakan akan mencapai 815 ribu barel, serta lifting gas diperkirakan mencapai 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan keterkaitan program-program pembangunan lintas penguasa dan lintas wilayah yuridiksi, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan payung hukum. Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBN dan APBD harus selaras agar tercapai pembangunan nasional berbarengan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Baik tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah tidak terpisah satu sama lain. Pentingnya peran APBN dalam perekonomian daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi pengelolaan Keuangan Negara ini mencakup keseluruhan aspek seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara ini meletakkan profesionalisme dan berusaha menghapus masalah korupsi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penyusunan APBN menggunakan format anggaran terpadu (*unified budget*) yakni alokasi anggaran berdasarkan pada program Kementrian/Lembaga. Format anggaran terpadu ini meniadakan pengelompokan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan sebagaimana dalam sistem *dual budgeting* di mana alokasi anggaran didasarkan pada sektor dan sub sektor. Perubahan ini sepatutnya memberikan kreativitas Aparat Sipil Negara (ASN) di bidang perencanaan pada K/L dan di daerah untuk menyesuaikan *money follow program* berbasis pada pencapaian misi

pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih seperti termaktub dalam bab VIII RPJMN dan dan Gubernur/Wagub dan Bupati/Wabup-Walikota/Wakil Walikota terpilih juga seperti termaktub dalam juga dalam bab VIII RPJMD. Sayangnya, transformasi *money follow function* menjadi *money follow program* ini terutama di daerah tidak serta merta diikuti oleh ASN di daerah karena akan menciptakan “anti kemapanan” yang sudah bertahun-tahun dinikmati oleh ASN di daerah melalui berbagai kegiatan dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja OPD. Konsekuensinya, belanja di daerah baik Belanja Pemerintah Pusat maupun belanja Pemerintah Daerah lebih dominan diarahkan pada belanja yang hanya menciptakan kesejahteraan ASN ketimbang belanja publik yang menciptakan *multiplier effect* pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari indikasi besarnya belanja aparatur yang mencapai di atas 70 persen ketimbang belanja publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar yang dapat menimbulkan dampak ganda pada penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses pasar dan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga payung hukum tersebut juga memberikan dasar yuridis formal secara signifikan berupa penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan penyerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*). Ketiga undang-undang ini juga menerapkan disiplin fiskal baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Defisit anggaran Pemerintah Pusat dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan jumlah hutang maksimal 60 persen dari PDB. Aturan yang sama berlaku bagi Pemerintah Daerah. Disiplin fiskal ini sepatutnya dimulai dari pemimpin tertinggi di daerah agar pemborosan anggaran dapat diminimalisir.

#### **f. Kemiskinan**

Berdasarkan data BPS (2018), pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di

bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Jika dirunut lebih dalam, salah satu penyebab utama penurunan angka kemiskinan adalah intervensi pemerintah dalam bentuk lonjakan dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Hingga akhir kuartal I 2018, penyaluran bansos naik signifikan hingga 87,6 persen. Penyaluran ini pun bertepatan dengan dilaksanakannya survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2018 yang menjadi sumber penghitungan angka kemiskinan saat ini. Pengamat menilai penurunan

angka kemiskinan itu semu dan temporer. Sebab, ada lonjakan bansos, yang penyalurannya dilakukan sebelum survei BPS sehingga jika anggaran bansos dikurangi, maka jumlah orang miskin terancam naik lagi.

Jika melihat postur APBN, anggaran bansos tahun ini mencapai Rp 78,2 triliun atau naik 41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya juga paling tinggi pada masa pemerintahan Jokowi. Tahun 2016, alokasi dana bansos hanya sebesar Rp 49,61 triliun. Kenaikan alokasi bansos menjelang masa Pilpres sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Selama dua periode pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal serupa yakni pada 2008-2009 dan 2013-2014. Pada 2009, dana bansos naik 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2013, alokasinya naik 21 persen. Intervensi pemerintah juga terlihat dari indikator laju inflasi. Pada Juni 2018, inflasi tercatat sebesar 0,59 persen dan 1,9 persen sepanjang tahun kalender (Januari-Juni 2018). Sedangkan inflasi tahun ke tahun (Juni 2018 dibanding Juni 2017/YoY) mencapai 3,12 persen.

#### **g. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Indonesia terus berusaha mengembangkan sektor pertaniannya dengan potensi yang dimilikinya. Setelah kinerja tahun lalu yang dapat dibilang sangat bagus, tahun ini Indonesia masih terus berusaha untuk mencapai target-target pengembangan sektor pertaniannya. Banyak langkah dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan dijalankan di Tahun 2018 ini. Kementerian Pertanian sebagai pusat dan ujung tombak dalam pembuatan kebijakan pertanian di Indonesia terus berusaha dalam melakukan inovasi dan pengembangan kinerja guna meningkatkan kualitas sektor pertanian dalam negeri. Isu strategis terkait ketahanan pangan nasional meliputi:

### **g.1. Pengembangan 4 Komoditas Pertanian**

Setelah suksesnya swasembada produk pertanian seperti beras, bawang merah, cabai dan jagung, tahun ini Kementerian Pertanian akan lebih fokus untuk mengembangkan rempah-rempah, bawang putih, gula, dan kedelai. Kementerian menilai jika produk-produk tersebut dapat berkembang, maka komoditas strategis lain juga akan ikut berkembang. Langkah yang akan diambil adalah meminta pemerintah provinsi untuk mengembalikan luas tanam yang luasnya lebih rendah dibanding luas tanam tahun lalu.

### **g.2. Revitalisasi KRPL dan TTIC**

KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) juga akan menjadi fokus pengembangan pemerintah tahun ini. KRPL sebenarnya sudah berjalan cukup lama, namun sempat terhenti dan tidak berjalan maksimal. Tahun ini jumlah KPRL akan ditambah dan dikembangkan. Indonesia memiliki lahan pekarangan sekitar 10,4 juta hektar. Sejak 2010 hingga saat ini ada 18.000 titik lokasi KPRL dan akan ditingkatkan hingga 23.000 titik di Tahun 2018. KPRL akan sangat membantu ekonomi rumah tangga di sekitar lokasi karena akan menghemat pengeluaran biaya 750.000 hingga 1,2 juta rupiah, di setiap rumah tangganya.

Untuk TTIC (Toko Tani Indonesia Center), BKP (Badan Ketahanan Pangan) akan *me-launching* TTIC Digital (*e-commerce*) yang dimana nantinya berfungsi sebagai distributor TTI. Sampai akhir tahun 2017, sudah dibangun 1.800 unit TTI dan target di Tahun 2018 sudah ada 3000 unit TTI di daerah penyangga pasar. Fungsi TTIC nantinya sebagai koordinator distributor kebutuhan komoditi TTI yang akan bekerjasama dengan gapoktan sebagai produsen kebutuhan komoditi TTI.

### **g.3. Mengangkat Kesejahteraan Petani**

Dalam rakernas Kementerian Pertanian awal Tahun 2018, sudah dibahas bagaimana program-program yang mampu menyentuh langsung para petani dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya adalah dengan mekanisasi pertanian untuk mendorong produksi

komoditas strategis Indonesia. Petani yang kurang mampu akan diberi alsintan gratis untuk usahatannya. Selain itu, kementerian juga akan melanjutkan dan mengembangkan bentuk kerja sama dengan TNI AD yang bernama Satgas Pangan yang berfungsi untuk penegakan hukum di bidang pangan, pemberian binaan, dan tindakan pencegahan pelanggaran. Sejak Mei 2017, Satgas Pangan sudah berhasil menangani 169 kasus dengan 185 tersangka untuk pelanggaran komoditas beras, bawang, cabai, minyak goreng, sampai tepung terigu. Langkah ini diharapkan akan mampu lebih melindungi petani-petani Indonesia.

#### **g.4. Regenerasi Petani**

Jumlah dan kualitas petani sebagai sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, tahun ini kementerian juga akan berfokus dalam regenerasi petani dengan cara melakukan transformasi pendidikan pendidikan tinggi pertanian yang semula program studinya hanya penyuluhan, ditambah dengan harus berorientasi agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, dan mekanisasi pertanian. Untuk pembinaan lebih lanjut, penyuluh dan pendamping pertanian dari mahasiswa juga diharapkan mampu terjun langsung ke masyarakat. Perguruan tinggi pertanian di Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

#### **g.5. Produksi Benih**

Kementerian Pertanian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 akan memprioritaskan program perbenihan. Pihak kementerian sudah mengalokasikan dana sebesar 2,1 triliun rupiah untuk program perbenihan ini di sektor hortikultura dan perkebunan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memproduksi benih-benih unggul yang diberikan secara gratis kepada para petani. Hasil yang berkualitas unggul nantinya diharapkan mampu menambah kuantitas produk ekspor Indonesia.



### **g.6. Pola produksi dan konsumsi**

Secara historis, konsumsi beras/kapita/tahun sebesar 139,15 kg Tahun 2009 termasuk yang sangat tinggi di dunia. Bahkan menurut USDA, pada 2006 konsumsi beras penduduk Indonesia 160,8 kg/kapita/tahun. Angka-angka konsumsi yang lain seperti Siswono (2006) sebesar 125-130 kg dan konsumsi rumah tangga 105-110 kg, mungkin belum menggambarkan angka konsumsi menyeluruh karena mengabaikan konsumsi beras di restoran, rumah makan, warung, acara-acara pesta, kongres, seminar, lokakarya, dan sebagainya yang secara kuantitas cukup signifikan. Berdasarkan data Kementan, hingga Tahun 2017 tren konsumsi beras nasional terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, konsumsi beras di Indonesia mencapai 130 kilogram per kapita per tahun, dan Tahun 2014 mencapai 124 kilogram per kapita per tahun, kemudian Tahun 2017 mencapai 111,58 kilogram per kapita per tahun. Kendati demikian, angka tersebut masih jauh di atas konsumsi negara-negara Asia, seperti Korea Selatan 40 kilogram per kapita per tahun, Jepang 50 kilogram per kapita per tahun, Malaysia 80 kilogram per kapita per tahun, dan Thailand 70 kilogram per kapita per tahun, serta rata-rata dunia 60 kg/kapita/tahun dan ASEAN 60-80 kg/kapita/tahun. Kementerian Pertanian menargetkan angka konsumsi beras nasional berada pada posisi 90 kilogram per kapita per tahun dari 117 kilogram per kapita per tahun pada 2017. Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menyebutkan bahwa konsumsi beras per kapita per Maret 2015 adalah sebesar 98 kilogram per tahun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 97,2 kg per tahun.

Konsumsi per kapita ini dinilai berdasarkan aneka masakan yang mengandung beras mencakup konsumsi beras dalam bentuk nasi, beras ketan, tepung beras, dan konsumsi padi-padian lainnya. Selain itu, kelompok bahan makanan mengandung beras lain yang ikut diperhitungkan adalah bihun, bubur bayi kemasan, kue basah, nasi rames, nasi goreng, nasi putih, dan lontong sayur. Beberapa program



yang dilakukan, salah satunya diversifikasi pangan pada lahan-lahan yang tidak akan menciptakan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas padi, jagung, dan kedelai. Program diversifikasi pangan akan mengoptimalkan lahan pekarangan yang akan diintegrasikan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Potensi lahan pekarangan Indonesia sekitar 10,4 juta hektar di luar lahan program PAJALE, bisa menggunakan *polybag* sebagai media tanam. Adapun komoditas yang akan dikembangkan mulai dari sagu, gembili, ganyong, garut, dan singkong.

Tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras memberikan resiko yang tinggi terhadap penyediaannya karena peningkatan konsumsi akibat pertambahan penduduk akan terus terjadi. Peningkatan konsumsi ini semakin sulit diimbangi oleh peningkatan produksi yang cenderung stagnan karena penurunan produktivitas usaha tani akibat kondisi tanah yang semakin marginal disebabkan kurangnya upaya konservasi dan konversi lahan sawah untuk keperluan lain. Di samping itu, proporsi asupan karbohidrat yang terlalu didominasi padi-padian (lebih dari 50 persen) membuat kualitas gizi kurang baik dan tidak kondusif terhadap kesehatan.

#### **h. Perubahan Iklim**

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data

dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak Tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha di antaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha di antaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di samping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

Selain itu, Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan macam bencana alam lainnya. Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma bagi

masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untuk antisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana menjadi penting.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sering terdampak bencana alam paling besar. Bencana alam tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan bendung, dam, jaringan irigasi, jalan usahatani, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pangan. Naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim, tidak kurang dari 50 persen wilayah pertanian di Indonesia menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju, sehingga musim tanam menjadi pendek. Kondisi ini akan sangat berdampak buruk terhadap intensitas tanam jika tidak ada terobosan inovasi dan teknologi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Salah satu inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian adalah varietas unggul berumur genjah dan sangat genjah serta inovasi teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman pendukungnya.

#### **i. Sumberdaya Kelautan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekarang dinakhodai ibu Susi Pudjiastuti telah melakukan gebrakan-gebrakan dengan memberantas praktik IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) *Fishing*. Hal itu mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi di bidang Kelautan dan perikanan. Indonesia mampu memiliki nilai tawar (Bargaining Position) yang kuat di mata bangsa lain, khususnya yang selama ini menginjak-injak martabat dan ekonomi bangsa dengan menggerogoti kekayaan nasional di sektor kelautan dan

perikanan, hal ini adalah prestasi besar. *Blue Print* kelautan dan perikanan sedang dicetak, tetapi kita tidak dapat menutup mata dengan beragam permasalahan yang masih nampak di depan mata kita yakni permasalahan kesejahteraan nelayan dan para pelaku usaha perikanan kasta terendah, sejak Indonesia merdeka ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dikuasai oleh para pemegang modal, Kapitalis yang mampu mempermainkan kondisi perputaran uang di sektor kelautan dan perikanan, dimulai dari semakin meraja lelaya para tengkulak yang semakin mencekik nelayan.

Melihat dari sisi perikanan tangkap nelayan kita ibarat sapi perah para pemodal besar, nelayan tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil ikan yang mereka tangkap, karena kapal, biaya Bahan bakar dan logistik disediakan oleh sang Tengkulak dengan sistem yang diatur sesuai kehendak para tengkulak atau pemodal-pemodal besar sehingga para nelayan tak ubahnya kerja untuk para tengkulak sehingga pendapatan mereka jauh dari harapan dan nilai ideal sebuah usaha perikanan. Tengkulak atau pemain pasar di industri tangkap dapat menjelma dalam bentuk juragan-juragan kapal, atau pemilik industri perikanan yang memodali para nelayan untuk menyediakan bahan baku produksi usahanya.

Para tengkulak tidak hanya menguasai sistem perputaran uang usaha perikanan di suatu daerah yang imbasnya sangat merugikan nelayan, tetapi juga sering bermain curang dalam hal pelaporan hasil tangkapan, laporan hasil tangkapan yang dilaporkan ke pemerintah tidak sesuai dengan hasil tangkapan sebenarnya, banyak praktik para tengkulak mendatangi langsung para petugas dengan memberi imbalan serta pelaporan yang sudah disesuaikan dengan keinginan tengkulak tersebut, bahkan kapal-kapal nelayan banyak yang tidak bongkar hasil tangkapan di Tempat pelelangan ikan (TPI), tetapi langsung di perusahaan mereka. Hal itu semua berdampak pada pendapatan retribusi negara dari Industri perikanan tangkap serta tidak validnya data produksi perikanan tangkap pemerintah.

Dari sektor Industri pengolahan perikanan, masih banyak kita jumpai pabrik-pabrik atau Unit pengolahan ikan (UPI) yang mengesampingkan AMDAL, masih banyak pelaku usaha yang tidak memasang Instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang standar sehingga limbah industri yang pada umumnya dibuang di laut mengotori laut. Hal ini berimbas pada rusaknya ekosistem perairan di sekitar kawasan industri pengolahan ikan tersebut. Di sisi lain, banyak pengusaha yang tidak menerapkan sistem upah minimum bagi para buruh pabrik perikanan. Kita dapat mengambil contoh di kawasan Industri perikanan Muncar Banyuwangi semua hal tersebut di atas dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. Kawasan pabrik yang berbaur dengan pemukiman penduduk, sungai-sungai yang sudah tercemar oleh limbah pabrik mengalir ke pantai Muncar. Banyak perusahaan yang telah mendapat catatan hitam (Black List), tetapi masih beroperasi hingga saat ini.

Di sektor budidaya perikanan, pembukaan lahan untuk budidaya yang tidak memperhatikan dampak ekosistem dan lingkungan setempat marak terjadi, sehingga usaha budidaya liar yang merusak lingkungan terdapat di mana-mana, banyak lahan budidaya masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya baik ikan maupun udang yang baik. Tidak sedikit juga usaha budidaya skala besar dengan korporasi besar yang mengesampingkan dampak lingkungan tersebut.

Faktor keberpihakan pemerintah masih menjadi sesuatu yang sentral bagi penyebab kemiskinan nelayan. Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pemerintahlah yang ditunggu dan diharapkan oleh para nelayan. Kebijakan Bahan bakar solar yang sangat dibutuhkan bagi para nelayan, masih jauh dari ekspektasi para nelayan.

Termasuk harga yang terlalu mahal, ketersediaan yang terbatas, dan lemahnya pengawasan terhadap penyelewengan distribusi BBM bagi nelayan. Hal ini membuat nelayan kebingungan dalam memikirkan bagaimana langkah ke depannya sehingga tengkulaklah yang mengambil keuntungan dari permasalahan ini.

Lalu permasalahan yang terpenting dan tak disadari perannya ialah kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan dan kelautan Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan seperti, konsumsi ikan yang belum menempati peringkat teratas masyarakat Indonesia. Masyarakat belum menyadari bahwa kandungan hasil laut memiliki gizi yang tinggi. Kita dapat mencontoh pada Jepang yang masyarakatnya sangat menyukai makanan laut, sehingga Jepang dapat sangat maju. Contoh yang kedua ialah dapat terlihat dari minat masyarakat untuk mempelajari ilmu perikanan dan kelautan yang belum menjadi prioritas utama. *Passing grade* jurusan Kelautan dan Perikanan di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia masih menempati posisi pertengahan.

Permasalahan-permasalahan di atas adalah permasalahan dalam porto folio Kelautan dan Perikanan yang harus segera diselesaikan, karena indikator keberhasilan sebuah program pemerintah adalah seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah strategis dan cepat yang harus segera dilaksanakan adalah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah harus meninjau ulang Subsidi BBM untuk nelayan, serta memastikan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan nelayan, pemerintah harus segera bertindak terhadap praktik-praktik penyelewengan terhadap program subsidi BBM untuk nelayan. Praktek-praktik tersebut harus segera diakhiri agar ada kepastian bagi para nelayan;
2. Pemerintah harus memperkuat permodalan nelayan, Pembudidaya ikan skala kecil, dan para pelaku usaha kecil di bidang kelautan dan perikanan dengan memperkuat kelembagaan, Induk Koperasi Perikanan (INKA MINA) harus dihidupkan kembali, dengan sistem dan manajemen yang baru sehingga praktik-praktik memperkaya diri sendiri bagi pengurus koperasi dapat hilang, sehingga koperasi dapat

benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka pos-pos permodalan yang terjangkau untuk masyarakat perikanan seperti KUR untuk nelayan dan sebagainya;

3. Jika Koperasi perikanan yang sehat sudah berjalan dengan baik, maka bantuan-bantuan pemerintah dalam bentuk Kapal, alat tangkap, sarana budidaya ikan, dan permodalan dapat melalui lembaga tersebut, karena praktik di lapangan selama ini banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, banyak kelompok-kelompok usaha nelayan fiktif yang dibuat hanya untuk mencairkan dana bantuan pemerintah;
4. Pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam bidang usaha perikanan harus lebih tepat sasaran, tidak hanya sebatas upaya menghabiskan anggaran, tetapi minim hasil, pelatihan usaha mikro dan kecil (UMKM) bidang perikanan harus dititik beratkan pada kemampuan masyarakat untuk berusaha dan bersaing di pasar. Pelatihan dan pendampingan Budidaya di laut (marinculture) seperti Keramba Jaring Apung (KJA) harus digalakkan khususnya wilayah kepulauan yang memiliki perairan yang berpotensi untuk usaha tersebut;
5. Memperketat sistem pencatatan hasil tangkapan kapal – kapal nelayan, dan mewajibkan kapal – kapal penangkap ikan untuk bongkar muat di pelabuhan perikanan, memperkuat sistem pelelangan ikan, memangkas praktek- praktek permainan harga tengkulak di pelabuhan perikanan hal ini untuk akurasi data hasil tangkapan, serta memperkuat nilai jual hasil tangkapan nelayan;
6. Mengevaluasi semua Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan usaha budidaya perikanan, jika ada yang melanggar dengan tidak menggunakan IPAL atau tidak memerhatikan dampak lingkungan akibat proses produksi pengolahan ikan, maka pelaku usaha harus ditindak, dan ditutup jika tidak menggunakan Instalasi pengolahan limbah;

7. Pemerintah dapat melibatkan semua elemen termasuk institusi pendidikan, organisasi kemahasiswaan dalam rangka pendampingan masyarakat yang menitik beratkan pada pendampingan pengembangan usaha perikanan berbasis masyarakat di berbagai lini usaha, pendampingan dalam rangka pengawasan di bidang perikanan.

Pemerintah mengevaluasi kembali dana-dana bantuan dalam berbagai bentuk program di sektor kelautan dan perikanan, karena banyak ditemukan praktek bantuan tidak tepat sasaran, obyek pendanaan fiktif, menguntungkan pihak tertentu, tak sedikit yang hanya dimanfaatkan untuk pencitraan politik oknum-oknum tertentu.

#### **j. Ekosistem Daratan, Hutan, Degradasi lahan, dan Keanekaragaman Hayati**

Upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan kinerja kerja dengan menguatkan isu-isu kebijakan alokasi sumber daya hutan dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar fungsi-fungsi hutan dapat mendukung rencana pembangunan pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, tentu juga harus dapat memberikan keseimbangan produksi hutan kita. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam mengevaluasi kinerja yakni perizinan yang berada di dalam kawasan hutan baik itu hutan lindung, hutan konversi dan lainnya. Dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Tahun 2016 ini, KLHK juga berencana akan melakukan terobosan dengan mengganti beberapa regulasi.

Terkait dengan pengendalian perubahan iklim, setelah hasil konferensi perubahan iklim di Paris menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan *Paris Agreement* (Kesepakatan Paris), KLHK menyatakan akan sangat fokus bagaimana melakukan pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena kebakaran tersebut telah menyumbang banyak sekali emisi karbon bagi dunia. Selain itu,



membahas konservasi tentang bagaimana konservasi ke depan dapat memfasilitasi kehidupan masyarakat yang ada dan tetap mendukung pembangunan berskala nasional. Kebijakan KLHK ke depan, lanjutnya, fungsi hutan lindung dan konservasi akan diperkuat dengan pola pikir dan kesiapan mental para pejabat KLHK. KLHK tidak akan lagi melakukan pemberian izin tanpa memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, izin lingkungan dan juga tata ruang.

Isu lain terkait dengan lingkungan adalah penguasaan dan konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Terdapat perusahaan kelapa sawit yang menguasai konsesi 2,6 juta Ha lahan. Grup Sinarmas merupakan salah satu usaha dengan penguasaan lahan terbesar, dengan sektor usaha meliputi sawit, hutan dan tambang. Untuk menguasai sektor kehutanan, Sinar mas membangun Asia Pulp and Paper yang berdomisili di Singapura dan Indah Kiat Pulp and Paper, sebagai industri kertas di Indonesia. Beberapa kasus yang melibatkan perusahaan seperti Beberapa perusahaan dalam grup APP (Arara Abadi) pernah terkait dengan kasus korupsi di Provinsi Riau yang melibatkan suap kepada Gubernur Tengku Azmun Jaafar. Tahun 2015, kebakaran hutan melanda 86 ribu hektar tanaman Akasia di dalam konsesinya. Keterbatasan penanaman yang dilakukan APP, membuat industri kayu Sinarmas tersebut terindikasi menggunakan kayu hutan alam. IKPP pernah melakukan wanprestasi terbesar, dengan gagal bayar. Dengan penguasaan lahan yang luas, laporan perusahaan menyebutkan pembayaran pajaknya sepanjang 2004-2014 hanya mencapai 42 juta dolar.

#### **4.2.3. Isu Strategis Regional Sulawesi**

Pada sub ba 4.2.3 diuraikan beberapa isu strategis regional Sulawesi meliputi Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral, Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Sumberdaya Air dan Irigasi.

### **a. Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional. Pertanian pangan menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi. Terdapat kawasan potensial untuk pengembangan pangan di wilayah Sulawesi, yaitu Kawasan BOSOWASIPI (Bone-Soppeng-Wajo-Siderap-Pinrang di Sulawesi Selatan, dengan luas areal 116 847 hektar sawah dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padipadi-padi. Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan produksi pangan yang paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan. Produktivitas padi di Sulawesi masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao (biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing internasional; dan mengembangkan industri kakao yang mampu memberi peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha kakao. Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 838.037 ha atau 58 persen dari total luas lahan di Indonesia. Sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh petani (96 persen). Namun demikian, pengembangan kakao di Pulau Sulawesi menghadapi tantangan berupa kendala produksi, teknologi, kebijakan dan infrastruktur. Kurang tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menyebabkan pula kehilangan peluang pasar sebesar 600 ribu ton yang setara dengan USD 360 juta.

Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Koridor Ekonomi Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan

bahwa sektor perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sulawesi. Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor pertanian pangan (70 persen tangkapan dan 30 persen budidaya) di mana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Potensi pengembangan perikanan terus berkembang secara signifikan karena sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat.

#### **b. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral**

Pengembangan wilayah Pulau Sulawesi, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah timur Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur, khususnya Philipina yang menjadi salah satu lintasan perekonomian dunia. Wilayah Pulau Sulawesi berada pada posisi strategis nasional karena dari arah utara sampai timur pulau ini dilintasi oleh lautan Pasifik yang merupakan alur laut terbuka bagi pelayaran dari Laut Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Sementara Pulau Sulawesi bagian selatan terdapat wilayah kelautan Makassar-Buton yang juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, dan Amerika Bagian Selatan. Dengan demikian, Wilayah Pulau Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sulawesi memiliki akses perdagangan paling strategis sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Wilayah Pulau Sulawesi juga memiliki letak geografis dan hubungan interaksi yang kuat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah adalah: (1) Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; (2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; (3) Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan (4) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkembang di Pulau Sulawesi namun menghadapi tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam. Hal ini menyebabkan tingkat kesulitan teknis yang tinggi yang berujung pada tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi. Potensi minyak bumi Koridor Ekonomi Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan minyak bumi Indonesia, atau hanya 0,64 persen dari total cadangan Indonesia. Sedangkan potensi gas bumi Koridor Ekonomi Sulawesi juga relatif tidak besar dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 4,23 TSCF dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia, atau hanya 2,69 persen dari total cadangan Indonesia. Kegiatan ekonomi utama migas di Koridor Ekonomi Sulawesi akan terpusat pada beberapa lokasi berikut: (1) Area eksploitasi gas bumi di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (2) Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (3) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (4) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan (5) Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat.

### **c. Lingkungan dan Mitigasi Bencana**

Salah satu isu strategis di wilayah Pulau Sulawesi adalah meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Sementara itu, luas lahan kritis di seluruh wilayah Sulawesi mencapai areal sekitar 6,22 juta hektar atau 33 persen luas daratan, yang meliputi sangat kritis 3,62 juta hektar, lahan kritis 1,71 juta hektar dan agak kritis 0,89 juta hektar (lihat Tabel 2.22). Dibandingkan dengan wilayah pulau lainnya, lahan kritis di wilayah Pulau Sulawesi termasuk tinggi. Luas lahan kritis yang terbesar di wilayah Pulau Sulawesi Tenggara, mencapai 2,80 juta hektar atau 60 persen luas daratan dan Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat, mencapai 1,57 juta hektar atau 25,4 persen wilayah daratan.

Wilayah Sulawesi mempunyai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Adapun pusat pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Gorontalo, Palu dan Makassar; (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Isimu-Gorontalo, Tilamuta-Boalemo, Luwuk-Banggai dan lain-lain. Potensi bencana di wilayah regional Sulawesi meliputi Likwifaksi, Gempa, Banjir dan Tsunami (LGBT), serta longsor dan gunung berapi.

Dari aspek kegempaan, sistem patahan di bagian tengah Sulawesi dimana Kota Palu terdapat terdiri dari kompleks zona patahan yang berletak dalam pertemuan lempeng Pasifik, Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dari perhitungan terhadap pergerakan patahan Palu-Koro ini (Bellier, O. et al, 2001), diperoleh data kisaran pergerakan lempeng, yaitu  $35 \pm 8$  mm per tahun. Sejarah gempa bumi di bagian tengah Sulawesi telah tercatat sejak abad ke-19, di mana beberapa di antaranya mempunyai magnitude yang besar, di antaranya Tahun 1968 (6,7 SR), 1993 (5,8 SR), 2005 (6,2 SR) dan 2018 (7,4 SR). Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami (gelombang laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti deformasi bawah laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera dan di pantai utara Papua. Sementara itu, letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang seperti yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau. Kegempaan di Sulawesi ini juga ditandai dengan frekuensi yang tinggi tsunami di bagian Selat Makassar, sebagaimana yang terjadi pada Tahun 1927 di Teluk Palu dengan ketinggian gelombang mencapai 15 m, Tahun 1968 di Mepaga (10 m) dan Tahun 1996 di Simuntu-Pangalaseang (1 - 3,4 m), terakhir tanggal 28 Oktober 2018 gempa bumi di patahan sesar Palu-Koro juga diikuti oleh tsunami dan liquifaksi. Jalur patahan yang melalui bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat berada di bagian tengah yang membelah Kota Palu bagian timur dan barat. Bencana alam bersifat geologi yang terjadi di Sulawesi Tengah sangat terkait dengan kondisi dan proses-proses geologi yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Termasuk di antaranya adalah patahan aktif Palu-Koro, patahan Matano melewati wilayah Kabupaten Morowali dan patahan Sorong yang mendorong bagian timur Sulawesi. Bentuk topografi dan kerawanan longsor pada banyak kawasan serta ruas-ruas jalan strategis di wilayah ini sangat terkait dengan struktur material yang rapuh serta dapat dipicu oleh kegempaan.

Tantangan yang akan dihadapi wilayah Sulawesi adalah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan lokal. Tantangan ini tidak hanya menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai dan gaya hidup. Tantangan hanya dapat diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing. Upaya menjawab berbagai tantangan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya dalam peningkatan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi rakyat; penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Rekayasa, pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman juga menjadi tantangan wilayah Sulawesi. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing wilayah Sulawesi menjadi kian penting dan mendesak.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah kinerja yang masih belum optimal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Indonesia belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material



yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat. Tanggap darurat bencana seringkali berlangsung dengan agak tidak teratur, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal. Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Isu lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah orientasi kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia yang pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Tampaknya pemahaman dan kesadaran bahwa risiko bencana dapat dikurangi melalui intervensi-intervensi pembangunan masih minim. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang telah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko



bencana. Hal lain yang tampak mencolok dari berbagai kejadian bencana adalah masih dominannya peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar komunitas dalam situasi darurat bencana. Dalam banyak kejadian bencana terakhir di Indonesia belum terlihat adanya kiprah yang signifikan dari tim-tim siaga bencana komunitas. Pemberitaan media biasanya didominasi oleh kisah tim-tim reaksi cepat dari berbagai instansi pemerintah, termasuk yang paling dominan biasanya dari angkatan bersenjata, dan pihak swasta. Mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tidak semuanya mudah dijangkau, penting untuk mengembangkan tim-tim siaga bencana di tingkat masyarakat, karena masyarakatlah yang pertama-tama berhadapan dengan bencana dan dampak-dampak negatifnya. Jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana akan dapat dikurangi secara signifikan dengan adanya masyarakat dan Pemerintah Daerah yang tangguh dan siaga bencana. Ketangguhan dan kesiapsiagaan ini dapat dicapai melalui gladi-gladi dan simulasi bencana di tingkat komunitas yang dilaksanakan secara rutin dan teratur. Isu lain yang masih dihadapi adalah kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi. Banyak daerah yang menghadapi ancaman alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api, yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa, belum memiliki data dan informasi terinci tentang ancaman yang mereka hadapi berikut tingkat intensitasnya yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Informasi semacam ini sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, untuk menyusun upaya-upaya pengurangan risiko yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Diperlukan adanya upaya melibatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian-penelitian, ilmu dan teknologi kebencanaan. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana, siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi

kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan. Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi, sehingga terjadi tumpang tindih produk yang berbeda satu dengan yang lain yang malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

#### **d. Sumberdaya Air dan Irigasi**

Indonesia memiliki enam persen dari persediaan air dunia atau sekitar 21 persen dari persediaan air Asia Pasifik terutama yang bersumber dari danau, waduk dan sungai. Berikut kondisi sumberdaya air dan irigasi di Wilayah Pulau Sulawesi.

Sesuai dengan daur hidrologis, air hujan sebagian akan mengisi danau dan situ baik secara langsung atau tidak langsung seperti melalui mata air dan aliran sungai. Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 500 danau yang tersebar dari dataran rendah hingga puncak gunung. Dari sekian banyak danau tersebut, terdapat tiga danau utama di Sulawesi yaitu Danau Tondano di Sulawesi Utara dengan luas 4638 hektar, Danau Limboto di Gorontalo dengan luas sekitar 3500 hektar dan Danau Tempe, Towuti dan Matana di Sulawesi Selatan dengan luas masing-masing 10200, 50000 dan 14600 hektar serta Danau Poso dan Lindu di Sulawesi Tengah. Masing-masing 32300 dan 3150 hektar. Danau tersebut selain berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tata air juga berfungsi sebagai sumber air irigasi pesawahan.

Sebagian air hujan juga akan masuk ke cekungan air tanah yang potensinya tinggi yang kemudian dikembangkan sebagai waduk penampung air. Waduk yang utama di wilayah Pulau Sulawesi adalah waduk Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Hasil pemantauan volume beberapa waduk utama di Indonesia, menunjukkan bahwa volume air permukaan waduk pada musim kemarau. Persentase penurunan volume waduk selama musim kemarau mengindikasikan adanya kerusakan fungsi

resapan air di bagian hulu. Untuk waduk Bili-Bili, volume air terendah pada bulan September sampai dengan November yaitu sekitar 30 -60 juta m<sup>3</sup> dan volume tertinggi pada bulan Februari sampai dengan Mei, yaitu sekitar 260 – 310 juta m<sup>3</sup>. Air hujan juga akan mengalir ke sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Sulawesi. Jumlah sungai di wilayah Pulau Sulawesi sangat banyak, namun hanya terdapat 10 sungai yang luas daerah pengalirannya lebih dari 1000 km<sup>2</sup>.

#### **4.2.4. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah**

Pada sub bab 4.2.4 isu strategis Sulteng meliputi isu kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis, Pengelolaan Sumberdaya Maritim Yang Optimal, Lingkungan dan Mitigasi Bencana:

##### **a. Kemiskinan**

Berdasarkan data BPS (2018), pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai 420,21 ribu orang (14,01 persen), berkurang sebesar 3,06 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 423,27 ribu orang (14,22 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,39 persen turun menjadi 10,15 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 15,59 persen turun menjadi 15,51 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017– Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,47 ribu orang (dari 81,56 ribu orang pada September 2017 menjadi 85,03 ribu orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 341,72 ribu orang pada September 2017 menjadi 335,18 ribu orang pada Maret 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan

Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 75,69 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 76,16 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan di Sulawesi Tengah diharapkan dapat ditingkatkan terutama pada daerah pedesaan. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat menurun seiring dengan adanya peningkatan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Sulawesi Tengah pada 2016 yang meningkat Rp610 miliar sehingga total ADD 2016 mencapai Rp 1,12 triliun. Alokasi ADD juga diharapkan mendorong proses pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat ekonomi di daerah pedesaan. Dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah juga pernah melakukan Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) dan melaksanakan program nasional dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta PKH dan Rastra yang berlangsung hingga kini. Kebijakan tersebut tidak meningkatkan pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan pemberdayaan dan kualitas sumberdaya manusia. Bentuk lain program penanggulangan kemiskinan di provinsi ini adalah program beras untuk warga sejahtera (wastra) yang realisasinya mencapai 100 persen. Namun demikian, program-program yang diberikan tersebut tidak serta merta mampu mengurangi warga miskin secara signifikan, malah kecenderungan konstan. Jika dianalisis lokasi tempat tinggal masyarakat pada September 2015, jumlah penduduk miskin masyarakat di perkotaan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yakni 10,93 persen menjadi 11,06 persen, sementara jumlah penduduk di pedesaan mengalami penurunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah kajian yang mengevaluasi efektifitas program penanggulangan kemiskinan di provinsi ini.

#### **b. Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis**

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam hingga saat ini tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan secara ilegal serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan perumahan dan ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan serta masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya.

#### **c. Pengelolaan Sumberdaya Maritim Yang Optimal**

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki tiga wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni Selat Makassar, Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Selain itu, investasi pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan? Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan

ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo. Gubernur Sulteng pernah mengeluarkan himbauan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan. Pihak Dinas KP Sulteng sendiri akan membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah. Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakan membawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan di sana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran Kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi.

#### **d. Lingkungan dan Mitigasi Bencana**

Topografi Sulawesi Tengah didominasi oleh topografi perbukitan dan pegunungan, dengan elevasi tertinggi sekitar 2.850 m di atas permukaan laut. Persentase ketinggian terbesar adalah pada ketinggian 101 – 1000 m, yaitu sebesar 53,9 persen. Wilayah dataran pada kisaran 0 – 100 m hanya pada kisaran 20,2 persen. Nilai-nilai di atas menyiratkan bahwa pembangunan dan pengembangan wilayah akan berhadapan kondisi alam yang dominan perbukitan dan pegunungan. Hal tersebut pula merupakan indikasi bahwa potensi bencana alam berupa longsor tanah sangat mungkin terjadi sebagai hasil interaksi pembangunan dengan perubahan keseimbangan bentang alam.

Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor karena tingkat pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan komposisi tanah secara fisik didominasi oleh material lepas dan berlapis serta potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga yang ada di Indonesia. Karena banyaknya penebangan di hutan penyangga, wilayah rawan bencana longsor di Indonesia semakin bertambah. Kondisi ini akan dipercepat oleh perubahan tata guna lahan yang di dalamnya termasuk hilangnya

perkuatan lereng akibat terganggunya media perakaran serta kecenderungan perubahan infiltrasi air tanah menjadi aliran air permukaan.

Ekstensifikasi wilayah hunian, pembukaan kawasan perkebunan dan diterbitkannya izin eksploitasi kawasan untuk pertambangan tanpa memperhitungkan secara cermat aspek lingkungan fisik semuanya merupakan agen pencetus bahaya longsor. Anomali curah hujan yang di luar perkiraan disertai struktur batuan dan tanah yang rapuh serta bentuk topografi yang relatif datar akan menjadi pencetus utama bencana alam dahsyat seperti yang terjadi di wilayah Bungku Utara Tahun 2007. Salah satu hasil pembangunan yang kerap terancam akibat faktor topografi dan kelongsoran ini adalah prasarana transportasi jalan raya. Sebagai contoh adalah ruas jalan Tawaeli-Kebun kopi. Ruas jalan ini sudah untuk kesekian kalinya direhabilitasi ataupun dengan pembuatan trase baru tambahan. Dana puluhan milyar sudah digelontorkan untuk perbaikan ruas jalan ini namun hingga kini pun problem yang sama tetap berulang. Lalu, di mana letak kekeliruannya? Jawaban untuk ini sebenarnya sangat sederhana : perlakukanlah alam secara bijak. Artinya bahwa kestabilan lahan memiliki batas yang jika terlampaui, maka akan mencari keseimbangan baru, dengan cara alamiah merubah geometrinya mencapai keadaan seimbang. Hal inilah yang berulang terjadi di kawasan Kebun Kopi. Pertanyaan berikut adalah mengapa keseimbangannya terlampaui? Jawaban ini inipun dapat ditelusuri dengan cara mengamati penggunaan lahan di dan di kawasan hulu lereng. Metode penggalian pun perlu dicermati. Sepatutnya kegiatan penggalian ini dilakukan dengan diawali survey lengkap dampak akibat penggunaan lahan sekitarnya. Jika tidak, maka perulangan akan terjadi dan sekian milyar anggaran barupun harus digelontorkan. Fenomena di atas tidak saja berlaku untuk kawasan Kebun Kopi namun juga beberapa kawasan lain di Sulawesi Tengah seperti ruas Salua-Kulawi, Tambu-Kasimbar, Mepanga-Basi, Tentena-Gintu, Podi-Ampana dan beberapa ruas kritis lainnya di Sulawesi Tengah. Rekayasa sipil tentu saja dapat diterapkan pada kasus-kasus di atas



dengan diawali faktor penyebab sehingga alternatif desain dapat dibuat dengan mengakomodir faktor-faktor lain.

Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana ini perlu dipahami oleh aparaturnya pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi, sehingga diharapkan dampak dari bencana dapat dikurangi. Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Sering kali seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian bahkan korban jiwa. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber daya manusia. Pada dasarnya mitigasi (mitigation) merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik struktural maupun melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan secara integral sepatutnya sudah mengintegrasikan aspek lingkungan termasuk di dalamnya aspek kerawanan terhadap bencana alam. Hal ini dimaksudkan agar kiranya hasil pembangunan tidak bersifat merusak atau menyebabkan degradasi lingkungan lainnya. Untuk tercapainya maksud ini menjadi kebutuhan penting tersedianya database berupa peta-peta yang menunjukkan zonasi kestabilan lereng ataupun peta-peta sejenisnya yang pada intinya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Pengurangan risiko bencana atas dasar landasan internasional maupun nasional di atas seharusnya menginstruksikan bagi badan perencanaan, instansi ataupun lembaga terkait lainnya untuk menyiapkan peta rawan bencana atau sejenisnya yang juga harus sudah mutakhir tidak terlalu ekstrim perbedaan antara sumber satu dengan yang lainnya. Kemutakhiran menjadi sangat penting



mengingat pengalaman selama ini menunjukkan bahwa data yang ada tidak sinkron dengan kondisi nyata lapangan. Karenanya, penganggaran setiap tahun harus dialokasikan khusus untuk penyiapan *database* yang *valid*.

Provinsi Sulawesi Tengah sangat berpotensi dalam keterdapatan bahan galian baik bahan galian golongan A, B maupun C. Namun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih minim sehingga hal ini menjadikan tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga oleh kalangan akademisi. Dalam hal pengurangan risiko bencana, memperhatikan Landasan Global, Landasan Regional dan Landasan Nasional dalam Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan nasional, sepatutnya hal ini memberikan pijakan sekaligus tantangan bagi Universitas Tadulako khususnya Fakultas Teknik dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah digariskan, di antaranya dengan melibatkan tenaga ahli dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik terutama yang rentan terhadap bencana alam, berperan dalam penentuan kebijakan pengembangan perencanaan wilayah, memberikan masukan dan solusi terhadap penganggulan permasalahan bencana alam, bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pemetaan dan *update* wilayah rawan bencana dan memberikan penyuluhan terstruktur baik secara institusional maupun bekerjasama dengan instansi terkait.

#### **4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Donggala**

Pada sub bab 4.2.5 isu strategis Kabupaten Donggala dijelaskan isu strategis tentang kenaikan angka kemiskinan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha belum mendukung, Lingkungan dan Bencana Alam, Pengurangan Risiko Bencana, Reformasi Birokrasi,

### a. Pandemi Covid-19

Pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak tahun 2020 berdampak sangat luas terhadap aspek kesehatan, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Kondisi ini kemudian ditetapkan sebagai kondisi darurat dan bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pemerintah daerah sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dengan merelokasi dan merefocusing anggaran belanja secara besar-besaran untuk penanganan pandemi Covid 19 di Tahun 2020.

Dampak terjadinya Pandemi Covid 19 bagi Kabupaten Donggala adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020 hingga tahun 2021 sehingga banyak mempengaruhi perekonomian masyarakat. Selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemi Covid 19 juga berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, menurunnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah serta melemahnya sektor UMKM dan pariwisata. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala pada Tahun 2021 dan selanjutnya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan kebijakan kebijakan strategis untuk melakukan upaya akselerasi pemulihan ekonomi daerah.

Perencanaan pembangunan daerah pasca Covid 19 merupakan tantangan berat bagi Kabupaten Donggala. Kehidupan *New Normal* (Normal baru) yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu masalah bagi masyarakat jika tidak taat pada prosedur kesehatan Covid 19. Karena sampai dengan saat ini obat paten dari covid 19 belum ditemukan, sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan salah satunya dengan cara vaksin. Pemerintah

daerah Kabupaten Donggala harus mempunyai skenario tersendiri baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah ditengah ancaman pandemic covid 19 yang belum dipastikan kapan berakhir.

#### **b. Ibu Kota Negara**

Pemerintah telah resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Negara ke Penajam Passer Utara Kalimantan Timur. Isu pemindahan ibu kota baru telah bergulir Sejak tahun 2019, bahkan hingga kini pemerintah telah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur soal ibu kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, tahap-tahap pembangunan dan pemindahan ibu kota Negara beserta pembiayaannya. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan, mulai dari ketidakmerataan ekonomi hingga masalah beban lingkungan di pulau jawa. Sejak pertama diumumkan, sejumlah daerah yang berdekatan langsung dengan Kalimantan Timur sebagai calon dari ibu kota baru telah mempersiapkan diri sebagai daerah penyanggah dari Ibu Kota Baru tersebut.

Kabupaten Donggala salah satu daerah yang sangat diuntungkan dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi Kalimantan Timur. Sebab secara geografis wilayah Kabupaten Donggala berhadapan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur, hanya dibatasi oleh wilayah laut. Ini sangat potensial bagi daerah kabupaten Donggala. Olehnya sejak sekarang pemerintah daerah kabupaten Donggala harus menyiapkan konsep dan strategi yang tepat agar pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan berdampak sangat besar untuk pembangunan Kabupaten Donggala kedepan. Tentunya yang perlu dilakukan adalah melihat potensi yang ada di Kabupaten Donggala baik pertanian, perikanan dan kelautan, parawisata, industri dan perdagangan, maupun perhubungan.

### c. Daerah Otonomi Baru

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD NRI 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah.

Secara teoritis, tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yaitu peningkatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pembentukan daerah otonomi baru secara umum dapat berdampak positif bagi daerah diantaranya adalah:

- a. Bidang Politik Pemerintahan. Dari sisi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogen daerah pemekaran baru yang akan memperkuat civil society agar lebih aktif dalam kehidupan politik.
- b. Bidang Sosio Kultural. Dari dimensi sosial, kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru.
- c. Bidang Pelayanan Publik. Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi. Pemekaran dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan di daerah miskin, khususnya dalam kasus pembentukan kabupaten baru. Adanya pemekaran

dinilai akan memberi kesempatan kepada daerah miskin untuk memperoleh lebih banyak subsidi dari pemerintah pusat (khususnya melalui skema DAU dan beberapa DAK), hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita di daerah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai konskuensi sistem otonomi daerah, ada beberapa faktor yang dapat memicu mengapa perlu adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Donggala. Pertama, Mengatasi rentang kendali pemerintahan, alasan ini memperkuat isu pemekaraan daerah otonomi baru mengingat wilayah Kabupaten Donggala yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Posisi Donggala sebagai ibu kota pemerintahan menjadi faktor penentu. Sebab masyarakat di daerah pantai barat Kabupaten Donggala harus menempu perjalanan yang cukup jauh melewati Kota Palu sebagai ibu kota provinsi untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kondisi geografis yang terlalu luas menyebabkan proses pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif. Kedua, Faktor Politik. Dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Ketiga, faktor Pertumbuhan Ekonomi. pemekaran daerah dapat mendorong berkembangnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi baru. Hal ini juga menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Daerah otonomi baru memiliki kontrol terhadap sumber-sumber penggerak perekonomian di daerah baik dari segi perdagangan, industri, dan lain-lain.

#### **d. Kenaikan Angka Kemiskinan**

Selama periode 2013-2018, penduduk miskin di Kabupaten Donggala meningkat dari 49,6 ribu menjadi 54,44 ribu jiwa sebelum menurun menjadi 54,28 ribu di Tahun 2018. Persentase kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 17,18 persen menjadi 18,17 persen sebelum menurun menjadi 18,03 persen di Tahun 2018. Pada sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 3,26 poin menjadi 3,17 poin yang berarti kecepatan penduduk miskin Kabupaten Donggala naik status di atas garis kemiskinan 1,03 kali lipat ketimbang kecepatan penduduk miskin terjerembab ke dasar garis kemiskinan. Lalu menurun menjadi 3,04 poin di Tahun 2018. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa kesenjangan antara sesama penduduk miskin atau rumah tangga miskin selama periode tersebut semakin melebar yakni dari 0,98 poin menjadi 1,05 poin. Lalu tinggal 0,86 poin di Tahun 2018.

#### **e. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Beberapa isu strategis bidang pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Donggala sebagai berikut:

- Peningkatan produksi pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan;
- Perluasan lahan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian;
- Upaya inovasi teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas;
- Revitalisasi lahan-lahan terlantar untuk pemanfaatan tanaman pangan;
- Diversifikasi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan;
- Peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan;
- Fluktuasi harga pangan pokok;

- Penurunan Produktivitas Tanaman Perkebunan akibat serangan hama penyakit;
- Sistem pemasaran dan distribusi komoditi pertanian dan perikanan;
- Kepemilikan lahan pertanian dalam reforma agraria;
- Peningkatan produksi pangan hewani (daging sapi) melalui pengembangan kawasan peternakan sapi;
- Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan hasil tangkapan ikan, perikanan budidaya dan nilai tambah produk perikanan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengembangan badan usaha milik desa dalam kegiatan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- Peningkatan akses petani, nelayan dan peternak pada lembaga permodalan;
- Penggunaan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan.

**f. Revitalisasi Pertanian, kehutanan, Perikanan dan Kelautan**

Peningkatan sistem pertanian secara luas yang berbasis keragaman produksi, pengembangan mutu produktivitas serta pengembangan pertanian secara luas belum semua dapat terakses pada peningkatan nilai tambah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Donggala. Di samping itu, masalah lainnya adalah: 1) Luas pemilikan lahan sempit dan tidak memenuhi skala ekonomi; 2) Modal terbatas, sehingga pemberdayaan sumberdaya belum optimal; 3) Rendahnya produktivitas dan mutu hasil komoditi pertanian, menyebabkan rendahnya daya saing; 4) Kurangnya SDM

terdidik di bidang pertanian dalam pelaksanaan usaha pertanian yang profesional; 5) Penerapan teknologi tepat guna, spesifik lokasi, efisiensi dan ramah lingkungan masih belum optimal; 6) Sistem pemasaran dan distribusi hasil pertanian belum efisien; 7) Penanganan panen ditingkat petani belum dilakukan dengan baik, dan teknologi pengolahan hasil pertanian belum berkembang merata di setiap desa/kecamatan.

**g. Iklim Investasi dan Iklim Usaha belum mendukung.**

Sebagian besar pengusaha di Kabupaten Donggala berada pada kategori usaha kecil, sehingga sulit berkembang karena faktor keterbatasan di bidang permodalan, kemampuan manajerial usaha, kurangnya wawasan usaha dan terbatasnya akses terhadap sumberdaya produktif seperti teknologi, pasar dan informasi. Masih belum optimalnya infrastruktur yang mendukung sehingga jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Donggala masih kurang.

**h. Lingkungan dan Bencana Alam**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya

Dilansir dari laman InaRISK milik BNPB, Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi termasuk ke dalam wilayah yang paling rawan terkena dampak gempa. Bahkan, bila gempa bumi terjadi dapat dipastikan 100 persen dari total penduduk di ketiga wilayah tersebut akan merasakan dampaknya. Tak hanya itu, penduduk di ketiga wilayah ini juga diketahui sangat rentan terhadap bencana kekeringan. Namun, Yashinta menyayangkan, tingkat pemahaman penduduk atas bahaya bencana masih rendah. Tingkat kerentanan terhadap bencana di Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk 299.174 jiwa) adalah:



- i. Banjir: 30 persen (jiwa terpapar) : 70 persen (jiwa tidak terpapar);
- ii. Kekeringan: 100 persen (jiwa terpapar) Tsunami: 8 persen (jiwa terpapar) : 92 persen (jiwa tidak terpapar);
- iii. Gempa bumi: 99 persen (jiwa terpapar) : 1 persen (jiwa tidak terpapar);
- iv. Tanah longsor: 13 persen (jiwa terpapar) : 87 persen (jiwa tidak terpapar) Banjir bandang: 100 persen (jiwa tidak terpapar);
- v. Tingkat kapasitas daerah rendah.

Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah termasuk dalam wilayah dengan potensi bencana gempa bumi kategori tinggi. Potensi intensitas guncangan gempa mencapai lebih dari 8 MMI pada peta rawan bencana gempa bumi (Palu dan Donggala) termasuk dalam zona merah). Gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Palu dan Donggala dipicu oleh aktifitas patahan Palu-Koro. Patahan ini memanjang dari sebelah barat Donggala sampai Teluk Palu. Patahannya memang panjang tidak hanya di Palu ke utara saja, tetapi ke selatan juga Patahan Palu-Koro itu juga memang patahan aktif. Mengenai potensi kembalinya gempa besar seperti di Lombok, diharapkan itu tidak terjadi sehingga tidak membuat masyarakat khawatir. Meskipun demikian, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak-pihak terkait. "Kita hidup di Indonesia sadar pada posisi tektonik sering ada 3 lempeng aktif dunia".

Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana ini perlu dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi, sehingga diharapkan dampak dari bencana dapat dikurangi. Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya

pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Sering kali seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian bahkan korban jiwa. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber daya manusia.

Pada dasarnya mitigasi (*mitigation*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik struktural maupun melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non. Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana ini perlu dipahami oleh aparat pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi, sehingga diharapkan dampak dari bencana dapat dikurangi. Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Sering kali seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian bahkan korban jiwa. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber daya manusia.

#### **i. Reorientasi Paradigma Pengelolaan Bencana**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam penyelenggaraannya dikenal dengan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Dalam paradigma pengelolaan bencana, Rahmawati Husein (2014) dalam tulisannya berjudul **Bencana Di Indonesia Dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan** menyatakan bahwa selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana alam sebagai sesuatu yang datang di luar kemampuan manusia atau suatu peristiwa yang begitu saja terjadi tanpa pemberitahuan sehingga kecenderungannya adalah menunggu kejadian tersebut dialami atau menimpa diri mereka. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan konvensional yang menganggap bencana merupakan sifat alam dan terjadinya bencana adalah karena kecelakaan. Bencana alam juga tidak dapat diprediksi, tidak menentu, dan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terelakkan atau terhindarkan serta tidak terkendali (Triutomo, 2007). Di samping itu adanya keyakinan bahwa bencana adalah “kehendak Tuhan” (*the Acts of God*) di mana kejadian bencana alam itu di luar kemampuan manusia ataupun kehendak Tuhan (Lindell *et al.*, 2006), sebagai bentuk peringatan, cobaan bahkan kutukan, sehingga manusia tidak berhak dan tidak dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana. Berdasarkan pada pandangan ini, masyarakat terdampak dipandang sebagai “korban” dan penerima bantuan dari pihak luar atau harus segera mendapat pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih pada bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Oleh karena itu, pada umumnya tindakan yang dilakukan adalah upaya reaktif yang sifatnya kedaruratan, yang menekankan pada penanganan dan pemberian bantuan bukan penanggulangan. Bentuk penanganan biasanya berfokus

pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan, penampungan darurat, kesehatan dan mengatasi krisis yang dialami oleh masyarakat. Sementara tujuan dari penanganan bencananya adalah untuk menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan (Bakornas BP, 2007; Pujiono, 2007).

Di dunia termasuk di Indonesia hampir mayoritas sumber daya manusia, dana, maupun program-program penanggulangan bencana diarahkan pada saat tanggap darurat. Dicontohkan sebuah organisasi keagamaan, 80 persen kegiatan penanggulangan bencana maupun sumber daya dan sumber dana masih diperuntukkan untuk kegiatan kedaruratan seperti pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di seluruh Indonesia, serta pendampingan sosial, bantuan medis dan pemulihan kehidupan dan penghidupan. Dari pandangan konvensional paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat bahwa bencana sebagai bagian dari pembangunan dan bencana adalah masalah yang tidak berhenti. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan program pembangunan dengan penanggulangan bencana. Pandangan yang lebih progresif yang berkembang juga dipengaruhi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berkembangnya pengetahuan mendorong timbulnya pandangan bahwa bencana adalah merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik dan membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan ini paradigma yang berkembang adalah mitigasi di mana fokus penanggulangan bencana diarahkan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi akibat adanya kejadian alam. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat

struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dan lain-lain) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dan lain-lain (Bakornas PB, 2007; Godschalk et al, 1999). Sementara itu, pandangan holistik melihat bahwa kejadian alam dapat menjadi ancaman bencana jika bertemu dengan kerentanan serta ketidakmampuan masyarakat menghadapi risiko. Pandangan ini dikenal dengan paradigma pengurangan risiko. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam pengurangan bencana. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini upaya penanggulangan bencana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana.

Cara pandang baru terhadap pengelolaan bencana ini juga kemudian dijadikan kesepakatan internasional melalui Kerangka Aksi Hygo 2005-2015 yang diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana atau yang dikenal dengan World Conference on Disaster Reduction (WCDR). WCDR ini ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral. Lima prioritas yang ditegaskan dalam kerangka tersebut meliputi:

1. Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat;
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta menerapkan system peringatan dini;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana;
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih efektif (UNISDR, 2005).

Pada paradigma ini, masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan local (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Perubahan paradigma tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan bencana yaitu:

1. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;
3. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, lembaga usaha, di mana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya (Bakornas PB, 2007).

Perubahan pandangan dan paradigma tentang bencana dan pengelolaannya mendorong adanya pendekatan baru melalui manajemen risiko. Pendekatan ini mengharuskan setiap individu dalam masyarakat untuk memahami situasi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman serta kapasitas yang dimiliki untuk menekan risiko seminimal mungkin. Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana beberapa langkah dapat dilakukan melalui peningkatan :

1. Kesadaran masyarakat dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya;
2. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki;
3. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya;

4. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan;
5. Kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah.

Pendekatan pengurangan risiko ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar untuk lebih sensitif dalam memahami lingkungan. Bencana tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, peringatan dan bentuk kepedulian saat terjadinya saja, akan tetapi pengetahuan akan anacaman bencana dan kemampuan menghadapi dan mengelola bencana menjadi kegiatan yang terus menerus dilakukan.

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat global dan regional. Beberapa forum internasional telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang melandasi upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional. Agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia perlu didukung dengan landasan yang kuat dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tahapan pengelolaan bencana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap **prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana**. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap **prabencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam **situasi tidak terjadi bencana** meliputi:

## **1. Perencanaan penanggulangan bencana**

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Saat ini, terdapat dua dokumen perencanaan terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Donggala yakni Dokumen RPJMD Donggala Tahun 2019-2023 ini dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Gempa. Selanjutnya dalam perencanaan penanggulangan bencana tersebut memuat tentang:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Rencana penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **2. Pengurangan risiko bencana**

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e.



penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

### **3. Pencegahan**

Pencegahan bencana dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana yang dilakukan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Pemantauan terhadap: 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; 2) penggunaan teknologi tinggi.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

### **4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

### **5. Persyaratan analisis risiko bencana**

Analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

## 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

## 7. Pendidikan dan pelatihan dan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana **dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana** meliputi:

### 1. Kesiapsiagaan

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- e. Penyiapan lokasi evakuasi;
- f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BNPB dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.

## **2. Peringatan dini**

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:

- a. Mengamati gejala bencana;
- b. Menganalisa data hasil pengamatan;
- c. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. Menyebarkan hasil keputusan; dan
- e. Mengambil tindakan oleh masyarakat.

Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga

yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya.

### 3. Mitigasi bencana

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- c. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada **saat tanggap darurat** meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan

kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat yang ditugaskan oleh BPBD melalui identifikasi terhadap:

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban bencana;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Terkait dengan penanganan korban gempa di Kota Palu, Donggala dan Sigi, terdapat enam prioritas fokus penanganan yang dilakukan selama sebulan setelah gempa. **Pertama**, melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pihaknya membutuhkan banyak alat berat untuk proses evakuasi dan pencarian tersebut. Sebab, banyak korban yang diduga tertimpa reruntuhan bangunan, material longsor, dan tertimbun lumpur yang masih perlu untuk dievakuasi. Prioritas

**kedua**, adalah pemakaman jenazah harus segera dilakukan pemakaman massal lantaran tiga hari pascagempa korban meninggal dunia sudah mengeluarkan bau. **Ketiga**, percepatan pemulihan jaringan listrik. Sebab, saat itu jaringan listrik di Kota Palu belum semua menyala. Bahkan di Donggala, Sigi, dan Parigi Mountong, kondisi listrik masih padam. Prioritas **keempat**, adalah percepatan pengadaan bahan bakar minyak (BBM), terutama genset rumah sakit dan operator seluler. **Kelima**, adalah distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi baik dari jalur udara, darat, dan laut **Terakhir**, yaitu percepatan jaringan komunikasi.

Secara khusus di Kabupaten Donggala, untuk menangani korban bencana, Pemerintah kabupaten Donggala menetapkan status tanggap darurat dari tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 (tahap I: 30 September sampai dengan 13 Oktober 2018, Tahap II: 14 – 27 Oktober 2018). Sampai dengan berakhirnya status tanggap darurat tanggal 27 Oktober 2018, dalam penanganan tanggap darurat pemerintah Kabupaten Donggala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk posko tanggap darurat bencana gempa bumi dan Tsunami kabupaten Donggala di kantor BPBD kabupaten Donggala kecamatan Banawa kelurahan Kabonga Kecil;
2. Upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana gempa bumi dan tsunami di seluruh wilayah yang terdampak bencana;
3. Bupati telah meminta tambahan beras ke Bulog sebanyak 100 ton;
4. Membangun tenda Shelter pengungsian sementara;
5. Bupati mengeluarkan SK untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di 38 lokasi;
6. Presiden RI mengunjungi lokasi pengungsian di desa Loli Tasiburi kecamatan Banawa tanggal 3 Oktober 2018;
7. Kunjungan pertama Wakil Presiden pada tanggal 5 Oktober 2018 bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

8. Kunjungan kedua Wakil Presiden RI mengunjungi lokasi pengungsian dan meninjau dampak gempa bumi dan tsunami di desa Wani kecamatan Tanantovea tanggal 12 Oktober 2018;
9. Memobilisasi sumber daya (yang tercatat).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada **tahap pascabencana** terdiri atas:

**a. rehabilitasi**

Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkena bencana. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan: a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi.

**b. rekonstruksi.**

Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pambangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Berdasarkan hasil verifikasi kerugian bencana untuk pemukiman, komposisi dalam kategori rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, sebagai berikut:

- Jumlah Rumah Rusak Berat sebanyak 7.290 unit atau 34,10 persen;
- Jumlah Rumah Rusak Sedang sebesar 6.099 Unit atau 28,53 persen;
- Jumlah Rumah Rusak Ringan sebesar 7.989 unit atau 37,37 persen.
- Sebanyak 21.378 Unit rumah tidak mengalami kerusakan.

Hasil perhitungan penilaian dampak bencana terhadap sector permukiman/perumahan menimbulkan kerusakan sebesar Rp 1,648 triliun dan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 278,51 milyar sedangkan total dampak bencana adalah penjumlahan nilai kerusakan dengan nilai kerugian menjadi sebesar Rp 1,927 triliun. Hasil perhitungan dampak bencana pada **sektor infrastruktur** menghasilkan nilai kerusakan sebesar Rp 800,37 milyar dan kerugian akibat rusaknya sarana umum sebesar Rp 134,37 milyar. Total dampak bencana adalah



hasil penjumlahan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp 934,519 milyar. Nilai kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Donggala sebesar Rp 519,56 milyar dan nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 50,00 milyar sehingga total dampak bencana pada subsektor transportasi darat sebesar Rp.569,56 milyar. Perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian pada **sektor sosial** menghasilkan nilai kerusakan sebesar Rp 441,78 milyar nilai kerugian sebesar Rp 8,68 milyar dengan total dampak bencana yang ditimbulkan sebesar Rp 451,56 milyar.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damages and Losses Assessment*) yang dipadukan dengan hasil Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan (*Human Recovery Need Assesment*), yang meliputi sektor: a) Perumahan dan prasarana permukiman, b) Infrastruktur, c) Sosial, d) Ekonomi, dan Lintas Sektor. Berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan yang dikoordinasikan oleh BPBD, maka kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp 6,483 triliun.

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran dari Tahun 2019 – 2020. Sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden yang menginstruksikan untuk mensinergikan program/kegiatan yang terdapat pada Kementerian/Lembaga terkait dengan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami, maka pengidentifikasian potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
2. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

### 3. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.

Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca Bencana yang dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Swakelola atau Kontraktual yang dikerjakan oleh OPD terkait dengan atau tanpa melibatkan BPBD;
2. Pemberian Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM);
3. Pemberian Bantuan kepada masyarakat terkena bencana berupa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

#### **j. Reformasi Birokrasi**

Birokrasi pemerintah memegang peranan sangat penting untuk mencapai suatu kemajuan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Posisi penting birokrasi pemerintah ini dikarenakan birokrasi mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berkaitan sukses dan gagalnya suatu program pembangunan. Oleh karena itu, setiap negara/daerah menginginkan agar birokrasinya dapat tampil prima sehingga dapat mengimplementasikan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Bagi negara/daerah yang berhasil menata birokrasinya nampak sekali kemajuan dan dampak dari penataan tersebut. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terlihat dengan jelas disertai kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, saat ini berbagai negara melakukan reformasi birokrasinya secara total dan dampak dari reformasi birokrasi tersebut dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju seperti Austria, Denmark, Singapura, Korea Selatan bahkan sekarang ini Tiongkok yang berpaham Komunispun menata birokrasinya secara total dan kita dapat lihat hasilnya sekarang, Tiongkok tampil sebagai negara kuat bahkan sebagian orang mengatakan bahwa sekarang ini sebenarnya Tiongkoklah sebagai Negara Super Power khususnya di bidang Ekonomi.

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada negara-negara maju tersebut meliputi (1) penataan pada Sistem Birokrasi Perizinan yang cepat, mudah disertai informasi yang akurat, (2) kepastian Hukum dan sanksi yang ketat dan tidak pandang bulu terhadap berbagai pelanggaran dan indikasi tindakan-tindakan yang akan menghambat proses hukum, (3) Sumber Daya Manusia yang mempunyai Kapabilitas, Kapasitas dan berprinsip pada Hukum yang ketat dan Adil dalam tindakan, (4) menghindari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KK). Kita dapat melihat negara-negara tersebut dengan sangat serius dan ketat melakukan reformasi birokrasi sekarang ini tampil sebagai negara dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang mengagumkan dan secara otomatis memberikan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi kepada warganya.

Untuk negara Indonesia saat ini, kondisi birokrasinya belum menampakkan suatu perubahan yang berarti walaupun berbagai undang-undang tentang reformasi birokrasi telah lama dibuat dan sangat banyak. Sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, reformasi birokrasi pemerintah dilakukan untuk menekan penyimpangan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Namun dampak positif dari berbagai aturan dan kebijakan reformasi birokrasi belum memperlihatkan hasil yang mengembirakan. Birokrasi Indonesia belum menemukan format dan model yang tepat sesuai dengan keinginan masyarakat, lingkungan dan kehidupan global saat ini. Potret birokrasi Indonesia belum lepas atau melepaskan diri dari “stigma” lamban, berbelit-belit, tidak produktif, korup dan tidak taat hukum.

Reformasi yang bergulir Tahun 1998 sebagai antitesa terhadap dominasi orde baru yang sentralistik juga tidak membawa suatu perubahan berarti dalam menata pemerintahan utamanya penataan mesin pemerintahan. Birokrasi pemerintah tetap masih belum beranjak sebagai “mesin yang lambat”. Fenomena ini terjadi dari tingkat Pemerintah Pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi. Dengan adanya 9 program Reformasi Birokrasi tersebut diharapkan, akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian, lembaga, dan pemerintah Daerah lebih terarah dan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan akhir dari reformasi birokrasi tersebut. 9 sembilan program Reformasi dimaksud adalah:

#### **j.1. Manajemen perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan risiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### **j.2. Penataan peraturan perundang-undangan**

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut di antaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

#### **j.3. Penataan dan penguatan organisasi**

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk

meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

#### **j.4. Penataan ketatalaksanaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

#### **j.5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur**

Ini salah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

#### **j.6. Penguatan pengawasan**

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

### **j.7. Penguatan akuntabilitas kinerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

### **j.8. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

### **j.9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam *roadmap* masing-masing kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan akhir dari keseluruhan 9 program reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan berkinerja serta Pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan isu strategis reformasi di Kabupaten Donggala, reformasi yang disentuh lebih ditekankan pada bidang:

### **1. Tata Kelola Kelembagaan;**

Tata kelola kelembagaan yang dimaksud adalah menata kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala lebih efektif dan efisien. Efektif dilihat dari kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu mengimplementasikan program-program kerja sesuai masalah yang ada di masyarakat. Sedangkan efisien adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dikelola secara profesional dan proporsional melalui pemahaman pegawai pada tupoksi dan tujuan organisasi. Pemahaman pada tupoksi diperlukan agar semua pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya yang akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan.

### **2. Iklim dan Lingkungan Kerja**

Perubahan iklim dan lingkungan kerja diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Inovasi dan kreatifitas pegawai ditingkatkan guna melahirkan semangat kerja produktif. Produktivitas pegawai bukan hanya dilihat dari “output”, tetapi juga pada “proses”. Proses ditekankan agar pegawai memahami bahwa tujuan organisasi melalui suatu tahapan-tahapan penting yang harus diketahui, dipahami secara jelas. Iklim organisasi kondusif diyakini membawa perubahan terhadap perilaku, cara pandang dan kinerja pegawai. Iklim organisasi perangkat Organisasi Kabupaten Donggala seharusnya ditata dengan menekankan pada aspek kerjasama secara tim.

### **3. Pelayanan Publik berdasarkan Nilai-Nilai Lokal;**

Pelayanan berkualitas dan prima menjadi kebutuhan mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat menginginkan pelayanan publik oleh pemerintah memperhatikan aspek-aspek mendasar yakni, cepat, tepat, murah, berkualitas serta ramah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dapat mengabungkan bentuk-bentuk pelayanan memakai atau bersimbol pada nilai-nilai lokal. **“Local Wisdom”** dapat menjadi salah satu cara dan bentuk pelayanan publik memakai nilai-nilai budaya dan simbol-simbol budaya lokal yang telah diyakini dipercaya masyarakat sejak dahulu. Mengabungkan pelayanan

publik profesional dengan nilai-nilai budaya membawa keuntungan yakni masyarakat lebih dekat pada pelayanan, merasa bahwa pelayanan diberikan bersendi pada nilai-nilai dianut oleh masyarakat.

#### **4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Titik tekan dari isu strategis Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah penataan pada Sistem Rekrutmen dan penempatan ASN sesuai dengan keahlian/skill. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

#### **k. Bandara Udara Lapaloang**

Rencana pemindahan ibukota negara ke Penajam Utara Kalimantan Timur yang mulai dilakukan tahun 2024 memberi keuntungan tersendiri bagi provinsi Sulawesi Tengah yang berhadapan langsung sehingga pemerintah daerah kedepan perlu membuat grand desain dan rencana aksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak beberapa tahun lalu berkeinginan menaikkan status Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu menjadi bandara internasional. Namun terkendala oleh terbatasnya lahan bagi kebutuhan perpanjangan landasan pacu dan infrastruktur penunjang.

Sesuai dengan pola tata ruang yang direncanakan, saat ini sedang disiapkan sebuah bandara baru bertaraf internasional yang sangat prospektif dan akan dibangun di Kabupaten Donggala, tepatnya di atas Desa Lapaloang Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa. Beberapa faktor yang memperkuat Desa Lapaloang menjadi bandara Internasional antara lain:

1. Pertama tersedianya kawasan datar sekitar 2.500-3.000 hektar sangat dimungkinkan membangun satu kawasan berikat dengan kawasan lainnya seperti pariwisata Tanjung Karang Donggala, kawasan industri Mamuju Utara, Kawasan Industri Kota Palu. Bahkan terbuka peluang



pembangunan Hotel, Mall, Restoran dan lainnya. KEK Pariwisata Mandakika, NTB dan KEK Pariwisata Likupang Manado, sehingga lolos menjadi bagian dari program super prioritas 10 New Bali atau Bali Baru.

2. Kedua, kondisi bandara kelas satu Mutiara Sis Aljufri dinilai kurang relevan dikembangkan sebagai bandara Internasional dikarenakan terbatasnya lahan untuk kebutuhan perpanjangan landasan pacu, area parkir pesawat, apron bandara dan sarana penunjang lainnya termasuk pergudangan. Selain itu letak dari Mutiara Sis Al Jufrie diapit oleh dua perbukitan yang akan mempersulit akses dan manuver bagi pesawat berbadan lebar.
3. Ketiga adalah potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Tengah di sektor pangan “*Luxery*” seperti lobster, udang, tuna, durian montong dan lainnya memerlukan akses cepat ke Negara tujuan. Juga akan memberi dorongan arus wisatawan masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah karena selama ini masih menjadi destinasi sekunder atau tersier. Selain itu akan merangsang minat investasi masuk di Provinsi Sulawesi Tengah baik dibidang pangan, pariwisata dan tambang.
4. Keempat, Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kelima, bandara internasional “Lapaloang Donggala” nantinya memperkuat sistem transportasi udara di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga menambah akses masuk maupun keluar bagi wisatawan dan investor mancanegara.
6. Keenam, Rencana pengembangan tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Donggala sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer.

#### **4.3. Pembobotan Isu Strategis**

Setelah dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis (internasional, nasional, regional, provinsi dan kabupaten) yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan

dilakukan Focus Group Discussion (FGD) di tingkat Kabupaten Donggala dan kecamatan untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala pemerintahan yang baru di Kabupaten Donggala. Hasil pembobotan isu strategis disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) kriteria yang dijadikan dasar dalam penentuan urgensi isu strategis bagi pembangunan Kabupaten Donggala. Ketujuh kriteria isu strategis tersebut merupakan pengembangan dari kriteria isu strategis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kriteria. Setelah dilakukan pembobotan kriteria, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada Tabel 4.2 dengan cara memberikan skor pada setiap isu-isu strategis yang dikaitkan dengan ketujuh kriteria yang ada guna menentukan skala prioritas isu strategis. Adapun isu strategi pembangunan Kabupaten Donggala ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2.**

**Kriteria Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Donggala**

| <b>No.</b> | <b>Kriteria</b>                                                                           | <b>Bobot</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. | 17           |
| 2          | Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah                                       | 12           |
| 3          | Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat.             | 20           |
| 4          | Dampak yang ditimbulkannya terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.                       | 13           |

|   |                                                                   |     |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. | 15  |
| 6 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.                    | 12  |
| 7 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.                    | 11  |
|   | Total                                                             | 100 |

**Sumber: Hasil FGD Kabupaten Donggala dan Kecamatan Februari 2019**

Hasil analisis diperoleh dari hasil pembobotan pada Dokumen sebelumnya yakni RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2023 dan dielaborasi dengan data pembobotan dari hasil analisis isu strategis terbaru. Adapun isu strategi yang ditambahkan pada dokumen perubahan ini yaitu: (1). Efek Bola Salju Covid-19; (2) Tingginya Angka Stunting Kabupaten Donggala; (3) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); (4) Rencana Pembangunan Bandar Udara Lapaloang; (5) Usulan DOB.

Isu strategis tambahan tersebut dihitung berdasarkan persentase indikator kinerja yang tidak tercapai yang perlu diintervensi. Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis. Berikut ini tabel yang menunjukkan pembobotan isu strategis Kabupaten Donggala.

**Tabel 4.3**  
**Pembobotan Isu-Isu Strategis Pembangunan**  
**Kabupaten Donggala**

| No | Isu-Isu Strategis                              | Total Skor | Rata-rata | Prioritas |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | Lingkungan dan Mitigasi Bencana                | 53,00      | 7,57      | 1         |
| 2  | kemiskinan dan Ketenagakerjaan                 | 52,00      | 7,43      | 2         |
| 3  | Masalah Kesejahteraan Petani                   | 51,00      | 7,29      | 3         |
| 4  | Sumberdaya Air dan Irigasi                     | 50,00      | 7,14      | 4         |
| 5  | Stunting                                       | 49,14      | 7,02      | 5         |
| 6  | Ketahanan Pangan dan Pertanian                 | 49,00      | 7,00      | 6         |
| 7  | Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis/Agroindustri | 49,00      | 7,00      | 7         |
| 8  | Ibu Kota Negara (IKN)                          | 48,19      | 6,88      | 8         |
| 9  | Kenaikan Angka Kemiskinan                      | 48,00      | 6,86      | 9         |
| 10 | Efek Bola Salju Covid 19                       | 47,20      | 6,74      | 10        |
| 11 | Pola Produksi dan Konsumsi Pangan              | 47,00      | 6,71      | 11        |
| 12 | Revitalisasi Perkebunan dan Perikanan          | 47,00      | 6,71      | 12        |
| 13 | Pemulihan Infrastruktur pasca bencana alam     | 46,26      | 6,61      | 13        |
| 14 | Perubahan Iklim dan Pemanasan Global           | 46,00      | 6,57      | 14        |
| 15 | Degradasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan    | 46,00      | 6,57      | 15        |
| 16 | Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak     | 45,00      | 6,43      | 16        |
| 17 | Revitalisasi KRPL dan TTIC                     | 45,00      | 6,43      | 17        |
| 18 | Ketersediaan benih dan Saprodi lainnya         | 45,00      | 6,43      | 18        |

| No | Isu-Isu Strategis                                                      | Total Skor | Rata-rata | Prioritas |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 19 | Bandara Udara Lapaloang                                                | 44,81      | 6,40      | 19        |
| 20 | Pengembangan 4 Komoditi Pertanian dalam rangka swasembada              | 44,00      | 6,29      | 20        |
| 21 | Regenerasi Petani                                                      | 44,00      | 6,29      | 21        |
| 22 | Pengelolaan Sumberdaya Maritim Yang Optimal                            | 44,00      | 6,29      | 22        |
| 23 | Iklim Investasi dan Usaha                                              | 44,00      | 6,29      | 23        |
| 24 | Kebijakan Fiskal dan Defisit Neraca Berjalan                           | 44,00      | 6,29      | 24        |
| 25 | Krisis Pangan Mengglobal                                               | 43,00      | 6,14      | 25        |
| 26 | Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral      | 43,00      | 6,14      | 26        |
| 27 | Pembangunan Berkelanjutan                                              | 42,00      | 6,00      | 27        |
| 28 | Reformasi Birokrasi                                                    | 42,00      | 6,00      | 28        |
| 29 | Ekosistem Daratan, Hutan, Degradasi lahan, dan Keanekaragaman Hayati   | 40,00      | 5,71      | 29        |
| 30 | Hutang Luar Negeri                                                     | 39,00      | 5,57      | 30        |
| 31 | Efektivitas Hutang Luar Negeri Indonesia                               | 38,00      | 5,43      | 31        |
| 32 | Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas | 38,00      | 5,43      | 32        |
| 33 | Daerah Otonomi Baru (DOB)                                              | 32,54      | 4,65      | 33        |
| 34 | Perang Dagang Amerika dan Tiongkok                                     | 32,00      | 4,57      | 34        |
| 35 | Volatilitas Kurs                                                       | 31,00      | 4,43      | 35        |

Sumber: RPJMD Kab. Donggala 2019-2023 dan data diolah 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa isu Lingkungan dan mitigasi bencana menjadi isu prioritas pertama. Hal ini sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah terdampak Bencana Alam Tahun 2018 perlu menerapkan program penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan).

Adapun isu strategis terkait Pemulihan Infrastruktur pasca bencana tidak lagi menempati posisi prioritas pertama, dengan asumsi bahwa perubahan RPJMD telah memasuki tahun ke- 4 (Empat) yang tentunya telah melaksanakan Program- program serta kegiatan Pemulihan pasca bencana. Adapun isu ini tetap menjadi isu prioritas pada posisi ke-14 (Empat Belas) yang perlu diselesaikan.

Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi isu prioritas ke 2 (dua) karena Kabupaten Donggala menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yakni sebesar 17,39 persen, berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92 persen dan di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,78 persen (BPS, 2020). Bila ditinjau dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Donggala memiliki TPT yang rendah yakni 2,58 persen dan berada di posisi ke 10 terendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah. Namun pada saat yang sama Kabupaten Donggala memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Ini berarti bahwa tenaga kerja Kabupaten Donggala memiliki produktivitas dan/atau upah yang rendah, sehingga mereka tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimum dan belum mampu keluar dari jerat kemiskinan. Olehnya perlu ada intervensi yang serius dan sinergis antar seluruh perangkat daerah Kabupaten Donggala serta dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi bahkan nasional dalam penanggulangan kemiskinan.

Prioritas ke 3 (tiga) ditempati isu kesejahteraan petani. Sector pertanian merupakan sector penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Donggala. Bukan karena produktivitas yang tinggi, melainkan banyaknya

tenaga kerja yang bekerja di sector ini. Olehnya perlu intervensi pemerintah kabupaten untuk dapat memperkuat posisi petani dalam rantai produksi, sehingga petani dapat meningkatkan produksi, harga produk pertanian yang memadai dan penghasilan yang cukup bagi kehidupan para petani.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI**

Akselerasi pembangunan daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seyogyanya harus didukung oleh perencanaan yang sistematis dan terstruktur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah adalah rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Keberhasilan pembangunan daerah dapat tercapai bila dalam implementasinya didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perumusan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan merupakan konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah merupakan gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, yang secara obyektif dan faktual memiliki kewajaran dan kelayakan untuk dicapai dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia. Pengerahan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab isu-isu strategis dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terselenggara secara berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Keberadaan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat



dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang bersifat strategis tersebut yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan secara partisipatif, dengan mempertimbangkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJPD Kabupaten Donggala dan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Donggala Periode 2019–2024, dengan rumusan sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA  
YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MANDIRI DAN  
BERKARAKTER DENGAN BERPIJAK PADA NILAI  
KEARIFAN LOKAL”***

Sebagai gambaran dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Donggala 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya mengandung makna dengan Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

**Masyarakat:** adalah sekelompok orang atau warga yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yakni sebagian besar interaksi yang terjadi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dengan kata lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

**Donggala:** adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Dalam perjalanannya pada Tahun 2002 Kabupaten Donggala dimekarkan, dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam perkembangannya selanjutnya pada Tahun 2008 kembali dilakukan pemekaran dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 2009. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Donggala dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Donggala  
Periode 2019-2024**

| <b>Visi</b>                                                                                                                                | <b>Pokok-Pokok Visi</b> | <b>Penjelasan Visi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala yang Sejahtera, Berdayasaing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai KearifanLokal” | <b>Sejahtera</b>        | Gambaran masyarakat Kabupaten Donggala yang semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi: sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, merata dan adil serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dibarengi dengan peningkatan penghasilan yang memadai.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | <b>Berdaya Saing</b>    | Gambaran masyarakat Kabupaten Donggala yang semakin memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sehingga mampu bersaing secara nasional dan global. Kemampuan ini tercerminkan dari tingkat pendapatan dan daya beli, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, aksesibilitas terhadap informasi, lembaga dan pranata sosial yang kuat, serta struktur ekonomi yang kokoh (meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terbukanya kesempatan kerja dan meratanya distribusi pendapatan). |

| Visi | Pokok-Pokok Visi            | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Mandiri</b>              | Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang sedang dalam proses meningkatkan kapasitasnya untuk menggerakkan dan mengelola secara swadaya segala potensi dan sumber daya yang dimiliki atas prakarsa, inovatif dan adaptif teknologi untuk mendukung pembangunan daerah melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ).                                                                                                                                                                              |
|      | <b>Berkarakter</b>          | Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Donggala yang memiliki watak dan kepribadian yang tercermin dari akhlak dan budi pekerti dalam berperilaku, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan kearifan lokal serta menghargai perbedaan dalam keberagaman, sehingga menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>Nilai Kearifan Lokal</b> | Nilai kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual tatanan yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Dalam kaitan dengan Visi RPJMD, kearifan lokal ( <i>local wisdom</i> ), dimaknai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan |

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | pemerintahan dan penataan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan sumber daya tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun-temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. |

Visi Kabupaten Donggala yang tertuang dalam RPJMD Periode 2019– 2024 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Donggala 2005–2025, yaitu *“Kabupaten Donggala yang Mandiri, Sejahtera dan Damai”*. Kabupaten Donggala yang dicirikan dengan kondisi geografis wilayah yang memiliki sumber daya yang potensial di berbagai sektor sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan, daya saing, kemandirian guna mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

## 5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan dari misi tersebut, yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Misi sebagai penjabaran dari visi, maka dapat dirumuskan misi Kabupaten Donggala yang tertuang dalam RPJMD 2019–2023, sebagai pedoman bagi seluruh organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang

dijabarkan dalam Renstra dan diimplementasikan dalam Renja Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Perumusan Penjelasan Misi RPJMD**  
**Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

| <b>Pernyataan Visi</b>                                                                                                                       | <b>Misi</b>                                                                                               | <b>Penjelasan Misi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal” | 1. <i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i> | Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum ( <i>equality before the law</i> ) serta menjunjung tinggi penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. |

| Pernyataan Visi | Misi                                                                                                       | Penjelasan Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan                  | Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya suasana kondusif sehingga dapat menjamin atas terwujudnya pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengelolaan sumber daya pembangunan dapat meningkatkan daya saing dan membentuk masyarakat yang berkarakter. |
|                 | 3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan | Misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Kabupaten Donggala yang memiliki kemampuan bersaing melalui peningkatan sumber daya manusia yang dicirikan oleh aksesibilitas pendidikan yang merata, berkualitas serta berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan melalui pemerataan akses kesehatan yang merata, pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.               |

| Pernyataan Visi | Misi                                                                                                                         | Penjelasan Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4. <i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</i>                                                            | Dimaksudkan untuk melakukan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas Pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan Meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah terdampak bencana alam. |
|                 | 5. <i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i> | Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan social yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sekaligus merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian          |



| Pernyataan Visi | Misi | Penjelasan Misi                                                    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|
|                 |      | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Kabupaten Donggala. |

Rumusan Keterkaitan Misi sebagai penjabaran dari visi, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**

**Katerkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019-2024**

| Visi                                                                                                                                      | Misi                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal”</b> | <i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i>                     |
|                                                                                                                                           | <i>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan.</i>                             |
|                                                                                                                                           | <i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.</i>            |
|                                                                                                                                           | <i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.</i>                                                            |
|                                                                                                                                           | <i>Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.</i> |

Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif, yang semakin Sejahtera ditandai oleh terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai, sehingga akan

terwujud suatu tatanan masyarakat yang memiliki daya saing dan mandiri yang ditandai oleh kemampuan bersaing atas prakarsa, kreatifitas, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kekuatan yang bersumber dari dirinya sendiri secara swadaya. Sedangkan berkarakter dimaknai sebagai terbentuknya tatanan masyarakat yang memiliki watak dan kepribadian yang menjunjung tinggi solidaritas sosial, harkat kemanusiaan dan harga diri, yang tercermin dari akhlak dan budi pekerti yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Indikator tercapainya kondisi masyarakat sesuai dengan Visi daerah tersebut adalah: (i) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif, melalui tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, memberikan pelayanan secara merata dan akuntabel melalui penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, serta penerapan teknologi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan; (ii) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatnya pelayanan dan derajat kesehatan, serta daya beli masyarakat; (iii) Meningkatnya secara nyata rerata pendapatan per-kapita dan menurunnya angka kemiskinan, sebagai cerminan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, meningkatnya secara signifikan produksi pertanian dan nelayan dibarengi dengan meningkatnya nilai tukar petani dan nelayan serta penanganan secara tepat dan efektif berbagai masalah sosial bagi masyarakat miskin, rentan dan terdampak bencana alam. Hal-hal tersebut sekaligus mencerminkan bahwa hasil-hasil pembangunan tersebar lebih merata/berkeadilan; (iv) Meningkatnya solidaritas sosial sebagai wujud terbentuknya tatanan masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai kearifan lokal.

Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM adalah: (i) Meningkatnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang terjangkau dan berkualitas; (ii)

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil Negara (ASN) guna mendukung pelayanan yang prima dan berkeadilan; (iii) Meningkatnya penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM guna menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (iv) Menurunnya disparitas gender dalam proses pembangunan melalui meningkatnya partisipasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan strategis.

Indikator keberhasilan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan adalah (i) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; (ii) Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan kesehatan; (iii) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Indikator keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah menuju peningkatan kesejahteraan rakyat adalah: (i) Terbukanya keterisolasian wilayah dan percepatan pembangunan daerah terpencil terutama melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata yang dapat mendukung aksesibilitas dan akselerasi pengembangan potensi daerah; (ii) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan merencanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara arif, bijaksana dan berbasis pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan; (iii) Berkembangnya ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan dan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024 tersebut, sebagai penjabaran tahapan, arah dan kebijakan untuk mencapai Visi, harus pula menjadi bagian dari arah, kebijakan dan tahapan dalam pencapaian Misi RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005–2025, yaitu *“Kabupaten Donggala Yang Mandiri, Sejahtera dan Damai”*.

**Tabel 5.4.**  
**Keselarasan Misi RPJMD 2019–2024 dan Misi**  
**RPJPD 2005–2025**

| <b>Misi RPJMD 2019 – 2024</b>                                                                                                    | <b>Misi RPJPD 2005 - 2025</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i>          | <b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Suasana yang Aman dan Damai</i><br><br><b>Misi 4</b><br><i>Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas</i> |
| <b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan</i>                   | <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Kabupaten Donggala yang mandiri</i><br><br><b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Suasana yang Aman dan Damai.</i>                               |
| <b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.</i> | <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Kabupaten Donggala yang mandiri</i><br><br><b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Suasana yang Aman dan Damai</i>                                |
| <b>Misi 4</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan</i>                                                                       | <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Kabupaten Donggala yang</i>                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Misi RPJMD 2019 – 2024</b>                                                                                                              | <b>Misi RPJPD 2005 - 2025</b>                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Infrastruktur Daerah</i>                                                                                                                | <i>mandiri</i><br><br><b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Suasana yang Aman dan Damai</i>                                                     |
| <b>Misi 5</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i> | <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Kabupaten Donggala yang mandiri</i><br><br><b>Misi 2</b><br><i>Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Suasana yang Aman dan Damai</i> |

Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019–2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah harus pula menjadi bagian dari pencapaian 9 Misi dari Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2026 yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, sehingga memberikan keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Kabupaten Donggala dengan perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.5.**  
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Donggala**  
**Periode 2019–2024 dengan**  
**Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode**  
**2021–2026**

| <b>Misi RPJMD 2019 – 2024</b>                                                                                           | <b>Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2021 – 2026</b>                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i> | <b>Misi 2</b><br><i>Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM</i><br><br><b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i> |

| <b>Misi RPJMD 2019 – 2024</b>                                                                                                     | <b>Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2021 – 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p><b>Misi 5</b><br/>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Misi 2</b><br/>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan</p>                   | <p><b>Misi 1</b><br/>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <p><b>Misi 3</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p> <p><b>Misi 5</b><br/>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi 8</b><br/>Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital</p> |
| <p><b>Misi 3</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.</p> | <p><b>Misi 1</b><br/>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</p> <p><b>Misi 3</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p> <p><b>Misi 5</b><br/>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Misi 4</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>                                                  | <p><b>Misi 3</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p> <p><b>Misi 4</b><br/>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Misi RPJMD 2019 – 2024</b>                                                                                                              | <b>Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2021 – 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | <b>Misi 5</b><br><i>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</i>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Misi 5</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i> | <b>Misi 2</b><br><i>Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Daerah dan mendukung kemandirian energi</i><br><b>Misi 3</b><br><i>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan</i><br><b>Misi 5</b><br><i>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</i> |

Sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kabupaten Donggala Tahun 2019–2024, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Donggala 2005–2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, perlu pula memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Donggala menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional. Oleh karena itu, misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Donggala harus memiliki keselarasan dengan misi RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional lima tahunan.

**Tabel 5.6.**  
**Keselaran Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode**  
**2019–2024 dengan Misi RPJM Nasional Periode 2020–**  
**2024**

| <b>Misi RPJMD Periode<br/>2019 – 2024</b>                                                                                          | <b>Misi RPJM Nasional<br/>Periode 2020 – 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Misi 1</b></p> <p><i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i></p> | <p><b>Misi 2</b></p> <p>Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.</p> <p><b>Misi 3</b></p> <p>Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</p> <p><b>Misi 5</b></p> <p>Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p>                                                                                                                           |
| <p><b>Misi 2</b></p> <p><i>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan.</i></p>         | <p><b>Misi 2</b></p> <p>Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.</p> <p><b>Misi 4</b></p> <p>Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</p> <p><b>Misi 5</b></p> <p>Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p><b>Misi 6</b></p> <p>Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> |



| <b>Misi RPJMD Periode<br/>2019 – 2024</b>                                                                                                | <b>Misi RPJM Nasional<br/>Periode 2020 – 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Misi 3</b><br/><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.</i></p> | <p><b>Misi 1</b><br/>Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p><b>Misi 2</b><br/>Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum</p> <p><b>Misi 4</b><br/>Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</p> <p><b>Misi 5</b><br/>Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p><b>Misi 6</b><br/>Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> |
| <p><b>Misi 4</b><br/><i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.</i></p>                                                 | <p><b>Misi 1</b><br/>Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p><b>Misi 4</b><br/>Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</p> <p><b>Misi 5</b><br/>Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p><b>Misi 6</b><br/>Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p>                                                                                                            |

| <b>Misi RPJMD Periode<br/>2019 – 2024</b>                                                                                                            | <b>Misi RPJM Nasional<br/>Periode 2020 – 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Misi 5</b><br/> <i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.</i></p> | <p><b>Misi 1</b><br/> Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p><b>Misi 4</b><br/> Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</p> <p><b>Misi 5</b><br/> Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.</p> <p><b>Misi 6</b><br/> Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> |

Keselarasan antara misi Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024, dengan misi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka misi Perubahan RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024 perlu pula memperhatikan tiga dimensi pembangunan, yang meliputi: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan prioritas, dan; (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan serta menyelaraskan dengan sembilan agenda prioritas NAWA CITA, menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Keselarasan misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan RPJP maupun RTRW Kabupaten Donggala, harus pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keselarasan dokumen perencanaan ini dimaksudkan agar misi pembangunan daerah menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global,

sehingga pada Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relatif semakin membaik bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan komitmen bersama secara global dan nasional bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

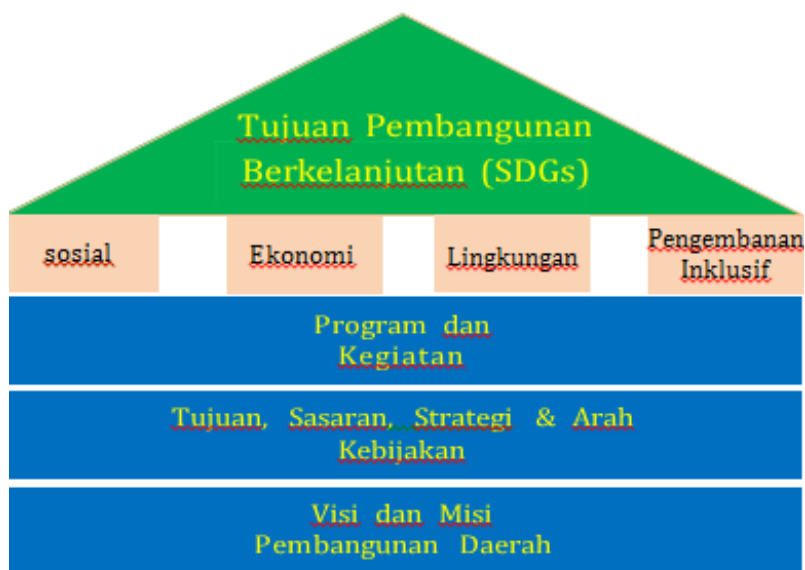
Penyusunan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin dari program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang yang bertujuan untuk:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat;
- 2) Penyediaan energi yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan dan penataan kota inklusif dan berkelanjutan;
- 3) Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan, meningkatkan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
- 4) Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan, serta menjalin kemitraan untuk melaksanakan semua tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan yang dilaksanakan, yaitu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah dengan mengacu pada batas-batas toleransi kerusakan lingkungan, degradasi daya dukung

lahan, perubahan iklim, mitigasi bencana dan keberlanjutan ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencakup 17 tujuan, yang dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Pembangunan Inklusif. Misi pemerintah daerah sebagai penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program dan kegiatan, harus memenuhi 17 tujuan dimaksud.



Integrasi Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala yang tertuang dalam RPJMD Periode 2019–2024, dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (MDGs), adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8**

**Integrasi Misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024 Kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

| Misi RPJMD Periode 2019–2024                                                                                            | Tujuan SDGs 2015–2030 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1</b><br><i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i> | Tujuan 1              | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.                                                                               |
|                                                                                                                         | Tujuan 2              | Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. |

| Misi RPJMD Periode 2019-2024                                                                                       | Tujuan SDGs 2015-2030                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.                                                                                    |
|                                                                                                                    | Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.                                                                                                             |
|                                                                                                                    | Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Tujuan 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. |
|                                                                                                                    | Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.                                                                                                         |
| <b>Misi 2</b><br><br><i>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan</i> | Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    | Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.                                                                                          |

| Misi RPJMD Periode 2019–2024                                                                                                     | Tujuan SDGs 2015–2030                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.                                                                                              |
|                                                                                                                                  | Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua                                                            |
|                                                                                                                                  | Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua                                                                       |
|                                                                                                                                  | Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. |
|                                                                                                                                  | Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.                                          |
|                                                                                                                                  | Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.                                                                                                           |
|                                                                                                                                  | Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.                                                       |
| <b>Misi 3</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.</i> | Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                  | Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.                                        |
|                                                                                                                                  | Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.                                                                 |

| <b>Misi RPJMD Periode 2019–2024</b> | <b>Tujuan SDGs 2015–2030</b>                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang Inklusif dan merata serta Meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.                                                                                    |
|                                     | Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan                                                                                                                                                 |
|                                     | Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.                                                                                                             |
|                                     | Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.                                                                                                                        |
|                                     | Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.                                                   |
|                                     | Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.                                                                                            |
|                                     | Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.                                                                                                                                                             |
|                                     | Tujuan 12 Menjamin pola produksi konsumsi yang berkelanjutan.                                                                                                                                                        |
|                                     | Tujuan 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. |
|                                     | Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.                                                                                                         |

| <b>Misi RPJMD Periode 2019–2024</b>                                             | <b>Tujuan SDGs 2015–2030</b> |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 4</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</i> | Tujuan 3                     | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.                                                                 |
|                                                                                 | Tujuan 4                     | Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.                                  |
|                                                                                 | Tujuan 6                     | Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua                                                            |
|                                                                                 | Tujuan 7                     | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua                                                                       |
|                                                                                 | Tujuan 8                     | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. |
|                                                                                 | Tujuan 9                     | Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.                                          |
|                                                                                 | Tujuan 10                    | Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.                                                                                                            |
|                                                                                 | Tujuan 11                    | Menjadikan kota dan per- mukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.                                                                              |
|                                                                                 | Tujuan 13                    | Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.                                                                                   |
|                                                                                 | Tujuan 14                    | Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera dalam hal pembangunan berkelanjutan                                  |



| Misi RPJMD Periode 2019–2024                                                                                                               | Tujuan SDGs 2015–2030                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Tujuan 17      Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.                                                       |
| <b>Misi 5</b><br><i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i> | Tujuan 1      Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                            | Tujuan 2      Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.                                        |
|                                                                                                                                            | Tujuan 3      Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.                                                                 |
|                                                                                                                                            | Tujuan 5      Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan                                                                                               |
|                                                                                                                                            | Tujuan 6      Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.                                                           |
|                                                                                                                                            | Tujuan 7      Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.                                                                      |
|                                                                                                                                            | Tujuan 8      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. |
|                                                                                                                                            | Tujuan 9      Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.                                          |

| Misi RPJMD Periode 2019–2024 | Tujuan SDGs 2015–2030                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.                                                                                                                                                                           |
|                              | Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.                                                                                                             |
|                              | Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. |
|                              | Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.                                                                                                                                |

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (b), wajib dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RPJMD. Oleh karena itu, integrasi Misi RPJMD Kabupaten Donggala dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan dokumen RKP yang telah dituangkan dalam program pencapaian misi RPJMD Kabupaten Donggala Periode 2019–2024.

KLHS digunakan sebagai acuan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan atau telah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan agar dampak atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir, sedangkan dalam evaluasi kebijakan rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko

negatif terhadap lingkungan.

KLHS RPJMD Kabupaten Donggala bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, di mana seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan tersebut.

Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan demikian, maka implementasi program atau kegiatan yang mengacu pada misi yang tertuang dalam RPJMD dapat mempertimbangkan seberapa besar dampak negative yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan terhadap keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan.

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala selama Periode 2019–2023, adalah:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM, dengan **sasaran:**
  - 1) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - 2) Optimalnya pelaksanaan pelayanan publik/pelayanan prima;
  - 3) Profesionalnya aparatur dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan;
  - 4) Terlaksananya Akuntabilitas dalam semua level kepemimpinan;
  - 5) Meningkatnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat pemerintahan Desa sampai pada level pemerintahan kabupaten;
  - 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah dan semua komponen kekuatan terhadap penegakan aturan dan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - 7) Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan toleransi inter dan antar

umat beragama;

- 8) Meningkatnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia;
  - 9) Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;
  - 10) Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial.
2. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan, dengan **Sasaran:**
- a. Pengelolaan Sumber Daya (*Pemerintah dan Masyarakat*)
    - 1) Optimalnya peran aktif Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
    - 2) Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan (*pembangunan partisipatif*).
  - b. Sumber Daya Alam dan Energi (*semua terdapat di bumi baik yang hidup maupun yang mati yang berguna bagi manusia*)
    - 1) Terkelolahnya sumber daya hutan, tambang, energi dan kelautan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan;
    - 2) Meningkatnya luas hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR) yang berorientasi pada kearifan lokal;
    - 3) Optimalnya peran aktif masyarakat dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam;
    - 4) Terciptanya kawasan konservasi hutan, laut dan perairan.
  - c. Sumber Daya Ekonomi (*Pasar/DUDI*)
    - 1) Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan;
    - 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi, kegiatan ekspor dan perdagangan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah;

- 3) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pola kemitraan;
- 4) Optimalnya pemberian pelayanan perizinan usaha secara profesional, mudah, efektif dan efisien.

d. Sumber Daya IPTEK (*Sains dan TIG*)

Meningkatnya produktivitas kegiatan pembangunan melalui penerapan sains dan teknologi tepat guna

e. Sumber Daya Jasa/Mitra (*Swasta*)

Meningkatnya peran swasta dalam menciptakan iklim usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

f. Sumber Daya Kelembagaan (*Organisasi*)

- 1) Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan dalam aktivitas pembangunan.
- 2) Meningkatkan peran perempuan guna menguatkan sendi-sendi kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang secara kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan, dengan **Sasaran:**

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur di semua level pemerintahan;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal;
- 3) Meningkatkan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun bagi anak usia sekolah;
- 4) Tuntasnya buta aksara;
- 5) Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat;
- 6) Terciptanya keluarga yang berkualitas;
- 7) Meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan;
- 8) Tersedianya sumber daya manusia sesuai potensi Daerah;
- 9) Terimplementasinya nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan;

- 10) Meningkatnya penghayatan dan pendalaman nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
  - 11) Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan.
4. Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, dengan

**Sasaran:**

- 1) Tersedianya infrastruktur penunjang yang memadai;
  - 2) Penataan lingkungan perumahan dan pelayanan publik pasca bencana alam;
  - 3) Membangun sarana transportasi guna membuka keterisolasian wilayah.
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan **Sasaran:**
- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal;
  - 2) Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan;
  - 3) Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri;
  - 4) Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender;
  - 5) Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat;
  - 6) Tersedianya tata ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak (Penyediaan fasilitas pojok laktasi dan nutrisi di ruang publik);
  - 7) Menguatnya kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koseran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - 8) Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi yang potensial dan prospektif.

***Visi: “Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal”***

**Tabel 5.8****Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Dan sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis**

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter Dengan Berpijak Pada Nilai Kearifan Lokal.**

| Misi                                                                                                            | Tujuan                                                                                           | Sasaran                                                                           | Indikator                                                                                         | Kondisi Awal 2019        | Target Capaian          |                           |                            |                                |                                 | Kondisi Akhir                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                   |                          | 2020                    | 2021                      | 2022                       | 2023                           | 2024                            |                                 |
| <b>Misi 1</b><br>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM | <b>Tujuan 1.1</b><br><br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif |                                                                                   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                        | 59,80 (CC)               | 64,22<br><br>(B)        | 67,25<br><br>(B)          | 67,25<br><br>(B)           | <b>69,25</b><br><br><b>(B)</b> | <b>71,25</b><br><br><b>(BB)</b> | <b>71,25</b><br><br><b>(BB)</b> |
|                                                                                                                 |                                                                                                  | <b>Sasaran 1.1.1</b><br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | 1. Indeks Persepsi Korupsi<br><br>2. Opini BPK terhadap LKPD<br><br>3. Indeks Kepuasan Masyarakat | 3<br><br>WDP<br><br>2,92 | 3,2<br><br>WTP<br><br>3 | 3,6<br><br>WTP<br><br>3,1 | 3,7<br><br>WTP<br><br>3,25 | 3,9<br><br>WTP<br><br>3,35     | 4,1<br><br>WTP<br><br>3,45      | 4,1<br><br>WTP<br><br>3,45      |
|                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                   |                          |                         |                           |                            |                                |                                 |                                 |

| Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator                                                                 | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |        |                                                                                                                                           |                                                                           |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      |        | <b>Sasaran 1.1.2</b><br>Meningkatnya Kapabilitas dan profesionalisme aparatur                                                             | Rata-rata Nilai Rapor Kinerja ASN pada semua Perangkat Daerah             | -                 | 65             | 69   | 72   | 74   | 76   | 76            |
|      |        | <b>Sasaran 1.1.3</b><br>Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat                                    | Persentase Terjadinya Perkelaian masyarakat / Perkelaian Antar Desa (PAD) | 0%                | 0%             | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%            |
|      |        | <b>Sasaran 1.1.4</b><br>Meningkatnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia | Persentase terjadinya konflik di masyarakat yang bernuansa SARA           | 0%                | 0%             | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%            |
|      |        | <b>Sasaran 1.1.5</b><br>Meningkatnya kesiagaan Masyarakat menghadapi bencana alam                                                         | Persentase Menurunnya jumlah korban bencana                               | 50%               | 55%            | 60%  | 65%  | 70%  | 75%  | 75%           |
|      |        |                                                                                                                                           |                                                                           |                   |                |      |      |      |      |               |



| Misi | Tujuan                                                                                  | Sasaran                                                                                  | Indikator                                                      | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |            |            |            |            | Kondisi Akhir |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                |                   | 2020           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |               |
|      | <b>Tujuan 1.2</b><br>Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang efektif dan transparan |                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                               | 65                | 66             | 69         | 70         | 75         | 80         | 80            |
|      |                                                                                         | <b>Sasaran 1.2.1</b><br>Meningkatnya pelayanan Publik yang cepat dan Prima               | Persentase PD yang melayani masyarakat tepat dan cepat         | 70%               | 75%            | 75%        | 80%        | 80%        | 80%        | 80%           |
|      |                                                                                         | <b>Sasaran 1.2.2</b><br>Mewujudkan administrasi kearsipan dan pelestarian dokumen daerah | Persentase tingkat pengelolaan kearsipan sesuai standar teknis | 75%               | 75%            | 76%        | 78%        | 80%        | 80%        | 80%           |
|      | <b>Tujuan 1.3</b><br><br>Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata         |                                                                                          | Persentase Peserta BPJS                                        | 60%               | <b>65%</b>     | <b>70%</b> | <b>72%</b> | <b>74%</b> | <b>75%</b> | <b>75%</b>    |

| Misi                                                                                                    | Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                    | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                   | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
|                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Sasaran 1.3.1</b><br><br>Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang social | Persentase peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang social | 90%               | 90%            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 90%           |
| <b>Misi 2</b><br>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan | <b>Tujuan 2.1</b><br>Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya <i>(Pemerintah dan Masyarakat)</i> |                                                                                                                                                | <b>Persentase Sumber Daya yang dioptimalkan</b>                                                                              | 25%               | 30%            | 35%    | 45%    | 55%    | 60%    | 60%           |
|                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Sasaran 2.1.1</b><br>Optimalnya peran aktif aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang membuat Dokumen Perencanaan sesuai standar teknis                                               | 25 OPD            | 35 OPD         | 40 OPD | 45 OPD | 50 OPD | 54 OPD | 54 OPD        |

| Misi | Tujuan            | Sasaran                                                                                                                                                    | Indikator                                                | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |               |            |               |            | Kondisi Akhir |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|      |                   |                                                                                                                                                            |                                                          |                   | 2020           | 2021          | 2022       | 2023          | 2024       |               |
|      |                   |                                                                                                                                                            |                                                          |                   |                |               |            |               |            |               |
|      |                   | <b>Sasaran 2.1.2</b><br><br>Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan <i>(pembangunan partisipatif)</i> | Persentase partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang | 70%               | 75%            | 80%           | 85%        | 90%           | 90%        | 90%           |
|      | <b>Tujuan 2.2</b> |                                                                                                                                                            | <b>Persentase pengelolaan SDA</b>                        | <b>10%</b>        | <b>15%</b>     | <b>17,50%</b> | <b>20%</b> | <b>22,50%</b> | <b>25%</b> | <b>25%</b>    |

| Misi | Tujuan                                                                                                                                 | Sasaran                                                                                                                                                | Indikator                                                                        | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                  |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi (semua terdapat di bumi baik yang hidup maupun yang mati yang berguna bagi manusia) |                                                                                                                                                        | untuk penyediaan Energi Baru dan Terbarukan                                      |                   |                |      |      |      |      |               |
|      |                                                                                                                                        | <b>Sasaran 2.2.1</b><br>Terkelolahnya sumber daya hutan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan | Persentase luasan hutan Produktif yang dikelola masyarakat yang ramah lingkungan | 35%               | 40%            | 45%  | 50%  | 60%  | 70%  | 70%           |
|      |                                                                                                                                        | <b>Sasaran 2.2.2</b>                                                                                                                                   | Persentase meningkatnya                                                          | 40%               | 45%            | 50%  | 55%  | 60%  | 70%  | 70%           |

| Misi | Tujuan            | Sasaran                                                                                                                                            | Indikator                                                                  | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |                   |                                                                                                                                                    |                                                                            |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      |                   | Meningkatnya luas hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR) yang berorientasi pada kearifan lokal | HTR, HKM, HD dan HR sesuai kearifan lokal                                  |                   |                |      |      |      |      |               |
|      |                   | <b>Sasaran 2.2.3</b><br>Meningkatnya peran aktif dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam                | Persentase luasan hutan yang terjaga kelestarian SDA sesuai standar teknis | 70%               | 72%            | 75%  | 76%  | 78%  | 80%  | 80%           |
|      |                   | <b>Sasaran 2.2.4</b><br>Meningkatnya penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya daerah terpencil dan kepulauan                            | Rasio Elektrifikasi daerah terpencil dan Kepulauan                         | 94%               | 95%            | 96%  | 98%  | 100% | 100% | 100%          |
|      | <b>Tujuan 2.3</b> |                                                                                                                                                    | Persentase                                                                 | 40%               | 45%            | 50%  | 55%  | 60%  | 65%  | 65%           |

| Misi | Tujuan                                                  | Sasaran                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                               | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |              |              |              |              | Kondisi Akhir |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               |
|      | Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (Pasar/DUDI) |                                                                                                                                               | potensi ekonomi yang dikelola                                                                                           |                   |                |              |              |              |              |               |
|      |                                                         | <b>Sasaran 2.3.1</b><br>Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan | Jumlah Perkada tentang peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan yang diterbitkan | 1 perbub          | 2 perbub       | 2<br>perbub  | 3<br>perbub  | 3<br>perbub  | 4 perbub     | 4 Perbub      |
|      |                                                         | <b>Sasaran 2.3.2</b><br>Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                                                             | Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang mengalami peningkatan aset                                                             | 1.000 KUM         | 1.250 KUM      | 1.300<br>KUM | 1.400<br>KUM | 1.450<br>KUM | 1.500<br>KUM | 1.500<br>KUM  |
|      |                                                         | <b>Sasaran 2.3.3</b>                                                                                                                          |                                                                                                                         | 10%               | 12%            | 14%          | 15%          | 16%          | 18%          | 18%           |

| Misi | Tujuan                             | Sasaran                                                                                                                                               | Indikator                                                      | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |           |           |           |           | Kondisi Akhir |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|      |                                    |                                                                                                                                                       |                                                                |                   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |               |
|      |                                    | Meningkatnya kerjasama ekonomi, kegiatan ekspor dan perdagangan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah | Persentase peningkatan volume Ekspor komoditas unggulan daerah |                   |                |           |           |           |           |               |
|      |                                    | <b>Sasaran 2.3.4</b><br><br>Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                                                     | Persentase IKM yang mengalami peningkatan aset                 | 1.500 IKM         | 1.750 IKM      | 2.000 IKM | 2.100 IKM | 1.250 IKM | 2.500 IKM | 2.500 IKM     |
|      |                                    | <b>Sasaran 2.3.5</b><br><br>Terwujudnya Penataan Struktur Industri dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial                                  | Jumlah sentra-sentra industri potensial yang terbentuk         | 3 sentra          | 3 sentra       | 5 sentra  | 6 sentra  | 7 sentra  | 8 sentra  | 8 sentra      |
|      | <b>Tujuan 2.4</b><br>Mengembangkan |                                                                                                                                                       | Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan                          | 10 OW             | 12 OW          | 14 OW     | 16 OW     | 20 OW     | 25 OW     | 25 OW         |

| Misi                                                                                                                     | Tujuan                                                                                                                                       | Sasaran                                                                                           | Indikator                                                   | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |              |              |              |              | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                             |                   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               |
|                                                                                                                          | obyek wisata                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                             |                   |                |              |              |              |              |               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                              | <b>Sasaran 2.4.1</b><br>Terlaksananya Inventarisasi Destinasi wisata                              | Jumlah destinasi wisata yang terinventarisir secara lengkap | 25 OW             | 30 OW          | 35 OW        | 40 OW        | 40 OW        | 45 OW        | 45 obyek      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                              | <b>Sasaran 2.4.2</b><br>Meningkatnya aksesibilitas obyek wisata                                   | Jumlah destinasi wisata yang memiliki akses memadai         | 5 OW              | 7 OW           | 10 OW        | 12 OW        | 15 OW        | 20 OW        | 20 obyek      |
| <b>Misi 3</b><br>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan | <b>Tujuan 3.1</b><br><i>Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa</i> |                                                                                                   | <b>Indeks Pendidikan</b>                                    | <b>66,65</b>      | <b>68,01</b>   | <b>70,65</b> | <b>71,41</b> | <b>72,02</b> | <b>73,75</b> | <b>73,75</b>  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                              | <b>Sasaran 3.1.1</b><br>Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas | Persentase capaian SPM pendidikan                           | 60%               | 65%            | 70%          | 75%          | 78%          | 80%          | 80%           |



| Misi | Tujuan                                                                                                        | Sasaran                                                                                                                          | Indikator                                                                                                | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |              |              |              |              | Kondisi Akhir |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               |
|      |                                                                                                               | <b>Sasaran 3.1.2</b><br>Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar                                                      | Persentase Guru (PAUD, SD, SMP) memiliki kuafikasi S1 atau D4                                            | 65 % %            | 70%            | 73%          | 75%          | 80%          | 85%          | 85%           |
|      |                                                                                                               | <b>Sasaran 3.1.3</b><br>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan                                                             | Persentase standar sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar                                 | 35%               | 45%            | 50%          | 55%          | 60%          | 65%          | 65%           |
|      | <b>Tujuan 3.2</b><br><i>Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan lembaga adat</i> |                                                                                                                                  | Jumlah Desa yang menerapkan nilai – nilai budaya dan adat istiadat dalam interaksi sosial dan lingkungan | 5 desa            | 7 desa         | 10 desa      | 16 desa      | 20 desa      | 25 desa      | 25 desa       |
|      |                                                                                                               | <b>Sasaran 3.2.1</b><br>Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal | Jumlah Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal       | 5 lembaga         | 7 lembaga      | 10 lembaga   | 16 lembaga   | 20 lembaga   | 25 lembaga   | 10 lembaga    |
|      | <b>Tujuan 3.3</b>                                                                                             |                                                                                                                                  | <b>Indeks</b>                                                                                            | <b>64,66</b>      | <b>66,21</b>   | <b>68,15</b> | <b>69,01</b> | <b>70,52</b> | <b>71,65</b> | <b>71,65</b>  |

| Misi | Tujuan                                                              | Sasaran                                                                        | Indikator                                                                                                    | Kondisi Awal 2019                  | Target Capaian                    |                                     |                                   |                                    |                                    | Kondisi Akhir                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                     |                                                                                |                                                                                                              |                                    | 2020                              | 2021                                | 2022                              | 2023                               | 2024                               |                                   |
|      | <i>Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas</i> |                                                                                | <b>Kesehatan</b>                                                                                             |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |                                    |                                   |
|      |                                                                     | <b>Sasaran 3.3.1</b><br>Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan gratis | Jumlah masyarakat miskin yang mendapat JKM                                                                   | 55.450 orang                       | 54.165 orang                      | 53.280 orang                        | 49.150 orang                      | 40.200 orang                       | 30.550 orang                       | 30.550 orang                      |
|      |                                                                     | <b>Sasaran 3.3.2</b><br>Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan            | Jumlah rumah sakit, puskesmas, Pustu dan Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai | 2 RS, 16 Pmas, 60 Pusdes, 15 Pustu | 2 RS, 18 Pmas, 65 pudes, 18 Pustu | 2 RS, 206 Pmas, 70 Pusdes, 20 Pustu | 2 RS, 22 Pmas, 75 pudes, 22 Pustu | 2 RS, 22 Pmas, 78 Pusdes, 24 Pustu | 2 RS, 22 Pmas, 80 Pusdes, 25 Pustu | 2 RS, 22 Pmas, 80 pudes, 25 Pustu |
|      |                                                                     | <b>Sasaran 3.3.3</b><br>Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan   | Persentase peningkatan Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai standar                               | 5%                                 | 10%                               | 15%                                 | 20%                               | 25%                                | 30%                                | 30%                               |
|      |                                                                     | <b>Sasaran 3.3.4</b><br>Tersedianya obat yang berkualitas                      | Persentase jumlah jenis obat yang tersedia sesuai kebutuhan                                                  | 25%                                | 30%                               | 40%                                 | 45%                               | 50%                                | 60%                                | 60%                               |
|      |                                                                     | <b>Sasaran 3.3.5</b><br>Meningkatnya Status Gizi                               | Presentase balita penderita Gizi Buruk                                                                       | 0,50%                              | 0,30%                             | 0,10%                               | 0,05%                             | 0,03%                              | 0,01%                              | 0,01%                             |

| Misi | Tujuan                                                                                       | Sasaran                                                                    | Indikator                                                                         | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |              |              |              |              | Kondisi Akhir |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                   |                   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               |
|      |                                                                                              | Masyarakat                                                                 |                                                                                   |                   |                |              |              |              |              |               |
|      | <b>Tujuan 3.4</b><br><i>Meningkatkan pelayanan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</i> |                                                                            | Jumlah Aseptor KB                                                                 | 30,000 orang      | 40,000 orang   | 49,000 orang | 54,000 orang | 56,000 orang | 60,000 orang | 60,000 orang  |
|      |                                                                                              | <b>Sasaran 3.4.1</b><br>Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera | Persentase Keluarga yang menerapkan pola hidup sehat                              | 45%               | 50%            | 55%          | 60%          | 70%          | 75%          | 75%           |
|      | <b>Tujuan 3.5</b><br><i>Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga</i>                        |                                                                            | Jumlah organisasi pemuda untuk pengembangan bakat dan minat yang dibina           | 30 org            | 40 org         | 45 org       | 50 org       | 70 org       | 75 org       | 75 org        |
|      |                                                                                              | <b>Sasaran 3.5.1</b><br>Meningkatnya ketersediaan Fasilitas olahraga       | Persentase fasilitas olahraga yang tersedia secara memadai sesuai cabang olahraga | 10%               | 15%            | 20%          | 25%          | 30%          | 40%          | 40%           |
|      |                                                                                              | <b>Sasaran 3.5.2</b>                                                       | Persentase                                                                        | 40%               | 50%            | 60%          | 65%          | 70%          | 75%          | 75%           |

| Misi | Tujuan                                                                                        | Sasaran                                                                       | Indikator                                                                                                    | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |                                                                                               |                                                                               |                                                                                                              |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      |                                                                                               | Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran serta pemuda                      | peningkatan peran pemuda dalam pembangunan                                                                   |                   |                |      |      |      |      |               |
|      | <b>Tujuan 3.6</b><br><i>Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan</i> |                                                                               | Persentase partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah                                                    | 10%               | 15%            | 20%  | 25%  | 30%  | 35%  | 35%           |
|      |                                                                                               | <b>Sasaran 3.6.1</b><br>Terwujudnya pengarusutamaan Gender                    | Persentase angka diskriminasi terhadap perempuan                                                             | 10%               | 5%             | 5%   | 4%   | 3%   | 1%   | 1%            |
|      |                                                                                               | <b>Sasaran 3.6.2</b><br><br>Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek | Persentase perempuan dalam keanggotaan DPRD dan keterlibatan Perempuan dalam pemerintahan dan keorganisasian | 10%               | 15%            | 20%  | 25%  | 30%  | 35%  | 35%           |
|      |                                                                                               | <b>Sasaran 3.6.3</b><br>Terwujudnya pemenuhan Hak perempuan dan anak          | Persentase pemenuhan hak perempuan dan anak                                                                  | 60%               | 65%            | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  | 85%           |

| Misi                                                                     | Tujuan                                                                                           | Sasaran                                                                                                       | Indikator                                                                                                       | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                 |                   | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
| <b>Misi 4</b><br>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | <b>Tujuan 4.1</b><br>Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas            |                                                                                                               | <b>Persentase tersedianya Infrastruktur Dasar yang memadai</b>                                                  | 10%               | 15%            | 20%    | 25%    | 30%    | 35%    | 35%           |
|                                                                          |                                                                                                  | <b>Sasaran 4.1.1</b><br>Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah | Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap pada wilayah (Kecamatan dan Desa) tertinggal atau sangat tertinggal | 30%               | 39%            | 44,47% | 50%    | 52%    | 55%    | 55%           |
|                                                                          |                                                                                                  | <b>Sasaran 4.1.2</b><br>Terwujudnya pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya       | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik                                                                    | 45,60%            | 58,51%         | 60,14% | 62%    | 63,45% | 65%    | 65%           |
|                                                                          | <b>Tujuan 4.2</b><br>Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas |                                                                                                               | Persentase tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memenuhi standar                                | 40%               | 42,15%         | 45,71% | 50,18% | 52,45% | 55,00% | 55,00%        |
|                                                                          |                                                                                                  | <b>Sasaran 4.2.1</b>                                                                                          | Persentase tersedianya                                                                                          | 40%               | 42,15%         | 45,71% | 50,18% | 52,45% | 55,00% | 55,00%        |

| Misi | Tujuan                                                                        | Sasaran                                                                                                               | Indikator                                                                                   | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                             |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      |                                                                               | Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                                                           | prasarana dan fasilitas perhubungan (Darat dan Laut) yang memadai dan berfungsi dengan baik |                   |                |      |      |      |      |               |
|      | <b>Tujuan 4.3</b><br>Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan |                                                                                                                       | Persentase pemanfaatan ruang dan lingkungan sehat perumahan                                 | 60%               | 65%            | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  | 85%           |
|      |                                                                               | <b>Sasaran 4.3.1</b><br>Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                         | Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai perda                                              | 80%               | 85%            | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100%          |
|      |                                                                               | <b>Sasaran 4.3.2</b><br>Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan pencegahan bahaya kebakaran | Persentase pengelolaan lingkungan perumahan yang memenuhi standar teknis                    | 80%               | 85%            | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100%          |

| Misi | Tujuan                                                                                             | Sasaran                                                                              | Indikator                                                    | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|      |                                                                                                    |                                                                                      |                                                              |                   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |               |
|      | <b>Tujuan 4.4</b><br>Mewujudkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan konservasi sumber daya alam |                                                                                      | Indeks Pencemaran Lingkungan                                 | na                | na             | na   | na   | na   | na   | na            |
|      |                                                                                                    | <b>Sasaran 4.4.1</b><br>Terwujudnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan               | Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)                      | na                | na             | na   | na   | na   | na   | na            |
|      |                                                                                                    | <b>Sasaran 4.4.2</b><br>Terwujudnya Perlindungan dan Pengendalian kawasan konservasi | Persentase terjaganya kawasan konservasi                     | 70%               | 75%            | 80%  | 90%  | 100% | 100% | 100%          |
|      | <b>Tujuan 4.5</b><br>Mewujudkan Reformasi Agraria dan Penyelesaian konflik pertanahan              |                                                                                      | Persentase Penduduk yang memiliki sertifikat Hak Milik Tanah | 25%               | 30%            | 40%  | 55%  | 60%  | 70%  | 70%           |
|      |                                                                                                    | <b>Sasaran 4.5.1</b>                                                                 |                                                              | 25%               | 30%            | 40%  | 55%  | 60%  | 70%  | 70%           |

| Misi                                                                                                                                | Tujuan                                                                                                                      | Sasaran                                                                                     | Indikator                                                     | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                               |                   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah                | Persentase pemilik tanah yang memiliki sertifikat             |                   |                |       |       |       |       |               |
| <b>Misi 5</b><br>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan | <b>Tujuan 5.1</b><br>Mewujudkan Kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan |                                                                                             | <b>PDRB atas harga berlaku</b>                                | 12,25             | 38,25          | 38,63 | 39,02 | 40,19 | 41,40 | 41,40         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             | <b>Sasaran 5.1.1</b><br>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal | Persentase pertumbuhan ekonomi sector potensi unggulan daerah | 5,00%             | -5,00%         | 5,40% | 5,72% | 6,00% | 6,50% | 6,50%         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             | <b>Sasaran 5.1.2</b>                                                                        | Persentase penurunan                                          | 18,40             | 17,39          | 16,73 | 15,76 | 14,79 | 13,82 | 13,82         |



| Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                   | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |           |           |           |           | Kondisi Akhir |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |               |
|      |        | Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan                                                           | masyarakat miskin                                                                                                           |                   |                |           |           |           |           |               |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.3</b><br><br>Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri                                    | Jumlah BUMDesa yang berfungsi secara aktif                                                                                  | 16 BUMDes         | 25 BUMDes      | 35 BUMDes | 45 BUMDes | 55 BUMDes | 65 BUMDes | 65 BUMDes     |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.4</b><br><br>Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender | Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan Gender | 20%               | 25%            | 30%       | 40%       | 45%       | 50%       | 50%           |

| Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                                                        | Indikator                                                      | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                |                                                                |                   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |               |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.5</b><br>Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat                                                                                             | Persentase TPAK                                                | 60%               | 62%            | 64%   | 74%   | 75%   | 80%   | 80%           |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.6</b><br>Tersedianya tata ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak (Penyediaan fasilitas pojok laktasi dan nutrisi di ruang publik)                      | Persentase fasilitas publik yang ramah bagi anak dan perempuan | 10%               | 15%            | 20%   | 25%   | 30%   | 35%   | 35%           |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.7</b><br>Memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koseran dalam penanganan | Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak         | 1%                | 0,50%          | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00%         |

| Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                  | Indikator                                                                      | Kondisi Awal 2019 | Target Capaian |         |         |         |         | Kondisi Akhir |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|      |        |                                                                                                                                          |                                                                                |                   | 2020           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |               |
|      |        | kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                                              |                                                                                |                   |                |         |         |         |         |               |
|      |        | <b>Sasaran 5.1.8</b><br>Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi yang potensial dan prospektif | Jumlah Kawasan Tertentu cepat tumbuh sesuai potensi unggulan kawasan perdesaan | 0 kwsan           | 1 kwsan        | 2 kwsan | 3 kwsan | 4 kwsan | 6 kwsan | 6 kwsan       |

#### 5.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan motivasi sekaligus menjadi acuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019–2023, perlu dijabarkan lebih operasional ke dalam rumusan prioritas pembangunan daerah agar dapat diimplementasikan dan terukur tingkat keberhasilannya. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dalam lima tahun mendatang, sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Donggala, sekaligus sebagai agenda utama dalam pencapaian visi ***“Terwujudnya Masyarakat Donggala Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal ”***

Pemanfaatan secara optimal, efisien dan efektif potensi sumber daya yang dimiliki dibarengi dengan langkah-langkah kebijakan strategis sesuai Misi yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Donggala lima tahun mendatang adalah:

**Misi 1:** *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*

- ❖ Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ Restrukturisasi lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan daerah guna mencapai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pelayanan prima kepada masyarakat secara adil dan merata;
- ❖ Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan merata.
- ❖ Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM

**Misi 2:** *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan*

- ❖ Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan, tambang, energi dan kelautan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan;
- ❖ Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- ❖ Mewujudkan pembentukan regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan.

**Misi 3:** *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.*

- ❖ Membangun fasilitas pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- ❖ Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan anak didik;
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- ❖ Peningkatan Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sampai ke pelosok desa terpencil ;
- ❖ Pemberian insentif bagi petugas kesehatan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.
- ❖ Peningkatan pembinaan keagamaan di kalangan masyarakat;

**Misi 4:** *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*

- ❖ Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah;
- ❖ Membangun sarana transportasi yang dapat membuka keterisolasian wilayah;

- ❖ Mendukung dan memfasilitasi pembangunan hunian yang layak pasca bencana alam;
- ❖ Penataan dan pembangunan lingkungan perumahan yang pelayanan publik pasca bencana alam;
- ❖ Membangun sarana dan prasarana umum berbasis kelestarian lingkungan.

**Misi 5:** *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*

- ❖ Pengembangan investasi dibidang Pertanian dan Perikanan;
- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi penyediaan sarana pemasaran hasil- hasil pertanian dan perikanan;
- ❖ Mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM);
- ❖ Mendorong Penguatan Dunia Usaha Lokal yang Berbasis Potensi Daerah dan Penataan Kebijakan Investasi;
- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi dan
- ❖ Kerjasama di Bidang Investasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha.

#### **5.4.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan Nasional Dan Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 Serta RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2023.**

##### **5.4.1.1 Subtansi RPJM Nasional tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui undang-undang Nomor 17 Tahun

2007, dengan berpedoman kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik serta tersusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*).

Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuan pembangunan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945*. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah, untuk memenuhi 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

### 5.4.1.2 RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Secara konsepsional gagasan “Incorporated” merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Berdasarkan mempertimbangkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan: “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021-2026 merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025, yaitu “Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-



Nilai kemanusiaan dan HAM.

3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan V - 10 dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 6.1. STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Donggala lima tahun ke depan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tersebut perlu diimplementasikan secara berkelanjutan dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam kurun waktu 2019-2024.

Strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, ditentukan berdasarkan hasil analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) yang dilakukan. Strategi merupakan rumusan berupa pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah melalui program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran visi dan misi pembangunan, dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu selama lima tahun.

Strategi yang ditempuh dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

**Misi 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.**

Strategi yang digunakan terkait dengan misi ke satu yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, yaitu melakukan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal, berkualitas dan merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Donggala. Pelibatan secara aktif kaum perempuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Donggala dalam lima tahun ke depan harus didorong, sehingga misi ini menempatkan kesetaraan gender pada posisi yang cukup strategis.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2019 – 2024). Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, adalah:

**Strategi:** Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik pada semua tingkat pemerintahan

**Program:**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- d. Program Pendaftaran Penduduk;
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

**Strategi:** Meningkatkan penataan organisasi, tata laksana dan tertib regulasi

**Program:**

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

**Strategi:** Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan

**Program:**

- a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

**Strategi:** Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Strategi :** Meningkatkan pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

**Program :**

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

**Strategi :** Meningkatkan koordinasi lintas OPD

**Program:**

- a. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Program Kepegawaian Daerah;
- d. Program Pencatatan Sipil
- e. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**Strategi:** Meningkatkan toleransi dan solidaritas antar warga masyarakat

**Program:**

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

**Strategi:** Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

**Program:**

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

**Strategi:** Meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia

**Program:**

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

**Strategi :** Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam

**Program :**

- a. Program Penanganan Bencana;
- b. Program Penanggulangan Bencana

**Strategi:** Mewujudkan Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- c. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- d. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- e. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorat;
- f. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

**Strategi:** Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kearsipan optimal

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**Program:**

- a. Program Rehabilitasi Sosial;
- b. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

**Strategi:** Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

**Program:**

- a. Program Pemberdayaan Sosial.

## **Misi 2: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan**

Strategi yang digunakan terkait dengan misi kedua yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang kompetitif dan berbasis kerakyatan dimaksudkan agar sumber daya pembangunan lebih berdaya guna sehingga percepatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan partisipatif.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024, untuk melaksanakan misi 2 tersebut, digunakan strategi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

**Strategi:** Meningkatkan penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

**Program:**

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Strategi:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

**Program:**

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

**Strategi:** Mewujudkan lahirnya regulasi yang menjamin stabilitas harga dan kepastian pasar

**Program :**

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

**Strategi:** Memberikan pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan

**Program:**

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh);
- b. Program Pengembangan Umkm;
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

**Strategi:** Meningkatkan kerjasama ekonomi untuk mendukung kegiatan ekspor dan perdagangan

**Program:**

- a. Program Pengembangan Ekspor;
- b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

**Strategi:** Meningkatkan dukungan dalam pengembangan UMKM

**Program:**

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh);
- d. Program Pengembangan UMKM.

**Strategi:** Meningkatkan kemampuan Iptek dalam pengembangan IKM

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

**Strategi:** Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial

**Program:**

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan.**

Strategi yang digunakan terkait dengan misi ketiga yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berperan dalam pembangunan daerah. Oleh karena melalui pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan yang tinggi di dukung oleh keimanan dan ketaqwaan, maka seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan zaman dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas permasalahan daerah.

Untuk menjalankan misi 3 ini, maka pada RPJMD Tahun 2019-2024 diperlukan strategi yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar

**Program:**

- a. Program Pengembangan Kurikulum;
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Pendidikan.

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas

**Program:**

- a. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

**Strategi:** Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidik dan kependidikan

**Program:**

- a. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.



**Strategi:** Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

**Program:**

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

**Strategi :** Penguatan Pemahaman tentang Nilai-Nilai Budaya dimasyarakat

**Program :**

- a. Program Pengembangan Kebudayaan.

**Strategi:** Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

**Program:**

- a. Pengelolaan Kekayaan Budaya.

**Strategi:** Mengembangkan Kesenian dan kebudayaan daerah

**Program:**

- a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

**Strategi:** Mendorong Kerjasama antar daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya

**Program:**

- a. Program Pembinaan Sejarah;
- b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara merata

**Program:**

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

**Strategi:** Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas

**Program :**

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**Strategi:** Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

**Program:**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**Strategi:** Meningkatkan penyediaan obat yang berkualitas

**Program:**

- a. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

**Strategi:** Meningkatkan Pelayanan Gizi masyarakat

**Program:**

- a. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

**Strategi:** Mendorong kesadaran masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB dan Penanggulangan HIV/AIDS

**Program :**

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

**Strategi:** Meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan bina keluarga

**Program:**

- a. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

**Strategi:** Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga

**Program:**

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

**Strategi:** Mewujudkan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)

**Program:**

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

**Strategi:** Mewujudkan Penguatan peran perempuan dan kualitas anak

**Program:**

- a. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

**Strategi:** Mewujudkan Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

**Program:**

- a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- b. Program Perlindungan Khusus Anak;
- c. Program Perlindungan Perempuan

#### **Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Perwujudan misi keempat RPJMD Kabupaten Donggala sangat strategis sifatnya. Hal tersebut disebabkan karena misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata sebagai penunjang berbagai kegiatan pembangunan lainnya, maka strategi dalam pencapaian misi tersebut sangat menentukan keberlanjutan pembangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Donggala, terutama jika dikaitkan dengan kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan pemukiman dan berbagai fasilitas lainnya) pasca bencana (gempa dan tsunami).

Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Donggala seperti dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2019-2024, perlu melakukan strategi dan program pembangunan sebagai berikut:

**Strategi:** Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan

**Program:**

- a. Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

**Strategi:** Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian

**Program:**

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Peternakan.

**Strategi:** Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan limbah

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Strategi:** Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**Program:**

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

**Strategi:** Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**Program:**

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Strategi:** Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan areal pemakaman

**Program:**

- a. Program Kawasan Permukiman;
- b. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

**Strategi:** Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

**Program:**

- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

**Strategi:** Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan

**Program:**

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

**Strategi :** Meningkatkan Pengawasan pada kawasan konservasi

**Program :**

- a. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh);

- b. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh;
- c. Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- e. Pengendalian kebakaran hutan;
- f. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

**Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**

Perwujudan misi 5 RPJMD Kabupaten Donggala sangat strategis sifatnya. Hal tersebut disebabkan karena misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata sebagai penunjang berbagai kegiatan pembangunan lainnya, maka strategi dalam mencapai misi tersebut sangat menentukan keberlanjutan pembangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Donggala, terutama jika dikaitkan dengan kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan pemukiman dan berbagai fasilitas lainnya) pasca bencana (gempa dan tsunami).

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2024 akan menempuh strategi serta program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**Strategi:** Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

**Program:**

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

**Strategi:** Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

**Program:**

- a. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

**Strategi:** Meningkatkan hasil produksi pertanian dan Perkebunan

**Program:**

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

**Strategi:** Meningkatkan hasil produksi Peternakan

**Program:**

- a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- b. Peningkatan produksi hasil peternakan;
- c. Peningkatan penerapan teknologi peternakan.

**Strategi:** Meningkatkan hasil produksi Kelautan dan Perikanan

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Strategi:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan

**Program:**

- a. Program Penyuluhan Pertanian;
- b. Program Perizinan Usaha Pertanian

**Strategi:** Meningkatkan sistem dan kelembagaan Pemerintah Desa.

**Program:**

- a. Program Penataan Desa;
- b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- c. Program Administrasi Pemerintahan;
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

**Strategi:** Meningkatkan Kesempatan dan lapangan Kerja.

**Program:**

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja.

**Strategi:** Memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak.

**Program:**

- a. Program Perlindungan Khusus Anak;
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

**Strategi:** Mengembangkan aktivitas agribisnis dan agroindustry.

**Program:**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 172 ayat 1, dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program dan kegiatan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan sumber daya dan waktu yang tersedia. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan

berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas terkait percepatan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh OPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Rensta) OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Arah kebijakan yang akan ditempuh berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi dan program pembangunan yang telah ditetapkan agar fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Donggala dalam lima tahun kedepan, disajikan pada Tabel 6.1, sebagai berikut:



**Tabel 6.1**

**Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

**Visi:**

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN  
DONGGALA YANG SEJAHTERA, BERDAYA  
SAING, MANDIRI DAN BERKARAKTER DENGAN  
BERPIJAK PADA NILAI KEARIFAN LOKAL”***

**Misi 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum  
dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM**

| <b>Strategi</b>                                                                                                   | <b>Arah Kebijakan</b>                               | <b>Program Pembangunan</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi 1.1.1.1</b><br><br>Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik pada semua tingkat pemerintahan | Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|                                                                                                                   |                                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |
|                                                                                                                   |                                                     | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            |
|                                                                                                                   |                                                     | Program Pendaftaran Penduduk                                |
|                                                                                                                   |                                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |
|                                                                                                                   |                                                     | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            |

|                                                                                                         |                                                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strategi 1.1.1.2</b></p> <p>Meningkatkan penataan organisasi, tatalaksana dan tertib regulasi</p> | <p>Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi</p> | <p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p>    |
| <p><b>Strategi 1.1.1.3</b></p> <p>Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan</p>               | <p>Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif</p>        | <p>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> |
| <p><b>Strategi 1.1.1.4</b></p> <p>Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>            | <p>Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah efisien dan efektif</p>               | <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p>                     |
|                                                                                                         |                                                                                   | <p>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>                 |
| <p><b>Strategi 1.1.1.5</b></p> <p>Meningkatkan pengawasan Internal Pemerintah Daerah.</p>               | <p>Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>                 | <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>      |
|                                                                                                         |                                                                                   | <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p>                      |

|                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strategi 1.1.1.6</b></p> <p>Meningkatkan koordinasi lintas OPD</p>                            | <p>Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Kepegawaian Daerah                                                                                                             |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Pencatatan Sipil                                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                            |
| <p><b>Strategi 1.1.3.1</b></p> <p>Meningkatkan toleransi dan solidaritas antar warga masyarakat</p> | <p>Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan berlandaskan kebhinekaan</p>           | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
|                                                                                                     |                                                                                 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             |

|                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi 1.1.3.2</b><br>Meningkatkan wawasan kebangsaan                                                     | Memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan                                                           | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   |
| <b>Strategi 1.1.4.1</b><br>Meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia                                  | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan                                  | Program Pemberdayaan Sosial;                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                        | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan |
| <b>Strategi 1.1.5.1</b><br>Meningkatkan kesiap-siagaan Masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam | Meningkatkan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam                                    | Program Penanganan Bencana;                                    |
|                                                                                                                |                                                                                                        | Program Penanggulangan Bencana                                 |
| <b>Strategi 1.2.1.1</b><br>Mewujudkan Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi                            | Terwujudnya Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi dalam menunjang ketersediaan data yang | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan        |
|                                                                                                                |                                                                                                        | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                        |
|                                                                                                                |                                                                                                        | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik            |

|                                                                                                            |                                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                            | akurat                                                                                             | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika         |
|                                                                                                            |                                                                                                    | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral       |
|                                                                                                            |                                                                                                    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
|                                                                                                            |                                                                                                    | bidang komunikasi dan informasi                  |
| <b>Strategi 1.2.2.1</b><br>Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kearsipan optimal                     | Perbaiki sistem kearsipan dan pelestarian dokumen daerah                                           | Program Pengelolaan Arsip                        |
|                                                                                                            |                                                                                                    | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip      |
|                                                                                                            |                                                                                                    | Program Perizinan Penggunaan Arsip               |
| <b>Strategi 1.3.1.1</b><br>Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Memberikan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  |

|                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                              | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |
| <b>Strategi 1.3.1.2</b><br>Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial | Memberikan pembinaan kepada anak terlantar, panti jompo dan penyandang cacat | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                                              | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                                              |
| <b>Strategi 1.3.1.3</b><br>Memperkuat kelembagaan Kesejahteraan sosial                                      | Menfasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan sosial                      | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                          |

**Misi 2. : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan**

| <b>Strategi</b>                                                                                          | <b>Arah Kebijakan</b>                                                               | <b>Program Pembangunan</b>                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi 2.1.1.1</b><br>Meningkatkan penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatkan konsistensi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan          | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| <b>Strategi 2.1.2.1</b><br>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan                  | Pelibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                         |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Promosi Penanaman Modal;                                   |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Pelayanan Penanaman Modal;                                 |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;                  |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal      |
| <b>Strategi 2.3.1.2</b><br>Mewujudkan lahirnya regulasi                                                  | Menyusun Regulasi tentang Penyangga harga harga untuk                               | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                       |
|                                                                                                          |                                                                                     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              |

|                                                                                                               |                                                                            |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| yang menjamin stabilitas harga dan kepastian pasar                                                            | menjamin stabilitas harga dan kepastian pasar                              | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      |
| <b>Strategi 2.3.2.1</b><br><br>Memberikan pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan             | Meningkatkan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Pengembangan Umkm                                                |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        |
| <b>Strategi 2.3.3.1</b><br><br>Meningkatkan kerjasama ekonomi untuk mendukung kegiatan ekspor dan perdagangan | Memfasilitasi kerjasama ekonomi di bidang perdagangan dan ekspor           | Program Pengembangan Ekspor;                                             |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     |
| <b>Strategi 2.3.4.1</b><br><br>Meningkatkan dukungan dalam pengembangan IKM                                   | Memberikan kemudahan perizinan usaha pendirian industri kecil dan menengah | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                 |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) |
|                                                                                                               |                                                                            | Program Pengembangan UMKM                                                |



|                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strategi 2.3.4.2</b></p> <p>Meningkatkan kemampuan Iptek dalam pengembangan IKM</p>      | <p>Menfasilitasi penerapan Iptek dalam pengembangan Industri Kecil Menengah</p>                                               | <p>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p>            |
| <p><b>Strategi 2.3.5.1</b></p> <p>Mengembangkan sentra-sentra industri potensial</p>           | <p>Menfasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana klaster industry</p>                                                         | <p>Penataan Struktur Industri</p>                                        |
|                                                                                                | <p>Pembangunan akses transportasi menuju sentra-sentra industri potensial</p>                                                 | <p>Pengembangan sentra- sentra industri potensial</p>                    |
| <p><b>Strategi 2.4.2.1</b></p> <p>Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial</p> | <p>Meningkatkan apresiasi masyarakat dan mendorong pengembangan Pariwisata</p>                                                | <p>Pengembangan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.</p> |
|                                                                                                | <p>Pengembangan daerah tujuan dan produk wisata (alam dan budaya), usaha ekonomi kreatif serta peningkatan promosi wisata</p> | <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>   |

**Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan**

| <b>Strategi</b>                                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                           | <b>Program Pembangunan</b>                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Strategi 3.1.1.1</b><br><br>Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar                    | Menyelenggarakan pendidikan formal pada semua jenjang, sesuai kewenangan daerah | Program Pengembangan Kurikulum                |
|                                                                                           |                                                                                 | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |
| <b>Strategi 3.1.1.2</b><br><br>Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua              | Menyelenggarakan pendidikan non formal                                          | Program Pengelolaan Pendidikan                |
| <b>Strategi 3.1.1.3</b><br><br>Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas         | Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu       | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan     |
| <b>Strategi 3.1.2.1</b><br><br>Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidik dan kependidikan | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                               | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan      |
| <b>Strategi 3.1.3.1</b>                                                                   | Pembangunan fasilitas                                                           | Pendidikan Anak Usia Dini;                    |

|                                                                                              |                                                                                   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas                                | pendidikan yang berkualitas dan merata                                            | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |
| <b>Strategi 3.2.1.1</b><br><br>Penguatan Pemahaman tentang Nilai- Nilai Budaya di masyarakat | Meningkatkan kuantitas Pranata                                                    | Program Pengembangan Kebudayaan               |
|                                                                                              | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah                                    |                                               |
|                                                                                              | Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah                                  |                                               |
| <b>Strategi 3.2.1.2</b><br><br>Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan                  | Mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyediaan sarana dan Prasarana Kebudayaan | Pengelolaan Kekayaan Budaya                   |
| <b>Strategi 3.2.1.3</b><br><br>Mengembangkan Kesenian dan kebudayaan daerah                  | Menyelenggarakan festival kesenian dan budaya daerah                              | Program Pengembangan Kesenian Tradisional     |
|                                                                                              | Menyelenggarakan seminar dan dialog                                               |                                               |

|                                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | kebudayaan guna merevitalisasi dan mereaktualisasi budaya lokal             |                                                                             |
| <b>Strategi 3.2.1.4</b><br><br>Mendorong Kerjasama antar daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya | Membangun Kemitraan dalam pengelolaan kebudayaan daerah                     | Program Pembinaan Sejarah;                                                  |
|                                                                                                                            |                                                                             | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                            |
| <b>Strategi 3.3.1.1</b><br><br>Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara merata                      | Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| <b>Strategi 3.3.2.1</b><br><br>Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas                                | Membangun fasilitas kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan             | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            |

|                                                                                                                     |                                                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi 3.3.3.1</b><br>Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas                                        | Memberikan pelayanan kesehatan yang Berkualitas                        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
|                                                                                                                     | Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan                   |                                                             |
| <b>Strategi 3.3.4.1</b><br>Meningkatkan penyediaan obat yang berkualitas                                            | Menjaga ketersediaan obat yang berkualitas dan terjangkau              | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| <b>Strategi 3.3.5.1</b><br>Meningkatkan Pelayanan Gizi masyarakat                                                   | Penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| <b>Strategi 3.4.1.1</b><br>Mendorong kesadaran masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB dan Penanggulangan HIV/AIDS | Memberikan Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan reproduksi remaja       | Program Pengendalian Penduduk                               |

|                                                                                         |                                                                                                                    |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                    | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).                   |
| <b>Strategi 3.4.1.2</b><br>Meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan bina keluarga | Menyediakan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan bina keluarga                               | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| <b>Strategi 3.5.1.1</b><br>Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga           | Meningkatkan prestasi olah raga yang professional melalui pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana olah raga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan       |
|                                                                                         |                                                                                                                    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         |
|                                                                                         |                                                                                                                    | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   |
| <b>Strategi 3.6.1.1</b><br>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)           | Meningkatkan penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan                                                           | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    |

|                                                                        |                                                                       |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Strategi 3.6.2.1</b><br>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan | Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak       | Program Peningkatan Kualitas Keluarga.          |
|                                                                        |                                                                       | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| <b>Strategi 3.6.3.1</b><br>Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak        | Meningkatkan Pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan khusus Anak | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                |
|                                                                        |                                                                       | Program Perlindungan Khusus Anak                |
|                                                                        |                                                                       | Program Perlindungan Perempuan                  |

**Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan  
Infrastruktur Daerah**

| <b>Strategi</b>                                                                          | <b>Arah Kebijakan</b>                                                      | <b>Program Pembangunan</b>                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi<br/>4.1.1.1</b><br>Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan | Pembangunan jalan dan jembatan                                             | Program Penyelenggaraan Jalan;                                         |
|                                                                                          |                                                                            | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                   |
| <b>Strategi<br/>4.1.2.1</b><br>Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian               | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Peternakan |
| <b>Strategi<br/>4.1.2.2</b><br>Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan limbah   | Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan limbah                    | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);                             |
|                                                                                          |                                                                            | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum       |



|                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strategi</b><br/><b>4.2.1.1</b><br/>Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p>                   | <p>Meningkatkan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> | <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>                                                               |
| <p><b>Strategi</b><br/><b>4.3.1.1</b><br/>Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>       | <p>Penyusunan Recana Tata Ruang berbasis daya dukung lingkungan</p> | <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p>                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                     | <p>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> |
| <p><b>Strategi</b><br/><b>4.3.2.1</b><br/>Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan areal pemakaman</p> | <p>Meningkatkan penataan Perumahan dan areal pemakaman</p>          | <p>Program Kawasan Permukiman;</p>                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                     | <p>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;</p>                                                                             |
|                                                                                                                 |                                                                     | <p>Program Pengembangan Perumahan;</p>                                                                                             |
|                                                                                                                 |                                                                     | <p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</p>                                                               |

|                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi 4.3.2.2</b><br>Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran        | Meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran                               | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                                |
| <b>Strategi 4.4.1.1</b><br>Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan | Melakukan Pengendalian pencemaran dan pencegahan Perusakan Lingkungan  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup;                                                                                    |
|                                                                                          |                                                                        | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                      |
|                                                                                          |                                                                        | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                 |
| <b>Strategi 4.4.2.1</b><br>Meningkatkan Pengawasan pada kawasan konservasi               | Melakukan Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam               | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); |
|                                                                                          | Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh            |

|  |                        |                                                                                            |
|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dan kawasan konservasi | Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
|  |                        | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);                                        |
|  |                        | Pengendalian kebakaran hutan                                                               |
|  |                        | Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.                                   |

**Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui  
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**

| <b>Strategi</b>                                                                                                                       | <b>Arah Kebijakan</b>                                                    | <b>Program<br/>Pembangunan</b>                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategi<br/>5.1.1.1</b><br><br>Meningkatkan<br>Pengembangan<br>Usaha Mikro<br>Kecil Menengah<br>(UMKM)                            | Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan UMKM                  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;                            |
|                                                                                                                                       | Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| <b>Strategi<br/>5.1.1.2</b><br><br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Kelembagaan<br>Koperasi dan<br>Usaha Mikro<br>Kecil Menengah<br>(UMKM) | Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM              | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;     |
|                                                                                                                                       | Membina dan memfasilitasi penguatan kelembagaan Koperasi                 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                        |

|                                                                                         |  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| <b>Strategi<br/>5.2.1.1</b><br><br>Meningkatkan hasil produksi pertanian dan Perkebunan |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;     |
|                                                                                         |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |
|                                                                                         |  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| <b>Strategi<br/>5.2.1.2</b><br><br>Meningkatkan hasil produksi Peternakan               |  | Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak             |
|                                                                                         |  | Peningkatan produksi hasil peternakan;                    |
|                                                                                         |  | Peningkatan penerapan teknologi peternakan.               |
| <b>Strategi<br/>5.3.1.1</b>                                                             |  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;                    |

|                                                                                                |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan hasil produksi Kelautan dan Perikanan                                             |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                              |
|                                                                                                |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                    |
|                                                                                                |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.                                   |
| <b>Strategi 5.4.1.1</b><br><br>Meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan |  | Program Penyuluhan Pertanian                                                        |
|                                                                                                |  | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                   |
| <b>Strategi 5.5.1.1</b><br><br>Meningkatkan sistem dan kelembagaan Pemerintah Desa             |  | Program Penataan Desa;                                                              |
|                                                                                                |  | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                                 |
|                                                                                                |  | Program Administrasi Pemerintahan                                                   |
|                                                                                                |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
|                                                                                                |  | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.                                         |

|                                                                                                                     |  |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strategi</b><br/><b>5.6.1.1</b></p> <p>Meningkatkan Kesempatan dan lapangan Kerja.</p>                        |  | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                |
|                                                                                                                     |  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                          |
|                                                                                                                     |  | Program Penempatan Tenaga Kerja.                                                |
| <p><b>Strategi</b><br/><b>5.7.1.1</b></p> <p>Menguatkan kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak.</p> |  | Program Perlindungan Khusus Anak                                                |
|                                                                                                                     |  | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.                                |
| <p><b>Strategi</b><br/><b>5.8.1.1</b></p> <p>Mengembangkan aktivitas agribisnis dan agroindustry</p>                |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
|                                                                                                                     |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                            |
|                                                                                                                     |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.                        |

berdasarkan arah kebijakan yang dirumuskan sesuai strategi yang ditempuh maka ditetapkan arah kebijakan umum tahunan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

| <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat penanggulang an kerusakan infrastruktur, jalan dan jembatan</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan sehat perumahan</li> <li>• Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur , jalan dan jembatan</li> <li>• pasca bencana</li> <li>• Mewujudkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan sehat perumahan</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Donggala Kanamavali secara sungguh-sungguh</li> <li>• Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui program Donggala Kanamaseh a secara sungguh-sungguh (menurunka n angka</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalk an pengelolaan potensi Daerah melalui program Donggala Nasugi Kanamasagen a</li> <li>• Menjamin Kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah</li> <li>• Meningkatkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberda yaan ekonomi Masyarak at</li> <li>• Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan (Bumdes, Perumda)</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar guna meningkatka n kualitas hidup masyarakat</li> <li>• Memantapk an</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantap an Implemen tasi Kab. Donggala sebagai Daerah penyangg a bagi IKN di Kaltim.</li> <li>• Pengentas an Kemiskin an dan penuruna n Stunting</li> <li>• Penataan Manajeme n ASN berbasis Kompeten</li> </ul> |



| Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang aman dan nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan pasca Gempa</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</li> <li>• Meningkatkan SDM penanggulangan bencana</li> <li>• Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2018</li> </ul> | <p>sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata</li> <li>• Rehabilitasi sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Rehabilitasi sarana prasarana dan penataan kelembagaan pada semua tingkatan pemerintahan daerah</li> <li>• Melanjutkan arah kebijakan</li> </ul> | <p>stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, gernas, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah</li> <li>• Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana</li> <li>• Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan</li> </ul> | <p>perluasan kesempatan kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pasca bencana;</li> <li>• Merwujudkan peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>• Menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal</li> <li>• Mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah</li> <li>• Melanjutkan</li> </ul> | <p>pelaksanaan pengentasan kemiskinan secara terpadu guna meningkatkan daya beli masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan penyusunan regulasi penyanggan harga guna memastikan stabilitas harga komoditas hasil pertanian dan perkebunan</li> <li>• Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar</li> <li>• Memantapkan penyelenggara</li> </ul> | <p>si.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah.</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.</li> <li>• Melanjutkan kebijakan tahun 2023</li> </ul> |

| Arah Kebijakan |            |                                                                     |                                   |                                                                                          |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2019           | 2020       | 2021                                                                | 2022                              | 2023                                                                                     | 2024 |
|                | Tahun 2019 | kesehatan;<br>• Melanjutkan<br>n arah<br>kebijakan<br>Tahun<br>2020 | n arah<br>kebijakan<br>Tahun 2019 | an<br>pemerintahan<br>berbasis IT<br>• Melanjutkan<br>arah<br>kebijakan<br>Tahun<br>2019 |      |

Rumusan arah kebijakan umum tahunan tersebut berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar penyusunan rencana kerja perangkat daerah fokus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 disajikan pada Gambar 6.1. serta gambar sebagai berikut:



**Gambar 6.1**  
**Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024**

Tabel 6.3  
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif  
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                    | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |      |                    |      |                    |      |                    |      |                                          |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         | 2021                                           |      | 2022               |      | 2023               |      | 2024               |      | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |      |                                                        |
|      |                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         | Target                                         | Rp   | Target             | Rp   | Target             | Rp   | Target             | Rp   | Target                                   | Rp   |                                                        |
| (1)  | (2)                                             | (3)                                                                                                      | (4)                                                                                                     | (5)                                            | (6)  | (7)                | (8)  | (9)                | (10) | (11)               | (12) | (15)                                     | (16) | (17)                                                   |
|      |                                                 | Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai- Nilai kemanusiaan dan HAM |                                                                                                         |                                                |      |                    |      |                    |      |                    |      |                                          |      |                                                        |
|      |                                                 | Tujuan 1.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif                       |                                                                                                         |                                                |      |                    |      |                    |      |                    |      |                                          |      |                                                        |
|      |                                                 | Sasaran 1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih                                  |                                                                                                         |                                                |      |                    |      |                    |      |                    |      |                                          |      |                                                        |
|      |                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                                   |                                                | 100% | 611.540.979.135,00 | 100% | 716.424.137.549,00 | 100% | 633.403.331.278,00 | 100% | 659.078.642.277,00                       |      | Semua PD                                               |
|      |                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 100%                                           |      | 830.831.155        | 100% | 972.450.457        | 100% | 1.228.995.498      | 100% | 1.256.104.267                            |      | Semua Kecamatan                                        |
|      |                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                         | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                                |      |                    |      |                    |      |                    |      |                                          |      |                                                        |
|      |                                                 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                       | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        | 100%                                           | 100% | 15.933.400         | 100% | 18.649.328         | 100% | 19.478.981         | 100% | 19.948.529                               |      |                                                        |
|      |                                                 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                               | Persentase Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pegawai Daerah                                           | 100%                                           | 100% | 559.829.904        | 100% | 655.255.695        | 100% | 599.582.725        | 100% | 615.218.349                              |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|      |                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                 | Persentase Meningkatnya Kapasitas ASN Melalui Pendidikan dan Pelatihan                                  | 100%                                           | 100% | 1.931.655.500      | 100% | 2.260.915.786      | 100% | 2.068.819.942      | 100% | 2.122.769.611                            |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|      |                                                 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                            | Persentase meningkatnya tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                      | 100%                                           | 100% | 2.492.809.850      | 100% | 5.029.892.357      | 100% | 3.301.826.001      | 100% | 3.459.222.775                            |      | Sekretariat Daerah                                     |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                              | Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                              |                                                                                                      |                                      | 2021                                           |                 | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                 |                                   |
|      |  |  |                                                                                              |                                                                                                      |                                      | Target                                         | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                         | Persentase meningkatnya perekonomian dan pembangunan                                                 | 90%                                  | 92%                                            | 1.846.006.850   | 92%    | 2.046.989.418   | 92%    | 1.568.086.542   | 92%    | 1.598.979.303   |                                          |                 | Sekretariat Daerah                |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                           | Persentase meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah                              | 85%                                  | 87%                                            | 773.650.000     | 90%    | 1.678.400.000   | 95%    | 2.500.000.000   | 97%    | 2.800.000.000   |                                          |                 | Inspektorat                       |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                          | Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa                                              |                                      |                                                | 306.784.650     |        | 359.077.619     |        | 415.994.885     |        | 426.340.977     |                                          |                 | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                     | Cakupan aplikasi dalam rangka e- gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Donggala                   |                                      |                                                | 40.305.000      |        | 47.175.188      |        | 54.652.909      |        | 56.012.170      |                                          |                 |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                   | Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi                                                          |                                      |                                                | 50.044.050      |        | 58.574.307      |        | 67.858.899      |        | 69.546.599      |                                          |                 |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)                                                          |                                      |                                                | 3.220.000       |        | 3.768.865       |        | 4.366.266       |        | 4.474.859       |                                          |                 |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                          | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku                      | -                                    | 100%                                           | 249.074.402.591 | 100%   | 276.804.029.291 | 100%   | 233.445.224.749 | 100%   | 247.288.526.577 | 100%                                     | 247.288.526.577 | BPKAD                             |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                      | Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik                                                      | -                                    | 100%                                           | 2.953.814.770   | 100%   | 2.090.344.860   | 100%   | 2.768.465.750   | 100%   | 2.932.635.769   | 100%                                     | 2.932.635.769   | BPKAD                             |
|      |  |  |                                                                                              |                                                                                                      |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |                 |                                   |
|      |  |  | Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Kapabilitas dan profesionalisme aparatur                          |                                                                                                      |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |                 |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                      | Persentase temuan hasil atau instruksi yang selesai ditindaklanjuti pada waktu yang telah ditentukan | 85%                                  | 90%                                            | 603.400.000     | 95%    | 1.047.600.000   | 95%    | 1.100.000.000   | 99%    | 1200000000      |                                          |                 | Inspektorat                       |
|      |  |  | Sasaran 1.1.3 Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat |                                                                                                      |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |                 |                                   |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                 | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                      | 2021                                           |                | 2022    |                | 2023    |                | 2024    |                | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |             |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                      | Target                                         | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                                   | Rp          |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                        | Persentase meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                       | 100%                                 |                                                |                | 100%    | 300.000.000    | 100%    | 350000000      | 100%    | 400000000      |                                          |             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|      |  |  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                    | Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                   | 4 Kali                               | 5 Kali                                         | 240.000.000    | 8 Kali  | 311.000.000    | 8 Kali  | 320.000.000    | 8 Kali  | 325000000      |                                          |             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|      |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                      | Persentase meningkatnya kewaspadaan Nasional dan meningkatnya kualitas dan Fasilitas penanganan Konflik Sosial | 13 Kali                              | 17 Kali                                        | 440.000.000    | 25 Kali | 540.000.000    | 26 Kali | 600.000.000    | 26 Kali | 650000000      |                                          |             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|      |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | Sasaran 1.1.4 Meningkatkan kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Azazi Manusia |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                   | Persentase meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                  | 100%                                 |                                                |                | 100%    | 200000000      | 100%    | 250000000      | 100%    | 300000000      |                                          |             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|      |  |  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                             | Persentase meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakkan Perda dan Perbup                    | 60%                                  | 65                                             | 293.617.000,00 | 70      | 343.665.478,00 | 75      | 359.683.019,00 | 80      | 368.035.380,00 |                                          |             | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|      |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | Sasaran 1.1.5 Meningkatkan kesiagaan Masyarakat menghadapi bencana alam                                                         |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                  | Persentase penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                              |                                      |                                                | 22.935.291.286 |         | 26.844.725.748 |         | 6.267.100.928  |         | 6.474.341.669  |                                          |             | BPBD                              |
|      |  |  | Tujuan 1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang efektif dan transparan                                                   |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | Sasaran 1.2.1 Meningkatkan pelayanan Publik yang cepat dan Prima                                                                |                                                                                                                |                                      |                                                |                |         |                |         |                |         |                |                                          |             |                                   |
|      |  |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                                                      | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Donggala                                                         | -                                    | 100%                                           | 100.000.000    | 100%    | 108.194.000    | 100%    | 215.000.000    | 100%    | 223.000.000    | 100%                                     | 223.000.000 | DPMPTSP                           |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |          |               |          |               |          |               |                                          |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|      |  |  |                                                                                |                                                                                                                                            |                                      | 2021                                           |               | 2022     |               | 2023     |               | 2024     |               | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |             |                                      |
|      |  |  |                                                                                |                                                                                                                                            |                                      | Target                                         | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target                                   | Rp          |                                      |
|      |  |  | Program Promosi Penanaman Modal                                                | Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal                                                                                            | -                                    | 100%                                           | 40.000.000    | 100%     | 300.000.000   | 100%     | 120.000.000   | 100%     | 143.000.000   | 100%                                     | 143.000.000 | DPMPTSP                              |
|      |  |  | Program Pelayanan Penanaman Modal                                              | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal                                                                        | -                                    | 7                                              | 7.000.000     | 7        | 117.324.800   | 7        | 115.000.000   | 7        | 135.000.000   | 7                                        | 135.000.000 | DPMPTSP                              |
|      |  |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                               | Persentase Pemanfaatan Dokumen Data Hasil Pengendalian                                                                                     |                                      | 100%                                           | 322.573.100   | 100%     | 322.573.100   | 100%     | 200.000.000   | 100%     | 200.000.000   | 100%                                     | 200.000.000 | DPMPTSP                              |
|      |  |  | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal                  | Tersedianya informasi penanaman modal secara lengkap dan terkini                                                                           |                                      | 100%                                           | 10.000.000    | 100%     | 131.728.000   | 100%     | 76.000.000    | 100%     | 82.000.000    | 100%                                     | 82.000.000  | DPMPTSP                              |
|      |  |  | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                                   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) | 0%                                   | 0%                                             | -             | 0%       | -             | 0%       | -             | 0%       | -             | 0%                                       | -           | DisPerindag                          |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                      | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                                    | 100%                                 |                                                | 830.831.155   | 100%     | 972.450.457   | 100%     | 1.228.995.498 | 100%     | 1.256.104.267 |                                          |             | Semua Kecamatan                      |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                               | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                                                            |                                      |                                                |               |          |               |          |               |          |               |                                          |             |                                      |
|      |  |  | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                       | Persentase Cakupan Program Pencatatan Sipil                                                                                                | 75%                                  | 92%                                            | 265.468.000   | 92%      | 169.375.000   | 95%      | 163.426.000   | 95%      | 165.000.000   | 95%                                      | -           | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|      |  |  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                   | Persentase Cakupan Program Pendaftaran Penduduk                                                                                            | 95%                                  | 80%                                            | 407.200.600   | 85%      | 236.278.400   | 95%      | 210.000.000   | 95%      | 210.000.000   | 95%                                      |             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                        | Persentase Cakupan Program PIAK                                                                                                            | 85%                                  | 95%                                            | 205.522.000   | 90%      | 95.060.000    | 95%      | 130.000.000   | 95%      | 135.000.000   | 95%                                      |             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                        | Persentase Cakupan Program Profil Kependudukan                                                                                             | 85%                                  | 25%                                            | 44.350.000    | 90%      | 67.840.000    | 90%      | 68.000.000    | 90%      | 32.252.000    | 90%                                      |             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|      |  |  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                             | jumlah Perda yang diundangkan                                                                                                              | 12 Perda                             | 12 Perda                                       | 3.613.964.600 | 12 Perda | 4.229.982.839 | 14 Perda | 3.902.363.629 | 14 Perda | 4.097.692.093 |                                          |             | Sekretariat DPRD                     |
|      |  |  | Sasaran 1.2.2 Mewujudkan Administrasi Kearsipan dan Pelestarian Dokumen Daerah |                                                                                                                                            |                                      |                                                |               |          |               |          |               |          |               |                                          |             |                                      |

| Kode |  |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                  | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |             |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                    |
|------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|      |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                      | 2021                                           |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024        |             |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                    |
|      |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                      | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target      | Rp          |                                   | Target                                   | Rp                 |
|      |  |  |  | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                             | Persentase Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dikonservasi/Preservasi                                                                                   | 99.94 %                              | 100%                                           | 125.000.000 | 100%   | 125.000.000 | 100%   | 125.000.000 | 100%        | 137.500.000 |                                   |                                          | Dinas Perpustakaan |
|      |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                   | Persentase Meningkatnya Jumlah Koleksi Perpustakaan dan Angka Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan                                                                | 99.94 %                              | 100%                                           | 855.524.303 | 100%   | 860.484.749 | 100%   | 944.459.261 | 100%        | 997.405.187 |                                   |                                          | Dinas Perpustakaan |
|      |  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                        | Persentase meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten                                                                                                | 100%                                 |                                                |             | 100%   | 99.126.878  | 100%   | 300.000.000 | 100%        | 450000000   |                                   |                                          | Dinas Kearsipan    |
|      |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                      |                                                |             |        |             |        |             |             |             |                                   |                                          |                    |
|      |  |  |  | Tujuan 1.3 Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata                                                                |                                                                                                                                                                   |                                      |                                                |             |        |             |        |             |             |             |                                   |                                          |                    |
|      |  |  |  | Sasaran 1.3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial |                                                                                                                                                                   |                                      |                                                |             |        |             |        |             |             |             |                                   |                                          |                    |
|      |  |  |  | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                      | Persentase PSKS yang diberdayakan                                                                                                                                 | 100%                                 | 100%                                           | 234.386.600 | 100%   | 310.000.000 | 100%   | 311.276.150 | 100%        | 316.276.150 |                                   |                                          | Dinas Sosial       |
|      |  |  |  | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                      | Persentase meningkatnya cakupan program rehabilitasi dibandingkan dengan sasaran direhabilitasi sosial dan menurunnya masalah penyandang kesejahteraan masyarakat |                                      | 100%                                           | 244.814.600 | 100%   | 330.000.000 |        | 100%        | 330.000.000 | 100%        | 362.000.000                       |                                          |                    |
|      |  |  |  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                                                          | Persentase cakupan anak terlantar yang dipelihara dibandingkan dengan total anak terlantar dan jumlah dokumen data fakir miskin yang ditetapkan                   | 100%                                 | 100%                                           | 137.819.000 | 100%   | 240.000.000 | 100%   | 241.714.338 | 100%        | 246.714.338 |                                   |                                          |                    |
|      |  |  |  | Program Penanganan Bencana                                                                                                       | Persentase meningkatnya cakupan sasaran penerima bantuan penanganan bencana                                                                                       | 100%                                 | 100%                                           | 578.200.228 | 100%   | 820.487.056 | 100%   | 843.870.444 | 100%        | 896.679.434 |                                   |                                          |                    |





| Kode |  |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                                                  | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |         |
|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
|      |  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                      | 2021                                           |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |         |
|      |  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                      | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                   | Target                                   | Rp      |
|      |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                                                                                               | Presentase terlaksananya peningkatan kerja sama antar desa dan pihak ketiga dlm pengembangan kwsn ekonomi desa | 75%                                  | 75%                                            | 48.975.000    | 78%    | 93.710.000    | 82%    | 196.238.986   | 85%    | 196.238.986   |                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |         |
|      |  |  |  | Sasaran 2.1.2 Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan (pembangunan partisipatif)                            |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                               | Presentase Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                         | 100%                                 | 100%                                           | 1.162.475.817 | 100%   | 2.194.627.180 | 100%   | 2.126.246.070 | 100%   | 2.321.426.981 | 100%                              | 2.751.837.269                            | Bappeda |
|      |  |  |  | Tujuan 2.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penyediaaan Energi (semua terdapat di bumi baik yang hidup maupun yang mati yang berguna bagi manusia)               |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Sasaran 2.2.1 Terkelolanya sumber daya hutan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan                      |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program A                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program B                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Sasaran 2.2.2 Meningkatnya luas hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR) yang berorientasi pada kearifan lokal |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program A                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program B                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Sasaran 2.2.3 Meningkatnya peran aktif dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program A                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program B                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Sasaran 2.2.4 Meningkatnya penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya daerah terpencil dan kepulauan                                                    |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program A                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |
|      |  |  |  | Program B                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |         |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                     | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                   |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      | 2021                                           |               | 2022                             |               | 2023                             |               | 2024                             |               |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                   |
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      | Target                                         | Rp            | Target                           | Rp            | Target                           | Rp            | Target                           | Rp            |                                   | Target                                   | Rp                |
|      |  |  | Tujuan 2.3 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Sumber Daya Ekonomi (Pasar/DUDI)                                                      |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Sasaran 2.3.1 Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                               | Persentase penerimaan dari Jumlah Jenis Pajak Daerah dan Jumlah Golongan Retribusi Daerah yang dikelola terhadap Pendapatan Asli Daerah | 46.30%<br>7 Jenis PD<br>3 Gol.RD     | 42.59%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD               | 2.108.103.000 | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 2.409.279.100 | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 3.399.458.706 | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 3.805.472.792 | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD  | 3.805.472.792                            | Pendapatan Daerah |
|      |  |  | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                                                                                     | Peningkatan Jumlah Alat UTTP                                                                                                            | 919 Alat UTTP                        | 919 Alat UTTP                                  | 91.718.750    | 100 Alat UTTP                    | 435.987.000   | 1200 Alat UTTP                   | 300.000.000   | 1200 Alat UTTP                   | 67.870.119    | 1200 Alat UTTP                    | 67.870.119                               | Disperindag       |
|      |  |  | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                 | Jumlah Kecamatan yang Dimonitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                      | 4 Kecamatan                          | 4 Kecamatan                                    | 29.138.275    | 6 Kecamatan                      | 71.175.000    | 8 Kecamatan                      | 450.000.000   | 8 Kecamatan                      | 21.561.766    | 8 Kecamatan                       | 21.561.766                               | Disperindag       |
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Sasaran 2.3.2 Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                                                             |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                            | Presentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data (ODS)                                                             | 0%                                   | -                                              | 110.075.000   | 0%                               | 455.705.000   | 0%                               | 167.744.942   | 0%                               | 171.371.973   | 0%                                | 171.371.973                              | Koperasi dan UMKM |
|      |  |  | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                                                                | Jumlah Promosi yang diikuti                                                                                                             | -                                    | -                                              | -             | -                                | -             | -                                | -             | -                                | -             | -                                 | -                                        | Disperindag       |
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Sasaran 2.3.3 Meningkatnya Kerja sama Ekonomi dan Industri sebagai Upaya memaju Pertumbuhan Ekonomi Daerah                          |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                   | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kab.Donggala                                                                                | 9,03                                 | 9,03                                           | 1.485.703.675 | 9,03                             | 3.091.797.300 | 9,04                             | 1.200.000.000 | 9,04                             | 1.099.392.273 | 9,04                              | 1.099.392.273                            | Disperindag       |
|      |  |  | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                         | Perdagangan Antar Pulau Kab.Donggala                                                                                                    | 36.188,22 Ton                        | 36.188,22 Ton                                  | -             | 39.807,04 Ton                    | -             | 43.787,75 Ton                    | 350.000.000   | 43.787,75 Ton                    |               | 43.787,75 Ton                     |                                          | Disperindag       |
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Sasaran 2.3.4 Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                                                 |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |
|      |  |  | Program Pengembangan Umkm                                                                                                           | Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha                              | 0%                                   | -                                              | 42.300.000    | 0%                               | 94.000.000    | 0%                               | 64.461.604    | 0%                               | 65.855.412    | 0%                                | 65.855.412                               | Koperasi dan UMKM |
|      |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                      |                                                |               |                                  |               |                                  |               |                                  |               |                                   |                                          |                   |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                             | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 2021                                           |               | 2022       |               | 2023       |               | 2024       |               | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |               |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Target                                         | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |                                   |
|      |  |  | Sasaran 2.3.5 Terwujudnya Penataan Struktur Industri dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                                                | Pertumbuhan industri                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8%                                   | 3%                                             | 3.857.976.830 | 3%         | 5.272.978.064 | 3%         | 1.250.000.000 | 3%         | 2.854.828.986 | 3%                                       | 2.854.828.986 | DisPerindag                       |
|      |  |  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                                                    | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait , serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten | 0%                                   | 0%                                             | -             | 0%         | -             | 0%         | -             | 0%         | -             | 0%                                       | -             | DisPerindag                       |
|      |  |  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                      | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                                   | 0%                                             | -             | 0%         | -             | 0%         | 100.000.000   | 0%         | -             | 0%                                       | -             | DisPerindag                       |
|      |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Tujuan 2.4 Mengembangkan obyek wisata                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Sasaran 2.4.1 Terlaksananya Inventarisasi Destinasi wisata                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                         | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.985 org                           | 24.985 org                                     | 712.135.100   | 24.985 org | 4.275.524.542 | 24.985 org | 653.403.349   | 24.985 org | 672.352.046   | 24.985 org                               | 672.352.046   | Dinas Pariwisata                  |
|      |  |  | Sasaran 2.4.2 Meningkatkan aksesibilitas obyek wisata                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                                | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                 |                                                | 298.187.050   | 100%       | 711.062.100   | 100%       | 273.594.739   | 100%       | 281.528.987   | 100%                                     | 281.528.987   | Dinas Pariwisata                  |
|      |  |  | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                          | Meningkatnya lokasi wisata kreatif kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                   | -                                              | 0%            | -          | 0%            | -          | 0%            | -          | 0%            | -                                        | 0%            | Dinas Pariwisata                  |
|      |  |  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                                             | Persentase sumber daya pariwisata ekonomi kreatif yang terlatih                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                 | 100%                                           | 447.160.400   | 100%       | 718.281.100   | 100%       | 410.281.845   | 100%       | 422.180.018   | 100%                                     | 422.180.018   | Dinas Pariwisata                  |
|      |  |  | Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Tujuan 3.1 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                         | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                          |                                 |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | 2021                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022                                                                                                                                                          |                | 2023                                                                                                                                                   |                | 2024                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                           | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                                 |
|      |  |  |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                                                                                                                                                                         | Rp              | Target                                                                                                                                                        | Rp             | Target                                                                                                                                                 | Rp             | Target                                                                                                                                                 | Rp                                                                                                                                                     |                                                           | Target                                   | Rp                              |
|      |  |  | Sasaran 3.1.1 Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                           |                                          |                                 |
|      |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                          | Persentase meningkatnya kurikulum mulok yang berkualitas                                 | APK PAUD 32,17<br>APK SD 95,52<br>APK SMP 98,88<br>APK SMP 67,52<br>APM SD 78,77<br>APM SD 82,03<br>APM SMP 84,26<br>APM SMP 53,63<br>APS SD 4,9<br>APS SMP 17,84<br>AL PAUD 97,00<br>AL SD 99,90<br>AL S MP 98,4 | APK PAUD 33,00<br>APK SD 32,79<br>APK SD 99,91<br>APK SMP 98,88<br>APK SMP 89,79<br>APM SD 78,77<br>APM SD 85,00<br>APM SMP 70,00<br>APS SD 2,5<br>APS SMP 10,00<br>AL PAUD 98,76<br>AL SD 99,8<br>AL SMP 99,9 | 109.211.071.127 | APK PAUD 33,00<br>APK SD 99,91<br>APK SMP 89,79<br>APM SD 85,00<br>APM SMP 70,00<br>APS SD 2,5<br>APS SMP 10,00<br>AL PAUD 98,76<br>AL SD 99,8<br>AL SMP 99,9 | 94.816.648.808 | APK PAUD 35,00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99,00<br>APM SD 98,72<br>APM SMP 75,00<br>APS SD 2,0<br>APS SMP 9,00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100<br>AL SMP 100 | 98.074.123.700 | APK PAUD 35,00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99,00<br>APM SD 98,72<br>APM SMP 75,00<br>APS SD 2,0<br>APS SMP 9,00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100<br>AL SMP 100 | APK PAUD 35,00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99,00<br>APM SD 98,72<br>APM SMP 75,00<br>APS SD 2,0<br>APS SMP 9,00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100<br>AL SMP 100 |                                                           |                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|      |  |  | Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                           |                                          |                                 |
|      |  |  | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                | Rasio guru/murid pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan | RASIO Guru /Murid PAUD 1:25<br>SD/MI 1:30<br>SMP/MTs 1:27                                                                                                                                                         | RASIO Guru /Murid PAUD 1:25<br>SD/MI 1:30<br>SMP/MTs 1:27                                                                                                                                                      | 831.529.400     | RASIO Guru /Murid PAUD 1:30<br>SD/MI 1:24<br>SMP/MTs 1: 22                                                                                                    | 973.267.722    | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:22<br>SMP/MTs 1:20                                                                                              | 844.987.443    | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:20<br>SMP/MTs 1:16                                                                                              | 874.017.422                                                                                                                                            | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:20<br>SMP/MTs 1:16 |                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|      |  |  | Sasaran 3.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                           |                                          |                                 |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)                                                                                                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                          |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | 2021                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 2022            |                                                                                                                                                               | 2023           |                                                                                                                                                        | 2024           |                                                                                                                                                        | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |    |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | Target                                         | Rp                                                                                                                                                                                                                                 | Target          | Rp                                                                                                                                                            | Target         | Rp                                                                                                                                                     | Target         | Rp                                                                                                                                                     | Target                                   | Rp |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                         | Persentase meningkatnya APM, APK, jenjang pendidikan PAUD,SD, SMP, Nonformal/kesetaraan dan meningkatnya harapan lama sekolah serta menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan non formal/kesetaraan | APK PAUD 32,17<br>PAUD 32,17<br>APK SD 95,52<br>APK SMP 67,52<br>APK 67,52<br>APM SD 82,03<br>APM SMP 53,63<br>APS SD 4,9<br>APS SMP 17,84<br>AL PAUD 97,00<br>AL SD 99,90<br>AL S MP 98,4 | 93.306.512.106                                 | APK PAUD 32,79<br>APK SD 98,88<br>APK SMP 89,79<br>APM SD 78,77<br>APM SD 85,00<br>APM SMP 84,26<br>APM SMP 82,03<br>APM 69,52<br>SMP APS SD 53,63<br>APS SD 11,96<br>AL PAUD 97,65<br>AL SD 17,84<br>AL 99,97<br>PAUD AL SMP 99,6 | 109.211.071.127 | APK PAUD 33,00<br>APK SD 99,91<br>APK SMP 89,79<br>APM SD 85,00<br>APM SMP 70,00<br>APS SD 2,5<br>APS SMP 10,00<br>AL PAUD 98,76<br>AL SD 99,8<br>AL SMP 99,9 | 94.816.648.808 | APK PAUD 35,00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99,00<br>APM SD 98,72<br>APM SMP 75,00<br>APS SD 2,0<br>APS SMP 9,00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100<br>AL SMP 100 | 98.074.123.700 | APK PAUD 35,00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99,00<br>APM SD 98,72<br>APM SMP 75,00<br>APS SD 2,0<br>APS SMP 9,00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100<br>AL SMP 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |    |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                        | Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)                                                                                                                    | 98.21%                                                                                                                                                                                     | 100%                                           | 37.148.932.400                                                                                                                                                                                                                     | 100%            | 49.391.798.394                                                                                                                                                | 100%           | 51.254.808.712                                                                                                                                         | 100%           | 51.254.808.712                                                                                                                                         |                                          |    |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                        | Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD                                                                                                                                        | 35.15%                                                                                                                                                                                     | 61.55%                                         | 113.302.640                                                                                                                                                                                                                        | 63.08%          | 118.061.483                                                                                                                                                   | 64.66%         | 121.061.483                                                                                                                                            | 66.28%         | 121.465.698                                                                                                                                            |                                          |    |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                              | Persentase penerbitan izin Diksar dan PAUD                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                       | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                                  | -               | -                                                                                                                                                             | 100%           | -                                                                                                                                                      | 100%           | -                                                                                                                                                      |                                          |    |                                   |
|      |  |  | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                                                                 | terwujudnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                       | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                                  | -               | -                                                                                                                                                             | 100%           | -                                                                                                                                                      | 100%           | -                                                                                                                                                      |                                          |    |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                          |    |                                   |
|      |  |  | Tujuan 3.2 Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan lembaga adat                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                          |    |                                   |
|      |  |  | Sasaran 3.2.1 Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                        |                                          |    |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                        | Persentase penegelolaan dan pembinaan kebudayaan yang dikembangkan                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                       | 100%                                           | 444.241.250                                                                                                                                                                                                                        | 100%            | 519.964.380                                                                                                                                                   | 100%           | 451.431.155                                                                                                                                            | 100%           | 466.940.306                                                                                                                                            | 4                                        |    |                                   |

| Kode |  |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                             | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 |
|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                      | 2021                                           |                 | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |    |                                                   |
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                      | Target                                         | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp |                                                   |
|      |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                   | Persentase meningkatnya kesenian tradisional yang berkembang sesuai kebutuhan dan tututan                                                                  | 100%                                 | 100%                                           |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 6                                        |    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                   |
|      |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                   | persentase terpublikasinya informasi sejarah Kab. Donggala                                                                                                 | 100%                                 | 100%                                           |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 4                                        |    |                                                   |
|      |  |  |  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                            | persentase meningkatnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan                                                                        | 100%                                 | 100%                                           |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 4                                        |    |                                                   |
|      |  |  |  | Program Pengelolaan Permuseuman                                             | Persentase terkellannya permuseuman                                                                                                                        | 100%                                 | 100%                                           |                 | 100%   |                 | 100%   |                 | 100%   |                 |                                          |    |                                                   |
|      |  |  |  | Sasaran 3.3.1 Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan gratis        |                                                                                                                                                            |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |    |                                                   |
|      |  |  |  | Sasaran 3.3.2 Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan                   |                                                                                                                                                            |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |    |                                                   |
|      |  |  |  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan<br>b. Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi standar                 | 80%                                  | 85%                                            | 124.860.699.729 | 90%    | 146.797.803.736 | 95%    | 113.471.237.071 | 97%    | 113.663.646.237 | 95%                                      |    | Dinas Kesehatan, RSUD Kabelota, RSUD Pendau Tambu |
|      |  |  |  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | a. Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar<br>b. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu dan bermanfaat | 75%                                  | 80%                                            | 171.085.600     | 85%    | 200.247.991     | 90%    | 200.247.991     | 95%    | 184.937.547     | Dinas Kesehatan                          |    |                                                   |
|      |  |  |  | Sasaran 3.3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan          |                                                                                                                                                            |                                      |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                          |    |                                                   |

| Kode |  |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                             | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                            | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |        |                  |        |               |        |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                   |                        |
|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                         |                                      | 2021                                           |                  | 2022   |                  | 2023   |               | 2024   |                  |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD          |                        |
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                         |                                      | Target                                         | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp            | Target | Rp               |                                   | Target                                            | Rp                     |
|      |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten                                           | 75%                                  | 80%                                            | 1.222.212.140,00 | 85%    | 1.430.544.278,00 | 90%    | 1.430.544.278 | 95%    | 1.321.168.554,00 | Dinas Kesehatan                   | Dinas Kesehatan                                   |                        |
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Sasaran 3.3.4 Tersedianya obat yang berkualitas                             |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Sasaran 3.3.5 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat                           |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                         | Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang di Intervensi                                                    | 1 Kec                                | 1 Kec                                          | 247.511.115      | 4 Kec  | 289.700.615      | 5 Kec  | 467.436.305   | 5 Kec  | 480.991.958      | 5 Kec                             | 480.991.958                                       | Dinas Ketahanan Pangan |
|      |  |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif                                             | 75%                                  | 80%                                            | 7.642.426.100,00 | 85%    | 8.945.115.636,00 | 90%    | 8.945.115.636 | 95%    | 4.000.000,00     | Dinas Kesehatan                   | Dinas Kesehatan                                   |                        |
|      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Tujuan 3.4 Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Sasaran 3.4.1 Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera            |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                               | Persentase penurunan kuantitas perkembangan penduduk                                                    | 2,2                                  | 2,1                                            | 2.426.095.680    | 2,0    | 767.937.531      | 1,9    | 1.550.195.059 | 1,7    | 1.586.817.537    | 1,7                               | Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana |                        |
|      |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | Persentase Menurunnya laju pertumbuhan penduduk                                                         | 1,38                                 | 1,36                                           | 480.099.850      | 1,35   | 4.744.640.680    | 1,34   | 5.069.289.853 | 1,32   | 5.189.048.947    | 1,32                              |                                                   |                        |
|      |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                | Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dari Keluarga Pra Sejahtera Menjadi Keluarga Sejahtera I | 12,8                                 | 11,84                                          | 339.840.000      | 11,54  | 2.307.292.585    | 10     | 2.350.000.000 | 9,20   | 2.350.000.000    | 9,20                              |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Tujuan 3.5 Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga                        |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Sasaran 3.5.1 Meningkatnya ketersediaan Fasilitas olahraga                  |                                                                                                         |                                      |                                                |                  |        |                  |        |               |        |                  |                                   |                                                   |                        |
|      |  |  |  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                      | Persentase Cabang Olahraga Yang Meraih Medali Dalam Kompetisi                                           | 75%                                  | 80%                                            | 2.243.562.790    | 85%    | 2.625.989.225    | 90%    | 2.011.824.309 | 90%    | 2.080.867.450    | 90%                               | Dinas Pemuda dan Olahraga                         |                        |



| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                              | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                       | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|      |  |  |                                                                              |                                                                    |                                      | 2021                                           |             | 2022   |             | 2023   |            | 2024   |             | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |             |                                                    |
|      |  |  |                                                                              |                                                                    |                                      | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp         | Target | Rp          | Target                                   | Rp          |                                                    |
|      |  |  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                         | Persentase Pemuda Yang Menjadi Wirasahaan Mandiri dan Perkembangan | 75%                                  | 80%                                            | 1078698892  | 85%    | 1262568483  | 90%    | 963279660  | 90%    | 996475415   |                                          |             | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      |  |  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                   | Persentase Masyarakat yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan      | 0%                                   | 0%                                             | 0           | 0      | 0           | 0      | 0          | 0      | 4000000     |                                          |             | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      |  |  | Sasaran 3.5.2 Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran serta pemuda       |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |
|      |  |  | Tujuan 3.6 Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 3.6.1 Terwujudnya pengarusutamaan Gender                             |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |
|      |  |  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                             | Persentase meningkatnya Pemenuhan Hak Anak                         | 50%                                  | 60%                                            | 70.131.704  | 65%    | 220000000   | 75%    | 165309878  | 80%    | 112068849   | 85%                                      | 112068849   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                    | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender                                | 50%                                  |                                                |             | 65%    | 115719487   | 75%    | 90000000   | 80%    | 100000000   | 85%                                      | 100000000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                              | Persentase meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak    | 50%                                  |                                                |             | 65%    | 200.000.000 | 75%    | 50.000.000 | 80%    | 150.000.000 | 85%                                      | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                        | Persentase meningkatnya kualitas keluarga                          | 50%                                  | 60%                                            | 100.050.604 | 65%    | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000 | 80%    | 100.050.604 | 85%                                      | 100.050.604 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                             | Persentase meningkatnya perlindungan Khusus Anak                   | 50%                                  | 60%                                            | 115150154   | 65%    | 61283800    | 75%    | 159300000  | 80%    | 91283800    | 85%                                      | 91283800    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                               | Meningkatnya perlindungan Khusus Perempuan                         | 50%                                  | 60%                                            | 49400200    | 65%    | 99400200    | 75%    | 304271706  | 80%    | 139400200   | 85%                                      | 139400200   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  |                                                                              |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 3.6.2 Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek              |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 3.6.3 Terwujudnya pemenuhan Hak perempuan dan anak                   |                                                                    |                                      |                                                |             |        |             |        |            |        |             |                                          |             |                                                    |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                        | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------|--|
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 2021                                           |                | 2022   |                | 2023   |                 | 2024   |                | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |    |                                      |  |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp             | Target                                   | Rp |                                      |  |
|      |                                                 | Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    |                                      |  |
|      |                                                 | Tujuan 4.1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    |                                      |  |
|      |                                                 | Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah |                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    |                                      |  |
|      |                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                       | Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, Jumlah sarana prasarana pendukung dan pengelolaan jalan dan jembatan setiap tahun                                                |                                                | 83.457.477.805 |        | 97.683.219.948 |        | 107.912.216.527 |        | 71.644.892.265 |                                          |    | Dinas PU & PR                        |  |
|      |                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                | Persentase peningkatan pembinaan jasa konstruksi                                                                                                                                                              |                                                | 362.301.600    |        | 424.057.710    |        | 468.463.339     |        | 311.021.370    |                                          |    | Dinas PU & PR                        |  |
|      |                                                 | Sasaran 4.1.2 Terwujudnya pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya       |                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    |                                      |  |
|      |                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                           | 1. Terlindunginya DAS dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai dan abrasi pantai, 2. Rasio jaringan irigasi yang dikelola oleh kabupaten. 3. Rasio jaringan irigasi dikelola secara partisipatif. |                                                | 15.087.463.430 |        | 17.659.196.605 |        | 19.508.397.130  |        | 12.951.981.301 |                                          |    | Dinas PU & PR                        |  |
|      |                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                    | Persentase hunian yang bersanitasi dan jaringan air bersih/air minum yang dirasakan manfaatnya.                                                                                                               |                                                | 2.826.855.950  |        | 3.308.707.605  |        | 3.655.182.248   |        | 4.000.000.000  |                                          |    | Dinas PU & PR                        |  |
|      |                                                 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                             | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana yang mendukung pengembangan ternak                                                                                                                              | 100%                                           | 602.200.756    | 100%   | 704.848.870    | 100%   | 691.000.000     | 100%   | 708.614.870    | 100%                                     |    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|      |                                                 | Tujuan 4.2 Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas              |                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |        |                |        |                 |        |                |                                          |    |                                      |  |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                             | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |               |        |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |    |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----|
|      |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                      | 2021                                           |                | 2022   |                | 2023   |               | 2024   |               |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |    |
|      |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                      | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            |                                   | Target                                   | Rp |
|      |  |  | Sasaran 4.2.1 Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                               | Persentase layanan angkutan darat                                                                                                                                                                         |                                      |                                                | 3.851.380.136  |        | 4.507.867.034  |        | 2.622.616.504 |        | 2.685.926.098 |                                   | Dinas Perhubungan                        |    |
|      |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   | Dinas Perhubungan                        |    |
|      |  |  | Tujuan 4.3 Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |
|      |  |  | Sasaran 4.3.1 Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                         |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |
|      |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                              | Persentase rumah layak huni                                                                                                                                                                               |                                      |                                                | 17.303.358.150 |        | 20.252.801.600 |        | 6.561.007.389 |        | 6.751.276.604 |                                   | Dinas Perumahan                          |    |
|      |  |  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                  | Persentase Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                             |                                      |                                                | 3.422.373.000  |        | 4.005.733.498  |        | 1.297.679.580 |        | 1.335.312.288 |                                   | Dinas Perumahan                          |    |
|      |  |  | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                              | Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata                                                                                                                                                           |                                      |                                                | 7.566.690.381  |        | 8.856.470.387  |        | 2.869.102.695 |        | 2.952.306.673 |                                   | Dinas Perumahan                          |    |
|      |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                      | Tersusunnya dokumen pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah, jumlah dokumen rencana rinci kawasan potensial di Kabupaten Donggala                                                         |                                      |                                                | 360.307.229    |        | 421.723.388    |        | 465.884.577   |        | 309.309.283   |                                   | Dinas PU & PR                            |    |
|      |  |  | Sasaran 4.3.2 Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan pencegahan bahaya kebakaran |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |
|      |  |  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                   | 1. Persentase Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.<br>2. Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor.<br>3. Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan. |                                      |                                                | 102.810.000    |        | 120.334.476    |        | 28.092.980    |        | 29.021.959    |                                   | BPBD                                     |    |
|      |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |
|      |  |  | Tujuan 4.4 Mewujudkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan konservasi sumber daya alam                    |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                |        |                |        |               |        |               |                                   |                                          |    |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                         | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |                                          |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                      | 2021                                           |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                        |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                      | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                   | Rp                     |                                   |
|      |  |  | Sasaran 4.4.1 Terwujudnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                |             |        |             |        |             |        |             |                                          |                        |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | Persentase terlaksananya perencanaan lingkungan hidup                                                                     |                                      |                                                | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        |             |                                          | Dinas Lingkungan Hidup |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Persentase terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan tercapainya pemulihan fungsi lingkungan                  |                                      | %                                              | 180.822.000 | %      | 211.644.009 | %      | 225.207.448 | %      | 230.986.351 | %                                        | Dinas Lingkungan Hidup |                                   |
|      |  |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup |                                      |                                                |             |        | 20.000.000  |        | 20.000.000  |        | 20.000.000  |                                          |                        |                                   |
|      |  |  | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh           | Persentase terlaksananya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA                     |                                      |                                                |             |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |                                          |                        |                                   |
|      |  |  | Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup                                             |                                      |                                                |             |        | 20.000.000  |        | 20.000.000  |        | 20.000.000  |                                          |                        |                                   |
|      |  |  | Sasaran 4.4.2 Terwujudnya Perlindungan dan Pengendalian kawasan konservasi                                              |                                                                                                                           |                                      |                                                |             |        |             |        |             |        |             |                                          |                        |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | Persentase terlaksananya pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                       |                                      |                                                |             |        |             |        | 25.000.000  |        |             |                                          | Dinas Lingkungan Hidup |                                   |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                             | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                      | 2021                                           |               | 2022       |               | 2023       |               | 2024       |               | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |               |                                   |
|      |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                      | Target                                         | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                    | Persentase jenis Usaha/Kegiatan yang memiliki izin                                                                                                               |                                      |                                                |               | 50.000.000 |               | 50.000.000 |               | 50.000.000 |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Tujuan 4.5 Mewujudkan Reformasi Agraria dan Penyelesaian konflik pertanian                                                  |                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Sasaran 4.5.1 Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah                                  |                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               | Persentase lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian                                                       |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil di wilayah kabupaten yang telah memperoleh sertifikasi dan registrasi |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan  |                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Tujuan 5.1 Mewujudkan Kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan           |                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Sasaran 5.1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal                                           |                                                                                                                                                                  |                                      |                                                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                                   |
|      |  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                      | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                                                                         | 19,877                               | 7.980                                          | 885.354.933   | 8.139      | 846.108.186   | 8.320      | 2.088.565.905 | 8.443      | 2.378.408.389 | 8.443                                    | 2.378.408.389 | Dinas Perikanan                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                       | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                                                                                          | 23                                   | 21.910                                         | 1.419.530.043 | 23.006     | 3.436.161.618 | 24.156     | 2.001.669.222 | 25.364     | 1.985.772.180 | 25.364                                   | 1.985.772.180 | Dinas Perikanan                   |
|      |  |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                            | 1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan (Ton)                                                                                                              | 9                                    | 5.172                                          | 896.179.675   | 5.274      | 1.004.648.109 | 5.380      | 1.741.178.599 | 5.475      | 1.348.561.515 | 5.475                                    | 1.348.561.515 | Dinas Perikanan                   |

| Kode |  |  |                                                                         | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                               | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                   |      |                   |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |    |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|----|
|      |  |  |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                      | 2021                                           |                   | 2022              |                   | 2023              |      | 2024              |      |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |    |
|      |  |  |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                      | Target                                         | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp   | Target            | Rp   |                                   | Target                                   | Rp |
|      |  |  |                                                                         |                                                                                                                                               | 2. Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%) | 100%                                 | 100%                                           |                   | 100%              |                   | 100%              |      | 100%              |      |                                   |                                          |    |
|      |  |  |                                                                         |                                                                                                                                               | Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)                                                                                     | 47.19 Kg/Kap /Thn                    | 44.52 Kg/Kap /Thn                              | 46.75 Kg/Kap /Thn | 48.90 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn |      | 49.73 Kg/Kap /Thn |      |                                   |                                          |    |
|      |  |  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                   | Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan (%)                                                       | 100%                                                                                                           | -                                    | -                                              | 100%              | 317.999.900       | 100%              | 150.000.000       | 100% | 147.411.500       | 100% | 147.411.500                       | Dinas Perikanan                          |    |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase peningkatan ketersediaan Sarana yang mendukung pengembangan ternak                                                                 | -                                                                                                              | 100%                                 | 628.804.472                                    | 100%              | 1.871.528.653     | 100%              | 722.885.083       | 100% | 761.866.631       | 100% | 761.866.631                       | Dinas Peternakan dan Keswan              |    |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana yang mendukung pengembangan ternak                                                              | -                                                                                                              | 100%                                 | 481.760.605                                    | 100%              | 688.856.886       | 100%              | 552.800.000       | 100% | 566.891.896       | 100% | 566.891.896                       | Dinas Peternakan dan Keswan              |    |
|      |  |  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan/ternak dan kesehatan masyarakat veteriner                                                 | -                                                                                                              | 100%                                 | 285.066.560                                    | 100%              | 435.424.784       | 100%              | 323.625.920       | 100% | 337.699.907       | 100% | 337.699.907                       | Dinas Peternakan dan Keswan              |    |
|      |  |  | Program Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan kelompok tani yang mengikuti sosialisasi/pelatihan dan bimtek                                                           | -                                                                                                              | 100%                                 | 218.382.700                                    | 100%              | 420.801.200       | 100%              | 250.000.000       | 100% | 255.607.117       | 100% | 255.607.117                       | Dinas Peternakan dan Keswan              |    |
|      |  |  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | Persentase izin usaha pertanian yang dilakukan pengawasan                                                                                     | -                                                                                                              | 100%                                 | -                                              | 100%              | -                 | 100%              | -                 | 100% | -                 | 100% | -                                 | Dinas Peternakan dan Keswan              |    |
|      |  |  | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                              | Presentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang & Kantor Kas KSP untuk Koperasi                                                            | 100%                                                                                                           | 100%                                 | 6.975.000                                      | 100%              | 116.100.000       | 100%              | 10.629.307        | 100% | 10.859.137        | 100% | 10.859.137                        | Koperasi dan UMKM                        |    |
|      |  |  | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                             | Presentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota                  | 100%                                                                                                           | 100%                                 | 143.100.000                                    | 100%              | 248.875.000       | 100%              | 218.072.234       | 100% | 222.787.458       | 100% | 222.787.458                       | Koperasi dan UMKM                        |    |
|      |  |  | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi                            | Presentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota  | 100%                                                                                                           | 100%                                 | 32.175.000                                     | 100%              | 92.225.000        | 100%              | 49.031.965        | 100% | 50.092.148        | 100% | 50.092.148                        | Koperasi dan UMKM                        |    |
|      |  |  | Program Pendidikan Dan Lathan Perkoperasian                             | Presentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah | 100%                                                                                                           | 100%                                 | 390.304.000                                    | 100%              | 390.304.000       | 100%              | 594.790.114       | 100% | 607.650.845       | 100% | 607.650.845                       | Koperasi dan UMKM                        |    |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                               | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                             |
|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|      |  |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                      | 2021                                           |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |                             |
|      |  |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                      | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                   | Target                                   | Rp                          |
|      |  |  | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                                                | Persentase Koperasi yang telah diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah | 100%                                 | 100%                                           | 16.375.000    | 100%   | 86.375.000    | 100%   | 24.954.108    | 100%   | 25.493.673    | 100%                              | 25.493.673                               | Koperasi dan UMKM           |
|      |  |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |                             |
|      |  |  | Sasaran 5.1.2 Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan |                                                                                                                                                        |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                   |                                          |                             |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                          | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                          | 100%                                 | 100%                                           | 245.682.068   | 100%   | 945.522.900   | 100%   | 112.928.090   | 100%   | 260.382.536   | 100%                              | 260.382.536                              | DTPHP                       |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                       | Tersedianya Prasarana Pengolahan Lahan dan Pengolahan Air                                                                                              | 100%                                 | 100%                                           | 1.133.700.892 | 100%   | 2.302.384.255 | 100%   | 1.147.180.000 | 100%   | 1.201.536.261 | 100%                              | 1.201.536.261                            | DTPHP                       |
|      |  |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                               | 1. Jumlah Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya yang dibangun<br>2. Jumlah Lumbung Pangan yang di isi                                                 | -                                    | -                                              | -             | 3 unit | 133.424.000   | 3 unit | 1.950.000.000 | 3 unit | 2.006.550.000 | 3 unit                            | 2.006.550.000                            | Dinas Ketahanan Pangan      |
|      |  |  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                             | Persentase Kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                                            | 80,30%                               | 80,30%                                         | 753.082.865   | 81,25% | 723.379.350   | 81,76% | 1.265.447.549 | 81,76% | 1.302.145.528 | 81,76%                            | 1.302.145.528                            | Dinas Ketahanan Pangan      |
|      |  |  | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                            | Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                                                                 | 3 Kali                               | 3 Kali                                         | 43.988.750    | 3 Lap  | 105.869.559   | 3 Lap  | 83.074.809    | 3 Lap  | 85.483.978    | 3 Kali                            | 85.483.978                               | Dinas Ketahanan Pangan      |
|      |  |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                           | Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang di Intervensi                                                                                                   | 1 Kec                                | 1 Kec                                          | 247.511.115   | 4 Kec  | 267.378.800   | 5 Kec  | 467.436.305   | 5 Kec  | 480.991.958   | 5 Kec                             | 480.991.958                              | Dinas Ketahanan Pangan      |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                          | Persentase peningkatan ketersediaan Sarana yang mendukung pengembangan ternak                                                                          | -                                    | 100%                                           | 157.201.118   | 100%   | 467.882.163   | 100%   | 180.721.271   | 100%   | 190.466.658   | 100%                              | 190.466.658                              | Dinas Peternakan dan Keswan |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                       | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana yang mendukung pengembangan ternak                                                                       | -                                    | 100%                                           | 120.440.151   | 100%   | 172.214.222   | 100%   | 138.200.000   | 100%   | 141.722.974   | 100%                              | 141.722.974                              | Dinas Peternakan dan Keswan |
|      |  |  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                       | Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan/ ternak dan kesehatan masyarakat veteriner                                                         | -                                    | 100%                                           | 71.266.640    | 100%   | 108.856.196   | 100%   | 80.906.480    | 100%   | 84.424.977    | 100%                              | 84.424.977                               | Dinas Peternakan dan Keswan |
|      |  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                        | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                                                               | 19,877                               | 7.980                                          | 252.958.552   | 8.139  | 241.745.196   | 8.320  | 596.733.116   | 8.443  | 679.545.254   | 8.443                             | 679.545.254                              | Dinas Perikanan             |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                                                                                | 23                                   | 21.910                                         | 405.580.012   | 23.006 | 981.760.462   | 24.156 | 571.905.492   | 25.364 | 567.363.480   | 25.364                            | 567.363.480                              | Dinas Perikanan             |
|      |  |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                              | 1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan (Ton)                                                                                                    | 9                                    | 5.172                                          | 256.051.336   | 5.274  | 287.042.317   | 5.380  | 497.479.600   | 5.475  | 385.303.290   | 5.475                             | 385.303.290                              | Dinas Perikanan             |

| Kode |  |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                                                | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                    |                               |
|------|--|--|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |  |  |  |                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               | 2021                                           |                   | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |               |                                   | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD           |                               |
|      |  |  |  |                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               | Target                                         | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp            |                                   | Target                                             | Rp                            |
|      |  |  |  |                                                 | 2. Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil                                            | 100%                                                                                                                          | 100%                                           |                   | 100%              |                   | 100%              |                   | 100%              |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)                                                                                                                  | 44.52 Kg/Kap /Thn                                                                                                             | 44.52 Kg/Kap /Thn                              | 46.75 Kg/Kap /Thn | 48.90 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | Sasaran 5.1.3 Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri                                    |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                         | Persentase terjalin kerjasama (antar desa, antar desa dengan pihak ketiga, dan pembangunan kawasan perdesaan) yang ditetapkan | 80                                             | 35.982.200        | 85                | 42.115.545        | 90                | 68.979.028        | 95                | 70.979.634    | 95                                | PMD                                                |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                      | Persentase meningkatnya status desa                                                                                           | 60                                             | 619.271.500       | 65                | 724.829.407       | 70                | 1.187.163.257     | 75                | 1.221.594.675 | 75                                | PMD                                                |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                         | Persentase desa yang melakukan pembangunan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat  | 80                                             | 298.915.150       | 85                | 349.866.724       | 90                | 573.029.896       | 95                | 589.649.541   | 95                                | PMD                                                |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                  | Persentase Hasil Kelitbangan                                                                                                  |                                                | 908.750.000       |                   | 1.063.650.957     |                   | 718.025.004       |                   | 738.847.729   |                                   | Badan Penelitian dan Pengembangan                  |                               |
|      |  |  |  |                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | Sasaran 5.1.4 Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                   | Persentase pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan                                                                  | 0%                                             |                   | 0%                | 50%               |                   | 50%               |                   | 50%           |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                               |
|      |  |  |  |                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | Sasaran 5.1.5 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat                                                                    |                                                                                                                               |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                                   |                                                    |                               |
|      |  |  |  |                                                 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                            | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan Mengacu Ke Rencana Kerja                                                                | -                                              | 51.240.770        | 80%               | -                 | 80%               | 71.048.271        | 80%               | 73.108.670    | 80%                               | 73.108.670                                         | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |



| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|      |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                      | 2021                                           |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |               |                                                    |
|      |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                      | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                                                    |
|      |  |  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                                                                           | Persentase Tenaga Kerja yang lulus dan kompeten                                               | 90%                                  | 90%                                            | 10.060.144    | 90%    | 179.973.000   | 90%    | 13.948.967    | 90%    | 14.353.488    | 90%                                      | 14.353.488    | Tenaga Kerja dan Transmigrasi                      |
|      |  |  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                                                                  | Persentase Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar ditempatkan                                    | 22,50%                               | 30%                                            | 109.098.608   | 35%    | 72.870.500    | 40%    | 151.271.486   | 45%    | 155.658.359   | 45%                                      | 155.658.359   | Tenaga Kerja dan Transmigrasi                      |
|      |  |  | Hubungan Industrial                                                                                                                                                                                              | Persentase Jumlah Kasus yang terselesaikan                                                    | 90%                                  | 90%                                            | 26.037.300    | 90%    | 106.597.900   | 90%    | 36.102.212    | 90%    | 37.149.176    | 90%                                      | 37.149.176    | Tenaga Kerja dan Transmigrasi                      |
|      |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 5.1.6 Tersedianya tata ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak (Penyediaan fasilitas pojok laktasi dan nutrisi di ruang publik)                                                                  |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                   | persentase menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                            | 25%                                  |                                                | 49.400.200    | 25%    | 57.820.710    | 27%    | 62.374.391    | 28%    | 63.881.852    | 28%                                      |               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 5.1.7 Menguatnya kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koserer dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                                                                 | Persentase meningkatnya perlindungan khusus anak                                              | 25%                                  |                                                | 115.150.154   | 25%    | 134.778.070   | 27%    | 145.392.542   | 28%    | 148.906.381   | 28%                                      |               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                                                                  | Persentase meningkatannya pengelolaan sistem gender dan anak                                  | 0%                                   |                                                |               | 0%     |               | 50%    |               | 50%    |               | 50%                                      |               |                                                    |
|      |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | Sasaran 5.1.8 Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi yang potensial dan prospektif                                                                                   |                                                                                               |                                      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |                                          |               |                                                    |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                                             | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 100%                                 | 100%                                           | 982.728.272   | 100%   | 3.782.091.600 | 100%   | 451.712.360   | 100%   | 1.041.530.144 | 100%                                     | 1.041.530.144 | DTPHP                                              |
|      |  |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                          | Tersedianya Prasarana Pengolahan Lahan dan Pengolahan Air                                     | 100%                                 | 100%                                           | 4.534.803.568 | 100%   | 9.209.537.022 | 100%   | 4.588.720.000 | 100%   | 4.806.145.043 | 100%                                     | 4.806.145.043 | DTPHP                                              |
|      |  |  | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                     | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani                                                     | 100%                                 | 100%                                           | 481.788.000   | 100%   | 828.759.500   | 100%   | 354.430.331   | 100%   | 510.615.945   | 100%                                     | 510.615.945   | DTPHP                                              |

| Kode |  |  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah           | Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)                                                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |             |                   |             |                   |             |                                          |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                                           |                                                                                                                |                                      | 2021                                           |             | 2022              |             | 2023              |             | 2024              |             | Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD |             |                                   |
|      |  |  |                                                           |                                                                                                                |                                      | Target                                         | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target                                   | Rp          |                                   |
|      |  |  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase penurunan luas lahan yang terserang OPT dan DPT                                                     | 95%                                  | 95%                                            | 5.048.640   | 95%               | 123.500.000 | 95%               | 120.000.000 | 95%               | 5.350.727   | 95%                                      | 5.350.727   | DTPHP                             |
|      |  |  | Program Perizinan Usaha Pertanian                         | Persentase izin usaha pertanian yang dilakukan pengawasan                                                      | -                                    | 0%                                             | -           | 0%                | -           | 0%                | -           | 0%                | -           | 0%                                       | -           | DTPHP                             |
|      |  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                    | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                       | 19,877                               | 7.980                                          | 126.479.276 | 8.139             | 120.872.598 | 8.320             | 298.366.558 | 8.443             | 339.772.627 | 8.443                                    | 339.772.627 | Dinas Perikanan                   |
|      |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                     | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                                        | 23                                   | 21.910                                         | 202.790.006 | 23.006            | 490.880.231 | 24.156            | 285.952.746 | 25.364            | 283.681.740 | 25.364                                   | 283.681.740 | Dinas Perikanan                   |
|      |  |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan          | 1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan (Ton)                                                            | 9                                    | 5.172                                          | 128.025.668 | 5.274             | 143.521.158 | 5.380             | 248.739.800 | 5.475             | 192.651.645 | 5.475                                    | 192.651.645 | Dinas Perikanan                   |
|      |  |  |                                                           | 2. Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%) | 100%                                 | 100%                                           |             | 100%              |             | 100%              |             | 100%              |             | 100%                                     |             |                                   |
|      |  |  |                                                           | Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)                                                                                     | 44.52 Kg/Kap /Thn                    | 44.52 Kg/Kap /Thn                              |             | 46.75 Kg/Kap /Thn |             | 48.90 Kg/Kap /Thn |             | 49.73 Kg/Kap /Thn |             | 49.73 Kg/Kap /Thn                        |             |                                   |

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2019-2024. Uraian bab ini disajikan menjadi dua sub bab sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut.

#### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Periode RPJMD Revisi Tahun 2022-2024**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Donggala untuk periode RPJMD Revisi 2022-2024 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas, olehnya proyeksi terhadap Kapasitas Riil Keuangan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada Kabupaten Donggala. Proyeksi besaran Kapasitas Riil Kabupaten Donggala yang akan dibagi untuk membiayai sejumlah program pembangunan di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 menunjukkan Aspek Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala yang diawali dari uraian Kerangka Pendanaan Tahun Dasar 2021. Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala untuk kebutuhan RPJMD

Periode 2022-2024 didasarkan pada Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk membiayai sejumlah program yang menjadi acuan pembiayaan kegiatan yang melekat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2021-2024**  
**KABUPATEN DONGGALA**

| NO         | BELANJA                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                              | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           |
|            | <b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b> | <b>971,465,271,118.00</b>   | <b>977,661,098,764.00</b>   | <b>674,501,712,499.00</b>   | <b>708,226,798,123.00</b>   |
| <b>1</b>   | <b>BELANJA</b>                 | <b>1,436,628,986,000.00</b> | <b>1,579,810,923,000.00</b> | <b>1,290,541,317,553.00</b> | <b>1,355,068,383,430.00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>         | <b>867,963,114,393.00</b>   | <b>954,468,844,942.00</b>   | <b>908,690,482,677.00</b>   | <b>954,125,006,811.00</b>   |
| 1.1.1      | Belanja Pegawai                | 476,636,008,950.00          | 524,140,039,337.00          | 540,309,118,872.00          | 567,324,574,815.00          |
| 1.1.2      | Belanja Barang dan Jasa        | 326,206,106,059.00          | 358,717,507,808.00          | 299,415,358,187.00          | 314,386,126,096.00          |
| 1.1.3      | Belanja Hibah                  | 55,918,246,043.00           | 61,491,350,064.00           | 59,935,411,430.00           | 62,932,182,002.00           |
| 1.1.4      | Belanja Bantuan Sosial         | 9,202,753,341.00            | 10,119,947,733.00           | 9,030,594,188.00            | 9,482,123,898.00            |
| <b>1.2</b> | <b>Belanja Modal</b>           | <b>317,853,109,951.00</b>   | <b>349,532,008,545.00</b>   | <b>156,460,338,720.00</b>   | <b>164,283,355,656.00</b>   |
| <b>1.3</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b>     | <b>5,818,577,339.00</b>     | <b>6,398,487,102.00</b>     | <b>6,764,480,564.00</b>     | <b>7,102,704,592.00</b>     |

|            |                                                                             |                           |                           |                           |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>                                                     | <b>244,994,184,317.00</b> | <b>269,411,582,411.00</b> | <b>218,626,015,592.00</b> | <b>229,557,316,371.00</b> |
| 1.4.1      | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa       | 4,661,039,200.00          | 5,436,992,600.00          | 5,215,825,231.00          | 5,476,616,492.00          |
| 1.4.2      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 240,333,145,117.00        | 263,974,589,811.00        | 213,410,190,361.00        | 224,080,699,879.00        |

## **7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Donggala Periode RPJMD Tahun 2022-2023**

Sub bab ini memuat sejumlah program prioritas dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala periode RPJMD Tahun 2022-2023. Sejumlah program yang diutarakan pada sub bab ini akan menjadi acuan perumusan program dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Perumusan sejumlah program pembangunan daerah pada sub bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Penjabaran sejumlah program disertai kebutuhan pendanaan guna pencapaian visi melalui visi mengacu pada Pendekatan *Money Follow Progame* (MFP). Sub bab ini mempertimbangkan sejumlah program pembangunan daerah yang disusun dan diklasifikasikan berdasarkan: 1). Tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, 2). Fokus lokasi penerapan program yang diagendakan selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian dan dukungan Fokus Grup Diskusi (FGD), serta 3). Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program organisasi perangkat daerah.

Pencapaian target pembangunan dilakukan melalui sejumlah program yang didesain untuk menjadi acuan penetapan sejumlah kegiatan yang ditujukan pada pencapaian target pembangunan yang

menjadi dasar melekatnya sejumlah program dan kegiatan yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Donggala. Desain bobot misi untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati Periode Kabupaten Donggala 2022-2023 didesain dengan uraian bobot pada Tabel 7.3

Berdasarkan pembobotan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2022-2023 pada tabel 7.3 maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif di Kabupaten Donggala akan menjadi misi utama Kabupaten Donggala yang akan direalisasikan pada tahun 2022-2023. Atas peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan misi-misi lainnya, terutama pelaksanaan program-program dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, dan perikanan; peningkatan peran serta masyarakat melalui semangat gotong royong dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; Peningkatan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing; Penciptaan kemandirian ekonomi desa dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar pembangunan daerah; Penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Peningkatan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif, bersinergi dan terpadu; Penciptaan iklim usaha dan investasi yang lebih mudah dan cepat; dan Pembangunan masyarakat religius yang berkepribadian berbasis kearifan lokal.

Adapun keberpihakan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan program, rincian jenis program dan OPD penanggungjawab pada setiap misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.



**TABEL 7.2**  
**TARGET, INDIKATOR DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM KERJA BERDASARKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DONGGALA**  
**TAHUN 2022-2024**

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                                                | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                            | 2021 (Tahun Dasar) | 2022                                                                                                                                            |                     | 2023                                                                                                                                           |                     | 2024                                                                                                                                     |                                                           | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD                                                                                                      |                                                           |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |    |                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | JUMLAH (Rp)        | Target                                                                                                                                          | JUMLAH (Rp)         | Target                                                                                                                                         | JUMLAH (Rp)         | Target                                                                                                                                   | JUMLAH (Rp)                                               |                                                                                                                                          |                                                           |
| MISI | 1  | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar             |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 776.649.139.842    | -                                                                                                                                               | 188.505.403.597.828 | -                                                                                                                                              | 208.056.329.561.534 |                                                                                                                                          | 717.545.718.149                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 369.837.706.388    | -                                                                                                                                               | 382.639.448.699     | -                                                                                                                                              | 375.515.911.409     | -                                                                                                                                        | 388.631.787.931                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
|      | 3  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                             |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 369.837.706.388    | -                                                                                                                                               | 382.639.448.699     | -                                                                                                                                              | 375.515.911.409     | -                                                                                                                                        | 388.631.787.931                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                     | 90                                                                                                                                              | 275.699.664.882    | 96.78                                                                                                                                           | 285.777.757.288     | 98.97                                                                                                                                          | 285.995.561.128     | 100                                                                                                                                      | 289.683.646.810                                           | 100                                                                                                                                      |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | 3    | Persentase meningkatnya APM, APK, jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP. Nonformal/kesetaraan dan meningkatnya harapan lama sekolah serta menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan non formal/kesetaraan | APK PAUD 32.17<br>APK SD 95.52<br>APK SMP 67.52<br>APM SD 82.03<br>APM SMP 53.63<br>APS SD 4.9<br>APS SMP 17.84<br>AL PAUD 97.00<br>AL SD 99.90 | 93.306.512.106     | APK PAUD 32.79<br>APK SD 98.88<br>APK SMP 78.77<br>APM SD 84.26<br>APM SMP 69.52<br>APS SD 3.1<br>APS SMP 11.96<br>AL PAUD 97.65<br>AL SD 99.90 | 91.439.508.478      | APK PAUD 33.00<br>APK SD 99.91<br>APK SMP 89.79<br>APM SD 85.00<br>APM SMP 70.00<br>APS SD 2.5<br>APS SMP 10.00<br>AL PAUD 98.76<br>AL SD 99.8 | 89.136.553.881      | APK PAUD 35.00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99.00<br>APM SD 98.72<br>APM SMP 75.00<br>APS SD 2.0<br>APS SMP 9.00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100 | 98.074.123.699                                            | APK PAUD 35.00<br>APK SD 100<br>APK SMP 99.00<br>APM SD 98.72<br>APM SMP 75.00<br>APS SD 2.0<br>APS SMP 9.00<br>AL PAUD 100<br>AL SD 100 | AL                                                        |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kurikulum                                              | 3    | Persentase meningkatnya kurikulum mulok yang berkualitas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | -                  | -                                                                                                                                               | 1471617000          |                                                                                                                                                | 295.000.000.00      |                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | 3    | Rasio guru/murid pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan                                                                                                                                 | RASIO Guru /Murid PAUD 1:25<br>SD/MI 1:30<br>SMP/MTs 1:27                                                                                       | 831.529.400        | RASIO Guru /Murid PAUD 1:30<br>SD/MI 1:24<br>SMP/MTs 1:22                                                                                       | 3.950.565.933       | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:22<br>SMP/MTs 1:20                                                                                      | 88.796.400          | 874.017.422                                                                                                                              | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:20<br>SMP/MTs 1:16 |                                                                                                                                          | RASIO Guru /Murid PAUD 1:20<br>SD/MI 1:20<br>SMP/MTs 1:16 |
| 3    | 4  | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                   | 3    | Persentase penerbitan izin Diksar dan PAUD                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                               | -                  | -                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                                                              | -                   | -                                                                                                                                        | -                                                         | -                                                                                                                                        |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                      | 3    | terwujudnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | -                                                                                                                                               | -                  | -                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                                                              | -                   | -                                                                                                                                        | -                                                         | -                                                                                                                                        |                                                           |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                        |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 210.964.370.849    | -                                                                                                                                               | 246.924.297.029     | -                                                                                                                                              | 142.727.385.144     | -                                                                                                                                        | 180.132.277.784                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
|      | 3  | Dinas Kesehatan                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 135.873.285.234    | -                                                                                                                                               | 159.384.533.500     | -                                                                                                                                              | 142.727.385.144     | -                                                                                                                                        | 146.866.479.311                                           |                                                                                                                                          |                                                           |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                                                                                    | 90%                                                                                                                                             | 38.058.444.260     | 93%                                                                                                                                             | 38.524.461.319      | 95%                                                                                                                                            | 37.749.870.000      | 97%                                                                                                                                      | 41.132.059.129                                            | 97%                                                                                                                                      |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3    | persentase meningkatnya kesehatan masyarakat                                                                                                                                                                             | 80%                                                                                                                                             | 88.779.117.134     | 85%                                                                                                                                             | 117.284.484.981     | 90%                                                                                                                                            | 103.748.896.000     | 95%                                                                                                                                      | 95.967.118.906                                            | 95%                                                                                                                                      |                                                           |
| 3    | 4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 3    | persentase meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                                            | 80%                                                                                                                                             | 1.222.212.140      | 85%                                                                                                                                             | 2.569.436.600       | 90%                                                                                                                                            | 1.203.000.000       | 95%                                                                                                                                      | 1.321.168.553                                             | 95%                                                                                                                                      |                                                           |
| 3    | 4  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 3    | Persentase meningkatnya kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                                                                                                                                            | 80%                                                                                                                                             | 171.085.600        | 83%                                                                                                                                             | 303.896.000         | 85%                                                                                                                                            | 10.619.144          | 87%                                                                                                                                      | 184.937.546                                               | 87%                                                                                                                                      |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 3    | persentase masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan                                                                                                                                                              | 80%                                                                                                                                             | 7.642.426.100      | 83%                                                                                                                                             | 702.254.600         | 85%                                                                                                                                            | 15.000.000          | 87%                                                                                                                                      | 8.261.195.177                                             | 87%                                                                                                                                      |                                                           |
|      | 3  | Rsud Kabelota Donggala                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 59.551.191.089     | -                                                                                                                                               | 52.807.169.090      | -                                                                                                                                              | 29.348.518.687      | -                                                                                                                                        | 30.170.625.728                                            |                                                                                                                                          |                                                           |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 3    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                     | 80%                                                                                                                                             | 24.619.608.494     | 100%                                                                                                                                            | 26.585.438.454      | 100%                                                                                                                                           | 12.135.280.899      | 100%                                                                                                                                     | 12.474.098.398                                            | 100%                                                                                                                                     |                                                           |
| 3    | 4  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3    | Persentase Meningkatkan Kesehatan Masyarakat / Perorangan                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                                             | 34.931.582.595     | 100%                                                                                                                                            | 26.221.730.636      | 100%                                                                                                                                           | 17.213.237.788      | 100%                                                                                                                                     | 17.696.527.330                                            | 100%                                                                                                                                     |                                                           |
| 3    | 4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 3    | persentase meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | -                  | -                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                                                              | -                   | -                                                                                                                                        | -                                                         | -                                                                                                                                        |                                                           |
| 3    | 4  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 3    | Persentase meningkatnya kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | -                  | -                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                                                              | -                   | -                                                                                                                                        | -                                                         | -                                                                                                                                        |                                                           |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022    | 2023                |        | 2024                |                 | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |             |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
|      |    |                                                                             |      |                                                                                                                                                                                            |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target  | JUMLAH (Rp)         | Target | JUMLAH (Rp)         | Target          |                                     | JUMLAH (Rp) |
| 3    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 3    | persentase masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan                                                                                                                                |                                      | -                  | -       |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
|      | 3  | Rsud Pratama Tambu                                                          |      |                                                                                                                                                                                            |                                      | 15.539.894.526     | -       | 12.697.020.328      | -      | 3.007.942.416       | -               | 3.095.172.745                       |             |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                                                      | 80%                                  | 3.615.787.994      | 90%     | 2.347.853.526       | 95%    | 1.963.278.433       | 100%            | 720.783.450                         | 100%        |
| 3    | 4  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3    | persentase meningkatnya kesehatan masyarakat                                                                                                                                               | 80%                                  | 11.924.106.532     | 90%     | 10.341.246.802      | 95%    | 1.044.663.983       | 100%            | 2.374.389.295                       | 100%        |
| 3    | 4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 3    | persentase meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                              |                                      | -                  | 7920000 |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
| 3    | 4  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 3    | Persentase meningkatnya kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                                                                                                              |                                      | -                  | -       |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
| 3    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 3    | persentase masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan                                                                                                                                |                                      | -                  | -       |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                 |      |                                                                                                                                                                                            |                                      | 160.492.921.665    | -       | 187.849.738.326.993 | -      | 207.520.612.522.926 |                 | 130.612.677.378                     |             |
|      | 3  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                     |      |                                                                                                                                                                                            |                                      | 128.511.936.210    | -       | 204.928.501.581     | -      | 107.213.153.547     | 107.213.153.547 | 110.322.334.999                     |             |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                                                      |                                      | 13.262.313.752     |         | 17.534.420.499      |        | 13.498.640.815      |                 | 13.645.640.815                      |             |
| 4    | 4  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                   | 4    | 1. Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir<br>2. Persentase irigasi dalam kondisi baik                            |                                      | 15.087.463.430     |         | 45.112.081.161      |        | 15.013.795.027      |                 | 14.947.795.027                      |             |
| 4    | 4  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | 4    | Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan                                                                                                                                  |                                      | 6.082.444.788      |         | 8.812.285.448       |        | 7.148.104.934       |                 | 7.068.104.934,00                    |             |
| 4    | 4  | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional            | 4    | Cakupan TPA kabupaten yang dilaksanakan                                                                                                                                                    |                                      | -                  | -       |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
| 4    | 4  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      | 4    | Persentase air limbah domestik yang telah dikelola secara sistematis                                                                                                                       |                                      | 2.826.855.950      |         | 10.498.697.300      |        | 5.103.075.000,00    |                 | 5.115.075.000                       |             |
| 4    | 4  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                        | 4    | Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik                                                                                                          |                                      | 6.163.975.006      |         | 5.413.125.679       |        | 425.000.000         |                 | 435.000.000,00                      |             |
| 4    | 4  | Program Pengembangan Permukiman                                             | 4    | Luas Ruang Terbuka Hijau yang ditata                                                                                                                                                       |                                      | -                  | -       |                     | -      |                     | -               |                                     |             |
| 4    | 4  | Program Penataan Bangunan Gedung                                            | 4    | Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung                                                                                                                                           |                                      | 908.769.150        |         | 10.098.902.800      |        | 1.000.000           |                 | 2.000.000                           |             |
| 4    | 4  | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                                 | 4    | Persentase permukiman yang telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal                                                    |                                      | 27.500             |         | 8.757.401.738       |        | 4.775.888.269       |                 | 4.857.888.269                       |             |
| 4    | 4  | Program Penyelenggaraan Jalan                                               | 4    | 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)<br>2. Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)<br>3. Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton |                                      | 83.457.477.805     |         | 96.674.433.656      |        | 59.933.786.592      |                 | 62.857.068.044                      |             |
| 4    | 4  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                        | 4    | Persentase Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi di daerah kabupaten                                                                                                        |                                      | 362.301.600        |         | 647.725.800         |        | 452.950.512         |                 | 482.950.512                         |             |
| 4    | 4  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                      | 4    | Persentase Cakupan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten                                                                                                                                |                                      | 360.307.229        |         | 1.379.427.500       |        | 860.912.398         |                 | 910.812.398                         |             |
|      | 3  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan                           |      |                                                                                                                                                                                            |                                      | 31.980.985.455     | -       | 21.561.440.798      |        | 12.426.858.548      |                 | 12.787.237.445                      |             |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                             | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |                | 2023   |                  | 2024   |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                  | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)      | Target | JUMLAH (Rp)    |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                            | 3.688.563.924      |        | 3.722.416.849  |        | 3.355.639.032    |        | 1.439.172.391  |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengembangan Perumahan                                                                                              | 4                         | Persentase rumah layak huni                                                                                                                                      | 17.303.358.150     |        | 3.483.578.091  |        | 3.685.000.000    |        | 6.751.276.604  |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Kawasan Permukiman                                                                                                  | 4                         | Persentase Kawasan Permukiman                                                                                                                                    | 3.422.373.000      |        | 5.264.651.914  |        | 2.355.619.516    |        | 1.335.312.288  |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                              | 4                         | Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata                                                                                                                  | 7.566.690.381      |        | 2.647.701.569  |        | 550.000.000      |        | 2.952.306.673  |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                               | 4                         | Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian                                                           | -                  |        | 6.443.092.375  |        | 1.855.600.000,00 |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 4                         | Persentase perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil di wilayah kabupaten yang telah memperoleh sertifikasi dan registrasi | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                  | 792.393.900        | -      | 241.160.800    | -      | 75.000.000       |        | 309.169.489    |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan                                                                           |                           |                                                                                                                                                                  | 792.393.900        | -      | 241.160.800    | -      | 75.000.000       |        | 309.169.489    |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Izin Lokasi                                                                                             | 4                         | Cakupan penyelenggaraan pengelolaan izin lokasi                                                                                                                  | -                  |        | 10.000.000     |        |                  |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                                                                              | 4                         | Persentase Penambahan Aset Tanah                                                                                                                                 | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                                 | 4                         | Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | -                  |        | 50.953.300     |        | 200.000.000,00   |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                    | 4                         | Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan                                                                                          | 792.393.900        |        | 86.210.000     |        | 75.000.000,00    |        | 309.169.489,00 |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee                          | 4                         | Persentase penyelesaian redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang diselesaikan                            | -                  |        | 93.997.500     |        | 350.000.000,00   |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penetapan Tanah Ulayat                                                                                              | 4                         | Persentase tanah ulayat yang sudah ditetapkan                                                                                                                    | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Tanah Kosong                                                                                            | 4                         | Persentase tanah kosong yang telah dilakukan pengelolaan                                                                                                         | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                                                      | 4                         | Persentase penyelesaian permohonan izin membuka tanah                                                                                                            | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penatagunaan Tanah                                                                                                  | 4                         | 1. Persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah<br>2. Persentase Aset tanah Pemda yang bersertifikat                                                 | -                  |        | -              |        |                  |        |                |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                                   |                           |                                                                                                                                                                  | 30.174.156.765     | -      | 20.724.887.449 | -      | 12.133.466.521   |        | 12.485.337.047 |                                     |
|      | 3                                                            | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                  | 4.085.578.460      | -      | 4.512.429.659  | -      | 5.004.725.434    | -      | 5.120.862.469  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                            | 3.791.961.460      | 100%   | 3.979.471.659  | 100%   | 3.924.725.434    | 100%   | 4.752.827.090  | 100%                                |
| 1    | 4                                                            | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                                        | 1                         | Persentase meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan peraturan bupati                                                            | 293.617.000        | 60%    | 532.958.000    | 65%    | 1.080.000.000    | 75%    | 368.035.379    | 75%                                 |
|      | 3                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                  | 26.088.578.305     | -      | 16.212.457.790 | -      | 7.128.741.087    |        | 7.364.474.578  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                            | 3.050.477.019      |        | 5.739.563.531  |        | 3.073.917.832    |        | 861.110.950    |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Penanggulangan Bencana                                                                                              | 1                         | 1. Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana<br>2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                       | 22.935.291.286     |        | 7.545.122.059  |        | 3.962.569.255    |        | 6.474.341.669  |                                     |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                         | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                                                           |      |                                                                                                                                                                   |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    |                                     |
| 1    | 4  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1    | 1. Persentase Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                                                                   |                                      | 102.810.000        |        | 2.927.772.200  |        | 92.254.000     |        | 29.021.959     |                                     |
|      |    |                                                                                           |      | 2. Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terdapor                                                                                                |                                      |                    |        |                |        |                |        |                |                                     |
|      |    |                                                                                           |      | 3. Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan                                                                                                     |                                      |                    |        |                |        |                |        |                |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial                                                         |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 4.387.590.275      | -      | 5.135.476.858  | -      | 5.265.275.534  | -      | 5.374.468.520  |                                     |
|      | 3  | Dinas Sosial                                                                              |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 4.387.590.275      | -      | 10.430.647.530 | -      | 5.265.275.534  | -      | 5.374.468.520  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                              | 100%                                 | 3.192.369.847      | 100%   | 3.842.414.510  | 100%   | 3.538.414.602  | 100%   | 3.910.469.111  |                                     |
| 1    | 4  | Program Pemberdayaan Sosial                                                               | 1    | Persentase meningkatnya tatakelola perlindungan sosial masyarakat                                                                                                 | 100%                                 | 234.386.600        | 100%   | 868.684.300    | 100%   | 311.276.150    | 100%   | 287.095.029    |                                     |
| 1    | 4  | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            | 1    | Persentase meningkatnya penanganan warga migran korban tindak kekerasan                                                                                           |                                      | -                  |        | 0              |        |                |        |                |                                     |
| 1    | 4  | Program Rehabilitasi Sosial                                                               | 1    | Persentase meningkatnya cakupan program rehabilitasi dibandingkan dengan sasaran direhabilitasi sosial dan menurunnya masalah penyandang kesejahteraan masyarakat | 100%                                 | 244.814.600        | 100%   | 995.608.000    | 100%   | 330.000.000    | 100%   | 299.868.059    |                                     |
| 1    | 4  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                   | 1    | Persentase cakupan anak terlantar yang dipelihara dibandingkan dengan total anak terlantar dan jumlah dokumen data fakir miskin yang ditetapkan                   | 100%                                 | 137.819.000        |        | 2.892.880.720  |        | 241.714.338    | 100%   | 168.811.484    |                                     |
| 1    | 4  | Program Penanganan Bencana                                                                | 1    | Persentase meningkatnya cakupan sasaran penerima bantuan penanganan bencana                                                                                       | 100%                                 | 578.200.228        |        | 1.831.060.000  |        | 843.870.444    | 100%   | 708.224.837    |                                     |
| 1    | 4  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                  | 1    | Persentase meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan                                                                                                          |                                      | -                  |        | -              |        | -              |        | -              |                                     |
|      | 1  | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                     |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 57.473.040.168     | -      | 88.203.805.822 | -      | 75.315.900.527 |        | 65.039.709.729 |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja                                                   |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 4.854.208.734      |        | 8.029.000.922  |        | 6.431.195.620  |        | 6.603.200.293  |                                     |
|      | 3  | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                                                       |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 2.439.079.286      |        | 4.835.593.233  |        | 3.381.924.250  |        | 3.480.000.053  |                                     |
| 1    | 4  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 1    | Persentase Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ASN                                                                                 | 99,10%                               | 2.242.642.464      | 100%   | 4.476.151.833  | 100%   | 3.109.553.314  | 100%   | 3.199.730.360  | 100%                                |
| 3    | 4  | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                          | 2    | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan Mengacu Ke Rencana Kerja                                                                                                    | -                                    | 51.240.770         | 80%    | -              | 80%    | 71.048.271     | 80%    | 73.108.670     | 80%                                 |
| 3    | 4  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    | 2    | Persentase Tenaga Kerja yang lulus dan kompeten                                                                                                                   | 90%                                  | 10.060.144         | 90%    | 179.973.000    | 90%    | 13.948.967     | 90%    | 14.353.488     | 90%                                 |
| 3    | 4  | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                           | 2    | Persentase Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar ditempatkan                                                                                                        | 22,50%                               | 109.098.608        | 35%    | 72.870.500     | 40%    | 151.271.486    | 45%    | 155.658.359    | 45%                                 |
| 3    | 4  | Program Hubungan Industrial                                                               | 2    | Persentase Jumlah Kasus yang terselesaikan                                                                                                                        | 90%                                  | 26.037.300         | 90%    | 106.597.900    | 90%    | 36.102.212     | 90%    | 37.149.176     | 90%                                 |
|      | 3  | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                                        |      |                                                                                                                                                                   |                                      | 2.415.129.448      | -      | 3.193.407.689  | -      | 3.049.271.370  | -      | 3.123.200.239  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                              | 100%                                 | 2.080.396.786      | 100%   | 2.390.406.220  | 100%   | 2.627.626.187  | 100%   | 2.690.340.816  | 100%                                |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                                                                                    | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                          | 2021 (Tahun Dasar) | 2022                 |                      | 2023   |                      | 2024   |                      | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                         |                           |                                                                                                               | JUMLAH (Rp)        | Target               | JUMLAH (Rp)          | Target | JUMLAH (Rp)          | Target | JUMLAH (Rp)          |                                     |
| 3    | 4                                                            | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                              | 3                         | Persentase pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan                                                  | 0%                 | -                    | 104.000.502          | 0%     | 50.000.000,00        | 50%    |                      | 50%                                 |
| 3    | 4                                                            | Program Perlindungan Perempuan                                                                                          | 3                         | Persentase menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                            | 25%                | 49.400.200           | 115.000.253          | 25%    | 62.374.390           | 28%    | 63.881.852           | 28%                                 |
| 3    | 4                                                            | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                   | 3                         | Persentase peningkatan kualitas keluarga                                                                      | 25%                | 100.050.604          | 120.000.204          | 25%    | 40.000.000           | 28%    | 129.380.403          | 28%                                 |
| 3    | 4                                                            | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                                         | 3                         | Persentase meningkatnya pengelolaan sistem gender dan anak                                                    | 0%                 | -                    | 160.000.150          | 0%     | 75327551             | 50%    |                      | 50%                                 |
| 3    | 4                                                            | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                                                                                        | 3                         | Persentase meningkatnya pemenuhan hak anak                                                                    | 25%                | 70.131.704           | 200.000.308          | 25%    | 88.550.700           | 28%    | 90.690.788           | 28%                                 |
| 3    | 4                                                            | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                        | 3                         | Persentase meningkatnya perlindungan khusus anak                                                              | 25%                | 115.150.154          | 104.000.052          | 25%    | 105.392.542          | 28%    | 148.906.381          | 28%                                 |
|      | 2                                                            | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>                                                                                |                           |                                                                                                               |                    | <b>3.662.060.085</b> | <b>4.845.808.980</b> | -      | <b>6.915.959.113</b> |        | <b>7.116.521.926</b> |                                     |
|      | 3                                                            | <b>Dinas Ketahanan Pangan</b>                                                                                           |                           |                                                                                                               |                    | <b>3.662.060.085</b> | <b>4.845.808.980</b> | -      | <b>6.915.959.113</b> |        | <b>7.116.521.926</b> |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 1                         | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang memenuhi standar Tekhnis                                 | 100%               | 2.617.477.355        | 3.615.757.271        | 100%   | 3.150.000.450        | 100%   | 3.241.350.462        | 100%                                |
| 2    | 4                                                            | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                                         | 2                         | 1. Jumlah Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya yang dibangun 2. Jumlah Lumbung Pangan yang di isi           | -                  | -                    | 133.424.000          | 3 unit | 1.950.000.000        | 3 unit | 2.006.550.000        | 3 unit                              |
| 2    | 4                                                            | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                       | 2                         | Persentase Kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                   | 80,30%             | 753.082.865          | 723.379.350          | 81,25% | 1.265.447.549        | 81,76% | 1.302.145.528        | 81,76%                              |
| 2    | 4                                                            | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                      | 2                         | Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji                                             | 3 Lap              | 43.988.750           | 105.869.559          | 3 Lap  | 83.074.809           | 3 Lap  | 85.483.978           | 3 Lap                               |
| 2    | 4                                                            | Program Penangan Kerawanan Pangan                                                                                       | 2                         | Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang di Intervensi                                                          | 1 Kec              | 247.511.115          | 267.378.800          | 4 Kec  | 467.436.305          | 5 Kec  | 480.991.958          | 5 Kec                               |
|      | 2                                                            | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>                                                                      |                           |                                                                                                               |                    | <b>3.486.064.293</b> | <b>4.080.281.289</b> | -      | <b>4.507.552.046</b> |        | <b>4.453.181.963</b> |                                     |
|      | 3                                                            | <b>Badan Lingkungan Hidup Daerah</b>                                                                                    |                           |                                                                                                               |                    | <b>3.486.064.293</b> | <b>6.980.400.866</b> | -      | <b>4.341.770.616</b> |        | <b>4.453.181.963</b> |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis          |                    | 2.408.630.693        | 3.809.781.316        |        | 2.609.012.903        |        | 3.076.842.495        |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 4                         | Cakupan penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup                                                          |                    | -                    | 806163200            |        | 50.000.000           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 4                         | 1. Indeks kualitas air                                                                                        |                    | 180.822.000,00       | 511.318.600,00       |        | 220.000.000          |        | 230.986.351,00       |                                     |
|      |                                                              |                                                                                                                         |                           | 2. Indeks kualitas udara                                                                                      |                    |                      |                      |        |                      |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | 4                         | Luas area pengelolaan keragaman hayati kabupaten                                                              |                    | -                    | -                    |        | 25.000.000           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | 4                         | Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan                             |                    | -                    | 32.875.000           |        | 20.000.000           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 4                         | Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan            |                    | -                    | 76.937.700           |        | 70.159.200           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh           | 4                         | Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan            |                    | -                    | 35.500.000           |        | 20.000.000           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | 4                         | Cakupan masyarakat yang telah memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang di adakan |                    | -                    | 122.502.250          |        | 45.000.000           |        |                      |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | 4                         | Cakupan masyarakat yang diberikan penghargaan dalam 1 (satu) tahun                                            |                    | -                    | 11.625.000           |        | 11.625.000           |        |                      |                                     |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                                                | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 (Tahun Dasar) | 2022          |                | 2023          |                | 2024          |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH (Rp)        | Target        | JUMLAH (Rp)    | Target        | JUMLAH (Rp)    | Target        | JUMLAH (Rp)    |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                       | 4                         | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani                                                                                                                                                                                                                    | -                  |               | 61.225.000     |               | 20.000.000     |               |                |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Persampahan                                                     | 4                         | Persentase sampah perkotaan yang telah dilakukan pengelolaan                                                                                                                                                                                                                  | 896.611.600        |               | 1.512.472.800  |               | 1.250.973.513  |               | 1.145.353.117  |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.794.248.036      | -             | 7.952.361.403  | -             | 6.823.682.222  | -             | 7.021.569.006  |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                             |                           | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.794.248.036      | 99%           | 9.211.236.597  | 98%           | 6.823.682.222  | 95%           | 7.021.569.006  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                                                                           | 99%                | 5.945.494.936 | 99%            | 7.853.977.597 | 97%            | 5.971.288.905 | 96%            | 6.144.373.206                       |
| 1    | 4                                                            | Program Pendaftaran Penduduk                                                        | 1                         | Persentase Meningkatnya Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                | 90%                | 371.596.100   | 98%            | 496.599.000   | 97%            | 373.189.838   | 95%            | 384.048.716                         |
| 1    | 4                                                            | Program Pencatatan Sipil                                                            | 1                         | Persentase Meningkatnya Program Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                    | 90%                | 244.573.000   | 98%            | 392.350.000   | 97%            | 245.621.949   | 95%            | 252.768.925                         |
| 1    | 4                                                            | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | 1                         | Persentase meningkatnya Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                               | 90%                | 188.234.000   | 98%            | 367.060.000   | 96%            | 189.041.317   | 95%            | 194.541.940                         |
| 1    | 4                                                            | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                             | 1                         | Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                                                                                                                                                | 90%                | 44.350.000    | 98%            | 101.250.000   | 96%            | 44.540.213    | 94%            | 45.836.220                          |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.370.353.950      | -             | 3.944.847.542  | -             | 6.461.045.316  | -             | 6.648.415.630  |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.370.353.950      | -             | 6.697.466.811  | -             | 6.461.045.316  | -             | 6.648.415.630  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                                                                           | 100%               | 2.416.185.100 | 100%           | 2.928.425.311 | 100%           | 2.973.971.431 | 100%           | 4.766.191.780                       |
| 5    | 4                                                            | Program Penataan Desa                                                               | 2                         | Persentase fasilitasi (pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, tata wilayah desa, penataan kewenangan desa, penamaan dan kode desa, penetapan kesatuan masyarakat humum adat dan desa adat kewenangan kabupaten) yang dapat diselesaikan/ditetapkan |                    | -             | 111.661.000    |               | 204.000.000    |               |                |                                     |
| 5    | 4                                                            | Program Peningkatan Kerjasama Desa                                                  | 2                         | Persentase terjalin kerjasama (antar desa, antar desa dengan pihak ketiga, dan pembangunan kawasan perdesaan) yang ditetapkan                                                                                                                                                 | 80                 | 35.982.200    | 85             | 93.710.000    | 90             | 196.238.986   | 95             | 70.979.634                          |
| 5    | 4                                                            | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | 2                         | Persentase meningkatnya status desa                                                                                                                                                                                                                                           | 60                 | 619.271.500   | 65             | 2.652.270.000 | 70             | 2.016.279.291 | 75             | 1.221.594.675                       |
| 5    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 2                         | Persentase desa yang melakukan pembangunan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masvarakat hukum adat                                                                                                                                                  | 80                 | 298.915.150   | 85             | 911.400.500   | 90             | 1.070.555.608 | 95             | 589.649.541                         |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.492.369.244      | -             | 16.279.241.736 | -             | 10.876.385.553 | -             | 11.133.800.734 |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.492.369.244      | -             | 16.279.241.736 | -             | 10.876.385.553 | -             | 11.133.800.734 |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                                                                           | 100%               | 3.323.871.164 | 100%           | 6.988.753.556 | 100%           | 4.958.319.831 | 100%           | 4.357.934.250                       |
| 3    | 4                                                            | Program Pengendalian Penduduk                                                       | 3                         | Persentase Penurunan Kuantitas Perkembangan Penduduk                                                                                                                                                                                                                          | 1,36               | 1.210.393.300 | 1,35           | 2.267.655.300 | 1,34           | 1.900.000.000 | 1,33           | 1.586.817.537                       |
| 3    | 4                                                            | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)                                           | 3                         | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Menuju Keluarga Sehat Sejahtera                                                                                                                                                                                                          | 11.963 (PPM)       | 3.958.104.780 | 9000 (PPM)     | 5.451.476.280 | 9000 (PPM)     | 1.851.015.000 | 9000 (PPM)     | 5.189.048.947                       |
| 3    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                        | 3                         | Persentase Peningkatan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I                                                                                                                                                                                                         | 7%                 | -             | 8%             | 1571356600    | 9%             | 2.167.050.722 | 10%            | -                                   |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.762.555.122      | -             | 13.581.018.868 | -             | 11.330.162.024 | -             |                |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Perhubungan                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.762.555.122      | -             | 13.581.018.868 | -             | 5.966.905.594  | -             | 6.110.945.856  |                                     |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                           | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                                                                           | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                |                           |                                                                                                                                                                | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)   |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                          | 4.911.174.986      |        | 8.274.428.768 |        | 5.249.809.394 |        | 3.425.019.758 |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (L.Laj) | 4                         | Persentase layanan angkutan darat                                                                                                                              | 3.851.380.136      |        | 5.306.590.100 |        | 717.069.200   |        | 2.685.926.098 |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Pelayaran                                  | 4                         | Cakupan pengelolaan pelayaran                                                                                                                                  | -                  |        | -             |        |               |        |               |                                     |
| 4    | 4                                                            | Program Pengelolaan Penerbangan                                | 4                         | Cakupan penyelenggaraan pengelolaan penerbangan                                                                                                                | -                  |        | -             |        |               |        |               |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika          |                           |                                                                                                                                                                | 2.536.379.937      | -      | 5.874.104.295 | -      | 3.511.514.173 |        | 3.363.848.084 |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Komunikasi Dan Informatika                               |                           |                                                                                                                                                                | 2.536.379.937      | -      | 5.874.104.295 | -      | 3.511.514.173 |        | 3.363.848.084 |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                          | 2.189.290.287      |        | 2.737.353.375 |        | 2.174.514.173 |        | 2.261.848.084 |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik            | 1                         | 1. Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa<br>2. Hasil layanan komunikasi dan informatika                                                      | 306.784.650        |        | 1.056.477.920 |        | 692.000.000   |        | 692.000.000   |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                       | 1                         | Cakupan aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Donggala                                                                              | 40.305.000         |        | 2.080.273.000 |        | 410.000.000   |        | 410.000.000   |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik                           |                           |                                                                                                                                                                | 50.044.050         | -      | 651.276.800   | -      | 80.000.000    |        | 155.000.000   |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Komunikasi Dan Informatika                               |                           |                                                                                                                                                                | 50.044.050         | -      | 651.276.800   | -      | 80.000.000    |        | 155.000.000   |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                     | 1                         | Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi                                                                                                                    | 50.044.050         |        | 651.276.800   |        | 80.000.000    |        | 155.000.000   |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian                          |                           |                                                                                                                                                                | 3.220.000          | -      | 87.593.900    | -      | 155.000.000   |        | 80.000.000    |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Komunikasi Dan Informatika                               |                           |                                                                                                                                                                | 3.220.000          | -      | 87.593.900    | -      | 155.000.000   |        | 80.000.000    |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  | 1                         | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)                                                                                                                    | 3.220.000          |        | 87.593.900    |        | 155.000.000   |        | 80.000.000    |                                     |
|      | 2                                                            | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |                           |                                                                                                                                                                | 2.579.398.211      |        | 3.787.511.511 |        | 3.930.794.959 |        | 4.015.788.012 |                                     |
|      | 3                                                            | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah                |                           |                                                                                                                                                                | 2.579.398.211      |        | 3.787.511.511 |        | 3.930.794.959 |        | 4.015.788.012 |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 1                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                              | 1.838.094.211      | 100%   | 2.303.927.511 | 100%   | 2.801.110.685 | 100%   | 2.861.677.365 | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                     | 5                         | Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang & Kantor Kas KSP untuk Koperasi                                                                             | 6.975.000          | 100%   | 116.100.000   | 100%   | 10.629.307    | 100%   | 10.859.137    | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                    | 5                         | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota                                   | 143.100.000        | 100%   | 248.875.000   | 100%   | 218.072.234   | 100%   | 222.787.458   | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                   | 5                         | Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota                   | 32.175.000         | 100%   | 92.225.000    | 100%   | 49.031.965    | 100%   | 50.092.148    | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                   | 5                         | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota | 390.304.000        | 100%   | 390.304.000   | 100%   | 594.790.114   | 100%   | 607.650.845   | 100%                                |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN             | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   | 2023          |        | 2024          |        | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------|------|
|      |    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                       |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)   | Target |                                     |      |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | 5    | Presentase Koperasi yang telah diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100%                                 | 16.375.000         | 100%   | 86.375.000    | 100%   | 24.954.108    | 100%   | 25.493.673                          | 100% |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 5    | Presentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data (ODS)                                                                                           | 100%                                 | 110.075.000        | 100%   | 455.705.000   | 100%   | 167.744.942   | 100%   | 171.371.973                         | 100% |
| 5    | 4  | Program Pengembangan Umkm                                                | 5    | Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha                                                            | 100%                                 | 42.300.000         | 100%   | 94.000.000    | 100%   | 64.461.604    | 100%   | 65.855.412                          | 100% |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal                               |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 2.433.823.798      |        | 3.600.596.353 |        | 3.292.733.563 |        | 3.355.426.836                       |      |
|      | 3  | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 2.433.823.798      |        | 3.600.596.353 |        | 3.292.733.563 |        | 3.355.426.836                       |      |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 1    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                     |                                      | 1.964.250.698      | 100%   | 2.620.776.453 | 100%   | 2.642.733.563 | 100%   | 2.654.426.836                       | 100% |
| 5    | 4  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | 5    | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Donggala                                                                                                                |                                      | 100.000.000        | 100%   | 108.194.000   | 100%   | 215.000.000   | 100%   | 223.000.000                         | 100% |
| 5    | 4  | Program Promosi Penanaman Modal                                          | 5    | Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal                                                                                                                       |                                      | 40.000.000         | 100%   | 300.000.000   | 100%   | 120.000.000   | 100%   | 143.000.000                         | 100% |
| 5    | 4  | Program Pelayanan Penanaman Modal                                        | 5    | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal                                                                                                   |                                      | 7.000.000          | 7      | 117.324.800   | 7      | 115.000.000   | 7      | 135.000.000                         | 7    |
| 5    | 4  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | 5    | Persentase Pemanfaatan Dokumen Data Hasil Pengendalian                                                                                                                |                                      | 322.573.100        | 100%   | 322.573.100   | 100%   | 200.000.000   | 100%   | 200.000.000                         | 100% |
|      |    | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal            |      | Tersedianya informasi penanaman modal secara lengkap dan terkini                                                                                                      |                                      | 10.000.000         | 100%   | 131.728.000   | 100%   | 76.000.000    | 100%   | 82.000.000                          | 100% |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga                       |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 6.033.566.698      | -      | 7.062.018.148 | -      | 5.410.231.660 | -      | 5.596.128.378                       | -    |
|      | 3  | Dinas Pemuda Dan Olah Raga                                               |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 6.033.566.698      | -      | 6.352.719.692 | -      | 5.410.231.660 | -      | 5.596.128.378                       | -    |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                  | 100%                                 | 2.711.305.016      | 100%   | 2.974.577.992 | 100%   | 2.431.127.691 | 100%   | 2.514.785.513                       | 100% |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | 3    | Persentase pemuda yang menjadi wirusahaawan mandiri dan berkembang                                                                                                    | 75%                                  | 1.078.698.892      | 80%    | 1.613.779.700 | 85%    | 963.279.660   | 90%    | 1.000.475.415                       | 90%  |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                   | 3    | Persentase cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi                                                                                                         | 75%                                  | 2.243.562.790      | 80%    | 1.541.562.000 | 85%    | 2.011.824.309 | 90%    | 2.080.867.450                       | 90%  |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                               | 3    | Persentase masyarakat yang aktif dalam organisasi kepramukaan                                                                                                         | 0%                                   | -                  | 0%     | 222800000     | 0%     | 4000000       | 0%     | -                                   | 0%   |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan                                    |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 444.241.250        | -      | 1.915.247.700 | -      | 673.328.863   | -      | 466.940.306                         | -    |
|      | 3  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                          |      |                                                                                                                                                                       |                                      | 444.241.250        | -      | 1.915.247.700 | -      | 673.328.863   | -      | 466.940.306                         | -    |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kebudayaan                                          | 3    | Persentase penegelolaan dan pembinaan kebudayaan yang dikembangkan                                                                                                    | 0                                    | 444.241.250        | 1      | 307.812.000   | 1      | 475.098.863   | 1      | 466.940.306                         | 4    |



| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                              |      |                                                                                                                                |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    |                                     |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                    | 3    | Persentase meningkatnya kesenian tradisional yang berkembang sesuai kebutuhan dan tututan                                      | 0                                    | -                  | 1      | 95154200       | 2      | 21870000       | 2      | -              | 6                                   |
| 3    | 4  | Program Pembinaan Sejarah                                    | 3    | persentase terpublikasinya informasi sejarah Kab. Donggala                                                                     | 0                                    | -                  | 0      | 872.840.000    | 2      | 135440000      | 2      | -              | 4                                   |
| 3    | 4  | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya             | 3    | persentase meningkatnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan                                            | 0                                    |                    | 0      | 639441500      | 2      | 40920000       | 2      | -              | 4                                   |
| 3    | 4  | Program Pengelolaan Permuseuman                              | 3    | Persentase terkellannya permuseuman                                                                                            | 0                                    | -                  | 0      | -              | 1      | -              | 1      | -              | 2                                   |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                      |      |                                                                                                                                |                                      |                    |        | 2.197.800.621  | -      | 4.210.566.115  | -      | 2.432.526.477  | 2.485.669.744                       |
|      | 3  | Dinas Perpustakaan                                           |      |                                                                                                                                |                                      |                    |        | 2.197.800.621  | -      | 4.210.566.115  | -      | 2.432.526.477  | 2.485.669.744                       |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                            | 83,33                                | 1.831.400.621      | 85,00  | 3.158.818.211  | 90,00  | 1.717.526.477  | 95,00  | 2.071.269.551  | 95,00                               |
| 2    | 4  | Program Pembinaan Perpustakaan                               | 3    | Persentase meningkatnya layanan perpustakaan (koleksi buku, khas daerah, khusus) kepada masyarakat dan prestasi gemar membaca, | 75                                   | 366.400.000        | 80     | 1.051.747.904  | 85     | 615.000.000    | 90     | 414.400.193    | 90                                  |
| 2    | 4  | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno         | 3    | Persentase meningkatnya naskah kuno dan budaya etnis yang dilestarikan dan berkembang                                          |                                      | -                  |        | -              |        | 100.000.000    |        | -              |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                         |      |                                                                                                                                |                                      | 1.772.706.139      | -      | 2.302.330.260  | -      | 2.483.788.939  | -      | 2.544.218.818  |                                     |
|      | 3  | Dinas Kearsipan                                              |      |                                                                                                                                |                                      | 1.772.706.139      | -      | 2.302.330.260  | -      | 2.483.788.939  | -      | 2.544.218.818  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                            | 100,00                               | 1.772.706.139      | 100,00 | 2.049.044.314  | 100,00 | 2.078.788.939  | 100,00 | 2.544.218.818  | 100,00                              |
| 1    | 4  | Program Pengelolaan Arsip                                    | 1    | Persentase meningkatnya arsip statis dan dinamis yang dikelola memenuhi standar                                                |                                      | -                  |        | 235.585.946    |        | 300.000.000    |        | -              |                                     |
| 1    | 4  | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                  | 1    | persentase dokumen di lingkungan pemerintah daerah yang diarsipkan pada sarana dan prasarana yang memenuhi standar             |                                      | -                  |        | 17.700.000     |        | 80.000.000     |        | -              |                                     |
| 1    | 4  | Program Perizinan Penggunaan Arsip                           | 1    | Persentase pelayanan perizinan penggunaan arsip                                                                                |                                      | -                  |        | -              |        | 25.000.000     |        | -              |                                     |
|      | 1  | Urusan Pemerintahan Pilihan                                  |      |                                                                                                                                |                                      | 51.547.182.912     | -      | 86.432.869.551 | -      | 57.807.970.084 | -      | 59.397.401.213 |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan            |      |                                                                                                                                |                                      | 9.519.243.108      |        | 19.748.345.979 |        | 16.760.804.017 |        | 17.246.867.333 |                                     |
|      | 3  | Dinas Perikanan                                              |      |                                                                                                                                |                                      | 9.519.243.108      |        | 19.748.345.979 |        | 16.760.804.017 |        | 17.246.867.333 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 5    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang memenuhi standar teknis                                                   | 85%                                  | 4.946.293.608      | 90%    | 11.877.606.204 | 95%    | 8.280.212.979  | 100%   | 8.938.395.713  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                        | 5    | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                                                        | 21.910                               | 2.027.900.061      | 23.006 | 4.908.802.311  | 24.156 | 2.859.527.460  | 25.364 | 2.836.817.400  | 25.364                              |
| 2    | 4  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | 5    | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                                       | 7.980                                | 1.264.792.761      | 8.139  | 1.208.725.980  | 8.320  | 2.983.665.579  | 8.443  | 3.397.726.270  | 8.443                               |
| 2    | 4  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan        | 5    | Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan (%)                                        | 100%                                 | -                  | 100%   | 317.999.900    | 100%   | 150.000.000    | 100%   | 147.411.500    | 100%                                |
| 2    |    |                                                              |      | 1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan (Ton)                                                                            | 5.172                                | 1.280.256.678      | 5.274  | 1.435.211.584  | 5.380  | 2.487.397.999  | 5.475  | 1.926.516.450  | 5.475                               |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                       | Misi                       | Indikator Kinerja Program                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022              |                | 2023              |                   | 2024       |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                                                                    |                            |                                                                                                                |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target            | JUMLAH (Rp)    | Target            | JUMLAH (Rp)       | Target     | JUMLAH (Rp)    |                                     |
|      | 4  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   | 5                          | 2. Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%) | 100%                                 | 100%               | 100%              |                | 100%              |                   | 100%       |                |                                     |
|      |    |                                                                                                    | Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn) | 44.52 Kg/Kap /Thn                                                                                              |                                      | 46.75 Kg/Kap /Thn  | 48.90 Kg/Kap /Thn |                | 49.73 Kg/Kap /Thn | 49.73 Kg/Kap /Thn |            |                |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata                                                              |                            |                                                                                                                |                                      | 3.837.335.639      |                   | 8.773.587.245  |                   | 3.520.935.858     |            | 3.623.042.997  |                                     |
|      | 3  | Dinas Pariwisata                                                                                   |                            |                                                                                                                |                                      | 3.837.335.639      |                   | 8.773.587.245  |                   | 3.520.935.858     |            | 3.623.042.997  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 1                          | Presentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah                                         | 100%                                 | 2.379.853.089      | 100%              | 3.068.719.503  | 100%              | 2.183.655.924     | 100%       | 2.246.981.946  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | 2                          | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara                                                           | 24.985 org                           | 712.135.100        | 24.985 org        | 4.275.524.542  | 24.985 org        | 653.403.349       | 24.985 org | 672.352.046    | 24.985 org                          |
| 2    | 4  | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | 2                          | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara                                                     | 100%                                 | 298.187.050        | 100%              | 711.062.100    | 100%              | 273.594.739       | 100%       | 281.528.987    | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 2                          | Meningkatnya lokasi wisata kreatif kabupaten                                                                   | 0%                                   | -                  | 0%                | -              | 0%                | -                 | 0%         | -              | 0%                                  |
| 2    | 4  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | 2                          | Persentase sumber daya pariwisata ekonomi kreatif yang terlatih                                                | 100%                                 | 447.160.400        | 100%              | 718.281.100    | 100%              | 410.281.845       | 100%       | 422.180.018    | 100%                                |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian                                                               |                            |                                                                                                                |                                      | 29.280.721.948     |                   | 43.590.134.497 |                   | 30.982.239.599    |            | 31.793.724.546 |                                     |
|      | 3  | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan                                                  |                            |                                                                                                                |                                      | 22.502.320.263     |                   | 34.151.463.664 |                   | 23.261.414.923    |            | 23.848.995.955 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 1                          | Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah Yang Lancar, Efektif dan Efisien                             | 100%                                 | 15.118.568.823     | 100%              | 16.959.668.387 | 100%              | 16.486.444.142    | 100%       | 16.023.435.299 | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | 2                          | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                  | 100%                                 | 1.228.410.340      | 100%              | 4.727.614.500  | 100%              | 564.640.450       | 100%       | 1.301.912.680  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | 2                          | Tersedianya Prasarana Pengolahan Lahan dan Pengolahan Air                                                      | 100%                                 | 5.668.504.460      | 100%              | 11.511.921.277 | 100%              | 5.735.900.000     | 100%       | 6.007.681.304  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Penyuluhan Pertanian                                                                       | 2                          | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani                                                                      | 100%                                 | 481.788.000        | 100%              | 828.759.500    | 100%              | 354.430.331       | 100%       | 510.615.945    | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Pengendalian Dan Penganggulangan Bencana Pertanian                                         | 2                          | Persentase penurunan luas lahan yang terserang OPT dan DPT                                                     | 95%                                  | 5.048.640          | 95%               | 123.500.000    | 95%               | 120.000.000       | 95%        | 5.350.727      | 95%                                 |
|      |    | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                  |                            | Persentase izin usaha pertanian yang dilakukan pengawasan                                                      | 0%                                   | -                  | 0%                | -              | 0%                | -                 | 0%         | -              | 0%                                  |
|      | 3  | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan                                                               |                            |                                                                                                                |                                      | 6.778.401.685      | -                 | 9.438.670.833  | -                 | 7.720.824.676     | -          | 7.944.728.591  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 1                          | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala                                | 100%                                 | 4.815.479.439      | 100%              | 5.273.106.729  | 100%              | 5.471.685.922     | 100%       | 5.606.048.431  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | 2                          | Persentase peningkatan ketersediaan Sarana yang mendukung pengembangan ternak                                  | 100%                                 | 786.005.590        | 100%              | 2.339.410.816  | 100%              | 903.606.354       | 100%       | 952.333.289    | 100%                                |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022           |                | 2023           |               | 2024           |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                                         |      |                                                                                                                                            |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target         | JUMLAH (Rp)    | Target         | JUMLAH (Rp)   | Target         | JUMLAH (Rp)   |                                     |
| 2    | 4  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | 2    | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana yang mendukung pengembangan ternak                                                           | 100%                                 | 602.200.756        | 100%           | 861.071.108    | 100%           | 691.000.000   | 100%           | 708.614.870   | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2    | Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan/ternak dan kesehatan masyarakat veteriner                                              | 100%                                 | 356.333.200        | 100%           | 544.280.980    | 100%           | 404.532.400   | 100%           | 422.124.884   | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Penyuluhan Pertanian                                            | 2    | Persentase penyuluhan kelompok tani yang mengikuti sosialisasi/pelatihan dan bimtek                                                        | 100%                                 | 218.382.700        | 100%           | 420.801.200    | 100%           | 250.000.000   | 100%           | 255.607.117   | 100%                                |
|      |    | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       |      | Persentase izin usaha pertanian yang dilakukan pengawasan                                                                                  | 100%                                 | -                  | 100%           | -              | 100%           | -             | 100%           | -             | 100%                                |
|      |    | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                     |      |                                                                                                                                            |                                      | 8.705.209.788      |                | 14.258.935.826 |                | 6.260.200.532 |                | 6.441.746.347 |                                     |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan                                  |      |                                                                                                                                            |                                      | 4.847.232.958      |                | 8.985.957.762  |                | 4.910.200.532 |                | 3.586.917.361 |                                     |
|      | 3  | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                     |      |                                                                                                                                            |                                      | 4.847.232.958      |                | 8.985.957.762  |                | 4.910.200.532 |                | 3.586.917.361 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | 1    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                          | 100%                                 | 3.240.672.258      | 100%           | 5.386.998.462  | 100%           | 2.610.200.532 | 100%           | 2.398.093.203 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                            | 2    | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) | 0%                                   | -                  | 0%             | -              | 0%             | -             | 0%             | -             | 0%                                  |
| 5    | 4  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 2    | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kab.Donggala                                                                                   | 9,03                                 | 1.485.703.675      | 9,03           | 3.091.797.300  | 9,04           | 1.200.000.000 | 9,04           | 1.099.392.273 | 9,04                                |
| 5    | 4  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting     | 2    | Jumlah Kecamatan yang Dimonitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                         | 4 Kecamatan                          | 29.138.275         | 6 Kecamatan    | 71.175.000     | 8 Kecamatan    | 450.000.000   | 8 Kecamatan    | 21.561.766    | 8 Kecamatan                         |
| 5    | 4  | Program Pengembangan Ekspor                                             | 2    | Perdagangan Antar Pulau Kab.Donggala                                                                                                       | 36.188,22 Ton                        | -                  | 39.807,04 Ton  | -              | 43.787,75 Ton  | 350.000.000   | 43.787,75 Ton  | -             | 43.787,75 Ton                       |
| 5    | 4  | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                         | 2    | Peningkatan Jumlah Alat UTTP                                                                                                               | 919 Alat UTTP                        | 91.718.750         | 1100 Alat UTTP | 435.987.000    | 1200 Alat UTTP | 300.000.000   | 1200 Alat UTTP | 67.870.119    | 1200 Alat UTTP                      |
| 5    | 4  | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                    | 2    | Jumlah Promosi yang di ikuti                                                                                                               | -                                    | -                  | -              | -              | -              | -             | -              | -             | -                                   |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian                                |      |                                                                                                                                            |                                      | 3.857.976.830      |                | 5.272.978.064  |                | 1.350.000.000 |                | 2.854.828.986 |                                     |
|      | 3  | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                     |      |                                                                                                                                            |                                      | 3.857.976.830      |                | 5.272.978.064  |                | 1.350.000.000 |                | 2.854.828.986 |                                     |
| 5    | 4  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                            | 2    | Pertumbuhan industri                                                                                                                       | 8%                                   | 3.857.976.830      | 3%             | 5.272.978.064  | 3%             | 1.250.000.000 | 3%             | 2.854.828.986 | 6%                                  |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN      | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022     |                 | 2023           |                 | 2024     |                 | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target   | JUMLAH (Rp)     | Target         | JUMLAH (Rp)     | Target   | JUMLAH (Rp)     |                                     |
| 5    | 4  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                          | 2    | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait , serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten | 0%                                   | -                  | 0%       | -               | 0%             | -               | 0%       | -               | 0%                                  |
| 5    | 4  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional            | 2    | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                                   | -                  | 0%       | -               | 0%             | 100.000.000     | 0%       | -               | 0%                                  |
|      | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 204.672.429        |          | 61.866.004      |                | 283.790.078     |          | 292.019.990     |                                     |
|      | 3  | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 204.672.429        |          | 61.866.004      |                | 283.790.078     |          | 292.019.990     |                                     |
| 5    | 4  | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                          | 5    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                    | -                  | 1 Dok    | 20.668.004      | 1 Dok          | 120.000.000     | 1 Dok    | 130.000.000     | 1 Dok                               |
| 5    | 4  | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                          | 5    | Jumlah Pembangunan Kawasan dan Permukiman Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | -                  | 1 keg    | 0               | 4 keg          | 73.790.078      | 4 keg    | 70.019.990      | 4 keg                               |
| 5    | 4  | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                         | 5    | Terwujudnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | 516 Org                              | 204.672.429        | 100%     | 41.198.000      | 100%           | 90.000.000      | 100%     | 92.000.000      | 100%                                |
|      | 1  | Unsur Pendukung Pemerintahan                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 55.337.616.450     | -        | 64.770.188.379  | 80.801.475.702 | 60.814.830.686  |          | 63.216.460.775  |                                     |
|      | 2  | Sekretariat Daerah                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 27.238.597.091     | -        | 47.912.838.751  | -              | 30.472.889.911  | -        | 31.356.603.718  |                                     |
|      | 3  | Sekretariat Daerah                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 27.238.597.091     | -        | 47.912.838.751  | -              | 30.472.889.911  | -        | 31.356.603.718  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                                                                                                                                                                                              | 98%                                  | 22.899.780.391     | 98%      | 41.884.823.319  | 98%            | 25.618.963.684  | 98%      | 26.361.862.018  | 98%                                 |
| 5    | 4  | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                     | 5    | Persentase meningkatnya tata pemerintaan dan kesejahteraan rakvat                                                                                                                                                                                                                                                  | 90%                                  | 2.492.809.850      | 100%     | 3.644.162.092   | 100%           | 2.788.759.228   | 100%     | 2.869.662.899   | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Perekonomian Dan Pembangunan                              | 5    | Persentase meningkatnya perekonomian dan pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                               | 90%                                  | 1.846.006.850      | 92%      | 2.383.853.340   | 92%            | 2.065.166.999   | 92%      | 2.125.078.801   | 92%                                 |
|      | 2  | Sekretariat Dprd                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 28.099.019.359     | -        | 32.888.636.951  | -              | 30.341.940.775  | -        | 31.859.857.057  |                                     |
|      | 3  | Sekretariat Dprd                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 28.099.019.359     | -        | 34.397.733.635  | -              | 30.341.940.775  | -        | 31.859.857.057  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                                                                                                                                                                                               | 100%                                 | 24.485.054.759     | 100%     | 27.028.332.885  | 100%           | 26.439.577.146  | 100%     | 27.762.164.964  | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd                | 1    | Jumlah Perda yang diundangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 perda                             | 3.613.964.600      | 12 perda | 7.369.400.750   | 12 perda       | 3.902.363.629   | 14 perda | 4.097.692.093   | 14 perda                            |
|      | 1  | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 366.069.452.649    |          | 399.894.066.083 |                | 349.781.150.811 |          | 371.538.971.876 |                                     |
|      | 2  | Perencanaan                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 4.958.021.852      |          | 8.352.597.645   |                | 7.650.156.700   |          | 9.901.011.271   |                                     |
|      | 3  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 4.958.021.852      |          | 8.352.597.645   |                | 7.650.156.700   |          | 9.901.011.271   |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 1    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang memenuhi standar teknis                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                 | 3.108.119.550      | 100%     | 5.002.332.065   | 100%           | 4.397.500.354   | 100%     | 5.395.064.097   | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 2    | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan, dokumen hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                             | 100%                                 | 687.426.485        | 100%     | 1.155.638.400   | 100%           | 1.126.410.276   | 100%     | 1.476.264.982   | 100%                                |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022                             |                 | 2023                             |                 | 2024                             |                 | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                                    |      |                                                                                                                                         |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target                           | JUMLAH (Rp)     | Target                           | JUMLAH (Rp)     | Target                           | JUMLAH (Rp)     |                                     |
| 2    | 4  | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 2    | Presentase Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                  | 100%                                 | 1.162.475.817      | 100%                             | 2.194.627.180   | 100%                             | 2.126.246.070   | 100%                             | 3.029.682.192   | 100%                                |
|      | 2  | Keuangan                                                           |      |                                                                                                                                         |                                      | 350.979.043.711    |                                  | 377.892.972.234 |                                  | 332.055.931.369 |                                  | 351.293.921.045 |                                     |
|      | 3  | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                         |      |                                                                                                                                         |                                      | 338.786.258.827    |                                  | 364.563.697.882 |                                  | 317.527.859.380 |                                  | 336.344.534.969 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, pengaangran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                    | -                                    | 86.758.041.466     | 100%                             | 85.669.323.731  | 100%                             | 81.314.168.880  | 100%                             | 86.123.372.623  | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | 1    | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku                                                         | -                                    | 249.074.402.591    | 100%                             | 276.804.029.291 | 100%                             | 233.445.224.749 | 100%                             | 247.288.526.577 | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | 1    | Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik                                                                                         | -                                    | 2.953.814.770      | 100%                             | 2.090.344.860   | 100%                             | 2.768.465.750   | 100%                             | 2.932.635.769   | 100%                                |
|      | 3  | Badan Pendapatan Daerah                                            |      |                                                                                                                                         |                                      | 12.192.784.884     | -                                | 13.329.274.352  | -                                | 14.528.071.989  |                                  | 14.949.386.076  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1    | Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien                                                  | 95.46%                               | 10.084.681.884     | 100%                             | 10.919.995.252  | 100%                             | 11.128.613.283  | 100%                             | 11.143.913.284  | 100%                                |
| 2    | 4  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | 2    | Persentase penerimaan dari Jumlah Jenis Pajak Daerah dan Jumlah Golongan Retribusi Daerah yang dikelola terhadap Pendapatan Asli Daerah | 46.30%<br>7 Jenis PD<br>3 Gol.RD     | 2.108.103.000      | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 2.409.279.100   | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 3.399.458.706   | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD | 3.805.472.792   | 42.96%<br>9 Jenis PD<br>3 Gol.RD    |
|      | 2  | Kepegawaian                                                        |      |                                                                                                                                         |                                      | 7.367.803.399      | -                                | 9.495.971.784   | -                                | 7.890.699.372   | -                                | 8.096.329.653   |                                     |
|      | 3  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia             |      |                                                                                                                                         |                                      | 7.367.803.399      | -                                | 9.495.971.784   | -                                | 7.890.699.372   | -                                | 8.096.329.653   |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                     | 100%                                 | 4.876.317.995      | 100%                             | 5.263.907.892   | 100%                             | 5.222.296.705   | 100%                             | 5.358.341.694   | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Kepegawaian Daerah                                         | 1    | Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai daerah                                                                           | 100%                                 | 559.829.904        | 100%                             | 2.029.525.299   | 100%                             | 599.582.725     | 100%                             | 615.218.349     | 100%                                |
| 3    | 4  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | 3    | Persentase meningkatnya kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan                                                                  | 100%                                 | 1.931.655.500      | 100%                             | 2.202.538.593   | 100%                             | 2.068.819.942   | 100%                             | 2.122.769.611   | 100%                                |
|      | 2  | Penelitian Dan Pengembangan                                        |      |                                                                                                                                         |                                      | 2.764.583.687      | -                                | 4.152.524.420   | -                                | 2.184.363.370   | -                                | 2.247.709.907   |                                     |
|      | 3  | Badan Penelitian Dan Pengembangan                                  |      |                                                                                                                                         |                                      | 2.764.583.687      | -                                | 4.152.524.420   | -                                | 2.184.363.370   | -                                | 2.247.709.907   |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                     |                                      | 1.855.833.687      |                                  | 2.021.992.970   |                                  | 1.739.363.370   |                                  | 1.508.862.178   |                                     |
| 2    | 4  | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | 2    | Persentase Hasil Kelitbangan                                                                                                            |                                      | 908.750.000        |                                  | 2.130.531.450   |                                  | 445.000.000     |                                  | 738.847.729     |                                     |
| 2    | 2  | Pengelolaan Perbatasan                                             |      |                                                                                                                                         |                                      | -                  | -                                | -               | -                                | -               | -                                | -               |                                     |
| 2    | 4  | Program Pengelolaan Perbatasan                                     | 2    |                                                                                                                                         |                                      | -                  |                                  | -               |                                  | -               |                                  | -               |                                     |
| 1    |    | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan                               |      |                                                                                                                                         |                                      | 6.778.137.535      | -                                | 7.933.504.787   | -                                | 8.841.677.451   | -                                | 9.069.086.097   |                                     |
|      | 2  | Inspektorat Daerah                                                 |      |                                                                                                                                         |                                      | 6.778.137.535      | -                                | 7.933.504.787   | -                                | 8.841.677.451   | -                                | 9.069.086.097   |                                     |
|      | 3  | Inspektorat Daerah                                                 |      |                                                                                                                                         |                                      | 6.778.137.535      | -                                | 8.053.074.862   | -                                | 8.841.677.451   | -                                | 9.069.086.097   |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                     | 100%                                 | 5.401.087.535      | 100%                             | 5.554.894.862   | 100%                             | 5.241.677.451   | 100%                             | 7.226.569.167   | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | 1    | Persentase meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah                                                                 | 80%                                  | 773.650.000        | 85%                              | 1.922.900.000   | 90%                              | 2.500.000.000   | 95%                              | 1.035.157.201   | 95%                                 |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                                                           | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                              |      |                                                                                                                                     |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)    |                                     |
| 1    | 4  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi      | 1    | Persentase hasil pendampingan dan asistensi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai standar dan dalam waktu yang telah ditentukan | 75%                                  | 603.400.000        | 80%    | 575.280.000    | 85%    | 1.100.000.000  | 90%    | 807.359.730    | 90%                                 |
|      | 1  | Unsur Kewilayahan                                            |      |                                                                                                                                     |                                      | 32.292.299.900     | -      | 37.796.683.014 | -      | 40.529.458.711 | -      | 41.525.013.006 |                                     |
|      | 2  | Kecamatan                                                    |      |                                                                                                                                     |                                      | 32.292.299.900     | -      | 37.796.683.014 | -      | 40.529.458.711 | -      | 41.525.013.006 |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Banawa                                             |      |                                                                                                                                     |                                      | 12.052.900.913     | -      | 14.776.384.687 | -      | 12.528.642.273 | -      | 12.891.972.898 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                 | 100%                                 | 5.599.752.875      | 100%   | 4.475.827.173  | 100%   | 7.000.827.021  | 100%   | 5.989.773.343  | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                             |                                      | -                  |        | 470.813.990    | 100%   | 45.000.000,00  |        |                |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                                                     | 100%                                 | 6.453.148.038      | 100%   | 9.775.743.524  | 100%   | 5.407.815.252  | 100%   | 6.902.199.555  | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                  |                                      | -                  |        | 45.000.000     | 100%   | 50.000.000,00  |        | -              |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                                                     |                                      | -                  |        | -              |        | -              |        | -              |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                    |                                      | -                  |        | 9.000.000      | 100%   | 25.000.000,00  |        | -              |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Banawa Tengah                                      |      |                                                                                                                                     |                                      | 1.334.626.324      | -      | 1.512.737.852  | -      | 1.761.145.463  | -      | 1.806.418.681  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                 | 100%                                 | 1.177.186.424      | 100%   | 1.454.289.102  | 100%   | 1.656.145.463  | 100%   | 1.593.318.472  | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                             | 100%                                 | 151.639.900        | 100%   | 51.898.750     | 100%   | 90.000.000     | 100%   | 205.249.714    | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                                                     | 100%                                 | 5.800.000          | 100%   | 6.550.000      | 100%   | 15.000.000     | 100%   | 7.850.495      | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                  |                                      | -                  |        | -              |        | -              |        | -              |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                                                     |                                      | -                  |        | -              |        | -              |        | -              |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                    |                                      | -                  |        | -              |        | -              |        | -              |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Banawa Selatan                                     |      |                                                                                                                                     |                                      | 1.354.098.004      | -      | 1.504.170.754  | -      | 1.660.803.072  | -      | 1.700.266.361  |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis                                 | 100%                                 | 1.274.773.604      | 100%   | 1.337.473.154  | 100%   | 1.456.015.863  | 100%   | 1.600.662.516  | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                             | 100%                                 | 70.019.000         | 100%   | 127.388.600    | 100%   | 82.787.209     | 100%   | 87.919.501     | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                                                     |                                      | -                  |        | 9.521.000      |        | 30.000.000,00  |        |                |                                     |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                        | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)                                                                    | 2021 (Tahun Dasar)   | 2022   |                      | 2023   |                      | 2024   |                      | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                             |                           |                                                                                                         | JUMLAH (Rp)          | Target | JUMLAH (Rp)          | Target | JUMLAH (Rp)          | Target | JUMLAH (Rp)          |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 1                         | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -                                   |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 1                         | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -                                   |
| 5    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 5                         | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        | 9.305.400            | 100%   | 29.788.000           | 100%   | 92.000.000,00        | 100%   | 11.684.344           | 100%                                |
| 3    | <b>Kecamatan Rio Pakaya</b>                                  |                                                             |                           |                                                                                                         | <b>1.320.237.203</b> | -      | <b>1.537.859.761</b> | -      | <b>1.847.135.104</b> | -      | <b>1.883.302.022</b> | -                                   |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 1.060.538.498        | 100%   | 1.093.051.471        | 100%   | 1.682.635.104,00     | 100%   | 1.512.852.197        | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 5                         | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 259.698.705          | 100%   | 435.392.990          | 100%   | 140.000.000,00       | 100%   | 370.449.825          | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 5                         | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -                                   |
| 1    | 4                                                            | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 1                         | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -                                   |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 1                         | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         | -                    | -      | -                    | -      | 15.000.000,00        | -      | -                    | -                                   |
| 5    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 5                         | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        | -                    | -      | 9.415.300            | -      | 9.500.000,00         | -      | -                    | -                                   |
| 3    | <b>Kecamatan Pinembani</b>                                   |                                                             |                           |                                                                                                         | <b>810.486.003</b>   | -      | <b>1.232.784.189</b> | -      | <b>1.292.233.283</b> | -      | <b>1.329.128.048</b> | -                                   |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 803.721.003          | 100%   | 1.173.977.189        | 100%   | 1.139.383.896,00     | 100%   | 1.318.033.869        | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 5                         | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | -                    | -      | -                    | -      | 36.376.808,00        | -      | -                    | -                                   |
| 5    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 5                         | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | 6.765.000            | 100%   | 6.000.000            | 100%   | 19.688.080,00        | 100%   | 11.094.179           | 100%                                |
| 1    | 4                                                            | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 1                         | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      | -                    | -      | 4.500.000            | -      | 19.324.722,00        | -      | -                    | -                                   |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 1                         | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         | -                    | -      | 30.012.000           | -      | 35.000.000,00        | -      | -                    | -                                   |
| 5    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 5                         | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        | -                    | -      | 18.295.000           | -      | 42.459.777,00        | -      | -                    | -                                   |
| 3    | <b>Kecamatan Tanantovea</b>                                  |                                                             |                           |                                                                                                         | <b>2.177.974.246</b> | -      | <b>2.396.274.530</b> | -      | <b>2.650.233.800</b> | -      | <b>2.715.490.580</b> | -                                   |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1                         | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 2.162.782.446        | 100%   | 2.322.772.230        | 100%   | 2.490.233.800,00     | 100%   | 2.696.548.539        | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 5                         | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | -                    | -      | 16.125.000           | -      | 50.000.000,00        | -      | -                    | -                                   |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |               | 2023   |                  | 2024   |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                              |      |                                                                                                         |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)      | Target | JUMLAH (Rp)   |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | 100%                                 | 8.563.800          | 100%   | 14.591.200    | 100%   | 40.000.000,00    | 100%   | 10.677.856    | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | 8.751.100     |        |                  |        |               |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        |                  |        |               |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        | 100%                                 | 6.628.000          | 100%   | 34.035.000    | 100%   | 70.000.000,00    | 100%   | 8.264.185     | 100%                                |
| 3    |    | Kecamatan Labuan                                             |      |                                                                                                         |                                      | 1.928.839.902      | -      | 2.049.498.668 | -      | 2.275.874.995    | -      | 2.330.275.369 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis     | 100%                                 | 1.924.639.902      | 100%   | 2.037.598.668 | 100%   | 2.162.874.995,00 | 100%   | 2.325.201.480 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 100%                                 | 4.200.000          | 100%   | -             | 100%   | 55.000.000,00    | 100%   | 5.073.889     | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         |                                      | -                  |        | 11.900.000    |        | 58.000.000,00    |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 3    |    | Kecamatan Sindue                                             |      |                                                                                                         |                                      | 1.872.342.177      | -      | 2.087.966.867 | -      | 2.168.536.703    | -      | 2.225.624.267 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis     | 100%                                 | 1.867.142.177      | 100%   | 2.079.266.867 | 100%   | 2.153.536.703,00 | 100%   | 2.219.443.164 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas |                                      | -                  |        | -             |        |                  |        |               |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | 100%                                 | 5.200.000          | 100%   | 8.700.000     | 100%   | 15.000.000,00    | 100%   | 6.181.103     | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 3    |    | Kecamatan Sindue Tambusabora                                 |      |                                                                                                         |                                      | 808.383.278        | -      | 1.010.561.977 | -      | 1.079.483.127    | -      | 1.102.088.137 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penggaangan dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis     | 100%                                 | 800.483.278        | 100%   | 977.561.977   | 100%   | 1.014.483.127,00 | 100%   | 1.091.317.588 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 100%                                 | 7.900.000          | 100%   | 33.000.000    | 100%   | 15.000.000,00    | 100%   | 10.770.549    | 100%                                |



| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |               | 2023   |                | 2024   |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                              |      |                                                                                                         |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)    | Target | JUMLAH (Rp)   |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         |                                      | -                  |        | -             |        | 50.000.000,00  |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Sindue Tobata                                      |      |                                                                                                         |                                      | 855.769.534        | -      | 1.155.267.823 | -      | 1.492.236.388  | -      | 1.526.811.243 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 100%                                 | 713.273.174        | 100%   | 807.925.917   | 100%   | 855.236.388,00 | 100%   | 1.276.609.069 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 100%                                 | 138.396.360        | 100%   | 334.188.250   | 100%   | 587.000.000,00 | 100%   | 246.914.257   | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | 100%                                 | 4.100.000          | 100%   | 13.153.656    | 100%   | 50.000.000,00  | 100%   | 3.287.918     | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Sirenja                                            |      |                                                                                                         |                                      | 1.616.421.132      | -      | 1.899.219.626 | -      | 2.413.620.886  | -      | 2.463.315.891 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 100%                                 | 1.616.421.132      | 100%   | 1.899.219.626 | 100%   | 2.413.620.886  | 100%   | 2.463.315.891 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Balaesang                                          |      |                                                                                                         |                                      | 1.374.102.690      | -      | 1.590.314.193 | -      | 1.956.359.033  | -      | 1.995.693.444 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daera sesuai standar teknis    | 100%                                 | 1.374.102.690      | 100%   | 1.590.314.193 | 100%   | 1.956.359.033  | 100%   | 1.995.693.444 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas |                                      | -                  |        | -             |        | -              |        | -             |                                     |

| KODE |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |               | 2023   |                  | 2024   |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|----|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------------------------|
|      |    |                                                              |      |                                                                                                         |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)      | Target | JUMLAH (Rp)   |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 5    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Dampelas                                           |      |                                                                                                         |                                      | 1.626.596.178      | -      | 1.878.279.597 | -      | 2.373.312.976    | -      | 2.421.839.052 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis   | 100%                                 | 1.547.446.178      | 100%   | 1.763.429.597 | 100%   | 2.203.012.683,00 | 100%   | 2.303.991.594 | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 5    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas | 100%                                 | 79.150.000         | 100%   | 114.850.000   | 100%   | 100.000.000,00   | 100%   | 117.847.458   | 100%                                |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | 70.300.293,00    |        | -             |                                     |
|      | 3  | Kecamatan Sojol Utara                                        |      |                                                                                                         |                                      | 955.420.019        | -      | 1.173.263.045 | -      | 1.496.779.789    | -      | 1.525.686.402 |                                     |
| 1    | 40 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 1    | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis   | 100%                                 | 952.120.019        | 100%   | 1.167.263.045 | 100%   | 1.195.876.492,00 | 100%   | 1.520.416.698 | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | 1    | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas |                                      | -                  |        | -             |        | 221.403.297,00   |        | -             |                                     |
| 5    | 4  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | 5    | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                         | 100%                                 | 3.300.000          | 100%   | 6.000.000     | 100%   | 34.500.000,00    | 100%   | 5.269.704     | 100%                                |
| 1    | 4  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum           | 1    | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                      |                                      | -                  |        | -             |        | 5.000.000,00     |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | 1    | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                         |                                      | -                  |        | -             |        | 20.000.000,00    |        | -             |                                     |
| 1    | 4  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 1    | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan        |                                      | -                  |        | -             |        | 20.000.000,00    |        | -             |                                     |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Misi                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program                                                                                                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |               | 2023   |                  | 2024   |                | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)   | Target | JUMLAH (Rp)      | Target | JUMLAH (Rp)    |                                     |
|      | 3                                                            | Kecamatan Sojol                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                      | 1.112.415.541      | -      | 1.400.260.177 | -      | 1.925.068.502    | -      | 1.966.975.488  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                      | 100%                                 | 992.588.351        | 100%   | 1.234.285.177 | 100%   | 1.564.068.502,00 | 100%   | 1.755.096.414  | 100%                                |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                                    | 100%                                 | 119.827.190        | 100%   | 156.000.000   | 100%   | 290.000.000,00   | 100%   | 211.879.074    | 100%                                |
| 5    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                                                            |                                      | -                  |        | 9975000       |        | 46.000.000,00    |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                     | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                         |                                      | -                  |        | -             |        | 5.000.000,00     |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                       | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                                                            |                                      | -                  |        | -             |        | 15.000.000,00    |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                           |                                      | -                  |        | -             |        | 5.000.000,00     |        | -              |                                     |
|      | 3                                                            | Kecamatan Balaesang Tanjung                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                      | 1.091.686.756      | -      | 1.296.467.270 | -      | 1.607.993.317    | -      | 1.640.125.123  |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                      | 100%                                 | 1.091.686.756      | 100%   | 1.296.467.270 | 100%   | 1.607.993.317    | 100%   | 1.640.125.123  | 100%                                |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas                                    |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -              |                                     |
| 5    | 4                                                            | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan                                                            |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                     | Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                         |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                       | Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat                                                            |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -              |                                     |
| 1    | 4                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                           |                                      | -                  |        | -             |        | -                |        | -              |                                     |
|      | 1                                                            | Unsur Pemerintahan Umum                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                      | 3.584.008.379      | -      | 4.194.920.431 | -      | 15.499.855.337   | -      | 29.355.351.141 |                                     |
|      | 2                                                            | Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                      | 3.584.008.379      | -      | 4.194.920.431 | -      | 15.499.855.337   | -      | 29.355.351.141 |                                     |
|      | 3                                                            | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                      | 3.584.008.379      | -      | 4.798.097.921 | -      | 15.499.855.337   | -      | 29.355.351.141 |                                     |
| 1    | 40                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis                                      | 100%                                 | 2.099.350.415      | 100%   | 2.676.597.857 | 100%   | 6.339.855.337    | 100%   | 17.195.056.156 | 100%                                |
| 1    | 4                                                            | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan                                                               |                                      | -                  |        | 150.648.000   |        | 1.000.000.000    |        |                |                                     |
|      | 4                                                            | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 75%                                  | 1.184.713.564      | 80%    | 1.127.357.764 | 85%    | 2.560.000.000    | 90%    | 9.703.559.176  | 90%                                 |

| KODE |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                              | Misi | Indikator Kinerja Program                                                                             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | 2021 (Tahun Dasar) | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024   |                   | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
|      |   |                                                                                                           |      |                                                                                                       |                                      | JUMLAH (Rp)        | Target | JUMLAH (Rp)       | Target | JUMLAH (Rp)       | Target | JUMLAH (Rp)       |                                     |
| 1    | 4 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                             | 1    | Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                          |                                      | -                  |        | 118.062.000       |        | 1.000.000.000     |        |                   |                                     |
| 1    | 4 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                  | 1    | Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya              | 75%                                  | 111.280.000        | 80%    | 275.191.800       | 85%    | 1.400.000.000     | 90%    | 911.454.127       | 90%                                 |
| 1    | 4 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 1    | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik | 75%                                  | 188.664.400        | 80%    | 450.240.500       | 85%    | 3.200.000.000     | 90%    | 1.545.281.682     | 90%                                 |
|      |   |                                                                                                           |      |                                                                                                       |                                      |                    |        |                   |        |                   |        |                   |                                     |
|      |   |                                                                                                           |      |                                                                                                       |                                      |                    |        |                   |        |                   |        |                   |                                     |
|      |   | GRAND TOTAL                                                                                               |      |                                                                                                       |                                      | 1.349.740.877.835  |        | 1.579.810.923.000 |        | 1.290.541.317.555 |        | 1.355.068.383.432 |                                     |

Berdasarkan keberpihakan anggaran dan program-program yang terkait pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati pada tabel 7.2 diatas maka ditentukan besaran bobot dan pendanaan pada setiap target dan indikator setiap program pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2022-2024 dan untuk mengetahui besaran kerangka pendanaan total pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel 7.2 (terlampir).

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA MENURUT BIDANG URUSAN TAHUN 2021-2024**

Bab VIII menguraikan tentang penjabaran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Daerah. Penetapan capaian indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan Kabupaten Donggala setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah yang diuraikan berdasarkan aspek, urusan dan layanan dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan dibagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. **Indikator Kinerja Daerah** terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. **Aspek**

**kesejahteraan masyarakat** dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (terdapat minimal tujuh indikator), kesejahteraan sosial (fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumberdaya), dan indikator seni budaya dan olahraga. **Aspek pelayanan umum** dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar (terdapat 24 urusan) dan Urusan Pilihan (8 urusan). **Aspek daya saing** merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam hal ini daya saing daerah digambarkan oleh fokus kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumberdaya Manusia. Lebih lanjut capaian dan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Tabel 8.1

Tabel 8.1 menunjukkan indikator kinerja berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Donggala selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 2019-2020, serta data proyeksi atau data target kinerja untuk RPJMD berikutnya (kurun waktu 2021-2024). Secara ilmiah, data indikator kinerja selama kurun waktu 2019-2020 merupakan data realisasi/capaian (sesungguhnya), yang diperoleh dari beberapa sumber data seperti data Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Tengah, data Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, data dari instansi pemerintah dan sumber valid lainnya. Untuk data target kinerja pada periode waktu 2021-2024 merupakan data proyeksi yang didasarkan pada kecenderungan data selama RPJMD 2019-2020.

Secara spesifik, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan besaran nilai target masing-masing indikator pada Tabel

8.1 terkait target indikator RPJMD Donggala Tahun 2021-2024, yakni: pertama, besarnya indikator didasarkan pada besarnya pertumbuhan rata-rata tahunan indikator yang bersangkutan selama kurun waktu 2019-2020. Sebagian indikator memiliki pola pertumbuhan yang relatif teratur, sesuai dengan pola seharusnya, serta menjadi target pemerintah daerah (contoh indikator tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang diharapkan semakin menurun, sementara indikator IPM dan APM yang diharapkan semakin meningkat). Kedua, nilai indikator pada kurun waktu 2021-2024 didasarkan pada nilai-rata-rata tahunan dari indikator yang bersangkutan selama periode 2019-2020. Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan nilai suatu indikator yang tidak menunjukkan kecenderungan perubahan yang teratur (misalnya produksi sektor perikanan dan pertumbuhan tahunan yang cenderung berfluktuasi setiap tahunnya). Ketiga, nilai indikator selama 2021-2024 didasarkan pada nilai tertentu dari indikator yang bersangkutan dalam kurun waktu 2019-2020. Pendekatan ini digunakan mengingat indikator yang bersangkutan datanya tidak tersedia setiap tahun bahkan hanya tersedia pada tahun tertentu saja. Dengan pendekatan ini, maka hanya besarnya nilai indikator setiap tahunnya selama kurun waktu 2021-2024 merupakan nilai target yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan historis dan akademik yang dianggap sudah cukup rasional. Selanjutnya mengingat ada beberapa data berbagai indikator pembangunan Tahun 2020 belum terpublikasi, maka nilai indikator-indikator yang bersangkutan Tahun 2020 merupakan data proyeksi yang didasarkan pada data tahun 2019.

Terkait dengan hasil kinerja pembangunan pada kurun waktu 2019-2020 dan target 2021-2024, terdapat beberapa indikator umum kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan perkapita, dan IPM cenderung membaik. Namun peningkatan IPM belum mampu menyamai atau melampaui IPM provinsi, sementara untuk indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Beberapa indikator pelayanan dasar pendidikan cenderung membaik, namun pelayanan kesehatan masih relatif kurang peningkatan.



**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2021-2024**

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                | Satuan   | Kondisi Awal<br>2020 | Target            |                    |                    |                    | Kondisi<br>Akhir<br>(2024) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|     |                                                                        |          |                      | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               |                            |
| 1   | Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Donggala                               | Kategori | 64,22                | 67,25             | 67,25              | <b>69,25</b>       | <b>71,25</b>       | <b>71,25</b>               |
| 2   | Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)                         | Nilai    | (B)                  | (B)               | (B)                | <b>(B)</b>         | <b>(BB)</b>        | <b>(BB)</b>                |
| 3   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       | Persen   | 66                   | 69                | 70                 | 80                 | 80                 | 80                         |
| 4   | Indeks kepuasan masyarakat                                             | Kategori | 3,2<br>WTP<br>3,0    | 3,6<br>WTP<br>3,1 | 3,7<br>WTP<br>3,25 | 3,9<br>WTP<br>3,35 | 4,1<br>WTP<br>3,45 | 4,1<br>WTP<br>3,45         |
| 5   | Opini hasil pemeriksaan oleh BPK                                       | Opini    | WTP                  | WTP               | WTP                | WTP                | WTP                | WTP                        |
| 6   | Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Donggala                              | Indeks   | 66                   | 69                | 70                 | 75                 | 80                 | 80                         |
| 7   | Persentase Sumber Daya yang dioptimalkan                               | Persen   | 30                   | 35                | 45                 | 55                 | 60                 | 60                         |
| 8   | Persentase pengelolaan SDA untuk penyediaan Energi Baru dan Terbarukan | Persen   | 15                   | 17.50             | 20                 | 22.50              | 25                 | 25                         |
| 9   | Persentase potensi ekonomi yang                                        | Persen   | 45                   | 50                | 55                 | 60                 | 65                 | 65                         |

| No. | Indikator Kinerja Utama                                      | Satuan             | Kondisi Awal<br>2020 | Target       |              |              |              | Kondisi<br>Akhir<br>(2024) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|     |                                                              |                    |                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                            |
|     | dikelola                                                     |                    |                      |              |              |              |              |                            |
| 10  | Pertumbuhan Ekonomi                                          | Persen             | -4,87                | 5,72         | 5,72         | 5,72         | 5,72         | 5,72                       |
| 11  | PDRB Perkapita                                               | Konstan Rp. (juta) | 26,45                | 26,71        | 26,98        | 27,79        | 28,62        | 28,62                      |
| 12  | Gini Rasio                                                   | Indeks             | 0,33                 | 0,33         | 0,32         | 0,31         | 0,29         | 0,29                       |
| 13  | Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)                           | Persen             | 2,58                 | 3,50         | 3,50         | 3,50         | 3,50         | 3,50                       |
| 14  | Nilai Tukar Petani (NTP)                                     | Persen             | na                   | 100          | 100          | 100          | 100          | 100                        |
| 15  | Nilai Tukar Nelayan (NTN)                                    | Persen             | na                   | 104          | 105          | 106          | 107          | 107                        |
| 16  | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)                              | Poin               | 81,2                 | 82,4         | 84,0         | 86,8         | 90,4         | 90,4                       |
| 17  | Presentase Penduduk Miskin                                   | Persen             | 17,39                | 17,04        | 16,53        | 15,87        | 15,08        | 15,08                      |
| 18  | Persentase PMKS yang terpenuhi<br>Kebutuhan Dasarnya         | Persen             | 10,01                | 10,11        | 11,63        | 15,11        | 22,67        | 22,67                      |
| 19  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                             | Indeks             | 65,56                | 65,85        | 66,14        | 66,47        | 66,80        | 66,80                      |
| 20  | Indeks Pendidikan                                            | Indeks             | <b>68,01</b>         | <b>70,65</b> | <b>71,41</b> | <b>72,02</b> | <b>73,75</b> | <b>73,75</b>               |
| 21  | Harapan lama sekolah                                         | Tahun              | 12,49                | 12,51        | 12,52        | 12,54        | 12,55        | 12,55                      |
| 22  | Rata-rata lama Sekolah                                       | Tahun              | 7,88                 | 7,90         | 7,92         | 7,93         | 7,95         | 7,95                       |
| 23  | Indeks Kesehatan                                             | Indeks             | <b>66,21</b>         | <b>68,15</b> | <b>69,01</b> | <b>70,52</b> | <b>71,65</b> | <b>71,65</b>               |
| 24  | Usia Harapan Hidup                                           | Tahun              | 67,33                | 67,38        | 67,44        | 67,49        | 67,54        |                            |
| 25  | Jumlah Aseptor KB                                            | Orang              | 40.000               | 49.000       | 54.000       | 56.000       | 60.000       | 60.000                     |
| 26  | Persentase partisipasi Perempuan<br>dalam Pembangunan Daerah | Persen             | 15                   | 20           | 25           | 30           | 35           | 35                         |

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                  | Satuan              | Kondisi Awal<br>2020 | Target |       |       |       | Kondisi<br>Akhir<br>(2024) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|
|     |                                                                                                          |                     |                      | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |                            |
| 27  | Angka Stunting                                                                                           | Persen              | 27,15                | 25,79  | 24,50 | 23,28 | 22,11 | 22,11                      |
| 28  | Jumlah organisasi pemuda untuk pengembangan bakat dan minat yang dibina                                  | Jumlah              | 50                   | 55     | 60    | 70    | 75    | 75                         |
| 29  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan                                                   | Persen              | 60                   | 60     | 60    | 60    | 60    | 60                         |
| 30  | Peningkatan prestasi olahraga                                                                            | Jumlah Medali Juara | 3,80                 | 4,07   | 5,08  | 6,61  | 9,91  | 9,91                       |
| 31  | Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan                                                                    | Jumlah              | 10                   | 14     | 16    | 20    | 25    | 25                         |
| 32  | Jumlah Desa yang menerapkan nilai – nilai budaya dan adat istiadat dalam interaksi sosial dan lingkungan | Jumlah Desa         | 7                    | 10     | 16    | 20    | 25    | 25                         |
| 33  | Persentase tersedianya Infrastruktur Dasar yang memadai                                                  | Persen              | 15                   | 20     | 25    | 30    | 35    | 35                         |
| 34  | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                                       | Persen              | 0,45                 | 0,45   | 0,47  | 0,48  | 0,50  | 0,50                       |
| 35  | Persentase tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memenuhi standar                         | Persen              | 42.15                | 45.71  | 50.18 | 52.45 | 55.00 | 55.00                      |
| 36  | Persentase pemanfaatan ruang dan lingkungan sehat perumahan                                              | Persen              | 65                   | 70     | 75    | 80    | 85    | 85                         |

| No. | Indikator Kinerja Utama                                      | Satuan | Kondisi Awal<br>2020 | Target |       |       |       | Kondisi<br>Akhir<br>(2024) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|
|     |                                                              |        |                      | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |                            |
| 37  | Presentase Rumah Layak Huni                                  | Persen | 67.57                | 68.92  | 70.30 | 71.71 | 71.71 | 71.71                      |
| 38  | Persentase RT berakses air bersih                            | Persen | 61.71                | 62.94  | 64.20 | 65.48 | 64.48 | 64.48                      |
| 39  | Persentase Penduduk yang memiliki sertifikat Hak Milik Tanah | Persen | 30                   | 40     | 55    | 60    | 70    | 70                         |

**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kabupaten Donggala Tahun 2021-2024**

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                       | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                      |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| <b>1.</b>    | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                                                                |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| <b>1.1.</b>  | <b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>                                                                          |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| <b>1.1.1</b> | <b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 1.1.1.1.     | Pertumbuhan PDRB                                                                                                     |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 1.1.1.1.1    | Atas Dasar Harga Konstan                                                                                             | -4,87                     | 0,6                              | 4,40  | 4,53  | 4,66  | 4,66                                          |
| 1.1.1.1.2    | Atas Dasar Harga Berlaku                                                                                             | -3,22                     | 0,6                              | 7,60  | 7,82  | 8,06  | 8,06                                          |
| 1.1.1.2      | Laju Inflasi                                                                                                         | 1,98                      | 1,96                             | 1,94  | 1,98  | 2,02  | 2,02                                          |
| 1.1.1.3      | PDRB Per Kapita                                                                                                      |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 1.1.1.3.1    | PDRB Perkapita ADH-Konstan (HK Rp Juta)                                                                              | 26,45                     | 26,71                            | 26,98 | 27,79 | 28,62 | 28,62                                         |
| 1.1.1.3.2    | PDRB Perkapita ADH-Berlaku (HB Rp Juta)                                                                              | 38,25                     | 38,63                            | 39,02 | 40,19 | 41,40 | 41,40                                         |
| 1.1.1.4      | Indeks Gini                                                                                                          | 0,33                      | 0,33                             | 0,33  | 0,33  | 0,32  | 0,32                                          |
| 1.1.1.5      | Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia                                                                               | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 1.1.1.6      | Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)                                                          | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 1.1.1.7      | Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan                                                                         | 82,61                     | 82,96                            | 83,47 | 84,13 | 84,92 | 84,92                                         |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                         | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                        |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 1.1.1.8  | Rasio Kesenjangan Kemiskinan                                                                           | 3,01                      | 3,00                             | 2,99  | 2,98  | 2,97  | 2,97                                          |
| 1.1.1.9  | Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari                     | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 1.1.1.10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                       | 65,56                     | 65,76                            | 65,89 | 66,02 | 66,15 | 66,15                                         |
| 1.1.1.11 | Angka Melek Huruf                                                                                      | 99,84                     | 99,94                            | 100   | 100   | 100   | 100,24                                        |
| 1.1.1.12 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                                                           | 7,88                      | 7,90                             | 7,92  | 7,93  | 7,95  | 7,95                                          |
| 1.1.1.13 | Harapan Lama Sekolah                                                                                   | 12,49                     | 12,51                            | 12,52 | 12,54 | 12,55 | 12,55                                         |
| 1.1.1.14 | Angka Usia Harapan Hidup                                                                               | 67,64                     | 67,70                            | 67,76 | 67,81 | 67,86 | 67,86                                         |
| 1.1.1.15 | Persentase Balita Gizi Buruk                                                                           | 4,14                      | 4,04                             | 3,93  | 3,83  | 3,73  | 3,73                                          |
| 1.1.1.16 | Prevalensi Balita Gizi Kurang                                                                          | 16,7                      | 16,03                            | 15,39 | 14,78 | 14,18 | 14,18                                         |
| 1.1.1.18 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja                                                                       | 63,93                     | 67,47                            | 67,47 | 67,47 | 67,47 | 67,47                                         |
| 1.1.1.19 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                     | 63,93                     | 67,47                            | 67,47 | 67,47 | 67,47 | 67,47                                         |
| 1.1.1.20 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                           | 2,58                      | 3,50                             | 3,50  | 3,50  | 3,50  | 3,50                                          |
| 1.1.1.21 | Rasio Penduduk Yang Bekerja                                                                            | 97,42                     | 96,50                            | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50                                         |
| 1.1.1.22 | Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja                                                                  | 37,3                      | 37,67                            | 38,80 | 40,74 | 42,78 | 42,78                                         |
| 1.1.1.23 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas                                         | 63,68                     | 62,27                            | 65,11 | 65,11 | 65,11 | 65,11                                         |
| 1.1.1.24 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | 30,63                     | 31,45                            | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45                                         |
| 1.1.1.25 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I                                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 1.1.1.26 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                            |                           | 2021                             | 2022      | 2023      | 2024      |                                               |
| 1.1.1.27 | Persentase PAD terhadap pendapatan                                         | 8,37                      | 6,06                             | 6,42      | 6,79      | 6,79      | 6,79                                          |
| 1.1.1.28 | Opini BPK                                                                  | WTP                       | WTP                              | WTP       | WTP       | WTP       | WTP                                           |
| 1.1.1.29 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                  | 81,2                      | 82,4                             | 84,0      | 86,8      | 90,4      | 90,4                                          |
| 1.1.1.30 | Penguatan cadangan pangan                                                  | 16,5                      | 17,50                            | 18,50     | 19,50     | 19,5      | 19,5                                          |
| 1.1.1.31 | Penanganan daerah rawan pangan                                             | 1                         | 1                                | 1         | 1         | 1         | 1                                             |
| 1.1.1.32 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Harga Konstan)       | 39,83                     | 28,56                            | 27,70     | 26,87     | 26,63     | 26,63                                         |
| 1.1.1.33 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Harga Konstan)       | 5,08                      | 4,91                             | 4,76      | 4,62      | 4,61      | 4,61                                          |
| 1.1.1.34 | Produksi sektor pertanian                                                  | 95.030                    | 116.429                          | 93.287    | 95.073    | 96.878    | 96.878                                        |
| 1.1.1.35 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (harga Konstan) | 20,85                     | 18,81                            | 18,25     | 17,70     | 17,68     | 17,68                                         |
| 1.1.1.36 | Produksi sektor perkebunan                                                 | 67.389,4                  | 49.194                           | 49.818    | 50.455    | 51.104    | 51.104                                        |
| 1.1.1.37 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB                          | Tidak ada                 | Tidak ada                        | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada                                     |
| 1.1.1.38 | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB                                  | na                        | na                               | na        | na        | na        | na                                            |
| 1.1.1.39 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB                               | 13,56                     | 13,70                            | 13,83     | 13,97     | 14,11     | 14,11                                         |
| 1.1.1.40 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                                 | na                        | na                               | na        | na        | na        | na                                            |
| 1.1.1.41 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB                     | 5,55                      | 5,61                             | 5,66      | 5,83      | 6,01      | 6,01                                          |
| 1.1.1.42 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB                                | 9,63                      | 9,73                             | 9,82      | 9,92      | 10,02     | 10,02                                         |
| 1.1.1.43 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB                                   | 2,34                      | 2,35                             | 2,38      | 2,45      | 2,52      | 2,52                                          |
| 1.1.1.44 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor                      | 3                         | 3,4                              | 3,5       | 3,6       | 3,7       | 3,7                                           |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah    | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                   |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
|              | Industri                                                          |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 1.1.1.45     | Pertumbuhan Industri                                              | 2,87                      | 3                                | 3,2    | 3,3    | 3,5    | 3,5                                           |
| 1.1.1.46     | Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB                             | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| <b>2</b>     | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                       |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2,1</b>   | <b>Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib</b>                        |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2,1</b>   | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b> |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2.1.1</b> | <b>Pendidikan</b>                                                 |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.1      | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                  | 29,96                     | 31,5                             | 33,0   | 34,7   | 36,4   | 36,42                                         |
| 2.1.1.2      | Angka Partisipasi Kasar :                                         |                           |                                  |        |        |        |                                               |
|              | - SD/MI                                                           | 106,91                    | 107,98                           | 109,06 | 110,15 | 111,25 | 111,25                                        |
|              | - SMP/MTS                                                         | 93,9                      | 94,84                            | 95,79  | 96,75  | 97,71  | 97,71                                         |
|              | - SMA/MA                                                          | 78,43                     | 79,21                            | 80,01  | 80,81  | 81,61  | 81,61                                         |
| 2.1.1.3      | Angka Pendidikan yang Ditamatkan                                  | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.4      | Angka Partisipasi Murni (APM) :                                   |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.4.1    | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                       | 93,38                     | 93,85                            | 94,32  | 95,26  | 96,21  | 96,21                                         |
| 2.1.1.4.2    | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                     | 77,51                     | 77,90                            | 78,29  | 79,07  | 79,86  | 79,86                                         |
| 2.1.1.4.3    | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C                  | 60,45                     | 60,75                            | 61,06  | 61,67  | 62,28  | 62,28                                         |
| 2.1.1.5      | Angka Partisipasi Sekolah (APS) :                                 |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.5.1    | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A                     | 98,8                      | 99,29                            | 99,79  | 99,89  | 99,99  | 99,99                                         |
| 2.1.1.5.2    | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B                   | 98,5                      | 98,99                            | 99,49  | 99,59  | 99,69  | 99,69                                         |



| No        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|           |                                                                               |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.1.1.5.3 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C                            | 68,85                     | 69,19                            | 69,54  | 70,24  | 70,94  | 70,94                                         |
| 2.1.1.6   | Angka Putus Sekolah:                                                          |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.6.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                                               | 0,05                      | 0,05                             | 0,05   | 0,04   | 0,04   | 0,04                                          |
| 2.1.1.6.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                                             | 0,21                      | 0,20                             | 0,19   | 0,18   | 0,17   | 0,17                                          |
| 2.1.1.7   | Angka Kelulusan:                                                              |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.7.1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                                    | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.7.2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                                  | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.7.3 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                                               | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.8   | Angka Melanjutkan (AM):                                                       |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.8.1 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                  | 88,50                     | 88,52                            | 88,55  | 88,58  | 90     | 90                                            |
| 2.1.1.8.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                             | 141,30                    | 141,34                           | 141,38 | 141,40 | 141,43 | 141,43                                        |
| 2.1.1.9   | Fasilitas Pendidikan:                                                         | 88,50                     | 88,52                            | 88,55  | 88,58  | 90     | 90                                            |
| 2.1.1.9.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                                | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.9.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik               | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.10  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar             | 1:90                      | 1 : 90                           | 1 : 89 | 1 : 88 | 1 : 88 | 1 : 88                                        |
| 2.1.1.11  | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.1.12  | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                                     | 1 : 26                    | 1 : 25                           | 1 : 25 | 1 : 24 | 1 : 23 | 1 : 23                                        |
| 2.1.1.13  | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah                                 | 1 : 30                    | 1 : 30                           | 1 : 29 | 1 : 29 | 1 : 28 | 1 : 28                                        |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah       | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                      |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.1.1.14     | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar                   | 1:17                      | 1 : 17                           | 1 : 16 | 1 : 16 | 1 : 15 | 1 : 15                                        |
| 2.1.1.15     | Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Sekola menengah       | 1:26                      | 1 : 25                           | 1 : 25 | 1 : 24 | 1 : 23 | 1 : 23                                        |
| 2.1.1.16     | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar        | 1,95                      | 1,98                             | 2      | 2,2    | 2,4    | 2,4                                           |
| 2.1.1.17     | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.1.18     | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | 97,22                     | 98,19                            | 99,17  | 99,27  | 99,37  | 99,37                                         |
| 2.1.1.19     | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                               | 83,45                     | 84,28                            | 86,81  | 89,42  | 92,10  | 92,10                                         |
| <b>2.1.2</b> | <b>Kesehatan</b>                                                     |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.2.1      | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                   | 3,13                      | 3,07                             | 3,01   | 2,95   | 2,89   | 2,89                                          |
| 2.1.2.2      | Angka kelangsungan hidup bayi                                        | 1,00                      | 1,00                             | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00                                          |
| 2.1.2.3      | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                       | 3,13                      | 3,07                             | 3,01   | 2,95   | 2,89   | 2,89                                          |
| 2.1.2.4      | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                     | 2,64                      | 2,59                             | 2,54   | 2,48   | 2,44   | 2,44                                          |
| 2.1.2.5      | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup                       | 181,31                    | 177,68                           | 174,13 | 170,65 | 167,23 | 167,23                                        |
| 2.1.2.6      | Rasio posyandu per satuan balita                                     | 12,57                     | 12,32                            | 12,20  | 12,07  | 11,95  | 11,95                                         |
| 2.1.2.7      | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk               | 0,3164                    | 0,31                             | 0,31   | 0,30   | 0,30   | 0,30                                          |
| 2.1.2.8      | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                | 0,007                     | 0,0069                           | 0,0068 | 0,0067 | 0,0067 | 0,01                                          |
| 2.1.2.9      | Rasio dokter per satuan penduduk                                     | 0,117                     | 0,119                            | 0,122  | 0,124  | 0,127  | 0,13                                          |
| 2.1.2.10     | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                               | 0,184                     | 0,188                            | 0,191  | 0,195  | 0,199  | 0,20                                          |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                          | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.1.2.11 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                             | 85,5                      | 86,36                            | 87,22 | 88,09 | 88,97 | 88,97                                         |
| 2.1.2.12 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 84,3                      | 85,14                            | 85,99 | 86,85 | 87,72 | 87,72                                         |
| 2.1.2.13 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | 69                        | 71,07                            | 73,20 | 75,40 | 77,66 | 77,66                                         |
| 2.1.2.14 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                            | 40,4                      | 50,50                            | 63,13 | 78,91 | 98,63 | 98,63                                         |
| 2.1.2.16 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                    | 90                        | 90,90                            | 91,81 | 92,73 | 93,65 | 93,65                                         |
| 2.1.2.17 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk                                                 | 0,001                     | 0,001                            | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000                                         |
| 2.1.2.18 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                 | 51,68                     | 52,20                            | 52,67 | 53,13 | 53,13 | 53,13                                         |
| 2.1.2.19 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                              | 18,57                     | 18,76                            | 18,94 | 19,13 | 19,32 | 19,32                                         |
| 2.1.2.20 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                  | 78,79                     | 78,00                            | 77,22 | 76,45 | 75,69 | 75,69                                         |
| 2.1.2.21 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                             | 3,89                      | 3,85                             | 3,81  | 3,77  | 3,74  | 3,74                                          |
| 2.1.2.22 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                   | 2,77                      | 2,91                             | 3,05  | 3,21  | 3,37  | 3,37                                          |
| 2.1.2.23 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                  | 18,35                     | 19,27                            | 20,23 | 21,24 | 22,30 | 22,30                                         |
| 2.1.2.24 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                  | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.1.2.25 | Penderita diare yang ditangani                                                          | 56,87                     | 59,71                            | 62,70 | 65,83 | 69,13 | 69,13                                         |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                    | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.1.2.26 | Angka kejadian Malaria                                                                            | 43,85                     | 0,10                             | 0,09   | 0,09   | 0,08   | 0,08                                          |
| 2.1.2.27 | Tingkat kematian akibat malaria                                                                   | 0                         |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.2.30 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                                  | 0,004                     | 0,0038                           | 0,0036 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0033                                        |
| 2.1.2.32 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 2,53                      | 2,78                             | 3,06   | 3,37   | 3,70   | 3,70                                          |
| 2.1.2.33 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                      | 4,38                      | 4,41                             | 4,43   | 4,45   | 4,45   | 4,45                                          |
| 2.1.2.34 | Cakupan kunjungan bayi                                                                            | 98                        | 98,98                            | 99,47  | 99,87  | 100    | 100                                           |
| 2.1.2.35 | Cakupan puskesmas                                                                                 | 93,27                     | 94,20                            | 97,03  | 101,88 | 106,97 | 106,97                                        |
| 2.1.2.36 | Cakupan pembantu puskesmas                                                                        | 43,2                      | 43,63                            | 44,94  | 46,29  | 47,68  | 47,68                                         |
| 2.1.2.37 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                                    | 83,5                      | 84,34                            | 85,18  | 87,73  | 90,37  | 90,37                                         |
| 2.1.2.38 | Cakupan pelayanan nifas                                                                           | 80                        | 80,80                            | 84,84  | 89,08  | 93,54  | 93,54                                         |
| 2.1.2.39 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                                 | 31,5                      | 31,82                            | 33,41  | 35,08  | 36,83  | 36,83                                         |
| 2.1.2.40 | Cakupan pelayanan anak balita                                                                     | 45,3                      | 47,57                            | 49,94  | 52,44  | 55,06  | 55,06                                         |
| 2.1.2.41 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin              | 3,07                      | 3,22                             | 3,38   | 3,55   | 3,73   | 3,73                                          |
| 2.1.2.42 | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                             | 91,7                      | 92,62                            | 94,47  | 97,30  | 100    | 100                                           |
| 2.1.2.43 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin                                               | 70,88                     | 71,02                            | 71,16  | 71,27  | 71,27  | 71,27                                         |
| 2.1.2.44 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)                | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.1.2.45 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang                                                        | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                             | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                                            |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
|                | dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam                                               |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2.1.3</b>   | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                   |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2.1.3.1</b> | <b>Pekerjaan Umum:</b>                                                                     |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.1.3.1.1      | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                         | 0,45                      | 0,45                             | 0,47   | 0,48   | 0,50   | 0,50                                          |
| 2.1.3.1.2      | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                 | 0,0036                    | 0,0036                           | 0,0037 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0040                                        |
| 2.1.3.1.3      | Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4                     | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.1.3.1.4      | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)                               | 44,73                     | 45,18                            | 46,53  | 47,93  | 49,37  | 49,37                                         |
| 2.1.3.1.5      | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | 44,65                     | 45,10                            | 45,55  | 46,00  | 46,46  | 46,46                                         |
| 2.1.3.1.6      | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar         | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.1.3.1.7      | Persentase rumah tinggal bersanitasi                                                       | 54,44                     | 54,98                            | 56,63  | 58,33  | 60,08  | 60,08                                         |
| 2.1.3.1.8      | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar                                      | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.1.3.1.9      | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat              | 14,57                     | 14,72                            | 14,86  | 15,01  | 15,16  | 15,16                                         |
| 2.1.3.1.10     | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                    | 40,39                     | 39,99                            | 39,59  | 39,19  | 38,80  | 38,80                                         |
| 2.1.3.1.11     | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor   | 2,57                      | 2,60                             | 2,62   | 2,65   | 2,67   | 2,67                                          |
| 2.1.3.1.12     | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                            | 58,51                     | 59,10                            | 59,69  | 61,48  | 63,32  | 63,32                                         |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                               | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                                                                              |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.1.3.1.13     | Rasio Jaringan Irigasi                                                                                                       | 0,37                      | 0,37                             | 0,38  | 0,40  | 0,42  | 0,42                                          |
| 2.1.3.1.14     | Persentase penduduk berakses air minum                                                                                       | 76                        | 76,76                            | 79,06 | 83,02 | 87,17 | 87,17                                         |
| 2.1.3.1.15     | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan                           | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.1.3.1.16     | Persentase areal kawasan kumuh                                                                                               | 1,57                      | 1,55                             | 1,54  | 1,52  | 1,51  | 1,51                                          |
| 2.1.3.1.17     | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan                                                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.1.3.1.18     | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk                                                                              | 40,39                     | 40,79                            | 41,20 | 41,61 | 42,03 | 42,03                                         |
| 2.1.3.1.19     | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                                                                                      | 2,57                      | 2,60                             | 2,62  | 2,65  | 2,67  | 2,67                                          |
| <b>2.1.3.2</b> | <b>Penataan Ruang:</b>                                                                                                       |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.1.3.2.1      | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB                                                                | 0,3                       | 0,30                             | 0,31  | 0,32  | 0,33  | 0,33                                          |
| 2.1.3.2.2      | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan                                                       | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.1.3.2.3      | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                                                  | 0,37                      | 0,37                             | 0,38  | 0,40  | 0,41  | 0,41                                          |
| 2.1.3.2.4      | Ruang publik yang berubah peruntukannya                                                                                      | 0,52                      | 0,52                             | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53                                          |
| 2.1.3.2.5      | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.1.3.2.6      | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                       | 76                        | 76,76                            | 77,53 | 78,30 | 79,09 | 79,09                                         |
| <b>2.1.4.</b>  | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                                                                |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.1.4.1        | Rasio rumah layak huni                                                                                                       | 69,68                     | 69,35                            | 72,70 | 76,23 | 79,93 | 79,93                                         |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                              | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                             |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.1.4.2       | Rasio permukiman layak huni                                                                 | 0,99                      | 1,0                              | 1,01  | 1,02  | 1,03  | 1,03                                          |
| 2.1.4.3       | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                                                       | 69,97                     | 70,17                            | 70,52 | 71,05 | 72,00 | 72,00                                         |
| 2.1.4.4       | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau                                            | 47,20                     | 50,50                            | 53,03 | 55,68 | 58,46 | 58,46                                         |
| 2.1.4.5       | Persentase pemukiman yang tertata                                                           | 0,3                       | 0,30                             | 0,32  | 0,33  | 0,35  | 0,35                                          |
| 2.1.4.6       | Persentase lingkungan pemukiman kumuh                                                       | 0,01                      | 0,0099                           | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,01                                          |
| 2.1.4.7       | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan                                     | 25,08                     | 24,08                            | 23,08 | 22,08 | 21,08 | 21,08                                         |
| 2.1.4.8       | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan                                                       | 7,63                      | 7,65                             | 7,66  | 7,67  | 7,68  | 7,68                                          |
| 2.1.4.9       | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU                             | 2,62                      | 2,64                             | 2,65  | 2,67  | 2,68  | 2,68                                          |
| <b>2.1.5.</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>                            |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.1.5.1       | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                            | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.1.5.2       | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                    | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.1.5.3       | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota                                          | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.1.5.4       | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 83,70                     | 82,87                            | 87,01 | 91,36 | 95,93 | 95,93                                         |
| 2.1.5.5       | Persentase Penegakan PERDA                                                                  | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| <b>2.1.6.</b> | <b>Sosial</b>                                                                               |                           |                                  |       |       |       |                                               |

| No         | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                       | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.1.6.1    | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                                       | 10,01                     | 10,11                            | 11,63 | 15,11 | 22,67 | 22,67                                         |
| 2.1.6.2    | Persentase PMKS yang tertangani                                                                                                                      | 10,01                     | 10,11                            | 11,63 | 15,11 | 22,67 | 22,67                                         |
| 2.1.6.3    | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                 | 5                         | 5,05                             | 5,81  | 7,55  | 11,32 | 11,32                                         |
| 2.1.6.4    | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 64,32                     | 64,96                            | 66,91 | 68,92 | 70,99 | 70,99                                         |
| 2.1.6.5    | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                                                                 | 8                         | 8,08                             | 8,32  | 8,57  | 8,83  | 8,83                                          |
| 2.1.6.6    | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                  | 5                         | 5,05                             | 5,20  | 5,36  | 5,52  | 5,52                                          |
| 2.1.6.7    | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                                                   | 31                        | 31,31                            | 32,88 | 37,81 | 45,37 | 45,37                                         |
| 2.1.6.8    | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap                                                | 10                        | 10,10                            | 10,20 | 10,30 | 10,41 | 10,41                                         |
| 2.1.6.9    | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                   | 1,1                       | 1,11                             | 1,17  | 1,22  | 1,29  | 1,29                                          |
| <b>2,2</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>                                                                         |                           |                                  |       |       |       |                                               |



| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah        | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                       |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| <b>2.2.1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                   |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.1.1      | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun                            | 90,95                     | 2,26                             | 1,13  | 1,13  | 1,13  | 1,13                                          |
| 2.2.1.2      | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)        | 2                         | 4                                | 2     | 2     | 2     | 2                                             |
| 2.2.1.3      | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                 | 1176,65                   | 0,44                             | 0,87  | 1,23  | 2,44  | 2,44                                          |
| 2.2.1.4      | Keselamatan dan perlindungan                                          | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.1.5      | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek          | 89,87                     | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.2.1.6      | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.1.7      | Besaran Pemeriksaan Perusahaan                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.1.8      | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan                             | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.1.9      | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi   | 35,56                     | 80                               | 93,33 | 96,97 | 97,96 | 97,96                                         |
| 2.2.1.10     | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat   | 30                        | 98,46                            | 98,46 | 94,12 | 96,97 | 96,97                                         |
| 2.2.1.11     | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan         | 75,29                     | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.1.12     | Rasio lulusan S1/S2/S3                                                | 109                       | 15,08                            | 7,69  | 9,99  | 9,99  | 9,99                                          |
| <b>2.2.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                   |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.2.1      | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                | 1,26                      | 1,26                             | 1,26  | 1,26  | 1,26  | 1,26                                          |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.2.2.2  | Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR                                                                                                                                | 1,26                      | 1,26                             | 1,26   | 1,26   | 1,26   | 1,26                                          |
| 2.2.2.3  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                       | 0,39                      | 0,39                             | 0,40   | 0,40   | 0,41   | 0,41                                          |
| 2.2.2.4  | Rasio KDRT                                                                                                                                                                    | 0,34                      | 0,34                             | 0,32   | 0,30   | 0,29   | 0,29                                          |
| 2.2.2.5  | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                                                                                                                                   | 30,12                     | 22,27                            | 15,60  | 12,80  | 12,80  | 12,80                                         |
| 2.2.2.6  | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                                                                                          | 79,96                     | 80,38                            | 80,80  | 81,22  | 81,22  | 81,22                                         |
| 2.2.2.7  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | 100                       | 101,00                           | 102,01 | 103,03 | 104,06 | 104,06                                        |
| 2.2.2.8  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 72                        | 72,72                            | 73,45  | 74,18  | 74,92  | 74,92                                         |
| 2.2.2.9  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.        | 85                        | 85,85                            | 86,71  | 87,58  | 88,45  | 88,45                                         |
| 2.2.2.10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                       | 50                        | 50,50                            | 51,01  | 51,52  | 52,03  | 52,03                                         |
| 2.2.2.11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                            | 89                        | 89,89                            | 90,79  | 91,70  | 92,61  | 92,61                                         |
| 2.2.2.12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak                                                                                                                            | 89                        | 89,89                            | 90,79  | 91,70  | 92,61  | 92,61                                         |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                | Kondisi Konekta Awal 2020                      | Target Capaian Periode 2021-2024               |                                                |                                                |                                                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                | 2021                                           | 2022                                           | 2023                                           | 2024                                           |                                                |
|              | korban kekerasan                                                              |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 2.2.2.13     | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 20                                             | 30                                             | 40                                             | 50                                             | 50                                             | 50                                             |
| 2.2.2.14     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                           | 87                                             | 86,13                                          | 85,27                                          | 84,42                                          | 83,57                                          | 83,57                                          |
| 2.2.2.15     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                          | 87                                             | 86,13                                          | 85,27                                          | 84,42                                          | 83,57                                          | 83,57                                          |
| 2.2.2.16     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                          | 50                                             | 49,50                                          | 49,01                                          | 48,51                                          | 48,03                                          | 48,03                                          |
| 2.2.2.17     | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                             | 30                                             | 29,70                                          | 29,40                                          | 29,11                                          | 28,82                                          | 28,82                                          |
| 2.2.2.18     | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | 30                                             | 29,70                                          | 29,40                                          | 29,11                                          | 28,82                                          | 28,82                                          |
| 2.2.2.19     | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian            | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>2.2.3</b> | <b>Pangan</b>                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 2.2.3.1      | Ketersediaan pangan utama                                                     | 21,08                                          | 21,61                                          | 22,15                                          | 22,70                                          | 22,70                                          | 22,70                                          |
| 2.2.3.2      | Ketersediaan energi dan protein perkapita                                     | 4.434                                          | 3.454,20                                       | 3.626,91                                       | 3.808,26                                       | 3.998,67                                       | 3.998,67                                       |
| 2.2.3.3      | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                                      | Pelaku usaha 6 orang dan Pelaku utama 30 orang | Pelaku usaha 4 orang dan Pelaku utama 30 orang | Pelaku usaha 4 orang dan Pelaku utama 30 orang | Pelaku usaha 6 orang dan Pelaku utama 30 orang | Pelaku usaha 6 orang dan Pelaku utama 30 orang | Pelaku usaha 6 orang dan Pelaku utama 30 orang |
| <b>2.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>                                                             |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                     | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                    |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.2.4.1       | Persentase luas lahan bersertifikat                                                                                                                                                                                | 8,0039                    | 2,5 Ha                           | 2,5 Ha | 1,5 Ha | 1,5 Ha | 1,5 Ha                                        |
| 2.2.4.2       | Penyelesaian kasus tanah Negara                                                                                                                                                                                    | 33,33                     | 33,67                            | 35,35  | 37,12  | 38,97  | 38,97                                         |
| 2.2.4.3       | Penyelesaian izin lokasi                                                                                                                                                                                           | 85,89                     | 86,75                            | 87,62  | 88,49  | 89,38  | 89,38                                         |
| <b>2.2.5.</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                                                                            |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.2.5.1       | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.2.5.2       | Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.2.5.3       | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                          | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.2.5.4       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air                                                                                                                                                                               | 56,00                     | 65,19                            | 65,29  | 65,39  | 65,49  | 65,49                                         |
| 2.2.5.5       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                             | 87,00                     | 92,27                            | 92,37  | 92,47  | 92,57  | 92,57                                         |
| 2.2.5.6       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                                                                     | 56,00                     | 85,05                            | 85,89  | 86,73  | 87,57  | 87,57                                         |
| 2.2.5.7       | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100                       | 100                              | 100    | 100    | 100    | 100                                           |
| 2.2.5.8       | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota                                                                                                   | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.2.5.9       | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA                                                                                                                                                                           | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                   | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.2.5.10 | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional                                                                                                             | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.11 | Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional                                                                                                                | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.12 | Penetapan Hak MHA                                                                                                                                                                | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.13 | Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan                                                                                                                  | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.14 | Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana                                                                                                                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.15 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat                                                                                                                                | 1,00                      | 1,00                             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00                                          |
| 2.2.5.16 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup                                                                                                                             | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.2.5.17 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | na                        | 1,00                             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00                                          |
| 2.2.5.18 | Timbunan Sampah yang Ditangani                                                                                                                                                   | 3,047                     | 3,047                            | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047                                         |
| 2.2.5.19 | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R                                                                                                                              | 3,59                      | 3,59                             | 3,59  | 3,59  | 3,59  | 3,59                                          |
| 2.2.5.20 | Persentase Cakupan Area Pelayanan                                                                                                                                                | 0,89                      | 0,89                             | 0,89  | 0,89  | 0,89  | 0,89                                          |
| 2.2.5.21 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani                                                                                                                                         | 6,88                      | 6,88                             | 6,88  | 6,88  | 6,88  | 6,88                                          |
| 2.2.5.22 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota                                                                                                                                  | >71                       | >71                              | >71   | >71   | >71   | >71                                           |
| 2.2.5.23 | Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang                                                                                                                              | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                            | Kondisi Konerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |         |          |          | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                           |                           | 2021                             | 2022    | 2023     | 2024     |                                               |
|               | Diterbitkan                                                                               |                           |                                  |         |          |          |                                               |
| 2.2.5.24      | Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan | na                        | na                               | na      | na       | na       | na                                            |
| <b>2.2.6.</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                     |                           |                                  |         |          |          |                                               |
| 2.2.6.1       | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk                                                | 205,864                   | 207,92                           | 210,00  | 212,10   | 214,22   | 214,22                                        |
| 2.2.6.2       | Rasio Bayi Berakte Kelahiran                                                              | 21,082                    | 21,29                            | 22,36   | 23,48    | 24,65    | 24,65                                         |
| 2.2.6.3       | Rasio Pasangan Berakte Nikah                                                              | 352,76                    | 356,29                           | 374,10  | 392,81   | 412,45   | 412,45                                        |
| 2.2.6.4       | Persentase kepemilikan KTP                                                                | 97,93                     | 98,91                            | 99,90   | 100      | 100      | 100                                           |
| 2.2.6.5       | Rasio Penduduk Memiliki KK                                                                | 92765                     | 93692,7                          | 98377,3 | 103296,1 | 108461,0 | 108460,95                                     |
| 2.2.6.6       | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten                                        | ada                       | Ada                              | Ada     | Ada      | Ada      | Ada                                           |
| 2.2.6.7       | Penerapan KTP nasional Berbasis NIK                                                       | ada                       | Ada                              | Ada     | Ada      | Ada      | Ada                                           |
| 2.2.6.8       | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                             | 205,864                   | 207,92                           | 218,32  | 229,23   | 240,70   | 240,70                                        |
| 2.2.6.9       | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran                                                         | 103198                    | 104230                           | 105272  | 106325   | 107388   | 107388                                        |
| <b>2.2.7</b>  | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                                   |                           |                                  |         |          |          |                                               |
| 2.2.7.1       | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik                          | 141                       | 142,41                           | 143,83  | 145,27   | 146,73   | 146,73                                        |
| 2.2.7.2       | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)                    | 33                        | 33,33                            | 36,66   | 40,33    | 44,36    | 44,36                                         |
| 2.2.7.3       | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                                      | 27                        | 27,27                            | 30,00   | 33,00    | 36,30    | 36,30                                         |
| 2.2.7.4       | Persentase LPM Aktif                                                                      | 158                       | 158                              | 158     | 158      | 158      | 158                                           |
| 2.2.7.6       | Persentase PKK Aktif                                                                      | 183                       | 184,83                           | 186,68  | 188,55   | 190,43   | 190,43                                        |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |       |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |                           | 2021                             | 2022   | 2023  | 2024   |                                               |
| 2.2.7.7      | Persentase Posyandu Aktif                                                                                                                           | 452                       | 456,52                           | 461,09 | 465,7 | 470,35 | 470,35                                        |
| 2.2.7.8      | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat                                                                                         | 13                        | 13,13                            | 13,26  | 13,39 | 13,53  | 13,53                                         |
| 2.2.7.9      | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                  | 13                        | 13,13                            | 13,26  | 13,39 | 13,53  | 13,53                                         |
| <b>2.2.8</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                                                                 |                           |                                  |        |       |        |                                               |
| 2.2.8.1      | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                                                                                     | 1,89                      | 1,87                             | 1,78   | 1,69  | 1,60   | 1,60                                          |
| 2.2.8.2      | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                                                          | 2,61                      | 2,58                             | 2,45   | 2,33  | 2,22   | 2,22                                          |
| 2.2.8.3      | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB                                           | 10                        | 10,10                            | 10,20  | 10,30 | 10,41  | 10,41                                         |
| 2.2.8.4      | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                      | 6                         | 6,06                             | 6,12   | 6,18  | 6,24   | 6,24                                          |
| 2.2.8.5      | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk                      | 1,50                      | 1,52                             | 1,53   | 1,55  | 1,56   | 1,56                                          |
| 2.2.8.6      | Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | 6                         | 6,06                             | 6,12   | 6,18  | 6,24   | 6,24                                          |
| 2.2.8.7      | Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan                                              | 4                         | 4,04                             | 4,08   | 4,12  | 4,16   | 4,16                                          |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                  | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |          |          |          | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                 |                           | 2021                             | 2022     | 2023     | 2024     |                                               |
|          | Kependudukan                                                                                    |                           |                                  |          |          |          |                                               |
| 2.2.8.8  | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga                                                              | 2                         | 1,98                             | 1,96     | 1,94     | 1,92     | 1,92                                          |
| 2.2.8.9  | Ratio Akseptor KB                                                                               | 65,7                      | 66,36                            | 67,02    | 67,69    | 68,37    | 68,37                                         |
| 2.2.8.10 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49                             | 41014                     | 41424,14                         | 41838,38 | 42256,77 | 42679,33 | 42679,33                                      |
| 2.2.8.11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | 32                        | 31,68                            | 31,36    | 31,05    | 30,74    | 30,74                                         |
| 2.2.8.12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                | 354                       | 357,54                           | 361,12   | 364,73   | 368,37   | 368,37                                        |
| 2.2.8.13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                      | 10520                     | 10414,80                         | 10310,65 | 10207,55 | 10105,47 | 10105,47                                      |
| 2.2.8.14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                         | 2,93                      | 2,96                             | 2,99     | 3,02     | 3,05     | 3,05                                          |
| 2.2.8.15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                        | 94                        | 94,94                            | 95,89    | 96,85    | 97,82    | 97,82                                         |
| 2.2.8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                               | 1440                      | 1454,40                          | 1468,94  | 1483,63  | 1498,47  | 1498,47                                       |
| 2.2.8.17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                               | 476                       | 480,76                           | 485,57   | 490,42   | 495,33   | 495,33                                        |
| 2.2.8.18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                               | 852                       | 860,52                           | 869,13   | 877,82   | 886,59   | 886,59                                        |
| 2.2.8.19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                   | 3                         | 3,03                             | 3,06     | 3,09     | 3,12     | 3,12                                          |
| 2.2.8.20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling                                              | 420                       | 424,20                           | 428,44   | 432,73   | 437,05   | 437,05                                        |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                  | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                           | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    |                                               |
|          | Remaja/Mahasiswa                                                                                                                                                |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.2.8.21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                    | 98                        | 98,98                            | 99,97   | 100,97  | 101,98  | 101,98                                        |
| 2.2.8.22 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                                      | 190                       | 191,90                           | 193,82  | 195,76  | 197,71  | 197,71                                        |
| 2.2.8.23 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            | 170                       | 171,70                           | 173,42  | 175,15  | 176,90  | 176,90                                        |
| 2.2.8.24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              | 7154                      | 7225,54                          | 7297,80 | 7370,77 | 7444,48 | 7444,48                                       |
| 2.2.8.25 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 18                        | 18,18                            | 18,36   | 18,55   | 18,73   | 18,73                                         |
| 2.2.8.26 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 | 84                        | 84,84                            | 85,69   | 86,55   | 87,41   | 87,41                                         |
| 2.2.8.27 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    | 0                         | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                          |
| 2.2.8.28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                                           | 59                        | 59,59                            | 60,19   | 60,79   | 61,40   | 61,40                                         |
| 2.2.8.29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan                                                                   | 2112                      | 2133,12                          | 2154,45 | 2176,00 | 2197,76 | 2197,76                                       |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                               |                           | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    |                                               |
|              | pembinaan tumbuh kembang anak                                                                                 |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.2.8.30     | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                           | 19                        | 19,19                            | 19,38   | 19,58   | 19,77   | 19,77                                         |
| 2.2.8.31     | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | 0                         | 17,01                            | 17,18   | 17,35   | 17,53   | 17,53                                         |
| 2.2.8.32     | Persentase Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I                                                             | 12,8                      | 11,84                            | 11,54   | 10      | 10      | 10                                            |
| <b>2.2.9</b> | <b>Perhubungan</b>                                                                                            |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.2.9.1      | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                           | 2689                      | 2689                             | 2743,05 | 288,20  | 3024,21 | 3024,21                                       |
| 2.2.9.1.1    | Jumlah Penumpang Angkutan Darat                                                                               | 2689                      | 2689                             | 2743,05 | 288,20  | 3024,21 | 3024,21                                       |
| 2.2.9.1.6    | Rasio ijin trayek                                                                                             | 0,00098                   | 0,00099                          | 0,00100 | 0,00101 | 0,00102 | 0,00102                                       |
| 2.2.9.1.7    | Persentase Uji KIR Kendaraan                                                                                  | 289                       | 291,89                           | 294,81  | 297,76  | 300,73  | 300,73                                        |
| 2.2.9.2      | Jumlah Pelabuhan Terminal Bus                                                                                 | 5                         | 5,05                             | 5,10    | 5,6     | 6,2     | 5,17                                          |
| 2.2.9.2.1    | Jumlah Pelabuhan Laut                                                                                         | na                        | na                               | na      | na      | na      | na                                            |
| 2.2.9.2.3    | Jumlah Terminal Bis                                                                                           | 5                         | 5                                | 5       | 5       | 5       | 5                                             |
| 2.2.9.2.4    | Persentase Layanan Angkutan Darat                                                                             | 16,6                      | 16,77                            | 16,93   | 17,10   | 17,27   | 17,27                                         |
| 2.2.9.2.5    | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum                                                                      | 5,65                      | 5,71                             | 5,76    | 5,82    | 5,88    | 5,88                                          |
| 2.2.9.2.6    | Persentase Pemasangan Rambu-Rambu                                                                             | 30                        | 30,30                            | 30,60   | 30,91   | 31,22   | 31,22                                         |
| 2.2.9.2.7    | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan                                                                      | 13,16                     | 13,29                            | 13,42   | 14,10   | 14,80   | 14,80                                         |
| 2.2.9.2.8    | Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum                                                                     | 2689                      | 2715,89                          | 2743,05 | 2880,20 | 3024,21 | 3024,21                                       |
| 2.2.9.2.9    | Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum                                                                    | na                        | na                               | 2610,19 | 2759,50 | 2812,20 | 2812,20                                       |
| 2.2.9.2.10   | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/                                                                  | 2689                      | 2715,89                          | 2743,05 | 2880,20 | 3024,21 | 3024,21                                       |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                           | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                                          |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
|                | terminal per tahun                                                                       |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| <b>2.2.10.</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                        |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.2.10.1       | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 50                        | 50,50                            | 51,01  | 51,52  | 52,03  | 52,03                                         |
| 2.2.10.2       | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                                           | 65                        | 65,65                            | 66,31  | 66,97  | 67,64  | 67,64                                         |
| 2.2.10.3       | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                                          | 75                        | 75,75                            | 78,02  | 80,36  | 82,77  | 82,77                                         |
| 2.2.10.4       | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                              | 56,2                      | 56,76                            | 58,46  | 60,22  | 62,03  | 62,03                                         |
| 2.2.10.5       | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                     | 14,23                     | 14,37                            | 14,80  | 15,25  | 15,71  | 15,71                                         |
| 2.2.10.6       | Website Milik Pemerintah Daerah                                                          | 1                         | 1,01                             | 1,02   | 1,03   | 1,04   | 1,04                                          |
| 2.2.10.7       | Jumlah Pameran/Expo setahun                                                              | 1                         | 1                                | 1      | 1      | 1      | 1                                             |
| <b>2.2.11</b>  | <b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>                                               |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.2.11.1       | Persentase koperasi aktif                                                                | 53                        | 38                               | 39     | 40     | 40     | 40                                            |
| 2.2.11.2       | Persentase UKM non BPR/LKM aktif                                                         | 80                        | 84,84                            | 85,69  | 86,55  | 87,41  | 87,41                                         |
| 2.2.11.3       | Persentase BPR/LKM aktif                                                                 | 1                         | 15,15                            | 15,30  | 15,45  | 15,61  | 15,61                                         |
| 2.2.11.4       | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil                                                             | 12.206                    | 4.090                            | 4.165  | 4.255  | 4.255  | 4.255                                         |
| <b>2.2.12</b>  | <b>Penanaman Modal</b>                                                                   |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.2.12.1       | Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA)                                             | 18                        | 18                               | 20     | 22     | 24     | 24                                            |
| 2.2.12.2       | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                      | 65.043.000.000            | 303.00                           | 306.03 | 309.09 | 312.18 | 312.18                                        |
| 2.2.12.3       | Rasio daya serap tenaga kerja                                                            | 10                        | 11,11                            | 11,44  | 11,79  | 12,14  | 12,14                                         |
| 2.2.12.4       | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)                                | 22,88                     | 30,30                            | 30,60  | 30,91  | 31,22  | 31,22                                         |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                             | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|                |                                                                                            |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| <b>2.2.13</b>  | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                                            |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.13.1       | Persentase organisasi pemuda yang aktif                                                    | 50                        | 50,50                            | 54,04 | 57,82 | 61,86 | 61,86                                         |
| 2.2.13.2       | Persentase wirausaha muda                                                                  | 3                         | 3,03                             | 3,24  | 3,47  | 3,71  | 3,71                                          |
| 2.2.13.3       | Cakupan pembinaan olahraga                                                                 | 45                        | 45,45                            | 48,63 | 52,04 | 55,68 | 55,68                                         |
| 2.2.13.4       | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                        | 15                        | 15,15                            | 16,21 | 17,35 | 18,56 | 18,56                                         |
| 2.2.13.5       | Cakupan pembinaan atlet muda                                                               | 25                        | 25,25                            | 27,02 | 28,91 | 30,93 | 30,93                                         |
| 2.2.13.6       | Jumlah atlet berprestasi                                                                   | 13,00                     | 13,13                            | 14,05 | 15,03 | 16,08 | 16,08                                         |
| 2.2.13.7       | Jumlah prestasi olahraga                                                                   | 3,80                      | 3,80                             | 3,91  | 4,11  | 4,52  | 5,20                                          |
| <b>2.2.14</b>  | <b>Statistik</b>                                                                           |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.14.1       | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                    | Ada                       | Ada                              | Ada   | Ada   | Ada   | Ada                                           |
| 2.2.14.2       | Buku "kabupaten dalam angka"                                                               | Ada                       | Ada                              | Ada   | Ada   | Ada   | Ada                                           |
| 2.2.14.3       | Buku "PDRB"                                                                                | Ada                       | Ada                              | Ada   | Ada   | Ada   | Ada                                           |
| <b>2.2.15.</b> | <b>Persandian</b>                                                                          |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.15.1       | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 0%                        | 0%                               | 0%    | 5%    | 10%   | 10%                                           |
| <b>2.2.16</b>  | <b>Kebudayaan</b>                                                                          |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.2.16.1       | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                   | 0                         | 0                                | 1     | 2     | 1     | 4                                             |
| 2.2.16.2       | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    | 0                         | 0                                | 1     | 3     | 2     | 6                                             |
| 2.2.16.3       | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | 0                         | 0                                | 0     | 2     | 2     | 4                                             |
| 2.2.16.4       | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                           | 0                         | 0                                | 0     | 2     | 2     | 4                                             |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah         | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |             |             |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                        |                           | 2021                             | 2022        | 2023        | 2024        |                                               |
| 2.2.16.5      | Presentase Kesenian Daerah yang Dilestarikan                           | 0                         | 0                                | 0           | 1           | 1           | 2                                             |
| <b>2.2.17</b> | <b>Perpustakaan</b>                                                    |                           |                                  |             |             |             |                                               |
| 2.2.17.1      | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                               | 400                       | 404,00                           | 408,04      | 412,12      | 416,24      | 416,24                                        |
| 2.2.17.2      | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                      | 23238                     | 23470,38                         | 23705,08    | 23942,13    | 24181,56    | 24181,56                                      |
| 2.2.17.3      | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                  | 0,13                      | 0,13                             | 0,13        | 0,13        | 0,14        | 0,14                                          |
| 2.2.17.4      | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun                         | 33,33                     | 33,66                            | 34,00       | 34,34       | 34,68       | 34,68                                         |
| 2.2.17.5      | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                 | 7813                      | 7891,13                          | 7970,04     | 8049,74     | 8130,24     | 8130,24                                       |
| 2.2.17.6      | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 10                        | 10,10                            | 10,20       | 10,30       | 10,41       | 10,41                                         |
| 2.2.17.7      | Jumlah Perpustakaan                                                    | 616                       | 622,16                           | 628,38      | 634,67      | 641,01      | 641,01                                        |
| <b>2.2.18</b> | <b>Kearsipan</b>                                                       |                           |                                  |             |             |             |                                               |
| 2.2.18.1      | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku           | 10,32                     | 10,42                            | 10,53       | 10,63       | 10,74       | 10,74                                         |
| 2.2.18.2      | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                    | 10,80                     | 10,91                            | 11,02       | 11,13       | 11,24       | 11,24                                         |
| <b>2,3</b>    | <b>Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan</b>                             |                           |                                  |             |             |             |                                               |
| <b>2.3.1</b>  | <b>Pariwisata</b>                                                      |                           |                                  |             |             |             |                                               |
| 2.3.1.1       | Kunjungan wisata                                                       | 19.100                    | 13.080                           | 19.483      | 19.678      | 19.875      | 19.875                                        |
| 2.3.1.2       | Lama kunjungan Wisata                                                  | 1-3 hari                  | 1-3 hari                         | 1-3 hari    | 1-3 hari    | 1-3 hari    | 1-3 hari                                      |
| 2.3.1.3       | Rata-rata Kunjungan per-objek wisata (orang)                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500                                         |
| 2.3.1.4       | PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)                                       | 60.648.900                | 121.215.000                      | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000                                   |
| 2.3.1.5       | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB                             |                           |                                  |             |             |             |                                               |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                |                           | 2021                             | 2022      | 2023      | 2024      |                                               |
| 2.3.1.5.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | na                        | 0,22                             | 0,23      | 0,23      | 0,23      | 0,23                                          |
| 2.3.1.5.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | na                        | 0,22                             | 0,23      | 0,23      | 0,23      | 0,23                                          |
| 2.3.1.6      | Jumlah Objek Wisata (Objek)                                    |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.1.6.1    | Wisata Alam                                                    | 77                        | 77                               | 77        | 77        | 77        | 77                                            |
| 2.3.1.6.2    | Wisata Budaya                                                  | 3                         | 3                                | 3         | 3         | 3         | 3                                             |
| 2.3.1.6.3    | Wisata Buatan                                                  | 0                         | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0                                             |
| <b>2.3.2</b> | <b>Pertanian</b>                                               |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.2.1      | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB           |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.2.1.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 26,99                     | 24,02                            | 23,30     | 22,60     | 22,43     | 22,43                                         |
| 2.3.2.1.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 31,64                     | 28,56                            | 27,70     | 26,87     | 26,63     | 26,63                                         |
| 2.3.2.2      | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB           |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.2.2.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 4,21                      | 4,06                             | 3,94      | 3,82      | 3,79      | 3,79                                          |
| 2.3.2.2.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 5,08                      | 4,91                             | 4,76      | 4,62      | 4,61      | 4,61                                          |
| 2.3.2.3      | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB     |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.2.3.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 17,71                     | 15,77                            | 15,30     | 14,84     | 14,77     | 14,77                                         |
| 2.3.2.3.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 20,85                     | 18,81                            | 18,25     | 17,70     | 17,68     | 17,68                                         |
| 2.3.2.4      | Kontribusi Sub Sektor Sektor Peternakan terhadap PDRB          |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.2.4.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 1,82                      | 1,80                             | 1,78      | 1,80      | 1,82      | 1,82                                          |
| 2.3.2.4.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 2,17                      | 2,15                             | 2,13      | 2,15      | 2,17      | 2,17                                          |
| 2.3.2.5      | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB              | Tidak ada                 | Tidak ada                        | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada                                     |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                               | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.3.2.6      | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar                                          |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.3.2.6.1    | Padi                                                                                                         | 4,67                      | 4,87                             | 4,91  | 4,95  | 4,95  | 4,95                                          |
| 2.3.2.6.2    | Jagung                                                                                                       | 5,88                      | 5,24                             | 5,60  | 5,99  | 6,04  | 6,04                                          |
| 2.3.2.6.3    | Kedelai                                                                                                      | 1,25                      | 1,76                             | 1,77  | 1,78  | 1,78  | 1,78                                          |
| 2.3.2.6.4    | Kacang Tanah                                                                                                 | 0,99                      | 1,23                             | 1,26  | 1,30  | 1,30  | 1,30                                          |
| 2.3.2.6.5    | Kacang Hijau                                                                                                 | 0,58                      | 0,87                             | 0,87  | 0,88  | 0,88  | 0,88                                          |
| 2.3.2.6.6    | Ubi Kayu                                                                                                     | 18,56                     | 17,03                            | 17,19 | 17,36 | 17,52 | 17,52                                         |
| 2.3.2.6.7    | Ubi Jalar                                                                                                    | 13,99                     | 10,71                            | 10,81 | 10,92 | 10,93 | 10,93                                         |
| 2.3.2.7      | Cakupan bina kelompok petani                                                                                 | 59                        | 30                               | 30    | 30    | 30    | 30                                            |
| <b>2.3.3</b> | <b>Kehutanan</b>                                                                                             |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.3.3.1      | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis                                                                          | 75,86                     | 76,62                            | 77,38 | 78,16 | 78,94 | 78,94                                         |
| 2.3.3.2      | Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                      | 18,28                     | 18,10                            | 17,92 | 17,02 | 16,17 | 16,17                                         |
| 2.3.3.3      | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | 0,29                      | 0,29                             | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30                                          |
| 2.3.3.4      | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB                                                                    |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.3.3.4.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                                                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.3.3.4.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                                                                        | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.3.3.5      | Persentase Luas Hutan Menurut Fungsinya                                                                      | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.3.3.5.1    | Hutan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa                                                                       | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.3.3.5.2     | Hutan Lindung                                                  | 29,68                     | 29,98                            | 30,28  | 30,58  | 30,89  | 30,89                                         |
| 2.3.3.5.3     | Hutan Produksi Tetap                                           | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.3.3.5.4     | Hutan Produksi Biasa                                           | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.3.3.5.5     | Hutan Produksi yang Dapat dikonversi                           | 4,94                      | 4,99                             | 5,04   | 5,09   | 5,14   | 5,14                                          |
| 2.3.3.5.6     | Areal Penggunaan Lain (APL)                                    | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| <b>2.3.4</b>  | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>                          |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.4.1       | Persentase rumah tangga pengguna listrik                       | 92,05                     | 92,97                            | 93,90  | 94,84  | 95,79  | 95,79                                         |
| 2.3.4.2       | Rasio ketersediaan daya listrik                                | 92,05                     | 92,97                            | 93,90  | 94,84  | 95,79  | 95,79                                         |
| 2.3.4.3       | Persentase pertambangan tanpa ijin                             | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.3.4.4       | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB                   |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.4.4.1     | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 16,12                     | 16,28                            | 16,44  | 16,61  | 16,77  | 16,77                                         |
| 2.3.4.4.2     | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 13,56                     | 13,70                            | 13,83  | 13,97  | 14,11  | 14,11                                         |
| <b>2.3.5.</b> | <b>Perdagangan</b>                                             |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.5.1       | Ekspor Bersih Perdagangan                                      | 750000                    | 675000                           | 742500 | 779625 | 834199 | 834199                                        |
| 2.3.5.2       | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                  | 8                         | 8,08                             | 8,16   | 8,24   | 8,32   | 8,32                                          |
| 2.3.5.3       | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB                    |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.5.3.1     | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 9,02                      | 9,11                             | 9,20   | 9,29   | 9,39   | 9,39                                          |
| 2.3.5.3.2     | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 9,63                      | 9,73                             | 9,82   | 9,92   | 10,02  | 10,02                                         |
| 2.3.5.4       | Jumlah Perusahaan Perdagangan                                  |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.5.4.1     | Perusahaan Besar                                               | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.3.5.4.2     | Perusahaan Sedang                                              | 19                        | 22                               | 25     | 27     | 30     | 33                                            |



| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                |                           | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   |                                               |
| 2.3.5.4.3    | Perusahaan Kecil                                               | 222                       | 240                              | 260    | 280    | 300    | 300                                           |
| 2.3.5.5      | Jumlah Sarana Perdagangan                                      |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.5.5.1    | Pasar Desa                                                     | 52                        | 53                               | 54     | 55     | 56     | 56                                            |
| 2.3.5.5.2    | Toko                                                           | 145                       | 150                              | 155    | 160    | 170    | 170                                           |
| 2.3.5.5.3    | Kios                                                           | 1.200                     | 1.300                            | 1.400  | 1.600  | 1.700  | 1.700                                         |
| 2.3.5.5.4    | Warung                                                         | 650                       | 700                              | 800    | 950    | 1.100  | 1.100                                         |
| 2.3.5.6      | Realisasi Perdagangan Antar Pulau (Ton)                        | 34.327                    | 36.000                           | 37.800 | 39.690 | 41.674 | 41.674                                        |
| 2.3.5.6.1    | Cengkeh                                                        | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| 2.3.5.6.2    | Kopra                                                          | na                        | na                               | na     | na     | na     | na                                            |
| <b>2.3.6</b> | <b>Perindustrian</b>                                           |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.6.1      | Cakupan bina kelompok pengrajin                                | 14                        | 17                               | 23     | 26     | 29     | 29                                            |
| 2.3.6.2      | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.6.2.1    | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                          | 2,34                      | 2,31                             | 2,32   | 2,33   | 2,34   | 2,34                                          |
| 2.3.6.2.2    | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                          | 3                         | 3,4                              | 3,5    | 3,6    | 3,7    | 3,7                                           |
| 2.3.6.3      | Persentase Pertumbuhan Industri                                | 2,87                      | 3                                | 3,2    | 3,3    | 3,5    | 3,5                                           |
| 2.3.6.4      | Perkembangan Industri                                          |                           |                                  |        |        |        |                                               |
| 2.3.6.4.1    | Jumlah Perusahaan Industri                                     | 195                       | 200                              | 210    | 220    | 240    | 240                                           |
| 2.3.6.4.2    | Jumlah Tenaga Kerja                                            | 901                       | 1.000                            | 1.050  | 1.100  | 1.200  | 1.200                                         |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                    | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                   |                           | 2021                             | 2022      | 2023      | 2024      |                                               |
| <b>2.3.7</b> | <b>Transmigrasi</b>                                                                               |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.7.1      | Persentase transmigran swakarsa                                                                   | Tidak ada                 | Tidak ada                        | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada                                     |
| <b>2.3.8</b> | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                                                     |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.3.8.1      | Produksi perikanan (Ton)                                                                          | 48.411                    | 35.062                           | 36.419    | 37.838    | 39.282    | 39.282                                        |
| 2.3.8.2      | Produksi Perikanan Tangkap                                                                        | 21.910                    | 21.910                           | 23.006    | 24.156    | 25.364    | 25.364                                        |
| 2.3.8.3      | Produksi Perikanan Olahan                                                                         | 6.760                     | 5.172                            | 5.274     | 5.380     | 5.475     | 5.475                                         |
| 2.3.8.4      | Produksi Perikanan Budidaya                                                                       | 19.741                    | 7.980                            | 8.139     | 8.302     | 8.443     | 8.443                                         |
| 2.3.8.5      | Konsumsi ikan                                                                                     | 44,77                     | 44,52                            | 46,75     | 48,90     | 48.90     | 48.90                                         |
| 2.3.8.6      | Cakupan bina kelompok nelayan                                                                     | 65                        | 6                                | 12        | 16        | 20        | 20                                            |
| 2.3.8.7      | Produksi perikanan kelompok nelayan                                                               | 23.650                    | 22.680                           | 23.150    | 24.250    | 25.463    | 25.463                                        |
| 2.3.8.10     | Nilai tukar nelayan                                                                               | na                        | 104                              | 105       | 106       | 107       | 107                                           |
| 2.3.8.11     | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB                                                         | 6,15                      | 6,20                             | 6,38      | 6,51      | 6,84      | 6,84                                          |
| 2.3.8.11.1   | Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)                                                             | 5,99                      | 6,05                             | 6,23      | 6,42      | 6,61      | 6,61                                          |
| 2.3.8.11.2   | Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)                                                             | 5,5                       | 5,56                             | 5,72      | 5,89      | 6,07      | 6,07                                          |
| <b>2,4</b>   | <b>Penunjang Urusan</b>                                                                           |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| <b>2.4.1</b> | <b>Perencanaan Pembangunan</b>                                                                    |                           |                                  |           |           |           |                                               |
| 2.4.1.1      | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | 4 Dok                     | 4 Dok                            | 4 Dok     | 4 Dok     | 4 Dok     | 4 Dok                                         |
| 2.4.1.2      | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                                       | Ada                       | Ada                              | Ada       | Ada       | Ada       | Ada                                           |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah     | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                    |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.4.1.3      | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA               | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.4.1.4      | Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD, RENSTRA dan RKPD | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| 2.4.1.5      | Keterkaitan antara Dokumen RENJA dan RKPD                          | 2 Dok                     | 2 Dok                            | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok                                         |
| 2.4.1.6      | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                         | 100                       | 100                              | 100   | 100   | 100   | 100                                           |
| <b>2.4.2</b> | <b>Keuangan</b>                                                    |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.4.2.1      | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                | WTP                       | WTP                              | WTP   | WTP   | WTP   | WTP                                           |
| 2.4.2.2      | Persentase SILPA                                                   | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.4.2.3      | Persentase SILPA terhadap APBD                                     | 0,93                      | 0,95                             | 0,97  | 0,98  | 0,96  | 0,96                                          |
| 2.4.2.4      | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana                  | na                        | na                               | na    | na    | na    | na                                            |
| 2.4.2.5      | Persentase belanja pendidikan (20%)                                | 28                        | 29,5                             | 30    | 32    | 30    | 30                                            |
| 2.4.2.6      | Persentase belanja kesehatan (10%)                                 | 7,50                      | 8,20                             | 8,75  | 8,80  | 8,58  | 8,58                                          |
| 2.4.2.7      | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 60%                       | 60%                              | 60%   | 60%   | 60%   | 60%                                           |
| 2.4.2.7.1    | Belanja Operasi (Belanja Pegawai)                                  | 89,7                      | 80,4                             | 70,13 | 84,1  | 100   | 100                                           |
|              | Belanja Operasi (Belanja barang dan jasa)                          | 89,2                      | 86,1                             | 69,6  | 83,5  | 100   | 100                                           |
| 2.4.2.7.2    | Belanja Modal                                                      | 98,3                      | 95,3                             | 78    | 93,6  | 96,7  | 96,7                                          |
| 2.4.2.7.3    | Belanja tidak terduga                                              | 76,24                     | 101,06                           | 53,94 | 64,7  | 66,8  | 66,8                                          |
| 2.4.2.8      | Bagi hasil kabupaten dan desa                                      | 99,02                     | 0                                | 39,8  | 47,7  | 57,3  | 57,3                                          |
| 2.4.2.9      | Penetapan APBD                                                     | Tepat Waktu               | Tepat                            | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat Waktu                                   |

| No            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                  | Kondisi Konejra Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                 |                           | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    |                                               |
|               |                                                                                 |                           | Waktu                            | Waktu   | Waktu   | Waktu   |                                               |
| <b>2.4.3</b>  | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                               |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.4.3.1       | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                     | 1 Tahun                   | 1 Tahun                          | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun                                       |
| 2.4.3.2       | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | 100%                      | 100%                             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                          |
| 2.4.3.3       | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 62,85%                    | 67%                              | 71%     | 75%     | 80%     | 80%                                           |
| 2.4.3.4       | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                         | 39                        | 41                               | 41      | 41      | 41      | 41                                            |
| 2.4.3.5       | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                            | 196                       | 196                              | 196     | 196     | 196     | 196                                           |
| 2.4.3.6       | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | 2766                      | 2816                             | 2866    | 2916    | 2966    | 2966                                          |
| <b>2.4.4.</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                                              |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.4.4.1       | Persentase implementasi rencana kelitbangan.                                    | 60                        | 60,60                            | 61,21   | 61,82   | 62,44   | 62,44                                         |
| 2.4.4.2       | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.                                       | 10                        | 10,10                            | 10,20   | 10,30   | 10,41   | 10,41                                         |
| 2.4.4.3       | Penerapan SIDA:                                                                 | 4                         | 4,04                             | 4,08    | 4,12    | 4,16    | 4,16                                          |
| 2.4.4.4       | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.   | 10                        | 10,10                            | 10,20   | 10,30   | 10,41   | 10,41                                         |
| 2.4.4.5       | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.                         | 20                        | 20,20                            | 20,40   | 20,61   | 20,81   | 20,81                                         |
| <b>2.4.5.</b> | <b>Pengawasan</b>                                                               |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 2.4.5.1       | Persentase tindak lanjut temuan                                                 | 25                        | 24,76                            | 24,05   | 13,36   | 22,69   | 22,69                                         |

| No                             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                              | Kondisi Konekta Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                             |                           | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024  |                                               |
| 2.4.5.2                        | LHP BPK                                                                                                                                                                                                                     | 3,6                       | 3,56                             | 3,46  | 3,35  | 3,25  | 3,25                                          |
| 2.4.5.3                        | LHP APIP                                                                                                                                                                                                                    | 24                        | 23,76                            | 23,05 | 22,36 | 21,69 | 21,69                                         |
| 2.4.5.4                        | Jumlah temuan BPK                                                                                                                                                                                                           | 3,8                       | 3,67                             | 3,66  | 3,55  | 3,52  | 3,52                                          |
| <b>2.4.6</b>                   | <b>Sekretariat Dewan</b>                                                                                                                                                                                                    |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 2.4.6.1                        | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota                                                                                                                                  | 80%                       | 100%                             | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                          |
| 2.4.6.2                        | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | 80%                       | 100%                             | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                          |
| 2.4.6.3                        | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                                                        | 80%                       | 100%                             | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                          |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| <b>3,1</b>                     | <b>Kemampuan Ekonomi</b>                                                                                                                                                                                                    |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| <b>3.1.1</b>                   | <b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>                                                                                                        |                           |                                  |       |       |       |                                               |
| 3.1.1.1                        | Produktivitas Total Daerah                                                                                                                                                                                                  | 58,35                     | 61                               | 62    | 63    | 64    | 64                                            |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja Awal 2020 | Target Capaian Periode 2021-2024 |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                |                           | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    |                                               |
| <b>3.1.2</b> | <b>Pertanian</b>                                               |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 3.1.2.1      | Nilai Tukar Petani                                             | na                        | na                               | na      | na      | na      | na                                            |
| <b>3,2</b>   | <b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>                         |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| <b>3.2.1</b> | <b>Perhubungan</b>                                             |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 3.2.1.1      | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan                       | 13,16                     | 13,29                            | 13,42   | 13,56   | 13,69   | 13,69                                         |
| 3.2.1.2      | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum               | 2689                      | 2715,89                          | 2743,05 | 2770,48 | 2798,18 | 2798,18                                       |
| <b>3.2.2</b> | <b>Penataan Ruang</b>                                          |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 3.2.2.1      | Ketaatan Terhadap RTRW                                         | 76                        | 76,76                            | 77,53   | 78,30   | 79,09   | 79,09                                         |
| 3.2.2.2      | Luas Wilayah Produktif                                         | na                        | na                               | na      | na      | na      | na                                            |
| <b>3.2.3</b> | <b>Iklim Berinvestasi</b>                                      |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| <b>3.2.4</b> | <b>Sumber Daya Manusia</b>                                     |                           |                                  |         |         |         |                                               |
| 3.2.4.1      | Rasio Ketergantungan                                           | 53,58                     | 51,12                            | 48,66   | 46,2    | 43,74   | 43,74                                         |
| 3.2.4.2      | Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)                 | 109                       | 15,08                            | 7,69    | 9,99    | 9,99    | 9,99                                          |

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tanggal 27 Juni 2018 yang dilantik pada 16 Januari 2019 di Palu. Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Donggala kurun waktu 2019 sampai dengan 2024, dengan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

#### **9.1. PEDOMAN TRANSISI**

Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2019-2024 dimulai pada saat pelantikannya pada Tanggal 16 Januari 2019 dan akan berakhir pada Tanggal 16 Januari 2024. Oleh karena itu, maka P-RPJMD ini berlaku sampai dengan akhir Tahun 2024. Karena RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2024 secara reguler disusun pada bulan Maret 2024, maka RKPD tersebut belum mempunyai RPJMD acuan. Dalam rangka mengisi kekosongan perencanaan dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 dan RPJMN 2020-2024 demi keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Donggala dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pembangunan Nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD dalam masa transisi tersebut menjadi bagian dari P-RPJMD Periode 2019-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **9.2. PEDOMAN PELAKSANAAN**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diimplementasikan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Perencanaan Penganggaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Di samping itu, P-RPJMD merupakan Pedoman bagi setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra (Rencana Strategis) OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. P-RPJMD adalah barometer untuk mengukur sejauhmana capaian dari pelaksanaannya sehingga merupakan ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Karena pada P-RPJMD belum semua tujuan dan sasaran disajikan secara terukur, maka Renstra OPD harus disajikan dengan sasaran yang lebih terukur sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi baik terhadap Renstra yang bersangkutan juga terhadap P-RPJMD;
2. Sebagai barometer, P-RPJMD harus dievaluasi baik dalam kurun waktu setiap tahun, pertengahan periode pelaksanaannya, dan akhir periode pelaksanaannya, sehingga jika dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan dapat segera disesuaikan agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dan dapat menjadi acuan penyusunan RPJMD periode berikutnya;
3. P-RPJMD harus menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, maka sosialisasi P-RPJMD harus segera dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu agar jelas bagi seluruh pemangku kepentingan tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini;



4. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (renja) OPD, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Prioritas, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan yang tertuang dalam P-RPJMD. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta menjamin konsistensi dan keberlanjutan program, maka kegiatan serta pembiayaannya ditetapkan oleh masing-masing pimpinan OPD. Untuk maksud ini, sepantasnya penyusunan dokumen perencanaan berbasis sistem yakni Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), sesuai Pemendagri Nomor 98 Tahun 2018 ;
5. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir P-RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan;

Demikian Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Donggala Periode 2019-2024 ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA